

Menuai **Hasil Terbaik**
Melalui **Layanan Berkualitas**
ke **Pelosok Negeri**


Bank dengan Pertumbuhan Bisnis Mikro,
Kecil dan Menengah Terbaik di Indonesia





Menuai Hasil Terbaik Melalui Layanan Berkualitas ke Pelosok Negeri

Bank dengan
Pertumbuhan Bisnis Mikro,
Kecil dan Menengah
Terbaik di Indonesia



Konsistensi Bank BRI dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia khususnya dengan memberikan layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya yang berkualitas, dan berfokus pada segmen bisnis mikro, kecil dan menengah termasuk segmen bisnis lainnya dengan disertai penyediaan jaringan kerja yang memadai di seluruh negeri, membuahkan hasil yang membanggakan.

Bank BRI mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis kredit UMKM terbaik, sehingga total aset tumbuh menjadi Rp626,2 triliun, total kredit tumbuh menjadi Rp448,34 triliun dengan kualitas kredit yang senantiasa terjaga pada kisaran 1,63%, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian laba bersih yang meningkat 14,27% yakni sebesar Rp21,35 triliun.

Bank BRI bertekad mengoptimalkan sinergi di seluruh lini bisnis yang dijalani untuk meraih pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

Konsisten Mengembangkan Bisnis dengan Dukungan Sumber Daya Manusia yang Profesional

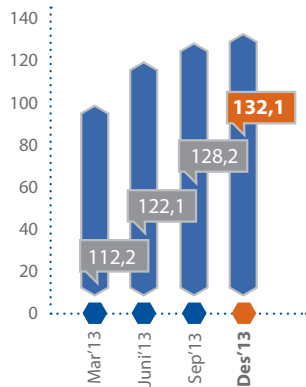
Untuk mendukung pengembangan bisnis di segmen Mikro, Kecil dan Menengah, BRI melakukan perekrutan sumber daya manusia secara substansial, sehingga kapasitas penyaluran kredit BRI meningkat.

Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pelaksanaan program edukasi layanan perbankan yang baik yang disertai pengembangan usaha di segmen UMKM, menjadikan jumlah nasabah mikro terus meningkat, *outstanding* pinjaman naik,

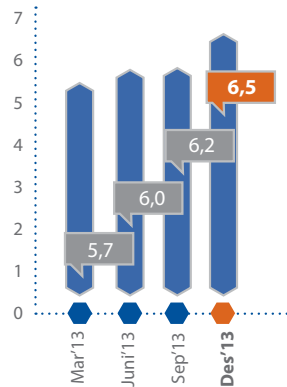
migrasi debitur KUR mikro ke kredit mikro komersial meningkat, yang diikuti dengan kualitas kredit mikro yang senantiasa terjaga.



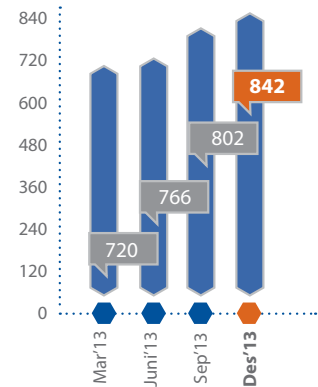
Pertumbuhan Kredit Mikro*
(Dalam Rp triliun)



Pertumbuhan Debitur Mikro*
(Dalam Juta)



Migrasi Debitur KUR Mikro ke Kupedes Komersial*
(Dalam Ribu)



Kredit mikro naik:
23,72%
dibandingkan
18,41%
tahun 2012*

Total kredit mikro:
Rp132,1 triliun*

NPL Kredit Mikro terjaga di angka
1,04%*

Kredit Ritel Komersial dan Menengah Naik
24,33% dan
22,90%*

* Angka Bank Saja

Menyeimbangkan Pertumbuhan Segmen Bisnis Lainnya

Sepanjang tahun 2013, BRI berhasil melakukan ekspansi kredit untuk segmen lainnya serta peningkatan bisnis jasa keuangan lainnya secara berimbang, seiring dengan ekspansi kredit di segmen UMKM.

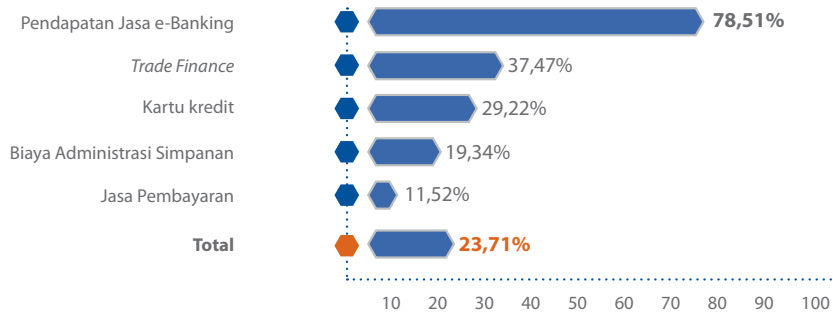
Ekspansi kredit untuk segmen konsumen, serta kredit korporasi baik BUMN maupun Non BUMN, maupun pengembangan layanan jasa perbankan lainnya yang meliputi jasa *e-banking*, jasa *trade finance*, jasa remitansi,

jasa pasar modal dan sebagainya terus mengalami pertumbuhan seiring perkembangan industri perbankan di Indonesia.



**Pertumbuhan Fee Based
Income tahun 2012-2013***

(Dalam %)



Pendapatan jasa
e-Banking Naik
78,51%*

Pendapatan
trade finance
naik
37,47%*

Kredit
BUMN Naik
23,66%*

Kredit
Konsumer Naik
20,29%*

Kredit
Korporasi Non
BUMN Naik
25,68%*

* Angka Bank Saja

Memperluas Jaringan Kerja ke Seluruh Pelosok Negeri

Di Tahun 2013, BRI menambah 756 unit kerja yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, BRI Unit, dan Teras BRI, serta menambah 45.329 jaringan *e-channel*.

BRI kini tumbuh menjadi bank komersial terbesar dan tersebar di Indonesia, dengan dukungan jaringan kerja operasional mencapai 9.808 unit kerja

serta 104.570 jaringan *e-channel* yang tersebar, terintegrasi dan mampu menjangkau seluruh pelosok negeri secara *real time-online*. Dukungan aplikasi teknologi informasi perbankan terkini menjadikan interaksi langsung dengan nasabah dapat dikelola dengan baik. Hal ini juga disertai dengan peningkatan akurasi sehingga meningkatkan

kepercayaan dan kepuasan nasabah BRI yang saat ini telah mencapai sekitar 48 juta rekening.

Seluruh fasilitas tersebut menjadikan BRI mampu melayani kebutuhan akan produk dan layanan perbankan dan bagi seluruh lapisan masyarakat di manapun mereka berada.



BRI memiliki dan didukung oleh:

9.808

Unit Kerja*

± 48 Juta

Rekening
Nasabah*

18.292

Jaringan ATM,
terbesar di
Indonesia.*

104.570

Jaringan
e-Channel.*

* Angka Bank Saja

Ekspansi Kredit yang Didukung dengan Kemampuan Menghimpun Dana yang Berkualitas dan Struktur Modal yang Kuat

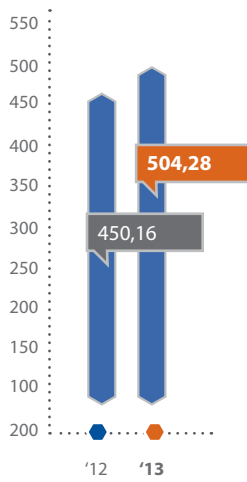
Dengan basis nasabah yang besar, jumlah rekening mencapai 48 juta, BRI mampu menghimpun dana pihak ketiga untuk mendukung ekspansi kreditnya, sehingga *Loan to Deposit Ratio* terjaga di 88,54%, dengan komposisi dana murah yang tetap berada dikisaran 60% sehingga biaya bunga tetap terjaga.

Selain dana pihak ketiga yang dihimpun dari nasabah, tingginya kepercayaan investor sebagai hasil implementasi tata kelola yang baik, menjadikan BRI berhasil mendapatkan sumber dana jangka panjang melalui penerbitan *Global Bond* senilai US\$500 juta, berjangka waktu 5 tahun dengan kupon 2,95%.

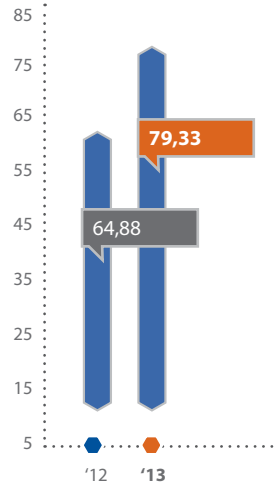
BRI juga memiliki struktur permodalan yang kuat. Tercatat pada akhir tahun 2013, tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) sebesar 16,99% dengan komposisi modal Tier I mencapai 95% atau Tier I CAR sebesar 16,13%.



Total Dana Pihak Ketiga
(Dalam Rp Triliun)



Total Ekuitas
(Dalam Rp Triliun)



Ekuitas tahun 2013
Rp79.33 triliun*

Dana Pihak Ketiga Naik
12,02%

Total CAR
16,99%*

Tier I CAR
16,13%*

* Angka Bank Saja

Menjaga Pertumbuhan Aset yang Berkualitas Melalui Peningkatan Kualitas Implementasi GCG

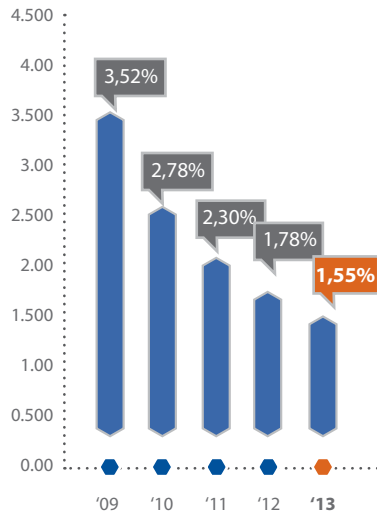
BRI berhasil meletakkan landasan yang kuat untuk terus tumbuh secara berkesinambungan melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, infrastruktur Teknologi Informasi yang handal serta peningkatan kompetensi dan integritas SDM.

BRI secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG dalam proses penyaluran kredit, yakni transparan, terencana, bertanggung jawab, akuntabel dan fokus pada keunggulan kompetitif.

Sebagai hasilnya, BRI mampu meningkatkan total aset melalui peningkatan kredit dengan kualitas yang semakin membaik, yang ditunjukkan oleh penurunan persentase NPL secara total.

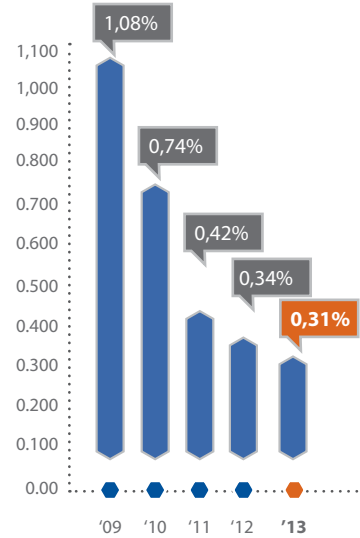


**Pergerakan
NPL Gross***



**Pergerakan
NPL Net***

(Dalam %)



Bank BRI berkomitmen untuk menjadi bank terbaik di Indonesia dengan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik

8 Sentra Pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia

Nilai Komposit Self Assesment GCG kategori **SANGAT BAIK**

17 Kantor Inspeksi

* Angka Bank Saja

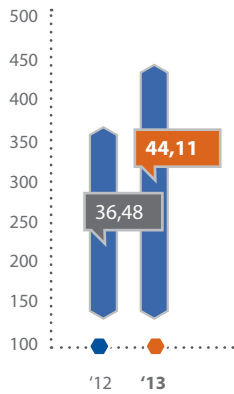
Mencatatkan Kinerja Membanggakan di tengah Kondisi Ekonomi yang Menantang

Seluruh upaya pengembangan usaha yang terfokus, terarah dan terintegrasi yang disertai konsistensi dalam meningkatkan kualitas penerapan praktek tata kelola yang baik menjadikan BRI mampu mencatat kinerja yang membanggakan, melampaui rata-rata kinerja bank lainnya, meskipun ditengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan di sepanjang tahun 2013.



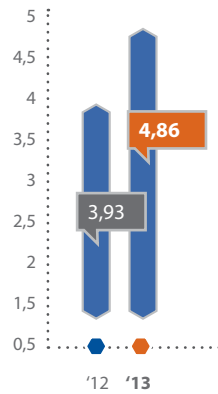
Pendapatan Bunga Bersih

(Dalam Rp Triliun)



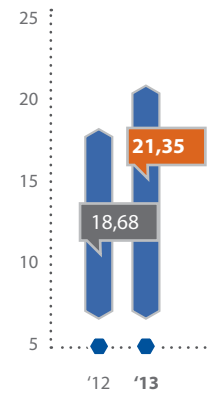
Fee Based Income

(Dalam Rp Triliun)



Laba Bersih

(Dalam Rp Triliun)



Laba Bersih
Naik
14,27%

Pendapatan
Bunga Bersih
Naik
20,89%

Pendapatan
Fee Based
Naik
23,74%

Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan (Rp miliar)	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Neraca					
Total Aset	316.947	404.286	469.899	551.337	626.183
Total Aset Produktif	299.063	379.696	432.647	499.042	568.546
Kredit - Gross	208.123	252.489	294.515	362.007	448.345
Obligasi Rekap Pemerintah	15.027	13.626	8.996	4.316	4.511
Penyertaan Saham Netto	111	134	165	197	223
Total Liabilities	289.690	367.612	420.079	486.455	546.856
Dana Pihak Ketiga	255.928	333.652	384.264	450.166	504.281
- Giro	50.094	77.364	76.779	79.723	79.337
- Tabungan	104.463	125.990	154.133	184.717	212.997
- Deposito	101.371	130.298	153.353	185.726	211.948
Liabilitas berbeban bunga lainnya	21.284	17.297	19.361	15.784	14.873
Modal/Ekuitas	27.257	36.673	49.820	64.882	79.327
Laba/Rugi					
Pendapatan Bunga :					
- Dengan Bunga Obligasi Pemerintah	35.334	44.615	48.164	49.610	59.461
- Tanpa Bunga Obligasi Pemerintah	33.528	43.109	47.053	49.235	59.298
Pendapatan Bunga Bersih :					
- Dengan Bunga Obligasi Pemerintah	23.049	32.889	34.427	36.484	44.106
- Tanpa Bunga Obligasi Pemerintah	21.244	31.382	33.316	36.109	43.943
Pendapatan Operasional Lainnya	3.270	5.545	5.776	8.390	8.348
Biaya Operasional Lainnya	(11.960)	(16.114)	(17.086)	(19.491)	(22.381)
CKPN	(5.799)	(7.917)	(5.533)	(2.700)	(3.946)
Laba Sebelum Pajak	9.891	14.908	18.756	23.860	27.910
Laba Bersih Tahun Berjalan	7.308	11.472	15.088	18.687	21.354
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	N/A	11.472	15.083	18.681	21.344
Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	N/A	Nihil	5	6	10
Laba rugi komprehensif	N/A	11.559	15.296	18.661	19.917
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	N/A	11.559	15.288	18.652	19.913
Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	N/A	Nihil	8	9	3
Laba Bersih per Saham (Rp)	304,75	478,36	628,91	757,26	865,22
Rasio Keuangan					
Permodalan					
Rasio Kecukupan Modal (CAR)*	13,20%	13,76%	14,96%	16,95%	16,99%
Aktiva Produktif					
Aset Produktif dan Non Produktif Bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,59%	2,19%	1,79%	1,19%	1,06%
Aset Produktif Bermasalah	2,68%	2,24%	1,85%	1,46%	1,28%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	4,29%	4,58%	4,51%	3,43%	2,90%
Kredit Bermasalah (NPL Gross)	3,52%	2,78%	2,30%	1,78%	1,55%
Profitabilitas					
ROA	3,73%	4,64%	4,93%	5,15%	5,03%
ROE	35,22%	43,83%	42,49%	38,66%	34,11%
NIM	9,14%	10,77%	9,58%	8,42%	8,55%
BOPO	77,66%	70,86%	66,69%	59,93%	60,58%
Likuiditas					
LDR	80,88%	75,17%	76,20%	79,85%	88,54%
Kepatuhan					
Persentase Pelanggaran BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

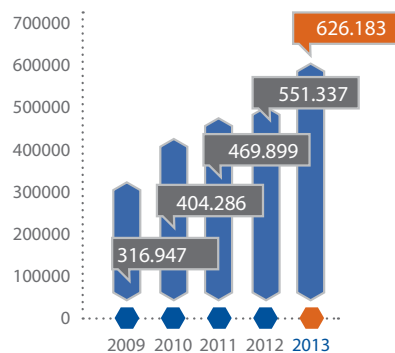
Ikhtisar Keuangan (Rp miliar)	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase Pelampauan BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Giro Wajib Minimum	5,90%	8,05%	9,33%	10,64%	8,02%
Posisi Devisa Netto	5,22%	4,45%	5,49%	3,00%	3,15%

Angka kinerja keuangan tersebut diatas merupakan laporan keuangan konsolidasi BRI dengan entitas perusahaan anak untuk tahun 2013 : PT BRISyariah, PT Bank Agroniaga Tbk, BRIngin Remittance Co. Ltd, sedangkan untuk tahun 2010 hanya dengan PT BRISyariah. Rasio keuangan menggunakan data bank saja.

* Mulai 2004 sudah memperhitungkan risiko pasar dan mulai 2010 sudah memperhitungkan risiko operasional

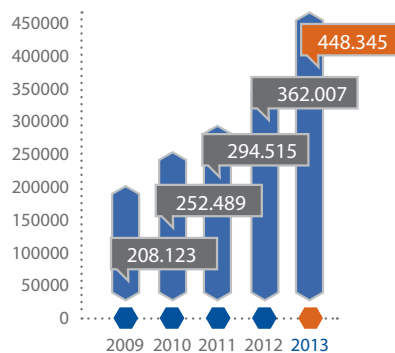
Total Aset

(Dalam Rp miliar)



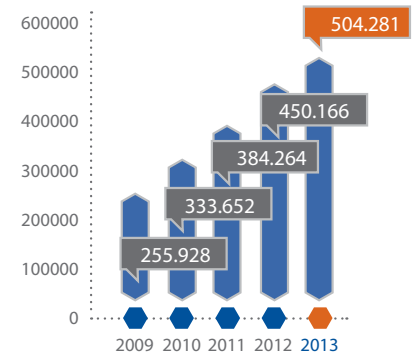
Total Kredit

(Dalam Rp miliar)



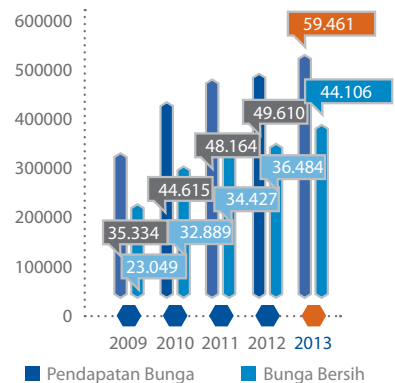
Dana Pihak Ketiga

(Dalam Rp miliar)



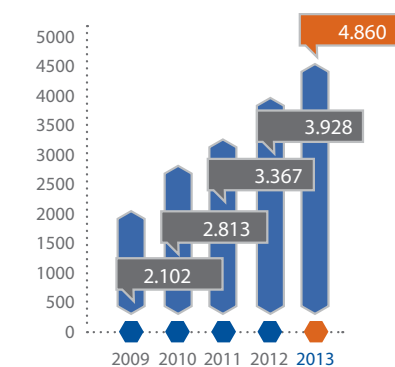
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Bunga Bersih

(Dalam Rp miliar)



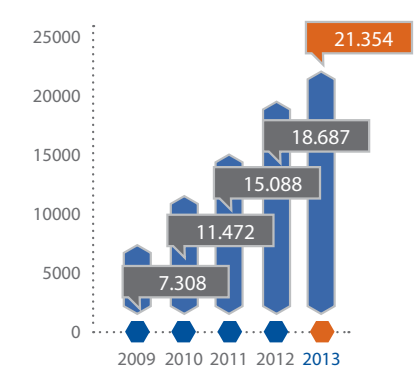
Fee Based Income*

(Dalam Rp miliar)



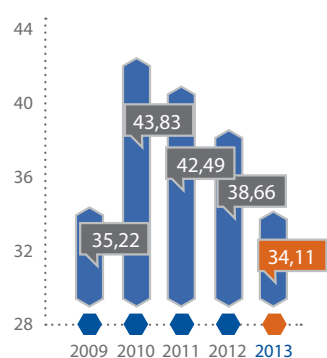
Labas Bersih

(Dalam Rp miliar)



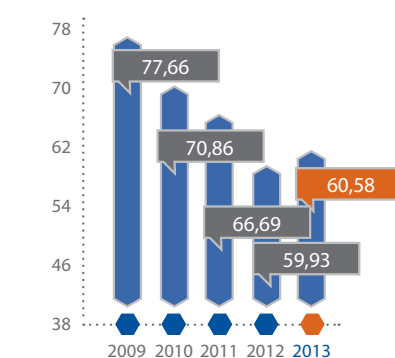
ROE*

(Dalam %)



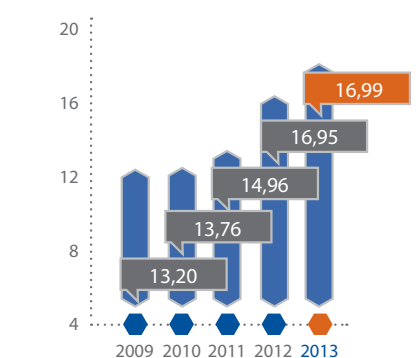
BOPO*

(Dalam %)



CAR*

(Dalam %)



* Angka Bank Saja

Peristiwa Penting 2013



18 Januari

- Kerjasama dengan Pemda DKI Jakarta, BRI meluncurkan *e-Tax* BRI, layanan pembayaran pajak secara *online* untuk warga DKI Jakarta



28 Februari

- Pemegang Saham setuju *Dividend Payout Ratio* 30%, dividend saham menjadi sebesar Rp225,2320 per saham atau total sebesar Rp5,5 triliun, terbesar di sektor Perbankan.



14 Maret

- BRI sukses menggalang dana jangka panjang melalui penerbitan Obligasi Global senilai USD 500 Juta dengan kupon 2,95%, yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018.



27 April

- Dukung perkembangan olahraga, BRI Luncurkan Kartu BRIZZI Edisi Basket.



20 Mei

- Kegiatan CSR Direksi Mengajar "Mental Juara Bersama BRI" berlangsung serentak di 7 Kota.

23 Mei

- BRI Tampilkan Teknologi Perbankan Terbaru dalam ajang IBEX (*Indonesia Banking Expo*)



20 Juni

- Bekerja sama dengan PT Telkom (Persero) Tbk dalam rangka sinergi BUMN untuk layanan *Financial Inclusion*, BRI meluncurkan T-BANK. Para pengguna telepon seluler kini dapat menikmati layanan perbankan tanpa perlu pergi ke Bank.

12 Juli

- Bekerja sama dengan PT Askes (Persero), BRI siap layani BPJS di seluruh Indonesia.



26 Juli

- Bekerja sama dengan Alfamart – BRI mendukung 90.000 usaha mikro di sekitar Gerai Alfamart, program *Store Sales Point*.

1 Agustus

- Kerjasama dengan PT Berdikari, BRI siap kururkan KKP-E kepada 500 Peternak Sapi.



5 September

- Demo Layanan *Microfinance* di APEC – BRI ikut memfasilitasi kegiatan kegiatan *Cultural Visit* delegasi APEC *Small Medium Enterprises Ministerial and Related Meetings 2013*, dalam rangkaian konferensi APEC di Bali.



5 Oktober

- Majukan PKL, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan BRI sukseskan Jakarta *Night Market*



27 November

- *Public Expose* BRI dalam Acara *Investor Summit 2013*, BRI paparkan 4 Keunggulan Utama.



19 Desember

- Mudahkan Masyarakat, Bank BRI resmikan *E-Banking Hybrid Lounge* di Pacific Place

22 Desember

- Jalan sehat, 40 ribu keluarga besar Bank BRI di puncak HUT BRI ke-118.



Penghargaan dan Sertifikasi

Kinerja BRI tahun 2013 yang membanggakan mendapatkan apresiasi dari pihak eksternal melalui raihan tidak kurang dari 40 penghargaan dari berbagai kategori dan ajang penyelenggaraan penghargaan, meliputi:



"GOLD BRAND CHAMPION OF MOST POPULAR BRAND"

Kategori *Conventional Banking*

"BRONZE BRAND CHAMPION OF BRAND EQUITY"

Kategori *Conventional Banking (Asset > IDR 75 Trillion)*

Pada acara :

"Indonesia Brand Champion 2013"

Penyelenggara :
MarkPlus Insight

Tanggal :
31 Januari 2013

TOP BRAND AWARD

(in Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand)

Kategori :

- ATM Card BRI,
- BRI Junio - Children's Savings Account,
- Bank BRI - Deposit Account,
- Call BRI - Call Center
- BRI Britama – Saving Account.

Penyelenggara:
Majalah Marketing

Tanggal :
3 Februari 2013

BEST MICROFINANCE BUSINESS

Penyelenggara :
Asian Banker

EMITEN TERBAIK 2013

Acara :

Investor Award 2013

Penyelenggara :
Majalah Investor

Tanggal :
2 Mei 2013



**PERINGKAT PERTAMA
EMITEN OBLIGASI
TERBAIK 2013**

Acara :
Capital Market Award 2013
Penyelenggara :
BEI, KPEI dan KSEI
Tanggal :
15 Mei 2013

**INDONESIA
MOST ADMIRIED
COMPANIES**

Acara :
*Most Admired
Companies*
Penyelenggara :
Warta Ekonomi
Tanggal :
28 Mei 2013

**BUMN PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK
BUMN PENDUKUNG
MOBIL LISTRIK**

Acara :
BUMN Award
Penyelenggara :
Kementerian BUMN
Tanggal :
19 Mei 2013

**2nd BEST CSR
PROGRAM
6th BEST INVESTOR
RELATION
9th BEST MANAGED
COMPANY
9th BEST CORPORATE
GOVERNANCE**

Acara :
*Asia's Best Companies
2013*
Penyelenggara :
Finance Asia
Tanggal :
26 Juni 2013

**PREDIKAT "SANGAT
BAGUS"**

untuk Kinerja Keuangan
Perbankan Tahun 2013

Acara :
Infobank Awards 2013
Penyelenggara :
Majalah Infobank
Tanggal :
5 Juli 2013

Penghargaan dan Sertifikasi



BEST WEALTH CREATOR

based on WAI Method

Acara :

Swa 100: ASEAN Best Public Company 2013 Indonesian Best Public Company 2013

Penyelenggara:

Majalah Swa

Tanggal :

27 Juni 2013

BANK OF THE YEAR 2013

- **Bank Terbaik untuk Modal Inti > 30 T**
- **Peringkat 1 Corporate Social Responsibility**
- **Peringkat 1 Finance**
- **Peringkat 1 Information Technology**
- **Peringkat 1 Risk Management**

Acara :

Anugerah Perbankan Indonesia

Penyelenggara:

Business Review dan Ideku Group

Tanggal :

26 September 2013

THE WORLD'S BIGGEST PUBLIC COMPANY

Acara :

The Global 2000
Forbes Magazine

Penyelenggara :

Forbes Magazine

Tanggal :

3 Oktober 2013

BEST PERFORMANCE BANKING 2013

Kategori Bank Buku 4

Acara :

Indonesian Banking Awards

Penyelenggara :

Majalah Tempo dan CRMS Indonesia

Tanggal :

01 Oktober 2013



**PERINGKAT I BUMN
FINANCE-LISTED 2012**

Acara :
Annual Report Awards
Penyelenggara :
OJK-BI-KNKG-Dirjen Pajak
Tanggal :
01 Oktober 2013

**PERINGKAT 2 UMUM
DARI 230 PESERTA.**

Acara :
Annual Report Awards
Penyelenggara :
OJK-BI-KNKG-Dirjen Pajak
Tanggal :
01 Oktober 2013

**25 LISTED COMPANY
IN SUSTAINABLE
RESPONSIBLE
INVESTMENT (SRI)
KEHATI INDEX**

Penyelenggara :
Yayasan Kehati
Tanggal :
01 Mei 2013

Sertifikasi

ISO 9001:2008

Sentra Operasi BRI telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008 untuk bidang *Provision of Payment System by RTGS, Clearing and Remittance*. Sertifikasi dari *Lloyd's Register Quality Assurance*, pada tanggal 12 Desember 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2015

ISO 9001 : 2008

Layanan *Contact Center (LCC)* BRI telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008. Sertifikasi dari *Verification New Zealand Limited* pada tanggal 5 Desember 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Desember 2014

ISO 9001 : 2008

Quality Management untuk 2 (dua) ruang lingkup tugas/fungsi, yakni produksi kartu dan penyelesaian komplain. Sertifikasi dari manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008. Sertifikasi dari LQRA (*Lloyd's Register Quality Assurance*) yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Internasional – UKAS (*United Kingdom Accreditation Service*) dan Komite Akreditasi Nasional. Sertifikasi diberikan tanggal 11 Desember 2013 dan berlaku selama 3 tahun.

Daftar Isi

Ikhtisar Utama

16	Ikhtisar Keuangan
18	Peristiwa Penting 2013
20	Penghargaan dan Sertifikasi

26

Laporan Pengurus Perusahaan

28	Sambutan Komisaris Utama
31	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
38	Laporan Direktur Utama
50	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris
51	Surat Pernyataan Anggota Direksi

52

Profil Perusahaan

54	Nama, Alamat & Informasi Umum Perusahaan
56	Sekilas Bank BRI
58	Milestone Bank BRI
60	Visi, Misi dan Nilai Utama Perusahaan
62	Produk dan Jasa Perbankan
64	Peta Wilayah dan Jaringan Kantor
66	Jaringan Kantor BRI
68	Struktur Organisasi
70	Entitas Anak dan Asosiasi
71	Lembaga Penunjang Pasar Modal

72

Informasi Bagi Investor

75	Ikhtisar Saham
76	Ikhtisar Obligasi
76	Kronologi Pencatatan Saham
76	Management Stock Option Plan
78	Komposisi Pemegang Saham
78	Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham BRI
80	Dividen dan Kebijakan Dividen
81	Obligasi Sub-Ordinasi
81	Obligasi Senior USD

82

Tinjauan Operasional

84	Prospek Dan Strategi Umum
88	Pengelolaan Sumber Daya Manusia
98	Pemasaran
106	Teknologi dan Sistem Informasi

110	Sentra Operasi
114	Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa
116	Manajemen Risiko

202

Analisa dan Pembahasan Manajemen

204	Tinjauan Umum
208	Kondisi Perbankan 2013
209	Pertumbuhan Kredit UMKM Nasional
210	Tinjauan Bisnis
210	Segmen Bisnis
212	Bisnis Mikro dan Program
220	Bisnis Ritel dan Menengah
228	Bisnis BUMN dan Korporasi
234	Bisnis Internasional
238	Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal
242	Tinjauan Kinerja Keuangan
244	Laporan Laba Rugi
249	Laporan Posisi Keuangan
258	Informasi Keuangan Lainnya
258	Pencapaian Target 2013
258	Target 2014
258	Komitmen dan Kontinjensi
259	Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai
259	Dampak Perubahan Suku Bunga Terhadap Kinerja Bank
260	Upaya Meningkatkan Perolehan Fee Based Income
263	Informasi-informasi Material Lain
263	Informasi dan Fakta Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang/Modal.
263	Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan.
263	Kebijakan Akuntansi dan Informasi Keuangan Kejadian Luar Biasa
263	Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Bank
266	Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan
266	Transaksi Benturan Kepentingan
266	Transaksi Berelasi
266	Kebijakan Dividen
267	Entitas Anak

267	PT Bank BRISyariah
269	PT Bank Agroniaga Tbk
270	BRI Remittance Co.Ltd.

272

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

274	Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
275	Dasar Acuan Implementasi GCG
277	Road Map Implementasi BRI
280	Implementasi GCG
285	Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
285	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Corporate Charter)
289	Kebijakan dan Prosedur Operasional Perusahaan.
290	Informasi Kebijakan dan Program Penting Lainnya
295	Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
296	Rapat Umum Pemegang Saham
298	Dewan Komisaris
309	Direksi
322	Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi
326	Komite Dibawah Dewan Komisaris
337	Komite - Komite Dibawah Direksi
347	Sekretaris Dewan Komisaris
348	Sekretaris Perusahaan
353	Fungsi Kepatuhan
356	Manajemen Risiko
357	Sistim Pengendalian Internal
359	Audit Intern
367	Auditor Ekstern dan Akuntan Perseroan
368	Kode Etik
372	Budaya Perusahaan
376	Sistem Pelaporan Pelanggaran/ <i>Whistleblowing System</i>
379	Perkara Hukum
380	Informasi Penting Lainnya
387	Tempat/Alamat yang dapat dihubungi <i>Stakeholders</i>

388

Laporan Tanggung Jawab Sosial

390	Asas dan Komitmen
393	Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
394	Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
396	Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

396	Penyaluran Kredit Program (KUR dan Kredit Program Lainnya)
397	Pelaksanaan Kegiatan CSR
403	Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Nasabah

406

Informasi Perusahaan

408	Profil Dewan Komisaris
412	Profil Direksi
418	Profil Komite Dewan Komisaris
420	Profil Sekretaris Perusahaan
420	Profil Kepala Audit Intern
421	Daftar Pejabat Senior
423	Alamat Kantor
423	Unit Kerja
425	Alamat Kontak Bagi Pembaca

426

Lampiran- Lampiran

426	Press Release
429	Korespondensi Dengan OJK dan BEI
433	Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

448

Laporan Keuangan Konsolidasi 2013



26

Laporan Pengurus Perusahaan

28	Sambutan Komisaris Utama
31	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
38	Laporan Direktur Utama
50	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris
51	Surat Pernyataan Anggota Direksi



“ Memperkokoh Basis Nasabah ”

Penetrasi pasar dengan TerasBRI, dan Teras BRI Keliling telah menyediakan jangkauan yang lebih luas sampai ke pelosok negeri dengan tujuan memperkokoh basis nasabah melalui edukasi dan informasi perbankan.

**Laporan
Pengurus
Perusahaan**

Sambutan Komisaris Utama

“ BRI berhasil mencatatkan kinerja yang membanggakan, berupa peningkatan aset yang berkualitas, membukukan kenaikan laba dan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di seluruh pelosok negeri

“



Bunasor Sanim
Komisaris Utama/Komisaris Independen

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga pada tahun 2013 Perseroan dapat mencapai kinerja yang sangat baik.

Pada tahun 2013 kondisi makroekonomi masih menunjukkan kondisi yang penuh tantangan, hal ini dapat kita lihat dari beberapa pengaruh faktor eksternal maupun internal. Beberapa faktor eksternal yaitu terjadinya perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia, seperti China, Jepang, Amerika, penurunan harga komoditas global, dan ekspektasi pemulihan perekonomian Amerika yang belum menunjukkan arah yang positif. Sedangkan beberapa faktor internal yaitu semakin besarnya defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran (*balance of payment*), melemahnya nilai tukar rupiah, inflasi, dan melambatnya pertumbuhan kredit serta kompetisi yang semakin ketat dalam pengumpulan dana.

Meskipun kondisi makroekonomi tersebut di atas, namun dengan semangat dan kerja keras dari jajaran manajemen dan seluruh pekerja BRI, maka pencapaian kinerja Bank BRI tahun 2013 masih sangat membanggakan. Pencapaian kinerja Perseroan tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat baik dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dalam pertumbuhan rasio keuangan pokok konsolidasi tahun 2013, seperti pertumbuhan total aset sebesar 13,58% dari posisi Desember

2012, kredit yang disalurkan tumbuh 23,8%, dana pihak ketiga tumbuh 12,0%, pendapatan bunga bersih sebesar 20,9%, laba setelah pajak sebesar Rp 21,35 triliun, dan non performing loan sebesar 1,63% atau lebih baik dibandingkan tahun 2012 sebesar 1,83%.

Pencapaian tersebut berkat dukungan SDM yang handal, teknologi informasi, dan perluasan jaringan kantor Perseroan. Adanya penambahan jumlah kantor sebanyak 756 unit kerja, yang terdiri dari 7 Kantor Cabang, 20 Kantor Cabang Pembantu, 144 BRI Unit, 36 Kantor Kas, 549 Teras BRI dan 1 Kantor Inspeksi, ditambah pertumbuhan jumlah layanan mobile banking sebesar 45.329 unit, Bank BRI senantiasa meningkatkan pelayanan terhadap nasabah untuk menjadi "The Biggest Payment Bank in Indonesia" yang siap menjangkau dan melayani seluruh lapisan masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Atas pencapaian kinerja tersebut Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran Perseroan dan stakeholders atas kerja keras dan dukungan yang telah diberikan selama tahun 2013 sehingga pencapaian kinerja Perseroan lebih baik dibandingkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Untuk itu, Perseroan memandang tahun 2014 sebagai

.....
Kerja keras manajemen beserta seluruh jajarannya dan dukungan seluruh pemangku kepentingan telah membuat BRI meraih hasil membanggakan dan siap melanjutkan pertumbuhan berkualitas menjadi **"The Biggest Payment Bank in Indonesia"**

Sambutan Komisaris Utama

tahun produktivitas dan dana dengan cara *Optimizing Capabilities to Sustain The Growth*. Terkait hal tersebut Manajemen telah merumuskan strategi berikut :

1. BRI sebagai Bank dengan jaringan kerja dan SDM yang produktif dan efisien,
2. Ekspansi kredit dengan risiko rendah dengan memanfaatkan *trickle down business*,
3. Terjaganya aspek rasio kesehatan bank.

Berbagai strategi inisiatif yang telah dirumuskan tersebut perlu diimplementasikan dengan baik oleh para pihak atau Unit Kerja terkait, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada segmen UMKM. Seluruh kegiatan Perseroan harus dilakukan sesuai dengan strategi aset, strategi dana, strategi permodalan, pertumbuhan non organik, strategi *fee based income*, dan *support strategy* yang telah dirumuskan. Selain itu, seluruh pekerja Perseroan harus memegang teguh kode etik pekerja dan budaya kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Destination Statement Perseroan pada tahun 2014 yaitu menjadi “Bank dengan Jaringan Kerja dan SDM yang Produktif dan Efisien” dan tekad bersama Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjadikan BRI sebagai “The Most Valuable Bank” pada tahun 2017 dapat direalisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, mengingat perkembangan dunia usaha yang dinamis dan kompetitif, maka Dewan Komisaris senantiasa menuntun komitmen seluruh jajaran Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin, sehingga *destination statement* tersebut dapat terwujud.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap jalannya perseroan, serta bekerjasama secara harmonis dengan jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan jalan kemudahan, bimbingan, dan kekuatan bagi seluruh insan BRI dalam menghadapi persaingan dan tantangan yang semakin kompleks. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Bunasor Sanim
Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2013

Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian demi kepentingan Perseroan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris melakukannya secara independen, berpedoman kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pengawasan Dewan Komisaris meliputi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilakukan demi kepentingan Perseroan dan untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta untuk memastikan bahwa Perseroan telah dikelola oleh Direksi untuk menjaga kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Komisaris memiliki perangkat pendukung yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris sebagai suatu majelis telah memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan. Untuk menjaga obyektivitas dan independensi, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan.

Evaluasi Kinerja Dan Pengawasan Perseroan Tahun 2013

Dewan Komisaris bersyukur bahwa Perseroan dapat melalui tahun 2013 dengan baik mengingat sejak pertengahan tahun 2013 telah terjadi perlambatan ekonomi sebagai akibat kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Melambatnya pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama, penurunan harga komoditas global, isu *tapering* pada perekonomian Amerika, dan kondisi dalam negeri seperti defisit neraca pembayaran yang melebar, fluktuasi nilai tukar rupiah dan meningkatnya inflasi telah menyebabkan industri perbankan mengalami pengetatan likuiditas yang diiringi dengan meningkatnya tekanan biaya dana.

Sepanjang tahun 2013, Direksi mampu menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Secara konsolidasi, laba bersih mampu menembus angka Rp 20 triliun yaitu sebesar Rp 21,35 triliun dan total aset mencapai Rp 626,18 triliun. Pencapaian ini juga diikuti oleh perbaikan pada indikator penting lainnya seperti pertumbuhan kredit yang mencapai 23,85% YoY dan pendapatan *fee-based income* yang berdasarkan angka bank saja mencapai Rp 4,86 triliun dengan kontribusi terhadap pendapatan mencapai 7,2%. Perseroan juga mencatat peningkatan rasio-rasio utama yang lebih baik dibanding bank pesaing. Rasio imbal hasil rata-rata ekuitas yang mencapai 34,11%, rasio imbal hasil rata-rata aktiva yang mencapai 5,03% dan rasio efisiensi biaya operasi (BOPO) yang mencapai 60,58%. Bersamaan dengan pengembangan bisnis, Direksi juga mampu untuk fokus menjaga kualitas aset yang menghasilkan tingkat NPL *gross* 1,55% dan NPL *nett* 0,31%. Direksi juga berhasil menjaga likuiditas dengan mempertahankan GWM Utama Rupiah dan GWM Valas pada kisaran 8% dengan LDR mencapai 88,54%.

Direksi mampu menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, baik dari sisi kuantitas seperti kenaikan laba, aset berkualitas dan penghimpunan DPK maupun kualitas pengelolaan, seperti tercermin pada indeks nilai GCG dan kepercayaan masyarakat di pasar modal.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2013

Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, Dewan Komisaris berupaya melakukan pengawasan secara disiplin terhadap parameter-parameter mikro keuangan dan makro eksternal.

Menyadari bahwa selain pentingnya pencapaian target pertumbuhan bisnis, namun yang lebih penting lagi adalah dapat menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, Dewan Komisaris berupaya melakukan pengawasan secara disiplin terhadap parameter-parameter mikro keuangan dan makro eksternal sebagai suatu cara untuk terciptanya sistem peringatan dini (*early warning system*).

1. Profil Risiko

Dengan semakin kompleksnya aktifitas usaha dan luasnya jaringan kerja BRI yang terbesar dan tersebar, maka perlu didukung dengan penerapan manajemen risiko yang memadai agar mampu mengidentifikasi setiap potensi risiko yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 4 (empat) aspek yang saling berkaitan dan saling terintegrasi, yaitu tata kelola; kerangka manajemen risiko; proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya dan sistem informasi manajemen risiko; dan kecukupan sistem pengendalian risiko.

Risiko inheren BRI selama tahun 2013 masih dapat dimitigasi melalui penerapan manajemen risiko secara baik, yang tercermin pada tingkat risiko low untuk risiko pasar dan risiko kepatuhan, serta tingkat risiko low to moderate untuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, dan risiko reputasi. Dengan demikian tingkat risiko komposit berada pada kategori *low to moderate* (nilai 2).

2. Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan telah dilaksanakan oleh Perseroan berlandaskan pada lima prinsip dasar (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independen, dan Kewajaran).

Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan antara lain:

- a. Transparansi, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan mengenai perusahaan, antara lain tercermin dari Laporan Keuangan Publikasi yang disampaikan setiap triwulan, ataupun menginformasikan jumlah saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan Perseroan.
- b. Akuntabilitas, kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efisien dan ekonomis, antara lain tercermin dari penetapan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing struktur organisasi, sistem rekrutmen pegawai yang *fair* dan obyektif, serta sistem remunerasi manajemen dan pekerja yang berbasis kinerja.
- c. Pertanggungjawaban, kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, antara lain tercermin dari pelaksanaan pelaporan Perseroan kepada regulator dan otoritas berwenang lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Independen, suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, antara lain tercermin dari adanya komitmen dari seluruh pekerja Perseroan untuk bekerja secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain tercermin dari pemberian

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2013

penghargaan (*reward*) untuk setiap prestasi dan menjatuhkan hukuman yang obyektif dan bersifat mendidik bagi setiap pelanggaran serta memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh nasabah Perseroan.

Dewan Komisaris menilai secara umum Perseroan telah menerapkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan Perseroan.

3. Rentabilitas

Dewan Komisaris menilai sepanjang tahun 2013 Direksi telah berhasil menerapkan strategi yang dipilih sehingga Perseroan mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp21,16 triliun, tumbuh 14,2% dari perolehan laba bersih tahun sebelumnya (angka bank saja).

Pencapaian laba bersih tersebut tidak terlepas dari keberhasilan mempertahankan NIM diatas 8% yaitu mencapai 8,55% yang lebih tinggi dari NIM periode tahun sebelumnya yang mencapai 8,42%.

Disamping itu, keberhasilan pencapaian laba bersih juga dikontribusi oleh terjaganya rata-rata biaya dana ditengah situasi persaingan untuk mendapatkan dana. Pada tahun 2013 *cost of fund* (COF) hanya meningkat 3 bps dari tahun 2013 menjadi 3,71% (angka bank saja).

Direksi juga mampu mencatat peningkatan rasio-rasio keuangan utama yang lebih baik dibanding bank pesaing, seperti rasio imbal hasil rata-rata ekuitas (ROE) yang mencapai 34,11%, dan rasio imbal hasil rata-rata aktiva (ROA) yang mencapai 5,03%. Namun apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, rasio ROE

dan ROA tersebut mengalami sedikit penurunan dimana pada periode sebelumnya rasio ROE dan ROA masing-masing mencapai 38,66% dan 5,15%. Tingkat efisiensi yang ditunjukkan dengan rasio BOPO dan CER masing-masing mencapai 60,58% dan 42,13% dibanding tahun lalu yang masing-masing mencapai 59,93% dan 43,11%, kenaikan BOPO lebih disebabkan karena adanya kenaikan biaya SDM yang signifikan yaitu sebagai akibat konversi pegawai dari tenaga *outsourcing* menjadi tenaga kontrak serta peningkatan status pekerja dari kontrak menjadi pekerja tetap.

4. Permodalan

Secara umum Dewan Komisaris menilai Direksi mampu melakukan pengelolaan permodalan dengan baik sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perseroan. Hal ini tergambar dari kemampuan Direksi menjaga tingkat permodalan di atas batas minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dicerminkan dari pencapaian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 16,99%.

Aktivitas Pengawasan Dan Rekomendasi

Di dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris melakukan :

1. Rapat rutin Dewan Komisaris minimal 1 minggu sekali.
2. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris minimal 1 bulan sekali.
3. Kunjungan Kerja ke seluruh wilayah kerja BRI selindo secara terjadwal.
4. Rapat Dewan Komisaris dengan divisi terkait.
5. Mengundang Direksi dan unit kerja terkait untuk membahas masalah yang mendesak untuk mencari solusi.

Dari hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan hasil Rapat tersebut di atas, direkomendasikan :

1. Perkreditan

Dewan Komisaris senantiasa memberi rekomendasi agar penyaluran kredit dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, meningkatkan kualitas pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko perkreditan yang memadai.

Untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai "Bank Pemimpin Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah", Dewan Komisaris juga selalu menegaskan agar penyaluran kredit pada segmen UMKM tetap dipertahankan minimal pada porsi tertentu.

Dewan Komisaris juga mendukung kebijakan Direksi dalam meningkatkan ekspansi kredit melalui strategi *trickle down business*. Selain itu Dewan Komisaris selalu berperan aktif memberikan saran dan masukan dalam forum konsultasi kredit antara Direksi dan Dewan Komisaris yang dilaksanakan untuk pemberian kredit kepada Debitur dalam jumlah tertentu.

2. Pendanaan

Dewan Komisaris senantiasa memberi rekomendasi dan saran agar Perseroan mengupayakan peningkatan komposisi dana murah sehingga tingkat bunga yang diberikan kepada nasabah dapat lebih kompetitif dibandingkan dengan bank pesaing. Target kenaikan dana pihak ketiga pada tahun 2014 agar selalu dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun, sehingga dapat mendukung pencapaian target ekspansi kredit dan menjaga likuiditas Perseroan.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2013

Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sentral dalam Perseroan, oleh karena itu Dewan Komisaris senantiasa memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan SDM Perseroan.

3. Pendapatan dan Beban

Dewan Komisaris senantiasa memberi rekomendasi dan saran agar Perseroan mengupayakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari pendapatan selain bunga antara lain melalui aktifitas *trade finance*, *remittance*, *cash management*, dan *transactional account* dengan memanfaatkan jaringan unit kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan terkait dengan beban, Dewan Komisaris senantiasa memberi saran agar Perseroan senantiasa mengupayakan peningkatan efisiensi.

4. Permodalan

Dewan Komisaris merekomendasikan agar pertumbuhan modal Perseroan dapat dioptimalkan melalui peningkatan laba ditahan. Upaya peningkatan sumber pendanaan/modal kerja melalui penerbitan surat berharga, baik dalam bentuk MTN maupun obligasi, agar dilaksanakan dengan berdasarkan pada analisa yang cermat dan mendalam dengan mengupayakan *term and condition* yang paling menguntungkan bagi Perseroan, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sentral dalam Perseroan, oleh karena itu Dewan Komisaris senantiasa memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan SDM Perseroan. Selama tahun 2013 Dewan Komisaris telah memberikan berbagai saran dan rekomendasi kepada Manajemen terkait dengan pengelolaan SDM, antara lain tentang pentingnya perencanaan SDM dan

Manpower Planning dilakukan secara strategi integratif yang mengacu pada *corporate plan*, RBB dan RKAP, serta sesuai dengan kebutuhan riil perkembangan bisnis perseroan.

Selain itu akselerasi pemenuhan SDM yang dilakukan tetap memperhatikan peningkatan kompetensi dan kualitas kepemimpinan melalui penyempurnaan kualitas pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pendampingan oleh senior, serta internalisasi dan penerapan budaya Perusahaan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah terbentuknya komposisi jumlah pekerja yang ideal antara pekerja bisnis dan pekerja supporting. Hal ini harus didukung oleh peningkatan peran Teknologi Informasi yang menunjang SDM dalam operasional Perseroan. Disamping itu adanya strategi MSDM untuk mendukung tahun dana pada 2014, melalui optimalisasi pemenuhan SDM khususnya bidang pemasaran dana, dan perbaikan kebijakan di bidang ketenagakerjaan beserta implementasinya, yang pada akhirnya akan membantu terwujudnya bank dengan jaringan kerja dan SDM yang produktif dan efisien.

6. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan efisiensi sekaligus layanan kepada nasabah, oleh karena itu Dewan Komisaris menyarankan agar pengembangan Teknologi Informasi dititikberatkan pada peningkatan kehandalan jaringan agar dapat menyediakan layanan prima kepada nasabah.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2013

Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi dapat mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam mendukung peningkatan akurasi, kecepatan, dan kualitas operasional Perseroan.

7. Manajemen Risiko

Peningkatan risiko terkait dengan adanya penambahan jumlah jaringan kantor, peningkatan jumlah sumber daya manusia, dan semakin beragamnya produk perbankan harus diikuti dengan upaya memperkuat infrastruktur manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.

8. Pengendalian Intern

Dewan Komisaris merekomendasikan agar memperbaiki kualitas pengendalian internal antara lain:

- Meningkatkan pengawasan melekat pada setiap proses operasional di unit kerja.
- Mengoptimalkan peran dan fungsi Manajemen Risiko pada seluruh unit kerja.
- Meningkatkan kualitas pengendalian internal melalui penerapan *Risk Based Audit* terhadap proses operasional di unit kerja dan meningkatkan kualitas internal auditor.
- Meningkatkan monitoring oleh pemimpin unit kerja terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terhadap temuan audit internal maupun eksternal.

9. Penyertaan Modal

Penyertaan modal pada Perusahaan Anak agar didahului dengan kajian yang mendalam dan komprehensif, dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyertaan modal juga harus didasari atas strategi pengembangan Perusahaan Anak yang lebih baik, sinergis, dan saling menguntungkan, yang disertai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan Anak.

10. Belanja Modal

Penyusunan anggaran belanja modal diselaraskan dengan perencanaan proyek, perkembangan bisnis dan kesiapan SDM. Selain itu, penggunaan anggaran tersebut perlu dioptimalisasikan supaya layanan kepada nasabah dapat ditingkatkan.

11. Jaringan Kantor

Penambahan jaringan unit kerja perlu diimbangi dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- peningkatan koordinasi antar unit kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan dapat mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun koordinasi yang dimaksud mencakup :
 - Sumber Daya Manusia, terkait *manning analysis*, penetapan formasi, dan pemenuhan formasi dilakukan dengan koordinasi aktif antar unit kerja yang terlibat.
 - Teknologi Informasi, terkait pengadaan *e-channel*, dilakukan antara Divisi Teknologi Sistem Informasi, Divisi Manajemen Aktiva Tetap, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro, Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel, dan unit kerja pengguna.
 - Logistik pendukung, terkait pengadaan tanah, gedung, dan sarana serta prasarana kantor dilakukan oleh Divisi Manajemen Aktiva Tetap, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa dan unit kerja pengguna.
- Direksi agar melakukan evaluasi terhadap rencana pembukaan kantor cabang baru agar diselaraskan dengan penerapan kebijakan *branchless banking*. Untuk itu diperlukan persiapan kerja sama dengan pihak lain yang akan menjadi mitra kerja (agen).
- Optimalisasi penggunaan fitur ATM maupun *e-channel* dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah sehingga mampu meningkatkan *fee based income*.

12. Good Corporate Governance (GCG)

Dewan Komisaris merekomendasikan supaya setiap insan Perseroan menjaga konsistensi pelaksanaan *Good Corporate Governance* sehingga menjadi salah satu budaya Perseroan.

13. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Penyaluran dana PKBL agar dititikberatkan pada bantuan Bina Lingkungan dan tidak terikat pada penyaluran kepada kelompok tetapi juga kepada individual. Adapun pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dan penyaluran dana tersebut harus dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku.

Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan usaha Perseroan tahun 2013.

Dewan Komisaris



Ahmad Fuad
Komisaris Independen

Vincentius Sonny Loho
Komisaris

Hermanto Siregar
Komisaris

Bunaser Sanim
Komisaris Utama/
Komisaris Independen



Mustafa Abubakar
Wakil Komisaris Utama

Aviliani
Komisaris Independen

Adhyaksa Dault
Komisaris Independen

Heru Lelono
Komisaris

Laporan Direktur Utama

“ Tahun 2013 kembali menjadi tahun ekspansi bisnis yang dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan memberikan hasil yang membanggakan berupa peningkatan kredit segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) terbesar di Indonesia, kenaikan pangsa pasar UMKM menjadi sekitar 29,50% dan peningkatan laba bersih 14,27% menjadi sebesar Rp21,35 triliun.

Perbaikan kualitas kredit di seluruh segmen bisnis yang berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan bunga, serta kontribusi *fee based income*, memiliki andil yang besar terhadap raihan laba bersih BRI di tahun 2013. “



Sofyan Basir
Direktur Utama

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pemegang Saham yang Terhormat,

Segala puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan, karena berkat rahmat-Nya BRI dapat melalui tahun 2013 yang penuh tantangan dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Atas nama Direksi BRI, perkenankan kami menyampaikan beberapa pencapaian utama kinerja BRI selama tahun buku 2013 kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Kondisi Perekonomian dan Perbankan Indonesia 2013

Seiring dengan ketidakpastian perekonomian global, melemahnya permintaan komoditas primer dari Indonesia dan meningkatnya porsi subsidi BBM, yang menyebabkan dilakukannya penyesuaian harga energi (BBM dan listrik), berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 6,23%, menjadi sekitar 5,7% di tahun 2013. Pertumbuhan PDB tersebut masih didukung oleh naiknya konsumsi rumah tangga, kegiatan investasi dan kegiatan ekspor. Namun demikian, pelemahan permintaan komoditas dan lonjakan konsumsi BBM tersebut membuat neraca berjalan mengalami tekanan yang pada akhirnya berdampak terhadap meningkatnya inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah pada paruh kedua tahun 2013.

Upaya pengendalian inflasi dan nilai tukar rupiah selanjutnya dilakukan melalui dua pendekatan, pertama, mengurangi subsidi BBM melalui penyesuaian harga dan kedua, meningkatkan suku bunga rujukan BI rate menjadi sebesar 7,5% dari posisi 5,75% secara bertahap sejak pertengahan tahun 2013. Langkah ini pada akhirnya menjadikan tingkat inflasi mulai lebih terkendali, yang terlihat pada angka inflasi di akhir tahun 2013 yang berada pada 8,38%, lebih rendah dari ekspektasi yaitu

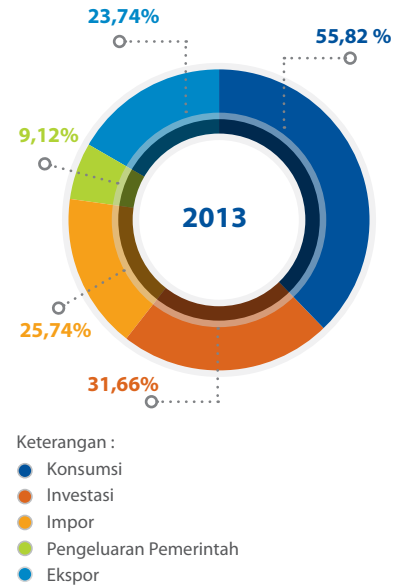
sekitar 9%, selain itu nilai tukar rupiah juga terlihat mulai stabil pada kisaran 12.000 rupiah/US Dollar pada akhir 2013.

Dalam situasi tersebut, stabilitas sistem keuangan dan fungsi intermediasi perbankan di tahun 2013 tetap terjaga cukup baik. Kinerja industri perbankan per Desember 2013 yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/*Capital Adequacy Ratio*) yang tercatat sebesar 18,13% jauh di atas batasan minimum 8%. Kualitas kredit juga terjaga dengan baik, tercermin pada tingkat NPL (*gross*) sebesar 1,77% yang berada jauh dibawah batasan maksimum NPL sebesar 5%. Pertumbuhan kredit nasional tercatat sebesar 21,6%, sedikit menurun dari pertumbuhan di tahun 2012 yang mencapai 23,97%, dan tetap didominasi oleh pertumbuhan kredit komersial yang sekaligus mencerminkan kondisi dan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun demikian, kenaikan tingkat inflasi akibat penyesuaian harga BBM, volatilitas harga bahan pangan serta pelemahan kegiatan perekonomian mendorong peningkatan persaingan perbankan dalam akuisisi dana pihak ketiga.

Menghadapi kondisi perekonomian dan perbankan yang sudah diperkirakan akan semakin menantang di tahun 2013, manajemen BRI menetapkan target pertumbuhan bisnis yang berkualitas melalui ekspansi bisnis yang prudent didasarkan pada strategi *market penetration*, *market development* dan *product development*. Strategi tersebut bertujuan untuk mencapai target sebagai bank yang paling besar menyalurkan kredit ke segmen UMKM, disertai upaya optimalisasi aktifitas layanan jasa perbankan dan perluasan akses serta peningkatan kualitas layanan, guna menggali potensi *fee based income* yang pada akhirnya mendukung upaya terwujudnya konsep *financial inclusion* di Indonesia.

Komposisi PDB Menurut Penggunaan



Kontributor utama pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2013 tetap didominasi oleh konsumsi domestik, khususnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai **55,3%** dari PDB.

Laporan Direktur Utama

BRI berhasil mengatasi kondisi perekonomian yang cukup menantang dengan membukukan pertumbuhan kredit hingga sebesar **23,66%**, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit perbankan nasional diikuti keberhasilan meningkatkan kualitas kredit, ditunjukkan dengan penurunan NPL (angka bank saja) menjadi **1,55%** ditahun 2013 dari **1,78%** di tahun sebelumnya.

Melampaui Target Kinerja Tahun 2013 Pertumbuhan Tertinggi Di Segmen Mikro, Kecil dan Menengah yang Disertai Perbaikan Kualitas Kredit

Pada tahun 2013, melalui penerapan strategi bisnis tersebut, BRI membukukan pertumbuhan kredit yang membanggakan di seluruh segmen bisnis. Volume pertumbuhan kredit terbesar tercatat pada segmen bisnis mikro yang bertambah senilai Rp25,33 triliun (angka bank saja), atau naik 23,72% menjadi Rp132,13 triliun. Volume pertumbuhan tersebut menjadikan BRI sebagai Bank di Indonesia yang mencatatkan nilai pertumbuhan terbesar di segmen mikro sekaligus membuat posisi BRI semakin kokoh sebagai bank terbesar di segmen mikro dengan pangsa pasar mencapai 45% (angka bank saja).

Secara keseluruhan, BRI mampu memperkokoh posisinya sebagai bank penyalur kredit terbesar di segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang sekaligus kembali menegaskan hasil positif dari konsistensi dalam perencanaan strategis BRI yang tetap berfokus pada segmen tersebut. Pada tahun 2013, outstanding kredit UMKM BRI mencapai Rp179,60 triliun (angka bank saja) tumbuh 21,48% dibandingkan tahun 2012. Dengan pertumbuhan tersebut, portfolio kredit untuk segmen UMKM berada pada kisaran 41,7%, sementara porsi kredit segmen mikro tetap mendominasi terhadap total kredit yang diberikan dengan komposisi mencapai 30,7%. Posisi *outstanding* kredit UMKM tersebut juga menegaskan posisi BRI sebagai Bank dengan pertumbuhan segmen UMKM tertinggi di Indonesia dan pangsa pasar UMKM sebesar 29.5% dari perbankan nasional.

Pertumbuhan di segmen mikro merupakan wujud berlanjutnya keberhasilan program revitalisasi segmen bisnis yang telah dirintis sejak tahun 2011 dan mulai

menunjukkan hasil sejak tahun 2012. Revitalisasi yang meliputi penambahan kapasitas tenaga pemasar kredit, perluasan jaringan *product development* serta penambahan *customer base* berjalan sesuai yang diharapkan. Kapasitas tenaga pemasar di tahun 2013 menunjukkan peningkatan, dicerminkan oleh peningkatan rasio petugas kredit mikro (mantri) per unit kerja mikro yang mencapai 3,7 meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 3,1 yang mencerminkan peningkatan kapasitas dalam menyalurkan kredit.

Sementara itu disisi jaringan, selama tahun 2013 BRI telah menambah 144 BRI Unit, 434 Teras BRI dan 115 Teras BRI Keliling sehingga secara keseluruhan jaringan unit kerja mikro BRI tercatat sebesar 7.821, meningkat dari posisi tahun 2012 yang sebesar 7.128.

Selanjutnya, dengan pertimbangan kinerja dan potensi bisnis, sepanjang tahun 2013, BRI kembali meningkatkan skala usaha sejumlah unit kerja operasionalnya dimana 10 Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang, 3 Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu dan 43 TerasBRI menjadi BRI Unit.

Selain penambahan unit kerja baru, konsistensi program perluasan jaringan kerja tersebut juga diikuti dengan peningkatan produktivitas unit kerja sepanjang tahun 2013, khususnya pada Teras BRI. Produktivitas Teras BRI tercatat sebesar Rp3,73 miliar *outstanding* kredit per teras dan Rp1,91 miliar dana pihak ketiga per Teras BRI, meningkat dari posisinya di tahun 2012 yang sebesar Rp2,49 miliar *outstanding* kredit per Teras dan Rp1,06 miliar simpanan per Teras BRI.

Target penambahan *customer base* juga berhasil dicapai, ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah nasabah mikro BRI, baik disisi pinjaman maupun disisi simpanan. Jumlah rekening Kredit Mikro BRI mencapai 6,5 juta, meningkat dari di tahun 2012 yang tercatat sebesar 5,5

Laporan Direktur Utama

Realisasi pengembangan jaringan membuat operasional BRI kini didukung oleh **9.808 unit kerja konvensional** dan **104.570 e-channel**, termasuk **18.292 unit ATM** yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

juta. Khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI juga berhasil menambah jumlah migrasi nasabah KUR-Mikro menjadi nasabah Mikro-Komersial menjadi 842 ribu nasabah sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan jumlah nasabah kredit mikro.

Dari sisi simpanan Mikro juga terjadi peningkatan jumlah rekening tabungan, dari sekitar 24 juta di tahun 2012 menjadi sekitar 28 juta rekening di tahun 2013. Besarnya jumlah rekening kredit dan simpanan Mikro tersebut menunjukkan bahwa Bisnis Mikro BRI terbukti mampu menjangkau masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis BRI telah membantu mewujudkan upaya *financial inclusion* di Indonesia, yang diharapkan membuat kegiatan perekonomian berlangsung semakin efisien, dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Revitalisasi yang juga diikuti dengan penerapan strategi integrasi pertumbuhan antar segmen bisnis dengan menekankan adanya *trickle down* bisnis antara segmen korporasi dengan segmen mikro, ritel dan menengah, juga turut berkontribusi pada terciptanya keseimbangan pertumbuhan segmen bisnis tersebut diatas. BRI mencatat nilai kredit segmen ritel menengah hasil *trickle down* bisnis di tahun 2013 mencapai Rp3,36 triliun, naik 158,5% dari nilai sebesar Rp1,30 triliun di tahun 2012.

Upaya revitalisasi, *cross selling* antar produk segmen bisnis dan *trickle down* bisnis korporasi dengan segmen UMKM, menghasilkan capaian strategis lain yang membanggakan, yakni perbaikan kualitas kredit di seluruh segmen bisnis. Hal ini tercermin pada terus menurunnya tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dari 1,78% di akhir tahun 2012 menjadi 1,55% di tahun 2013, jauh dibawah batasan maksimum

NPL BI yang sebesar 5% (angka bank saja). Tingkat pertumbuhan kredit BRI di sekitar 23,66% selama tahun 2013 yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit nasional dengan disertai penurunan NPL tersebut menunjukkan keberhasilan BRI mengembangkan dan mengelola portofolio kredit yang sehat dan berkualitas.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Untuk penghimpunan dana pihak ketiga, strategi yang ditetapkan adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan, dengan target terjaganya porsi dana murah sebagai sumber dana pihak ke tiga BRI secara optimal. Penerapan strategi ini juga memberikan hasil yang membanggakan. Selama tahun 2013, BRI berhasil menghimpun dana pihak ketiga dengan komposisi dana murah yang tetap optimal, yaitu terjaga di kisaran 60%.

Tabungan, sebagai sumber dana murah tumbuh relatif stabil dengan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan jenis simpanan lainnya. Setelah mengalami peningkatan 19,79% atau mencapai Rp182,64 triliun di tahun 2012, pada tahun 2013 dana tabungan yang berhasil dihimpun meningkat 14,98% menjadi sebesar Rp210,0 triliun. Sementara itu, deposito tumbuh sebesar 13,53%, menjadi senilai Rp198,34 triliun dari angka tahun 2012 yang sebesar Rp174,7 triliun, sedangkan giro, mengalami sedikit penurunan sebesar 0,93% menjadi senilai Rp78,02 triliun di tahun 2013. Sehingga secara keseluruhan, komposisi dana pihak ketiga BRI ditahun 2013 untuk dana murah berada pada 59,22%, sedangkan sisanya sebesar 40,78% berupa deposito. Komposisi dan struktur nasabah simpanan tersebut menunjukkan keberhasilan BRI menjaga kestabilan sumber dana murah untuk mendukung pertumbuhan kredit dan bisnis lainnya secara berkesinambungan.

Laporan Direktur Utama

Pengembangan jaringan dan fitur produk berbasis TI berhasil meningkatkan pendapatan *fee based income* BRI yang terkait *e-banking* sebesar **78,51%** menjadi sebesar **Rp673,58 miliar**.

Peningkatan akses dan kualitas layanan serta penggalian potensi *Fee Based Income*.

Target lain yang tak kalah pentingnya untuk dicapai dengan strategi peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan adalah pertumbuhan *fee based income* dan target jangka panjang untuk menjadikan BRI sebagai *The Biggest National Payment Gateway* dalam sistem keuangan Indonesia. Salah satu strategi yang sudah diterapkan dengan seksama adalah melalui pengembangan *e-banking*.

Sebagai bentuk realisasi rencana tersebut, di tahun 2013 BRI memperkuat jaringan *e-channel* dengan menambah 4.000 ATM, sehingga total jaringan ATM di akhir tahun menjadi 18.292 ATM, menjadikan BRI sebagai bank yang memiliki jaringan ATM terbesar diantara bank-bank di Indonesia dengan lokasi ATM yang tersebar luas hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Selain ATM, BRI menambah jaringan *e-channel* lainnya yang meliputi 41.221 EDC (Electronic Data Capture), 100 CDM (Cash Deposit Machine) dan 8 *e-Buzz* sehingga dengan penambahan tersebut hingga akhir Desember 2013, BRI telah memiliki total 104.570 jaringan *e-channel*, terdiri dari 18.292 ATM, 85.936 EDC, 100 kiosK, 192 CDM dan 50 *e-buzz*. Dalam rangka menambah mobilitas dan membuka akses ke daerah terpencil yang minim infrastruktur jalan, BRI juga mengkaji pengembangan Teras BRI Kapal.

BRI juga berupaya mengembangkan fitur-fitur produk berbasis TI untuk meningkatkan kualitas layanan, frekuensi transaksi sekaligus menggali potensi *fee based income*. Hasil dari pengembangan jaringan *e-banking* dan pengembangan fitur produk tersebut adalah peningkatan *fee based income* yang berasal dari peningkatan transaksi *e-banking*. Pertumbuhan *fee* yang berasal dari

transaksi yang dilakukan di *e-channel* BRI mencatat pertumbuhan tertinggi. Pemegang *debit card* secara konsisten juga menunjukkan peningkatan, sebagai salah satu sumber untuk potensi peningkatan transaksi *e-banking* dan *fee based income*. Adapun total penerimaan *fee based* BRI di tahun 2013 mencapai nilai sebesar Rp4,86 triliun, naik 23,71% dari nilai sebesar Rp3,93 triliun di tahun sebelumnya.

Pengembangan jaringan baik konvensional maupun *e-channel*, bersama dengan pengembangan fitur produk berbasis TI merupakan salah satu cara BRI untuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan akses bagi nasabah BRI yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan mendukung pengembangan segmen UMKM yang merupakan *core business* BRI.

Peningkatan Laba dan Penguatan Kondisi Permodalan

Pencapaian kinerja bisnis tersebut menjadikan laba bersih setelah pajak BRI (angka bank saja) menjadi sebesar Rp21,16 triliun tumbuh 14,2% dibandingkan nilai tahun 2012 yang sebesar Rp18,52 triliun. Nilai laba bersih tersebut adalah keberhasilan BRI dalam meningkatkan NIM BRI menjadi sebesar 8,55%, dari 8,42% di tahun 2012. Selain itu, disaat BRI masih melakukan ekspansi jaringan kerja dan penambahan pekerja, BRI tetap mampu menjaga BOPO pada posisi 60,58% dan CER pada posisi 42,13%.

Sementara disisi permodalan, BRI memiliki kebijakan selain untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan regulator, juga untuk menjaga struktur modal yang mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi dalam pengelolaan bank, baik risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional. Di akhir tahun 2013, Total CAR BRI mencapai 16,99%, sedikit meningkat dari posisi 16,95% di tahun 2012.

Laporan Direktur Utama

Tantangan yang dihadapi dan solusi

Secara umum, sepanjang tahun 2013 kinerja pencapaian bisnis BRI menghadapi cukup banyak tantangan, diantaranya terkait perubahan kondisi perekonomian domestik seiring kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM serta perekonomian global yang belum pulih.

Kenaikan tingkat inflasi tersebut disertai dengan defisit transaksi berjalan akibat pelemahan permintaan komoditas Indonesia dan pelemahan nilai tukar rupiah sehingga BI meningkatkan suku bunga acuannya. Akibatnya, kegiatan investasi mengalami perlambatan dan pertumbuhan kredit terkena imbasnya. Disisi lain, inflasi ikut andil dalam penurunan daya beli masyarakat, yang selanjutnya menyebabkan kemampuan menabung berkurang, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga yang dapat diserap oleh perbankan.

Dalam menghadapi tantangan diatas, BRI konsisten untuk tetap fokus mengembangkan segmen UMKM yang disertai dengan peningkatan peran teknologi informasi, serta terus meningkatkan penetrasi pasar melalui peningkatan akses layanan. Sementara itu, terkait pemenuhan SDM yang berkualitas, kegiatan rekrutmen juga dilakukan ditingkat regional dimana program pelatihan telah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis BRI. Dalam hal ini BRI telah menambah sentra pendidikan di Medan, Sumatera Utara, sehingga secara keseluruhan BRI kini memiliki .8 sentra pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tata Kelola Perusahaan – Merealisasikan GCG Excellence

Sebagai bentuk realisasi komitmen GCG *excellence*, BRI melaksanakan seluruh tahapan peningkatan kualitas penerapan GCG yang meliputi perumusan implementasi, evaluasi dan monitoring untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian praktek terbaik dimana seluruh aturan menyangkut tata kelola organisasi diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh segenap lapisan organisasi. BRI senantiasa melakukan peninjauan, penyusunan dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, *The Indonesian Corporate Governance Code* dan *GCG Charter* serta memperhatikan perkembangan terkini termasuk pemenuhan kaidah *ASEAN Corporate Governance Scorecard* untuk mendapatkan *feed-back* peningkatan kualitas penerapan GCG.

Untuk menjamin implementasi praktek-praktek GCG terbaik di seluruh lapisan organisasi, BRI secara konsisten melaksanakan program sosialisasi internal dalam rangka peningkatan *awareness* terhadap GCG, pengembangan GCG *Tools* yang meliputi pengembangan *whistleblowing system*, sistem pengaduan nasabah, penerapan *e-procurement*, pembentukan Pakta Integritas, dan sistem OPRA. Untuk memastikan tercapainya tingkat *awareness* yang merata di seluruh jajaran, BRI memberlakukan penyusunan dan penandatanganan Pakta Integritas secara berkala. Sedangkan untuk melaksanakan proses monitoring terkait pelaksanaan GCG, BRI juga telah mengembangkan *Dashboard Kepatuhan* yang berperan sebagai *early warning system* terhadap pelaksanaan GCG BRI.

BRI secara berkala juga melaksanakan kegiatan monitoring sebagai tahap lanjutan dari upaya peningkatan kualitas implementasi GCG, yakni pelaksanaan *assessment* GCG baik dengan metode *self assessment* sesuai ketentuan regulator, maupun pelaksanaan *third party assessment*, evaluasi kinerja Perusahaan berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan

Laba bersih BRI di tahun 2013, tumbuh **14,27%** mencapai **Rp21,35 triliun**.

Laporan Direktur Utama

BRI telah menerapkan manajemen risiko secara terpadu berdasarkan asas **three lines of defense** serta membentuk fungsi manajemen risiko yang independen dari fungsi bisnis dan audit.

serta evaluasi terhadap kebijakan dan sistem BRI. Hasil monitoring tersebut termasuk rekomendasi yang diberikan oleh assesor independen untuk digunakan sebagai *feed back* bagi upaya peningkatan kualitas penerapan GCG.

Sepanjang tahun 2013, sebagai upaya peningkatan kualitas penerapan GCG, BRI telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan diantaranya: Kick Off Revitalisasi Budaya Kerja, Eksternalisasi implementasi *Corporate Governance* BRI kepada *Stakeholders* BRI, *Brainstorming* Nilai-Nilai Budaya Dasar BRI (*Core Values*), *Training* untuk *Change Agent* untuk memastikan terjadinya perubahan dan internalisasi budaya kerja, *self assesment* kualitas penerapan GCG sesuai metode Bank Indonesia, assesment melalui CGPI, dan sebagainya.

Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan keteguhan komitmen Manajemen dan seluruh jajaran insan BRI dalam penerapan GCG. Bagi BRI, upaya peningkatan kompetensi SDM dalam bidang operasional dan pengembangan bisnis akan lebih bermakna dan memberi hasil optimal bagi seluruh pemangku kepentingan jika disertai dengan upaya peningkatan integritas dalam melaksanakan seluruh tugas yang diberikan. Integritas hanya dapat dibentuk melalui penerapan terbaik praktek-praktek dan kaidah GCG secara optimal.

Pengelolaan Risiko – Mengatasi Tantangan Menjadi Peluang.

BRI menetapkan fungsi manajemen risiko sebagai fungsi yang independen terhadap fungsi bisnis dan fungsi audit dalam rangka mendapatkan suatu sistem manajemen risiko yang tepat serta menjaga obyektivitas penilaian

dan pengukuran manajemen risiko. Melalui pelaksanaan manajemen risiko tersebut, BRI telah merealisasikan berbagai langkah mitigasi risiko sesuai dengan ketentuan regulator dan kebutuhan untuk mempersiapkan bank dalam menghadapi dan mengatasi seluruh jenis risiko dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya.

BRI telah menerapkan ketentuan Basel I dan Basel II dalam pengelolaan risiko, yang pada prinsipnya tersusun dalam *three lines of defense* yang ditujukan untuk menjaga azas independensi dalam proses pengambilan keputusan. *First line of defense* yaitu unit kerja bisnis/operasional dengan aktivitas fungsional sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengendalian intern dan menjaga kualitas output dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. *Second line of defense* adalah unit kerja manajemen risiko yang memantau penerapan manajemen risiko BRI sesuai toleransi risiko dan *third line of defense* adalah unit kerja audit intern yang berfungsi melakukan pengendalian melalui evaluasi kepada *first line* dan *second line of defense* serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.

Untuk memastikan keberhasilan mitigasi risiko di seluruh aspek operasional yang menjangkau seluruh negeri, BRI menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu (*enterprise-wide risk management*) melalui penerapan empat pilar yang terdiri dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang senantiasa dievaluasi dan diperbaharui secara berkala sesuai dengan perkembangan operasional dan bisnis BRI, pengembangan proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern. Penerapan pengelolaan risiko

Laporan Direktur Utama

terpadu yang meliputi penerapan mitigasi tersebut pada akhirnya menjadikan BRI mampu merubah tantangan menjadi peluang pertumbuhan.

Pengembangan SDM – Meningkatkan Kompetensi dan Integritas

Sebagai implementasi program penyiapan kandidat pemimpin masa depan dalam rangka memastikan pengembangan dan kegiatan bisnis yang berkelanjutan, BRI telah mempersiapkan *future leaders* melalui Program Pengembangan Staf (PPS), dimana setiap peserta *management trainee* yang direkrut akan mengikuti program pendidikan intensif selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan penuh. Terkait hal tersebut, materi *training* dipersiapkan secara komprehensif, sehingga para peserta memiliki kompetensi yang mumpuni baik dalam bidang teknis, manajemen sekaligus memiliki integritas moral yang tinggi untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Pengelolaan SDM dijalankan melalui kerangka arsitektur SDM BRI, yang meliputi *planning, recruiting, developing, retaining and performance monitoring*, sampai dengan *terminating*. Pada setiap tahapan, BRI menerapkan kebijakan persamaan hak dan kesempatan terhadap seluruh pekerjanya, baik dalam penilaian, penetapan jenjang karir maupun penentuan remunerasi. BRI telah mengembangkan sistem penilaian kinerja berdasarkan *balanced scorecard* dan menetapkan *key performance indicator* (KPI) individual dan tim sebagai dasar penilaian kinerja, yang seluruhnya telah didukung sistem teknologi informasi terintegrasi.

Sementara itu, sebagai bagian dari program pemenuhan SDM serta mendukung ekspansi bisnis, pada tahun 2013, BRI telah merekrut 7.319 calon pekerja melalui program PPS,

rekrutmen non staff dan *Professional Hiring*, sehingga total pekerja BRI di tahun 2013 adalah sebanyak 81.238 orang. Selanjutnya, BRI melanjutkan program dengan merealisasikan program pengembangan SDM tersebut dengan dukungan 8 (delapan) sentra pendidikan yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia, dengan materi pendidikan dan pengembangan yang berkelanjutan, baik *hard skill* maupun *soft skill*.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan –Sinergi Berkualitas untuk Pertumbuhan Bersama

Sebagai salah satu bank komersial terkemuka dengan dukungan jaringan kerja dan jangkauan terluas di Indonesia dengan fokus bisnis segmen UMKM, BRI memiliki komitmen dan peran yang tinggi untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Sebagai bagian dari pengembangan komunitas dalam rangka pelaksanaan program PKBL, BRI merealisasikan Program Kemitraan dengan memberikan dana pinjaman berbunga lunak yang diikuti pembinaan kepada para mitra binaan. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan terencana dan melibatkan pihak ketiga yang kompeten, sehingga pada periode tertentu usaha mitra binaan tersebut dapat berkembang secara substansial untuk kemudian beralih status menjadi nasabah komersial BRI yang loyal. Untuk menjadikan program pengawasan dan pembinaan berjalan dengan efektif dan efisien, BRI memprioritaskan pembentukan *cluster-cluster* usaha dalam penyaluran dana Program Kemitraan.

Sementara dalam merealisasikan program Bina Lingkungan, BRI memprioritaskan program peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pelestarian alam. Pilihan prioritas didasarkan pada pertimbangan adanya sinergi dengan penyaluran

dana Program Kemitraan. Penyaluran dana Bina Lingkungan dilakukan dalam bentuk program BRI Peduli dan BUMN Peduli.

Selama tahun 2013, BRI telah menyalurkan dana Program Kemitraan sebesar Rp131,32 miliar dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp146,12 miliar.

Prospek Usaha Tahun 2014

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, di tahun 2013 perekonomian Indonesia mengalami pelambatan pertumbuhan, tingkat inflasi relatif meningkat serta pelemahan nilai tukar. Dua isu utama yang menyebabkan pelemahan kinerja tersebut juga nampaknya masih akan dihadapi oleh Indonesia di tahun 2014, diantaranya: pertama, ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan perekonomian global, dan kedua, berkaitan dengan ketidakpastian perkembangan harga komoditas. Sekalipun pertumbuhan ekonomi domestik yang didukung permintaan rumah tangga tetap kuat, ketidakpastian ekonomi global juga mengakibatkan neraca transaksi berjalan mengalami tekanan yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Menghadapi kondisi tersebut diatas, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia telah menerapkan kebijakan makro ekonomi prudensial untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai rupiah agar berada pada kondisi fundamentalnya serta memperbaiki neraca transaksi berjalan menuju tingkat yang sehat. Untuk mendukung penguatan ekonomi domestik dan daya saing produk, Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat tumbuhnya sistem keuangan inklusif dan berkembangnya sektor UMKM guna mendukung terciptanya sinergi yang mampu mendukung peningkatan daya saing.

Laporan Direktur Utama

BRI menyalurkan dana Program Kemitraan sebesar **Rp131,32 miliar** dan Program Bina Lingkungan sebesar **Rp146,12 miliar** dengan prioritas pembentukan *cluster* usaha rakyat untuk meningkatkan efisiensi penyaluran serta membantu peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelestarian alam

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki iklim usaha, memberikan kepastian usaha melalui revisi daftar negatif investasi, menjalin dialog tripartit untuk memperbaiki iklim perburuhan dan mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur dasar yang selama ini menjadi salah satu kelemahan Indonesia.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan kesiapan seluruh pihak terkait, maka Bank Indonesia memprediksikan bahwa perekonomian tahun 2014 masih dalam tahap konsolidasi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik dan berada dalam kisaran 5,8-6,2%, dan inflasi diperkirakan berada pada kisaran target 4,5 +/- 1%. Pertumbuhan kredit diperkirakan pada kisaran 15-17%, dengan ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga pada kisaran yang sama.

Rencana Strategis

Mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini dan situasi persaingan di industri perbankan baik dalam penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga serta mempertimbangkan *competitive advantage* yang dimiliki, BRI telah menyusun strategi pertumbuhan di tahun 2014 hingga beberapa tahun kedepan. Adapun fokus bisnis yang secara konsisten dikembangkan adalah segmen UMKM dengan menerapkan strategi *selective growth* melalui ekspansi bisnis berbasis strategi *market penetration*, *market development* dan *product development* untuk meningkatkan *fee based income* dan meraih pertumbuhan terbaik di segmen UMKM, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Market penetration*, yakni ekspansi bisnis melalui optimalisasi posisi BRI yang telah memiliki jaringan kerja yang keseluruhannya telah terhubung *real time online* di seluruh Indonesia serta *customer base* terbesar melalui peningkatan aktivitas *cross selling* dan *integrated marketing* dalam pemasaran produk dan jasa bank.
 2. *Market development*, yakni melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh perok Indonesia dengan secara selektif memasuki pasar yang selama ini belum terlayani oleh BRI.
 3. *Product Development*, yakni melengkapi produk yang ada dengan *features* baru maupun menciptakan produk-produk baru
 4. *Product Development*, yakni melengkapi produk yang ada dengan *features* baru maupun menciptakan produk-produk baru sesuai kebutuhan nasabah.
- BRI juga akan berupaya mengembangkan potensi *fee-based income* dan meningkatkan pendapatan bunga dengan cara:
- Fokus ekspansi kredit pada segmen UMKM dan penetrasi segmen komersial serta korporasi yang memberi *trickle-down effect* pada kegiatan segmen UMKM
 - Menjaga komposisi sumber dana murah (giro dan tabungan) sekitar 60% dari total perolehan DPK.
 - Konsisten merealisasikan program perluasan jaringan kerja operasional untuk meningkatkan kualitas dan layanan jasa perbanan sekaligus meningkatkan *fee based income*.

Laporan Direktur Utama

5. BRI akan memperkuat struktur modalnya, melalui optimalisasi portofolio pinjaman dengan mempertimbangkan efisiensi alokasi modal, dan perbaikan kualitas aset.
6. Mendukung perwujudan konsep *financial inclusion* melalui perluasan akses layanan finansial dengan dukungan jaringan kerja sesuai potensi bisnis. Pembukaan unit kerja baru dilakukan secara selektif dan cermat.
7. Merealisasikan program penambahan dan peningkatan kompetensi SDM di seluruh lini, agar mampu berperan menjadi *point of sales* yang ikut menunjang pertumbuhan bisnis BRI.

Penutup

Atas nama Direksi Perseroan, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami, kepada Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan pengarahannya dan bimbingan, serta kepada para nasabah dan mitra usaha Perseroan atas kerjasamanya dan dukungannya.

Terlebih lagi, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pekerja dan keluarganya atas kerja keras, dedikasi dan kontribusinya kepada Perseroan sehingga pada tahun 2013, BRI kembali dapat meraih kinerja yang baik. Kami semakin yakin bahwa dimasa mendatang seluruh

jajaran akan dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi sehingga BRI mampu memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, melalui setiap tantangan dan mampu memanfaatkan peluang pertumbuhan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Sofyan Basir
Direktur Utama

Direksi



Achmad Baiquni
Direktur Keuangan

Djarot Kusumayakti
Direktur Bisnis Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

Gatot Mardiwasiso
Direktur MSDM

Asmawi Syam
Direktur Bisnis Kelembagaan
dan BUMN

Lenny Sugihat
Direktur Pengendalian
Risiko Kredit



Sarwono Sudarto
Direktur Operasional

A. Toni Soetirto
Direktur Bisnis Konsumer

Randi Anto
Direktur Kepatuhan

Suprajarto
Direktur Jaringan dan Layanan

Sofyan Basir
Direktur Utama

Sulaiman Arif Arianto
Direktur Bisnis Komersial

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris

Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2013
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2013 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh
atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Bunasor Sanim
Komisaris Utama
Merangkap Komisaris Independen



Mustafa Abubakar
Wakil Komisaris Utama



Heru Lelono
Komisaris



Hermanto Siregar
Komisaris



Vincentius Sony Loho
Komisaris



Aviliani
Komisaris Independen



Adhyaksa Dault
Komisaris Independen



Ahmad Fuad
Komisaris Independen

Surat Pernyataan Anggota Direksi

Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2013
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2013 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh
atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Sofyan Basir
Direktur Utama



Sarwono Sudarto
Direktur Operasional



Achmad Baiquni
Direktur Keuangan




Sulaiman Arif Arianto
Direktur Bisnis Komersial



Lenny Sugihart
Direktur Pengendalian
Risiko Kredit



A. Toni Soetirto
Direktur Bisnis Konsumer



Asmawi Syam
Direktur Bisnis
Kelembagaan dan BUMN



Suprajarto
Direktur Jaringan dan Layanan



Djarot Kusumayakti
Direktur Bisnis Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah



Randi Anto
Direktur Kepatuhan



Gatot Mardiwasis
Direktur Manajemen
Sumber Daya Manusia



Profil Perusahaan

54 Nama, Alamat & Informasi Umum Perusahaan

56 Sekilas Bank BRI

58 Milestone Bank BRI

60 Visi, Misi dan Nilai Utama Perusahaan

62 Produk dan Jasa Perbankan

64 Peta Wilayah dan Jaringan Kantor

66 Jaringan Kantor BRI

68 Struktur Organisasi

70 Entitas Anak dan Asosiasi

71 Lembaga Penunjang Pasar Modal



“ Inovasi dan Perkembangan Fitur Produk ”

Inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan melalui peluncuran fitur produk baru, maupun pengayaan fitur yang ada.

Profil Perusahaan

Nama, Alamat dan Informasi Umum Perusahaan

“ Bank terbesar di Segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan layanan *microbanking* terbesar di Indonesia maupun di dunia, didukung oleh **9.808 unit kerja** di seluruh Indonesia. “

“

Nama Perusahaan:

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.

Bidang Usaha:

Perbankan

Pendirian Perusahaan:

18 Desember 1968

Dasar Hukum Pendirian:

Undang-Undang No 21 Tahun 1968

Kepemilikan:

Pemerintah Indonesia 56,75%

Publik 43,25%

Modal Dasar:

Rp15.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh:

Rp 6.167.290.500.000

Pencatatan di Bursa:

Saham Perseroan telah dicatitkan
di Bursa Efek Jakarta pada tanggal
10 November 2003 dengan kode
perdagangan BBRI.

Kantor Pusat

Gedung BRI I Jln Jenderal Sudirman
Kav 44-46 Jakarta, 10210

Tel :

(62-21) 251-0244, 251-0254
251-0264, 251-0269, 251-0279

Fax :

(62-21) 250-0065, 250-0077

Website :

www.bri.co.id

Alamat Kontak

Divisi Sekretariat Perusahaan
Gedung BRI 1 Lt. 20
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210

Email:

humas@bri.co.id

Call center :

14017/(62-21) 500017/5798 7400

RATING BRI (Tahun 2013)

FITCH (Oktober 2013)

Long Term Foreign Currency IDR	BBB-, Stable Outlook
Short Term Foreign Currency IDR	F3
Support Rating Floor	BBB-
Support Rating	2
Viability Rating	bb+
National Long-Term Rating	AAA (Idn), Stable Outlook
Rupiah Subordinated Debt	A+ (idn)
Senior Unsecured Notes	BBB-

STANDARD AND POORS (Mei 2013)

Outlook	Stable
Long Term Foreign Issuer Credit	BB+
Long Term Local Issuer Credit	BB+
Short Term Foreign Issuer Credit	B
Short Term Local Issuer Credit	B

MOODY'S (Maret 2013)

Outlook	Stable
Bank Deposit	Baa3/P-3
Bank Financial Strength	D+
Baseline Credit Assessment	Baa3
Adjusted Baseline Credit Assessment	Baa3
Senior Unsecured Notes	Baa3

PEFINDO (Januari 2014)

National Rating	id AAA, Stable Outlook
-----------------	------------------------

Sekilas Bank BRI



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI", "Bank", atau "Perseroan") berdiri sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Sebagai bank komersial tertua, BRI konsisten memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan hingga saat ini BRI tetap mampu menjaga komitmen tersebut di tengah kompetisi industri perbankan Indonesia. Pemegang Saham mayoritas BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham mencapai 56,75%, sementara sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik.

Dengan dukungan pengalaman dan kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi selama 9 tahun berturut-turut sebagai bank

dengan laba terbesar dan berhasil menduduki peringkat kedua dalam hal aset di antara industri perbankan Indonesia. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras segenap insan BRI, yang secara terus menerus menambah kompetensi, berinovasi dan mengembangkan produk dan jasa perbankan bagi semua segmen bisnis.

Dengan reputasi sebagai penyedia layanan *microbanking* yang telah mengakar di tengah masyarakat Indonesia, BRI senantiasa mengembangkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. BRI terus berupaya menyelaraskan pengembangan bisnisnya dengan perkembangan demografi masyarakat yang merambah ke wilayah perkotaan, yang ditandai dengan munculnya kota-kota sentra ekonomi baru di seluruh wilayah Indonesia.

Selain fokus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan berbagai produk *consumer banking* dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Untuk mendukung upaya tersebut, BRI terus mengembangkan jaringan kerja sehingga kini tercatat sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di Indonesia, yaitu berjumlah 9.808 unit kerja termasuk 3 unit kerja yang berada di luar negeri, yang seluruhnya terhubung secara *real time online*. Dengan basis jumlah nasabah yang besar tercermin dari jumlah rekening yang lebih dari 48 juta rekening simpanan, BRI terus mengembangkan layanan *e-banking* yang dapat diakses masyarakat melalui internet, telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), maupun melalui layanan *e-channel* lainnya seperti *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Cash Deposit Machine (CDM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*,

“ BRI terus mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui **9.808 unit** kerja konvensional maupun *e-channel* dengan jumlah ATM mencapai **18.292 unit** yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia,

”

dan Kiosk dengan total jaringan e-channel ini telah mencapai 104.570 unit.

BRI juga berupaya merambah layanan perbankan bagi pengusaha skala mikro yang beroperasi di dalam pasar-pasar tradisional melalui Teras BRI yang diluncurkan sejak akhir tahun 2009. Teras BRI ini ditujukan untuk menjangkau pedagang di pasar tradisional yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan secara optimal.

Pada tanggal 28 Maret 2013, BRI berhasil menerbitkan *global bond* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai nominal sebesar USD 500.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018 di *Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)* dengan tingkat bunga tetap 2,95% per tahun. Kupon dan *yield Global*

bond BRI tersebut merupakan yang terendah di antara semua obligasi dalam mata uang Dollar Amerika yang pernah diterbitkan oleh perusahaan Indonesia di pasar obligasi internasional dan tercatat terdapat kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebanyak 5,3 kali selama masa penawaran. *Global bond* BRI tersebut memperoleh rating Baa3 dari *Fitch's Rating* dan BBB- dari *Moodys*. Keberhasilan penerbitan *Global Bond* tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat internasional kepada fundamental usaha BRI.

Sebagai bank yang beroperasi ditengah populasi masyarakat terbesar keempat di dunia, BRI akan konsisten dengan tekadnya menjadi partner utama bagi masyarakat di Indonesia dalam mengembangkan perekonomiannya. Dengan dukungan kinerja keuangan

yang semakin kuat, BRI optimis dapat semakin meningkatkan kemampuannya dalam menstimulus pertumbuhan perekonomian secara berkesinambungan di masa mendatang sejalan dengan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia

Milestone Bank BRI

Raden Aria Wiriadimaja pada tanggal 16 Desember 1895, mendirikan *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*, sebuah badan pengelola dana masjid di Purwokerto yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan skema yang sederhana.

Lembaga ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni *Hulp-en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen* (1895), *De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank* atau *Volksbank* dan kembali mengalami perubahan nama menjadi *Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene* (1912). Tahun 1934 berubah menjadi *Algemene Volkscredietbank* (AVB), hingga pada masa pendudukan Jepang, AVB berganti nama menjadi *Syomin Ginko* (1942-1945).

1895

1946

Pemerintah mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN).

1968

Sesuai Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992, BRI berubah status badan hukum

menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

1992

1960

Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968, Pemerintah kembali menetapkan nama Bank Rakyat Indonesia dengan status sebagai bank umum.

Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946, mengubah nama *Syomin Ginko* menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional.



Visi, Misi dan Nilai Utama Perusahaan

Visi

Menjadikan BRI
sebagai Bank Komersial
Terkemuka yang
selalu mengutamakan
Kepuasan Nasabah

Misi

- “Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat”.
- “Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko yang efektif serta praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik”.
- “Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Catatan: Visi dan Misi Perusahaan tersebut ditetapkan melalui SK Direksi BRI Nokep: 81-DIR/REN/02/2013 tanggal: 13 Februari 2013.

Nilai Utama Perusahaan

Integritas

Bertakwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada Kode Etik Perbankan dan Peraturan yang berlaku.

Profesionalisme

Bertanggung jawab, efektif, efisien, disiplin, dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan dan kesempatan.

Keteladanan

Konsisten bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar serta tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang tidak memberikan keteladanan.

Kepuasan Nasabah

Memenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul.

Penghargaan Kepada SDM

Merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang berkualitas serta memperlakukan pegawai berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai sebagai bagian dari Perusahaan dengan mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan. Memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi untuk kepentingan Perusahaan.

Catatan: *Statement* Nilai-nilai Utama Perusahaan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No: S-16-DIR/SSS/SDM/04/99 tertanggal 26 April 1999.

Produk dan Jasa Perbankan



“BRI siap memenuhi kebutuhan nasabah dengan ragam produk perbankan yang berkualitas, baik untuk kredit, penyimpanan dana, layanan jasa perbankan, layanan transfer dalam dan luar negeri dengan dukungan jaringan berbasis teknologi terkini.”

Produk Simpanan

1. BritAma Rupiah
2. BritAma Valas
3. BRI Junio
4. Simpedes
5. Simpedes TKI
6. Tabungan Haji
7. Deposito BRI Rupiah
8. Deposito BRI Valas
9. Deposit On Call (DOC)
10. GiroBRI Rupiah
11. GiroBRI Valas

Produk Pinjaman

Kredit Mikro

1. Kupedes
2. KUR Mikro

Kredit Ritel Komersial

- | | | |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Kredit Agunan Kas 4. Kredit Investasi (KI) 5. Kredit Modal Kerja (KMK) 6. KMK Ekspor 7. KMK Konstruksi | <ol style="list-style-type: none"> 8. KMK Konstruksi BO-I 9. Kredit Waralaba 10. Kredit SPBU 11. Kredit Resi Gudang 12. Kredit Pemilikan Gudang 13. KMK Talangan SPBU | <ol style="list-style-type: none"> 14. Kredit PPTKIS dan TKI 15. Kredit <i>Pre-Financing</i> 16. Kredit <i>Post-Financing</i> 17. <i>Distributor Financing</i> |
|---|---|--|

Kredit Konsumer

1. **Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)**
 - *Home Ownership Program* – Kerjasama dengan instansi maupun perusahaan-perusahaan
 - KPR Kerjasama
 - KPR Individu
 - KPRS
2. **Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)**
 - KKB Langsung
 - KKB Kerjasama
3. **Kartu kredit**
 - Kartu Kredit Visa
 - Kartu Kredit Mastercard
4. **Briguna Karya**
5. **Briguna Purna**

Kredit Program

1. Kredit Pengembangan Energi Nabati & Perkebunan (KPEN-RP)
2. Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE)
3. Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KPPA)
4. Resi Gudang (Subsidi & Komersial)
5. KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi)
6. KUR Ritel BRI
7. KUR TKI BRI
8. KUR Tanaman Keras

Kredit Menengah dan Korporasi

1. Kredit Modal Kerja (KMK)
2. Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK-E)
3. Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I)
4. Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-K)
5. Kredit Investasi (KI)
6. Kredit Sindikasi

Jasa Bank:

Jasa Bisnis :

1. Bank Garansi
2. Bank Kliring

Jasa Keuangan :

1. Bill Payment
2. Penerimaan Setoran
3. Transaksi Online
4. Transfer dan LLG
5. *Visa on Arrival*

Jasa Kelembagaan :

1. SPP Online
2. *Cash Management* BRI

Jasa E-Banking :

1. ATM BRI
2. *Mobile Banking* BRI
3. *Phone Banking* BRI
4. *Internet Banking* BRI
5. E-BUZZ
6. Kiosk BRI
7. Mini ATM BRI
8. BRIZZI
9. MOCASH

Layanan Bisnis Internasional :

1. Layanan Impor
 - a. Penerbitan *Letter of Credit*
 - b. Penerbitan *Amendment LC*
 - c. Fasilitas Kredit Impor
 - i. *Pre-Impor Financing* (Penangguhan Jaminan Impor)
 - ii. *Post-Impor Financing* (KMKI & Trust Receipt)
2. Layanan Ekspor
 - a. *Advising LC*
 - b. LC Confirmation
 - c. Jasa Penagihan Ekspor
 - i. *Outward Documentary Collection*
 - ii. *Outward Clean Collection*
 - d. *Pre-shipment Financing* (KMKE)
 - e. *Post-shipment Financing*
 - i. Negosiasi Wesel Ekspor
 - i. Diskonto Wesel Ekspor Berjangka
 - i. Rediskonto Wesel Ekspor Berjangka amet
3. *Refinancing LC*
4. *Risk Participation*
5. *Banker Acceptance*
6. *USD Local Settlement*
7. *Guarantee (Standby LC)*
8. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
9. *Bill Purchase Financing*
10. *Money Changer*
11. *BRI Remittance*

Layanan Treasury:

1. Transaksi Valuta Asing/*Foreign Exchange*
2. *Transaksi Swap*
3. *Transaksi Forward*
4. Jasa Wali Amanat
5. Jasa Agen Penjual Efek
6. Jasa Kustodian
7. Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK-BRI)

Layanan BRI Prioritas

Catatan : Penjelasan mengenai Produk dan Jasa lebih lengkap dapat dijumpai pada Sub Bab "Tinjauan Bisnis".

Peta Wilayah dan Jaringan Kantor



“ BRI melayani nasabah di seluruh pelosok negeri dengan dukungan 9.808 unit kerja konvensional dan 104.570 total jaringan *e-channel* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. ”

- Saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui 9.808 unit kerja dan jaringan *e-channel* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
- BRI mengoperasikan 7 jenjang kantor pelayanan, terdiri dari Kantor Pusat, 18 Kantor Wilayah, 453 Kantor Cabang (termasuk 3 Unit Kerja Luar Negeri), 565 Kantor Cabang Pembantu, 950 Kantor Kas, 5.144 BRI Unit, 2.212 Teras BRI, dan 465 Teras BRI Keliling.
- Dengan mempertimbangkan kinerja dan potensi bisnisnya selama tahun 2013, 7 Kantor Cabang Pembantu telah ditingkatkan skala usahanya menjadi Kantor Cabang, 3 Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu dan 43 Teras BRI menjadi BRI Unit.



	2009	2010	2011	2012	2013
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Wilayah	17	18	18	18	18
Kantor Cabang	406	413	431	446	453
Kantor Cabang Pembantu	434	470	502	545	565
Kantor Kas	728	822	870	914	950
BRI Unit	4.538	4.649	4.849	5.000	5.144
Pos Pelayanan Desa	68	-	-	-	-
Teras BRI	217	617	1.304	1.778	2.212
Teras BRI Keliling			100	350	465
Jumlah Unit Kerja Operasional	6.409	6.990	8.075	9.052	9.808
Kantor Inspeksi	14	14	14	16	17
Total Jumlah Unit Kerja	6.423	7.004	8.089	9.068	9.825

Jaringan Kantor BRI

“ Sejak tahun 2009, seluruh jaringan kerja BRI telah terkoneksi secara *real time on-line* “



TerasBRI Kumbasari
Bali



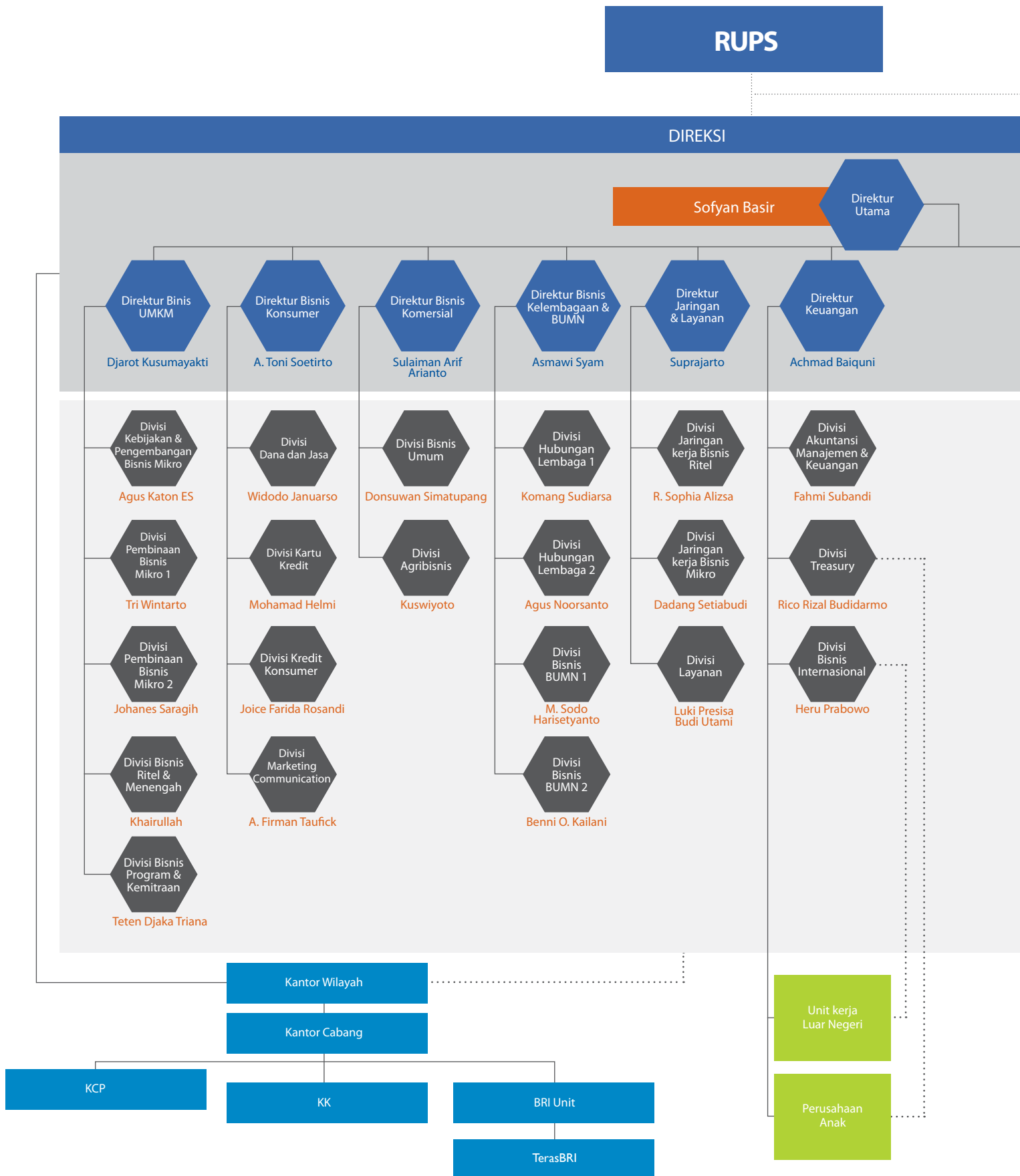
Kantor Kas Gambir,
Jakarta

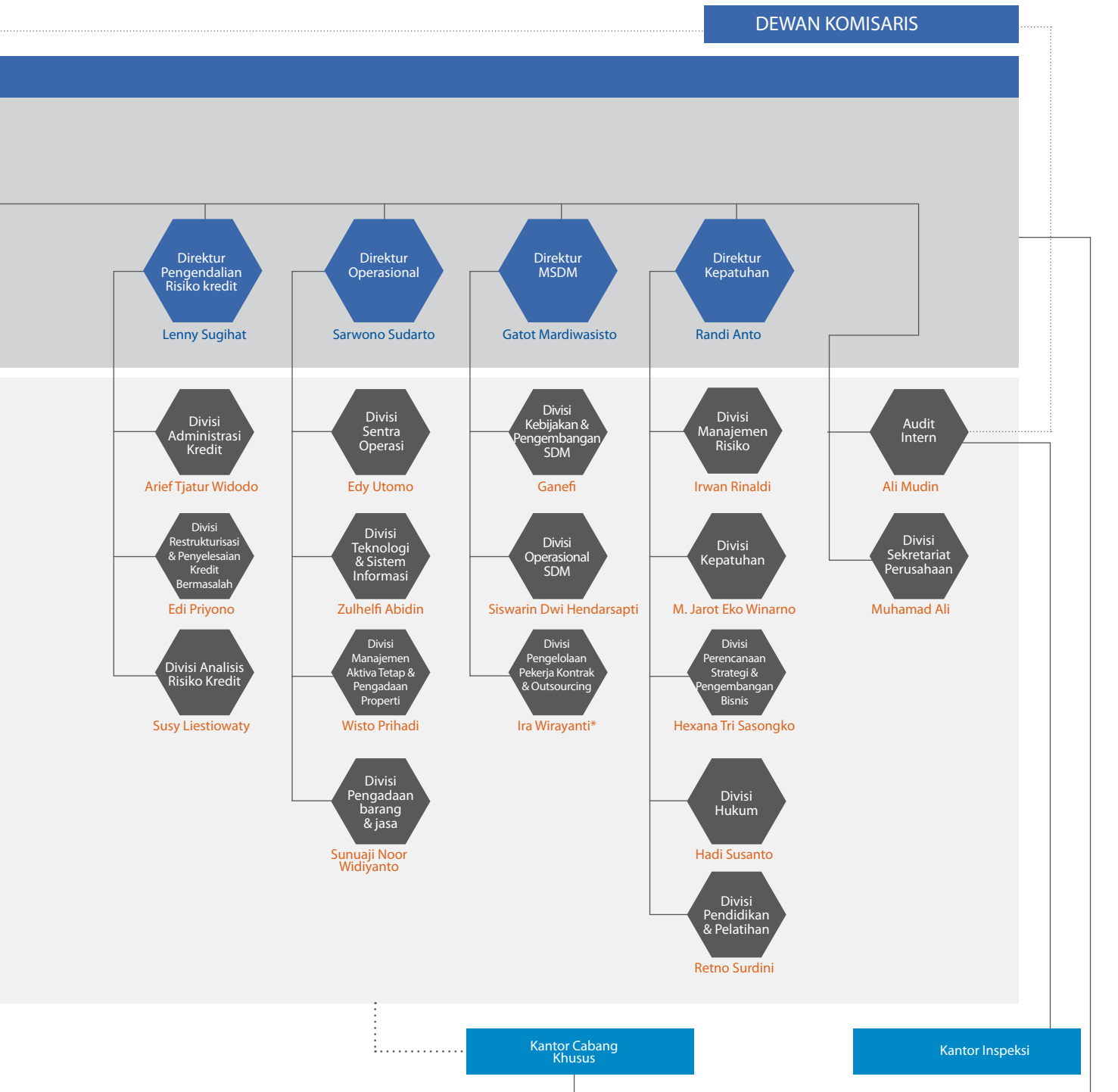


Sentra Layanan Prioritas Semarang,
Jawa Tengah



Struktur Organisasi





Komite Dewan Komisaris :
Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko

— Garis supervisi/Pembinaan
..... Garis Koordinasi

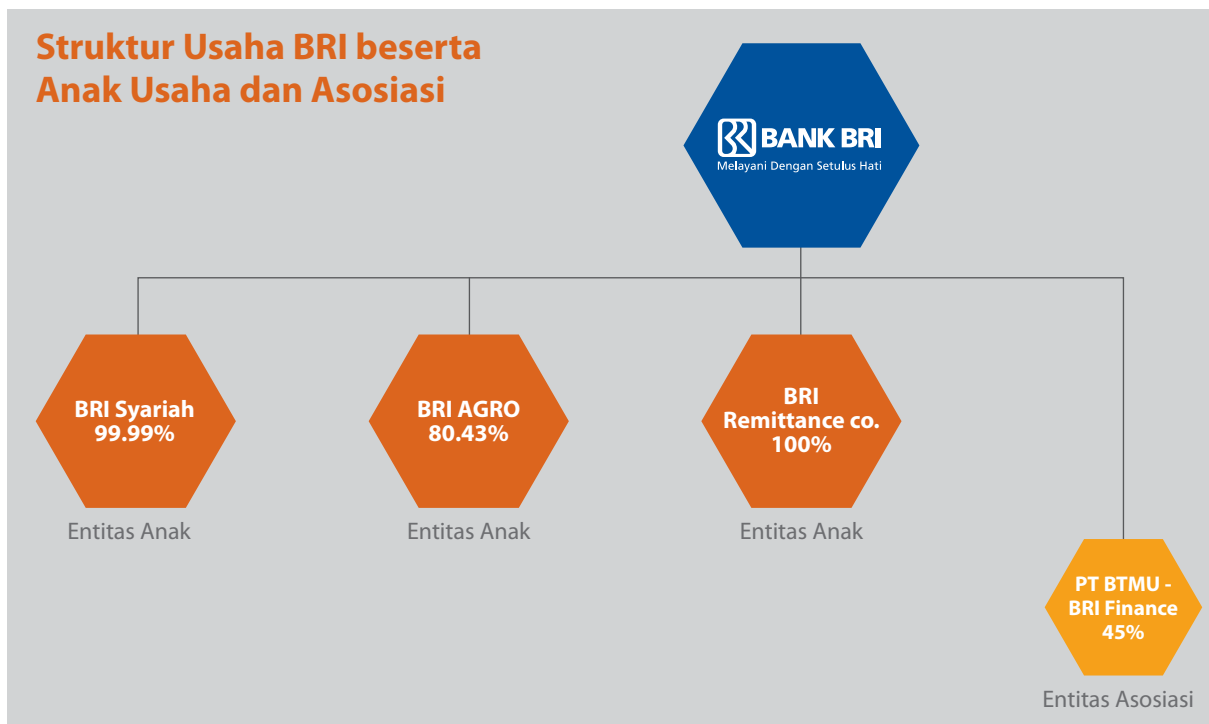
Komite Direksi :
Komite manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Aset, dan Liabilitas (Asset and Liabilities committee/ALCO), Komite Kebijakan SDM, Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi (Information System and Technology Steering Committee/ITSC), Komite Pengarah Project Management Office (PMO) Steering Committee.

* Pejabat pengganti

Entitas Anak dan Asosiasi

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tanggal Penyertaan BRI	Persentase Kepemilikan BRI (%)	Mulai Beroperasi	Alamat
PT Bank BRISyariah (%)	Bank Umum Syariah	19 Desember 2007	99,99%	16 Oktober 2008	Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta
PT Bank Agroniaga Tbk.	Bank Umum Swasta Nasional	3 Maret 2011	80,43%	8 Februari 1990	Plaza GRI Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 No.1, Jakarta
BRIngin Remittance Co. Ltd.	Perusahaan Remittance	16 Desember 2011	100%	7 April 2005	Room 1115, 11/F, Lippo Center, Tower II, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
ENTITAS ASOSIASI					
PT BTMU-BRI Finance	Pembiayaan	1 Agustus 1983	45,00%	1 Agustus 1983	Wisma 46 Lantai 10-Kota BNI, jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta

Struktur Usaha BRI beserta Anak Usaha dan Asosiasi



Lembaga Penunjang Pasar Modal

Akuntan Publik

Purwantono, Suherman, &
Surja (Ernst & Young)
Indonesian Stock Exchange Building
Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 5289 5000
Fax. (62-21) 5289 4100

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp. (62-21) 570 9009

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Indonesia Stock Exchange Building
Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 5299 1003
Fax. (62-21) 5299 1129

Lembaga Pemeringkat Efek

**PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo)**
Panin Tower Senayan City Lantai 17
Jl. Asia Afrika Kav. 19
Jakarta

PT Fitch Rating Indonesia

Prudential Tower Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 5795 7755
Fax. (62-21) 5795 7750

Moody's Singapore Pte. Ltd.

50th Raffles Place #23-06
Singapore Land Tower
Singapore 048623

Standard & Poors

30 Cecil Street
#17-01/08 Prudential Tower
Singapore 049712
Telp. (65) 6438 2881
Fax. (65) 6438 2321

Akses Informasi

Informasi untuk pemegang saham,
berita terbaru dan informasi umum
tentang Perseroan dapat diperoleh
melalui:

Sekretariat Perusahaan

Gedung BRI I
Jl. Jenderal Sudirman no. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Telp. (62-21) 575 1966
Fax. (62-21) 570 0916

WEBSITE

www.bri.co.id

EMAIL

humas@bri.co.id



72

Informasi Bagi Investor

75 Ikhtisar Saham

76 Ikhtisar Obligasi

76 Kronologi Pencatatan Saham

76 Management Stock Option Plan

78 Komposisi Pemegang Saham

78 Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham BRI

80 Dividen dan Kebijakan Dividen

81 Obligasi Sub-Ordinasi

81 Obligasi Senior USD



“ Kinerja Saham Terjaga “

Disaat IHSG tahun 2013 turun 0,98% dari tahun 2012, harga saham BBRI meningkat 4,32% dan ditutup pada posisi Rp. 7.250 dengan volume perdagangan yang solid dan likuid

**Informasi
Bagi Investor**

Informasi Bagi Investor

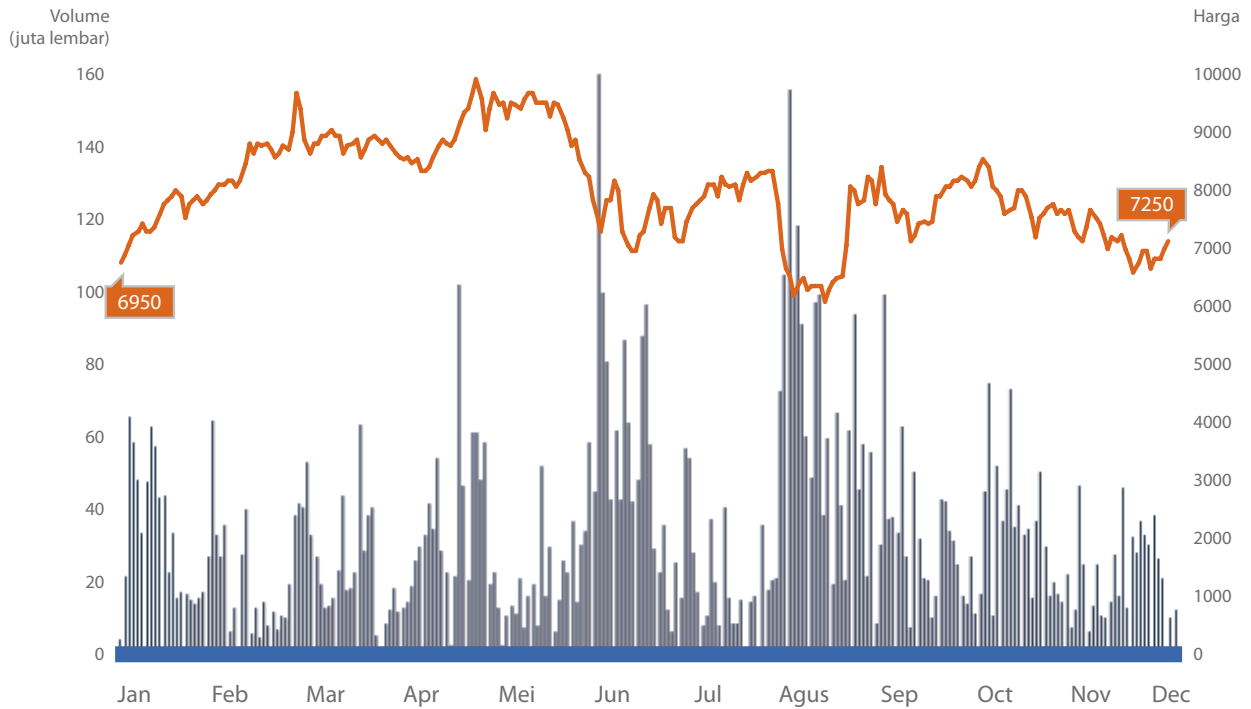


“ Saham BRI, dengan kode perdagangan BBRI, mulai tercatat di Bursa tanggal 10 November 2003. Nilai kapitalisasi saham BBRI per 31 Desember 2013 adalah Rp178,85 triliun, terbesar ke 7 (tujuh) di Bursa Efek Indonesia “

“ Harga saham BBRI sebesar **Rp7.250** di akhir tahun 2013 menunjukkan peningkatan sekitar **17x** dibandingkan harga saat IPO “

Informasi Bagi Investor

Grafik Harga Saham BBRI Tahun 2013



Tabel Perkembangan Harga Saham BRI

Tahun	Harga lembar/Saham				Jumlah Lembar Saham	Volume Transaksi (Lembar)	Nilai		Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutup			Frekuensi (Kali)	(Rp Triliun)	
2012	6,850	7,850	5,150	6,950	24,669,162,000	7,909,952,500	510,037	53,41	169,74
TW 1	6,850	7,250	6,400	6,950	24,669,162,000	2,084,086,000	139,315	14,17	169,74
TW 2	7,000	7,150	5,150	6,350	24,669,162,000	2,500,207,500	152,642	15,61	155,08
TW 3	6,400	7,550	6,250	7,450	24,669,162,000	1,719,729,500	108,461	11,97	181,95
TW 4	7,450	7,850	6,800	6,950	24,669,162,000	1,605,929,500	109,619	11,66	169,74
2013	7,050	9,650	6,350	7,250	24,669,162,000	8,507,730,500	729,566	87,40	178,85
TW 1	7,050	9,450	7,050	8,750	24,669,162,000	1,779,730,500	136,123	17,44	215,86
TW 2	8,700	9,650	7,100	7,750	24,669,162,000	2,377,318,000	188,110	32,22	191,19
TW 3	7,950	8,350	6,350	7,250	24,669,162,000	2,540,670,000	218,134	22,47	178,85
TW 4	7,350	8,450	6,800	7,250	24,669,162,000	1,809,875,000	187,199	15,27	178,85

Informasi Bagi Investor

Ikhtisar Obligasi

No.	Jenis	Tanggal Emisi	Jangka Waktu	Nilai Emisi	Jatuh Tempo	Kupon	Rating	Listing	Outstanding
1	Obligasi Subordinasi I*	9 Jan 2004		Rp 500 Milyar	9 Jan 2014 (dengan opsi beli pada 9 Jan 2010)	13,50% p.a. (tahun 1 s/d 6); 23,5% p.a. (tahun 7 s/d 10); dibayar triwulan	Id AA+ (Pefindo)	Bursa Efek Surabaya	Telah dilakukan pelunasan tanggal 11 Januari 2010
2	Obligasi Subordinasi II	22 Des 2009	5 Tahun	Rp 2 Triliun	22 Des 2014	10,95% p.a. (tahun 1 s/d 5); dibayar triwulan	A+ (idn) (Fitch)	Bursa Efek Indonesia	Rp 2 Triliun
3	Obligasi Senior USD	28 Mar 2013	5 Tahun	USD 500.000	28 Mar 18	2,95% p.a. (tahun 1 s/d 5); dibayar semesteran	Baa3 (Moody's) BBB-(Fitch)	Singapore Exchange	USD 500.000

Kronologi Pencatatan Saham

Tahun	Pemilik Saham				Nominal (Rp)	Total Jumlah Saham Disetor Akhir Periode	Nilai Modal Disetor Akhir Periode (Rp juta)	Aksi Korporasi
	Pemerintah		Masyarakat					
	Jumlah	%	Jumlah	%				
2003	7,000,000,000	59,50%	4,764,705,000	40,50%	500	11,764,705,000	5,882,353	IPO, tanggal 10 November 2003 Jumlah Saham setelah IPO 11.764.705.000 (tercatat di BEJ)
2004	7,000,000,000	59,07%	4,850,090,500	40,93%	500	11,850,090,500	5,925,045	Excercise MSOP 85,385,500
2005	7,000,000,000	58,16%	5,035,700,500	41,84%	500	12,035,700,500	6,017,850	Excercise MSOP 185,610,000
2006	7,000,000,000	56,97%	5,286,421,500	43,03%	500	12,286,421,500	6,143,211	Excercise MSOP 250,721,000
2007	7,000,000,000	56,83%	5,317,800,500	43,17%	500	12,317,800,500	6,158,900	Excercise MSOP 31,379,000
2008	7,000,000,000	56,79%	5,325,299,500	43,21%	500	12,325,299,500	6,162,650	Excercise MSOP 7,499,000
2009	7,000,000,000	56,77%	5,329,852,500	43,23%	500	12,329,852,500	6,164,926	Excercise MSOP 4,553,000
2010	7,000,000,000	56,75%	5,334,581,000	43,25%	500	12,334,581,000	6,167,291	Excercise MSOP 4,728,500
2011	14,000,000,000	56,75%	10,669,162,000	43,25%	250	24,669,162,000	6,167,291	Stock split 1:2 tanggal 11 Januari 2011
2012	14,000,000,000	56,75%	10,669,162,000	43,25%	250	24,669,162,000	6,167,291	
2013	14,000,000,000	56,75%	10,669,162,000	43,25%	250	24,669,162,000	6,167,291	

BRI melakukan Penawaran Saham Perdana sejumlah 2.047.060.000 Saham Biasa Atas Nama Seri B yang merupakan saham divestasi Negara Republik Indonesia dan sejumlah 1.764.705.000 Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang dikeluarkan dari Portepel pada tanggal 31 Oktober 2003, sesuai Pernyataan Pendaftaran efektif yang dikeluarkan oleh Bapepam (Surat Ketua Bapepam No. S-2646/PM/2003) tertanggal 31 Oktober 2003. Nilai nominal saham yang ditawarkan adalah sebesar Rp500,00. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan pada tanggal 10 November 2003, dan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

Management Stock Option Plan

Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2003, BRI menyelenggarakan Program Opsi Pembelian Saham bagi Manajemen (Management Stock Option Plan/MSOP). Jumlah saham yang diterbitkan dalam MSOP BRI adalah sebanyak 588.235.250 lembar.

Informasi Bagi Investor

MSOP dilaksanakan dalam tiga tahap yakni MSOP Tahap I, MSOP Tahap II dan MSOP Tahap III. Pelaksanaan MSOP Tahap I dan II mengacu pada peraturan Bapepam-LK terdahulu sedangkan pelaksanaan MSOP Tahap III sudah mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 dan Peraturan BEI No.1-A Lamp. Keputusan Direksi BEJ No. Kep.305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Efek. Masing-masing tahapan MSOP memiliki vesting period selama satu tahun. Saham MSOP yang telah di-exercise sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan MSOP adalah sebesar 569.876.000 lembar.

Masa exercise MSOP Tahap I dan II telah berakhir masing-masing pada tanggal 9 November 2008 dan 9 November 2009, dan sampai dengan akhir masa exercise, terdapat 4,3 juta lembar MSOP Tahap I dan 6,1 juta lembar MSOP Tahap II yang tidak diexercise.

Program MSOP Tahap III yang dimulai pada tanggal 10 November 2005, telah berakhir pelaksanaannya pada tanggal 9 November 2010. Opsi yang dialokasikan dalam MSOP Tahap III tersebut berjumlah 117.647.050 lembar, dimana sampai dengan akhir periode pelaksanaannya, opsi yang di-exercise berjumlah 108.830.000 lembar. Exercise opsi tersebut menyebabkan tambahan equity perusahaan sebesar Rp633.164.224.500,-.

Tahapan MSOP	Jumlah Saham MSOP (Lembar)	Tanggal dimulainya MSOP	Tanggal Berakhirnya Tahapan MSOP	Saham di-exercise
Tahap I	235,294,100	10 November 03	9 November 08	230,999,000
Tahap II	235,294,100	10 November 04	9 November 09	230,047,000
Tahap III	117,647,050	10 November 05	9 November 10	108,830,000
Jumlah	588,235,250			569,876,000

Berakhirnya periode pelaksanaan MSOP Tahap III tersebut mengakhiri rangkaian program MSOP BRI Tahap I-Tahap III yang dimulai bersamaan dengan IPO BRI tanggal 10 November 2003. Keseluruhan opsi yang dialokasikan dalam MSOP Tahap I-Tahap III berjumlah 588.235.250 lembar, dimana sampai dengan akhir periode pelaksanaannya, opsi yang di-exercise berjumlah 569.876.000 lembar. Eksekusi opsi tersebut menyebabkan tambahan equity perusahaan sebesar Rp1.366.089.110.750,00.

	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Jumlah
Modal Disetor	115.500	115.024	54.415	284.938
Agio	106.837	287.559	474.490	686.886
Modal lain-lain (Lembar Saham x option value)	27.117	80.889	10.259	212.265
Jumlah	249.454	483.471	633.164	1.366.089

dalam juta Rupiah)

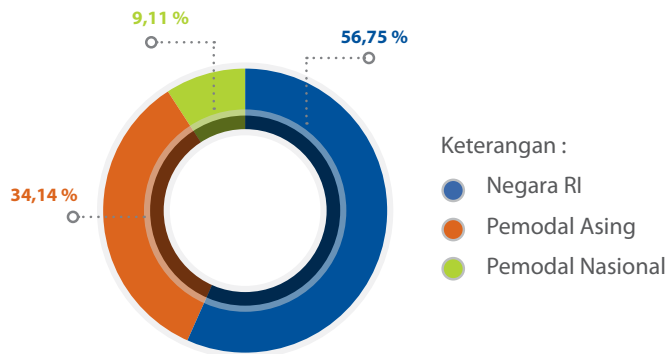
Informasi Bagi Investor

Pemegang Saham Mayoritas BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase mencapai **56,75%**

Komposisi Pemegang Saham

Jumlah Pemegang Saham BRI sampai dengan akhir tahun 2013 adalah 19.380 pemegang saham atau mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2012 yaitu 17.065 pemegang saham. Pemerintah Republik Indonesia tetap merupakan pemegang saham mayoritas BRI dengan kepemilikan saham sebesar 56,75% dan sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing tidak lebih dari 5%. Selain kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah RI, tidak ada investor strategis dalam daftar pemegang saham BRI.

Komposisi Pemegang Saham



	30 Desember 2013		
	Pemilik	Saham	Komposisi
Negara RI	1	14.000.000.000	56.75%
Publik	19.379	10.669.162.000	43.25%
Pemodal Nasional	17.766	2.246.410.715	9.11%
Perorangan	14.111	295.451.503	1.20%
Karyawan	3.041	88.644.500	0.36%
Pemerintah Daerah	1	318.000	0.00%
Institusi	613	1.861.996.712	7.55%
Bank	0	0	0.00%
Koperasi	6	2.554.000	0.01%
Yayasan	37	26.403.000	0.11%
Dana Pensiun	199	201.355.700	0.82%
Asuransi	64	613.666.000	2.49%
Perseroan Terbatas	134	392.735.705	1.59%
Lembaga Keuangan	0	0	0.00%
Reksa Dana	173	625.282.307	2.53%
Pemodal Asing	1.613	8.422.751.285	34.14%
Perorangan	62	1.445.500	0.01%
Badan Usaha asing	1.551	8.421.305.785	34.14%
Total	19.380	24.669.162,000	100.00%

Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham

Perlambatan ekonomi global di tahun 2013 mempengaruhi kondisi pasar modal Indonesia. Hal tersebut nampak dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia yang membukukan angka penutupan pada 30 Desember 2013 di level 4.274,18, turun 0,98% dari level penutupan IHSG di akhir Desember 2012 yang mencapai 4.316,69.

Informasi Bagi Investor



Namun demikian, adanya penambahan 31 emiten baru berhasil menambah nilai kapitalisasi pasar saham sebesar 2,32% dari Rp.3.835 triliun di akhir Desember 2012 menjadi Rp.3.924 triliun di tanggal 30 Desember 2013. Rata-rata nilai transaksi harian saham periode Januari – Desember 2013 juga mencapai Rp6,25 triliun, meningkat sebesar 37,68% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2012 sebesar Rp4,54 triliun.

Sedangkan rata-rata frekuensi transaksi harian periode Januari hingga Desember 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 26,51% menjadi 153.975 kali transaksi, jika dibandingkan perolehan rata-rata frekuensi transaksi di tahun 2012 hanya sebesar 121.712 kali transaksi.

Selain itu, rata-rata volume transaksi harian saham periode Januari hingga

Desember 2013 juga turut naik sebesar 28,51% mencapai 5,50 miliar lembar saham, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2012 hanya mencapai sebesar 4,28 miliar saham.

Kinerja Saham BRI

Saham BRI, dengan kode perdagangan BBRI, mulai tercatat dan diperdagangkan di BEI (dahulu BEJ) sejak tanggal 10 November 2003. Saat ini selain tercatat di papan utama, saham BBRI tercatat sebagai anggota saham blue chips LQ 45 (45 saham terlikuid di BEI), Indeks IDX 30, Indeks Bisnis-27, Indeks Kompas 100 dan Indeks Sri Kehati.

Sebagaimana kondisi bursa, pada tahun 2013 perkembangan harga saham BBRI berfluktuasi mengikuti perkembangan kondisi perekonomian dan sentimen pasar modal global. Fluktuasi harga saham BBRI di tahun 2013 berkisar dari

harga terendah adalah Rp6.350 dan harga tertinggi tercatat sebesar Rp9.650. Sedangkan volume transaksi mengalami peningkatan dari total 7.909,9 juta lembar saham selama tahun 2012 menjadi 8.507,7 juta lembar saham.

Sebagai salah satu saham unggulan, saham BBRI dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp178,85 triliun per akhir Desember 2013, turut terkena imbas sentimen pasar yang membuat investor cenderung berhati-hati dengan kinerja saham keuangan. Hingga paruh pertama tahun 2013, pasar modal Indonesia tumbuh tinggi hingga menembus level 5.000 akan tetapi adanya isu pengurangan stimulus di Amerika Serikat seiring membaiknya data perekonomian Amerika Serikat menyebabkan para investor asing mulai menarik dananya dari *emerging market*.

Informasi Bagi Investor

Seperti tampak pada grafik dan tabel harga saham di halaman 75, harga saham BBRI juga mengalami penurunan pada semester kedua 2013 walaupun sempat mencapai harga tertinggi di Rp9.650,- Pemicu utama penurunan sepanjang paruh kedua 2013 adalah isu penghentian stimulus oleh the Fed dan memburuknya kondisi makro ekonomi Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya inflasi dan semakin besarnya defisit transaksi berjalan Indonesia.

Walaupun ada berbagai pengaruh negatif dari luar maupun dalam negeri, hingga akhir Desember 2013, harga saham BRI masih mengalami peningkatan dari Rp6.950 di akhir 2012 menjadi Rp7.250 karena keyakinan investor terhadap kondisi fundamental BRI dengan volume perdagangan yang terus meningkat. Sebagaimana diketahui fokus usaha BRI adalah sektor UMKM dengan pemasaran produk lebih berorientasi memenuhi kebutuhan domestik. Perbaikan kinerja BRI, sebagaimana tercermin dari perbaikan NPL, peningkatan kredit yang prudent dan peningkatan laba bersih yang cukup tinggi dan di-informasikan secara rutin pada pelaku pasar. Hal tersebut direspon positif oleh investor sehingga saham BBRI di akhir tahun ditutup meningkat sebesar 4,32% dari posisi penutupan akhir tahun 2012.

Dividen dan Kebijakan Dividen

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari tahun 2013, BRI melakukan pembayaran dividen final tahun buku 2012 sebesar 30% dari laba bersih atau senilai Rp5.556.285,-. Rasio pembayaran dividen ini lebih besar dibandingkan rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2011 yang ditetapkan oleh RUPST 2012, sebesar 20%. Nilai dividen persaham yang dibayarkan pada tanggal 15 April 2013 adalah sebesar Rp 225,2320, atau naik 84,2% dari nilai pembayaran dividen persaham tahun 2011 yang sebesar Rp122,28.

Tabel Pembayaran Dividen BRI

Tahun Dividen	Tanggal Pembayaran	Jumlah Dividen (Rp Miliar)	Dividen per Lembar Saham* (Rp)	Rasio Pembayaran Dividen
2003	23 Juli 2004	990	42,1	75,01%
2004	5 Juli 2005	1.816	76,47	50,00%
2005	10 Juli 2006	1.904	78,09	50,00%
2006	2 Juli 2007	2.129	86,52	50,00%
2007	7 Juli 2008	2.419	98,17	50,00%
2008	3 Juli 2009	2.085	84,41	35,00%
2009	1 Juli 2010	2.192	88,91	30,00%
2010	15 Juni 2011	2.294	93,01	20,00%
2011	15 Mei 2012	3.017	122,28	20,00%
2012	15 April 2013	5.556	225,2320	30,00%

* Dividen per lembar saham merupakan data dividen setelah dilakukan stock split dengan rasio 1:2 pada tanggal 11 Januari 2011

Pada tahun 2009 dan tahun 2010, BRI melakukan pembagian dividen interim, masing-masing sebesar Rp45,74 per lembar saham dan Rp45,93 per lembar saham yang pelaksanaannya sesuai dengan UU PT No.40 tahun 2007. Besarnya dividen interim tersebut sudah masuk di dalam perhitungan dividen tahunan yang telah disebutkan di atas.

Tahun Dividen	Tanggal Pembayaran	Dividen per Lembar Saham (Rp)
2009	16 Desember 2009	45,74
2010	Desember 2010	45,93

Informasi Bagi Investor

Kebijakan pembagian dividen BRI diatur dalam Prospektus pada saat IPO, yakni pada bagian “Pembagian Dividen”, yang menyatakan bahwa BRI akan memberikan dividen dengan memperhatikan kondisi keuangan dan rencana pengembangan usaha. Ketetapan besaran *dividend pay-out ratio* dan/atau jumlah dividen tiap tahun buku dilakukan melalui RUPS.

Obligasi Sub-Ordinasi

Pada bulan Desember 2009 BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi II dalam denominasi Rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga 10,95% yang tercatat di bursa pada tanggal 22 Desember 2009. Fitch memberikan rating A+ terhadap Obligasi Subordinasi tersebut dan BRI berhasil menghimpun dana sebesar Rp2 Triliun dalam penerbitan Obligasi tersebut.

Penerimaan hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya digunakan perusahaan sebagai modal pelengkap sesuai dengan ketentuan BI, yang dimanfaatkan seluruhnya untuk ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Obligasi Senior USD

Pada tahun 2013, BRI berhasil menerbitkan obligasi senior berdenominasi USD dengan jangka waktu 5 tahun dan kupon 2,95% yang tercatat di bursa Singapura (*Singapore Exchange*) pada tanggal 28 Maret 2013. Obligasi ini diberikan rating BBB- oleh Fitch dan rating Baa3 oleh Moody's. Dalam penerbitan obligasi global ini, BRI berhasil menghimpun dana sebesar USD. 500 juta.

Penerimaan hasil penawaran Obligasi tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya digunakan perusahaan untuk mendanai ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian, diversifikasi *funding mix* dan pengelolaan *maturity profile* valas BRI.



82

Tinjauan Operasional

84 Prospek Dan Strategi Umum

88 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

98 Pemasaran

106 Teknologi dan Sistem Informasi

110 Sentra Operasi

114 Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa

116 Manajemen Risiko



“ Terjaganya Efisiensi Operasional yang Optimal ”

Melalui penerapan strategi efisiensi operasional serta peningkatan produktivitas seluruh jajaran untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

Tinjauan Operasional

Prospek Bisnis dan Strategi Umum



Prospek Bisnis

Di tahun 2013, perekonomian Indonesia kembali menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang masih belum kondusif. Perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,78%, lebih baik dari pertumbuhan beberapa negara asia lainnya seperti India, Malaysia, Singapura dan Thailand. Tetap tingginya permintaan domestik masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sepanjang tahun 2013, pelemahan pertumbuhan ekonomi beberapa negara maju, terutama di kawasan Eropa dan Asia masih berlanjut. Hal ini membuat permintaan produk Indonesia dari kawasan tersebut melemah. Sementara itu, program stimulus yang dijalankan Amerika Serikat mulai menunjukkan indikasi keberhasilan pada triwulan ke III, sehingga membuat Pemerintah AS merencanakan program

pengurangan stimulus (*tapering off*) yang akan direalisasikan mulai tahun 2014. Rencana tersebut menimbulkan tantangan baru terhadap perekonomian global, berupa penguatan dollar Amerika terhadap seluruh mata uang dunia, termasuk Rupiah.

Disisi lain, berkurangnya permintaan produk Indonesia, terutama komoditi perkebunan dan pertambangan membuat defisit perdagangan Indonesia semakin lebar. Untuk mengendalikan defisit dan menghemat pengeluaran negara, pemerintah telah menyesuaikan harga BBM dengan konsekuensi peningkatan laju inflasi.

Selain itu, rencana pengurangan stimulus oleh Pemerintah AS mendorong Pemerintah Indonesia untuk berjaga-jaga dan merencanakan pertumbuhan ekonomi yang *soft-landing* dengan menaikkan tingkat BI rate dari posisi

5,75% di akhir tahun 2012 menjadi 7,50% pada akhir tahun 2013, serta mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru untuk merangsang investasi langsung. Pada akhirnya, tingkat inflasi berhasil dijaga pada level 8,38% dari angka perkiraan 9,0%, cadangan devisa per akhir Desember 2013 mencapai US\$99,39 miliar, serta kurs rupiah berada pada level Rp12.171/US\$, atau melemah 19,5% dari Rp9.793/US\$.

Di tahun 2014 dan beberapa tahun ke depan, tantangan yang dihadapi Indonesia akan semakin besar. Selain persoalan nilai tukar, beberapa persoalan mendasar yang harus dipecahkan adalah perbaikan neraca perdagangan dan peningkatan investasi. Sebagai negara yang telah masuk kelompok negara berpendapatan menengah dengan income perkapita tahun 2012 sekitar US\$4.154 (Human Development Index 2012, World Population Data Sheet, Data Worldbank.org),

“
Perekonomian Indonesia
mampu tumbuh **5,78%**,
lebih baik dari pertumbuhan
beberapa negara kawasan
Asia, didukung oleh tetap
tingginya permintaan
domestik.
”



Indonesia harus berupaya keras untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Mengingat konsumsi domestik masih merupakan pendorong pertumbuhan utama, peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik menjadi salah satu pilihan. Untuk merealisasikan hal ini, Indonesia harus segera menyediakan infrastruktur dasar, meliputi: sarana transportasi, ketenaga listrik dan telekomunikasi, dan kebijakan yang jelas sehingga hambatan masuknya investasi langsung semakin berkurang. Ketersediaan infrastruktur dasar tersebut juga diharapkan membuat kegiatan ekonomi dapat berlangsung lebih efisien.

Memperhatikan hal tersebut, Bank Dunia dan beberapa pengamat ekonomi memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh pada kisaran yang tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi ditahun 2014 dan beberapa tahun kedepan masih akan didominasi oleh permintaan domestik, sehingga peluang bagi berkembangnya industri perbankan masih terbuka.

Data Bank Dunia menunjukkan, dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dan tingkat income percapita yang cukup besar, baru 20% penduduk Indonesia berusia diatas 15 tahun yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal (Data Global Financial Inclusion Index-Bank Dunia-2011), lebih rendah dari Thailand (77%), Malaysia (66%), Filipina (26%) dan

Vietnam (21%). Selain itu, jumlah kelas menengah Indonesia dengan pengeluaran sekitar Rp20.000 – Rp200.000,- di tahun 2010 telah mencapai 100 juta orang.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia memperkirakan pengguna internet di Indonesia akan mencapai 82 juta pengguna di akhir tahun 2013, dan menjadi 139 juta orang pada 2015, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan posisi akhir tahun 2012 dengan 63 juta pengguna. Disamping itu penetrasi pelanggan seluler telah mencapai sekitar 270 orang. Dari informasi tersebut, terlihat bahwa potensi bisnis *e-banking* masih sangat luas, terutama mengingat pengguna kartu debit BRI yang mencapai 19,4 juta, atau sekitar 50% dari total rekening Tabungan.

Prospek dan Strategi Umum

BRI bertekad memanfaatkan peluang pertumbuhan dengan fokus pada segmen UMKM, menerapkan strategi *selective growth* melalui ekspansi bisnis berbasis strategi *market penetration*, *market development* dan *product development* untuk meningkatkan *fee based income* dan meraih pertumbuhan terbaik di segmen MKM.

Sementara itu, mayoritas pelaku ekonomi domestik berasal dari sektor usaha Mikro Kecil Menengah, dengan jumlah pelaku sekitar 56,5 juta, dimana sekitar 55,9 juta diantaranya adalah pengusaha Mikro. Dari potensi pengusaha Mikro ini, baru sekitar 30%-nya yang menikmati fasilitas perbankan. (Lihat juga uraian "MDNA, Tinjauan Bisnis-Segmen Mikro").

Potensi pasar yang terlihat dari data-data tersebut menunjukkan bahwa peluang perbankan untuk memasarkan produk dan jasa perbankan konvensional, seperti Simpanan berupa Tabungan, Deposito dan Giro, Pinjaman berupa Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK), serta jasa perbankan melalui transaksi *e-banking* di Indonesia masih sangat besar. Dengan pengalaman panjang di bidang perbankan, terutama di segmen mikro, BRI yang telah memiliki infrastruktur jaringan yang terbesar dan tersebar hingga seluruh pelosok negeri bertekad memanfaatkan peluang pertumbuhan tersebut.

Strategi Umum

Prospek ekonomi yang baik dan stabil dalam jangka pendek, menengah maupun panjang menjadi landasan bagi BRI dalam menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tetap tumbuh secara konsisten dengan fokus tetap pada segmen MKM. Namun demikian, dengan tetap memperhatikan kondisi eksternal selama tiga tahun ke depan, BRI lebih mengedepankan strategi *selective growth* dalam program kerja di masing-masing lini bisnis. Agar tercipta suatu sinergi yang baik, BRI bertekad untuk mengkolaborasikan semua sumberdaya yang dimiliki. Sasaran utama (destination statement) yang

direncanakan pada tahun 2013 adalah: "Bank dengan pertumbuhan bisnis Mikro, Kecil dan Menengah terbaik di Indonesia".

Dalam tiga tahun ke depan bisnis utama BRI akan diarahkan tidak hanya pada penyaluran kredit namun juga aktifitas penghimpunan dana masyarakat serta penyediaan jasa perbankan, sehingga pendapatan BRI tidak hanya berasal dari pendapatan bunga tetapi juga melalui *fee based income*.

Pembiayaan kepada segmen bisnis Mikro, Kecil dan Menengah tetap menjadi fokus pertumbuhan kredit BRI. Namun demikian BRI juga memperhatikan peluang bisnis di segmen Korporasi yang memiliki *Trickle Down Business* kepada bisnis MKM.

Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI berupaya untuk mengarahkan pertumbuhan pada dana murah (Giro dan Tabungan) dengan komposisi dana murah dijaga pada kisaran 60% dari total dana masyarakat yang dihimpun.

Selain itu, optimalisasi jaringan kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah terkoneksi *real time online* terus dilaksanakan, dengan mengembangkan penyediaan jasa-jasa perbankan yang mendukung seluruh aktivitas keuangan nasabah baik dalam hal pengelolaan keuangan, maupun dalam hal bertransaksi dengan pihak lain. Strategi ini bertujuan untuk membangun *closed financial system* yang berbasis pada komunitas nasabah, sehingga diperoleh optimalisasi seluruh produk dan jasa yang bersumber dari *closed financial system* tersebut akan meningkatkan perolehan *fee based income*.

Prospek dan Strategi Umum

Sementara itu, untuk menjaga dan meningkatkan pangsa pasar, BRI terus melakukan perluasan jangkauan pelayanan perbankan khususnya melalui *electronic outlets*, seperti *mobile service* BRI serta berbagai jenis outlet lainnya.

Ekspansi bisnis dilakukan melalui strategi *market penetration*, *market development* dan *product development*:

- a. *Market penetration*, yakni optimalisasi posisi BRI yang kini memiliki jaringan kerja yang terhubung secara online di seluruh Indonesia serta *customer base* terbesar, melalui:
 - Peningkatan aktivitas *cross selling* dan *integrated marketing* dalam penjualan produk & jasa bank.
 - Pemanfaatan jaringan kerja secara optimal untuk memperkokoh daya saing BRI di segmen UMKM
 - Meningkatkan kualitas produk & jasa bank untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas nasabah.
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan *e-banking* BRI
- b. *Market Development*, yakni melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dengan secara selektif memasuki pasar yang selama ini belum terlayani oleh BRI, melalui:
 - Optimalisasi basis nasabah dan jaringan kerja untuk menjaring nasabah baru/ potensi pasar baru
 - Pengembangan jaringan kerja ke luar negeri yang potensial.
- c. *Product Development*, yakni melengkapi produk yang ada dengan fitur baru maupun menciptakan produk-produk baru, terutama produk bundling dengan asuransi (*bancassurance*) maupun dengan produk investasi untuk mempertahankan daya saing BRI di industri keuangan. Langkah yang dilakukan mencakup:
 - Kerja sama dengan institusi keuangan non bank untuk produk *bundling*.
 - Pengembangan produk pinjaman dan simpanan dengan skim atau fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia



Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur kunci tercapainya pertumbuhan usaha yang berkualitas dan terjaminnya kelangsungan usaha bagi BRI. Oleh karenanya dalam mengelola dan mengembangkan potensi SDM, BRI senantiasa berupaya agar seluruh pekerja mampu berkembang menjadi katalisator bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas pekerja yang lain, sehingga pada akhirnya bersama-sama menciptakan nilai positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tahapan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan program pengembangan kompetensi individual maupun team pada

seluruh lini SDM, dengan menekankan pentingnya pelaksanaan pelatihan berjenjang dan terstruktur. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah agar SDM BRI memiliki kemampuan mengenali potensi dan karakter calon nasabah yang berkualitas, mengutamakan pelayanan kepada nasabah namun disaat bersamaan menjunjung tinggi integritas moral dalam melaksanakan tugas.

Konsistensi BRI dalam merealisasikan program pengembangan SDM melalui sosialisasi budaya perusahaan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar GCG menjadi suatu keharusan bagi segenap jajaran manajemen Perseroan.

Arsitektur SDM BRI

Strategi pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM-BRI dijabarkan dalam bentuk *road map* program kerja pengelolaan SDM yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun yang senantiasa ditinjau ulang secara periodik untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Program kerja pengelolaan SDM untuk tahun 2013 adalah:

- Mengoptimalkan intensitas rekrutmen dan seleksi
- Menyempurnakan kebijakan manajemen kinerja dan kebijakan pengembangan karier
- Menyempurnakan sistem *reward*
- Melakukan *review* terhadap kebijakan peraturan disiplin
- Melakukan revitalisasi Budaya Kerja.

“

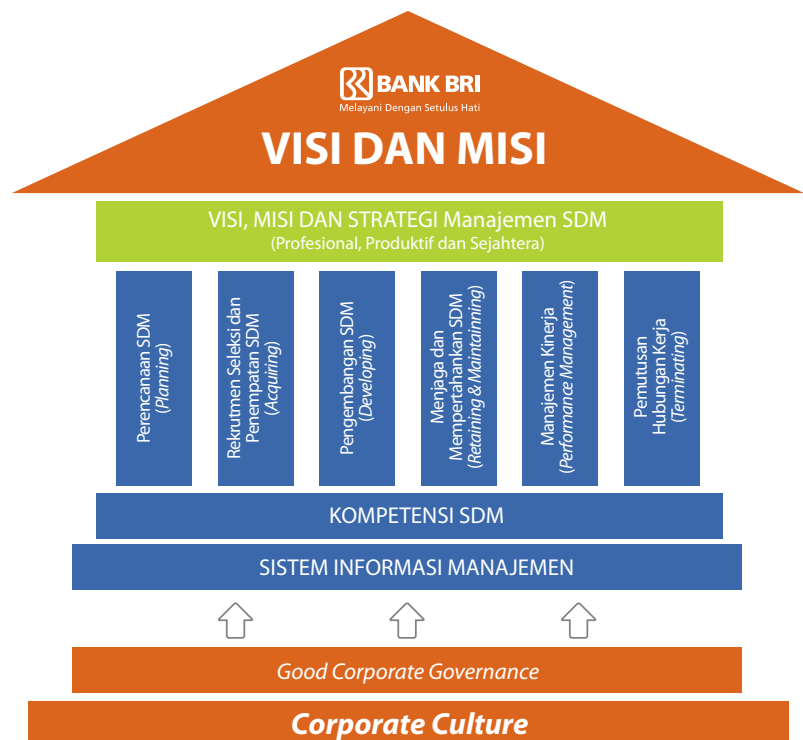
BRI konsisten mengembangkan SDM dengan kompetensi operasional maupun managerial yang berimbang dengan keluhuran ahlak dan integritas moral, melalui sosialisasi budaya perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar GCG untuk membentuk karakter insan BRI yang profesional, produktif dan sejahtera.

“



Program tersebut merupakan bagian dari kerangka Arsitektur SDM BRI yang disusun secara komprehensif, sistematis dan terukur, mulai dari aktivitas *planning* (perencanaan), *acquiring* (rekrutmen, seleksi dan penempatan), *developing* (pengembangan SDM), *retaining and maintaining* (menjaga dan mempertahankan), *performance management* (manajemen kinerja) dan *terminating* (pengakhiran hubungan).

Arsitektur SDM tersebut diwujudkan dalam kebijakan MSDM yang berbasis kompetensi dan didukung SIM SDM yang valid dan akurat serta dilandasi oleh penerapan GCG dan *Corporate Culture* yang merupakan dasar sikap perilaku pekerja untuk mewujudkan visi dan misi MSDM (profesional, produktif dan sejahtera).



Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Kompetensi Dan Profesionalisme

BRI mengembangkan perencanaan tenaga kerja (*manpower planning*) yang mampu mengintegrasikan kebutuhan SDM secara tepat dan akurat sesuai dengan rencana dan strategi perusahaan. Proses perencanaan kebutuhan SDM mengacu pada rencana bisnis jangka panjang yang tertuang dalam *Corporate Plan* BRI, jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan rencana jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Hubungan Industrial

Dalam rangka membuat dan menjaga hubungan kerja yang harmonis antara Perusahaan dan Pegawai. BRI selalu memperhatikan antara lain:

- **Penghormatan Terhadap Hak Asasi Pegawai**
BRI menjamin hak pekerja untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Oleh karenanya BRI mendukung kegiatan pekerja dalam berserikat dengan pembentukan SP-BRI, yang telah terbentuk sejak Juni 1999. SP-BRI tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan : 357/I/P/V/2005 tanggal 17 Mei 2005.

Sejak dibentuknya Serikat Pekerja, BRI secara reguler telah melakukan Perundingan dengan Serikat Pekerja untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku 2 tahun sekali dan maksimum perpanjangan 1 tahun, untuk menjamin pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

Pekerja, Perusahaan dan Serikat Pekerja. Adapun PKB yang saat ini berlaku adalah PKB Periode 2013 -2015.

Sebagai wujud dukungan, BRI selalu mengkomunikasikan kebijakan yang akan diterapkan kepada Pekerja serta melibatkan Serikat Pekerja dalam melakukan sosialisasi kebijakan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekerja serta masalah hubungan industrial lainnya.

Untuk menjaga hubungan yang harmonis antara Serikat Pekerja dan Perusahaan, BRI membentuk Forum kerjasama Bipartit antara Perusahaan dan Serikat Pekerja yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan dan kepentingan Pekerja dan menyelesaikan keluhan dari Pekerja.

- **Penerapan Azas Kesetaraan**
BRI memberikan kesempatan dan kesamaan hak kepada seluruh pekerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik dalam pengelolaan SDM, sejak proses rekrutmen, maupun dalam merealisasikan program pengembangan kompetensi dan keahlian, serta penetapan jenjang karir dan remunerasi.

Strategi Pemenuhan Sumber Daya Manusia 2013

Dengan perkembangan usaha dan jangkauan operasi yang berkembang cepat, BRI menerapkan beberapa strategi pemenuhan SDM yang tepat, akurat dan cepat namun dengan tetap memperhatikan kualitas ataupun kompetensi dasar para kandidat. Strategi pemenuhan yang diterapkan mencakup:

1. Pendelegasian wewenang untuk merekrut pekerja sesuai kebutuhan bisnis masing-masing Wilayah.
2. Bekerjasama secara aktif dengan beberapa Universitas terkemuka di Indonesia termasuk bekerja sama dengan beberapa konsultan *Career Development Center* di berbagai Universitas tersebut.
3. *E-Recruitment* (proses perekrutan dan seleksi Pekerja *Online*) berbasis IT.
4. Program Pengembangan *Resident Staf* (PPRS) untuk mencetak profesional perbankan dan kader pemimpin BRI masa depan di wilayah tertentu, sekaligus memberikan kesempatan kepada Putra-Putri terbaik didaerah untuk berkembang dan berkarir bersama BRI.

Melalui strategi rekrutmen tersebut, selama tahun 2013, BRI telah menambah jumlah pekerja tetap sebesar 7.319 orang.

- **Rekrutmen / Acquiring**
Sebagai salah satu bagian penting dari proses pemenuhan sumberdaya manusia, BRI menerapkan 3 program rekrutmen pekerja, yakni:
 1. Program Rekrutmen Pengembangan Staf (PPS) Merupakan program penerimaan pekerja tetap yang dimaksudkan untuk mencetak pemimpin BRI di masa depan. PPS merupakan program masuk menjadi Pekerja yang diprioritaskan untuk

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

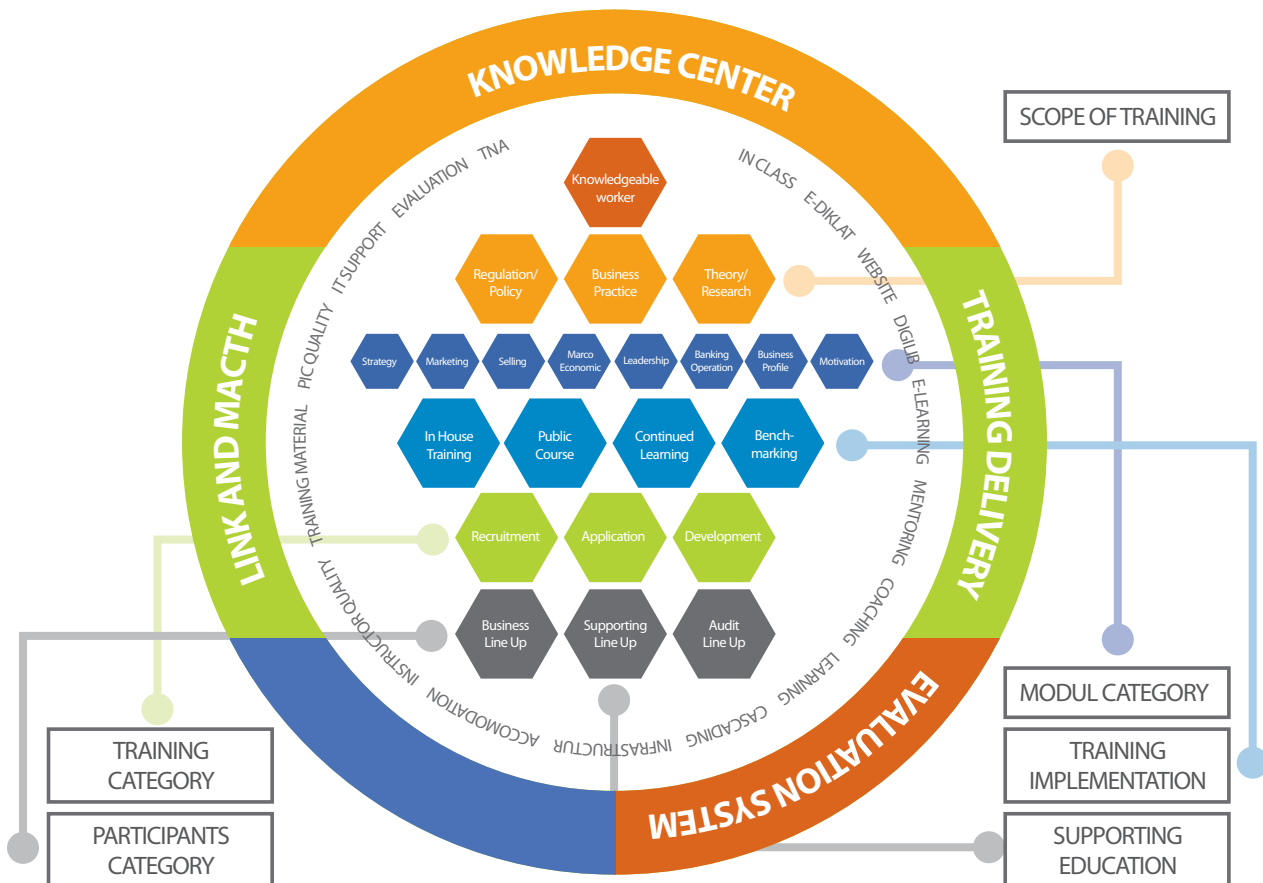
- mencapai jenjang karier yang paling tinggi dan merupakan calon pemimpin masa depan perusahaan, baik berasal dari internal BRI maupun *fresh graduate* lulusan universitas negeri/swasta Indonesia atau luar negeri sesuai kualifikasi yang telah ditentukan.
2. **Program Rekrutmen Non Staf**
Merupakan program penerimaan pekerja yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di level non manajerial yang mengutamakan kemampuan teknis dan tenaga pemasar. Pola rekrutmen ini ditujukan untuk memenuhi formasi Mantri, Account Officer (AO), Funding Officer (FO), dll. Pekerja dari Program Rekrutmen Non Staf juga mempunyai kesempatan untuk meniti jenjang dan jalur karir berbeda dengan Program Pengembangan Staf.
 3. **Professional Hiring**
Yakni program rekrutmen pekerja dari tenaga kerja perusahaan di luar BRI yang telah memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang tertentu. Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja pada jabatan-jabatan baru sebagai bagian dari perkembangan bisnis BRI dan diharapkan dapat melakukan *transfer of knowledge* kepada pekerja lainnya dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan.

- **Learning & Developing**
Pekerja BRI diarahkan untuk menjadi Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan belajar, kemauan berubah, berinovasi dan memberikan daya dorong kreatif bagi kemajuan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, BRI secara berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi pekerja agar memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat menjawab tantangan bisnis perusahaan di masa kini dan masa yang akan datang.

Program pendidikan, pelatihan dan pengembangan pekerja dilakukan secara berkelanjutan dan terencana dengan baik tergambar didalam bagan dibawah ini.

Proses rekrutmen dilakukan secara obyektif, terbuka, adil dan setara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan kandidat pekerja yang bertalenta dan berdedikasi tinggi.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia



Keterangan :

1. Program Pendidikan Pembekalan.
Kegiatan pendidikan yang diberikan kepada calon pekerja BRI atau pekerja BRI yang akan menduduki suatu jabatan tertentu dengan tujuan memberikan bekal kompetensi agar mampu melakukan tugasnya.
2. Program Pendidikan Aplikasi.
Kegiatan pendidikan yang diberikan kepada pekerja BRI dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas saat ini baik yang diselenggarakan oleh internal perusahaan maupun pihak ketiga (eksternal).
3. Program Pendidikan Pengembangan.
Kegiatan pendidikan yang diberikan kepada pekerja BRI dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka persiapan menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Selama tahun 2013, BRI telah menyelenggarakan program training kepada 393.198 peserta pekerja BRI. Program training yang telah diselenggarakan di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Peserta
1	Pendidikan Pembekalan	24.565
2	Pendidikan Pengembangan	4
3	Pendidikan Formal	29
4	Pendidikan Aplikasi	129.250
5	Sosialisasi	143.128
6	Public Course	3.246
7	Forum Peningkatan Kinerja dan Forum Group Discussion	91.476
8	Sertifikasi Dan Pendukung Pendidikan	1.500
Total		393.198

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Selain training menyeluruh, BRI mendukung pengembangan karir pekerja melalui pelaksanaan pelatihan khusus yang terencana, termasuk *job enrichment* dan *job enlargement*.

BRI mengembangkan pekerja yang bertalenta unggul untuk disiapkan menjadi kader pemimpin dan menduduki jabatan strategis di perusahaan melalui sistem *talent pool*. Sistem *talent pool* ini terus dikembangkan, termasuk dengan melibatkan dukungan sistem TI sebagai bagian dari pengembangan *Talent Management System*. Pengembangan staff bertalenta untuk promosi sebagai kader pimpinan masa depan akan melibatkan seluruh program pelatihan, aplikatif, teknis dan analitis.

Manajemen Kinerja SDM / HR Performance Management

BRI menerapkan sistem manajemen kinerja modern yang menilai kinerja dari 2 sisi, yakni pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan pencapaian kompetensi. Hal ini ditujukan agar evaluasi kinerja SDM mengukur secara berimbang antara apa yang harus dicapai Pekerja (KPI) dan bagaimana cara mencapainya (kompetensi).

Tahap-tahap sistem manajemen kinerja BRI juga dirancang secara sistematis, terdiri dari perencanaan, bimbingan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, pekerja dan atasan menyepakati target-target apa saja yang harus dicapai sedangkan pada tahap bimbingan, atasan memberikan *feedback* kepada bawahan terkait progress penyelesaian target tersebut. Pada tahap akhir, yakni evaluasi, atasan akan menilai kinerja Pekerja berdasarkan tingkat pencapaian dari target-target yang telah disepakati sebelumnya.

Manajemen Kinerja SDM dikelola melalui Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang terintegrasi secara *online* atau disebut sebagai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) *online*.

Hasil penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan remunerasi Pekerja. BRI menerapkan kebijakan kenaikan upah berdasarkan prestasi kerja (*merit increase*), sehingga Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kenaikan upah yang tinggi pula. Sebaliknya, Pekerja yang tidak berprestasi tidak memperoleh kenaikan upah.

Selain itu, guna mendorong prestasi kerja yang optimal, BRI memiliki kompensasi variabel yang diberikan kepada Pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Program kompensasi variabel tersebut bertujuan memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja yang optimal serta mendorong prestasi kerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kesejahteraan Pekerja Remunerasi

Untuk menarik calon Pekerja potensial, mempertahankan Pekerja kompeten dan meningkatkan motivasi Pekerja, BRI memberikan kompensasi secara adil, kompetitif, serta memperhatikan strategi dan perkembangan bisnis Perusahaan. Struktur pengupahan BRI dirancang untuk memberikan kompensasi kepada pekerja sesuai dengan kompetensi pekerja dan bobot jabatannya, agar Pekerja semakin tertantang untuk berprestasi dalam memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Selain kompensasi yang bersifat tetap (*fixed*), BRI memberikan pula kompensasi yang bersifat variabel yang pemberiannya dikaitkan dengan pencapaian target dan prestasi kerja.

BRI menerapkan program training terstruktur guna membekali SDM dengan kompetensi yang lengkap sesuai bidang tugasnya sekaligus memiliki moral dan integritas yang tinggi

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Untuk memberikan rasa aman dalam bekerja, kepada Pekerja BRI diberikan *benefit* hubungan kerja berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, Asuransi Jiwa & *Personal Accident*, fasilitas perumahan dan kendaraan, serta fasilitas lain yang lazim diberikan oleh Perusahaan sejenis di industri Perbankan.

BRI juga mempertimbangkan perbedaan tingkat biaya hidup di area unit-unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, BRI dalam memberikan kompensasi kepada setiap Pekerja tanpa membedakan *gender*, sehingga tidak terdapat perbedaan hak yang diterima antara Pekerja pria dan wanita. BRI juga memastikan bahwa upah minimum yang diberikan kepada Pekerja sejak bergabung telah berada di atas upah minimum yang berlaku di setiap wilayah tempat Perusahaan beroperasi.

Program Pensiun

Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman selama Pekerja masih aktif bekerja, maka BRI memberikan benefit setelah berakhirnya hubungan kerja yang bertujuan memelihara kesinambungan penghasilan setelah berakhirnya hubungan kerja. Beberapa program yang dilaksanakan mencakup: Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Program Pensiun luran Pasti (PIIP), Program Tunjangan Hari Tua (THT), Program Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek, dan Program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (Prospens).

Dampak Keuangan Pengelolaan SDM

- **Alokasi Dana Pengembangan Kompetensi SDM**

Selama tahun 2013, tidak kurang dari 557 training dan pengembangan yang dilakukan BRI, baik secara umum maupun khusus, dan diikuti 393.198 peserta. Total biaya investasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme pekerja tersebut adalah sebesar Rp. 544.7 miliar, meningkat 12.3% dari tahun 2012.

- **Total Dana Pengelolaan SDM**

Penambahan jumlah pekerja, peningkatan status terhadap pekerja alih daya frontliner menjadi pekerja kontrak, serta pemenuhan berbagai hak-hak pekerja membuat alokasi dana operasional untuk pekerja meningkat. Untuk tahun 2013, alokasi dana pekerja ini mencapai Rp 11,75 triliun, naik 27,5% dari total alokasi dana belanja pekerja di tahun 2012 yang mencapai Rp9,21 triliun. BRI memandang alokasi dana ini merupakan investasi yang dapat dipertanggung jawabkan melalui pengukuran manfaat dana belanja pekerja dan komitmen investasi untuk peningkatan kompetensi pekerja diantaranya dilakukan melalui perhitungan rasio produktivitas pekerja dan rasio belanja pelatihan.

- Rasio produktivitas pekerja (laba dibagi jumlah pekerja) pada 2013 sebesar Rp 261.22 juta per pekerja, meningkat dibandingkan 2012 yang sebesar Rp255,02 juta per pekerja. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan produktivitas pekerja dalam berkontribusi terhadap pencapaian target laba perusahaan.

Profil SDM BRI

Pada akhir tahun 2013, jumlah total pekerja BRI adalah 81.238 orang, naik 9.35% dari total pegawai di akhir tahun 2012 yang berjumlah 72.625 orang, termasuk pekerja alih daya. Pertambahan jumlah tenaga kerja tersebut sejalan dengan peningkatan aktivitas bisnis dan operasional BRI, diantaranya peningkatan jumlah unit layanan BRI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, BRI telah memastikan bahwa status pekerja frontliner BRI khususnya *Teller* dan *Customer Service* adalah pekerja kontrak dan pekerja tetap BRI.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Jumlah Pekerja Berdasarkan Status			
Status	2011	2012	2013
Pekerja Tetap	34.301	35.727	41.848
Pekerja Kontrak	4.780	36.155	38.355
Trainee	963	743	1.035
Grand Total	40.044	72.625	81.238

Menurut tingkat pendidikan, mayoritas pekerja BRI adalah lulusan jenjang pendidikan Diploma dan Strata-1 dengan jumlah dan komposisi yang semakin meningkat. Adapun profil komposisi pekerja BRI menurut pendidikan dan jenjang jabatan adalah sebagai berikut.

Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.			
Pendidikan	2011	2012	2013
SLTP / Setingkat	31	23	20
SLTA / Setingkat	7.341	6.196	5.376
Diploma	5.006	25.738	26.684
Strata 1	26.634	39.596	48.049
Strata 2	1.027	1.065	1.099
Strata 3	5	7	10
Grand Total	40.044	72.625	81.238

Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Organisasi.			
Level Organisasi	2011	2012	2013
Executive Vice President	67	67	70
Vice President	103	106	153
Assistant Vice President	380	429	403
Senior Manager	584	633	652
Manager	582	581	609
Assistant Manager	2,925	3,295	3,334
Officer	10,662	10,998	12,079
Assistant	24,741	56,516	63,938
Jumlah Pekerja BRI	40.044	72.625	81.238

Pengelolaan Sumber Daya Manusia



Revitalisasi Budaya Kerja BRI untuk meningkatkan integritas pekerja dan meningkatkan kualitas implementasi praktek GCG.

Tingkat Turnover

Selama tahun 2013, tercatat sejumlah 779 pekerja BRI mengundurkan diri dan berhenti bekerja dari BRI. Dengan demikian, maka tingkat *turnover* BRI adalah sebesar 1,86%, yang berarti sangat rendah. Hal tersebut adalah salah satu hasil dari penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, berupa suasana yang sehat, aman dan nyaman yang mampu menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi pada seluruh jajaran.

Pengelolaan SDM Berbasis Teknologi Informasi

Sebaran wilayah operasional yang luas dan jumlah SDM yang besar membuat BRI mengembangkan metode pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan dukungan teknologi informasi yang handal sehingga BRI dapat mengelola kebutuhan seluruh jajaran SDM dengan efisien dan akurat.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) SDM yang terintegrasi ini membuat BRI mampu memelihara *database* SDM, memenuhi hak-hak pekerja, memberi informasi kebijakan SDM terkait hak-hak pekerja, dan mengembangkan saluran komunikasi yang kondusif antara pekerja dengan manajemen. SIM SDM merupakan dasar dari pengembangan *Office Automation* maupun implementasi *Employee Self Service* (ESS) dengan tujuan efisiensi seluruh aspek pengelolaan kebutuhan SDM.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Internalisasi Budaya Perusahaan

Budaya kerja BRI dirumuskan dengan menggali nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh Pekerja sebagai nilai-nilai unggul yang dapat mendukung pencapaian kinerja terbaik bagi perusahaan, yaitu terdiri dari integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, keteladanan dan penghargaan kepada SDM. Hingga saat ini, nilai-nilai Budaya Kerja (*corporate values*) tersebut telah mampu mendukung visi dan misi Perusahaan. BRI senantiasa melakukan evaluasi atas implementasi Budaya Kerja untuk memastikan bahwa *core values* yang dimiliki Perusahaan dapat menjawab tantangan di masa mendatang.

Pada tahun 2013, BRI telah melakukan implementasi Revitalisasi Budaya Kerja BRI untuk meningkatkan peran serta seluruh insan BRI dalam menghadapi tantangan bisnis kedepan dan diharapkan memiliki sikap perilaku yang sesuai dengan Budaya Kerja BRI.

Beberapa kegiatan yang sudah dan akan terus dilakukan dalam rangka implementasi program Revitalisasi Budaya Kerja BRI antara lain :

1. Melakukan pemilihan *change agent* diseluruh Unkit Kerja BRI
2. Membuat konsep baru (*reconcept*) Budaya Kerja BRI.
3. Membuat design (*redesign*) program Budaya Kerja BRI.
4. Membuat alat ukur Budaya Kerja yang terintegrasi dan berjenjang yang didukung oleh sistem.
5. Melakukan sosialisasi yang terus menerus dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai macam media komunikasi.

Seluruh upaya dan kegiatan tersebut di atas dilakukan mengingat Budaya Perusahaan memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian visi misi Perusahaan.

Pemasaran



Strategi Pemasaran

Untuk memastikan pencapaian target kinerja di bidang penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, perolehan *fee based income*, *market share* di industri perbankan dan pada akhirnya target kinerja keuangan yang berkelanjutan, BRI merancang strategi pemasaran umum maupun khusus. Strategi pemasaran umum merupakan strategi yang di aplikasikan oleh BRI secara menyeluruh dan terpadu oleh seluruh unit kerja. Strategi pemasaran umum yang diterapkan pada dasarnya mencakup beberapa program, meliputi: peningkatan *awareness* akan produk jasa perbankan BRI, peningkatan akses layanan, pengembangan fitur produk, peningkatan kualitas layanan dan peningkatan pangsa pasar.

Penerapan program-program tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan pada

nasabah baru maupun nasabah *existing* untuk mengenali produk jasa perbankan dan fitur produk baru dari BRI, memberikan kemudahan akses serta memberikan kenyamanan pada nasabah dalam melakukan berbagai aktifitas perbankan sehingga menimbulkan loyalitas nasabah lama maupun ketertarikan calon nasabah baru untuk menjalin hubungan bisnis jangka panjang dengan BRI. Program-program tersebut dijelaskan dalam uraian berikut, sementara strategi pemasaran khusus yang diterapkan secara spesifik untuk masing-masing segmen operasional dapat dilihat pada uraian mengenai segmen bisnis terkait, yakni pada bahasan "Tinjauan Bisnis".

Peningkatan Awareness

Agar produk-produk jasa segmen bisnis mikro, kecil dan menengah dikenal masyarakat akar rumput yang berdiam di pelosok negeri, BRI merealisasikan berbagai program

akuisi maupun retensi nasabah yang dilakukan selama tahun 2013. Program tersebut dikemas dalam bentuk program pemasaran bertajuk Pesta Untung Beliung, Pesta Rakyat Simpedes, BRI Peduli Pasar Rakyat, Panen Bulanan Simpedes dan Grebeg Pasar. Seluruh program tersebut dilaksanakan BRI untuk memasarkan produk pinjaman Kupedes, KUR, produk simpanan BritAma, Simpedes serta produk *e-banking*. Selain program-program tersebut, BRI juga merealisasikan berbagai bentuk program pemasaran yang langsung ditujukan pada calon nasabah potensial tertentu.

Melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh komunitas pengusaha mikro, kecil dan menengah serta perorangan tersebut, BRI membangun dan menumbuhkan kembali *awareness* terhadap produk dan layanan BRI bagi nasabah baru maupun nasabah *existing*. Selain kegiatan pemasaran

“

ASPEK PEMASARAN
Perencanaan dan realisasi program pemasaran terpadu untuk menjamin tercapainya peningkatan basis nasabah serta loyalitas nasabah melalui pengenalan produk dan fitur produk jasa perbankan BRI, kemudahan akses layanan dan meningkatnya kualitas layanan terhadap nasabah

”

tersebut, untuk meningkatkan *brand awareness* BRI juga berpartisipasi pada berbagai pameran berskala nasional maupun internasional dengan menyertakan nasabah sebagai peserta pameran serta menyelenggarakan acara mudik bersama nasabah BRI (Nge-Buzz bareng BRI) dan seminar internasional tentang *microfinance*.

Peningkatan Akses Layanan

Pengembangan jaringan baik dalam bentuk fisik maupun *e-channel* merupakan salah satu strategi pemasaran BRI untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Pengembangan infrastruktur ini dilakukan melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan melalui pembukaan unit kerja di daerah-daerah baru sedangkan intensifikasi ditujukan untuk memaksimalkan potensi bisnis

pada daerah yang telah dilayani. Peningkatan akses layanan nasabah melalui *e-channel* yang difokuskan kepada penambahan jaringan ATM dan penyebaran mobile banking selain bertujuan untuk mempermudah jangkauan kepada nasabah juga ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Salah satu strategi pemasaran lain yang dijalankan oleh BRI adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini, yakni melalui peluncuran produk, seperti *mobile banking* dan *internet banking*. Kedua produk layanan berbasis teknologi informasi ini dirancang agar lebih *user friendly* sehingga nasabah lebih mudah melakukan berbagai aktifitas perbankan seperti: monitoring informasi rekening, melakukan transaksi keuangan dan melaksanakan berbagai pembayaran secara *online* melalui BRI.

Pengembangan Fitur Produk

Pengembangan fitur produk melalui modifikasi kegunaan maupun pengenalan fitur baru juga merupakan salah satu strategi pemasaran BRI kepada nasabah baru maupun nasabah *existing*. Pengembangan ini disesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakter nasabah di tiap segmen. Melalui pengembangan berbagai fitur produk, BRI menargetkan terpenuhinya kebutuhan seluruh nasabah yang beragam sehingga kepuasan nasabah meningkat.

Peningkatan Kompetensi dan Peran Pemasaran SDM

Di sisi sumber daya manusia, BRI melakukan penambahan tenaga pemasar dan juga meningkatkan kualitas pengetahuan mengenai produk dan jasa melalui pelatihan kepada tenaga pemasar sehingga mereka dapat memasarkan produk dan jasa yang lengkap sesuai

Pemasaran

BRI memiliki portofolio aset kredit UMKM terbesar di Indonesia dengan *market share* tahun 2013 mencapai 29,50%.

dengan kebutuhan nasabah. Dengan semakin meningkatnya kualitas tersebut, tenaga pemasar BRI dapat menjadi *professional business advisor* bagi nasabah.

Untuk menjamin peningkatan kualitas layanan, selain meningkatkan kompetensi SDM akan pemahaman produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, BRI juga memberlakukan standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh jajaran pekerja dalam berhubungan dengan nasabah internal (pekerja dari unit kerja lain) dan nasabah eksternal (kreditur dan debitur).

Standar pelayanan minimum tersebut dinamakan *Service Level Agreement (SLA)* yang menjadi bagian dari penilaian kinerja pekerja secara individual maupun secara tim. Semua program pengembangan dalam rangka pelaksanaan strategi pemasaran di atas dilakukan untuk memastikan diraihinya *Service Level Agreement (SLA)* yang memuaskan bagi nasabah.

Peningkatan Pangsa Pasar

Pelaksanaan seluruh program pemasaran tersebut diatas ditujukan untuk menambah basis nasabah dan meningkatnya pangsa pasar BRI di seluruh segmen bisnis yang dijalani. Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar tersebut, BRI juga aktif memasarkan produknya kepada mitra BUMN, melakukan *cross selling* produk serta memanfaatkan *Trickle Down Business* dari nasabah korporasi dan BUMN.

Trickle Down Business yang berasal dari nasabah segmen bisnis BUMN dan korporasi juga meningkatkan performa segmen lain seperti segmen bisnis ritel dan menengah. Strategi penjualan juga semakin diintensifkan dengan memanfaatkan *database* nasabah, pihak ketiga

(*dealer/developer*), *walk in customer* maupun *implant banking* seperti *Home Ownership Program (HOP)* dan *Car Ownership Program (COP)* dengan beberapa perusahaan besar.

Kemitraan dengan BUMN dilakukan melalui penyelenggaraan acara yang menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan para mitra. Sedangkan strategi *cross selling* yang dilakukan BRI memberikan pelayanan *closed-system financing* bagi nasabah baru maupun nasabah *existing*. Untuk itu, antar direktorat melakukan koordinasi intensif sehingga nasabah baru semakin meningkat di tahun 2013.

Posisi Dan Pangsa Pasar

Pada akhir tahun 2013, BRI memiliki aset sebesar Rp 606,37 (angka bank saja) triliun dan berada pada urutan kedua dari sisi aset dari seluruh perbankan yang beroperasi di Indonesia. Angka tersebut mencerminkan *market share* BRI 2013 sebesar 12,24 % dari sisi aset.

BRI berfokus pada penyaluran kredit untuk segmen UMKM. *Positioning market* tersebut membuat BRI dikenal sebagai bank terbesar di Indonesia untuk segmen UMKM. *Outstanding* kredit segmen UMKM per akhir tahun adalah sebesar Rp 179,61 triliun dan *outstanding* kredit UMKM secara nasional adalah Rp 608,82 triliun, sehingga pangsa pasar BRI untuk segmen ini pada tahun 2013 mencapai 29,50%. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan persentase *market share* kredit UMKM BRI tahun sebelumnya yaitu sebesar 28,08%.

Pemasaran

Marketing Communication

Kegiatan *Marketing Communication* memiliki misi menjadikan seluruh produk, jasa, dan layanan BRI mempunyai *brand* yang kuat dan dapat menunjang kegiatan pemasaran serta pertumbuhan penjualan produk, jasa dan layanan BRI. Melalui komunikasi pemasaran yang optimal maka diharapkan akan tercapai *brand awareness* dan *positioning* yang unik, tepat dan relevan dari seluruh produk, jasa dan layanan BRI di benak setiap target market, sehingga keberhasilan ekspansi usaha dapat lebih terjamin.

Untuk mencapai misi tersebut BRI merancang strategi komunikasi pemasaran yang di aplikasikan secara berkesinambungan selaras dengan penilaian kondisi industri perbankan dan sasaran perkembangan usaha. Pada tahun 2013, kegiatan *marketing communication* juga dilakukan untuk menjaga dan mempertajam *brand image* produk, jasa dan layanan BRI dengan berfokus pada program aktivasi produk, jasa dan layanan BRI.

Program *marketing communication* untuk *retail funding* tetap menjadi prioritas utama mengingat peranan strategisnya dalam menjamin stabilitas pendanaan dan menjaga *price competitiveness*. Selain itu, bisnis mikro, kecil dan menengah (MKM) yang menjadi pilar bisnis BRI juga mendapat prioritas khusus dalam pelaksanaan program *marketing communication* untuk menjamin keberlanjutan aspek *awareness* terhadap *brand* BRI.

Di tahun 2013 program *marketing communication* semakin memperkuat pengenalan produk-produk dan layanan BRI yang berbasis *business to business* (B2B) dengan strategi komunikasi yang sesuai dengan *nature* bisnis target market. Aktifitas *e-banking* BRI juga menjadi prioritas pelaksanaan program, guna menjamin peningkatan komposisi *fee based income*.

Program-program yang dilakukan, selain untuk menjaga *awareness*, juga ditujukan pada penajaman ke arah akuisisi produk jasa perbankan yang ditawarkan BRI. Oleh karenanya agar sesuai dengan karakter calon nasabah, promosi produk dan layanan tersebut dilakukan secara regional melalui 18 Kanwil BRI. Keseluruhan program yang dilaksanakan tersebut ditujukan untuk mendukung upaya BRI menjelma sebagai *The Biggest National Payment Gateway* pada beberapa tahun mendatang.

Realisasi Kegiatan

Berbagai kegiatan komunikasi pemasaran yang dilaksanakan sepanjang tahun 2013, mencakup pengenalan maupun penguatan:

1. Brand

- Kampanye *marketing communication* untuk *brand* yang *awareness*-nya sudah tinggi lebih diarahkan bersifat *activation*
- Kampanye tematik untuk produk-produk yang baru di-*launching* dan yang *awareness*-nya perlu ditingkatkan

2. Produk

- *Launching* produk-produk dan fitur baru : e-pay BRI, e-tax, Kartu Kredit *Private Label*
- Produk dan *service* yang diprioritaskan.

3. Channel

- Memperkuat *presence channel* BRI di wilayah-wilayah potensial baik channel konvensional maupun *e-channel*.
- Mengoptimalkan semua *channel* BRI sebagai sarana edukasi baik untuk *internal marketing* maupun eksternal untuk produk-produk yang menghasilkan *fee-based income*.

Semua program yang dilakukan berlandaskan pada BRI *brand architecture*, *brand life cycle* dan *journey of BRI brand*.

Penghargaan Marketing Communication

Berbagai kegiatan *marketing communication* dan realisasi peningkatan kualitas layanan yang semakin baik, membuat beberapa brand produk BRI mendapatkan penghargaan dari pihak ketiga, sebagai berikut:

- Tabungan BRI Britama Junio – Peringkat 1 Kategori Tabungan Junior Top Brand Index 2013 dari Majalah Marketing
- Tabungan BRI Britama – Peringkat 2 Kategori Tabungan Top Brand Index 2013 dari Majalah Marketing
- Deposito BRI – Peringkat 2 Kategori Deposito Top Brand Index 2013 dari Majalah Marketing
- BUMN Marketing Award 2013 – Silver Winner BUMN Marketing Awards 2013 dari Majalah BUMN Track.
- Products & Bussines Awards - Best Microfinance Business dari The Asian Banker
- Top Brand Award 2013 - kategori Call Centre dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group.
- Top Brand Award 2013 - kategori Deposit Account dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group.
- Top Brand Award 2013 – kategori ATM Card dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group.
- Indonesia Brand Champion Award 2013 – Bronze Brand Champion of Brand Equity untuk kategori Conventional Banking (Asset>IDR 75 Trillion) dari MarkPlus
- Indonesia Brand Champion 2013 - Gold Brand Champion of Most Popular Brand untuk kategori Conventional Banking dari Mark Plus Inc.

Pemasaran

- 3rd Best Phone Banking Machine Versi Majalah Infobank, dalam acara “Banking Service Excellence Award “ yang diselenggarakan oleh MRI
- The Best Contact Center Indonesia 2013, yakni Best Agent Inbound (Bronze) dari ICCA

Pengembangan Jaringan

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kehadiran di pasar-pasar potensial dan mendekati diri pada target market, BRI terus berupaya menambah, mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan kerja hingga ke pelosok negeri. Pengembangan tersebut dilakukan dengan mengutamakan kepuasan nasabah, antara lain melalui penambahan jaringan kerja konvensional maupun *mobile banking*, serta *e-channel* (ATM, EDC, CDM, Kiosk dan E-Buzz) sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas operasional.

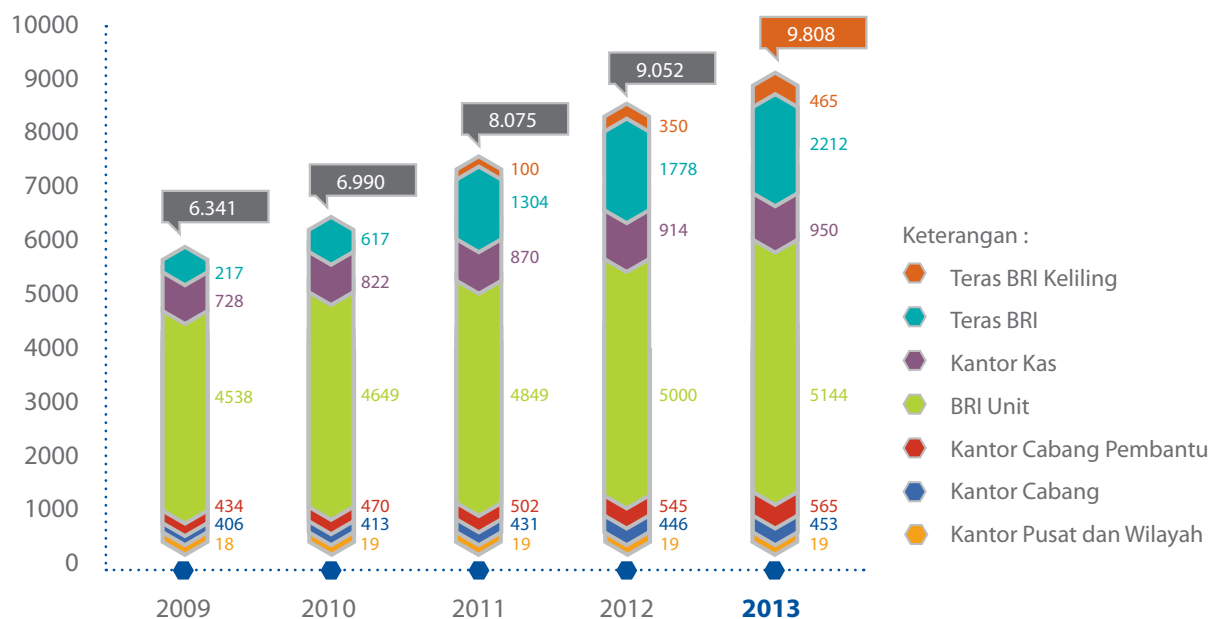
Realisasi Ekspansi Jaringan di Tahun 2013.

Realisasi pengembangan jaringan kerja bisnis ritel yang dijalankan ditahun 2013 meliputi penambahan 7 Kantor Cabang, 20 Kantor Cabang Pembantu dan 36 Kantor Kas. Untuk pengembangan bisnis mikro, pada tahun 2013 jumlah Kantor BRI Unit juga telah bertambah 144 kantor, sehingga total BRI Unit per Desember 2013 mencapai 5.144 BRI Unit.

Selain BRI Unit, sejak tahun 2009 BRI juga telah mengembangkan jaringan kerja baru berupa Teras BRI dan Teras BRI Keliling. Pada tahap awal, Teras BRI dibuka di tengah pasar tradisional dan sentra bisnis guna memudahkan pedagang pasar dan pelaku usaha untuk menabung, mengajukan pinjaman, serta melakukan transaksi perbankan lainnya, tanpa harus meninggalkan aktivitas bisnisnya. Pada tahun 2013 BRI menambah 434 Teras BRI dan 115 Teras BRI Keliling, sehingga kini BRI telah memiliki 2212 Teras BRI dan 465 Teras BRI Keliling.

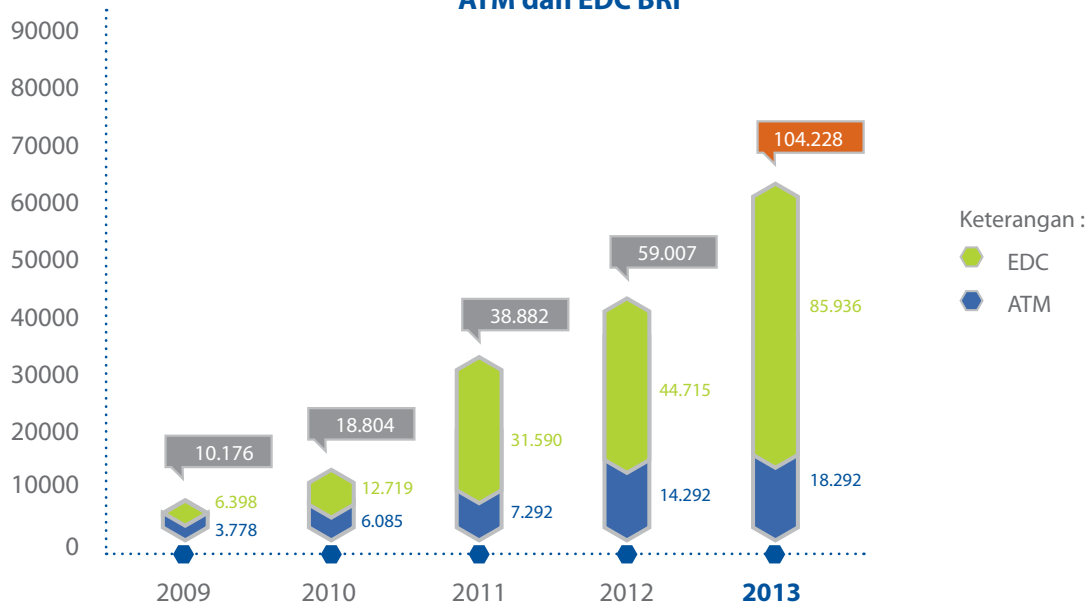
Penambahan unit kerja tersebut berasal dari pembukaan unit kerja baru maupun peningkatan status unit kerja. Untuk menjangkau nasabah potensial yang beraktifitas di areal terpencil yang minim fasilitas infrastruktur dasar namun lebih mudah dijangkau melalui moda transportasi air, pada tahun 2014 BRI akan mulai melakukan pengembangan Teras BRI Kapal.

Pertumbuhan Jumlah Unit Kerja BRI



Pemasaran

Pertumbuhan Jumlah Jaringan ATM dan EDC BRI



Selama tahun 2013, BRI menambah 4.000 ATM, 41.221 EDC, 100 CDM dan 8 e-Buzz sehingga sampai dengan akhir Desember 2013, BRI telah memiliki 18.292 ATM, 85.936 EDC, 192 CDM, serta 100 Kiosk. Untuk menambah mobilitas layanan, BRI juga telah memiliki 50 jaringan mobile outlet yang bernama e-Buzz.

Dengan seluruh penambahan tersebut, layanan perbankan BRI per akhir tahun 2013 telah didukung oleh jaringan kerja yang meliputi 9.808 unit kerja (termasuk kantor wilayah dan kantor pusat) dan 104.228 jaringan ATM dan IDC BRI (Lihat juga tabel "Profil BRI-Jaringan Kerja" dan uraian "Tinjauan Bisnis-Bisnis Konsumer")

Selain penambahan fisik jaringan layanan, selama tahun 2013 BRI melakukan berbagai program lain untuk meningkatkan optimalisasi fungsi dan kualitas unit kerja melalui:

- Meningkatkan kenyamanan nasabah saat bertransaksi, baik di unit kerja konvensional maupun *e-channel*
- Meningkatkan frekuensi pelatihan bagi pekerja BRI Unit dan Teras BRI agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada nasabah mikro.
- Pembukaan *Priority Lounge*, Kantor Layanan Pensiun dan Kredit Pegawai dan Sentra Layanan Prioritas.
- Penempatan *e-channel*: ATM, EDC dan SSPP (*Self Services Passbook Printer*) agar tercapai optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas jaringan *e-channel* BRI.
- Mengembangkan aplikasi teknologi guna mempercepat proses kredit di BRI Unit, Teras BRI, dan Teras BRI Keliling.

Peningkatan Layanan

Sebagai bagian implementasi strategi pemasaran untuk peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah, BRI senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan visi BRI yaitu memberikan layanan yang cepat, akurat, aman, ramah dan nyaman kepada semua nasabah dan menjadikan layanan BRI sebagai barometer layanan perbankan.

Langkah strategis yang telah dilakukan BRI untuk peningkatan kualitas layanan antara lain dengan menerapkan *service level agreement* (SLA) dan penetapan rating layanan untuk seluruh unit kerja BRI kemudian menyelenggarakan program *Service Quality Campaign* 1-96 dengan target pencapaian masuk dalam peringkat 5 besar bank dengan layanan terbaik.

Sebagai hasil dari peningkatan layanan kepada nasabah ini, BRI Prioritas memperoleh peringkat *Diamond* pada *Service Quality Award* dari Caree – CCSL.

Pemasaran



Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan

Selain berbagai langkah strategis tersebut di atas, BRI juga melakukan berbagai inisiatif pengembangan kualitas layanan sebagai berikut:

- Penanganan keluhan nasabah melalui satu pintu dan mengawasi penyelesaian keluhan nasabah. Keluhan pelanggan bisa disampaikan dengan mudah melalui program “Call Center BRI” dan dipastikan langkah-langkah penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- Melakukan standarisasi layanan dan kegiatan *refreshing course* mengenai produk dan kebijakan untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
- Meningkatkan *service skill* dan *service leadership* dengan memberikan pelatihan kepada pekerja terkait di Kantor Cabang seluruh Indonesia.
- Menentukan cabang percontohan (*Center of Excellence*) dalam hal Kualitas Layanan di masing-masing Kantor Wilayah
- Meningkatkan fungsi *response center* yang mengacu pada *Service Level Agreement (SLA)*.
- Meningkatkan *skill* dan *knowledge* para operator help desk dengan pelatihan *Service Quality* minimal setahun sekali.

Peningkatan Kualitas Layanan

BRI melakukan peningkatan kualitas layanan secara terus menerus melalui penetapan target-target perbaikan layanan dengan menerapkan strategi pengembangan kualitas yang meliputi aspek SDM, Proses dan *Premises* serta *Promotion*.

Pemasaran

Penghargaan Kualitas Layanan

Berbagai upaya serius yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari pihak independen. Hasil survei Marketing Research Indonesia terhadap terhadap 21 Bank tahun 2012/2013, pelayanan BRI memperlihatkan perbaikan dan peningkatan nilai sebesar 4,03 poin dari nilai 81,91 menjadi **85,94** dan yang terakhir tahun 2012/2013 terdapat kenaikan peringkat dari **PERINGKAT 5 MENJADI PERINGKAT 4**.

Selain hasil survei MRI tersebut, di tahun 2013, BRI juga menerima berbagai penghargaan dibidang kualitas layanan, yakni:

1.	The Best Agent Inbound (Bronze)	ICCA
2.	The Best Contact Center Indonesia 2013	ICCA
3.	3 rd Best Phone Banking Machine	MRI

Survey Kepuasan Nasabah

Untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kualitas layanan kepada nasabah, BRI secara rutin melakukan survey persepsi nasabah mengenai tingkat kualitas layanan BRI. Survey tersebut dilakukan secara internal maupun oleh pihak independen. Survey internal dilakukan minimal dua kali dalam setahun oleh setiap unit kerja operasional BRI di seluruh Indonesia yang pengumpulan datanya didukung oleh sistem teknologi informasi. Sedangkan survey kepuasan nasabah oleh pihak independen dilakukan setiap triwulan disertai perbandingan dengan kompetitor di industri perbankan. Survey juga dibedakan berdasarkan skala nasional maupun berdasarkan kota kecil dan kota besar serta daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kedua survey tersebut baik yang dilakukan oleh BRI maupun pihak independen menggunakan sampling target responden dari seluruh segmen dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan umur yang bervariasi.

Hasil survey pihak independen maupun internal menunjukkan bahwa tingkat kepuasan nasabah BRI terus meningkat secara konsisten dalam hampir semua aspek dibandingkan dengan beberapa bank lain. Namun demikian terdapat beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian di masa mendatang di antaranya perlunya perbaikan dalam pelayanan dan fitur produk serta jasa BRI. Survey kepuasan nasabah ini akan digunakan sebagai acuan dalam perbaikan mutu layanan BRI sehingga mendekati persepsi kepuasan nasabah terhadap layanan jasa perbankan yang ideal dan diharapkan meningkatkan loyalitas nasabah BRI.

Teknologi dan Sistem Informasi



Teknologi Informasi

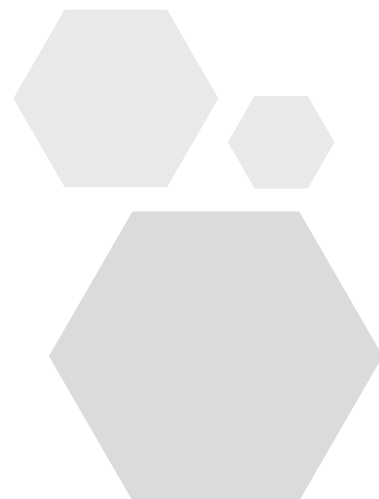
Untuk mendukung upaya peningkatan daya saing perusahaan dan memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan perbankan yang terpercaya, BRI konsisten mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan Teknologi dan Sistem Informasi (TSI). BRI bertekad memanfaatkan dukungan teknologi tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan agar semakin kompetitif, efisien serta mampu mengurangi risiko operasional.

Realisasi program-program yang menjadi sarana dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan operasional BRI meliputi:

1. Penerapan *Business Continuity and Disaster Recovery Plan* untuk menjaga kesinambungan operasional bisnis, meningkatkan kepercayaan nasabah dan memitigasi risiko operasional akibat kegagalan teknologi informasi.
2. Pengawasan keamanan sistem secara berkesinambungan melalui *Enterprise Monitoring System*.
3. Pelaksanaan *Security Awareness Programme* kepada seluruh pekerja secara rutin untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan penggunaan teknologi informasi di BRI.
4. Penerapan *best practice* sistem pengamanan teknologi informasi yang lebih luas berdasarkan ISO 27001:2005 serta regulasi dan peraturan dari Bank Indonesia dan Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pencapaian Bank BRI menjadi bank komersial terkemuka di Indonesia, BRI telah menyusun dan melaksanakan program pengembangan TSI secara bertahap dan berkelanjutan sejak tahun 2008. Program tersebut dinamakan *Information Technology Strategic Plan* (ITSP) BRI tahun 2008-2013, yang pada dasarnya terbagi kedalam beberapa tahap pengembangan, yaitu:

“ BRI bertekad memanfaatkan dukungan teknologi Informasi terkini untuk meningkatkan kualitas layanan agar semakin kompetitif, produktif, efisien mampu mengurangi risiko operasional dan memberikan tambahan *fee based income* yang substansial “



1. Penyediaan *access channel* yang luas dilengkapi dengan fitur yang beragam dan terintegrasi.
2. Adopsi *leading-edge IT (Information Technology)*.
3. Penyediaan akses data yang lengkap secara *realtime online*.
4. Implementasi (*near*) *zero downtime*.
5. Penggunaan multimedia dan *paperless technology*.

Berbagai program mengenai pengembangan TI yang dijalankan selama tahun 2013 sesuai dengan *roadmap* ITSP tersebut diuraikan secara ringkas sebagai berikut.

Pengembangan Fitur

BRI menerapkan program pengembangan fitur aplikasi berbasis TI (*e-channel*) sebagai salah satu upaya yang ditempuh untuk mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur dan meningkatkan perolehan *fee-based income*. Selama tahun 2013 BRI kembali menambah tidak kurang dari 137 fitur *e-channel* baru, dengan perincian sebagai berikut.

No.	Channel	Jumlah Fitur <i>e-Channel</i>				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	ATM	110	124	159	191	230
2	EDC	80	136	160	227	230
3	Mobile Banking	28	38	49	79	114

Teknologi Sistem Informasi

No.	Channel	Jumlah Fitur e-Channel				
		2009	2010	2011	2012	2013
4	Cash Management	15	24	87	118	136
5	Phone Banking	33	33	33	3	3
6	Internet Banking	25	41	56	59	75
7	CDM	64	64	159	191	202
8	Kiosk	23	23	23	23	23
9	SSB (Self Service Banking)	0	0	0	25	31
10	BRILink	7	7	7	7	7
TOTAL		385	490	733	923	1.060

Tata Kelola TI (IT Governance)

Dalam setiap tahapan penerapan dan pengembangan TI untuk mendukung operasional perbankan yang berkualitas, BRI senantiasa mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi (MR-IT) bagi Bank Umum. Untuk maksud tersebut, Perseroan telah menyusun Arsitektur TI BRI yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ITSP 2008-2013 tersebut diatas.

Kebijakan dan Prosedur TI

BRI memiliki kebijakan dan prosedur untuk mendukung proses tata kelola Perusahaan, antara lain mencakup:

1. Information Technology Strategic Plan (ITSP) 2008-2013
2. Arsitektur Teknologi Informasi BRI
3. Kebijakan Umum Sistem informasi
4. Kebijakan Umum Sekuriti Teknologi Sistem Informasi (KUTSI) BRI
5. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi.

6. Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)/Business Continuity Management (BCM) BRI
7. Kebijakan Standarisasi Perangkat Teknologi Informasi

Pengembangan Sistem Manajemen Berbasis Teknologi Informasi

Untuk mendukung implementasi GCG secara konsisten dan berkualitas, BRI membangun beberapa aplikasi TI yang dapat digunakan untuk membantu Manajemen dalam melakukan pengawasan dan juga berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa aplikasi TI yang telah dikembangkan mencakup:

1. SIM-Manajenen Risiko

Pengembangan sistem informasi manajemen risiko diantaranya dengan mengembangkan aplikasi yang didedikasikan khusus untuk risiko operasional, risiko kredit maupun risiko pasar. Penetapan perangkat dan metodologi pengukuran risiko dapat dilihat pada pembahasan "Manajemen Risiko".

2. Dashboard Kepatuhan

Dashboard Kepatuhan merupakan *tools* yang dikembangkan dengan tujuan untuk memantau pemenuhan BRI terhadap ketentuan regulator dan memberikan *alert* bagi pejabat terkait dalam mengambil keputusan dan atau kebijakan. Hal-hal yang dapat dipantau dalam *tools* ini antara lain Dana Pihak Ketiga, Derivatif, Denda SID dan LBU, NPL, CAR, Kredit Korporasi, Menengah, Ritel, Mikro, dll. Selanjutnya akan terus dilakukan penyempurnaan aplikasi melalui pengembangan beberapa menu baru.

3. SIM-SDM

BRI juga telah mengembangkan sistem TI untuk pengelolaan SDM, sehingga pelaporan internal terkait pengelolaan SDM kini telah didukung sistem yang memadai baik dari sisi TI (termasuk *IT-security system*) maupun dukungan SDM yang kompeten. Dengan adanya informasi yang tepat waktu, akurat lengkap dan handal tersebut, Proses pengambilan keputusan dapat berlangsung efektif.

Teknologi Sistem Informasi

4. Star Web System

BRI telah membangun STAR *Web System* yang merupakan sistem yang digunakan untuk *monitoring* kualitas layanan dan operasional secara *online*. Untuk memudahkan proses input data hasil *monitoring* kualitas layanan dan operasional unit kerja serta menjadikan data hasil *monitoring* terdokumentasi dengan baik. Sehingga akan memudahkan unit kerja dalam melakukan perbaikan kualitas layanan dan operasional unit kerja dengan cepat.

5. Sistem Manajemen Informasi Audit

BRI mengembangkan Sistem Informasi Audit dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi penerapan *Risk Based Audit*. Adapun pengembangan teknologi informasi yang dilakukan Audit Intern antara lain:

- a. Implementasi aplikasi Sistem Manajemen Audit yang mengintegrasikan seluruh proses audit mulai dari perencanaan audit tahunan, perencanaan audit individual, pelaksanaan audit individual, pelaporan dan dokumentasi.
- b. Pengembangan aplikasi BRIdex sebagai alat analisis sehingga peningkatan indikator risiko dapat diidentifikasi.
- c. Pengembangan secara berkesinambungan Pusat Data Elektronik (PDE) untuk auditor. PDE menangani pengolahan data yang digunakan untuk audit secara terpusat. Hasil pengolahan data oleh PDE dapat diakses oleh masing-masing auditor sesuai wilayah auditnya masing-masing.

- d. Sistem Penunjang sistem yang ada pada kategori ini menangani beragam bidang yang tidak berhubungan langsung dengan proses audit, seperti: CSS (*Customer Satisfaction Survey*) akan menangani hasil survey kepuasan *auditee* dalam setiap proses audit. Sedangkan AER (AIN Electronic Register) menangani inventarisasi infrastruktur TI (*hardware*) yang ada di masing-masing kantor audit.

6. e-Procurement

Aplikasi *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik/online berbasis internet yang bertujuan adanya transparansi pengadaan barang dan jasa. Aplikasi *e-procurement* BRI terdiri dari 10 (sepuluh) modul, meliputi:

- a. *Budget Management*
- b. *User Management*
- c. *Vendor Management*
- d. *Request Management*
- e. *Procurement Management*
- f. *Bid Auction*
- g. Penetapan Pemenang
- h. *Contract Management*
- i. *Vendor Performance management*
- j. *Report*

Rencana Pengembangan TI 2014

Rencana pengembangan TI bertujuan untuk menciptakan *one stop service* yang terintegrasi dengan memanfaatkan *channel* yang luas dan produk yang beragam, menyediakan akses data yang lengkap secara *real time online*, serta menerapkan teknologi sekuriti yang handal.

Pengembangan SDM Bidang TI

Selain mengembangkan program, menambah fitur-fitur aplikasi dan melakukan upgrading peralatan infrastruktur TI, BRI melaksanakan program peningkatan kompetensi SDM di bidang TI. Peningkatan kompetensi SDM ini dilakukan melalui pemberian berbagai training yang relevan termasuk pendidikan aplikasi, program sertifikasi keahlian, manajemen risiko di bidang TI, hingga tahap programmer bagi pengembangan fitur-fitur aplikasi.

Sentra Operasi



Kelancaran transaksi operasional perbankan di 9.808 jaringan kerja BRI dan lebih dari 100.000 jaringan *e-channel* yang terkoneksi secara *real time online*, memerlukan dukungan sentral operasi yang handal dan akurat. Menjawab tantangan tersebut, Sentra Operasi BRI mampu melayani berbagai macam transaksi dan melaksanakan pemrosesan jutaan transaksi perhari dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan melibatkan jumlah *database* nasabah yang masif.

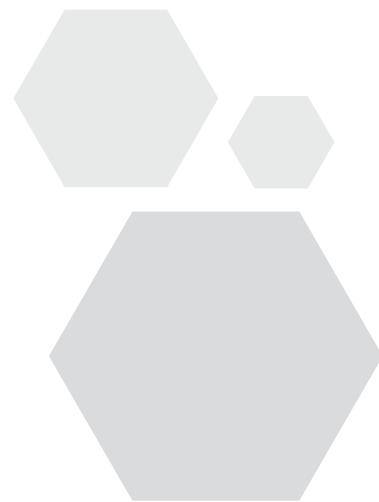
Sentra operasi BRI bertanggung jawab dalam pemrosesan dan monitoring transaksi operasional perbankan di jaringan kerja konvensional maupun *e-banking*. Untuk menjamin tercapainya target memiliki sentra operasi sesuai dengan *international best practice* yang berlaku di dunia perbankan, BRI telah membangun dan mengembangkan sistem operasional yang *fully centralized, fast, dan low risk*. Sistem operasi yang dibangun tersebut juga memiliki sistem kontrol yang terpadu (*integrated monitoring & control system*) sesuai kebutuhan BRI.

Penyempurnaan Proses Bisnis Dan Efisiensi Operasional

Program penyempurnaan proses bisnis yang telah dilakukan BRI bertujuan untuk mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan layanan yang menjamin kepuasan nasabah. Program tersebut meliputi penyempurnaan internal *business process* seluruh transaksi *back office* dan mengimplementasikan *enterprise reconciliation*.

Efisiensi operasional dilakukan secara intensif oleh BRI dengan tujuan *cost reduction* dengan tetap memperhatikan *inherent risk*. Hasil dari efisiensi operasional ini memberikan andil dalam mengontrol biaya operasional BRI dan sejalan dengan semangat *green banking*.

“
Penyempurnaan proses bisnis yang dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan layanan yang menjamin kepuasan nasabah memberi hasil berupa - meningkatnya volume transaksi, nilai transaksi dan perolehan fee based income dari transaksi tersebut.
”



Hasil Program Penyempurnaan

Realisasi strategi penyempurnaan proses bisnis dengan pelaksanaan berbagai program tersebut memberi hasil nyata dengan meningkatnya volume transaksi nasabah melalui berbagai fitur yang dikelola BRI.

Perkembangan Transaksi e-Banking BRI

Total transaksi *e-banking* di tahun 2013 mencapai 1.258,7 juta transaksi (rata-rata 3,5 juta transaksi per hari) meningkat signifikan sebesar 48,0% dibanding jumlah transaksi di tahun 2012. Peningkatan jumlah transaksi tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah kartu yang beredar, yakni mencapai 19,4 Juta kartu ATM/Debit aktif di akhir tahun 2013. Transaksi *e-banking* terbesar dilakukan menggunakan Kartu Debit sebesar 1.150,7 juta transaksi, meningkat 45,8% dari jumlah transaksi tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp 757,8 triliun di akhir 2013.

Perkembangan Transaksi RTGS Dan Kliring

Di tahun 2013 total transaksi *incoming* RTGS BRI mencapai nilai transaksi sebesar Rp 6.076 triliun dengan jumlah transaksi mencapai 1,21 juta transaksi. Sejalan dengan hal tersebut, nilai transaksi *outgoing* RTGS mencapai Rp 6.099 triliun dengan 1,35 juta transaksi.

Untuk transaksi Kliring, nominal transaksi Kliring Penyerahan Masuk (Debet Masuk) adalah Rp 23.5 triliun dengan jumlah transaksi mencapai 704,1 ribu transaksi, sedangkan transaksi Kliring Penyerahan Keluar (Debet Keluar) mencapai Rp 5,23 triliun. Sementara untuk Kliring Kredit, total transaksi *inward* mencapai Rp 47,7 triliun naik 75.0% dari tahun 2012, dengan 4,8 juta transaksi di akhir 2013, sedangkan transaksi *outward* mencapai Rp 30,9 triliun dengan 2,47 juta transaksi.

Sentra Operasi



Perkembangan Transaksi Remittance

Jumlah total *Incoming Remittance* telah mencapai 2,60 juta transaksi dengan nilai ekuivalen USD 21,87 miliar. Sementara transaksi *outgoing remittance* ditahun 2013 mencapai 45,8 ribu transaksi dengan nominal ekuivalen dengan USD 16,73 miliar.

Sertifikasi ISO 9001:2008 (Quality Management System)

Kegiatan sentra operasi BRI yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dari Badan Sertifikasi LQRA (*Lloyd's Quality Registration Assurance*) yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Internasional - UKAS (*United Kingdom Accreditation Service*) dan Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup:

- *Provision of Payment System by RTGS, Clearing dan Remittance*
- *Provision of Card Centre Production dan Complaint Handling Card Production, dan*
- *Complaint-Handling processes*

Sentra Operasi

Sasaran Strategis 2014

Memasuki tahun 2014, BRI telah menyiapkan rencana strategis terkait proses operasional guna meningkatkan kinerja operasional serta pelayanan kepada nasabah melalui berbagai program, mencakup:

- Melakukan sertifikasi ISO 9001:2008 pada Bagian Sentra Rekonsiliasi ATM dan Bagian Rekonsiliasi Sentra Operasi.
- Pengembangan Sentralisasi Warkat Debet.
- Meningkatkan rasa aman nasabah yang bertransaksi di BRI dengan jalan mengganti sebagian Kartu Debet BRI menjadi Kartu ber-*chip*.
- Peningkatan kompetensi, *skill* dan *knowledge* SDM.
- Pengembangan sistem otomasi pada semua transaksi *remittance*.

Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa



Sejalan dengan perkembangan bisnis dan perluasan jaringan kerja, BRI berupaya menjawab tantangan tersebut dengan mengelola aktiva tetap secara efisien serta memastikan terpenuhinya kebutuhan masing-masing unit kerja melalui pengadaan barang dan jasa yang optimal.

Dalam mengelola aktiva tetap dan pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalamnya properti, BRI tetap mempertahankan kaidah *Good Corporate Governance* (GCG) dengan didukung oleh aplikasi teknologi yang memadai. Dengan proses pengelolaan dan pengadaan yang lebih efisien, efektif, dan fleksibel tersebut dapat menghindarkan Perseroan dari kehilangan momentum pertumbuhan bisnis.

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan aktiva tetap dan logistik yang optimal, maka unit kerja yang melakukan fungsi manajemen aktiva tetap dan logistik serta pengadaan properti, senantiasa melakukan koordinasi secara maksimal dengan unit kerja yang melakukan perencanaan, atau permintaan kebutuhan logistik, dengan didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai.

Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan MAT dan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan aktiva tetap dan Pengadaan barang dan jasa, maka pada tahun 2013, Perseroan juga mengembangkan suatu sistem agar pemenuhan barang dan jasa dapat dilakukan secara lebih maksimal, transparan dan efisien.

Aplikasi yang ada saat ini dapat memastikan MAT BRI dan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan akuntabel dan akurat mulai dari distribusi, pengakuan aset, asuransi, pajak sampai dengan pelepasan aset tersebut

“ BRI mengembangkan Sistem Pengelolaan Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi. ”

Sistem aplikasi tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Sistem SIM-AT
Sistem ini berfungsi untuk mengelola database aktiva tetap BRI secara terpusat.
2. Sistem PDCA
Sistem ini mempunyai fungsi monitoring *Service Level Agreement (SLA)*, yang berupa standar waktu proses pengadaan yang sedang berjalan.
3. Sistem Manajemen Arsip
Sistem ini berfungsi untuk mendukung penyimpanan dan pengelolaan dokumen pengadaan secara komputerisasi, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengecekan ulang berkas.
4. Sistem E-Auction
Sistem ini digunakan sebagai alat seleksi harga terbaik secara komputerisasi dalam melakukan pengadaan, baik melalui pemilihan langsung maupun lelang.

Rencana Strategis MAT dan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam mendukung pengelolaan MAT dan pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran kegiatan operasional, di tahun 2014 telah disiapkan beberapa rencana strategis, yang mencakup:

1. Optimalisasi Aset
2. Percepatan layanan pengadaan barang dan jasa.
3. Standarisasi barang dan jasa.
4. Pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa yang akurat.
5. Peningkatan kualitas barang dan jasa.
6. Optimalisasi organisasi dan proses bisnis serta penyesuaian kebijakan kelogistikan.

Manajemen Risiko



Selama tahun 2013 bisnis BRI tetap berkembang ditengah dinamika kondisi perekonomian dan persaingan bisnis perbankan yang semakin kompetitif. Untuk menjadi yang terdepan, BRI mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan jasa secara berkelanjutan, serta perluasan unit kerja dan *e-channel*. Seiring dengan hal tersebut, BRI juga dihadapkan pada risiko bisnis yang selalu dinamis. Sehingga penerapan *enterprise-wide risk management* lebih difokuskan pada penciptaan nilai perusahaan sesuai tingkat risiko yang diambil.

Proses Manajemen Risiko diterapkan secara konsisten dalam setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional perbankan BRI sehari-hari karena merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu menjadi bank yang sehat dan bertumbuh secara berkesinambungan.

Manajemen Risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bank melalui dua aspek, yaitu melindungi modal dan mengoptimalkan *return* terhadap risiko. Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka BRI menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi.

Manajemen Risiko dalam organisasi BRI merupakan suatu fungsi yang bersifat independen terhadap fungsi bisnis dan terhadap fungsi audit. Ketiga fungsi tersebut berperan aktif dalam menerapkan manajemen risiko dengan kewenangan yang berbeda sebagai *first line*, *second line* dan *third line of defense*. Penerapan konsep tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjaga independensi dalam proses pengambilan keputusan, agar tidak

memihak, menguntungkan unit kerja operasional tertentu, atau mengabaikan unit kerja operasional lainnya.

Dasar Acuan Manajemen Risiko

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko BRI dilakukan berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, antara lain :

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan perubahannya dalam PBI No 11/25/PBI/2009
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan perubahannya dalam SE BI No 13/23/DPNP

“ BRI menerapkan pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi.

Enterprise-wide risk management diterapkan dengan konsep *three lines of defense* dan dilengkapi oleh Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) serta evaluasi berkala untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko

”

Dari sisi internal, BRI telah menetapkan Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) BRI yang diatur dalam SK Nokep S.248-DIR/DMR/04/2009 beserta beberapa kebijakan turunannya yang mengatur penerapan manajemen risiko di unit kerja BRI.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

BRI menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu (*enterprise-wide risk management*) untuk mengendalikan delapan jenis risiko yang menyertai kegiatan usaha. Kerangka tersebut meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai PBI No.11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang terdiri dari (1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, (2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, (3) Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko,

serta (4) Sistem pengendalian intern. Penerapan keempat pilar di atas dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami risiko yang dihadapi BRI dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko BRI secara efektif. Dalam

melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR).

Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Selain itu Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi juga menjadi perhatian Direksi.

Direksi BRI dibantu oleh *Risk Management Committee* (RMC) sebagai komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko

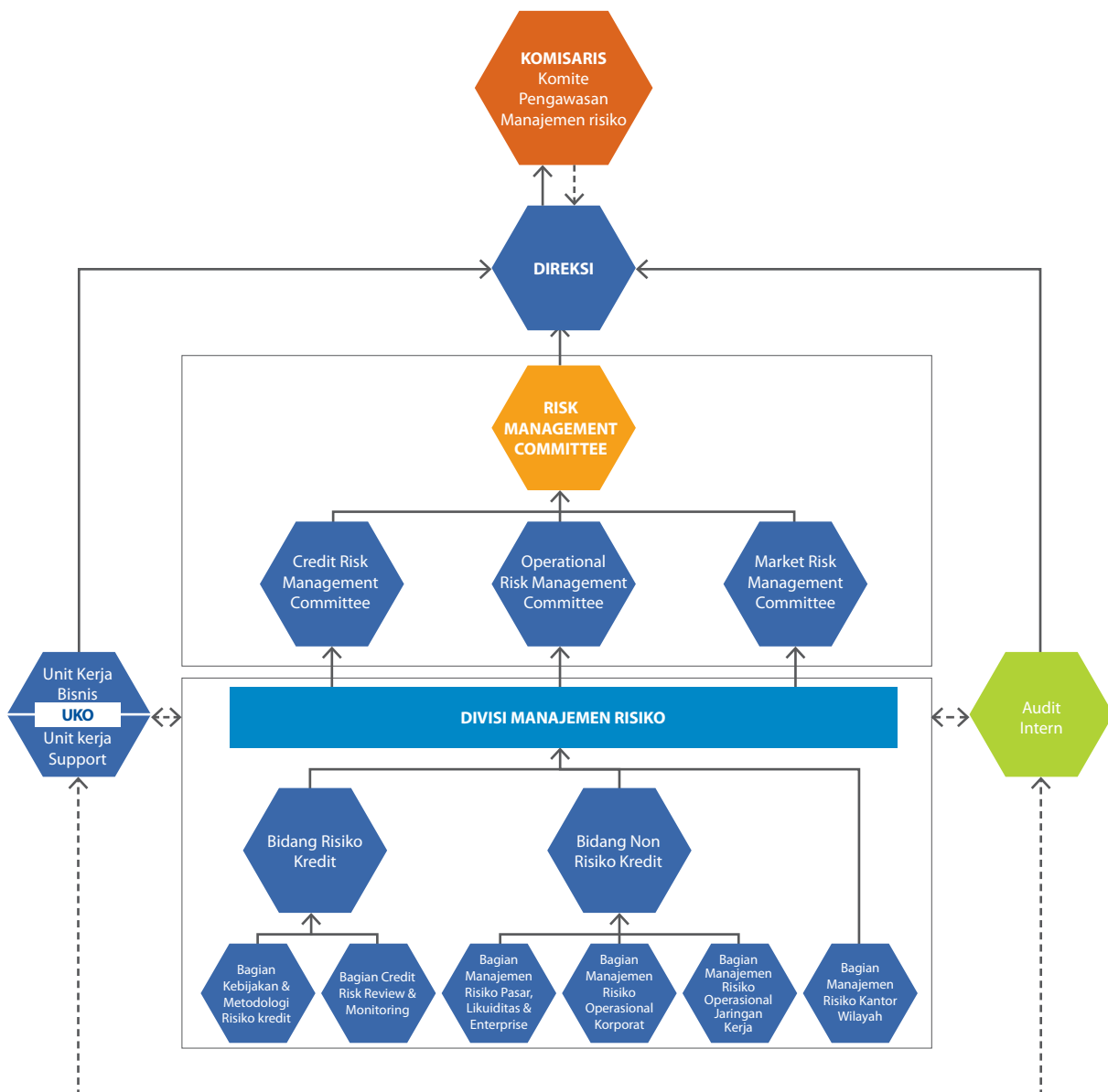
Manajemen Risiko

BRI. RMC bersifat non struktural dan independen terhadap unit kerja operasional. RMC bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan. RMC dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam waktu tiga bulan.

Untuk membahas permasalahan yang spesifik pada jenis risiko tertentu dan membutuhkan putusan segera, dilakukan rapat RMC yang bersifat terbatas,

atau yang disebut sub-RMC. Terdapat 3 (tiga) Sub-RMC yaitu CRMC (*Credit Risk Management Committee*), MRMC (*Market Risk Management Committee*), dan ORMC (*Operational Risk Management Committee*), yang dibentuk untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya.

Di bawah Direksi, struktur pengelolaan risiko BRI terdiri dari Unit Kerja Operasional, Manajemen Risiko, dan Audit Intern. Bagan struktur Organisasi Manajemen Risiko BRI adalah sebagai berikut:



Keterangan :

→ Garis kewenangan dan pertanggungjawaban *managerial line*

- - - - -> Garis komunikasi

Manajemen Risiko

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

Kebijakan Umum Manajemen Risiko BRI (KUMR BRI) menjelaskan tentang dasar-dasar kebijakan manajemen risiko BRI dan merupakan ketentuan tertinggi bidang manajemen risiko di BRI. KUMR BRI menjadi acuan kebijakan, prosedur, dan pedoman di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

KUMR diterjemahkan secara terperinci dan dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko (P3MR) yang berisi berbagai tahapan dalam proses manajemen risiko, antara lain, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. P3MR BRI terdiri atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit (P3MRK), Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (P3MRO), Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (P3MRP), dan Pedoman Pelaksanaan Penerapan *Enterprise Risk Management* (P3ERM).

Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko yang wajib dikelola dalam seluruh produk dan kegiatan usaha BRI harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), dengan memperhatikan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola risiko dimaksud. Limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Direksi BRI berwenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi untuk setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko

Proses manajemen risiko, terdiri dari :

a. Identifikasi

Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha BRI yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya. Proses identifikasi risiko akan sangat menentukan cakupan dan skala tahapan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BRI dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya.

Identifikasi *risk issue* dilakukan di level Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang seluruh Indonesia dengan menggunakan perangkat Manajemen Risiko. Dalam tahapan ini dilakukan penetapan dan pengkinian *risk issue*.

b. Pengukuran

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BRI sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis BRI. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya.

Pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko Konsolidasi triwulanan, *Dashboard* Profil Risiko bulanan, Laporan Profil Risiko Kantor Wilayah bulanan, Laporan konsolidasi RCSA triwulanan, Laporan analisa stress testing triwulanan, Laporan potensi kerugian risiko pasar mingguan, laporan monitoring *cash ratio* bulanan, dan Buku Top 50 *Risk Issue* triwulanan.

c. Pemantauan

Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha BRI serta efektivitas proses manajemen risiko. Contohnya antara lain dengan cara mengevaluasi limit, Indikator Risiko Utama, dan realisasi rencana tindak lanjut yang dibuat oleh unit kerja

Manajemen Risiko

d. Pengendalian

Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *moderate* dan *high* yang melebihi limit, peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian, dan audit internal secara periodik. Di samping itu juga dilakukan analisis terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) BRI dan merupakan pendukung penting dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen risiko yang diaplikasikan antara lain, *Operational Risk Assessor* (OPRA), *Loan Approval System* (LAS), dan *Treasury and Market Risk System* (GUAVA).

4. Sistem pengendalian intern manajemen risiko

Pengendalian intern secara menyeluruh telah diimplementasikan melalui :

- a. Penetapan struktur organisasi, dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*business unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).
- b. Penetapan *risk management unit*, yaitu unit kerja independen yang membuat kebijakan manajemen risiko, metodologi pengukuran risiko, penetapan limit risiko, dan melakukan validasi data/ model.

- c. Menerapkan konsep *three lines of defense*
- d. Setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko, akan direview dan dipantau sesuai kebutuhan, oleh masing-masing business unit.
- e. Validasi data dilakukan oleh pejabat dan unit kerja yang independen dari unit kerja operasional. Validasi data dilakukan minimal secara bulanan untuk semua risiko.
- f. Audit secara berkala dilakukan oleh unit kerja Audit Intern, untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko.
- g. Menerapkan kegiatan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dengan menggunakan konsep *Maker, Checker, Signer* (MCS) pada seluruh kegiatan operasional BRI.

Penerapan Struktur Dan Sistem Manajemen Risiko

Penerapan keempat pilar diatas, diantaranya dilakukan melalui beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan dan fungsi Organisasi, antara lain:
 - a. Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR) merupakan komite pada tingkat Dewan Komisaris yang bertugas membantu Komisaris dalam pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko yang dilakukan Direksi.
 - b. *Risk Management Committee* (RMC) merupakan komite yang membantu Direksi dalam implementasi Manajemen Risiko. RMC beranggotakan seluruh anggota Direksi

dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi BRI yang ditunjuk. RMC bertugas membahas profil risiko BRI secara keseluruhan dan strategi risiko. RMC dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

- c. Unit Kerja Manajemen Risiko adalah unit kerja yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses manajemen risiko dan bersifat independen dari Unit Kerja Operasional dan Unit Kerja Audit Intern.
 - d. Fungsi Manajemen Risiko merupakan fungsi / peran yang dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk di setiap Unit Kerja Operasional dan bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko dalam aktivitas fungsional di masing-masing unit kerja.
2. Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai ketentuan tertinggi di bidang manajemen risiko dan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko (P3MR) bidang Kredit, Operasional, Pasar, dan Terpadu.
 3. Penetapan limit-limit risiko dan pelaksanaan stress testing.
 4. Penetapan perangkat dan metodologi pengukuran risiko yang terdiri dari:
 - a. Operational risk
 - (1). Perangkat: *Risk and Control Self Assessment*, Indikator Risiko Utama, Manajemen Insiden, Forum Manajemen Risiko, dan Penilaian Tingkat Maturitas.

Manajemen Risiko

- (2). Metodologi: *Basic Indicator Approach* (BIA) dan secara bertahap menuju *Standardized Approach* (SA), kemudian *Advanced Measurement Approach* (AMA).
- b. *Credit risk*
 - (1). Perangkat: *Credit Risk Rating* (CRR) dan *Credit Risk Scoring* (CRS).
 - (2). Metodologi: *Standardized Approach* (SA) dan secara bertahap menuju *Internal Rating Based Approach* (IRBA).
- c. *Market risk*
 - (1). Perangkat: VaR, *Sensitivity Analysis*, *Maturity Gap*, *Maximum Cash Outflow*.
 - (2). Metodologi: *Standardized Approach* (SA) dan siap menerapkan *Internal Model*.
5. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko diantaranya, *Operational Risk Assesor* (OPRA) untuk Risiko Operasional, *Loan Approval System* (LAS) untuk Risiko Kredit, dan *Treasury and Market Risk System* (GUAVA) untuk Risiko Pasar.
6. Peningkatan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan kerangka kerja Manajemen Risiko, antara lain melalui pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di setiap Unit Kerja, adanya Fungsi Manajemen Risiko yang melekat pada pejabat yang ditunjuk di Unit Kerja. Selain itu, di setiap Kantor Wilayah, ada Bagian Manajemen Risiko Kanwil (MRK) yang bertugas melakukan pembinaan, monitoring, dan verifikasi terhadap implementasi proses Manajemen Risiko di Kantor Wilayah.

Program Kerja Manajemen Risiko

Selama tahun 2013, program kerja dan implementasi manajemen risiko yang telah dilakukan Bank BRI adalah:

1. Implementasi pengukuran Risiko Kredit dengan *Standardized Approach* (SA) secara otomatis dan simulasi pengukuran Risiko Kredit dengan metode *Internal Rating Based Approach* (IRBA).
2. Melakukan review kebijakan dan metodologi *Credit Risk Rating-Credit Risk Scoring* (CRR-CRS), *Credit Risk Modelling* (PD, LGD dan EAD) sesuai karakteristik kredit, kebutuhan MIS dan sistem CRM BRI, serta simulasi *risk based pricing / risk premium* dengan data CRR dan CRS untuk seluruh segmen bisnis.
3. Melakukan simulasi *stress test* Risiko Kredit untuk mengevaluasi dampak kerugian dengan mengacu pada kondisi eksternal dan kondisi makro ekonomi tahun 2013, antara lain: pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga acuan. *Stress test* dibuat dengan berbagai skenario baik secara hipotetikal maupun historikal dengan memperhatikan kejadian krisis yang pernah terjadi.
4. Melaksanakan *back testing* untuk mengetahui hasil perhitungan model yang digunakan masih valid dan dapat menggambarkan risiko yang sesungguhnya.
5. Melakukan review persyaratan kuantitatif untuk penyempurnaan perhitungan risiko pasar (VaR) yang dihasilkan oleh sistem aplikasi *Treasury and Market Risk* (GUAVA), dan review persyaratan kualitatif, dalam hal ini menempatkan staf yang kompeten secara *dedicated* untuk menjalankan fungsi *Middle Office*.
6. Melakukan penetapan limit transaksi dan limit risiko pasar dikaitkan dengan internal model.
7. Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko operasional yang dilakukan melalui sumber informasi dari Forum Manajemen Risiko dan perangkat OPRA. Perangkat ini memfasilitasi penerapan MRO secara terintegrasi sebagai persiapan proses penghitungan *capital charge* risiko operasional menggunakan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA)
8. Melakukan uji tingkat kecukupan pengelolaan risiko atas usulan produk dan atau aktivitas baru (PAB). Setiap produk dan atau aktivitas baru yang diajukan oleh unit kerja pemrakarsa harus dikaji ulang untuk memastikan pengelolaan risiko pada produk dan atau aktivitas baru tersebut sudah memadai.
9. Menerapkan Strategi *anti Fraud* sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko dalam mengantisipasi terjadinya fraud di BRI
10. Melakukan koordinasi pelaksanaan Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU) secara berkesinambungan dengan unit-unit kerja terkait diantaranya, uji coba *Switch Over DC-DRC*, *call tree* dan evakuasi bencana di unit kerja BRI dengan risiko tinggi.
11. Melakukan pemenuhan data dan MIS untuk mendukung implementasi Basel III
12. Melakukan sosialisasi dan pemahaman terkait implementasi manajemen risiko kepada seluruh unit kerja sebagai bagian dari budaya sadar risiko.

Manajemen Risiko

Risiko Yang Dihadapi

Proses manajemen risiko diterapkan secara konsisten dalam setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional perbankan sehari-hari. Konsistensi ini merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan BRI dalam mencapai target kinerja secara optimal sesuai yang telah ditetapkan, yaitu menjadi bank yang sehat dan bertumbuh secara berkesinambungan.

Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi strategi usaha BRI baik secara langsung maupun tidak langsung serta upaya BRI untuk mengelola risiko tersebut, diklasifikasikan ke dalam delapan jenis risiko sebagai berikut:

Risiko Kredit

Penerapan manajemen risiko kredit di BRI dilakukan melalui desain struktur organisasi yang menggambarkan keterlibatan seluruh pihak yang terkait manajemen risiko kredit (Komisaris, Direksi, Komite, Divisi Manajemen Risiko, Unit Kerja Operasional serta Audit Intern). Unit kerja operasional terdiri dari *Core Risk Taking Unit* dan *Supporting Risk Taking Unit*. BRI memiliki suatu Komite Manajemen Risiko Kredit (*Credit Risk Management Committee/CRMC*), yang merupakan *Sub Risk Management Committee* (RMC) untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan eksposur risiko kredit dan penerapan manajemen risiko kredit.

Dalam rangka mengelola risiko kredit, BRI telah menetapkan beberapa prinsip *prudential banking* yang tercermin dalam kebijakan perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, pengelolaan, dan proses putusan kredit. Beberapa contohnya antara lain, pemisahan fungsi pejabat kredit yaitu RM (*Relationship Management*) dan CRM (*Credit Risk Management*), penerapan *Four Eyes Principle*, penerapan *Risk Rating/Scoring System* (CRR dan CRS), pemisahan pengelolaan kredit bermasalah, serta penetapan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD), dan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT).

Pemisahan fungsi RM dan CRM serta pemisahan pengelolaan kredit lancar (*performing*) dengan pengelolaan kredit bermasalah berada pada divisi yang terpisah, dimaksudkan agar pengelolaan risiko dalam aktivitas perkreditan dapat dilaksanakan secara lebih fokus tanpa mengganggu proses bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan bisnis yang sehat. Selain itu BRI menerapkan proses uji kepatuhan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan guna memastikan prinsip kehati-hatian untuk putusan kredit diatas nilai tertentu.

BRI telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit melalui pedoman penetapan limit risiko kredit. Pedoman tersebut ditujukan untuk menetapkan limit risiko kredit pada level portofolio atau level bank secara keseluruhan yang dilaksanakan untuk seluruh produk dan aktivitas BRI yang berisiko kredit, dengan tetap memperhatikan kemampuan modal untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur. Penetapan limit risiko kredit bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran pinjaman.

BRI mengelola Risiko Kredit dengan melakukan pemantauan atas konsentrasi kredit dan eksposur Risiko Kredit aktual secara portofolio, segmen bisnis dan sektor ekonomi, terkait dengan limit Risiko Kredit dan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran dan pengendalian risiko kredit dilakukan melalui penilaian risiko debitur dengan menggunakan *Internal Risk Rating (Credit Risk Rating / Credit Risk Scoring)* sejak tahun 2001. Pemingkatan internal (*Credit Risk Rating/Credit Risk Scoring*) yang digunakan di BRI saat ini disusun berdasarkan data empiris/historis dari debitur *existing* BRI dengan menggunakan metodologi statistik.

Atas pemingkatan internal ini dilakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan, dan dilakukan penyesuaian asumsi jika terjadi perubahan ketentuan baik eksternal (regulator) maupun internal. Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model *internal rating* tersebut, telah dilakukan validasi oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Proses validasi atau review atas model pengukuran risiko kredit dilakukan dengan metode *back testing*.

Perhitungan CRR dan CRS dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan proses bisnis melalui aplikasi *Loan Approval System (LAS)*. LAS dirancang agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang.

Manajemen Risiko

Internal Rating (CRR) di BRI dapat digunakan untuk menentukan besarnya suku bunga yang akan dikenakan kepada calon debitur (*Risk Based Pricing*). Pendekatan *risk based pricing* ini memungkinkan dilakukannya diskriminasi harga sesuai dengan tingkat risiko (*high risk-high return*).

BRI juga telah melakukan analisis *Stress Testing* secara berkala menggunakan data makro ekonomi dan data internal BRI dalam berbagai skenario. Pengendalian Risiko Kredit dilakukan melalui berbagai *risk control* yang telah *built-in* dalam prosedur pemberian kredit yang diatur sejak proses prakarsa atau permohonan kredit, pembinaan dan monitoring, restrukturisasi, sampai dengan penyelesaian untuk kredit bermasalah.

Adapun pengukuran kebutuhan modal minimum Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan ketentuan BRI yang mengacu pada ketentuan BI yaitu *Standardized Approach Basel II* sejak Januari 2012. Perhitungan risiko kredit tercermin

dalam nilai ATMR Risiko Kredit yang dihitung secara bulanan, terdiri dari risiko kegagalan debitur, risiko kegagalan *counterparty* dan risiko kegagalan *settlement*. Secara paralel, BRI juga sedang mempersiapkan dan mengembangkan metodologi *Internal Rating Based Approach (IRBA)*.

Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dan Tagihan yang mengalami Penurunan Nilai / Impairment

BRI menetapkan definisi tersendiri untuk tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai. Tagihan yang telah jatuh tempo adalah merupakan seluruh tagihan / kelompok tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga.

Seluruh tagihan dapat mengalami penurunan nilai/*impairment* apabila dalam suatu kondisi terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas asset keuangan atau kelompok asset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti obyektif adalah hasil observasi atas peristiwa yang menjadi perhatian BRI yang mempengaruhi kesanggupan bayar debitur di masa mendatang sehingga merugikan terhadap kredit yang dimiliki BRI. Apabila terjadi penurunan nilai pada kredit tersebut, sehingga nilai tercatat kredit setelah terjadinya penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal, maka harus dibentuk suatu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk menutup kerugian akibat terjadinya penurunan nilai tersebut. CKPN adalah cadangan kerugian yang dihitung dari besarnya penurunan nilai pada suatu asset keuangan yang dievaluasi baik secara individual maupun kolektif.

Tabel berikut menggambarkan pengungkapan tagihan bersih BRI berdasarkan kategori portofolio yang dirinci berdasarkan wilayah, sisa jangka waktu kontrak dan sektor ekonomi, bank secara individual dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

BRI telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memisahkan fungsi pejabat kredit, menerapkan *Four Eyes Principle*, mengimplementasikan *Risk Rating*, memisahkan pengelolaan kredit bermasalah, menetapkan Pasar Sasaran dan Kriteria Risiko yang dapat Diterima serta Rencana Pemasaran Tahunan dalam pengelolaan risiko kredit.

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2013							
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah							
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	123.017.637	-	-	-	-	-	3.286.158	126.303.795
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	55.478.362	2.271.153	7.202.327	401.033	3.608.948	3.530.874	-	72.492.697
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	28.671.725	17.869	-	-	-	-	85.190	28.774.784
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	21.951	130.162	19.358	40.074	22.557	42.424	-	276.526
6	Kredit Beragun Properti Komersial	571.802	909.301	31.847	113.366	147.693	152.826	-	1.926.835
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	11.358.853	41.445.520	8.496.937	8.709.679	11.588.739	18.745.846	727	100.346.301
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	20.594.390	34.330.965	13.340.445	27.250.438	21.480.251	31.479.422	-	148.475.911
9	Tagihan Kepada Korporasi	69.892.901	10.339.514	3.353.452	6.861.716	10.383.736	13.821.256	955.738	115.608.313
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	950.818	882.582	338.866	479.705	666.022	1.325.152	147	4.643.292
11	Aset Lainnya	9.262.706	2.312.107	4.502.609	5.327.512	4.960.640	4.686.379	-	31.051.953
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	319.821.145	92.639.173	37.285.841	49.183.523	52.858.586	73.784.179	4.327.960	629.900.407

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2012								
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah								
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	149.940.931	-	-	-	-	-	-	1.213.431	151.154.363
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	47.047.663	997.753	6.388.158	265.772	3.943.597	1.998.875	-	-	60.641.818
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	25.532.052	19.392	-	-	-	-	48.188	-	25.599.632
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	253.940	247.346	58.089	113.981	88.908	135.348	-	-	897.612
6	Kredit Beragun Properti Komersial	109.525	551.225	36.549	26.433	115.488	121.622	-	-	960.842
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	9.166.298	34.078.351	7.361.636	7.542.409	10.223.946	15.431.823	576	-	83.805.039
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	16.083.980	29.016.175	9.895.381	20.859.767	16.318.850	26.814.069	245	-	118.988.467
9	Tagihan Kepada Korporasi	45.359.160	9.811.126	2.130.016	5.441.212	9.042.363	11.427.074	445.540	-	83.656.491
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	486.434	368.869	205.538	285.239	396.767	752.636	-	-	2.495.483
11	Aset Lainnya	2.341.591	6.212.579	42.041	6.676.846	5.368.040	2.564.151	-	-	23.205.248
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	296.321.575	81.302.816	26.117.407	41.211.659	45.497.958	59.245.600	1.707.979	-	551.404.995

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2013							
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah							
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	123.566.813	-	-	-	-	-	3.286.158	126.852.971
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	55.510.512	2.271.153	7.202.327	401.033	3.608.948	3.580.707	-	72.574.680
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	29.137.764	17.869	-	-	52.107	55.998	85.190	29.348.928
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	30.006	139.164	21.930	41.456	24.702	95.396	-	352.654
6	Kredit Beragun Properti Komersial	571.802	909.487	31.847	113.366	147.693	199.412	-	1.973.607
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	11.433.549	41.452.300	8.650.421	8.733.482	11.642.053	19.066.597	727	100.979.129
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	20.909.057	34.436.923	13.340.445	27.282.606	21.827.756	31.731.199	-	149.527.986
9	Tagihan Kepada Korporasi	71.775.516	10.378.071	3.388.266	6.954.495	10.383.986	13.961.207	955.738	117.797.279
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	950.818	882.582	338.866	479.705	666.022	1.325.152	147	4.643.292
11	Aset Lainnya	9.298.458	2.316.287	4.512.794	5.327.868	4.962.098	4.706.004	-	31.123.509
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	7.109.118	1.869.908	3.213.382	1.676.268	1.403.279	2.346.148	-	17.618.103
Total		330.293.413	94.673.744	40.700.278	51.010.279	54.718.644	77.067.820	4.327.960	652.792.138

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2012							
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah							
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	150.988.567	-	-	-	-	-	1.213.431	152.201.999
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	47.063.728	997.753	6.388.158	265.772	3.943.597	2.105.940	-	60.764.948
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	25.914.992	19.559	118	1.019	35.365	1.856	48.188	26.021.097
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	254.550	251.597	59.769	114.565	91.140	176.702	-	948.324
6	Kredit Beragun Properti Komersial	109.525	551.225	36.549	26.433	117.124	132.335	-	973.191
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	9.211.261	34.086.797	7.462.944	7.569.016	10.257.119	15.627.129	576	84.214.842
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	16.304.468	29.086.123	9.895.381	20.893.067	16.333.224	27.369.680	245	119.882.187
9	Tagihan Kepada Korporasi	46.062.770	9.811.126	2.146.866	5.451.117	9.224.616	11.559.640	445.540	84.701.675
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	486.434	368.869	205.538	285.239	396.767	752.636	-	2.495.483
11	Aset Lainnya	2.376.718	6.213.150	43.901	6.677.885	5.368.962	2.587.873	-	23.268.488
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	6.665.301	1.229.885	2.336.517	1.345.593	1.056.574	1.694.567	-	14.328.437
Total		305.438.314	82.616.084	28.575.740	42.629.707	46.824.487	62.008.359	1.707.979	569.800.670

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu - Bank Secara Individual (dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		≤1 tahun	>1thn s.d. 3thn	>3thn s.d. 5thn	> 5thn	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	14.075.952	412.539	174.321	38.526.536	73.114.447	126.303.795
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	20.936.788	5.400.009	7.188.676	31.034.623	7.932.601	72.492.697
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	15.303.830	2.763.077	501.032	4.709.439	5.497.406	28.774.784
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	3.300	34.737	238.489	-	276.526
6	Kredit Beragun Properti Komersial	353	14.611	165.855	1.746.016	-	1.926.835
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	112.953	4.343.181	20.805.208	75.084.232	727	100.346.301
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	18.972.685	73.766.325	27.175.665	27.737.723	823.513	148.475.911
9	Tagihan Kepada Korporasi	20.484.098	20.019.811	16.449.464	48.650.849	10.004.091	115.608.313
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	340.916	1.254.099	1.034.301	2.013.976	-	4.643.292
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	31.051.953	31.051.953
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
TOTAL		90.227.575	107.976.952	73.529.259	229.741.883	128.424.738	629.900.407

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu - Bank Secara Individual (dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2012					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		≤1 tahun	>1thn s.d. 3thn	>3thn s.d. 5thn	> 5thn	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.745.225	164.396	394.806	38.492.607	102.357.329	151.154.363
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	15.457.768	3.533.803	8.463.648	23.456.065	9.730.534	60.641.818
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6.398.207	914.748	199.586	1.285.746	16.801.345	25.599.632
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	67	7.299	101.743	788.503	-	897.612
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.523	11.907	203.964	743.447	-	960.842
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	98.484	4.082.410	20.407.648	59.215.921	576	83.805.039
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	15.011.853	56.464.981	22.158.895	24.680.565	672.174	118.988.467
9	Tagihan Kepada Korporasi	16.531.033	17.127.190	17.357.362	32.580.445	60.461	83.656.491
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	185.673	802.917	672.432	834.460	-	2.495.483
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	23.205.248	23.205.248
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
TOTAL		63.429.833	83.109.653	69.960.084	182.077.760	152.827.665	551.404.995

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		≤1 tahun	>1thn s.d. 3thn	>3thn s.d. 5thn	> 5thn	Non- Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	14.625.128	412.539	174.321	38.526.536	73.114.448	126.852.972
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	20.983.324	5.400.009	7.201.702	31.057.046	7.932.600	72.574.681
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	15.772.409	2.766.583	603.092	4.709.439	5.497.406	29.348.929
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	40.743	10.991	43.331	257.590	-	352.655
6	Kredit Beragun Properti Komersial	19.463	23.545	178.755	1.751.844	-	1.973.607
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	143.641	4.538.247	21.090.358	75.206.157	727	100.979.130
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	19.590.940	73.903.032	27.345.318	27.865.186	823.513	149.527.989
9	Tagihan Kepada Korporasi	21.548.115	20.719.004	16.587.692	48.938.378	10.004.091	117.797.280
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	340.916	1.254.099	1.034.301	2.013.976	-	4.643.292
11	Aset Lainnya	71.556	-	-	-	31.051.953	31.123.509
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	5.126.088	3.672.287	4.099.937	3.365.018	1.354.773	17.618.103
	TOTAL	98.262.323	112.700.336	78.358.807	233.691.170	129.779.511	652.792.147

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2012					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		≤1 tahun	>1thn s.d. 3thn	>3thn s.d. 5thn	> 5thn	Non- Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	10.792.861	164.396	394.806	38.492.607	102.357.329	152.201.999
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	15.507.294	3.565.170	8.479.713	23.482.237	9.730.534	60.764.948
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6.783.599	942.550	207.857	1.285.746	16.801.345	26.021.097
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	34.498	13.421	106.743	793.662	-	948.324
6	Kredit Beragun Properti Komersial	9.531	13.706	205.926	744.027	-	973.191
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	115.693	4.200.309	20.624.603	59.273.660	576	84.214.841
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	15.310.088	56.656.464	22.402.708	24.840.754	672.174	119.882.188
9	Tagihan Kepada Korporasi	16.937.736	17.545.775	17.489.655	32.668.049	60.461	84.701.676
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	185.673	802.917	672.432	834.460	-	2.495.483
11	Aset Lainnya	63.240	-	-	-	23.205.248	23.268.487
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	3.298.957	2.055.420	1.312.688	7.661.372	-	14.328.437
	TOTAL	69.039.170	85.960.130	71.897.131	190.076.574	152.827.665	569.800.670

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2013					
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	5.224.676	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	2.426.681	-	663.775
4	Industri Pengolahan	-	18.198.859	-	3.860.830
5	Listrik, Gas, dan Air	-	11.580.188	-	24
6	Konstruksi	-	3.446.490	-	26.156
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	10.613.440	-	85.736
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	14.071
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	7.166.479	-	2.139
10	Perantara Keuangan	94.391.704	4.085.108	-	16.952.333
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	728.962	-	19.928
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.286.264	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	6.177.187	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	14.843.976	2.394.542	-	530.475
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	541.438	213.674	-	577.810
19	Bukan Lapangan Usaha	10.214	-	-	2.959.879
20	Lainnya	13.230.199	236.411	-	3.081.628
Total		126.303.795	72.492.697	-	28.774.784

Manajemen Risiko

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti komersial	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan kepada UKM dan Portfolio Retail	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Asset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah (Apabila Ada)
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	116	926	46.770	17.585.381	13.992.876	290.811	-	-
	-	-	4.652	1.542.929	263.135	27.077	-	-
	-	-	720	237.048	3.008.407	30.077	-	-
	520	-	5.677	3.878.606	29.746.185	143.934	-	-
	-	-	1.496	124.907	2.000.195	4.392	-	-
	281	-	24.755	965.608	7.199.366	344.434	-	-
	7.248	-	47.979	83.270.390	38.863.630	2.476.618	-	-
	74	1.849.606	5.036	1.193.333	534.129	26.634	-	-
	106	53.796	6.641	1.722.805	3.157.253	77.418	-	-
	-	-	6.896	127.667	179.661	1.449	-	-
	75.660	22.507	41.549	3.515.871	3.204.841	199.548	-	-
	-	-	235.314	54.684	65.551	2.380	-	-
	-	-	343.742	188.592	141.125	4.634	-	-
	767	-	61.563	569.001	539.861	28.718	-	-
	977	-	196.141	5.245.676	1.366.115	41.860	-	-
	-	-	4.181	1.044.560	29.355	4.704	-	-
	16.435	-	43.108.553	16.723.525	6.933.994	709.452	-	-
	174.342	-	56.204.636	10.481.669	2.592.211	229.152	-	-
	-	-	-	709	1.784.503	-	-	-
	-	-	-	2.950	5.920	-	31.051.953	-
	276.526	1.926.835	100.346.301	148.475.911	115.608.313	4.643.292	31.051.953	-

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2012					
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	6.922.468	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	2.238.220	-	-
4	Industri Pengolahan	-	17.202.468	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	10.904.668	-	-
6	Konstruksi	-	3.316.216	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	101.275	699.630	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	5.967.591	-	-
10	Perantara Keuangan	132.771.913	4.601.737	-	25.599.631
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	4.891.847	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	564.752	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	18.281.148	3.332.219	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20	Lainnya	-	-	-	-
Total		151.154.363	60.641.818	-	25.599.631

Manajemen Risiko

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti komersial	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan kepada UKM dan Portfolio Retail	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Asset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah (Apabila Ada)
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	1.029	28.800	12.335.457	11.188.698	66.522	-	-
	-	-	1.088	1.110.494	179.797	11.217	-	-
	337	-	173	149.521	2.899.476	19.136	-	-
	904	-	6.352	2.520.535	21.127.750	90.791	-	-
	-	-	2.350	72.240	738.153	2.880	-	-
	-	-	38.903	876.020	5.724.403	85.568	-	-
	7.897	-	40.388	62.084.235	24.563.633	1.983.886	-	-
	446	914.073	1.156	654.544	392.379	15.901	-	-
	170	16.061	9.406	962.580	2.101.510	32.763	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	20.840	29.679	69.634	4.191.578	2.859.632	73.935	-	-
	234	-	135.319	69.311	51.673	1.317	-	-
	671	-	479.483	198.872	78.053	1.989	-	-
	2.652	-	68.935	372.964	406.329	3.860	-	-
	-	-	10.883	1.728.244	676.406	3.755	-	-
	-	-	566	316.346	8.599	-	-	-
	-	-	-	46	-	-	-	-
	15.350	-	71.567.214	25.993.260	9.896.369	97.605	-	-
	848.110	-	11.344.389	5.352.222	763.632	4.360	-	-
	-	-	-	-	-	-	23.205.248	-
	897.612	960.842	83.805.039	118.988.467	83.656.492	2.495.484	23.205.248	-

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2013					
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	5.287.534	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	2.426.681	-	663.775
4	Industri Pengolahan	-	18.198.859	-	3.860.830
5	Listrik, Gas, dan Air	-	11.580.188	-	24
6	Konstruksi	-	3.446.490	-	26.156
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	10.613.440	-	85.736
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	14.071
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	7.166.479	-	2.139
10	Perantara Keuangan	94.391.704	4.085.108	-	17.008.727
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	728.962	-	72.035
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.286.264	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	-	6.177.187	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	14.843.976	2.394.542	-	530.475
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	541.438	213.674	-	578.800
19	Bukan Lapangan Usaha	10.214	-	-	2.959.879
20	Lainnya	13.779.375	255.537	-	3.546.281
Total		126.852.971	72.574.681	-	29.348.928

Manajemen Risiko

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan kepada UKM dan Portfolio Retail	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Asset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah (Apabila Ada)
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	6.932	33.947	83.644	17.879.672	14.391.762	290.811	-	217.238
	678	664	4.791	1.544.702	263.135	27.077	-	45.987
	177	221	720	237.494	3.008.407	30.077	-	115.326
	2.545	314	7.330	4.058.473	30.067.833	143.934	-	1.555.500
	-	-	1.496	124.907	2.000.195	4.392	-	58.538
	1.338	-	61.838	993.654	7.294.703	344.434	-	580.609
	41.612	4.980	49.459	83.587.260	39.061.809	2.476.618	-	2.465.631
	184	1.849.606	5.036	1.199.798	570.455	26.634	-	152.586
	355	53.796	6.679	1.745.397	3.264.983	77.418	-	728.609
	-	-	6.896	132.126	675.274	1.449	-	4.934.702
	87.852	29.553	49.088	3.569.004	3.225.361	199.548	-	256.852
	-	-	235.314	54.684	65.551	2.380	-	73.715
	-	-	343.742	188.592	141.125	4.634	-	77.949
	767	387	61.563	569.855	539.861	28.718	-	14.304
	1.111	-	196.898	5.340.275	1.366.115	41.860	-	62.814
	497	-	4.181	1.044.650	29.355	4.704	-	-
	16.435	-	43.108.553	16.723.525	6.933.994	709.452	-	-
	192.172	139	56.751.902	10.530.262	2.775.334	229.152	-	1.520.828
	-	-	-	709	1.784.503	-	-	-
	-	-	-	2.950	337.525	-	31.123.509	4.756.915
	352.655	1.973.607	100.979.130	149.527.989	117.797.280	4.643.292	31.123.509	17.618.103

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2012					
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	7.045.598	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	2.238.220	-	-
4	Industri Pengolahan	-	17.202.468	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	10.904.668	-	-
6	Konstruksi	-	3.316.216	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	101.275	699.630	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	5.967.591	-	-
10	Perantara Keuangan	132.771.913	4.601.737	-	25.601.880
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	4.891.847	-	34.592
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	-	564.752	-	1.297
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	18.281.148	3.332.219	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20	Lainnya	1.047.636	-	-	383.327
Total		152.201.999	60.764.948	-	26.021.096

Manajemen Risiko

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan kepada UKM dan Portfolio Retail	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Asset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah (Apabila Ada)
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.516	3.929	35.761	12.767.478	11.305.321	66.522	-	65.860
	871	723	1.276	1.111.129	179.797	11.217	-	-
	337	-	173	149.969	2.899.476	19.136	-	53.464
	1.903	358	8.160	2.535.273	21.309.146	90.791	-	591.731
	-	-	2.350	72.240	738.153	2.880	-	1.895
	925	-	39.587	891.151	5.840.486	85.568	-	56.020
	41.858	6.827	40.417	62.156.743	24.730.935	1.983.886	-	151.699
	591	914.073	1.156	654.963	411.100	15.901	-	-
	564	16.061	9.493	974.976	2.140.352	32.763	-	51.641
	-	-	-	9.285	262.897	0	-	3.808.422
	24.129	30.642	73.206	4.199.102	2.876.482	73.935	-	1.633
	234	-	135.319	69.311	51.673	1.317	-	2.385.600
	671	-	479.483	198.899	78.053	1.989	-	-
	2.652	462	68.935	373.552	406.329	3.860	-	-
	98	-	10.973	1.887.865	676.748	3.755	-	-
	-	-	566	316.346	8.599	-	-	-
	-	-	-	46	-	-	-	-
	21.864	115	71.963.598	26.161.637	9.944.954	97.605	-	-
	848.110	-	11.344.389	5.352.222	763.632	4.360	-	-
	-	-	-	-	77.543	-	23.268.489	7.160.472
	948.323	973.191	84.214.842	119.882.187	84.701.676	2.495.484	23.268.489	14.328.437

Manajemen Risiko

Pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pendekatan yang digunakan BRI dalam menentukan jenis evaluasi Risiko Kredit pada Aset Kredit, apakah dinilai secara individual atau kolektif adalah sebagai berikut :

1. *Individual Impairment*
 - Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai.
 - Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.
2. *Collective Impairment*
 - Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.
 - Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.
 - Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Metodologi Perhitungan CKPN

Perhitungan CKPN BRI dilakukan dengan metodologi sebagai berikut :

1. *Individual Impairment:*
 - *Discounted Cash Flow*
Dilakukan dengan estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang, dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut. Kerugian penurunan nilai dihitung dengan membandingkan nilai tercatat aset keuangan dengan arus kas yang didiskontokan dengan *discount factor* berdasarkan suku bunga efektif aset keuangan dimaksud.
 - *Fair Value of Collateral*
Pengukuran aset keuangan yang mengalami penurunan nilai mencerminkan nilai wajar agunannya. Agunan tersebut tidak diakui sebagai aset secara terpisah dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai
2. *Collective Impairment*
Penetapan tingkat kerugian historis dilakukan dengan menggunakan metode statistik berdasarkan *internal loan grades* dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - *Probability of Default (PD)*
yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang diukur dengan menggunakan *Roll Rate Method* (menggunakan data umur tunggakan aset keuangan), *Migration Analysis* (berdasarkan *internal rating system* yang dilakukan dengan menganalisa tingkat migrasi outstanding aset keuangan dari grade tertinggi ke grade terendah)
 - *Loss Given Default (LGD)*
yaitu besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban.

Tabel berikut menggambarkan pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan wilayah dan sektor ekonomi, bank secara individual dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

(dalam Rp Juta)

No	Keterangan	31 Desember 2013								
		Wilayah								
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Tagihan	321.757.132	93.403.193	37.626.672	49.784.691	53.623.597	75.201.545	3.593.993		634.990.823
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	5.516.629	1.511.236	771.546	709.391	1.778.686	2.473.594	184		12.761.266
	a. Belum Jatuh Tempo	4.395.037	210.373	343.232	46.477	800.003	311.648	-		6.106.770
	b. Telah jatuh Tempo	1.121.592	1.300.863	428.314	662.914	978.683	2.161.946	184		6.654.496
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	945.141	123.292	148.500	50.558	479.219	601.179	-		2.347.889
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	2.478.709	3.196.043	1.005.144	1.780.949	1.563.583	2.700.046	36		12.724.510
5	Tagihan yang hapus buku	908.306.00	986.159.00	315.852.00	505.222.00	576.170.00	1.002.798.00	-		4.294.507

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

(dalam Rp Juta)

No	Keterangan	31 Desember 2012								
		Wilayah								
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Tagihan	298.883.048	83.048.980	26.798.435	42.322.661	46.591.471	61.395.949	1.161.563		560.202.107
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	4.834.689	1.294.258	715.382	739.476	1.469.742	2.197.227	25		11.250.799
	a. Belum Jatuh Tempo	3.585.389	183.352	291.203	63.592	628.830	294.569	-		5.046.935
	b. Telah jatuh Tempo	1.249.300	1.110.906	424.179	675.884	840.912	1.902.658	25		6.203.864
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	2.004.560	100.504	153.382	81.720	444.316	590.078			3.374.560
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	1.891.294	2.702.473	963.653	1.649.896	1.364.449	2.610.287	27.313		11.209.365
5	Tagihan yang hapus buku	916.636.00	955.319.00	405.992.00	563.686.00	630.801.00	946.332.00	-		4.418.766

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak (dalam Rp Juta)

No	Keterangan	31 Desember 2013								
		Wilayah								
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Tagihan	330.865.936	95.374.650	41.038.403	51.556.877	55.458.477	78.408.352	3.593.993	-	656.296.688
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Belum Jatuh Tempo	4.531.340	244.106	569.706	64.520	838.373	379.829	-	-	6.627.874
	b. Telah jatuh Tempo	1.144.022	1.310.646	445.012	668.912	995.541	2.264.601	184	-	6.828.918
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	956.166	123.292	148.500	50.558	479.219	630.202	-	-	2.387.937
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	2.565.327	3.222.962	1.071.171	1.803.233	1.593.637	2.773.793	36	-	13.030.159
5	Tagihan yang hapus buku	912.078	987.537	316.479	505.502	576.610	1.024.713	-	-	4.322.919

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak (dalam Rp Juta)

No	Keterangan	31 Desember 2012								
		Wilayah								
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Tagihan	306.507.897	84.367.531	29.280.616	43.743.213	47.906.976	64.057.004	1.161.563	-	577.024.800
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Belum Jatuh Tempo	3.587.362	183.352	291.428	63.811	628.878	348.297	-	-	5.103.128
	b. Telah jatuh Tempo	1.441.763	1.133.683	480.978	691.303	880.718	2.004.144	25	-	6.632.614
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	2.016.802	100.504	153.382	81.720	444.316	606.590	-	-	3.403.314
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	1.977.795	2.722.583	1.017.783	1.672.421	1.399.038	2.694.618	27.313	-	11.511.551
5	Tagihan yang hapus buku	945.853	955.481	406.928	563.744	630.961	946.452	-	-	4.449.419

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam Rp Juta)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2013							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	37.509.151	82.214	569.489	143.871	1.400.828	373.097
2	Perikanan	1.856.658	-	37.304	-	73.484	25.411
3	Pertambangan dan Penggalian	6.390.112	13.770	39.486	15.566	209.105	7.265
4	Industri Pengolahan	56.672.745	712.040	595.427	767.247	754.851	109.964
5	Listrik, Gas dan Air	13.726.749	21.431	4.742	10.932	230.965	1.314
6	Konstruksi	12.413.871	1.237.662	254.664	401.617	210.362	58.387
7	Perdagangan besar dan eceran	137.265.120	1.932.763	3.407.033	542.295	5.645.443	3.105.460
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3.683.955	89.290	58.904	55.673	110.677	19.082
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	12.352.025	1.103.345	151.120	163.853	266.999	30.590
10	Perantara keuangan	115.768.017	211.674	763	23.401	76.270	2.101
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	8.072.087	539.102	217.327	209.667	297.199	129.072
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3.645.352	-	1.025	-	3.284	1.927
13	Jasa Pendidikan	682.708	-	2.950	-	6.863	3.627
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.211.693	33.809	9.556	4.536	33.138	6.074
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya	13.094.096	121.268	58.546	6.273	351.751	49.315
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	1.099.459	8.402	7.124	2.958	68.768	5.846
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	85.260.952	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	71.792.658	-	23.341	-	-	111.581
19	Bukan Laporan Usaha	4.884.354	-	1.215.695	-	2.885.721	254.394
20	Lainnya	47.609.061	-	-	-	98802	-
	Total	634.990.823	6.106.770	6.654.496	2.347.889	12.724.510	4.294.507

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam Rp Juta)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2012							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	31.161.976	46.506	443.559	185.924	1.210.222	330.783
2	Perikanan	1.326.643	-	22.900	-	42.838	18.358
3	Pertambangan dan Penggalian	5.366.485	8.376	75.705	44.786	102.662	3.845
4	Industri Pengolahan	41.765.582	474.774	575.308	692.178	554.624	318.177
5	Listrik, Gas dan Air	11.739.575	33.075	1.962	16.013	161.933	1.284
6	Konstruksi	10.725.594	1.341.813	168.486	635.522	181.162	58.172
7	Perdagangan besar dan eceran	92.944.892	644.039	3.159.188	580.197	4.261.061	2.889.746
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2.050.508	50.851	50.921	45.517	57.658	16.716
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	9.469.221	865.864	133.029	320.107	204.170	27.765
10	Perantara keuangan	163.023.872	185.840	1.006	48.558	5.576	138
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	12.370.081	195.100	283.439	109.998	268.447	146.350
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	262.397	8.588	2.841	2.690	7.224	1.617
13	Jasa Pendidikan	766.427	-	6.642	-	24.049	2.220
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	876.405	31.717	13.671	8.752	26.376	2.092
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya	3.037.044	2.192	7.876	165	117.311	9.300
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	335.257	-	258	-	20.365	45
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	46	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	131.382.761	1.156.262	1.076.597	683.441	3.572.367	541.271
19	Bukan Laporan Usaha	18.392.095	1.938	180.476	712	391.320	50.887
20	Lainnya	23.205.248	-	-	-	-	-
	Total	560.202.107	5.046.935	6.203.864	3.374.560	11.209.365	4.418.766

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

(dalam Rp Juta)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2013							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	38.507.149	116.752	618.517	180.673	1.424.369	378.576
2	Perikanan	1.905.586	12	37.769	-	74.145	25.411
3	Pertambangan dan Penggalian	6.505.887	14.867	40.295	15.566	210.654	7.273
4	Industri Pengolahan	58.650.696	790.782	596.581	767.247	776.025	109.965
5	Listrik, Gas dan Air	13.785.287	21.627	4.742	10.932	231.546	1.314
6	Konstruksi	13.156.037	1.244.849	254.664	401.617	218.772	58.387
7	Perdagangan besar dan eceran	140.253.495	1.991.591	3.409.830	542.295	5.689.019	3.105.470
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3.857.165	90.898	58.904	55.673	112.821	19.082
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	13.210.757	1.136.119	158.095	163.853	287.408	30.590
10	Perantara keuangan	121.262.520	330.050	2.638	23.401	116.201	2.102
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	8.480.869	539.952	217.822	209.667	301.047	129.072
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3.719.067	2.202	1.025	-	4.131	1.927
13	Jasa Pendidikan	760.657	115	2.950	-	7.604	3.627
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.227.218	33.900	9.556	4.536	33.283	6.074
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya	13.238.309	121.818	81.117	9.519	359.910	53.188
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	1.100.048	8.402	7.124	2.958	68.771	5.846
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	85.260.952	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	74.043.864	92.326	34.022	-	39.081	129.936
19	Bukan Laporan Usaha	4.884.354	-	1.215.695	-	2.885.721	255.079
20	Lainnya	52.486.771	91.612	77.572	-	189.651	-
	Total	656.296.688	6.627.874	6.828.918	2.387.937	13.030.159	4.322.919

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

(dalam Rp Juta)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2012							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	31.738.863	82.644	566.933	212.874	1.241.351	336.847
2	Perikanan	1.329.024	-	22.900	-	42.863	18.358
3	Pertambangan dan Penggalian	5.420.399	8.376	75.705	44.786	103.199	3.845
4	Industri Pengolahan	42.555.472	474.995	619.188	692.178	584.161	318.177
5	Listrik, Gas dan Air	11.741.470	33.075	2.125	16.013	161.969	1.284
6	Konstruksi	10.914.296	1.341.813	173.512	635.522	186.468	58.869
7	Perdagangan besar dan eceran	93.511.035	644.039	3.166.391	580.197	4.267.334	2.903.750
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2.069.987	50.851	50.921	45.517	57.871	16.716
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	9.573.069	865.864	133.375	320.107	205.538	27.765
10	Perantara keuangan	167.148.533	185.840	1.006	48.558	68.872	138
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	12.413.717	195.497	283.439	109.998	269.083	146.515
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2.673.334	8.588	2.841	2.690	69.934	1.617
13	Jasa Pendidikan	766.440	-	6.642	-	24.049	2.220
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	877.361	31.717	211.810	8.752	26.381	2.092
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya	3.182.722	16.909	7.876	1.969	123.269	9.300
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	335.257	-	258	-	20.365	45
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	46	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	132.015.885	1.160.982	1.076.822	683.441	3.591.624	549.085
19	Bukan Laporan Usaha	18.392.095	1.938	180.476	712	391.320	50.887
20	Lainnya	30.441.769	-	84.449	-	75.900	1.909
	Total	577.100.774	5.103.128	6.666.669	3.403.314	11.511.551	4.449.419

Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No	Keterangan	Posisi Tanggal Laporan	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
31 Desember 2013			
1	Saldo awal CKPN	3.374.560	11.209.365
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	(1.000.776)	5.783.757
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	-	5.783.757
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	1.000.776	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	25.895	4.268.612
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-
	Saldo akhir CKPN	2.347.889	12.724.510

Manajemen Risiko

Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No	Keterangan	Posisi Tanggal Laporan	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
31 Desember 2012			
1	Saldo awal CKPN	3.085.307	12.783.229
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	761.519	1.793.112
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	761.519	1.793.112
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	472.266	3.946.499
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	579.523
Saldo akhir CKPN		3.374.560	11.209.365

Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Konsolidasi dengan Anak Perusahaan

(dalam Rp Juta)

No	Keterangan	Posisi Tanggal Laporan	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
31 Desember 2013			
1	Saldo awal CKPN	3.403.314	11.511.551
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	(989.482)	5.815.841
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	11.294	5.827.829
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	1.000.776	11.988
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	25.895	4.297.024
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	(209)
Saldo akhir CKPN		2.387.937	13.030.159

Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Konsolidasi dengan Anak Perusahaan

(dalam Rp Juta)

No	Keterangan	Posisi Tanggal Laporan	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
31 Desember 2012			
1	Saldo awal CKPN	3.139.888	12.950.084
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	741.061	1.953.728
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	767.316	1.974.137
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	26.255	20.409
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	477.634	3.967.967
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	579.508
Saldo akhir CKPN		3.403.315	11.515.353

Counterparty Credit Risk

Risiko kredit pihak lawan terdapat pada aktivitas *treasury* dan internasional yang dilakukan oleh BRI, khususnya untuk produk *Credit Line*. Tagihan Bersih untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan tersebut terdiri dari eksposur transaksi derivatif *over the counter* (OTC), eksposur transaksi repo termasuk Risiko Kredit dari penerbit surat berharga yang menjadi *underlying* transaksi repo serta transaksi Reverse Repo. Mitigasi Risiko kredit BRI untuk *counterparty credit risk* dapat dilakukan dengan teknik pengakuan garansi dan atau penjaminan/asuransi kredit sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan regulator.

Manajemen Risiko

Tabel berikut menggambarkan Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*).

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan - Transaksi Derivatif

(dalam Rp Juta)

No	Variable yang Mendasari	31 Desember 2013								
		Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Bank Secara Individual										
1	Suku Bunga	3.529.300	8.032.200	-	4.918	1.565.102	23.173	-	23.173	
2	Nilai Tukar	2.117.580	-	-	-	-	241.453	-	241.453	
3	Lainnya	-	-	-	63	-	63	-	63	
TOTAL		5.646.880	8.032.200	-	4.981	1.565.102	264.689	-	264.689	
Bank Secara Konsolidasi										
1	Suku Bunga	3.529.300	8.032.200	-	4.918	1.565.102	23.173	-	23.173	
2	Nilai Tukar	2.117.580	-	-	-	-	241.453	-	241.453	
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Lainnya	-	-	-	63	-	63	-	63	
TOTAL		5.646.880	8.032.200	-	4.981	1.565.102	264.689	-	264.689	

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan - Transaksi Derivatif

(dalam Rp Juta)

No	Variable yang Mendasari	31 Desember 2012								
		Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Bank Secara Individual										
1	Suku Bunga	-	9.330.786	-	27.433	147.265	27.433	-	27.433	
2	Nilai Tukar	1.455.263	-	-	1.417	4.928	1.417	-	1.417	
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		1.455.263	9.330.786	-	28.850	152.193	28.850	-	28.850	
Bank Secara Konsolidasi										
1	Suku Bunga	-	9.330.786	-	27.433	147.265	27.433	-	27.433	
2	Nilai Tukar	1.455.263	-	-	1.417	4.928	1.417	-	1.417	
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		1.455.263	9.330.786	-	28.850	152.193	28.850	-	28.850	

Manajemen Risiko

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Repo - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2013			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Repo - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2012			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Repo - Bank Secara Konsolidasi Dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2013			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Manajemen Risiko

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Repo - Bank Secara Konsolidasi Dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2012			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Reverse Repo - Bank Secara Individual (dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2013			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	13.230.199	-	13.230.199	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.474.553	-	1.474.553	294.911
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
TOTAL		14.704.752	-	14.704.752	294.911

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Reverse Repo - Bank Secara Individual (dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2012			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.550.521	-	9.550.521	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	28.850	-	28.850	14.425
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
TOTAL		9.579.371	-	9.579.371	14.425

Manajemen Risiko

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Reverse Repo - Bank Secara Konsolidasi Dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2013			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	13.230.199	-	13.230.199	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.474.553	-	1.474.553	294.911
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
TOTAL		14.704.752	-	14.704.752	294.911

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Reverse Repo - Bank Secara Konsolidasi Dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2012			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.550.521	-	9.550.521	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	28.850	-	28.850	14.425
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
TOTAL		9.579.371	-	9.579.371	14.425

Manajemen Risiko

Mitigasi Risiko Kredit (MRK)

BRI memperhitungkan keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit (MRK). BRI memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari penggunaan teknik MRK seperti risiko hukum, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko pasar, termasuk prosedur untuk memastikan bahwa eksekusi agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit dilakukan dalam jangka waktu yang wajar.

Jenis agunan keuangan yang diakui adalah sebagai berikut :

- a. Uang tunai
- b. Giro, tabungan, atau deposito
- c. Emas
- d. Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara
- e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- f. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
- g. Surat-surat berharga yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia dengan peringkat minimal:
 - (1). Setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain
 - (2). Setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
 - (3). Setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral
 - (4). Setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Bank
 - (5). Setara dengan A- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Korporasi
 - (6). Setara A-2 untuk surat berharga jangka pendek.

Sepanjang termasuk jenis agunan yang diakui, instrumen yang mendasari (*underlying instruments*), atau agunan dari transaksi *reverse repo*, dapat diakui sebagai mitigasi risiko dimaksud atas transaksi *reverse repo*.

BRI memperhitungkan keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik **Mitigasi Risiko Kredit** (MRK) dan memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari penggunaan teknik MRK.

Manajemen Risiko

Dalam menetapkan nilai agunan, BRI menggunakan nilai yang lebih rendah diantara nilai pengikatan agunan, dengan nilai wajar, atau nilai pasar agunan. Penilaian kembali nilai wajar, atau nilai pasar agunan dilakukan secara berkala.

Pihak pemberi garansi yang diakui adalah :

1. Pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia;
2. Pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain apabila pihak tersebut memiliki:
 - a. Bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin; dan
 - b. Peringkat paling rendah BBB- atau yang setara;
3. Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia, Kantor Cabang Bank Asing di Indonesia, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang memiliki bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin;
4. Bank yang berbadan hukum asing yang tergolong sebagai prime bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit;
5. Lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik dan Tagihan Kepada Korporasi.

Pihak pemberi jaminan / asuransi kredit dapat berupa lembaga berstatus BUMN ataupun berstatus non BUMN. BRI telah menetapkan persyaratan tersendiri untuk tiap jenis lembaga penjaminan / asuransi kredit. Penjaminan / asuransi kredit yang saat ini diberlakukan adalah yang diterbitkan oleh lembaga penjamin berstatus BUMN maupun non BUMN. Salah satu contoh penjaminan kredit adalah pada kredit usaha rakyat (KUR) dengan penjaminan/asuransi kredit minimal 70% dari kredit yang diberikan oleh BRI dengan jangka waktu penjaminan/asuransi kredit minimal sama dengan jangka waktu kredit.

Tabel berikut menggambarkan pengungkapan tagihan bersih bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit serta pengungkapan tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit, bank secara individual dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak pada posisi 31 Desember 2013.

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan					
		0%	20%	35%	40%	45%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	112.532.052	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	590.576	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	18.083.908	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	222.498	54.028	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	285.962	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	18.911.109	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Neraca		131.443.161	18.960.446	222.498	54.028	-	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	541.544	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	1.510.297	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur TRA		541.544	1.510.297	-	-	-	
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	13.230.199	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	1.474.553	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		13.230.199	1.474.553	-	-	-	

Manajemen Risiko

2013						ATMR	Beban Modal
Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-	-
66.424.504	-	-	-	-	-	33.330.367	2.666.429
-	-	-	-	-	-	-	-
5.851.256	-	-	-	-	-	6.542.410	523.393
-	-	-	-	-	-	99.486	7.959
-	-	-	1.926.835	-	-	1.926.835	154.147
100.346.301	-	-	-	-	-	50.173.151	4.013.852
-	148.314.466	-	-	-	-	100.484.254	8.038.740
342.328	-	-	109.327.837	-	-	109.165.798	8.733.264
-	-	-	12.419	4.630.873	-	6.958.703	556.696
-	-	-	12.107.184	33.660	-	12.157.674	972.614
-	-	-	-	-	-	-	-
172.964.389	148.314.466	123.374.275	4.664.533	-	-	320.838.678	25.667.094
-	-	-	-	-	-	-	-
5.477.617	-	-	-	-	-	2.738.809	219.105
-	-	-	-	-	-	-	-
1.292.371	-	-	562.398	-	-	1.515.932	121.275
-	-	-	-	-	-	-	-
-	161.445	-	-	-	-	121.084	9.687
-	-	-	5.652.186	-	-	5.652.186	452.175
-	-	-	-	-	-	-	-
6.769.988	161.445	6.214.584	-	-	-	10.028.011	802.241
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	294.911	23.593
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	294.911	23.593

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan					
		0%	20%	35%	40%	45%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	141.220.712	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	554.509	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	15.099.885	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	441.434	456.016	162	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	192.628	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	13.734.773	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Neraca		154.955.485	15.847.022	441.434	456.016	162	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	383.130	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	4.765	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur TRA		383.130	4.765	-	-	-	
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.550.521	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepd Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	28.850	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		9.550.521	28.850	-	-	-	

Manajemen Risiko

2012						ATMR	Beban Modal
Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-	-	-	-
	54.461.925	-	-	-	-	27.338.831	2.187.106
	-	-	-	-	-	-	-
	10.466.132	-	-	-	-	8.253.043	660.243
	-	-	-	-	-	336.981	26.958
	-	-	960.842	-	-	960.842	76.867
	83.805.039	-	-	-	-	41.902.520	3.352.202
	-	118.780.469	-	-	-	81.332.743	6.506.619
	306.650	-	77.410.014	100.000	-	77.497.133	6.199.771
	-	-	-	2.495.483	-	3.743.225	299.458
	-	-	9.424.296	46.179	-	9.493.564	759.485
	-	-	-	-	-	-	-
	149.039.746	118.780.469	87.795.151	2.641.662	-	250.858.881	20.068.710
	-	-	-	-	-	-	-
	5.625.383	-	-	-	-	2.812.692	225.015
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	953	76
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	207.998	-	-	-	155.999	12.480
	-	-	5.647.200	-	-	5.647.200	451.776
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	5.625.383	207.998	5.647.200	-	-	8.616.843	689.347
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	14.425	1.154
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	14.425	1.154

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan				
		0%	20%	35%	40%	45%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	113.081.228	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	590.576	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	18.657.098	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	222.498	129.051	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	285.962	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	18.933.864	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	132.015.092	19.533.636	222.498	129.051	-
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	541.544	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	1.511.251	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	1.105	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	541.544	1.511.251	-	1.105	-
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	13.230.199	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	1.474.553	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	13.230.199	1.474.553	-	-	-

Manajemen Risiko

2013						ATMR	Beban Modal
Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
-	-	-	-	-	-	-	-
66.462.686	-	18.802	-	-	33.368.260	2.669.461	
-	-	-	-	-	-	-	
5.851.256	-	-	-	-	6.657.238	532.579	
-	-	-	-	-	129.495	10.360	
-	-	1.973.166	-	-	1.973.166	157.853	
100.979.131	-	-	-	-	50.489.566	4.039.165	
-	149.293.556	-	-	-	101.218.572	8.097.486	
342.328	-	111.379.031	-	-	111.216.992	8.897.359	
-	-	12.419	4.630.873	-	6.958.703	556.696	
-	-	12.155.158	34.487	-	12.157.674	972.614	
-	-	-	-	-	-	-	
173.635.401	149.293.556	125.538.576	4.665.360	-	324.169.666	25.933.573	
-	-	-	-	-	-	-	
5.502.617	-	-	-	-	2.751.309	220.105	
-	-	-	-	-	-	-	
1.292.371	-	562.398	-	-	1.516.123	121.290	
-	-	-	-	-	442	35	
-	-	441	-	-	441	35	
-	-	-	-	-	-	-	
-	234.430	-	-	-	175.823	14.066	
-	-	5.789.958	-	-	5.789.958	463.197	
-	-	-	-	-	-	-	
6.794.988	234.430	6.352.797	-	-	10.234.096	818.728	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	294.911	23.593	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	294.911	23.593	

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan				
		0%	20%	35%	40%	45%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	142.268.348	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	554.509	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	15.494.917	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	0	441.434	504.743	162
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	192.628	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	13.763.521	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	3.121.326	442.182	1.476.092	-	-
Total Eksposur Neraca		159.153.195	16.684.236	1.917.526	504.743	162
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	383.130	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	31.198	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	1.985	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		383.130	31.198	-	1.985	-
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.550.521	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	28.850	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		9.550.521	28.850	-	-	-

Manajemen Risiko

2012						ATMR	Beban Modal
Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-	-	-	-
	54.585.055	-	-	-	-	27.400.396	2.192.032
	-	-	-	-	-	-	-
	10.466.132	-	-	-	-	8.332.050	666.564
	-	-	-	-	-	356.472	28.518
	-	-	972.593	-	-	972.593	77.807
	84.214.841	-	-	-	-	42.107.131	3.368.570
	-	119.645.489	-	-	-	81.951.405	6.556.112
	306.650	-	78.403.400	100.000	-	78.427.193	6.274.175
	-	-	-	2.495.483	-	3.743.225	299.458
	-	-	9.455.422	49.545	-	9.529.740	762.379
	-	-	9.150.180	-	-	9.755.249	780.420
	149.572.678	119.645.489	97.981.594	2.645.028	-	262.575.451	21.006.036
	-	-	-	-	-	-	-
	5.625.383	-	-	-	-	2.812.692	225.015
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	6.240	499
	-	-	-	-	-	794	64
	-	-	598	-	-	598	48
	-	-	-	-	-	-	-
	-	236.698	-	-	-	177.523	14.202
	-	-	5.698.998	-	-	5.698.998	455.920
	-	-	-	-	-	-	-
	138.657	-	-	-	-	69.329	5.546
	5.764.040	236.698	5.699.596	-	-	8.766.173	701.294
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	14.425	1.154
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	14.425	1.154

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	112.532.052	-	-	-	-	112.532.052
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	67.015.080	-	-	-	-	67.015.080
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	23.935.164	-	-	-	-	23.935.164
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	276.526	-	-	-	-	276.526
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.926.835	-	-	-	-	1.926.835
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	100.346.301	-	-	-	-	100.346.301
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	148.314.466	223.312	19.243.840	-	-	128.847.314
9	Tagihan Kepada Korporasi	109.956.127	390.395	-	-	-	109.565.732
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4.643.292	17	-	-	-	4.643.275
11	Aset Lainnya	31.051.953	-	-	-	-	31.051.953
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca		599.997.797	613.724	19.243.840	-	-	580.140.232
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Admn.							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	541.544	-	-	-	-	541.544
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.477.617	-	-	-	-	5.477.617
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.365.067	-	-	-	-	3.365.067
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	161.445	-	-	-	-	161.445
9	Tagihan Kepada Korporasi	5.652.186	-	-	-	-	5.652.186
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		15.197.859	-	-	-	-	15.197.859
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	13.230.199	-	-	-	-	13.230.199
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	0
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.474.553	-	-	-	-	1.474.553
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		14.704.752	-	-	-	-	14.704.752

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2012					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	141.220.712	-	-	-	-	141.220.712
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	55.016.434	6.066	-	-	-	55.010.368
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	25.566.017	-	-	-	-	25.566.017
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	897.612	-	-	-	-	897.612
6	Kredit Beragun Properti Komersial	960.842	-	-	-	-	960.842
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	83.805.039	-	-	-	-	83.805.039
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	118.780.469	163.040	13.873.325	-	-	104.744.104
9	Tagihan Kepada Korporasi	78.009.292	254.732	-	-	-	77.754.559
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.495.483	-	-	-	-	2.495.483
11	Aset Lainnya	23.205.247	-	-	-	-	23.205.247
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca		529.957.148	423.838	13.873.325	-	-	515.659.984
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	383.130	-	-	-	-	383.130
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.625.383	-	-	-	-	5.625.383
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	4.765	-	-	-	-	4.765
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	207.998	-	-	-	-	207.998
9	Tagihan Kepada Korporasi	5.647.200	-	-	-	-	5.647.200
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		11.868.476	-	-	-	-	11.868.476
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.550.521	-	-	-	-	9.550.521
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	0	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	28.850	-	-	-	-	28.850
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	0	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	0	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		9.579.371	-	-	-	-	9.579.371

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	113.081.228	-	-	-	-	113.081.228
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	67.072.064	-	-	-	-	67.072.064
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	24.508.354	-	-	-	-	24.508.354
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	351.549	-	-	-	-	351.549
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.973.166	-	-	-	-	1.973.166
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	100.979.131	575	-	-	-	100.978.556
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	149.293.556	282.936	19.243.840	-	-	129.766.780
9	Tagihan Kepada Korporasi	112.007.321	413.107	-	-	-	111.594.214
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4.643.292	17	-	-	-	4.643.275
11	Aset Lainnya	31.123.509	-	-	-	-	31.123.509
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca		605.033.170	696.635	19.243.840	-	-	585.092.695
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	541.544	-	-	-	-	541.544
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.502.617	-	-	-	-	5.502.617
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.366.021	-	-	-	-	3.366.021
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.105	-	-	-	-	1.105
6	Kredit Beragun Properti Komersial	441	-	-	-	-	441
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	234.430	-	-	-	-	234.430
9	Tagihan Kepada Korporasi	5.789.958	-	-	-	-	5.789.958
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		15.436.116	-	-	-	-	15.436.116
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	13.230.199	-	-	-	-	13.230.199
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.474.553	-	-	-	-	1.474.553
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		14.704.752	-	-	-	-	14.704.752

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2012					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	142.268.348	-	-	-	-	142.268.348
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	55.139.564	6.066	-	-	-	55.133.498
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	25.961.049	-	-	-	-	25.961.049
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	946.339	-	-	-	-	946.339
6	Kredit Beragun Properti Komersial	972.593	-	-	-	-	972.593
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	84.214.841	580	-	-	-	84.214.261
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	119.645.490	203.178	13.873.325	-	-	105.568.987
9	Tagihan Kepada Korporasi	79.002.679	318.059	-	-	-	78.684.619
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.495.483	-	-	-	-	2.495.483
11	Aset Lainnya	23.268.487	-	-	-	-	23.268.487
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	14.189.780	-	-	-	-	14.189.780
Total Eksposur Neraca		548.104.653	527.883	13.873.325	-	-	533.703.445
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	383.130	-	-	-	-	383.130
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.625.383	-	-	-	-	5.625.383
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	31.198	-	-	-	-	31.198
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.985	-	-	-	-	1.985
6	Kredit Beragun Properti Komersial	598	-	-	-	-	598
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	236.698	-	-	-	-	236.698
9	Tagihan Kepada Korporasi	5.698.998	-	-	-	-	5.698.998
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	138.657	-	-	-	-	138.657
Total Eksposur TRA		12.116.646	-	-	-	-	12.116.646
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.550.521	-	-	-	-	9.550.521
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pemb Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	28.850	-	-	-	-	28.850
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		9.579.371	-	-	-	-	9.579.371

Manajemen Risiko

Pendekatan Standar

Kebijakan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dilakukan dengan Pendekatan Standar yang mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011. Dalam pendekatan standar, nominal ATMR risiko kredit merupakan hasil perkalian antara tagihan bersih dengan bobot risiko yang telah ditetapkan didasarkan pada peringkat terkini dari debitur/counterparty pihak lawan sesuai kategori portofolio atau prosentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu.

Portofolio kelompok tagihan di BRI yang telah menggunakan peringkat adalah tagihan kepada pemerintah, tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional, serta tagihan kepada korporasi. Sedangkan untuk tagihan lainnya menggunakan perhitungan bobot risiko tanpa peringkat. Lembaga pemeringkat yang

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 sd Aa3	A1 sd A3	Baa1+ sd Baa3-	Ba1+ sd Ba3-
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+(Idn) s.d AA-(Idn)	A+(Idn) s.d A-(Idn)	BBB+(Idn) s.d BBB-(Idn)	BB+(Idn) s.d BB-(Idn)
		PT ICRA Indonesia	(Idr) AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	327.310	-	7.006.817	7.446.729
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		76.858	513.718	25.000	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		713.602	1.291.124	1.094.260	10.844.049	128.498
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan		-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi		719.080	361.979	392.993	354.261	258.966
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah		-	-	-	-	-
TOTAL			1.509.540	2.494.131	1.512.253	18.205.127	7.834.193

Manajemen Risiko

digunakan BRI adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator (Bank Indonesia) sesuai ketentuan lembaga pemeringkat dalam negeri yang diakui yaitu Pefindo, PT Fitch Ratings Indonesia, dan PT ICRA Indonesia Sedangkan untuk pemeringkat internasional dapat dilakukan antara lain oleh S&P, Moody's dan Fitch.

Tabel berikut menggambarkan Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat, bank secara individual dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak pada posisi 31 Desember 2013

31 Desember 2013								
Tagihan Bersih								
		Peringkat Jangka Pendek					Tanpa Peringkat	Total
	B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	B+ sd B-	Kurang dari B-	F1+ sd F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	B1+ sd B3-	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	111.522.939	126.303.795
	-	-	-	-	-	-	71.877.121	72.492.697
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	14.703.251	28.774.784
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	113.521.034	115.608.313
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	311.624.345	343.179.589

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 sd Aa3	A1 sd A3	Baa1+ sd Baa3-	Ba1+ sd Ba3-
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	(Idr) AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	5.883.639	10.652.421
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		-	86.738	574.996	931.640	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan		-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi		199.932	4.341	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah		-	-	-	-	-
TOTAL			199.932	91.079	574.996	6.815.279	10.652.421

Manajemen Risiko

31 Desember 2012								
Tagihan Bersih								
		Peringkat Jangka Pendek					Tanpa Peringkat	Total
B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
B+ sd B-	Kurang dari B-	F1+ sd F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1+ sd B3-	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	134.618.303	151.154.363	
-	-	-	-	-	-	60.641.818	60.641.818	
-	-	-	-	-	-	-z	-	
-	-	-	-	-	-	24.006.258	25.599.632	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	83.452.219	83.656.491	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	302.718.597	321.052.304	

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 sd Aa3	A1 sd A3	Baa1+ sd Baa3-	Ba1+ sd Ba3-
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+(Idn) s.d AA-(Idn)	A+(Idn) s.d. A-(Idn)	BBB+(Idn) s.d BBB-(Idn)	BB+(Idn) s.d BB-(Idn)
		PT ICRA Indonesia	(Idr) AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	327.310	-	7.006.817	7.446.729
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		76.858	513.718	25.000	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		713.602	1.291.124	1.094.260	10.844.049	128.498
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan		-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi		719.080	361.979	392.993	354.261	258.966
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah		88.588	51.000	-	-	-
TOTAL			1.598.128	2.545.131	1.512.253	18.205.127	7.834.193

Manajemen Risiko

31 Desember 2013

Tagihan Bersih

		Peringkat Jangka Pendek					Tanpa Peringkat	Total
B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
B+ sd B-	Kurang dari B-	F1+ sd F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1+ sd B3-	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	112.072.116	126.852.972	
-	-	-	-	-	-	71.959.105	72.574.681	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	15.277.396	29.348.929	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	115.710.001	117.797.280	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	14.144.277	14.283.865	
-	-	-	-	-	-	329.162.895	360.857.727	

Manajemen Risiko

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 sd Aa3	A1 sd A3	Baa1+ sd Baa3-	Ba1+ sd Ba3-
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	(Idr) AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	5.883.639	10.652.421
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		-	86.738	574.996	931.640	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan		-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi		199.932	4.341	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah		85.467	76.000	-	-	-
TOTAL			285.399	167.079	574.996	6.815.279	10.652.421

Manajemen Risiko

31 Desember 2012								
Tagihan Bersih								
		Peringkat Jangka Pendek					Tanpa Peringkat	Total
B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
B+ sd B-	Kurang dari B-	F1+ sd F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1+ sd B3-	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
[ldr]B+ s.d [ldr]B-	Kurang dari [ldr]B-	[ldr]A1+ s.d [ldr]A1	[ldr]A2+ s.d [ldr]A2	[ldr]A3+ s.d [ldr]A3	Kurang dari [ldr]A3			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	135.665.939	152.201.999	
-	-	-	-	-	-	60.764.948	60.764.948	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	24.427.723	26.021.097	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	84.497.404	84.701.676	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	11.405.474	11.566.941	
-	-	-	-	-	-	316.761.487	335.256.661	

Manajemen Risiko

Perhitungan ATMR Risiko Kredit

Pengukuran kebutuhan modal minimum untuk menekan risiko kredit dilakukan dengan mengacu pada ketentuan BI yaitu dengan menggunakan *Standardized Approach* Basel II sejak Januari 2012.

Dalam pendekatan standar, perhitungan merupakan hasil perkalian antara tagihan bersih dengan bobot risiko yang telah ditetapkan didasarkan pada peringkat terkini dari debitur/*counterparty* pihak lawan sesuai kategori portofolio, atau prosentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu. Portofolio kelompok tagihan yang telah menggunakan peringkat adalah tagihan kepada bank dan tagihan kepada korporasi. Sedangkan untuk tagihan lainnya menggunakan perhitungan bobot risiko tanpa peringkat (*unrated*).

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko kredit posisi 31 Desember 2013 individual Bank adalah sebesar Rp 331,16 triliun. Sementara ATMR untuk risiko kredit konsolidasi dengan anak perusahaan sebesar Rp 346,92 triliun.

Tabel berikut menggambarkan perhitungan ATMR risiko kredit pendekatan standar, bank secara individual dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak pada posisi 31 Desember 2013 disajikan dalam jutaan rupiah. BRI dan anak perusahaan tidak memiliki eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan penyelesaian (*settlement risk*) serta tidak memiliki eksposur sekuritisasi.

Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Bank secara Individual (dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	112.532.052	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	67.015.080	33.330.367	33.330.367
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	23.935.164	6.542.410	6.542.410
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	276.526	99.486	99.486
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.926.835	1.926.835	1.926.835
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	100.346.301	50.173.151	50.173.151
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	148.314.466	111.235.850	100.484.254
9	Tagihan Kepada Korporasi	109.956.127	109.556.193	109.165.798
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4.643.292	6.958.729	6.958.703
11	Aset Lainnya	31.051.953	-	12.157.674
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-
Total Eksposur Neraca		599.997.796	319.823.020	320.838.676

Manajemen Risiko

Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Bank secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2012		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	141.220.712	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	55.016.434	27.341.864	27.338.831
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	25.566.017	8.253.043	8.253.043
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	897.612	336.981	336.981
6	Kredit Beragun Properti Komersial	960.842	960.842	960.842
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	83.805.039	41.902.520	41.902.520
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	118.780.469	89.085.352	81.332.743
9	Tagihan Kepada Korporasi	78.009.292	77.751.865	77.497.133
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.495.483	3.743.225	3.743.225
11	Aset Lainnya	23.205.247	-	9.493.564
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-
Total Eksposur Neraca		529.957.148	249.375.691	250.858.881

Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	113.081.228	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	67.072.064	33.368.260	33.368.260
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	24.508.354	6.657.048	6.657.048
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	351.549	129.495	129.495
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.973.165	1.973.165	1.973.165
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	100.979.130	50.489.565	50.489.278
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	149.293.557	111.970.168	101.173.853
9	Tagihan Kepada Korporasi	112.007.321	111.607.388	111.194.280
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4.643.292	6.958.729	6.958.703
11	Aset Lainnya	31.123.510	-	12.206.887
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-
Total Eksposur Neraca		605.033.170	323.153.818	324.150.970

Manajemen Risiko

Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2012		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	142.268.348	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	55.139.564	27.403.429	27.400.396
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	25.961.049	8.332.049	8.332.049
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	946.339	356.472	356.472
6	Kredit Beragun Properti Komersial	972.593	972.593	972.593
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	84.214.841	42.107.421	42.107.131
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	119.645.490	89.734.118	81.951.405
9	Tagihan Kepada Korporasi	79.002.679	78.745.252	78.427.193
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.495.483	3.743.225	3.743.225
11	Aset Lainnya	23.268.487	-	9.529.740
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-
Total Eksposur Neraca		533.914.873	251.394.558	252.820.202

Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif - Bank secara Individual (dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	541.544	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.477.617	2.738.809	2.738.809
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.365.067	1.515.932	1.515.932
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	161.445	121.084	121.084
9	Tagihan Kepada Korporasi	5.652.186	5.652.186	5.652.186
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
Total		15.197.860	10.028.011	10.028.011

Manajemen Risiko

Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif - Bank secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2012		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	383.130	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.625.383	2.812.692	2.812.692
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	4.765	953	953
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	207.998	155.999	155.999
9	Tagihan Kepada Korporasi	5.647.200	5.647.200	5.647.200
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	Total	11.868.476	8.616.843	8.616.843

Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	541.544	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.502.617	2.751.309	2.751.309
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.366.022	1.516.123	1.516.123
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.105	442	442
6	Kredit Beragun Properti Komersial	441	441	441
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	234.430	175.823	175.823
9	Tagihan Kepada Korporasi	5.789.959	5.789.959	5.789.959
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	Total	15.436.119	10.234.097	10.234.097

Manajemen Risiko

Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2012		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	383.130	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.625.383	2.812.692	2.812.692
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	31.198	6.240	6.240
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.985	794	794
6	Kredit Beragun Properti Komersial	598	598	598
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	236.698	177.523	177.523
9	Tagihan Kepada Korporasi	5.698.998	5.698.998	5.698.998
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	Total	11.977.990	8.696.845	8.696.845

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Bank secara Individual (dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	13.230.199	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.474.553	294.911	294.911
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
	Total	14.704.752	294.911	294.911

Manajemen Risiko

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) - Bank secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2012		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.550.521	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	28.850	14.425	14.425
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
	Total	9.579.371	14.425	14.425

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	13.230.199	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.474.553	294.911	294.911
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
	Total	14.704.752	294.911	294.911

Manajemen Risiko

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2012		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.550.521	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	28.850	14.425	14.425
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
	Total	9.579.371	14.425	14.425

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* - Bank secara Individual (dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)			
1	Delivery versus payment	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-
2	Non-Delivery versus payment	-	-	-
	Total	-	-	-

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* - Bank secara Individual (dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2012		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)			
1	Delivery versus payment	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-
2	Non-Delivery versus payment	-	-	-
	Total	-	-	-

Manajemen Risiko

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement*- Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)			
1	<i>Delivery versus payment</i>	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-
2	<i>Non-Delivery versus payment</i>	-	-	-
	Total	-	-	-

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2012		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)			
1	<i>Delivery versus payment</i>	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-
2	<i>Non-Delivery versus payment</i>	-	-	-
	Total	-	-	-

Pengungkapan di Unit Usaha Syariah - Bank secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		31 Desember 2012	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)				
1	Total Eksposur	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

Pengungkapan di BRI Syariah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		31 Desember 2012	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)				
1	Total Eksposur	-	12.242.836	-	9.824.577
	Total	-	12.242.836	-	9.824.577

Manajemen Risiko

Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit - Bank secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2013	31 Desember 2012
(1)	(2)	(3)	(6)
1	Total ATMR Risiko Kredit	331.161.598	259.490.149
Total Faktor Pengurang Modal		-	-

Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2013	31 Desember 2012
(1)	(2)	(3)	(6)
1	Total ATMR Risiko Kredit	346.922.813	271.356.050
Total Faktor Pengurang Modal		-	-

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

Organisasi manajemen risiko pasar BRI terdiri dari unit kerja *front office* (Divisi Treasury), *back office* (Divisi Sentra Operasi), dan *middle office* (Divisi Manajemen Risiko) dengan masing-masing memiliki kewenangan berbeda. Jajaran *front office* berwenang melakukan transaksi instrumen keuangan. Jajaran *middle office* menetapkan dan memantau limit risiko pasar dan secara berkala memastikan data pasar (*market price*) yang digunakan untuk *mark-to-market* (MTM). Jajaran *back office* melakukan *settlement* transaksi *treasury* dan secara harian menetapkan harga pasar (MTM) pada akhir hari.

BRI mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury and market risk* (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. Melalui aplikasi ini BRI dapat melakukan pengukuran risiko pasar yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan monitoring eksposur risiko instrumen, BRI juga melakukan monitoring limit risiko pasar dan limit transaksi antara lain limit nominal transaksi dealer, *cut loss limit*, dan *stop loss limit*. Monitoring dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan/*trading*.

Transaksi aset keuangan dan/atau derivatif yang ditujukan sebagai posisi *trading* hanya diperkenankan dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Pengelompokan aset keuangan dan/atau derivatif ke dalam portofolio *trading book* diterapkan BRI secara konsisten, dan tidak dapat

memindahkan posisi *trading book* ke portofolio *banking book*.

Pengelolaan portofolio *banking book* tidak dapat digunakan untuk transaksi trading dalam rangka mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga dalam jangka pendek. Portofolio *banking book* bertujuan digunakan untuk kepentingan likuiditas atau dimiliki hingga jatuh tempo.

Valuasi portofolio trading book dan banking book dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar dari instrumen yang diperdagangkan secara aktif (MTM). Harga pasar tersebut mencerminkan transaksi aktual dan rutin yang dilakukan secara wajar. Hasil valuasi berdasarkan nilai pasar (MTM) divalidasi secara periodik untuk memastikan konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan. Apabila harga pasar tidak tersedia karena instrumen tidak aktif diperdagangkan maka valuasi penetapan nilai wajar menggunakan pendekatan simulasi harga (*mark-to-model*).

BRI melakukan pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal. Penerapan perhitungan modal pada saat ini telah mengakomodasi *Capital Accord* 1988 dan 1996 yang memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar dalam perhitungan kecukupan permodalan bank. Sesuai *capital accord* tahun 1996 dan Basel II, perhitungan risiko pasar dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pilihan metode, yaitu: metode standar (*standard method*) dan model internal (*internal model*).

Mengingat kompleksitas metodologi perhitungan risiko pasar, maka penerapan metode ini membutuhkan kesiapan perbankan untuk menerapkan perhitungan

Manajemen Risiko

risiko pasar dalam perhitungan beban modal. Oleh karena itu, BRI memberlakukan penerapan pendekatan metodologi secara bertahap, dimulai dengan metode standar (*standard method*).

Sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI), perhitungan risiko pasar dengan metode standar yang wajib diperhitungkan bank secara individual, terdiri dari risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar. Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *Trading Book* yang terekspos Risiko Suku Bunga. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing BRI dalam trading book dan banking book yang terekspos Risiko Nilai Tukar.

Faktor risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku bunga dalam metode standar yaitu :

- a. Risiko Spesifik (*Specific Risk*) dari setiap efek atau instrumen keuangan, tanpa memperhatikan posisi *long* atau posisi *short*. Dengan demikian proses saling hapus (*offset*) tidak dimungkinkan kecuali posisi tersebut bersifat identik;
- b. Risiko Umum (*General Market Risk*) dari keseluruhan portofolio, dimana posisi *long* atau posisi *short* dalam efek atau instrumen yang berbeda dapat dilakukan saling hapus

Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah *dirty price*, yaitu nilai pasar surat berharga (*clean price*) ditambah dengan *present value* dari pendapatan bunga yang akan diterima (*accrued interest*). Perhitungan *present value* atas *accrued interest* dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai *present value* tersebut tidak menimbulkan perbedaan yang material. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap semua posisi BRI baik trading book dan banking book dalam valuta asing termasuk emas, dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN). Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing, selain terkena Risiko Nilai Tukar, juga dapat menimbulkan

Risiko Suku Bunga (misalnya untuk instrumen *cross-currency swaps*). Dalam hal tersebut, maka eksposur Risiko Suku Bunga juga harus diperhitungkan.

Beban modal untuk Risiko Nilai Tukar dari posisi valuta asing adalah sebesar 8% terhadap PDN yang dimiliki BRI secara keseluruhan pada akhir hari. PDN adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut atas jumlah selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan jumlah selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Cakupan portofolio yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) antara lain:

1. Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek
2. Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga (*price movement*) secara aktual dan atau potensial
3. Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profit*)
4. Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain Bond Forward, Bond Option, Interest Rate Swap, Cross Currency Swaps, Foreign Exchange Forward, Interest Rate Options, dan Forward Rate Agreements/FRAs.
5. Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang dan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certificates of Deposits*) dan surat-surat berharga yang dijual oleh BRI dengan syarat dibeli kembali (*Repo/ Securities Lending*).
6. Posisi valuta asing BRI dalam *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko nilai tukar.

Tabel berikut menyajikan beban modal dan ATMR risiko pasar dengan menggunakan metode standar

BRI mengimplementasikan aplikasi *treasury and market risk* (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office* untuk melakukan pengukuran risiko pasar yang **terintegrasi dengan proses transaksi harian**.

Manajemen Risiko

Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam Rp Juta)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2013			
		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga	-	-	-	-
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	8.768	109.606	12.368	154.597
2	Risiko Nilai Tukar	174.831	2.185.382	178.882	2.236.020
3	Risiko Ekuitas	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-
	Total	183.599	2.294.988	191.249	2.390.617

Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam Rp Juta)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2012			
		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga	-	-	-	-
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	-	-	4.203	52.531
2	Risiko Nilai Tukar	132.358	1.654.474	132.687	1.658.586
3	Risiko Ekuitas	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-
	Total	132.358	1.654.474	136.889	1.711.117

Dalam mengantisipasi risiko pasar pada aktivitas treasury, BRI melakukan beberapa langkah pengukuran, pemantauan dan pengendalian, diantaranya :

- Langkah-langkah pengukuran antara lain :
 - Sensitivity testing of interest rate*, suatu analisa terhadap tingkat sensitifitas suku bunga, yang hasilnya digunakan sebagai indikator dalam memprediksi potensi risiko suku bunga dan menyusun strategi kebijakan *trading* aktivitas *treasury*.
 - Volatility of foreign exchange and interest rate*, yaitu pengukuran terhadap tingkat volatilitas (perubahan) nilai tukar dan suku bunga berdasarkan tingkat keyakinan tertentu (*confidence level*). Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur potensi risiko nilai tukar dan suku bunga pada portofolio *trading* aktivitas *treasury*.
 - Stress testing and back testing*;
 - Stress testing*, yaitu berupa simulasi berdasarkan skenario tertentu untuk melihat kecukupan modal dan atau tingkat ketahanan likuiditas bank dalam menghadapi kondisi tertentu, misalnya tingkat bunga tertentu, nilai tukar valas sampai dengan tingkat tertentu, dan atau situasi likuiditas berdasarkan situasi tertentu.
 - Back testing*, yaitu suatu analisa yang dilakukan untuk memastikan keakuratan metodologi, atau berfungsi sebagai alat ukur risiko pasar, dengan cara membandingkan prediksi risiko pasar dengan kerugian yang terjadi (*actual loss*).
 - Revaluasi terhadap posisi *treasury* dan BRI secara keseluruhan termasuk melakukan perhitungan terhadap produk *treasury* yang belum/tidak ada harga pasarnya (*hypothetical prices*).
- Langkah pemantauan berupa *Profit and Loss Assistance*, yakni pemantauan data perhitungan laba rugi dari aktivitas *treasury* secara harian, untuk mengetahui perkembangan kinerja *treasury* terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

Manajemen Risiko

3. Langkah pengendalian antara lain:
- *Limit and excess controls (front end)*, yakni pengawasan perkembangan aktivitas limit transaksi treasury untuk memastikan bahwa treasury telah mematuhi limit transaksi yang telah ditetapkan, terutama untuk *cut-loss limit*.
 - *New Product and or Activity Review* untuk transaksi *treasury*, suatu analisa yang membahas mengenai karakteristik suatu produk dan atau aktivitas baru yang akan dijadikan sebagai produk dalam aktivitas *trading*, yang mencakup informasi potensi laba-rugi, potensi risiko, prosedur *settlement*, proses revaluasi dan mitigasi risiko yang dilakukan

Risiko Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Operasional ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan SDM, internal proses, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank, yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank.

Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI juga mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan, dan strategik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Penerapan manajemen risiko operasional BRI pada tahun 2013 diantaranya dilaksanakan dan dipantau melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa *Operational Risk Assessor (OPRA)* yang mencakup modul *Risk and Control*

Self Assessment (RCSA), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator (KRI)*, Manajemen Insiden (MI), Forum MR dan Penilaian Maturitas serta implementasi Business Continuity Management. Upaya peningkatan pemahaman atas manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya sadar risiko, *fraud awareness* dan sosialisasi/pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh pekerja BRI, serta peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional BRI.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI. Untuk itu, Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko yang dihadapi BRI, dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja operasional. Tata kelola Manajemen Risiko Operasional BRI didasarkan atas tiga lini pertahanan yaitu *Risk Taking Units* (unit kerja operasional), *Risk Control Units* (Divisi Manajemen Risiko), dan *Internal Audit Function* (Audit Internal).

Setiap unit kerja operasional BRI berfungsi sebagai *first line of defense* yang bertanggung-jawab atas penerapan proses manajemen risiko dalam aktivitas operasional dan bisnis di masing-masing unit kerja. Dalam membangun budaya sadar risiko secara menyeluruh, Direksi BRI telah menetapkan Fungsi Manajemen Risiko (Fungsi MR) pada setiap unit kerja mulai dari level Kantor Pusat (Divisi/Desk), Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang yang mencakup bidang operasional, pemasaran dan bisnis mikro, dan Kantor Cabang Pembantu. Tugas dari Fungsi MR diantaranya: 1) Mendorong pemahaman budaya sadar risiko di unit kerjanya; 2) Mendorong pelaksanaan proses manajemen risiko (Identifikasi, Pengukuran,

Tata kelola Manajemen Risiko Operasional BRI didasarkan atas tiga lini pertahanan yaitu *Risk Taking Units* (unit kerja operasional), *Risk Control Units* (Divisi Manajemen Risiko), dan *Internal Audit Function* (Audit Intern).

Manajemen Risiko

Pemantauan, dan Pengendalian Risiko); serta 3) Melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan risiko. Dengan demikian, diharapkan seluruh insan BRI memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko dalam setiap aktivitas bisnis.

Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) Operasional sebagai *second line of defense*, bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional, pengembangan dan implementasi kebijakan/prosedur dan metodologi, pengawasan, pengkajian, serta pemantauan proses manajemen risiko operasional. Disamping itu, UKMR Operasional juga berperan dalam penyusunan dan pemantauan profil risiko operasional BRI, penilaian kecukupan pengelolaan risiko operasional dari suatu produk dan atau aktivitas baru, serta mendukung unit kerja operasional/*risk owner* dalam mengembangkan budaya sadar risiko, penerapan strategi anti fraud, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko operasional. Dalam rangka pembahasan pengelolaan dan perbaikan kontrol atas risiko operasional, UKMR Operasional mengkoordinasikan pelaksanaan *Operational Risk Management Committee* (ORMC) yang dilaksanakan setiap triwulan bersama Divisi/Desk dan Unit Kerja terkait.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) selaku *third line of defense* yang meliputi Audit Kantor Pusat dan Kantor Inspektorat BRI seluruh Indonesia melakukan pemantauan dan validasi atas kecukupan pengendalian intern (*assurance*) dalam aktivitas operasional dan bisnis di unit kerja operasional dan konsistensi atas penerapan manajemen risiko operasional di BRI secara *bankwide*.

Struktur tata kelola manajemen risiko operasional BRI menggambarkan keterkaitan antara fungsi manajemen risiko operasional pada tingkat

perusahaan (*Corporate Level*), tingkat UKO, dan keterlibatan dari Audit Internal sebagai Fungsi *Assurance*. Penerapan manajemen risiko operasional di BRI dilakukan melalui desain struktur organisasi yang menggambarkan keterlibatan seluruh pihak yang terkait manajemen risiko operasional (Komisaris, Direksi, *Risk Management Committee*, Divisi Manajemen Risiko, Unit Kerja Operasional, Fungsi Manajemen Risiko Operasional, serta Audit Intern).

Pelaksanaan Identifikasi, Pengukuran dan Mitigasi Risiko Operasional

a. *Risk and Control Self Assessment* (RCSA)

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (*Impact*) dan kemungkinan kejadian (*Likelihood*).

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja selaku *first line of defense* dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk juga melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan.

Di BRI, RCSA telah diterapkan untuk level Divisi/Desk Kantor Pusat BRI, Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang Khusus (KCK), Kantor Cabang (Kanca) dan Sentra Layanan BRI Prioritas. Pada Tahun 2014, RCSA direncanakan akan diimplementasikan sampai dengan level Kantor Cabang Pembantu (KCP), sehingga penilaian RCSA di KCP tidak lagi diwakilkan kepada

Kantor Cabang supervisinya. Sedangkan untuk memitigasi risiko di bidang bisnis mikro dan operasional BRI Unit, telah ditunjuk MBM dan AMBM sebagai fungsi MR bisnis mikro.

Konsolidasi RCSA disusun dalam rangka mendapatkan hasil profil risiko operasional yang komprehensif dan untuk memenuhi kebutuhan pengendalian atau mitigasi. Hasil konsolidasi RCSA tersebut dilaporkan secara rutin kepada seluruh Direksi BRI dalam *Risk Management Committee* (RMC) yang dilaksanakan setiap triwulan.

Risiko operasional selalu berubah, oleh karena itu perlu dilakukan pengkinian *risk issue* dalam RCSA secara berkala. Pengkinian *risk issue* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI, yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis; perubahan ketentuan internal/eksternal; dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Selain itu, pengkinian tersebut juga mempertimbangkan hasil identifikasi risiko operasional melalui perangkat lainnya, antara lain data Manajemen Insiden (MI)/*Loss Event Database* (LED), dan *Key Risk Indicator* (KRI), serta Laporan Hasil Audit (LHA).

b. Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI)

IRU/KRI adalah alat untuk mendeteksi peningkatan dan atau penurunan risiko baik

Manajemen Risiko

yang bersifat *leading* terhadap kejadian kerugian yang belum terjadi maupun yang bersifat historis. Prediksi tren risiko dimaksud ditujukan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait risiko operasional yang muncul sebelum kerugian finansial atau non finansial terjadi.

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau limit risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (*threshold*) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* yang melibatkan Audit Internal, *Risk Owner*, dan pihak terkait lainnya. Indikator Risiko Utama BRI antara lain tercermin dalam Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko Kanwil yang dimonitor secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan. Selain itu, pada tahun 2013, IRU mulai diterapkan di aplikasi OPRA khusus untuk memantau risiko kepatuhan dan terus dikembangkan untuk memantau risiko lainnya. Berikut adalah indikator risiko utama yang sudah dapat dipantau melalui aplikasi OPRA:

No.	Risk Issue	Indikator
1.	Pelanggaran pelimpahan pajak	Frekuensi (jumlah) Nominal Denda (rupiah)
2.	Pelanggaran pelaporan LBU	Frekuensi (jumlah) Nominal Denda (rupiah)
3.	Pelanggaran pelaporan SID	Frekuensi (jumlah) Nominal Denda (rupiah)
4.	Pelanggaran pelaporan pejabat eksekutif	Frekuensi (jumlah) Nominal Denda (rupiah)
5.	Pelanggaran ketentuan regulator lainnya	Frekuensi (jumlah) Nominal Denda (rupiah)

Untuk mempermudah pemantauan risiko maka disediakan laporan yang dapat di unduh setiap saat dari aplikasi OPRA. Dari laporan IRU tersebut dapat diketahui frekuensi pelanggaran SID serta nominalnya, sehingga akan memudahkan pemantauan pergerakan risiko tersebut. Dengan demikian BRI dapat melakukan perbaikan kontrol untuk mencegah pelanggaran SID terulang kembali di periode selanjutnya.

c. Manajemen Insiden (MI)/Loss Event Database (LED) dan Pengukuran Beban Modal Risiko Operasional

Di BRI, Manajemen Insiden (MI) merupakan *Loss Event Database* (LED) yang mencakup proses dokumentasi data kejadian kerugian, baik finansial maupun non finansial yang meliputi *actual loss*, *potential loss*, dan *near misses*, sejak insiden terjadi sampai dengan penyelesaiannya, termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan yang dilakukan.

Data kerugian operasional BRI yang didokumentasikan mulai tahun 2007 disusun secara konsisten dan sistematis dalam bentuk matriks *database* kerugian yang diklasifikasikan berdasarkan delapan lini bisnis dan tujuh *event type*/ kategori kejadian dengan dimensi frekuensi kejadian dan *severity/loss*.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada sistem MI, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional dan kategori kejadian (*event type*) yang terbagi ke dalam 8 lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam menentukan langkah perbaikan kontrol dan pengembangan langkah preventif lainnya dalam pengendalian risiko berdasarkan dokumentasi proses penanganan/penyelesaian insiden.

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, saat ini BRI menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) yang mulai diterapkan sejak tahun 2010 sesuai dengan ketentuan regulator. Namun demikian, BRI telah melakukan persiapan penerapan *The Standardised Approach* (TSA) dan *Advanced Measurement Approach* (AMA).

Manajemen Risiko

BRI juga telah melakukan simulasi perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA). Dalam metode AMA tersebut digunakan 2 pendekatan, yaitu *Extreme Value Theory* (EVT) dan *Loss Distribution Approach* (LDA). Dalam rangka menuju perhitungan beban modal risiko operasional dengan metode AMA, BRI telah menyusun gap analysis terkait penerapannya.

Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai regulasi Bank Indonesia (BI).

Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2013		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar	40.214.297	6.032.145	75.401.807
Total		40.214.297	6.032.145	75.401.807

Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2012		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar	34.243.949	5.136.592	64.207.405
Total		34.243.949	5.136.592	64.207.405

Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2013		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar	40.398.748	6.059.812	75.747.653
Total		40.398.748	6.059.812	75.747.653

Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2012		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar	34.401.371	5.160.206	64.502.571
Total		34.401.371	5.160.206	64.502.571

Manajemen Risiko

d. Forum MR dan Penilaian Maturitas

Forum Manajemen Risiko (Forum MR) adalah wadah atau forum pertemuan antara pemimpin Unit Kerja dengan pejabat setingkat dibawahnya, pekerja atau jajarannya untuk membahas permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional yang menjadi kendala dalam rangka mencapai target bisnis atau kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di masing-masing unit kerja BRI diharapkan menjadi salah satu pendukung dan pendorong untuk menumbuhkembangkan budaya sadar risiko di BRI.

Penilaian maturitas merupakan proses *self assessment* terhadap tingkat kemampuan penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja BRI yang dilakukan setiap akhir tahun oleh masing-masing pimpinan unit kerja BRI terhadap parameter-parameter tertentu. Dengan melakukan penilaian maturitas diharapkan masing-masing unit kerja dapat mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan sehingga lebih baik ke depan (*continuous improvement*).

e. Implementasi Strategi Anti-Fraud

Penerapan sistem pengendalian fraud telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur pengendalian internal BRI, dimana perhatian khusus diberikan terhadap penyelesaian kasus-kasus fraud yang terjadi untuk menunjukkan intoleransi manajemen BRI terhadap fraud (*zero fraud tolerance*). Penetapan dan penerapan Strategi Anti Fraud sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko dalam rangka pencegahan dan pengelolaan kejadian fraud di BRI mencakup 4 (empat) pilar, yaitu 1) pencegahan, 2) deteksi, 3) investigasi, pelaporan dan sanksi, dan 4) evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut. Komitmen Anti Fraud ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh pekerja BRI sebagai bentuk peningkatan anti fraud *awareness* dan pencegahan fraud

f. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru (PAB)

Dalam rangka penerbitan setiap produk dan atau aktivitas baru (PAB) di BRI, dilakukan proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PAB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko PAB dimaksud. Unit Kerja Manajemen Risiko (UKMR) bertugas melakukan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB dan merekomendasikan hasil penilaian dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI.

g. Implementasi Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)

Potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha BRI, dimana BRI memiliki unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Direksi BRI memandang perlu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU), yang berujud:

- Rencana Penanggulangan Bencana, guna melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan Unit Kerja Operasional BRI
- Rencana Kelangsungan Usaha, untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana.

Implementasi MKU BRI selama tahun 2013 mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan/pengkinian Tim Manajemen Krisis, penyusunan/pengkinian *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*.

Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk memetakan uker rawan bencana serta menginventarisir sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja.

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa unit kerja BRI, antara lain di tahun 2013, ketika terjadi gempa di Aceh, banjir di Ambon, Jakarta, dan Kendari, serta erupsi gunung berapi di Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Ketersediaan mobil e-Buzz dan Teras BRI Keliling yang tersebar di seluruh wilayah kerja BRI dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai *alternate site* pada saat terjadi bencana, sehingga unit kerja dapat beroperasi sesegera mungkin pasca terjadinya bencana. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko mengkoordinasikan implementasi BCM secara berkesinambungan dengan unit-unit kerja terkait diantaranya adalah pelaksanaan uji coba atau *testing* seperti *Switch Over* DC-DRC 2013 dan simulasi evakuasi bencana di beberapa gedung kantor BRI termasuk Gedung Kantor Pusat BRI dan Gedung TI Ragunan.

Manajemen Risiko

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko sebagai tindak lanjut hasil pemantauan kinerja dan kepatuhan unit kerja operasional terhadap limit likuiditas yang telah ditetapkan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan BRI untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko sebagai tindak lanjut hasil pemantauan kinerja dan kepatuhan unit kerja operasional terhadap limit likuiditas yang telah ditetapkan.

Secara khusus, Divisi Treasury juga memperhatikan indikator peringatan dini (early-warning indicators) dalam memantau posisi likuiditas sebagai bagian dari proses manajemen likuiditas serta untuk mengetahui peningkatan potensi risiko. Adapun beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi bagian dari sistem peringatan dini likuiditas, antara lain :

1. Indikator internal
 - a. Kualitas asset yang memburuk;
 - b. Peningkatan konsentrasi pada beberapa asset dan sumber pendanaan tertentu;
 - c. Peningkatan currency mismatch;
 - d. Pelampauan limit yang telah ditetapkan secara berulang kali;
 - e. Peningkatan biaya dana BRI secara keseluruhan;
 - f. Posisi arus kas (cash flow) yang semakin buruk sebagai akibat maturity mismatch yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek.

2. Indikator eksternal
 - a. Informasi publik yang negatif terhadap BRI;
 - b. Penurunan hasil peringkat BRI oleh lembaga pemeringkat;
 - c. Penurunan harga saham BRI secara terus-menerus;
 - d. Penurunan fasilitas credit line yang diberikan oleh bank koresponden;
 - e. Peningkatan pencairan simpanan berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo;
 - f. Keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka menengah dan jangka panjang;
 - g. Ketatnya kondisi likuiditas pasar;
 - h. Perubahan kebijakan dari regulator yang berdampak signifikan terhadap perbankan.

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi likuiditas BRI yang aktual, hasil pengukuran dengan menggunakan rasio likuiditas dianalisis lebih mendalam dan dikaitkan dengan informasi kualitatif terkini sehingga menghasilkan kesimpulan yang wajar dan komprehensif. Alat pengukur risiko likuiditas yang digunakan adalah: proyeksi arus kas, profil maturitas, rasio likuiditas dan stress test risiko likuiditas.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan kewajiban dalam neraca serta tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif, dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2013.

Manajemen Risiko

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Pos-pos	31 Desember 2013					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I Neraca							
A. Aset							
	1. Kas	18.514.993	18.514.993	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	22.766.365	22.766.365	-	-	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	2.604.040	2.564.040	40.000	-	-	-
	4. Surat Berharga	50.473.224	26.753.814	1.980.980	-	6.582.477	15.155.953
	5. Kredit yang diberikan	368.801.800	11.999.600	33.432.804	24.340.727	40.446.837	258.581.832
	6. Tagihan lainnya	34.781.787	33.557.749	696.835	510.133	17.070	-
	7. Lain-lain	12.631.438	3.150.121	661.461	629.084	716.472	7.474.300
	Total Aset	510.573.647	119.306.682	36.812.080	25.479.944	47.762.856	281.212.085
B. Kewajiban							
	1. Dana Pihak Ketiga	420.841.857	358.487.876	20.528.552	10.369.656	12.775.541	18.680.232
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	83.189	67.133	202	6.727	-	9.127
	3. Kewajiban pada bank lain	917.962	917.962	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5. Pinjaman yang Diterima	12.467	-	-	-	-	12.467
	6. Kewajiban lainnya	13.201.002	6.630.283	4.333.098	1.092.413	1.145.208	-
	7. Lain-lain	4.815.967	1.396.157	613.246	47.005	1.998.495	761.064
	Total Kewajiban	439.872.444	367.499.411	25.475.098	11.515.801	15.919.244	19.462.890
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	70.701.203	(248.192.729)	11.336.982	13.964.143	31.843.612	261.749.195
II Rekening Administratif							
A. Tagihan Rekening Administratif							
	1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2. Kontijensi	3.123	3.123	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	3.123	3.123	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
	1. Komitmen	54.330.121	2.278.900	6.431.564	13.855.596	6.842.069	24.921.992
	2. Kontijensi	5.704.614	1.404.007	1.282.878	724.912	1.099.140	1.193.677
	Total Kewajiban Rekening Administratif	60.034.735	3.682.907	7.714.442	14.580.508	7.941.209	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(60.031.612)	(3.679.784)	(7.714.442)	(14.580.508)	(7.941.209)	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	10.669.591	(251.872.513)	3.622.540	(616.365)	23.902.403	261.749.195
	Selisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

Manajemen Risiko

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual

(dalam Rp. Juta)

No.	Pos-pos	31 Desember 2012					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I Neraca							
A. Aset							
	1. Kas	13.450.227	13.450.227	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	94.514.921	59.892.650	21.131.764	13.490.507	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	640.514	385.514	255.000	-	-	-
	4. Surat Berharga	37.538.188	11.082.348	1.627.741	8.461.574	2.516.239	13.850.286
	5. Kredit yang diberikan	311.340.715	14.962.163	22.190.689	21.254.353	37.150.177	215.783.333
	6. Tagihan lainnya	6.907.674	349	5.140	567.947	150.895	6.183.343
	7. Lain-lain	5.215.402	118.067	208.240	300.471	58.632	4.529.992
	Total Aset	469.607.641	99.891.318	45.418.574	44.074.852	39.875.943	240.346.954
B. Kewajiban							
	1. Dana Pihak Ketiga	389.845.197	332.297.606	18.183.335	8.013.306	31.040.598	310.352
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	118.875	77.377	4.217	37.281	-	-
	3. Kewajiban pada bank lain	958.549	958.549	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5. Pinjaman yang Diterima	132.876	-	4.066	115.106	-	13.704
	6. Kewajiban lainnya	16.283	349	15.934	-	-	-
	7. Lain-lain	15.428.270	12.739.894	1.572.144	976.378	-	139.854
	Total Kewajiban	406.500.050	346.073.775	19.779.696	9.142.070	31.040.598	463.910
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	63.107.591	(246.182.457)	25.638.878	34.932.782	8.835.345	239.883.044
II Rekening Administratif							
A. Tagihan Rekening Administratif							
	1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2. Kontijensi	180.573	114.427	3.768	7.807	13.046	41.525
	Total Tagihan Rekening Administratif	180.573	114.427	3.768	7.807	13.046	41.525
B. Kewajiban Rekening Administratif							
	1. Komitmen	59.704.866	5.150.867	10.581.881	12.315.272	31.656.846	-
	2. Kontijensi	3.848.083	1.161.365	834.912	502.150	1.349.656	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	63.552.949	6.312.232	11.416.793	12.817.422	33.006.502	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(63.372.376)	(6.197.805)	(11.413.025)	(12.809.615)	(32.993.456)	41.525
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	(264.785)	(252.380.262)	14.225.853	22.123.167	(24.158.111)	239.924.569
	Selisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

Manajemen Risiko

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No.	Pos-pos	31 Desember 2013					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I Neraca							
A. Aset							
	1. Kas	18.775.487	18.775.487	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	23.710.858	23.710.858	-	-	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	2.409.040	2.369.040	40.000	-	-	-
	4. Surat Berharga	52.288.001	27.803.508	1.980.980	-	6.666.877	15.836.636
	5. Kredit yang diberikan	386.041.694	12.708.638	34.167.525	25.360.830	42.322.265	271.482.437
	6. Tagihan lainnya	35.744.220	34.520.182	696.835	510.133	17.070	-
	7. Lain-lain	13.274.874	3.517.856	668.712	629.084	716.472	7.742.750
	Total Aset	532.244.174	123.405.569	37.554.052	26.500.047	49.722.684	295.061.823
B. Kewajiban							
	1. Dana Pihak Ketiga	438.537.145	381.255.122	23.384.842	8.326.820	25.314.645	255.716
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	118.875	67.133	202	6.727	-	44.813
	3. Kewajiban pada bank lain	1.841.458	1.835.914	3.108	2.436	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5. Pinjaman yang Diterima	112.467	-	-	-	-	112.467
	6. Kewajiban lainnya	13.427.528	6.836.822	4.344.400	1.096.667	1.149.639	-
	7. Lain-lain	5.080.273	1.406.269	614.559	335.572	1.998.495	725.378
	Total Kewajiban	459.117.746	391.401.260	28.347.111	9.768.222	28.462.779	1.138.374
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	73.126.428	(267.995.691)	9.206.941	16.731.825	21.259.905	293.923.449
II Rekening Administratif							
A. Tagihan Rekening Administratif							
	1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2. Kontijensi	23.450	23.450	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	23.450	23.450	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
	1. Komitmen	55.100.825	2.375.064	6.475.913	13.970.032	7.157.539	25.122.277
	2. Kontijensi	5.770.702	1.447.252	1.283.045	724.912	1.114.575	1.200.918
	Total Kewajiban Rekening Administratif	60.871.527	3.822.316	7.758.958	14.694.944	8.272.114	26.323.195
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(60.848.077)	(38.303)	(7.825)	(38.015)	(171.672)	(207.869)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]	12.278.351	(268.033.994)	9.199.116	16.693.810	21.088.233	293.715.580
	Selisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

Manajemen Risiko

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Pos-pos	31 Desember 2012					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I Neraca							
A. Aset							
	1. Kas	13.610.763	13.610.763	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	97.083.996	62.461.725	21.131.764	13.490.507	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	1.109.140	854.140	255.000	-	-	-
	4. Surat Berharga	38.453.637	11.147.033	1.627.741	8.986.574	2.516.239	14.176.050
	5. Kredit yang diberikan	324.798.635	15.661.758	23.012.065	21.915.768	38.197.482	226.011.562
	6. Tagihan lainnya	6.933.419	26.094	5.140	567.947	150.895	6.183.343
	7. Lain-lain	4.460.249	118.297	239.154	302.861	58.632	3.741.305
	Total Aset	486.449.839	103.879.810	46.270.864	45.263.657	40.923.248	250.112.260
B. Kewajiban							
	1. Dana Pihak Ketiga	392.837.279	332.703.768	20.456.540	8.280.732	31.083.539	312.700
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	118.875	77.377	4.217	37.281	-	-
	3. Kewajiban pada bank lain	2.018.356	1.339.669	675.800	500	2.387	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5. Pinjaman yang Diterima	317.007	-	129.489	65.928	-	121.590
	6. Kewajiban lainnya	34.449	14.033	20.416	-	-	-
	7. Lain-lain	26.950.862	22.257.266	2.744.783	1.704.643	-	244.170
	Total Kewajiban	422.276.828	356.392.112	24.031.245	10.089.084	31.083.539	678.460
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	64.173.011	(252.512.302)	22.239.619	35.174.573	9.837.322	249.433.800
II Rekening Administratif							
A. Tagihan Rekening Administratif							
	1. Komitmen	532.710	135.525	7.825	38.015	171.672	179.673
	2. Kontijensi	250.201	155.859	3.768	7.807	13.046	69.721
	Total Tagihan Rekening Administratif	782.911	291.384	11.593	45.822	184.718	249.394
B. Kewajiban Rekening Administratif							
	1. Komitmen	60.140.354	5.189.170	10.589.706	12.353.287	31.828.518	179.673
	2. Kontijensi	3.876.279	1.161.365	834.912	502.150	1.349.656	28.196
	Total Kewajiban Rekening Administratif	64.016.633	6.350.535	11.424.618	12.855.437	33.178.174	207.869
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(63.233.722)	(38.303)	(7.825)	(38.015)	(171.672)	(207.869)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	939.289	(252.550.605)	22.231.794	35.136.558	9.665.650	249.225.931
	Selisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

Manajemen Risiko

Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Pos-pos	31 Desember 2013					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I Neraca							
A. Aset							
	1. Kas	396.114	396.114	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	7.301.979	7.301.979	-	-	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	2.909.346	2.906.550	2.796	-	-	-
	4. Surat Berharga	9.308.643	3.837.908	2.733.930	-	866.921	1.869.884
	5. Kredit yang diberikan	46.743.674	12.744.570	3.432.752	4.244.521	6.848.647	19.473.184
	6. Tagihan lainnya	26.907.154	17.894.295	1.489.344	1.701.343	1.328.533	4.493.639
	7. Lain-lain	112.203	-	68.815	27.496	-	15.892
	Total Aset	93.679.113	45.081.416	7.727.637	5.973.360	9.044.101	25.852.599
B. Kewajiban							
	1. Dana Pihak Ketiga	65.524.514	40.465.692	5.733.874	10.189.304	9.081.272	54.372
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3. Kewajiban pada bank lain	184.976	184.976	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	6.023.133	-	-	-	-	6.023.133
	5. Pinjaman yang Diterima	8.956.390	1.909.483	4.065.257	2.981.650	-	-
	6. Kewajiban lainnya	4.950.478	1.260.042	851.895	1.045.417	1.074.837	718.287
	7. Lain-lain	213.668	93.273	67.464	26.341	26.590	-
	Total Kewajiban	85.853.159	43.913.466	10.718.490	14.242.712	10.182.699	6.795.792
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	7.825.954	1.167.950	(2.990.853)	(8.269.352)	(1.138.598)	19.056.807
II Rekening Administratif							
A. Tagihan Rekening Administratif							
	1. Komitmen	1.180.490	1.180.490	-	-	-	-
	2. Kontijensi	34.753	34.753	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	1.215.243	1.215.243	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
	1. Komitmen	44.170.089	3.982.439	17.780.089	6.515.524	4.647.268	11.244.769
	2. Kontijensi	10.152.672	701.533	1.059.741	1.654.756	1.452.317	5.284.325
	Total Kewajiban Rekening Administratif	54.322.761	4.683.972	18.839.830	8.170.280	6.099.585	16.529.094
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(53.107.518)	(3.468.729)	(18.839.830)	(8.170.280)	(6.099.585)	(16.529.094)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]	62.148.715	5.851.922	15.848.977	(99.072)	4.960.987	35.585.901
	Selisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

Manajemen Risiko

Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Individual

(dalam Rp Juta)

No.	Pos-pos	31 Desember 2012					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I Neraca							
A. Aset							
	1. Kas	284.543	284.543	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	6.147.100	5.183.548	481.821	481.731	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	9.800.035	9.790.397	9.638	-	-	-
	4. Surat Berharga	6.999.619	2.854.341	48.188	-	67.463	4.029.627
	5. Kredit yang diberikan	36.891.249	10.785.703	1.648.194	2.024.216	5.510.396	16.922.740
	6. Tagihan lainnya	5.398.397	556.689	1.950.561	2.812.532	-	78.615
	7. Lain-lain	80.572	74.312	-	6.260	-	-
	Total Aset	65.601.515	29.529.533	4.138.402	5.324.739	5.577.859	21.030.982
B. Kewajiban							
	1. Dana Pihak Ketiga	46.239.221	27.759.327	5.868.092	7.288.616	5.322.003	1.183
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3. Kewajiban pada bank lain	1.175.283	1.175.283	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5. Pinjaman yang Diterima	10.571.568	1.969.609	3.467.951	5.134.009	-	-
	6. Kewajiban lainnya	5.521.740	560.092	1.950.669	2.812.532	-	198.447
	7. Lain-lain	563.995	197.105	136.420	230.469	-	-
	Total Kewajiban	64.071.807	31.661.416	11.423.132	15.465.626	5.322.003	199.630
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	1.529.708	(2.131.883)	(7.284.730)	(10.140.887)	255.856	20.831.352
II Rekening Administratif							
A. Tagihan Rekening Administratif							
	1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2. Kontijensi	15.192	1.648	-	-	-	13.544
	Total Tagihan Rekening Administratif	15.192	1.648	-	-	-	13.544
B. Kewajiban Rekening Administratif							
	1. Komitmen	27.733.344	2.019.384	12.909.894	1.456.517	11.347.549	-
	2. Kontijensi	8.320.674	409.867	991.314	1.510.316	5.409.177	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	36.054.018	2.429.251	13.901.208	2.966.833	16.756.726	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(36.038.826)	(2.427.603)	(13.901.208)	(2.966.833)	(16.756.726)	13.544
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	37.583.726	297.368	6.616.478	(7.174.054)	17.012.582	20.831.352
	Selisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

Manajemen Risiko

Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak (dalam Rp Juta)

No.	Pos-pos	31 Desember 2013					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I Neraca							
A. Aset							
	1. Kas	396.291	396.291	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	7.301.979	7.301.979	-	-	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	2.885.006	2.882.210	2.796	-	-	-
	4. Surat Berharga	9.337.146	3.837.908	2.733.930	-	866.921	1.898.387
	5. Kredit yang diberikan	46.885.065	12.744.570	3.432.752	4.248.062	6.861.219	19.598.462
	6. Tagihan lainnya	27.020.132	18.007.273	1.489.344	1.701.343	1.328.533	4.493.639
	7. Lain-lain	113.132	930	68.815	27.495	-	15.892
	Total Aset	93.938.752	45.171.161	7.727.637	5.976.900	9.056.673	26.006.380
B. Kewajiban							
	1. Dana Pihak Ketiga	65.744.237	44.618.357	7.675.471	9.698.381	3.697.863	54.165
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3. Kewajiban pada bank lain	1.849.762	1.631.999	44.543	173.220	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	6.023.133	-	-	-	-	6.023.133
	5. Pinjaman yang Diterima	8.956.390	1.909.483	4.065.257	2.981.650	-	-
	6. Kewajiban lainnya	4.950.478	1.260.042	851.895	1.045.417	1.074.837	718.287
	7. Lain-lain	213.758	93.364	67.464	26.340	26.590	-
	Total Kewajiban	87.737.758	72.571	38.679	-	-	32
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	29.797	(15.281)	(38.679)	-	17.290	66.467
II Rekening Administratif							
A. Tagihan Rekening Administratif							
	1. Komitmen	1.180.490	1.180.490	-	-	-	-
	2. Kontijensi	34.753	34.753	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	1.215.243	1.215.243	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
	1. Komitmen	44.242.746	3.982.439	17.780.089	6.515.524	4.659.559	11.305.135
	2. Kontijensi	10.166.801	701.533	1.063.112	1.664.224	1.453.607	5.284.325
	Total Kewajiban Rekening Administratif	31.035	31.035	31.035	31.035	31.035	31.035
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	1.184.208	1.184.208	(31.035)	(31.035)	(31.035)	(31.035)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	(1.154.411)	(1.199.489)	(7.644)	31.035	48.325	97.502
	Selisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

Manajemen Risiko

Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

(dalam Rp Juta)

No.	Pos-pos	31 Desember 2012					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I Neraca							
A. Aset							
	1. Kas	284.701	284.701	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	6.153.846	5.190.294	481.821	481.731	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	8.994.778	8.985.140	9.638	-	-	-
	4. Surat Berharga	6.999.619	2.854.341	48.188	-	67.463	4.029.627
	5. Kredit yang diberikan	36.975.038	10.785.703	1.648.194	2.024.216	5.527.686	16.989.239
	6. Tagihan lainnya	5.398.397	556.689	1.950.561	2.812.532	-	78.615
	7. Lain-lain	80.572	74.312	-	6.260	-	-
	Total Aset	64.886.951	57.290	-	-	17.290	66.499
B. Kewajiban							
	1. Dana Pihak Ketiga	46.314.858	27.834.837	5.868.221	7.288.615	5.322.002	1.183
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3. Kewajiban pada bank lain	1.213.833	1.175.283	38.550	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5. Pinjaman yang Diterima	10.563.657	1.969.609	3.467.951	5.126.097	-	-
	6. Kewajiban lainnya	5.521.740	560.092	1.950.669	2.812.532	-	198.447
	7. Lain-lain	564.095	197.205	136.420	230.469	-	-
	Total Kewajiban	64.178.183	72.571	38.679	-	-	32
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	29.797	(15.281)	(38.679)	-	17.290	66.467
II Rekening Administratif							
A. Tagihan Rekening Administratif							
	1. Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2. Kontijensi	15.192	1.648	-	-	-	13.544
	Total Tagihan Rekening Administratif	15.192	1.648	-	-	-	13.544
B. Kewajiban Rekening Administratif							
	1. Komitmen	347.423	253.081	3.768	7.807	13.046	69.721
	2. Kontijensi	644.257	152.730	11.593	45.822	184.718	249.394
	Total Kewajiban Rekening Administratif	31.035	31.035	31.035	31.035	31.035	31.035
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(15.843)	(29.387)	(31.035)	(31.035)	(31.035)	(17.491)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	45.640	14.106	(7.644)	31.035	48.325	83.958
	Selisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

Pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas pada tingkat korporat dikoordinasikan oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko. Divisi Treasury bertanggung jawab untuk mengelola likuiditas nasional, baik untuk intrahari, harian, jangka pendek, menengah dan panjang, dalam mata uang rupiah dan valuta asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam menyusun dan melakukan review kebijakan manajemen risiko likuiditas.

Hasil pemantauan posisi dan risiko likuiditas disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terhadap hasil pemantauan yang menunjukkan indikasi risiko likuiditas berpotensi meningkat, Divisi Treasury merekomendasikan mitigasi eksposur risiko dan/atau penyesuaian secara tepat waktu terhadap strategi manajemen likuiditas di dalam Rapat ALCO atau Rapat Tim Manajemen Kelangsungan Likuiditas (Tim MKL/

Manajemen Risiko

Contingency Liquidity Crisis Team) untuk diputuskan tindak lanjut pengendalian berupa pencegahan dan/ atau penyelesaian yang efektif di dalam koridor kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking*).

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Divisi Hukum sebagai koordinator dari Manajemen Risiko Hukum berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko dalam mengelola Risiko Hukum di BRI. Untuk menunjang pelaksanaan proses Manajemen Risiko Hukum di seluruh uker BRI, Divisi Hukum berkoordinasi dengan *legal officer* (LO) di kantor wilayah. Selain itu, terdapat Fungsi Manajemen Risiko (FMR) di seluruh Kanca yang terdiri dari FMR Bidang Operasional, FMR Bidang Pemasaran dan FMR Bidang Mikro untuk turut memantau Risiko Hukum yang terjadi di masing-masing uker sesuai bidangnya, serta berkoordinasi dengan *legal officer* (LO) di kantor wilayah.

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui beberapa cara, mencakup:

- a. Divisi Hukum sebagai koordinator Risiko Hukum di BRI melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal BRI tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Divisi Hukum memberikan *advis/opini* hukum atas perjanjian kerjasama (PKS)/*agreement* antara BRI dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum BRI sebelum perjanjian/*agreement* ditandatangani oleh pejabat BRI yang berwenang.
- c. Setiap transaksi perbankan di BRI yang meliputi operasional, perkreditan dan hubungan ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai.

- d. Divisi Hukum bekerja sama dengan *legal officer* (LO) di Kantor Wilayah memantau risiko hukum di seluruh unit kerja BRI melalui mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum serta sosialisasi modus operandi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum.
- e. Divisi Hukum menyusun pedoman-pedoman hukum misalnya pedoman penyusunan PKS dan buku saku hukum baik untuk bidang operasional maupun bidang perkreditan.
- f. Pembinaan staf pada unit kerja operasional (UKO) di Kantor Wilayah, dengan cara meningkatkan kompetensi dalam mengendalikan risiko hukum di wilayah kerja yang bersangkutan berupa sosialisasi, diskusi mengenai opini atas suatu kejadian dari sisi hukum yang berlaku, dan lain-lain.
- g. *Legal officer* (LO) di Kantor Wilayah memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya kepada UKO apabila terjadi kasus hukum di UKO dan berkoordinasi dengan Divisi Hukum
- h. Divisi Hukum memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus.
- i. Apabila diperlukan, UKO dapat berkonsultasi dengan Divisi Hukum mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang bersifat teknis.
- j. Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi Bank dan atau adanya tuntutan hukum yang secara signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi BRI, maka sebagai *contingency plan* harus dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara lain melalui: penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi.
- k. Sebagai bagian dari pemantauan terhadap

Dalam rangka memitigasi risiko stratejik, BRI telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan strategi dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Manajemen Risiko

BRI melakukan **evaluasi** dan pengkinian sistem dan prosedur manajemen risiko **secara berkala** untuk menjaga kesesuaian antara Sistem Manajemen Risiko yang ada dengan kondisi internal BRI serta regulasi perbankan yang terkini.

risiko hukum, Divisi Hukum berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko terkait dengan pelaporan profil risiko hukum BRI setiap bulan kepada Direksi melalui *Dashboard* Profil Risiko.

Selain langkah pengendalian risiko hukum di atas, dalam rangka meningkatkan kesadaran risiko hukum, Divisi Hukum telah mengeluarkan Kompilasi Resume Ketentuan yang dikeluarkan Divisi Hukum. Kompilasi tersebut memuat resume ketentuan atau panduan yang dikeluarkan oleh Divisi Hukum yang meliputi: Aktivitas Perkreditan dan Agunan, Aktivitas Operasional, Legal Manual dan Buku Saku Hukum, dan lainnya. Kompilasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh UKO untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan demi melindungi BRI dari risiko hukum.

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Tujuan utama Manajemen Risiko Strategik adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk didalamnya corporate plan dan business plan, dikelola oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis. Perumusan dan pemantauan pelaksanaan dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh rencana pengembangan produk dan atau aktivitas baru, penetapan pasar sasaran baru, maupun penetapan pasar sasaran yang harus dihindari, serta aksi korporasi seperti merger dan akuisisi, disusun secara cermat

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki BRI. Penetapan strategi yang tepat dalam pengembangan dan pemeliharaan TI, dan pengelolaan SDM yang meliputi rekrutmen, pengembangan, pembinaan dan *exit policy*, pengembangan produk dan/ atau aktivitas baru, pengembangan layanan, perluasan jaringan, penetrasi pasar sasaran, serta *marketing communication* dapat membantu BRI agar terhindar dari kegagalan dalam memenangkan persaingan bisnis perbankan dan menjaga kelangsungan usaha. Lebih lanjut, strategi menjadi tidak efektif jika tidak disertai pemenuhan faktor-faktor pendukung kesuksesan yang dipersyaratkan.

Dalam rangka memitigasi risiko strategik, BRI telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan strategi dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Melalui parameter yang tercermin pada Profil Risiko, khususnya Risiko Strategik, perencanaan strategi terhadap seluruh inisiatif yang terkait dengan lini bisnis dan penunjangnya dimonitor untuk dapat memastikan pencapaian realisasi target-target bisnis jangka pendek, dan jangka panjang apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Selain itu untuk mengukur kemajuan yang dicapai, BRI mempunyai laporan realisasi rencana bisnis bank, rencana kerja fungsional, dan rencana kerja anggaran yang dilaporkan tiap unit kerja setiap triwulan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat BRI tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Perbankan merupakan suatu industri yang *highly regulated*, sehingga BRI senantiasa melakukan monitoring atas kepatuhan terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun instansi berwenang lainnya. Sanksi regulator terhadap pelanggaran ketentuan-

Manajemen Risiko

ketentuan dimaksud bervariasi dari teguran, sanksi/denda/penalti, hingga pencabutan lisensi. Pengelolaan kepatuhan dilakukan pada seluruh aktivitas bidang perkreditan dan non perkreditan sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan, melalui Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko, merupakan koordinator Risiko Kepatuhan yang mengelola risiko kepatuhan di BRI. Selain itu, terdapat peran Bagian Manajemen Risiko Kantor Wilayah, Unit Kerja Khusus (UKK), serta peran serta pemimpin unit kerja dalam mengelola dan menerapkan budaya sadar risiko di seluruh unit kerja BRI. Dalam rangka pemantauan eksposur risiko kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko menyusun *Dashboard Profil Risiko BRI* yang dilaporkan kepada Direksi.

Adapun implementasi manajemen risiko kepatuhan tahun 2013 antara lain dengan penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan sosialisasi *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagai inisiatif yang lebih mendalam dari pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) secara berkala. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan awareness dan kepatuhan UKO BRI terhadap prosedur ini.

Disamping itu, BRI juga menerapkan metodologi *Risk Based Approach* yang terangkum dalam kebijakan dan *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait APU dan PPT untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Hal ini juga didukung dengan telah diimplementasikannya sistem *Anti Money Laundering* (AML) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan, melalui laporan CTR dan STR.

BRI mengembangkan modul proses manajemen risiko kepatuhan melalui perangkat Manajemen Insiden (MI) dan IRU. Melalui MI dan IRU, BRI dapat melakukan identifikasi dan monitoring atas sanksi, denda, pinalti akibat pelanggaran aturan regulator sehingga langkah-langkah pengendalian risiko kepatuhan dapat dijalankan. Perangkat tersebut dipantau oleh Divisi Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan untuk melihat Risiko Kepatuhan secara korporat, dan Bagian Manajemen Risiko Kantor Wilayah untuk melihat Risiko Kepatuhan pada level unit kerja wilayah binaan.

Selain itu, baik Divisi Manajemen Risiko di Kantor Pusat maupun Bagian Manajemen Risiko di Kantor Wilayah terlibat dalam pemantauan kepatuhan untuk hal-hal yang kritis ataupun hal-hal yang disyaratkan oleh regulator seperti perencanaan, pembukaan, dan pelaporan unit kerja baru.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Fungsi pengendalian Risiko Reputasi dilakukan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan (SKP) sebagai *public relation* BRI. Secara berkala Divisi SKP menilai parameter risiko reputasi dan melaporkan pada Direksi dengan tindasan kepada Divisi Manajemen Risiko untuk digabung dengan profil risiko BRI secara korporat, dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pengalaman fungsi *public relation* BRI dalam penanganan publikasi negatif, baik yang berskala nasional maupun lokal, hingga saat ini sangat membantu dalam mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat pada umumnya, atau nasabah BRI pada khususnya. Meskipun reputasi BRI saat ini sangat baik, pengelolaan publikasi negatif yang terkait dengan seluruh aspek operasional BRI harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BRI segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi. Di samping itu mitigasi Risiko Reputasi maupun kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas materialitas permasalahan dan biaya.

Pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis diatur dalam kebijakan *Business Continuity Management* BRI yang bertujuan untuk meminimalisasi dampak risiko reputasi pada saat terjadi situasi gangguan atau bencana. Dalam hal ini, BRI memiliki Tim Manajemen Krisis (TMK) yang berperan penting saat terjadi gangguan atau bencana dan bertanggung jawab melakukan langkah-langkah yang perlu diambil termasuk pengelolaan risiko reputasi. Struktur TMK dibentuk di seluruh unit kerja BRI yaitu TMK Kantor Pusat, TMK Kantor Wilayah, dan TMK Kantor Cabang. Aspek strategik yang harus diperhatikan dalam pengelolaan risiko reputasi saat krisis adalah menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan masyarakat sekitar terhadap nama baik BRI.

Dalam rangka pengendalian Risiko Reputasi yang lebih besar di masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihan Risiko Reputasi yang telah dilakukan diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya Risiko Reputasi.

Langkah yang dilakukan BRI dalam manajemen risiko reputasi antara lain melalui komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga *brand* BRI secara korporat. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan atau komplain dari

Manajemen Risiko

stakeholders yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap BRI.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi dan pengkinian sistem dan prosedur manajemen risiko perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian antara Sistem Manajemen Risiko yang ada, dengan kondisi internal BRI serta regulasi perbankan yang terkini. Dalam melakukan evaluasi dan pengkinian tersebut, BRI memiliki perangkat berupa Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan suatu proses penilaian self assessment yang dilakukan oleh Fungsi Manajemen Risiko yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja, yang kemudian divalidasi oleh Kepala Bagian Manajemen Risiko Kanwil atau Kepala Bagian Manajemen Risiko Operasional di Kantor Pusat. Pelaksanaan penilaian maturitas penerapan manajemen risiko ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko di tiap Unit Kerja secara umum memiliki tujuan:

1. Menunjukkan tingkat implementasi manajemen risiko di masing-masing Unit Kerja yang bersangkutan.
2. Mengevaluasi tingkat kematangan (maturitas) implementasi manajemen risiko di masing-masing Unit Kerja
3. Mendorong setiap Unit Kerja agar selalu melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam implementasi manajemen risiko.

Penerapan penilaian maturitas dimaksud diharapkan memberikan manfaat, yaitu sebagai indikator yang menggambarkan efektivitas implementasi sistem dan prosedur proses manajemen risiko yang telah diprakarsai oleh Divisi Manajemen Risiko.

Upaya Peningkatan Kualitas Implementasi Manajemen Risiko BRI

Dalam mengelola risiko, BRI dibantu oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, yang terdiri dari:

- *Operational Risk Assesor* (OPRA), untuk membantu mengelola Risiko Operasional
Sampai saat ini aplikasi OPRA baru digunakan oleh unit kerja Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang BRI. Untuk menyesuaikan kebutuhan di masa depan, sistem ini akan dikembangkan agar dapat digunakan oleh semua unit kerja BRI.
- *Loan Approval System* (LAS), untuk membantu mengelola Risiko Kredit
Di tahun 2013, LAS digunakan untuk semua proses dan putusan kredit, sehingga BRI mempunyai suatu sistem perkreditan yang terintegrasi.
- *Treasury and Market Risk System* (GUAVA), untuk membantu mengelola Risiko Pasar.
Rencana pengembangan sistem ini adalah pengembangan produk derivatif dan *internal dealing*.

Kualitas dan validitas data Sistem Informasi Manajemen Risiko juga selalu ditingkatkan, agar dapat memberikan informasi yang akurat, dan dapat menjadi bahan masukan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Pengembangan SDM Di Bidang Manajemen Risiko

Untuk menerapkan manajemen risiko yang berkualitas, dibutuhkan pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tugasnya masing-masing dengan mengedepankan budaya risiko dan pelaksanaan manajemen risiko dalam aktivitas operasionalnya sehari-hari. Untuk mendapatkan SDM yang handal dalam bidang manajemen risiko sekaligus memenuhi ketentuan regulator tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, maka BRI melaksanakan edukasi manajemen risiko antara lain:

a. Sertifikasi Manajemen Risiko dan Refreshment

Pendidikan sertifikasi Manajemen Risiko diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eselon 1, 2, dan 3. Bagi yang telah mendapat sertifikasi Manajemen Risiko, maka BRI tetap melaksanakan edukasi dengan program refreshment agar yang bersangkutan tetap mendapatkan informasi terkini mengenai manajemen risiko. Selama tahun 2013 jumlah pekerja BRI yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko sebanyak 307 orang.

Manajemen Risiko

b. *e-learning*

Edukasi manajemen risiko juga dilaksanakan melalui metode pembelajaran interaktif melalui *e-learning*. *E-learning* ditujukan untuk seluruh pekerja BRI sebagai media edukasi mandiri agar memahami filosofi dan penerapan manajemen risiko.

c. Sosialisasi

Sosialisasi rutin dilakukan oleh unit kerja Manajemen Risiko kepada seluruh jajaran pekerja BRI di seluruh Indonesia, terutama mengenai perangkat manajemen risiko yang digunakan di BRI.

d. Pembelajaran

Pembelajaran bagi pekerja BRI melalui seminar dan training yang diselenggarakan pihak eksternal.

Rencana Dan Strategi Manajemen Risiko Tahun 2014

Untuk tahun 2014, BRI telah merencanakan berbagai kegiatan yang bertujuan memperkuat dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, diantaranya mencakup:

1. Monitoring dan analisis terhadap limit risiko kredit, kinerja CRR / CRS, eksposur risiko, *risk & return* pada aktifitas perkreditan, dan *recovery rate*.
2. Review kebijakan dan metodologi *Credit Risk Rating-Credit Risk Scoring* (CRR-CRS), *Credit Risk Modelling* (PD, LGD dan EAD) sesuai karakteristik kredit, kebutuhan MIS dan sistem CRM BRI.
3. Pengukuran risiko kredit dengan *Internal Rating Based Approach* (IRBA) Basel II.
4. Melakukan simulasi dan review metodologi validasi model *back testing* dan *stress testing* Risiko Pasar dan Risiko Kredit.
5. Review kebijakan *Enterprise-wide Risk Management* (ERM), dengan menyesuaikan kebijakan Basel III.
6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko, khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan validitas data.
7. Koordinasi penerapan Strategi Anti fraud dan penerapan perangkat Manajemen Risiko.
8. Meningkatkan budaya sadar risiko dan mengoptimalkan penerapan manajemen risiko yang ada di unit kerja BRI seluruh Indonesia.
9. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi pengendalian seluruh jenis risiko.



**Analisa dan Pembahasan
Manajemen**

204 Tinjauan Umum

208 Kondisi Perbankan 2013

209 Pertumbuhan Kredit UMKM Nasional

210 Tinjauan Bisnis

210 Segmen Bisnis

212 Bisnis Mikro dan Program

220 Bisnis Ritel dan Menengah

228 Bisnis BUMN dan Korporasi

234 Bisnis Internasional

238 Bisnis Treasury dan
Jasa Penunjang Pasar Modal

242 Tinjauan Kinerja Keuangan

244 Laporan Laba Rugi

249 Laporan Posisi Keuangan

258 Informasi Keuangan Lainnya

258 Pencapaian Target 2013

258 Target 2014

258 Komitmen dan Kontinjensi

259 Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai

“ Pengembangan Teknologi E-Channel ”

Memperkuat jaringan teknologi untuk memberikan kemudahan bertransaksi

Analisa dan Pembahasan Manajemen

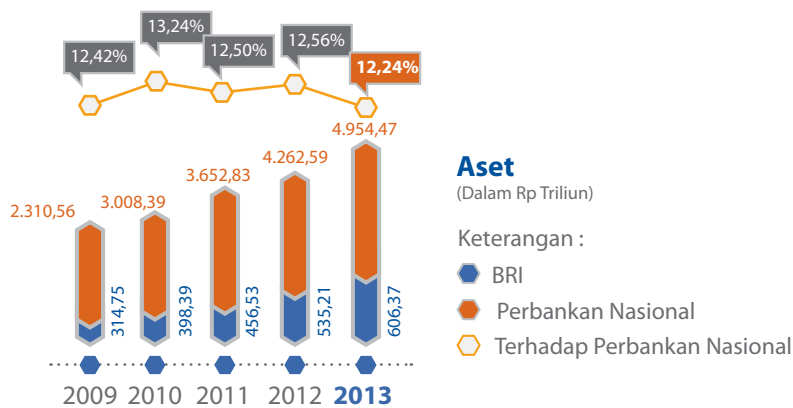
259	Dampak Perubahan Suku Bunga Terhadap Kinerja Bank		
260	Upaya Meningkatkan Perolehan Fee Based Income		
263	Informasi-informasi Material Lain		
263	Informasi dan Fakta Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang/Modal.		
263	Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan.		
263	Kebijakan Akuntansi dan Informasi Keuangan Kejadian Luar Biasa		
263	Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Bank		
266	Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan		
266	Transaksi Benturan Kepentingan		
266	Transaksi Berelasi		
266	Kebijakan Dividen		
267	Entitas Anak		
267	PT Bank BRISyariah		
269	PT Bank Agroniaga Tbk		
270	BRI Remittance Co.Ltd.		

Tinjauan Umum



Tinjauan Kinerja BRI vs Perbankan

Pertumbuhan Aset*	
BRI	Perbankan Nasional
Pada tahun 2013 aset BRI tumbuh 13,30% mencapai Rp606,37 triliun dari angka Rp535,21 triliun di akhir tahun 2012. Pangsa pasar aset BRI di akhir tahun 2013 adalah 12,24%.	Aset perbankan nasional tumbuh sebesar 16,23%, dari posisi Rp4.262,59 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 4.954,47 triliun pada tahun 2013.



* Angka bank saja

“

BRI berhasil meningkatkan pangsa pasar di segmen MKM, memperbaiki kualitas kredit, meningkatkan perolehan *fee based income*, meningkatkan laba bersih serta berhasil memantapkan diri sebagai bank dengan pertumbuhan bisnis MKM terbesar yang berkualitas.

”

BRI*

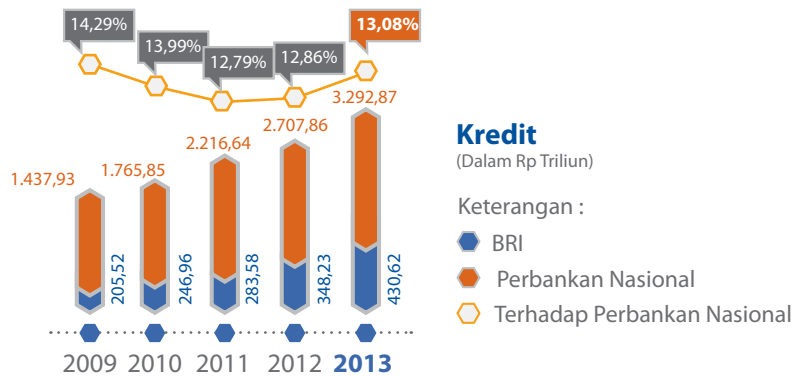
Pertumbuhan Kredit*

BRI

Kredit BRI meningkat 23,66%, mencapai Rp430,62 triliun dari angka Rp348,23 triliun di akhir tahun 2012 lebih tinggi dari pertumbuhan kredit perbankan nasional, sehingga pangsa pasar kredit BRI di akhir tahun 2013 kembali naik menjadi 13,08%, lebih tinggi dari posisi 12,86% di tahun 2012.

Perbankan Nasional

Kredit perbankan nasional meningkat sebesar 21,60%, dari posisi Rp2.707,86 triliun pada Desember 2012 menjadi Rp3.292,87 triliun pada akhir Desember 2013, lebih rendah dari pertumbuhan di tahun 2012 sebesar 22,97%.



* Angka bank saja

Tinjauan Umum

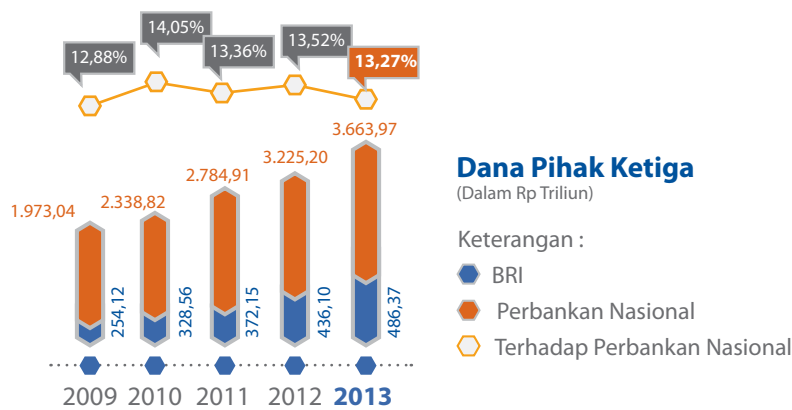
Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga*

BRI

Perbankan Nasional

Posisi simpanan pihak ketiga BRI meningkat 11,52% dari angka Rp436,10 triliun menjadi sebesar Rp486,37 triliun di akhir tahun 2013. Pangsa pasar dana pihak ketiga BRI di akhir tahun 2013 menjadi sebesar 13,27%.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga perbankan nasional bertumbuh sebesar 13,60% dari Rp3.225,20 triliun di akhir Desember 2012 menjadi Rp3.663,97 triliun di akhir Desember 2013.



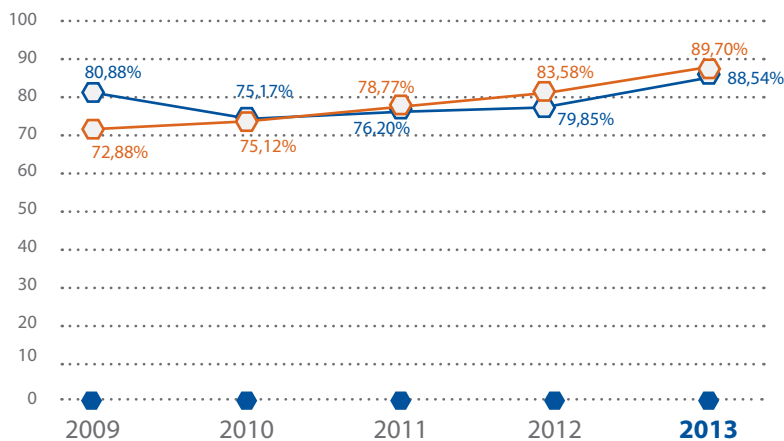
Posisi Loan to Deposit Ratio (LDR)*

BRI

Perbankan Nasional

Keberhasilan BRI dalam menghimpun dana pihak ketiga membuat LDR BRI terkelola dengan baik pada kisaran 88,54% di akhir tahun 2013.

Tingkat LDR nasional cenderung meningkat dari posisi 83,58% di akhir tahun 2012 menjadi 89,70% Desember 2013, akibat peningkatan pertumbuhan kredit nasional yang diiringi perlambatan penghimpunan dana pihak ketiga.



* Angka bank saja

Tinjauan Umum

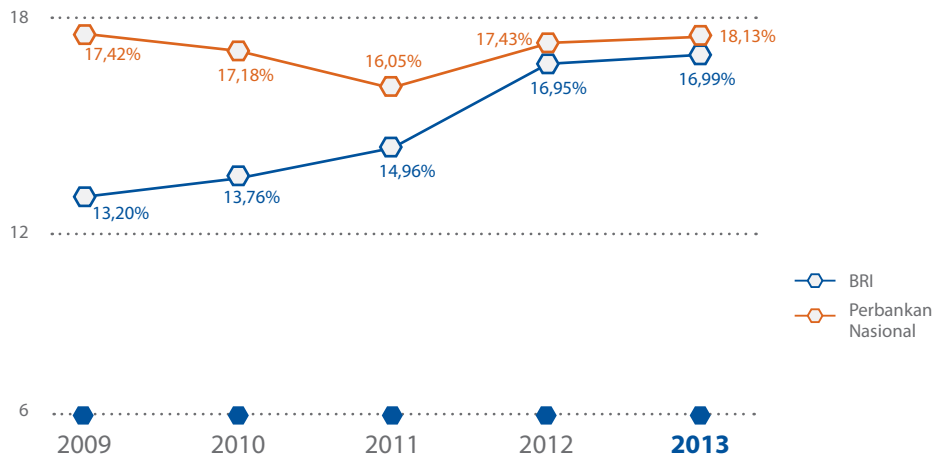
Posisi Capital Adequacy Ratio (CAR)*

BRI

Perbankan Nasional

Peningkatan laba bersih yang substansial membuat CAR BRI terus menguat, naik dari posisi 16,95% di akhir tahun 2012 menjadi sebesar 16,99% di akhir tahun 2013, menunjukkan kemampuan untuk mendukung ekspansi kredit dan mengatasi risiko di tahun mendatang.

CAR perbankan nasional meningkat dari posisi 17,43% tahun 2012 menjadi 18,13% di akhir Desember 2013.



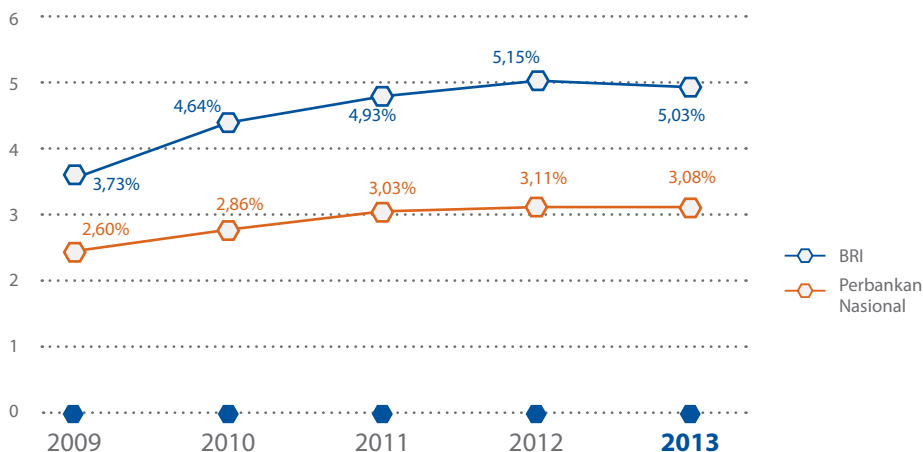
Rentabilitas Aset (ROA)*

BRI

Perbankan Nasional

Peningkatan efisiensi operasional, peningkatan *loan yield* dan naiknya komponen *fee based income* membuat ROA BRI relatif terjaga dari posisi 5,15% di akhir tahun 2012 menjadi sebesar 5,03% di akhir tahun 2013, lebih tinggi dari posisi ROA perbankan nasional.

ROA perbankan nasional juga relatif terjaga, dari posisi 3,11% tahun 2012 menjadi 3,08% di akhir Desember 2013.



* Angka bank saja

Tinjauan Umum

Kondisi Perbankan 2013

Di tengah kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2013 yang cukup menantang sebagai dampak krisis keuangan di kawasan Eropa dan terjadinya pelemahan nilai tukar akibat rencana *tapering off* oleh pemerintah Amerika Serikat, kondisi perbankan Indonesia masih relatif terjaga dengan fungsi intermediasi yang tetap baik. Menghadapi situasi perekonomian tersebut, rasio kredit bermasalah/NPL (*Non Performing Loan*) *gross* masih terjaga pada level yang dapat dikelola dengan baik, berkisar pada angka 1,77% dari tahun sebelumnya, sebesar 1,87%. Tetap kuatnya kondisi perbankan domestik juga tercermin dari tingginya rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) perbankan nasional yang berada jauh diatas ketentuan minimum regulator, yakni sekitar 18,13%.

Kondisi perbankan tersebut lebih baik dari kondisi perekonomian, yang mengalami perlambatan pertumbuhan dari 6,23% di tahun 2012 menjadi sebesar 5,78% di tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut didorong oleh tingkat konsumsi domestik yang sebagian besar dipenuhi oleh produk-produk industri mikro, kecil maupun menengah. Kondisi tersebut berperan besar terhadap terjaminnya kualitas aset perbankan nasional yang banyak mendukung sektor industri UMKM ini.

Jumlah pertumbuhan penyaluran kredit perbankan nasional di tahun 2013, menurut data BI sedikit melambat, dikisaran 21,60% dengan nilai kredit mencapai Rp3.292,87 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari pertumbuhan kredit di tahun 2012, sebesar 23,66%, dengan nilai kredit mencapai Rp2.707,86 triliun. Di tahun 2014, Bank Indonesia memperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan kredit di kisaran 15-17% untuk menjaga kualitas penyaluran kredit.

Mayoritas total penyaluran kredit tersebut, yakni 48,15% ditujukan untuk membiayai modal kerja yang tumbuh dari Rp1.316,69 triliun per Desember 2012 menjadi sebesar Rp 1.585,66 triliun di akhir 2013. Selanjutnya, 24,24% ditujukan untuk membiayai investasi yang meningkat dari Rp591,43 triliun per Desember 2012 menjadi sebesar Rp 798,16 triliun di akhir 2013. Sisanya sebesar 27,61% ditujukan untuk membiayai konsumsi yang meningkat dari Rp799,75 triliun, menjadi sebesar Rp 909,06 triliun di akhir 2013.

Sementara untuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), kondisi perekonomian yang kurang kondusif membuat pertumbuhannya juga terpengaruh, yakni menurun dari sebesar 15,8% di tahun 2012 dengan nilai Rp3.225,20 triliun, menjadi hanya tumbuh 13,60% dengan nilai sebesar Rp 3.663,97 triliun pada Desember 2013. Komposisi DPK di bulan Desember tahun 2013 terdiri dari 23,11% giro, 43,79% deposito dan tabungan dengan proporsi 33,10%.

Komposisi tersebut relatif sama dengan tahun 2012, yang terdiri dari 23,78% giro, 42,83% deposito dan tabungan dengan proporsi 33,39%. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari penghimpunan DPK membuat rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) perbankan kembali meningkat. Pada bulan Desember 2013, rata-rata LDR perbankan nasional adalah 89,70%, meningkat dari posisi 83,58% di akhir tahun 2012.

Posisi DPK dan LDR tersebut menunjukkan bahwa persaingan di industri perbankan dalam memperebutkan DPK di tahun-tahun mendatang akan semakin meningkat. Namun sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta tingkat inklusifitas keuangan masyarakat Indonesia yang berada di kisaran 20% menunjukkan masih tingginya potensi penghimpunan DPK.

Kecenderungan kenaikan suku bunga rujukan di tahun 2013 pada gilirannya akan berdampak pada strategi penetapan bunga simpanan yang akan membuat biaya dana meningkat. Oleh karenanya perbankan harus mampu menciptakan inovasi produk dan fitur baru, termasuk melaksanakan aktivitas promosi yang semakin agresif untuk dapat bersaing.

Dengan dukungan jaringan unit kerja maupun fasilitas EDC yang luas serta ragam produk jasa perbankan yang inovatif BRI tetap menunjukkan kondisi yang berbeda dengan perbankan nasional. Dengan penerapan strategi *selective growth* dan berfokus pada pengembangan segmen MKM termasuk upaya revitalisasi bisnis mikro, BRI menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Konsistensi pelaksanaan konsolidasi khususnya di segmen ritel komersial dan menengah di tahun yang penuh tantangan ini juga menunjukkan hasil berupa meningkatnya kualitas kredit yang terlihat dari penurunan tingkat NPL di segmen kredit tersebut.

NPL (*gross*) segmen menengah menurun dari 5,09% di tahun 2012, menjadi 4,38% di tahun 2013. Untuk segmen ritel komersial, angkanya menurun dari 3,75% di tahun 2012 menjadi sebesar 3,13% di tahun 2013. Demikian juga dengan NPL (*gross*) segmen konsumen yang membaik dari 1,60% di tahun 2012, menjadi sebesar 1,40% di tahun 2013.

Dengan membaiknya NPL (*gross*) di segmen kredit tersebut, maka secara total NPL (*Gross*) kredit BRI (data bank saja) mengalami penurunan, yaitu dari 1,78% di tahun 2012, menjadi sebesar 1,55% di tahun 2013.

Perbaikan NPL tersebut menunjukkan bahwa BRI mampu menghasilkan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan bukan sekedar pertumbuhan kredit yang tinggi dan agresif. Secara keseluruhan, BRI mampu menjaga LDR pada kisaran 88,54%, masih dibawah ketentuan 92% yang ditetapkan oleh BI. Hal ini menunjukkan masih adanya

Tinjauan Umum

ruang bagi BRI untuk melakukan ekspansi kredit di tahun mendatang. Kondisi likuiditas tersebut ditunjang dengan portofolio kredit yang sehat, permodalan yang kuat dan infrastruktur yang siap menunjang pertumbuhan bisnis, menjadikan tahun 2014 sebagai masa bagi BRI untuk melanjutkan pertumbuhan segmen UMKM yang berkualitas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan peran *fee based income* dalam meningkatkan profitabilitas melalui inovasi produk-produk perbankan berbasis dukungan TI.

Pertumbuhan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Kondisi perekonomian Indonesia yang bertumpu pada kekuatan pasar domestik terbukti mampu membuat perekonomian Indonesia relatif lebih tahan terhadap gejolak perekonomian global yang didera krisis sejak beberapa tahun terakhir. Pada saat beberapa negara maju yang mengandalkan perdagangan internasional mengalami kontraksi pertumbuhan negatif akibat krisis, Indonesia tetap mampu mencatatkan pertumbuhan positif. Mempertimbangkan daya tahannya terhadap pengaruh eksternal, Pemerintah dan dunia bisnis semakin intens mendukung pengembangan struktur industri yang berorientasi pasar dalam negeri.

Hingga beberapa tahun kedepan, kondisi ini akan terus berlangsung, mengingat semakin meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia sebagaimana tercermin dari meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya kelas menengah, menurunnya tingkat kemiskinan serta meningkatnya angkatan kerja produktif. Hal tersebut menjadikan segmen bisnis yang berorientasi pada pasar dalam negeri mempunyai prospek bisnis yang cerah, termasuk dalam penyaluran kredit.

Dengan kondisi tersebut, maka pertumbuhan bisnis Mikro, Kecil dan Menengah yang berorientasi pasar dalam negeri akan terus membuat perbankan nasional memberi

perhatian lebih pada penyaluran kredit di segmen ini. Porsi kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam struktur kredit nasional di tahun 2013 ini mencapai 18,48% dari total kredit perbankan nasional.

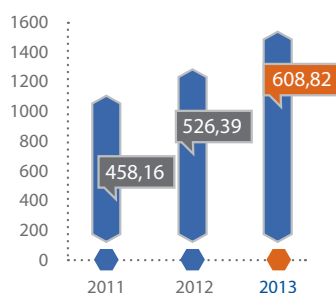
Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nasional selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat pertumbuhan yang moderat. Pada tahun 2012 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tumbuh 14,89% dari Rp458,16 triliun di akhir tahun 2011 menjadi sebesar Rp526,39 triliun di akhir tahun 2012. Pada tahun 2013, saat pertumbuhan ekonomi nasional melambat, kredit UMKM nasional masih tetap tumbuh sebesar 15,66% dengan outstanding mencapai Rp 608,82 triliun.

BRI sebagai bank yang mempunyai hubungan sangat kuat dengan perekonomian domestik dengan fokusnya pada segmen UMKM memiliki posisi yang sangat baik untuk memanfaatkan potensi bisnis yang ada. Dukungan jaringan yang luas membuat portofolio kredit UMKM BRI terhadap total kredit UMKM perbankan nasional senantiasa terjaga pada level yang tinggi. Pada tahun 2012 portofolio kredit UMKM BRI adalah sebesar 28,08% dari total kredit UMKM perbankan nasional. Portofolio ini di tahun 2013 meningkat menjadi 29,50% dari total kredit UMKM, seiring dengan tingginya ekspansi kredit UMKM yang berhasil diraih oleh BRI.

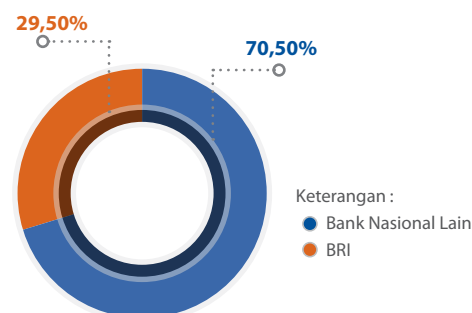
Pasar domestik Indonesia akan terus berkembang seiring dengan terus membaiknya taraf hidup masyarakat Indonesia, memberikan peluang pertumbuhan berkelanjutan bagi segmen bisnis UMKM. Hal ini pada gilirannya menciptakan peluang yang bisa diraih oleh industri perbankan termasuk BRI untuk mendukung pertumbuhan segmen UMKM melalui penyaluran kredit maupun pemberian jasa-jasa perbankan yang mampu membuat kegiatan operasional segmen ini berlangsung semakin efisien dan meningkatkan daya tahannya terhadap gejolak perekonomian global.

Kredit UMKM Nasional

(Dalam Rp triliun)



Pangsa Pasar



Tinjauan Bisnis



Segmen Bisnis

Berdasarkan besaran kredit yang diberikan, BRI membagi segmen pasarnya ke dalam tiga segmen utama, yakni Segmen Mikro, Segmen Ritel dan Segmen Korporasi. Kemudian sesuai dengan sifat usaha, BRI juga mengelaborasi segmen bisnis ini menjadi Bisnis Mikro dan Program, Bisnis Ritel dan Menengah, Bisnis BUMN dan Korporasi, Bisnis Internasional, *Treasury* dan Jasa Penunjang Pasar Modal, serta Anak Perusahaan yang fokus kepada bisnis Syariah, Agribisnis dan bisnis *Remittance*.

<p>Mikro dan Program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit Mikro • Kredit Program • Simpanan Mikro 	<p>Bisnis Mikro ditujukan untuk memberikan layanan perbankan, khususnya untuk nasabah perorangan dan wirausahawan mikro, sedangkan Bisnis Program lebih kepada menyalurkan program pembangunan dari Pemerintah untuk pemberdayaan usaha masyarakat.</p>
<p>Ritel dan Menengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit Ritel • Kredit Menengah • Kredit Konsumer • Simpanan Ritel 	<p>Bisnis Ritel dan Menengah ditujukan untuk melayani nasabah perorangan serta wirausahawan kecil dan menengah (UKM), dengan memberikan layanan jasa perbankan, produk simpanan, dan pinjaman baik komersial maupun konsumen.</p>
<p>BUMN dan Korporasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit BUMN & Korporasi • Pengelolaan dana BUMN & Korporasi 	<p>Bisnis BUMN dan Korporasi ditujukan untuk melayani perusahaan BUMN dan Non-BUMN, terutama dengan potensi <i>trickle-down business</i> bagi segmen UMKM.</p>
<p>Bisnis Internasional dan Treasury</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trade Finance, Remittance, Money Changer</i> • Produk <i>Treasury</i> • Jasa Pasar Modal & DPLK 	<p>Bisnis Internasional dan <i>Treasury</i> ditujukan untuk memberikan layanan Jasa Perbankan Internasional, seperti <i>Trade Finance, Money Changer</i> dan <i>Remittance</i>, melayani produk <i>Treasury</i> serta Jasa Pasar Modal & DPLK.</p>
<p>Entitas Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Syariah • Bank Agro • Bisnis <i>Remittance</i> 	<p>Entitas Anak memberikan sinergi bisnis BRI dengan memberikan layanan perbankan syariah, agribisnis, dan <i>remittance</i>.</p>



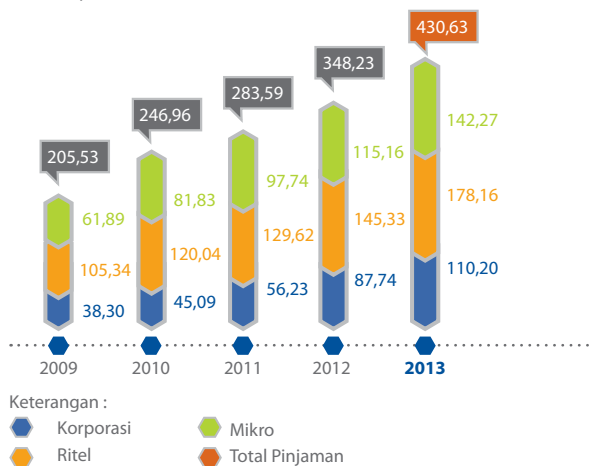
“Konsistensi BRI dalam memperkuat pengembangan usaha segmen mikro kecil dan menengah melalui penambahan jaringan layanan berbasis TI dan dukungan kompetensi SDM telah memberikan hasil yang membanggakan dengan diimbangi perbaikan kualitas aset”



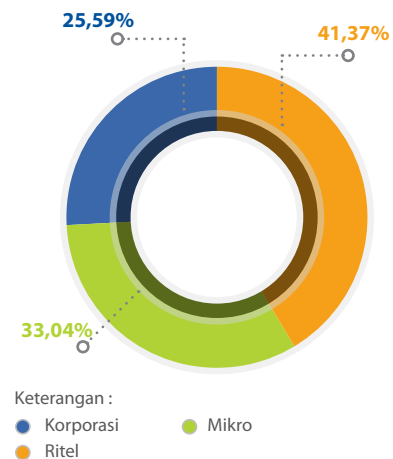
Sesuai dengan visi dan misinya, BRI lebih memfokuskan bisnisnya pada sektor mikro, kecil dan menengah dengan porsi kredit mikro, kecil dan menengah terhadap total kredit BRI di tahun 2013 sekitar 74,41%. Sedangkan penyaluran kredit di segmen korporasi dan BUMN ditujukan untuk menangkap potensi, mengoptimalkan likuiditas dana yang ada, sekaligus membuka peluang terciptanya *trickle down bussines* bagi segmen mikro, kecil dan menengah melalui *supply chain* di segmen korporasi dan BUMN.

Pembahasan berikut menggambarkan perkembangan masing-masing segmen bisnis BRI.

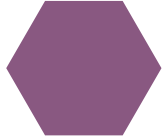
Kredit BRI (Dalam Rp Triliun)



Komposisi Kredit BRI



Tinjauan Bisnis



Bisnis Mikro dan Program



“

Strategi Utama yang diterapkan dalam pengembangan Bisnis Mikro dan Program adalah pelaksanaan konsep *community banking* dengan mengedepankan *community development* untuk menjamin pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan

”

Tinjauan Bisnis

Ringkasan :

1. Bisnis Mikro merupakan segmen usaha unggulan dari BRI yang didesain dan ditujukan untuk nasabah perorangan dan pengembangan usaha mikro.
2. Produk pinjaman unggulan adalah Kupedes dan KUR Mikro sementara Produk simpanan unggulan adalah Simpedes.
3. Penambahan outlet untuk mendukung akselerasi peningkatan segmen Bisnis Mikro, sehingga total BRI Unit menjadi 5.144 unit, Teras BRI menjadi 2.212 unit, dan TerasBRI Keliling menjadi 465 unit.
4. Total *Outstanding* kredit Mikro meningkat 23,72% menjadi Rp 132,13 triliun dan NPL Segmen Mikro berhasil ditekan pada level 1,04%.
5. Total Simpanan segmen Mikro meningkat 15,45%, mencapai Rp146,15 triliun. Sekitar 88,24% simpanan segmen mikro berupa tabungan dengan rata rata tabungan sebesar Rp 4,7 juta/ penabung.
6. BRI adalah perbankan utama dalam penyaluran kredit program secara komersial guna mendukung terlaksananya *financial inclusion*.

Bisnis Mikro dan Program mencakup penyaluran kredit mikro dan Kredit Usaha Rakyat, penghimpunan dana masyarakat, serta penyediaan jasa bank lainnya, melalui unit kerja BRI antara lain BRI Unit, Teras BRI dan Teras BRI Keliling.

Bisnis Mikro

Untuk menjadi lembaga keuangan mikro (*microbanking*) terbaik di dunia yang menguntungkan dan berkelanjutan, BRI senantiasa mengutamakan kepuasan nasabah

sehingga tercipta loyalitas nasabah dalam jangka panjang. Dengan basis nasabah pinjaman dan simpanan yang kokoh, BRI mampu mempertahankan dominasinya dalam pemberian layanan perbankan untuk segmen bisnis mikro.

Potensi peningkatan nasabah untuk layanan perbankan mikro masih sangat terbuka, hal ini sesuai dengan data penyaluran kredit berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang menunjukkan bahwa dari seluruh unit usaha UMKM, yang diperkirakan sebesar 56,53 juta pengusaha dengan lebih dari 90%nya bergerak di sektor usaha mikro, layanan perbankan baru dapat menjangkau sekitar 30%nya. Sementara itu, World Bank Survey di tahun 2010 menginformasikan bahwa dari total populasi Indonesia, baru sekitar 17% yang telah menikmati fasilitas pinjaman dari perbankan. Sehingga dari kedua data tersebut tergambar bahwa potensi pengembangan bisnis UMKM di Indonesia masih sangat besar.

Dengan potensi yang sangat besar tersebut, BRI menjadikan sektor UMKM sebagai fokus dalam pengembangan bisnisnya. Sementara itu, memperhatikan kondisi eksternal selama periode tiga tahun ke depan, BRI lebih menekankan pada strategi *selective growth*. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yakni dengan mengkolaborasi serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada baik infrastruktur, produk serta SDM agar mampu menciptakan sinergi dan memberikan arah dalam pengembangan bisnis BRI, khususnya dengan sasaran utama sebagai Bank dengan pertumbuhan Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah terbaik di Indonesia.

Strategi umum yang dijalankan BRI untuk mengembangkan segmen mikro adalah melalui pelaksanaan konsep *community banking* yang berkualitas, meliputi:

1. Perluasan jangkauan pelayanan ke seluruh pelosok Indonesia dan penyediaan produk dan jasa keuangan mikro yang sederhana, aman dan mudah diakses oleh nasabah.
2. Peningkatan kualitas produk dan layanan di segmen bisnis mikro serta menjalin kemitraan yang berkesinambungan dengan para nasabah sehingga tercipta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
3. Pemenuhan sumber daya manusia yang mengerti seluk beluk usaha mikro, mampu bertindak sebagai pemberi solusi dan *partner* bagi para pelaku bisnis mikro melalui pemberian arahan, pendampingan dan pengawasan yang konsisten.
4. Pemberian informasi mengenai *microbanking* BRI sebagai lembaga keuangan mikro yang berhasil dan berkelanjutan di tingkat internasional, sekaligus sebagai *global corporate social responsibility* BRI untuk pengembangan *microbanking* yang berkelanjutan secara internasional.

Produk pinjaman unggulan untuk segmen Mikro ini adalah Kupedes dan KUR Mikro. Kupedes merupakan Kredit Usaha dengan plafond sampai dengan Rp100 juta yang ditujukan untuk badan usaha maupun perorangan yang memenuhi persyaratan dan dilayani di seluruh jaringan kerja Bisnis Mikro BRI.

Tinjauan Bisnis

KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula (*start-up business*) dengan jaminan asuransi dari Pemerintah dan plafond kredit sampai dengan Rp20 juta. Bagi BRI, penyaluran KUR Mikro merupakan salah satu sarana untuk menambah basis calon nasabah Kupedes yang berkualitas. Penutupan asuransi kredit dari Pemerintah sebesar 70%-80% dari *total loss* menjadikan KUR Mikro sebagai skim kredit dengan profil *risk and return* yang memadai untuk BRI.

Selain dua produk Pinjaman tersebut, unit kerja Mikro juga melayani kredit konsumtif yaitu Briguna Karya untuk Karyawan dan Briguna Purna untuk Pensiunan. Sedangkan untuk produk Simpanan, produk unggulan untuk nasabah mikro adalah Simpedes dengan fasilitas perbankan yang lengkap, dan didesain untuk memudahkan nasabah mikro. Seluruh produk dan jasa Bisnis Mikro dilayani melalui jaringan kerja yang terhubung secara *real time online*, baik melalui unit kerja konvensional, yaitu BRI Unit, Teras BRI dan Teras BRI Keliling maupun jaringan e-channel, seperti ATM, dan EDC.

Pengembangan Bisnis Mikro di Tahun 2013

Selama tahun 2013, kegiatan utama yang dilaksanakan BRI untuk mengembangkan Bisnis Mikro dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantapan Proses Reorganisasi Divisi Bisnis Mikro
Ada dua program utama yang dilaksanakan dalam reorganisasi Divisi Bisnis Mikro dengan tujuan utama mendorong peningkatan bisnis mikro BRI, yakni:
 - Pemantapan Kinerja 3 (tiga) Divisi Bisnis Mikro hasil pengembangan di tahun 2012, yakni Divisi Kebijakan dan Pengembangan, Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 1, dan Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 2.

BRI menargetkan percepatan ekspansi Bisnis Mikro yang tetap berlandaskan pada asas *prudential banking* melalui pemisahan 2 fungsi, yakni divisi yang menetapkan kebijakan dan divisi yang fokus pada pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Pembentukan 2 (dua) divisi yang bertugas sebagai pelaksana program menunjukkan tingginya komitmen BRI dalam pengembangan Bisnis Mikro dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian.

- Penambahan Mantri (*micro loan officer*) di BRI Unit, sehingga rasio mantri per BRI Unit meningkat dari 3,09 pada tahun 2012 menjadi 3,67 pada tahun 2013. Peningkatan rasio ini menggambarkan peningkatan kapasitas penyaluran kredit mikro untuk setiap BRI Unit, sekaligus menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit untuk menekan rasio NPL.
2. Penambahan Infrastruktur Jaringan
BRI konsisten melanjutkan program pengembangan infrastruktur sebagai bagian implementasi strategi penetrasi pasar melalui program ekstensifikasi maupun intensifikasi, yakni pembukaan unit kerja mikro di daerah-daerah baru dengan membuka BRI Unit serta memaksimalkan potensi bisnis pada daerah-daerah yang telah dilayani, dengan membuka Teras BRI dan Teras BRI Keliling. Penambahan infrastruktur jaringan juga dilakukan dengan pengembangan jaringan *e-channel*, melalui ATM dan EDC.
 3. Peningkatan kualitas Infrastruktur Jaringan
Selain menambah jaringan, BRI berupaya meningkatkan kualitas jaringan yang ada melalui penggantian peralatan pendukung, yakni perangkat TI maupun non-TI berusia diatas 5 tahun dan perbaikan tampilan unit kerja Mikro BRI melalui program renovasi bangunan unit kerja BRI, eksterior maupun interior.
 4. Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional
Program peningkatan jumlah unit kerja tersebut juga didukung dengan ketersediaan SDM yang berkualitas, termasuk ketersediaan Mantri. BRI akan terus meningkatkan kualitas dari SDM yang ada melalui program pendidikan secara berkala dan berkesinambungan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) sentra pendidikan di seluruh Indonesia yang diikuti perbaikan kurikulum / materi pelatihan. BRI juga berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan otomasi sistem perkreditan pada unit layanan *mobile*.
 5. Memperkokoh Basis Nasabah Perbaikan-perbaikan tersebut diatas merupakan bagian dari upaya BRI untuk menambah basis nasabah guna meningkatkan *outstanding* pinjaman maupun simpanan. Peningkatan jumlah nasabah ditujukan untuk memperkuat basis nasabah BRI seiring dengan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah.
 6. Program Pemasaran Bisnis Mikro
Pada tahun 2013, sebagai bagian dari rangkaian upaya perluasan basis nasabah, meningkatkan loyalitas nasabah eksisting dan meningkatkan *outstanding* simpanan maupun pinjaman, BRI melakukan berbagai program pemasaran terpadu, meliputi:

Tinjauan Bisnis

Panen Hadiah Simpedes (PHS)

Merupakan program pemasaran yang mengemas secara menarik program Undian Simpedes dan program Panen Bulanan Simpedes (PBS), dengan mengusung *tagline* "Gampang sekali, Banyak sekali dan Berkali-kali"



Pesta Rakyat Simpedes (PRS)

PRS dirancang sebagai *event* khusus pemasaran produk Simpedes yang dilaksanakan pertama kali tahun 2008. Program ini ditujukan untuk memasarkan Simpedes dan produk bisnis mikro lainnya dengan melalui peningkatan *awareness* dan *purchase intention* terhadap Simpedes. Untuk tahun 2013, PRS ditujukan sebagai kegiatan pemasaran terpadu produk pinjaman Kupedes, KUR Mikro, Simpedes dan produk *e-banking* yang dilaksanakan di lebih dari 200 Kantor Cabang BRI dengan mengangkat tema *mobile banking* dan *internet-banking*.

Program Kerjasama dengan Mitra Retailer

BRI juga mengembangkan Bisnis Mikro melalui kerjasama dengan para mitra retailer yang potensial. Dalam program kerjasama ini, BRI menyediakan produk dan layanan simpanan maupun pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan para Mitra Retailer.

Simpedes Bikin Gampang

Merupakan program edukasi fitur dan fasilitas *e-banking*, seperti *SMS Banking*, *BRI mobile*, *Mocash*, kartu Simpedes dan *e-channel* (ATM dan EDC) untuk meningkatkan penggunaan Simpedes serta mengedukasi kepada nasabah bahwa Simpedes bisa digunakan untuk transaksi apa saja dan dimana saja dengan akurat.

Pasar Ramadhan Simpedes

Program promosi untuk meningkatkan *awareness* dan akuisisi Simpedes di pasar-pasar Ramadhan selama bulan Ramadhan yang didukung dengan Teras BRI Keliling.

7. *Microfinance International Cooperation*

MIC merupakan salah satu bentuk *global corporate social responsibility* BRI dalam rangka mengembangkan bisnis *microfinance* yang terdepan di dunia.

Melalui MIC, BRI konsisten menjalankan *Microfinance Training and Study Visit (MTSV)*, *business captures*, serta *technical assistance* di bidang *microfinance*. MIC BRI juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga *microfinance* dunia seperti Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA), Microfinance Network (MFN), Microcredit Summit, Banking With The Poor (BWTP), Woman World Banking, APEC, dan lainnya.

Sebagai bentuk keberhasilan BRI dalam merealisasikan misi pembangunan dan komersial usaha mikro, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan BRI sebagai laboratorium *microfinance* dunia.

Pada tahun 2013, sebagai salah satu praktisi terbaik dalam *microfinance* dan *micro banking* yang bergerak secara komersial di dunia, BRI untuk kesekian kalinya dilibatkan dalam rangkaian kegiatan Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) yang digelar di Bali Oktober 2013. Pada kesempatan tersebut BRI menyajikan presentasi pengembangan layanan *microfinance* kepada anggota delegasi APEC, demo layanan nasabah di BRI Unit dan Teras BRI serta mengorganisasikan kunjungan delegasi ke nasabah binaan Mikro BRI.

BRI sebelumnya juga menyelenggarakan berbagai pembelajaran tentang *microfinance* kepada delegasi Timur Tengah dalam program *international training program on microfinance for Palestine*. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BRI juga menyeleksi praktisi *microfinance* dari Palestina untuk magang dan belajar langsung praktek *microfinance* di Indonesia. Kegiatan kerjasama dengan Palestina ini merupakan realisasi kerjasama dengan New Asian-African Strategic Partnership (NAASP).

Tinjauan Bisnis

Mantri – Garda Terdepan Pengembangan Segmen Bisnis Mikro

Sukses BRI pada salah satu segmen bisnis unggulan – Bisnis Mikro –, tak lepas dari peran para Mantri (*Micro Loan Officer*) yang saat ini berjumlah 21.542 pekerja, tersebar di seluruh Unit Kerja Mikro BRI di seluruh pelosok Indonesia yang saat ini berjumlah 5.144 BRI Unit, 2.212 Teras BRI dan 465 Teras BRI Keliling. Dengan tanggung jawab pokoknya diantaranya meliputi kegiatan pemasaran baik produk pinjaman (Kupedes, KUR Mikro, Briguna) maupun produk Simpanan (Simpedes), penambahan jumlah nasabah baru baik pinjaman maupun simpanan, kualitas pinjaman (NPL) rekening pinjaman yang dikelola serta *fee based income* yang diperoleh, BRI secara konsisten membekali para mantri dengan proram pelatihan yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi.

BRI menerapkan program pelatihan dengan target peran "*financial bisnis advisor*" sebagai kompetensi dasar yang wajib dikuasai para calon mantri. BRI juga menekankan pendalaman dibidang integritas, melalui pelatihan pemahaman kode etik bisnis dan nilai-nilai budaya perusahaan.

Perekrutan Mantri dilakukan secara terbuka, dengan mayoritas *feeder* berasal dari Teller dan Customer Service Bisnis Mikro BRI. Untuk mendukung tercapainya kinerja optimal dari para mantri, BRI menerapkan mekanisme remunerasi berbasis kinerja yang terukur. Ukuran keberhasilan mantri didasarkan kepada pencapaian target individu sesuai *Key Performance Indicator* (KPI). Sebagai bentuk penghargaan terhadap pencapaian kinerja Mantri, selain melalui penghasilan tetap, perusahaan juga mengapresiasi pencapaian kinerja tersebut dengan memberikan bonus atau insentif.

Dengan pengelolaan mantri yang terstruktur tersebut, BRI berhasil menunjukkan kiprahnya, sebagai perbankan utama di segmen Mikro di Indonesia. BRI juga telah diakui sebagai salah satu perbankan utama di dunia dalam penyaluran kredit Mikro. Memperhatikan seluruh prestasi yang telah diraih dan dampak besar dari Bisnis Mikro terhadap kinerja bank secara keseluruhan, BRI bertekad terus mengembangkan Bisnis Mikro ini, termasuk meningkatkan kualitas para mantri melalui peningkatan kompetensi dan penerapan remunerasi berdasarkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bisnis Program

BRI mengembangkan bisnis program melalui optimalisasi jaringan infrastruktur yang telah ada, sehingga BRI terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu bank utama dalam penyaluran kredit program yang digulirkan Pemerintah, sebagai bagian dari program pembangunan perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang profesional dan *prudent*.

Produk yang menjadi unggulan di Bisnis Program pada intinya ada 3 jenis yakni Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Non Kemitraan, Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE).

Melalui penyaluran KPEN-RP Non Kemitraan, KKPE, dan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG), BRI menunjukkan dukungan terhadap program Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kredit KKPE ini telah banyak membantu petani, peternak, nelayan dan pembudidaya dalam meningkatkan produksi pertanian mereka.

Skema KKPE antara lain terdiri dari KKPE Tebu Rakyat, KKPE Tanaman Pangan, KKPE Tanaman Hortikultura, KKPE Pengadaan Pangan, KKPE Peternakan, KKPE Perikanan dan KKPE Alat Mesin Pertanian.

Tinjauan Bisnis

KKPE Tebu Rakyat merupakan Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha / Pabrik Gula (PG). Skema KKPE Tebu Rakyat ini telah menunjukkan hasil nyata berupa peningkatan substansial produksi tebu nasional karena naiknya pasokan tebu dari hasil pertanian rakyat.

Selain KKPE, produk lainnya yang disalurkan melalui Bisnis Program adalah KUR Ritel, yaitu pinjaman dengan plafond di atas Rp20 juta sampai dengan maksimum Rp500 juta, yang dijamin oleh Pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo. KUR Ritel diperuntukkan bagi pengusaha kecil yang memiliki bisnis yang *feasible* namun belum *bankable*.

Kinerja Bisnis Mikro dan Program

1. Pengembangan infrastruktur jaringan Mikro

Pada tahun 2013, BRI telah berhasil menambah 144 BRI Unit, 434 teras BRI dan 115 Teras BRI Keliling, sehingga total menjadi 5.144 BRI Unit, 2.212 Teras BRI dan 465 Teras BRI Keliling. Penambahan Teras BRI yang dimulai sejak tahun 2009 dan sebagian besar berlokasi di pasar tradisional menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung perekonomian mikro sekaligus meningkatkan outstanding pinjaman Kupedes dan KUR mikro.

2. Perkembangan Nasabah Mikro

Realisasi penambahan jaringan dan pekerja Mikro menunjukkan hasil nyata berupa naiknya jumlah nasabah peminjam Mikro secara signifikan. Pada tahun 2013, total nasabah peminjam Mikro bertambah signifikan sebesar 1,03 juta menjadi 6,5 juta nasabah.

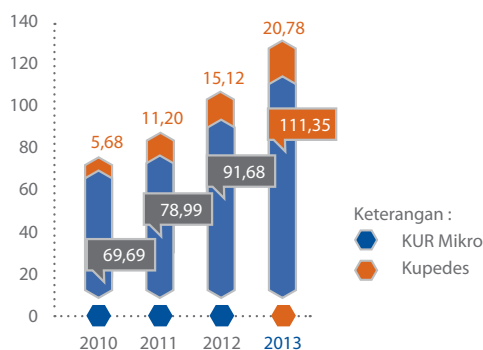
3. Pertumbuhan Outstanding Kredit Mikro

Ketahanan ekonomi domestik, penambahan dan peningkatan kualitas infrastruktur, penambahan SDM termasuk Mantri yang kompeten, serta pelaksanaan berbagai program pengembangan Bisnis Mikro membuat BRI mampu menangkap peluang pertumbuhan dengan baik dan membukukan peningkatan outstanding pinjaman mikro yang signifikan, yaitu naik 23,72% menjadi Rp132,13 triliun di akhir tahun 2013.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan pinjaman KUR Mikro sebesar 37,45% menjadi sebesar Rp20,8 triliun dan pinjaman Kupedes sebesar 21,46% menjadi sebesar Rp111,4 triliun.

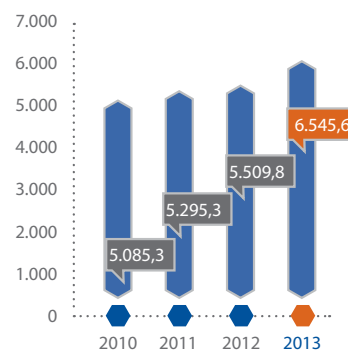
Perkembangan Outstanding Kredit Mikro

(Dalam Rp triliun)



Total Debitur Mikro

(Dalam Ribu)



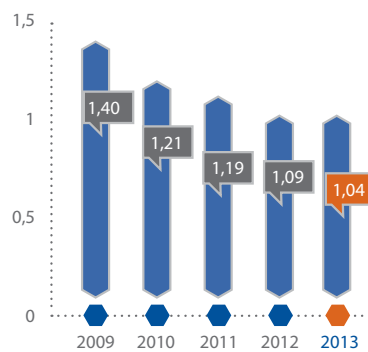
Tinjauan Bisnis

4. Kualitas Kredit Mikro

Program pengembangan organisasi, perbaikan sistem kerja berbasis TI, penambahan dan peningkatan kompetensi SDM, termasuk pengetahuan yang mendalam terhadap karakteristik nasabah mikro, membuat BRI mampu menjaga kualitas pinjaman Mikro yang ditunjukkan oleh rendahnya persentase NPL yakni 1,04% pada tahun 2013. Dalam 5 tahun terakhir, NPL pinjaman mikro berhasil di kelola pada level sangat rendah yaitu dibawah 1,50%.

NPL Pinjaman Mikro

(Dalam %)



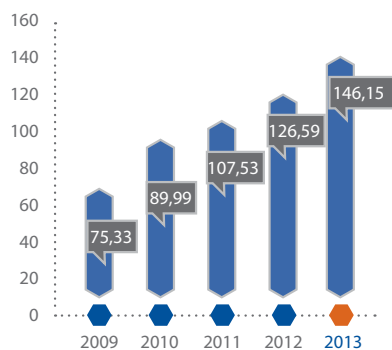
5. Perkembangan Simpanan Mikro

Keberhasilan penambahan nasabah Mikro BRI sejalan dengan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari nasabah Mikro. Selama tahun 2013 total dana pihak ketiga dari nasabah Mikro BRI berhasil ditingkatkan 15,45% menjadi sebesar Rp146,15 triliun. Pencapaian tersebut didukung oleh jaringan kerja Bisnis Mikro BRI yang terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia.

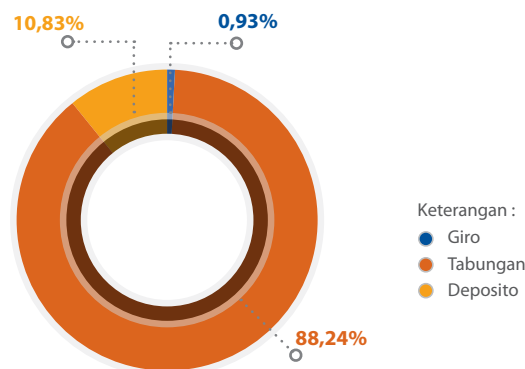
Produk tabungan yang merupakan sumber dana murah mendominasi komposisi dana pihak ketiga nasabah Mikro, yaitu 88,24% disusul dengan deposito 10,83% dan sisanya giro sebesar 0,93%. Dengan total perolehan dana pihak ketiga tersebut, maka Bisnis Mikro dapat mencukupi kebutuhan dana seluruh kegiatan penyaluran kredit mikro (*self funded business*).

Total Simpanan Mikro

(Dalam Rp Triliun)



Komposisi Simpanan Mikro



Keterangan :

- Giro
- Tabungan
- Deposito

6. Pencapaian Bisnis Program

Total outstanding kredit program yang disalurkan di tahun 2013 mencapai Rp10,13 triliun. Di tahun 2013, BRI telah menyalurkan kredit kepada lebih dari 25 ribu petani untuk meningkatkan produksi pertaniannya melalui KKPE, sehingga outstanding KKPE meningkat 16,59% dari Rp2,46 triliun menjadi sebesar Rp2,87 triliun.

Tinjauan Bisnis

Di samping itu, sampai dengan akhir tahun 2013, BRI telah menyalurkan KUR Ritel kepada lebih dari 45 ribu debitur yang terdiri atas pengusaha kecil dan koperasi, bertambah 8,7 ribu debitur dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan konsistensi komitmen BRI dalam mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor UMKM di Indonesia. Selama tahun 2013, outstanding KUR ritel naik 27,12% dari Rp5,4 triliun menjadi sebesar Rp6,9 triliun.

Profitabilitas Segmen Bisnis Mikro dan Program

Penyaluran kredit di segmen Mikro dan Program sepanjang tahun 2013 menyumbang pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp23,96 triliun, dan memberikan kontribusi *net profit* bagi BRI sebesar Rp10,06 triliun.

Strategi Pengembangan Bisnis Mikro dan Program 2014

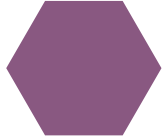
Bagi BRI, segmen Bisnis Mikro memiliki arti penting, yakni sebagai salah satu *entry point* utama dari tumbuh dan berkembangnya hubungan dan loyalitas jangka panjang dengan nasabah yang kelak akan dikembangkan menjadi nasabah komersial maupun nasabah korporasi sejalan dengan pertumbuhan usaha para nasabah Mikro. Oleh karenanya, BRI bertekad untuk terus memperkuat basis pertumbuhan Bisnis Mikro.

Untuk mempercepat pertumbuhan Bisnis Mikro, maka BRI meningkatkan intensitas pembentukan kluster-kluster usaha yang merupakan potensi pasar untuk produk dan jasa Mikro. Upaya tersebut dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Kantor Pusat akan konsisten mendukung upaya pengembangan Bisnis Mikro ini dengan membina hubungan baik dengan lembaga, instansi,

atau pihak ketiga di tingkat pusat untuk membuka dan memudahkan penetrasi pasar oleh unit kerja di daerah. Strategi pengembangan Bisnis Mikro yang akan dijalankan ditahun 2014 mencakup:

1. Pengembangan Pasar
 - a. Akuisisi nasabah baru melalui optimalisasi *trickle down business* dari segmen lain.
 - b. Mengembangkan *strategic alliance* dalam rangka pemasaran maupun pengembangan bisnis Mikro
2. Penetrasi Pasar
 - a. Meningkatkan *cross selling* dari nasabah *existing*.
 - b. Melakukan program-program pemasaran sesuai dengan profil calon nasabah, sekaligus mempertahankan nasabah *existing*.
 - c. Melakukan *marketing communication* terkait produk mikro secara optimal.
 - d. Mengembangkan *community banking* sebagai konsep pengembangan bisnis mikro
3. Pengembangan fitur produk Bisnis Mikro yang cocok untuk nasabah Mikro, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, BRI juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan melakukan penyederhanaan prosedur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
4. Pengembangan Faktor Pendukung
 - a. Mengembangkan SDM Mikro, baik secara kualitas maupun kuantitas
 - b. Mengembangkan sistem pelaporan untuk mempermudah monitoring kinerja Bisnis Mikro
 - c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas TI dalam mendukung operasional Bisnis mikro
 - d. Meningkatkan kinerja *e-channel* untuk mendukung tercapainya peningkatan *Fee Based Income* (FBI) Bisnis Mikro.
 - e. Melakukan evaluasi dan monitoring yang komprehensif dan berjenjang, serta pembinaan yang kontinyu untuk menjaga kinerja bisnis mikro.
5. Rencana Aksi. Dalam rangka memastikan keberhasilan strategi pengembangan bisnis mikro tersebut, BRI telah mempersiapkan beberapa rencana aksi, mencakup:
 - a. Perluasan jaringan untuk memperkokoh basis nasabah dengan menambah BRI Unit, Teras BRI, Teras BRI Keliling dan merintis pengembangan Teras BRI Kapal untuk menjangkau wilayah dengan infrastruktur transportasi darat yang minim.
 - b. Pengembangan konsep *branchless banking* mikro.

Tinjauan Bisnis



Bisnis Ritel dan Menengah



“

Ekspansi kredit Segmen Ritel dan Menengah bertumpu pada pemberian Kredit Investasi (KI) maupun Kredit Modal Kerja (KMK), kredit konsumtif dengan produk unggulan Briguna, serta Kredit Perumahan (KPR), untuk segmen Kecil dan Menengah.

”

Tinjauan Bisnis

Ringkasan :

1. Setelah periode konsolidasi, di tahun 2013, BRI merealisasikan berbagai program untuk mengembangkan segmen ritel dan menengah.
2. Ekspansi kredit Segmen Ritel dan Menengah bertumpu pada pemberian Kredit Investasi (KI) maupun Kredit Modal Kerja (KMK), kredit konsumtif dengan produk unggulan Briguna, Kredit Perumahan (KPR), untuk segmen Kecil dan Menengah.
3. Total Kredit Ritel dan Menengah meningkat 22,58% menjadi sebesar Rp178,16 triliun.
4. Penghimpunan dana ritel dilakukan melalui produk tabungan Britama yang tumbuh 12,94% menjadi Rp79,41 triliun
5. Bisnis Ritel kini didukung oleh jaringan ATM terbesar dan tersebar di Indonesia dengan lebih dari 18.292 ATM BRI

Secara umum segmen Bisnis Ritel BRI meliputi penyaluran kredit ritel komersial dan menengah untuk membiayai Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penyaluran kredit konsumen, penghimpunan dana pihak ketiga ritel, serta bisnis konsumen lainnya.

Pinjaman

Total outstanding Kredit Ritel dan Menengah di tahun 2013 mencapai Rp178,16 triliun atau 41,37% dari total kredit BRI.

Kredit Ritel Komersial dan Menengah

BRI menyalurkan Kredit Ritel dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi pelaku bisnis usaha kecil dan menengah, baik berupa Kredit Modal Kerja

maupun Kredit Investasi. Penyaluran pinjaman tersebut dilakukan melalui 453 Kantor Cabang dan 565 Kantor Cabang Pembantu dibawah koordinasi 18 Kantor Wilayah.

Pengembangan Kredit Ritel Komersial dan Menengah di tahun 2013

Di tahun 2013 ditengah dinamika perekonomian global maupun lokal, BRI mengembangkan Kredit Ritel Komersial dan Menengah dengan tetap melaksanakan program perbaikan kualitas kredit mencakup:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi portofolio kredit secara komprehensif, baik *onsite* maupun *offsite*, disertai dengan pembinaan ke unit kerja operasional.
2. Pemberian solusi yang meliputi petunjuk teknis penyelesaian permasalahan yang menyangkut operasional, pelaksanaan monitoring otomatis, kelancaran angsuran nasabah, kriteria pelaksanaan restrukturisasi kredit, dan permasalahan lain yang dihadapi oleh unit kerja.
3. Peningkatan pengetahuan pengelolaan risiko kredit pada seluruh jajaran Divisi Bisnis Ritel dan Menengah.
4. Penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur menyangkut proses pengajuan, monitoring dan penyelesaian nasabah dalam perhatian khusus.

Selain program peningkatan kualitas kredit tersebut, selama tahun 2013 BRI juga merealisasikan berbagai program untuk mengembangkan Segmen Bisnis Ritel dan Menengah yang mencakup:

1. Evaluasi dan penetapan target penjualan Kredit Ritel dan Menengah untuk meningkatkan *outstanding* dan ekspansi Bisnis Ritel dan Menengah dengan memperhatikan faktor potensi wilayah, dan sektor ekonomi.
2. Pelaksanaan program pemasaran *member get member*.
3. Program *trickle down business*, yakni pemasaran ditujukan terhadap suplier dan distributor dari perusahaan-perusahaan BUMN dan Korporasi bonafid yang telah menjadi nasabah BRI.
4. Pelaksanaan kegiatan *cross-selling* produk BRI lainnya kepada nasabah *existing* untuk meningkatkan pendapatan.

Kinerja Kredit Ritel Komersial dan Menengah di tahun 2013

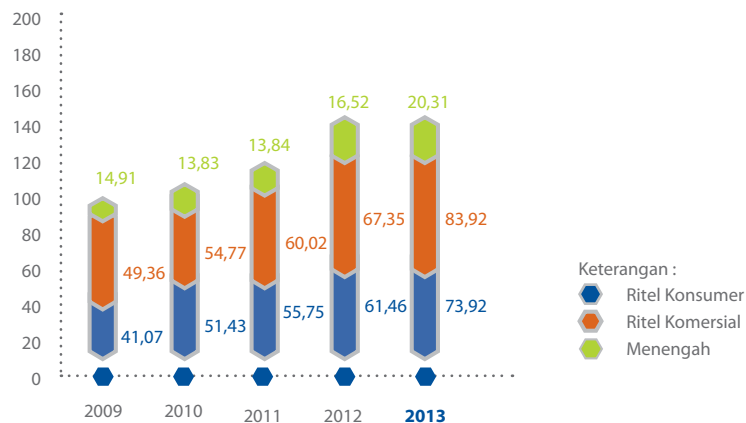
1. Kredit Ritel Komersial
Di tahun 2013, portofolio KMK dan KI dengan plafond antara Rp100 juta sampai dengan Rp5 miliar menunjukkan peningkatan. Sekalipun kondisi perekonomian domestik terpengaruh oleh kondisi perekonomian global yang belum kondusif, BRI berhasil mengatasi tantangan dan mendapatkan lebih dari 27 ribu debitur baru, sehingga total *outstanding* Kredit Ritel Komersial naik 24,60% dari Rp67,35 triliun menjadi sebesar Rp83,92.

Tinjauan Bisnis

- Kredit Menengah
KI maupun KMK yang termasuk ke dalam Kredit Menengah adalah kredit dengan besar pinjaman lebih besar dari Rp5 miliar sampai dengan Rp50 miliar. Pada tahun 2013 outstanding pinjaman segmen menengah ini tumbuh 22,90% dari Rp16,52 triliun menjadi sebesar Rp20,31 triliun.
- Konsistensi dalam monitoring dan pengelolaan kredit yang *prudent* menghasilkan perbaikan kualitas kredit yang cukup signifikan. Pada akhir tahun 2013, BRI berhasil memperbaiki NPL untuk segmen Ritel Komersial dan Menengah masing-masing menjadi sebesar 3,13% dan 4,38%.

Perkembangan Outstanding Pinjaman Segmen Ritel dan Menengah

(Dalam Rp Triliun)



Kredit Konsumer

Sampai saat ini, Kredit Konsumer BRI masih didominasi oleh Briguna (Kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, Karyawan dan Pensiunan) dengan proporsi sekitar 80%. Namun BRI juga memiliki Produk Kredit Konsumer lainnya seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kartu Kredit.

Proses pemberian Kredit Konsumer pada dasarnya mengacu pada pendapatan calon nasabah yang dibuktikan dengan *statement* pendapatan dari tempat bekerja, atau pendapatan usahanya untuk pengusaha, disertai dengan penilaian yang memadai atas jaminan dari kredit yang diberikan. Oleh karenanya, pertumbuhan kredit konsumer sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian secara umum seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan perekonomian.

Produk-Produk Kredit Konsumer

Briguna

Briguna merupakan produk unggulan kredit konsumer BRI, yang ditujukan bagi karyawan dan pensiunan dengan penghasilan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan nasabah baik konsumtif maupun produktif. Jaringan kerja BRI yang tersebar dan terbesar merupakan salah satu keunggulan kompetitif BRI dalam menggarap segmen ini.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

KPR BRI dengan berbagai kemudahannya diharapkan semakin memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal. Saat ini, BRI telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 400 proyek perumahan di seluruh Indonesia. Selain itu, KPR BRI juga menawarkan berbagai kemudahan diantaranya adalah jangka waktu kredit yang *flexible*, suku bunga sangat kompetitif, dokumen kepemilikan yang terjamin aman dan kemudahan lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi calon debitur.

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS)

KPRS merupakan skema kredit dari pemerintah yaitu KPR dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal ini BRI bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Sumber daya pembiayaan KPRS ini merupakan *blended fund* antara BRI dan Pemerintah/Kemenpera sehingga suku bunga yang ditawarkan cukup rendah dan *fixed* selama jangka waktu kredit.

Tinjauan Bisnis

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

KKB BRI diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor. Program kerjasama yang telah dilakukan antara lain dengan beberapa Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), *dealer*, maupun *multifinance* menjadikan KKB BRI mampu memberi layanan terbaik dengan suku bunga yang sangat terjangkau. KKB BRI juga menyediakan fitur tanpa *down payment*, yaitu produk *bundling* antara KKB dengan produk simpanan BRI.

Pengembangan Kredit Konsumer di Tahun 2013

Sebagaimana diketahui perekonomian global dan Indonesia selama tahun 2013 kurang kondusif akibat melemahnya perekonomian negara-negara maju sejak beberapa tahun terakhir. Akibat kondisi tersebut, pertumbuhan perekonomian Indonesia melambat dari prediksi awal sebesar 6,3% menjadi 5,78%. Disamping itu pemerintah juga menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) sehingga turut mempengaruhi daya beli masyarakat.

Kondisi ekonomi tersebut telah mendorong naiknya tingkat inflasi dan pelemahan kurs rupiah, sehingga BI meningkatkan suku bunga acuan dan menaikkan persyaratan tanda jadi pembelian kredit konsumsi kendaraan maupun perumahan, yang pada akhirnya mempengaruhi permintaan kredit, khususnya untuk produk KPR dan KPA.

Untuk memastikan pencapaian target segmen bisnis Kredit Konsumer, BRI menerapkan strategi umum di tahun 2013 yakni:

1. Memantapkan implementasi Proses Bisnis *Monoline* di Unit Kerja layanan Kredit Konsumer di seluruh Indonesia yang telah dimulai sejak Juli 2012. Melalui implementasi *monoline* ini, BRI memiliki unit kerja yang fokus dalam melayani Kredit Konsumer, yaitu 13 Sentra

Kredit Konsumer (SKK) dan 45 Kanca Kredit Konsumer (KKK) sebagai *delivery channel* utama dan didukung juga *delivery channel* lainnya yaitu 391 Kanca *Referral*. Proses implementasi ini disesuaikan dengan potensi bisnis konsumer yang terdapat di masing-masing wilayah.

2. Pengembangan berkelanjutan terhadap inovasi dan fitur Briguna.
3. Peningkatan standar layanan dengan tetap memperhatikan Manajemen Risiko yang *prudent*. Dalam hal ini BRI melakukan pembenahan dan penyempurnaan teknologi untuk memastikan *Service Level Agreement* (SLA) yang memuaskan. Strategi ini diterapkan pada produk Briguna kerjasama, dengan implementasi permohonan pinjaman secara *online* dan pengembangan layanan pengelolaan pembayaran angsuran.
4. Menerapkan *Consumer Loan Approval System* (CLAS) untuk mendukung kecepatan proses kredit.
5. Memasarkan Kredit Konsumer BRI dengan suku bunga yang sangat bersaing.
6. Mengarahkan *brand* Kredit Konsumer BRI pada kecepatan layanan sehingga *positioning* kredit konsumer BRI makin kuat di masyarakat. Sebagai bagian dari strategi pembentukan *brand image* dan peningkatan *awareness*, BRI melakukan promosi di berbagai media dan ikut aktif dalam berbagai pameran berskala nasional maupun internasional.
7. Kerjasama dengan Mitra Usaha. BRI terus menjalin kemitraan dengan sejumlah *developer* besar untuk menyalurkan KPR dan KPA melalui Program Pemasaran Bersama/*Joint Promo*, serta merangkul ATPM kendaraan bermotor untuk mendukung penyaluran KKB. BRI juga menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan *multifinance* melalui produk KKB Kerjasama.

Kinerja Kredit Konsumer di Tahun 2013

1. Secara keseluruhan, *outstanding* Kredit Konsumer pada tahun 2013 meningkat 20,29% menjadi sebesar Rp73,92 triliun dari posisi Rp61,46 triliun di tahun 2012. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan Briguna sebesar 17,46% menjadi Rp57,55 triliun dari Rp48,9 triliun ditahun 2012.
2. Ekspansi Kredit Konsumer dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjaga kualitas kredit. Proses monitoring dan seleksi nasabah yang *prudent* membuat NPL kredit konsumer di tahun 2013 relatif rendah yakni sebesar 1,40%.

Kartu Kredit

Kartu Kredit BRI diluncurkan sejak tahun 2006 dan diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi. Hingga saat ini, BRI telah memiliki beberapa jenis Kartu Kredit diantaranya: Kartu Kredit BRI *Standard, Gold, Platinum, Corporate, Business*, dan *Co-Branding*.

Pengembangan Bisnis Kartu Kredit di Tahun 2013

Sepanjang tahun 2013, BRI telah mengimplementasikan sejumlah strategi terkait pengembangan dan pemasaran kartu kredit, diantaranya:

1. Peningkatan kerja sama dengan merchant kartu kredit MasterCard untuk jenis Kartu Kredit *Standard, Gold, Platinum, Business*, dan *Corporate*, serta kerjasama dengan Visa *Worldwide* untuk Kartu Kredit BRI Touch.
2. Melakukan *integrated promotion*
3. Meningkatkan *cross-selling* produk BRI lainnya.
4. Menambah jangkauan pemasaran ke kota-kota *second* dan *third tier*.
5. Pengembangan Produk/fitur, yakni menerbitkan Kartu Kredit *Co-Brand*, menyempurnakan beberapa fiturnya seperti *Electronic Statement*

Tinjauan Bisnis

- (e-statement), EDC *Redemption* BRI Point, dan Fitur Cicilan di EDC.
- Menitikberatkan strategi pemasaran pada akuisisi nasabah BRI, yakni pemasaran dan edukasi kepada kantor cabang BRI dalam memberikan layanan dan fasilitas Kartu Kredit BRI.
 - Menjaga kualitas aset dengan pengembangan infrastruktur *collection*, membentuk tim penagihan dan *collection recovery* di Unit Kerja Operasional.
 - Pengembangan dan otomasi sebagian proses aplikasi kartu kredit untuk mempercepat proses putusan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Strategi pengembangan tersebut ditunjang oleh reputasi dan kepercayaan dari para pemegang kartu kredit yang tinggi, sumber daya pendukung yang handal seperti *platform* TI yang tepat, sumber pendanaan yang murah, jaringan kerja yang luas mencakup seluruh pelosok Indonesia, basis nasabah yang besar dan tersebar luas serta dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Kinerja Kartu Kredit di Tahun 2013

Kinerja bisnis kartu kredit BRI terus menunjukkan peningkatan sebagaimana tampak pada naiknya jumlah kartu baru, volume transaksi dan *fee based income*. Pada akhir tahun 2013, BRI berhasil menerbitkan 666.027 kartu, naik 23,63% dari 538.729 kartu di tahun 2012. Sedangkan *sales volume* naik 25,50% dengan nilai mencapai Rp2,99 triliun dari sebelumnya sebesar Rp2,39 triliun. Selain itu, hingga tahun 2013 BRI berhasil menambah jumlah EDC *merchant* menjadi 55.206 EDC, dengan *total volume* penjualan mencapai Rp5,7 triliun.

Simpanan

BRI menyediakan beragam produk simpanan yang memberi kemudahan bagi nasabah untuk menempatkan dananya dengan aman disertai layanan yang berstandar tinggi. Untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk simpanan, BRI mengagendakan kegiatan pemasaran terpadu. Pada beberapa produk simpanan tertentu, BRI bahkan memberikan program promosi secara berkala dengan hadiah yang menarik. Produk-produk simpanan BRI yang utama adalah sebagai berikut.

Produk Produk Simpanan BritAma

BritAma merupakan produk tabungan unggulan untuk merebut pasar dana pihak ketiga, terutama di perkotaan. BritAma ditujukan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi perbankan, serta tersedia dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing.

BRI juga memiliki varian produk tabungan lain yang telah disesuaikan fitur produknya sesuai kebutuhan nasabah, seperti BritAma Valas, BritAma Bisnis dan BritAma Rencana.

Produk tabungan ini dilengkapi berbagai fitur yang menarik yang menawarkan kemudahan bertransaksi melalui ATM dan EDC yang dapat dilakukan dari seluruh penjuru dunia, serta didukung oleh layanan 24 jam dari Internet Banking dan Mobile Banking. Selain itu, tabungan ini juga didukung oleh 9.808 unit kerja BRI, CDM BRI dan Kiosk BRI di seluruh Indonesia.

Dalam rangka menerapkan strategi penghimpunan dana dan meningkatkan rata-rata saldo tabungan, BRI menyelenggarakan Program Undian Berhadiah Untung Beliung BritAma (UBB), sebuah program *customer retention/loyalty* dan *acquisition* Tabungan BRI BritAma. Program UBB ini telah

dilaksanakan sebanyak 6 (enam) periode sejak tahun 2007 dan telah berhasil meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk Tabungan BRI BritAma.

Tabungan BRI Junio

Tabungan BRI Junio adalah tabungan yang memiliki target pasar khusus anak-anak dan remaja dengan usia 17 tahun ke bawah. Tujuan dari tabungan ini adalah untuk memperkenalkan perbankan sejak dini dan menanamkan rasa gemar menabung kepada anak. Tabungan BRI Junio sangat menarik karena menggunakan Kartu Debet *Private Label Limited Edition* bergambar karakter tokoh idola anak-anak, antara lain Superman, Tweety dan Tom and Jerry.

GiroBRI

GiroBRI adalah salah satu produk BRI untuk menarik sumber dana murah dari masyarakat. GiroBRI tersedia dalam berbagai pilihan jenis mata uang, baik Rupiah maupun mata uang asing serta dilengkapi dengan fasilitas BRI Virtual Account (BRIVA) dan kartu debit yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam penyetoran, monitoring dan rekonsiliasi transaksi bisnisnya.

DepoBRI

DepoBRI adalah *brand* Deposito BRI, yang merupakan simpanan berjangka dengan jangka waktu mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan dan suku bunga yang kompetitif.

Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah produk tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan Ibadah Haji. Produk ini akan membantu nasabah dalam mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), baik biasa maupun khusus (Haji Plus). Penyetoran dapat dilakukan secara *online* di seluruh unit kerja BRI melalui koneksi langsung (*host to host*) dengan Siskohat Kementerian Agama.

Tinjauan Bisnis

Tabunganku

Produk Tabunganku merupakan salah satu bagian dari program Bank Indonesia dalam mengimplementasikan Gerakan Indonesia Menabung. Produk ini ditujukan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia dalam rangka menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa keunggulan Tabunganku adalah bebas biaya administrasi dan setoran awal yang terjangkau.

Kinerja Simpanan di Tahun 2013

Pada tahun 2013, produk-produk simpanan Ritel berhasil menghimpun dana pihak ketiga menjadi sebesar Rp167,81 triliun. Selain berhasil meningkatkan perolehan dana pihak ketiga melalui layanan produk simpanan, BRI juga berhasil memperoleh sejumlah pengakuan dari pihak eksternal, diantaranya pada tahun 2013, BRI meraih Top Brand Index dari Majalah Marketing untuk kategori Tabungan BRI Junio dan berdasarkan hasil survey dari Mark Plus Insight, BRI memperoleh penghargaan Indonesian Brand Champion Award 2013 (Gold) kategori *Most Popular Brand in Conventional Banking*. Selain itu, BRI berada pada peringkat pertama dalam Indonesia Middle Class & Consumer Finance Survey 2013 untuk kategori Tabungan dan Deposito.

e-channel

Dalam mendukung penggalangan dana murah Ritel dan meningkatkan daya saing produk dan layanan perbankan, BRI secara konsisten mengembangkan jaringan elektronik terpadu (*e-Channel*) dengan dukungan teknologi terkini. Pengembangan infrastruktur jaringan *e-Channel* dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan faktor keamanan informasi. (Lihat juga bahasan "Pengembangan Sistem Teknologi Informasi").

Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen BRI dalam memberi kemudahan akses para nasabahnya, setiap tahun BRI melakukan penambahan infrastruktur pada jaringan *e-Channel* yang terdiri dari gerai ATM, Kiosk, CDM, EDC dan e-Buzz, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel Pengembangan E-Channel					
E-Channel	2009	2010	2011	2012	2013
ATM	3.778	6.085	7.292	14.292	18.292
EDC	6.398	12.719	31.590	44.715	85.936
CDM	22	39	89	92	192
Kiosk	60	96	100	100	100
E-Buzz	1	2	19	42	50
Total	10.259	18.941	39.090	59.241	104.570

Untuk mengoptimalkan basis nasabah yang terbesar di Indonesia, BRI akan mengembangkan *e-channel* baik berupa ATM, EDC, Kiosk maupun CDM. Ada tiga hal utama yang akan dicapai dalam pengembangan *e-channel*, pertama meningkatkan akses layanan nasabah, meningkatkan *fee-based income*, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Di tahun 2013, BRI telah meluncurkan BRI *e-banking Hybrid Lounge*, layanan *self service banking* berupa Mesin Hybrid yang menyatukan fungsi ATM, CDM, EDC dan *Internet Banking*, sebagai bentuk komitmen peningkatan layanan berbasis TI kepada para nasabah setianya. Layanan yang tersedia dari fungsi ini sangat beragam, meliputi pembukaan rekening tabungan BritAma cukup menggunakan nomor e-KTP sebagai sumber informasi data nasabah, pembukaan rekening giro, deposito, aplikasi kartu kredit dan aplikasi layanan BRI prioritas.

Layanan BRI Prioritas

Untuk meningkatkan *awareness* dan *loyalty* nasabah, BRI Prioritas menggunakan *brand association* berupa *intellectual*, *lifestyle* dan *heritage*. BRI Prioritas menawarkan layanan jasa perbankan yang eksklusif kepada Nasabah BRI, terutama kalangan *mass affluent* dan *high net worth individual*. Layanan ini meliputi jasa perbankan pada umumnya, jasa konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, asuransi (*bancassurance*) serta perencanaan pensiun.

Tinjauan Bisnis

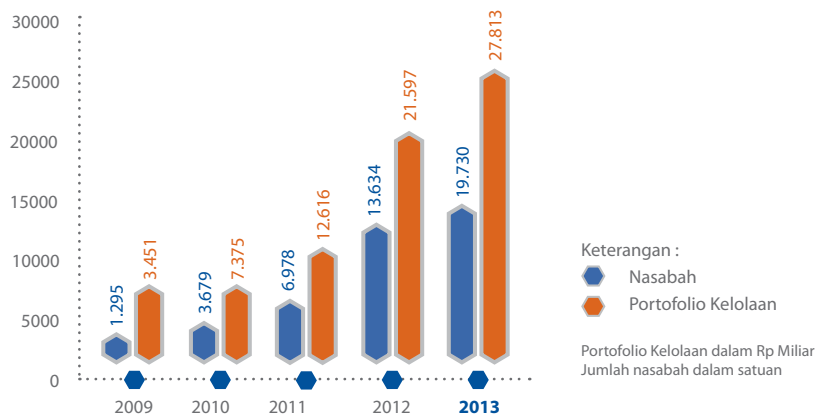
Dalam memberikan layanan untuk segmen Prioritas, BRI telah mempunyai *priority lounge* yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Sentra Layanan Prioritas (SLP) BRI dirancang dengan standar ruangan yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan, sehingga nasabah akan merasa lebih nyaman dalam bertransaksi.

Organisasi SLP dibangun dengan konsep pengawasan berjenjang (*built in control*) dan dikelola secara profesional oleh para *Priority Banking Assistant* (PBA), *Priority Banking Officer* (PBO) dan *Priority Banking Manager* (PBM) yang berpengalaman dan bersertifikasi, sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh regulator. Standar tersebut antara lain sertifikasi WAPERD untuk agen penjualan Reksa Dana, Sertifikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) untuk penjualan *Bancassurance* (Unit Link), serta Sertifikasi Pelatihan *Wealth Management*.

BRI Prioritas memberikan layanan khusus yang sangat bersaing antara lain, pelayanan personal dari PBO, layanan pengantaran dan penjemputan uang untuk nominal tertentu, layanan transaksi melalui telepon, ruangan khusus untuk bertransaksi, fasilitas *business & private mini lounge*, *internet & e-banking corner*, *free meeting room*, tempat parkir khusus, serta layanan Call Center 24 Jam.

Kinerja BRI Prioritas di Tahun 2013

BRI Prioritas berhasil membukukan penambahan jumlah nasabah dan portofolio kelolaan dalam beberapa tahun terakhir, seperti tampak pada grafik berikut:



Profitabilitas Segmen Ritel

Keseluruhan jasa dan layanan di segmen ritel tersebut telah berhasil memberikan pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp20,76 triliun dan menyumbang kontribusi *net profit* bagi BRI sebesar Rp8,64 triliun ditahun 2013.

Strategi Pengembangan Bisnis Ritel dan Menengah 2014

Kredit Ritel Komersial dan Menengah

BRI telah mempersiapkan serangkaian program untuk meningkatkan akselerasi pencapaian target Kredit Ritel dan Menengah di tahun 2014, yang mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. *Market development*
Melakukan kerjasama dengan institusi pemerintah atau BUMN dan perusahaan swasta yang bonafide melalui sosialisasi produk, *business linkage* dan perluasan jaringan bisnis.
2. *Market penetration (existing market and product)*
Melakukan kegiatan pemasaran yang lebih aktif kepada mitra BUMN melalui pembentukan aliansi strategis dalam rangka pelaksanaan *Closed System Financing* dan menumbuhkan *Trickle Down Business* serta meningkatkan *cross selling*.

Tinjauan Bisnis

3. *Product Development*
Inovasi skema produk Ritel dan Menengah dengan melakukan *benchmark product* dan pemetaan potensi pasar. Selain itu BRI juga melakukan pengembangan fitur produk yang berbasis TI.
4. Perbaikan Proses Kredit dan Peningkatan Kualitas layanan.
Mencakup perbaikan proses bisnis, sosialisasi kebijakan dan prosedur di tingkat Kantor Wilayah, Kantor Cabang, maupun Kantor Cabang Pembantu, penyempurnaan pedoman kredit, evaluasi pemberian wewenang putusan kredit, serta *review Service Level Agreement (SLA)* dan standar layanan kredit dengan melakukan *benchmark* dengan bank lain.
5. Pengembangan SDM
Pengembangan kompetensi melalui pelatihan terstruktur, termasuk kompetensi Pekerja Kredit Lini (PKL) di bidang *selling skill*, pelayanan dan analisis kredit disertai perbaikan metode penilaian kinerja serta pemberian kompensasi berbasis kinerja berdasarkan volume dan kualitas portofolio.
6. Pengembangan Sarana Pendukung
Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran produk-produk baru, monitoring kredit, serta akses informasi produk.

Kredit Konsumer

1. Penyempurnaan organisasi dan proses bisnis yang telah diimplementasikan di beberapa kota utama melalui pelaksanaan review efektifitas penerapan Proses Bisnis Monoline di 13 SKK dan 45 KKK untuk potensi perluasan di 14 kota besar di Indonesia.
2. Peningkatan *Service Level Agreement (SLA)* melalui pembangunan beberapa Regional Processing Center (RPC) dan implementasi sistem yang terintegrasi.
3. Ekspansi kredit yang berkualitas melalui pembangunan Regional Sales Center (RSC) dan Collection Center. Menerapkan strategi *Collection* yang meliputi optimalisasi fungsi collection, pelatihan berkelanjutan bagi SDM, dan penyempurnaan *Complain Handling System* untuk menjaga kualitas kredit.
4. Pengembangan fitur produk baik KPR, KPRS maupun KKB secara berkesinambungan.
5. Strategi penjualan dengan memanfaatkan *database* nasabah, pihak ketiga (*dealer* atau *developer*), *walk in customer* maupun *implant banking* melalui program *Home Ownership Program (HOP)* dan *Car Ownership Program (COP)* dengan beberapa perusahaan besar dalam rangka mendapatkan *trickle down business*.
6. Kerja sama dengan rekanan dengan tujuan *upgrading* rekening *escrow* sehingga meningkatkan potensi *cross selling* produk BRI lainnya.
7. Menerapkan strategi pemasaran yang lebih spesifik di masing-masing wilayah.
8. Optimalisasi sistem pembayaran melalui *e-channel* BRI.
9. Peningkatan kegiatan pemasaran Kartu Kredit
10. Peningkatan kerjasama Bisnis Kartu Kredit dengan *merchant* BRI
11. Inovasi dan pengembangan produk Kartu Kredit BRI.

Simpanan

1. Fokus pada peningkatan pangsa pasar dana di area perkotaan.
2. Memperluas dan meningkatkan jumlah *delivery channel*, khususnya *e-channel*.
3. Inovasi produk simpanan dan *e-banking* yang menarik serta program pemasaran yang kreatif, meliputi program akuisisi, retensi dan loyaliti.

Layanan BRI Prioritas

1. Fokus pada upaya pengembangan produk dan peningkatan kualitas layanan.
2. Bekerjasama dengan *brand* lain yang sesuai dan terkemuka
3. Melaksanakan program pemasaran yang meliputi akuisisi, retensi, dan *loyalty*
4. Menambah Sentra Layanan Prioritas dan *Priority Lounge* di sejumlah kota besar di Indonesia.

Tinjauan Bisnis

Bisnis BUMN dan Korporasi



“ Fokus pengembangan Bisnis BUMN dan Korporasi pada sektor yang mampu memberi peluang *cross selling*, *trickle down business* dan memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri, telah memberi hasil nyata berupa naiknya portofolio UMKM hasil sinergi hingga 158,46% “

Tinjauan Bisnis

Ringkasan :

1. Pengembangan Bisnis BUMN dan Korporasi difokuskan pada usaha yang memberikan peluang *cross-selling* untuk pengembangan segmen bisnis lainnya serta peningkatan *fee based income*, khususnya di segmen MKM dalam bentuk *trickle down business*.
2. *Total outstanding* Kredit Korporasi di tahun 2013 mencapai Rp47,75 triliun dengan NPL terjaga sebesar 0,87% sedangkan *total outstanding* Kredit BUMN mencapai Rp62,47 triliun dengan NPL 0,00%

Segmen Bisnis BUMN dan Korporasi saat ini berkembang menjadi segmen yang menunjang ekspansi bisnis BRI. Strategi pengembangan bisnis ini ke depannya ditujukan untuk meningkatkan *competitive positioning*, terutama untuk kredit yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung pengembangan perekonomian nasional dengan potensi *trickle down business* yang luas terhadap segmen UMKM yang menjadi fokus bisnis BRI.

Dari segmen inilah BRI menargetkan terjadinya *cross-selling* kepada segmen bisnis lainnya melalui pengembangan ragam jenis layanan jasa perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, sinergi yang terbentuk juga akan mendukung terjadinya peningkatan *fee based income*.

Untuk mengoptimalkan potensi di segmen ini, BRI menjalankan strategi pengembangan dengan fokus pada target pemasaran, yaitu perusahaan

yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional dengan cara *integrated marketing*, *product bundling* dan *cross selling* sehingga tercipta "*one stop financial services*" yang memberikan *integrated banking solution* bagi nasabah korporasi.

Untuk mendukung pencapaian strategi tersebut, BRI senantiasa memperbaiki dan mengembangkan layanan jasa perbankan, kualitas layanan, fitur produk, maupun kompetensi SDM. Adapun fasilitas layanan perbankan untuk segmen korporasi dan BUMN ini diantaranya mencakup, pemberian fasilitas kredit dengan skema khusus, *cash management*, pemberian fasilitas kredit kepada *vendor*, sub-kontraktor, suplier, distributor, mitra binaan, serta kredit konsumen kepada karyawan yang bekerja di perusahaan BUMN tersebut. Selain itu, BRI juga mengembangkan layanan perbankan lainnya, seperti: *Host-to-Host*, *One Gate Payment*, Pembayaran Tagihan dan Briva (BRI Virtual Account).

Bisnis BUMN

Penyaluran kredit BUMN di tahun 2013 tercatat mencapai Rp62,47 triliun dengan komposisi dua sektor terbesar bersumber dari agribisnis dan infrastruktur. Strategi yang dijalankan BRI hingga penyaluran kredit dapat tercapai di tahun 2013 ini di antaranya adalah dengan program retensi nasabah BUMN *existing*, program akuisisi nasabah lama yang sedang menikmati fasilitas di bank lain, serta program akuisisi nasabah BUMN dan anak perusahaan BUMN baru.

Bisnis Korporasi

Segmen Bisnis Korporasi BRI disalurkan berdasarkan sektor bisnis dan potensi *trickle down business*, yang terbagi ke dalam dua sektor utama yaitu Agribisnis dan Bisnis Umum (Non Agribisnis).

Agribisnis

Produk utama di sektor Agribisnis adalah fasilitas Kredit Agribisnis. Fasilitas ini diberikan kepada individu atau perusahaan yang bergerak di bidang pertanian untuk mendukung pembiayaan di sektor pertanian yang bersifat *on-farm* maupun *off-farm* dari hulu sampai hilir. Sektor pembiayaan *on-farm* meliputi usaha atau kegiatan budidaya pertanian termasuk perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Sektor pembiayaan *off-farm* meliputi usaha atau industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian seperti kegiatan pembibitan, agrokimia, pestisida, alat mesin pertanian dan pakan ternak.

Sasaran utama pengembangan kredit agribisnis adalah pembiayaan ke komoditi ekspor yang memiliki *competitive advantage* dan agribisnis yang memiliki *multiplier effect* kepada UMKM melalui penciptaan *one stop services*, *closed system financing* dan *risk adjusting mechanism* serta peningkatan kualitas *account officer* sebagai *professional business advisor*.

Tinjauan Bisnis

Bisnis Umum (Non Agribisnis)

Di sektor Bisnis Umum, kredit merupakan produk utama yang ditujukan untuk pengembangan usaha segmen korporasi diluar sektor agribisnis dan BUMN. Pengembangan bisnis dilakukan secara prudent dengan memanfaatkan jaringan kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia dan dengan optimalisasi produk-produk *treasury* maupun produk Bisnis Internasional BRI yang lengkap, sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan bunga dan *fee based income* BRI.

Pengelolaan Dana BUMN dan Korporasi

Selain fokus pada pinjaman korporasi, Bisnis Korporasi juga mengutamakan jasa pengelolaan terhadap penempatan dana nasabah maupun pengembangan layanan perbankan yang dapat meningkatkan *fee based income*.

Untuk menangkap potensi nasabah korporasi secara optimal, BRI telah mempunyai unit kerja khusus, yaitu Divisi Hubungan Kelembagaan guna memberikan pelayanan yang spesifik dan berkesinambungan kepada nasabah non-perorangan yang terdiri dari institusi Pemerintah maupun swasta yang memerlukan layanan perbankan berskala nasional.

Target dana kelolaan secara umum adalah dana -dana instansi pemerintah lembaga pendidikan, Dana Pensiun dan perusahaan swasta. Selanjutnya, guna mengikuti pesatnya perkembangan dunia bisnis yang menuntut produk dan jasa perbankan yang relevan dengan kebutuhan nasabah, BRI terus mengembangkan ragam produk dan jasa yang disediakan, antara lain sebagai berikut:

Cash Management

BRI menyediakan *Cash Management Service* (CMS) bagi nasabah perusahaan yang membutuhkan layanan transaksi perbankan yang cepat dan akurat. CMS merupakan solusi layanan perbankan yang memungkinkan nasabah perusahaan melakukan monitoring informasi rekening, melakukan transaksi keuangan dan melaksanakan manajemen likuiditas yang paling optimum melalui sistem yang terintegrasi dan terkoneksi *online* dengan Bank.

Untuk mendukung pencapaian visi "Menyediakan produk *Cash Management* BRI yang handal dan berdaya saing", BRI telah mengembangkan CMS melalui pengembangan sistem, meliputi:

1. Instalasi, peremajaan serta *upgrade server/scalability server*.
2. Peningkatan *bandwidth* jaringan, perangkat *security Firewall* dan komunikasi internet.
3. Pengembangan fitur-fitur general aplikasi CMS.
4. Pengembangan fitur-fitur khusus (*customized*) aplikasi CMS, termasuk dalam rangka penerapan strategi *closed system*.
5. Penyempurnaan tampilan (*Interface*) aplikasi CMS yang lebih *user friendly*.

Treasury Single Account (TSA)

Dalam rangka mengelola keuangan Negara secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerapkan *Treasury Single Account* (TSA) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melibatkan Peserta Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Tinjauan Bisnis

Modul Penerimaan Negara (MPN)

MPN *Single Entry* adalah aplikasi terpadu yang ditujukan untuk melakukan transaksi penerimaan setoran penerimaan negara dari wajib setor kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Transaksi MPN *Single Entry* ini meliputi hampir seluruh pembayaran terkait perpajakan kepada negara.

Modul Kerjasama dengan Kementerian

BRI menjalin kerjasama dengan beberapa Kementerian untuk mendukung program-program yang dilakukan pemerintah. Dalam kerjasama tersebut, BRI memperoleh beberapa manfaat meliputi pembukaan rekening dari penerima program, dana yang mengendap, dan jasa administrasi. Beberapa modul kerjasama yang dikembangkan meliputi:

1. Bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
2. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyaluran tunjangan profesi dan dana *Block Grant*.
3. Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam penyaluran dana berbagai program kesehatan.
4. Kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk memajukan industri pertanian berbasis sumberdaya lokal berupa dukungan penyaluran dana program, seperti bantuan modal kerja pasca panen, modal usaha hortikultura, dan sebagainya.

Layanan Pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

BRI ditunjuk sebagai Bank yang melaksanakan pengelolaan pembayaran PNB, bekerja sama dengan Polri melalui Automatic Teller Machine (ATM), Electronic Data Capture (EDC), dan Teller BRI.

Jenis-jenis PNB Polri tersebut mencakup SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan), Klipeng (Klinik Pengemudi) dan Senpi (Senjata Api).

Visa on Arrival (VoA)

VoA adalah visa yang diberikan di tempat pemeriksaan imigrasi kepada warga negara asing yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia. BRI menyediakan *counter* pelayanan pembayaran VoA dan mengelola pemasukan dana dari VoA kantor imigrasi Republik Indonesia.

Payment Point

BRI melaksanakan kerjasama dalam bentuk pengelolaan keuangan dan penerimaan pembayaran tagihan untuk mendukung usaha berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan BUMN dalam mempermudah pelayanan bagi masyarakat umum. Perusahaan tersebut antara lain PLN, PT Telkom dan PDAM.

Profitabilitas Segmen BUMN dan Korporasi

Penyaluran kredit BUMN dan Korporasi sepanjang tahun 2013 menyumbang pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp3,86 triliun, dan memberikan kontribusi *net profit* bagi BRI sebesar Rp1,53 triliun.

Tinjauan Bisnis



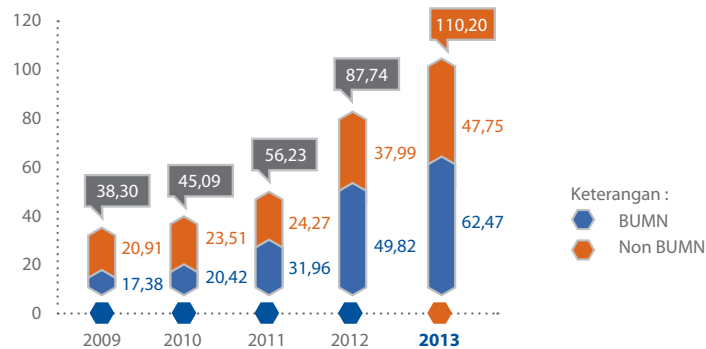
Kinerja Bisnis BUMN dan Korporasi

1. Penyaluran Pinjaman
Total outstanding pinjaman korporasi meningkat menjadi Rp110,20 triliun, dengan naiknya pinjaman BUMN sebesar Rp12,65 triliun dan pinjaman Non-BUMN sebesar Rp 9,76 triliun.
2. Kualitas kredit
Penerapan asas kehati-hatian dalam proses pemberian kredit membuat kualitas kredit segmen Bisnis Korporasi terjaga dengan NPL sebesar 0,87% untuk Non BUMN dan 0.00% untuk BUMN.
3. Dampak *trickle down business* terhadap bisnis UMKM.
Sinergi segmen bisnis korporasi dengan bisnis UMKM sebagai hasil *Trickle down business* menunjukkan hasil nyata, sehingga *outstanding* pinjaman UMKM hasil sinergi ini tahun 2013 meningkat drastis mencapai 158.46% dari senilai Rp1,30 triliun di tahun 2012 menjadi sebesar Rp3,36 triliun.
4. *Cash Management*
Peningkatan jumlah nasabah pengguna CMS BRI telah menunjang peningkatan jumlah rekening kelolaan dari 24.017 rekening di tahun 2012 menjadi 33.019 rekening di tahun 2013 dan jumlah transaksi dari 1,50 juta transaksi di tahun 2012 menjadi 2,64 juta transaksi.
5. *Fee Based Income*
Volume aktifitas hubungan kelembagaan dan pengelolaan dana korporasi turut berperan dalam menghasilkan pendapatan *fee based income* segmen korporasi sebesar Rp 107,61 miliar.
6. Penghimpunan dana
Penghimpunan dana Korporasi mencapai Rp172,40 triliun, yang menjadi salah satu sumber dana untuk ekspansi bisnis Korporasi.

Tinjauan Bisnis

Outstanding Pinjaman Segmen Bisnis Korporasi

(Dalam Rp Triliun)

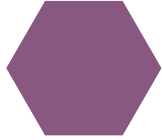


Strategi Pengembangan Bisnis BUMN dan Korporasi

Dalam pengembangan Bisnis BUMN dan Korporasi, BRI akan terus mengupayakan pengembangan bisnis melalui strategi sebagai berikut:

1. BUMN
Memperkuat penetrasi pasar Kredit BUMN dan menjadikannya sebagai *entry gate* bagi bisnis BRI lainnya.
2. Korporasi (Agribisnis dan Bisnis Umum)
 - a. Pembiayaan pada sektor usaha yang prospektif dan belum jenuh
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bertindak sebagai *financial advisor* bagi debitur
 - c. Optimalisasi TI sesuai dengan kebutuhan bisnis
3. Pengelolaan Dana BUMN dan Korporasi
 - a. Optimalisasi kerjasama dengan nasabah institusi yang ada melalui penambahan *cross selling*
 - b. Meningkatkan kualitas, fungsi dan peran *executive relationship officer*
 - c. Pengembangan ke bisnis di sektor swasta nasional dan perusahaan multinasional
 - d. Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lembaga pemerintah, BUMN maupun korporasi.

Tinjauan Bisnis



Bisnis Internasional



“

Berbagai program pengembangan Bisnis Internasional yang dilakukan dengan konsisten membuat BRI membukukan peningkatan volume dan nilai transaksi remitansi serta *fee based* yang membanggakan

”

Tinjauan Bisnis

Ringkasan :

1. Bisnis Internasional BRI didukung oleh 3 Kantor Luar Negeri dan 1.200 Bank Koresponden di seluruh dunia.
2. Peningkatan jaringan, ragam layanan yang didukung fitur produk baru dan teknologi informasi terkini membuat volume kegiatan *trade finance* dan *remittance* meningkat pesat.
3. Peningkatan *volume trade finance* dan *international banking services* membuat nilai transaksi juga berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir.
4. Di tahun 2013 *fee based income* yang dihasilkan mencapai Rp514,39 miliar, meningkat 37,47% dari tahun 2012.

Dalam upaya untuk mendukung pencapaian BRI menjadi Bank Komersial Terkemuka di Indonesia, maka BRI terus mengembangkan pelayanan bisnis yang terkait dengan perdagangan internasional. Pengembangan ini dilakukan dengan cara memperbaharui kebijakan yang terkait bisnis internasional, membina hubungan dengan bank koresponden baik dalam dan luar negeri, melakukan pembinaan kepada unit kerja seluruh Indonesia, melakukan pengembangan dan pemasaran bisnis internasional guna memberikan kontribusi dalam bentuk *fee based income* kepada BRI.

Transaksi *trade finance* dan *international banking services* juga memiliki kontribusi terhadap kegiatan bisnis BRI antara lain *loan expansion*, penyediaan sumber dana jangka pendek serta sebagai sarana untuk meningkatkan *end-to-end service* bagi nasabah BRI, yakni menyediakan layanan *remittance* dan *bank notes services*.

Produk dan Layanan Bisnis Internasional

Produk-produk *trade finance* dan *international banking services* lainnya yang dimiliki BRI adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan *Letter of Credit* (LC) dan SKBDN
2. *Refinancing LC*
3. *Post-shipment Financing*
4. *Bill Purchase Financing*
5. *Standby LC, Guarantee*, dan *Counter Guarantee*
6. *Trust Receipt* (TR)
7. *Documentary and Clean Collection*
8. *Money Changer*
9. *Interbank Banknotes Transaction*
10. *Remittance*

Pengembangan Bisnis Internasional di Tahun 2013

Selama 2013, BRI juga melaksanakan program pemasaran berupa *reward* tahunan Mudik Bareng BRIfast Remittance pada bulan Agustus sebagai bagian dari strategi akuisisi nasabah baru dan retensi nasabah *existing*. BRI juga melakukan kerjasama dengan agen pengirim TKI (PPTKIS) untuk pemasaran BRIfast Remittance sekaligus akuisisi nasabah tabungan BritAma TKI dan mengembangkan fitur *incoming remittance* dengan tujuan bank lain (bekerjasama dengan jaringan LINK, Prima dan ATM Bersama).

Untuk mendukung layanan produk-produk tersebut, saat ini BRI memiliki lebih dari 1.200 Bank Koresponden serta didukung rekening *nostro* dalam 14 jenis mata uang asing. BRI juga melakukan kegiatan pemasaran secara langsung untuk produk *Trade Refinancing*

LC dan Non LC, *Risk Participation*, dan penerbitan *Guarantee* dengan jaminan *Counter Guarantee* dari Bank Koresponden.

Selain pemasaran produk-produk *trade finance* dan *international banking services*, BRI juga melakukan pencarian sumber pendanaan valas luar negeri (*offshore funding*) melalui penerbitan *Bankers Acceptance* (BA), *Bilateral Loan* dan penggalangan simpanan valas dari nasabah ritel dan korporasi.

Kinerja Bisnis Internasional di Tahun 2013

Trade Finance

Trade Finance menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan *fee based income* bagi BRI dengan pertumbuhan rata-rata tahunan, selama lima tahun terakhir, adalah sebesar 55.4% CAGR sejak akhir tahun 2009 hingga akhir tahun 2013. Pada tahun 2013, kendati perekonomian global maupun nasional kurang kondusif, *fee based income* dari transaksi *trade finance* mencapai Rp514,39 miliar.

Untuk mendukung peningkatan kegiatan *trade finance*, BRI melakukan berbagai upaya yang meliputi revitalisasi SDM, pengembangan produk dan jasa, serta sistem pendukung. Upaya peningkatan kualitas layanan produk dan jasa *trade finance* dilakukan dengan cara sentralisasi layanan *processing trade finance* melalui pembentukan *Trade Processing Center* (TPC) yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BRI terhadap peningkatan layanan operasional *trade finance* yang lebih cepat, efisien dan akurat. BRI juga memiliki tenaga pemasar khusus untuk *Trade Finance* di kantor-

Tinjauan Bisnis

kantor wilayah BRI yang memiliki potensi transaksi *trade finance* yang besar sebagai langkah penetrasi pasar dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

Remittance

Saat ini BRI telah mengembangkan layanan *remittance* kerjasama dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank di seluruh dunia dengan nama produk **BRIfast Remittance**.

Dalam rangka meningkatkan layanan *remittance* kepada nasabah, BRI memperluas kerjasama dengan bank koresponden dan *counterpart remittance* serta mengembangkan fitur *credit to account* dan *cash pick up* sehingga memberikan pilihan kepada nasabah dalam melakukan pengiriman uang ke rekening nasabah di BRI atau dengan pengambilan tunai di seluruh unit kerja BRI. Layanan BRIfast Remittance yang *real-time online* memberikan kemudahan, keamanan serta kecepatan pengiriman uang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah.

BRIfast Remittance mengakomodasi layanan pengiriman uang *Credit to Account* (kiriman masuk rekening) dan *Cash Pick-Up* (kiriman diambil secara tunai). Dengan jaringan *counterpart* kerjasama BRI di seluruh dunia serta dukungan lebih dari 9.808 unit kerja BRI yang *real-time online* tersebar di seluruh Indonesia, BRI dapat memberikan kemudahan, keamanan, serta kecepatan pengiriman uang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Saat ini BRI telah menjalin kerjasama dengan 37 *counterpart* di 13 negara. Untuk

meningkatkan layanan *remittance* kepada Tenaga Kerja Indonesia, BRI telah menempatkan *Remittance Representative* di beberapa Negara tujuan penempatan Tenaga Kerja Indonesia yaitu Malaysia, Abu Dhabi, dan Saudi Arabia.

Hasilnya menunjukkan bahwa transaksi *remittance* BRI terus meningkat dari sebesar 846 ribu transaksi di tahun 2011 menjadi lebih dari 1,86 juta transaksi di tahun 2012, dan kemudian meningkat menjadi 2,65 juta transaksi di tahun 2013.

Jumlah Transaksi Remittance

(Dalam Ribu)



Mengingat besarnya nilai dan manfaatnya bagi nasabah, BRI berupaya memperkuat bisnis *remittance* dan meningkatkan kualitas layanan antara lain dengan mengembangkan BRIfast Remittance sebagai sarana *innovative remittance* untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Money Changer

Saat ini BRI telah memiliki bisnis *money changer* dalam berbagai mata uang asing seperti USD, SGD, AUD, CAD, EUR, GBP, CHF, SAR, CNY, JPY, KRW, BND, NZD, PGK, THB, HKD dan MYR yang dapat dilayani secara *real-time online* di seluruh Kantor Cabang BRI.

Layanan *money changer* BRI menawarkan nilai tukar yang kompetitif dan selalu mengikuti perkembangan *global exchange rate*. Dalam memasarkan dan mengembangkan bisnis *money changer*, BRI memiliki *dealer banknotes* yang memiliki tugas untuk melakukan penetapan kurs, kewenangan negosiasi kurs dan *inventory management* serta fungsi monitoring maupun asistensi kepada unit kerja BRI yang melakukan bisnis *money changer*.

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas kas valas (*bank notes*) serta *inventory management* terkait keperluan BRI maupun pihak ketiga, BRI juga aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor *bank notes* yang bekerja sama dengan Bank Koresponden BRI di beberapa negara.

Unit Kerja Luar Negeri (UKLN)

Dalam upaya mengembangkan pelayanan *trade finance* BRI, saat ini BRI telah didukung oleh Unit Kerja Luar Negeri yaitu BRI New York Agency (BRINYA), BRI Cayman Island Branch (BRICIB) dan BRI Hongkong Representative Office (BRI HKRO). Dukungan tersebut dalam bentuk pemberian *trade loan, fund raising, commercial loan, risk participation, remittance, USD settlement* dan melaksanakan fungsi kepanjangan tangan BRI di luar negeri.

Tinjauan Bisnis

BRINYA aktif dalam pembiayaan kredit kepada perusahaan Global USA dan perusahaan Indonesia sebagai upaya dalam pengembangan portofolio aset. Selain itu, BRINYA juga berpartisipasi dalam pembiayaan proyek pemerintah RI melalui skema PLN sebagai wujud dukungan BRI bagi kelancaran program pembangunan Pemerintah RI.

Hasilnya, kinerja BRI New York Agency terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Aset BRI New York Agency pada tahun 2013 terus tumbuh mencapai USD918,87 Juta, dan laba mencapai USD 12,90 juta.

Unit kerja lainnya, BRI Caymand Island Branch (BRICIB) aktif melakukan aktivitas perbankan baik dari sisi aset dan liabilitas, Aset BRI Caymand Island Branch meningkat sebesar 40,07% dari akhir tahun 2012, dari USD199,9 juta menjadi USD280,0 juta di tahun 2013 dengan total pinjaman sebesar USD267,4 juta. Laba bersih yang dihasilkan selama tahun 2013 mencapai USD2,5 juta.

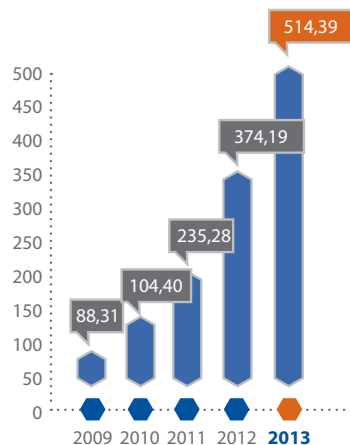
BRI Hong Kong Representative Office merupakan kepanjangan tangan kantor pusat BRI yang berada di pusat keuangan di Asia. BRI Hong Kong Representative Office bertugas mengumpulkan informasi menyangkut investasi dan peluang bisnis untuk mengembangkan *bilateral trade relations* dan mempromosikan peroduk dan kegiatan ekspor impor Indonesia. BRI Hong Kong Representative Office juga bertugas untuk membangun *customer based* pada bisnis *remittance* sekaligus melakukan supervisi kegiatan bisnis Anak Perusahaan BRI di Hong Kong yaitu BRI Remittance Company (BRC).

Profitabilitas Bisnis Internasional

Bisnis Internasional telah menyumbang *fee based income* yang cukup signifikan bagi BRI dengan perkembangan yang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir.

Fee Based

(Dalam Rp Miliar)



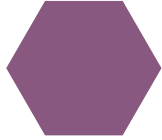
Strategi Pengembangan Bisnis Internasional 2014

Agar lebih kompetitif dalam rangka pengembangan bisnis internasional, BRI merencanakan berbagai kegiatan mencakup:

1. *Product development*
2. Implementasi layanan TPC (*Trade Processing Center*) untuk area Jabodetabek.
3. Pengembangan TPC agar mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah, dengan melakukan pengembangan portal layanan yang dapat diakses langsung oleh nasabah.

4. Peningkatan kualitas tenaga pemasar, advisor (TFO) dan tenaga operasional TF melalui sertifikasi demi pengembangan SDM yang profesional dan kompeten.
5. Pengembangan jasa *remittance*
6. Pengembangan fungsi *remittance representative* menjadi *representative office*.
7. Memperluas kerjasama dengan lembaga bank antara lain Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank domestik lain dan bank-bank di luar negeri.
8. Menyusun rencana kerjasama *Money Changer* dengan bank koresponden dan lembaga *Money Changer* dalam negeri.

Tinjauan Bisnis



Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal



“ Di tengah kondisi pasar modal yang cukup dinamis, BRI berhasil meningkatkan nilai penerbitan surat berharga, aset kelolaan kustodian dan aset kelolaan DPLK yang membuat perolehan *fee based* dari bisnis *Treasury* dan Jasa Penunjang Pasar modal meningkat 30,37% “

Tinjauan Bisnis

Ringkasan:

- Pengelolaan likuiditas, dan pengelolaan risiko pasar sesuai aturan regulator, dengan optimalisasi *yield* yang cukup membanggakan di tahun yang penuh tantangan.
- Untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang pasar modal, BRI memiliki bisnis jasa penunjang pasar modal yakni wali amanat, *selling agent*, kustodian dan DPLK.

Bisnis Treasury

Untuk memberikan layanan Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal yang optimal, BRI menerapkan strategi umum sebagai berikut:

1. Mengelola likuiditas, sumber dan penggunaan dana bank, serta pengelolaan risiko pasar secara profesional dan terarah.
2. Melakukan trading baik dalam rangka *arbitrage*, *market making* maupun *proprietary* dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta *trading limit* secara disiplin.
3. Melakukan *credit assesment* untuk mencari peluang investasi pada instrumen keuangan maupun penyertaan.
4. Menyediakan layanan produk dan jasa pasar keuangan baik kepada unit kerja internal BRI maupun nasabah dengan harga yang kompetitif.
5. Mengembangkan produk dan jasa keuangan baik di pasar uang maupun pasar modal untuk menghimpun *fee based income*.

Perlambatan pertumbuhan perekonomian global dan nasional yang terjadi di tahun 2013 membuat kehandalan Treasury BRI betul-betul diuji dalam mengelola struktur aset

dan kewajiban bank agar memberi andil nyata dalam mendukung kesinambungan kinerja bank. Tren pelemahan Rupiah sepanjang tahun 2013 menjadi tantangan bagi Treasury untuk mengambil posisi yang tepat dalam melindungi struktur Neraca BRI. Fungsi Treasury dalam meminimalisasi risiko nilai tukar terlihat dari posisi devisa neto yang tidak pernah melebihi ketentuan Bank Indonesia dan *Treasury Policy* BRI.

Tingginya tingkat inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada bulan Juni 2013 dan pelemahan rupiah akibat meningkatnya defisit neraca membuat BI menaikkan tingkat bunga acuan dari 5,75% di awal tahun menjadi 7,50% di akhir tahun. Hal ini membuat ekspektasi suku bunga deposito nasabah turut mengalami penyesuaian yang mengakibatkan penyesuaian dari sisi biaya dana. BRI menempuh langkah untuk meminimalisir penyesuaian suku bunga deposito terhadap biaya dana dengan cara mempertahankan komposisi dana murah sesuai target dan mempertahankan suku bunga produk simpanan yang tidak sensitif terhadap suku bunga. Dari sisi aset, penyaluran pinjaman diprioritaskan untuk *high yield* dengan tetap memperhatikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi yang juga mengalami penyesuaian suku bunga sesuai *market*.

Untuk melayani kebutuhan transaksi valuta asing (valas) nasabah, Bisnis Treasury BRI melayani transaksi jual-beli valas, dan transaksi lindung nilai nasabah melalui transaksi *forward* dan *swap*. Sebagai pelengkap dari pelayanan transaksi valas, secara reguler BRI juga memberikan layanan *market update* melalui *e-mail* dan

informasi kurs melalui *SMS Blast* kepada nasabah.

Pada tahun 2013 Divisi Treasury telah membuka empat outlet layanan remote area yaitu di Surabaya, Medan, Bandung dan Yogyakarta untuk lebih meningkatkan pelayanan transaksi valas. Selain itu, BRI terus melakukan sosialisasi produk Treasury, agar seluruh unit kerja di BRI memiliki pemahaman yang seragam tentang produk dan jasa Treasury.

Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal

Semakin beragamnya alternatif investasi di Indonesia membuat nasabah memiliki pilihan untuk berinvestasi, yakni di pasar uang dan atau di pasar modal. Jasa Penunjang Pasar Modal BRI berperan menjembatani kebutuhan nasabah untuk berinvestasi di pasar modal. Tidak hanya dari segi investasi, Jasa Penunjang Pasar Modal juga dapat melayani kebutuhan nasabah khususnya korporasi yang berencana untuk melakukan kegiatan *financing* melalui penerbitan surat berharga di pasar modal. Layanan dalam Jasa Penunjang Pasar Modal BRI antara lain:

Wali Amanat dan *Selling Agent*

Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di masa yang akan datang, BRI akan terus bekerjasama dengan pihak-pihak di Pasar Modal untuk mengembangkan jasa Wali Amanat.

Dalam fungsinya sebagai *selling agent*, BRI memasarkan produk investasi antara lain reksa dana,

Tinjauan Bisnis

ORI, dan Sukuk Ritel. Bekerjasama dengan delapan Manajer Investasi, saat ini BRI memasarkan 29 produk Reksa Dana, dengan fokus utama pemasaran ditujukan kepada nasabah BRI Prioritas. Selain itu, selama tahun 2013 BRI telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai *Selling Agent* ORI010 dan sebagai *Selling Agent* Sukuk Ritel Seri SR005.

Pemasaran ORI dan Sukuk Ritel dilakukan melalui seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BRI yang tersebar di Indonesia. BRI berupaya untuk selalu memperoleh kepercayaan dari Pemerintah agar dapat bertindak sebagai *selling agent/sub-selling agent* di setiap penerbitan ORI dan Sukuk Ritel sekaligus mendapatkan *fee based income* dari hasil penjualan produk investasi tersebut.

Jasa Kustodian

BRI telah menjadi Bank Kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis kelolaan aset, antara lain instrumen *money market* berupa deposito, *deposit on call*, Sertifikat Bank Indonesia, dan instrumen *fixed income* berupa surat utang baik *government bond* maupun *corporate bond*, serta instrumen ekuitas berupa saham. BRI telah ditunjuk sebagai *Sub Registry* dalam melaksanakan transaksi Obligasi Pemerintah dan penatakerjaan SBI Scripless oleh Bank Indonesia. Jasa Kustodian yang diberikan oleh BRI termasuk pengelolaan *mutual fund*, meliputi berbagai jenis Reksa Dana dan Dana Pensiun Lembaga keuangan.

Selama tahun 2013, Kustodian BRI telah memberikan berbagai layanan pada nasabah dan terus berkembang untuk menjadi pilihan utama dalam penitipan efek. Beberapa jasa kustodian yang dilakukan selama tahun 2013 dibagi menjadi dua kegiatan yaitu *core services* dan *value added services*.

Jasa Trustee

Layanan Jasa Trust BRI merupakan layanan jasa penitipan harta nasabah yang berupa aset finansial untuk dan atas nama nasabah. BRI merupakan bank pertama di Indonesia yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjalankan layanan Jasa Trust di Indonesia melalui surat Bank Indonesia No 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan surat penegasan Bank Indonesia No 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013.

Ruang lingkup layanan Jasa Trust BRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia meliputi :

1. Layanan Jasa Agen Pembayar.
2. Layanan Jasa Agen Peminjaman.
3. Layanan Jasa Agen Investasi.

Bank BRI saat ini memberikan pelayanan Jasa Trust untuk transaksi-transaksi keuangan yang melibatkan proyek minyak dan gas (Migas) baik yang dilaksanakan oleh anggota Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dibawah naungan SKK Migas maupun proyek-proyek non K3S.

Jasa Trust BRI juga berperan serta mendukung unit kerja pembiayaan BRI dalam transaksi kegiatan pembiayaan infrastruktur, energi dan pembiayaan sindikasi. Dalam pengelolaan dana hibah (*trust fund*) Bank BRI dapat berperan serta selaku Bank penyedia layanan Jasa Trust.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI merupakan lembaga pengelola Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang didirikan oleh Bank BRI sejak tanggal 9 Januari 2006. Produk DPLK BRI dikenal dengan nama "**Investasi Rencana Pensiun BRI**" terbuka bagi masyarakat umum baik peserta individu maupun kelompok dari pekerja sektor formal maupun informal.

Produk utama DPLK BRI adalah "Investasi Rencana Pensiun BRI", yang menawarkan empat pilihan investasi yaitu Paket Investasi Pasar Uang, Paket Investasi Pendapatan Tetap, Paket Investasi Saham dan Paket Investasi Kombinasi. Produk "Investasi Rencana Pensiun BRI" tersebut memiliki keunggulan antara lain:

1. Dikelola secara modern dengan valuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB) secara harian sebagaimana halnya pengelolaan Reksadana, dan NAB tersebut dipublikasikan setiap hari di surat kabar nasional.
2. Prosedur pendaftaran dan setoran iuran yang mudah.
3. Dukungan jaringan layanan terluas melalui seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu BRI.
4. Produk yang relatif aman serta memberikan tingkat *return* yang sangat kompetitif.
5. Transparansi kinerja, dimana Laporan Keuangan Tahunan DPLK BRI diaudit oleh auditor independen dan dipublikasikan melalui surat kabar nasional.

Sebagai pengelola Dana Pensiun, DPLK BRI memiliki visi menjadi *market leader* dalam industri Dana Pensiun yang mengutamakan pengelolaan *long term investment* secara *prudent* namun tetap memberikan return optimal, dikelola secara profesional dan transparan, guna menata masa depan peserta DPLK BRI menjadi lebih baik.

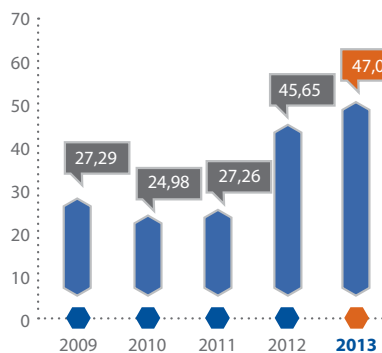
Tinjauan Bisnis

Kinerja Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

1. Mampu menjaga *Cost of Fund* di tengah kenaikan Suku Bunga acuan dan kondisi ekonomi Indonesia yang menantang. Biaya Dana BRI naik 3bps dari 3,68% pada akhir tahun 2012 menjadi 3,71% pada akhir tahun 2013, di saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga dari 5,75% pada awal tahun 2013 menjadi 7,50% di akhir tahun 2013.
2. Penerbitan Obligasi Global Bond jangka waktu 5 tahun sebesar USD500 Juta pada bulan Maret 2013 dengan *coupon rate* yang relatif rendah yaitu 2,95%. Rendahnya *coupon rate* obligasi ini menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap BRI, dimana total *orderbook* yang diterima sekitar USD12,5 Miliar atau *over subscribed* 4,2x.
3. Secara umum BRI mampu menjaga rasio likuiditas seperti GWM, Posisi Devisa Netto, *Loan to Deposit Ratio*, dan *Cash Ratio* sesuai aturan BI maupun kebijakan internal Treasury Policy.
4. *Fee Based Income* yang dihasilkan dari jasa penunjang pasar modal sepanjang tahun 2013 mencapai Rp 55,49 miliar meningkat 30,46% dari tahun 2012.
5. Total penerbitan surat berharga yang dikelola oleh BRI selaku wali amanat sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar Rp 47,01 triliun meningkat 10,2% dibanding periode yang sama tahun 2012.
6. Aset kelolaan Kustodian BRI telah meningkat 85,16% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp103,98 triliun di akhir tahun 2013, yang menghasilkan *fee based income* sebesar Rp25,8 miliar.
7. Aset kelolaan DPLK BRI di akhir tahun 2013 mencapai Rp2,98 triliun, naik sebesar 15,06% dari tahun 2012.

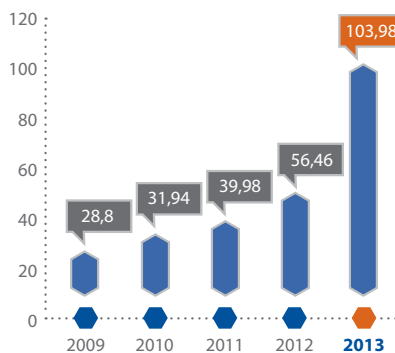
Kinerja Wali Amanat

(Dalam Rp Triliun)



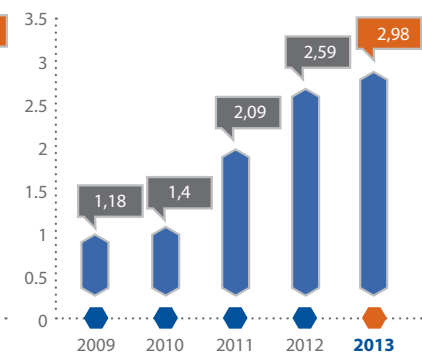
Aset Kelolaan Kustodian

(Dalam Rp Triliun)



Aset Kelolaan DPLK

(Dalam Rp Triliun)



Strategi Pengembangan Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

1. *Joint marketing* dengan divisi terkait dalam memasarkan produk Wali Amanat, ORI, Sukuk Ritel, ataupun Reksa Dana.
2. Perluasan jaringan penjualan Investasi Rencana Pensiun BRI melalui unit kerja mikro.
3. Penambahan fitur Investasi Rencana Pensiun BRI berupa Paket Investasi Syariah dan perlindungan asuransi
4. *Upgrade system* investasi reksadana.
5. Menjadi *Facility Agent* kredit sindikasi
6. Mendukung pertumbuhan *anorganik* BRI.

Tinjauan Keuangan



Bank BRI menyajikan uraian analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan untuk Industri Perbankan di Indonesia. Pada bagian akhir uraian ini, BRI juga menyajikan ringkasan kinerja anak usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kinerja keuangan Perseroan.

Seluruh materi uraian ini berdasarkan pada Laporan Keuangan Audit Konsolidasian BRI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman dan Surja (PSS-EY) sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. RPC- 4702/ PSS/2014 tanggal 16 Januari 2014 dengan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian BRI telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian BRI ini telah dilampirkan dalam Laporan Tahunan ini.

(dalam Rp juta)

Tabel Laba Rugi BRI					
	2011	2012	2013	Pertumbuhan	
				2011-2012	2012-2013
Pendapatan Bunga	47.296.178	48.272.021	57.720.831	2,06%	19,57%
Pendapatan Bagi Hasil - Syariah	868.170	1.338.400	1.740.253	54,16%	30,02%
Dikurangi : Beban Bunga dan Bonus	(13.737.272)	(13.126.655)	(15.354.813)	-4,44%	16,97%
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Bersih	34.427.076	36.483.766	44.106.271	5,97%	20,89%
Pendapatan Operasional Lainnya	5.775.975	8.389.732	8.348.459	45,25%	-0,49%
Beban Penyisihan Penghapusan Kerugian penurunan nilai atas keuangan dan non-keuangan - netto	(5.791.658)	(2.668.177)	(3.947.875)	-53,93%	47,96%

“

Dengan pertumbuhan bisnis mikro, kecil dan menengah terbaik di Indonesia, BRI mencatatkan kinerja keuangan yang memberi margin imbal hasil yang baik sekaligus memperkuat posisi keuangan seperti tercermin dari posisi ROE, CAR, NPL (gross) maupun LDR, untuk mendukung pertumbuhan di masa mendatang.

”

(dalam Rp juta)

Tabel Laba Rugi BRI					
	2011	2012	2013	Pertumbuhan	
				2011-2012	2012-2013
(Beban) Pembalikan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - netto	93.623	(262)	191	-100,28%	-172,90%
Pembalikan cadangan (beban penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset - non keuangan - netto	164.841	(31.489)	1.309	-119,10%	-104,16%
Dikurangi : Beban Operasional	(17.085.627)	(19.491.032)	(22.380.778)	14,08%	14,83%
Laba Operasional	17.584.230	22.682.538	26.127.577	28,99%	15,19%
Pendapatan/ Beban Non Operasional - Bersih	1.171.650	1.177.034	1.782.489	0,46%	51,44%
Laba Sebelum Pajak	18.755.880	23.859.572	27.910.066	27,21%	16,98%
Beban Pajak	(3.667.884)	(5.172.192)	(6.555.736)	41,01%	26,75%
Laba bersih sebelum pos luar biasa	15.087.996	18.687.380	21.354.330	23,86%	14,27%
Pos Luar biasa - bersih	0	0	0		
Laba Bersih	15.087.996	18.687.380	21.354.330	23,86%	14,27%

(dalam Rp juta)

Tabel Laba Rugi Komprehensif					
	2011	2012	2013	Pertumbuhan	
				2011-2012	2012-2013
Laba Bersih	15.087.996	18.687.380	21.354.330	23,86%	14,27%
Pendapatan Komprehensif Lainnya - bersih setelah Pajak	208.505	(26.372)	(1.437.676)	-112,65%	5351,52%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	15.296.501	18.661.008	19.916.654	22,00%	6,73%

Tinjauan Keuangan

- ROE* sebesar **34,11%** - salah satu tertinggi di industri perbankan Indonesia
- CAR* sebesar **16,99%** - Jauh diatas ketentuan regulator untuk, mendukung pertumbuhan masa depan
- NPL (gross) **1,63%**, - Menunjukkan kualitas kredit yang terjaga
- LDR sebesar **88,54%** - Menunjukkan kemampuan menjaga likuiditas dan kepercayaan.

Laporan Laba Rugi

Di tahun 2013, BRI kembali berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan. Membaiknya kualitas kredit, meningkatnya outstanding kredit, komposisi kredit yang ideal, serta tetap stabilnya efisiensi operasional merupakan beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja BRI.

BRI berhasil membukukan kenaikan laba konsolidasian 14,27% dibandingkan tahun 2012 yakni dari Rp18,69 triliun menjadi Rp21,35 triliun, memantapkan posisi sebagai Bank dengan perolehan laba terbesar sejak tahun 2005.

Pendapatan Bunga

Penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian merupakan langkah awal dalam menciptakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan di masa yang akan datang. Dalam mencapai hal tersebut, maka pada tahun 2013 BRI menerapkan strategi bisnis yang fokus pada peningkatan kualitas kredit dan selektif dalam penyaluran kredit. BRI juga berkonsentrasi penuh untuk memperbaiki kualitas kredit, melalui program peningkatan pengawasan dan perbaikan administrasi dengan dukungan sistem teknologi informasi terkini.

Dengan penerapan strategi tersebut, pertumbuhan kredit BRI di tahun 2013 dapat melampaui pertumbuhan kredit industri perbankan dan dengan kualitas kredit yang semakin baik.

Pada tahun 2013, total kredit dan pembiayaan BRI tumbuh 23,85%, naik sebesar Rp86,34 triliun, dari Rp362,01 triliun di tahun 2012 menjadi Rp448,34 triliun. Upaya perbaikan kualitas kredit dan perbaikan prosedur penilaian kredit, membuat NPL (gross) BRI terus membaik menjadi 1,63% per Desember 2013, dari posisi 1,83% di tahun sebelumnya.

Terjaganya kualitas kredit disertai dengan dominasi komposisi portofolio kredit oleh Kredit Mikro, menyebabkan pendapatan bunga (termasuk di dalamnya pendapatan bagi hasil syariah) selama tahun 2013 tumbuh sebesar 19,86% dari Rp49,61 triliun di tahun 2012 menjadi Rp59,46 triliun di tahun 2013. Dari total pendapatan bunga tersebut, sebesar Rp52,12 triliun atau 87,65%, merupakan kontribusi dari pendapatan bunga pinjaman.

Pada tahun 2013, BRI melanjutkan kebijakan mempertahankan suku bunga dasar kredit yang kompetitif untuk pinjaman BRI. *Lending rate* yang kompetitif dalam jangka panjang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis BRI, karena dapat semakin meningkatkan volume bisnis BRI, menciptakan *barrier of entry* bagi kompetitor serta meningkatkan kehadiran BRI di Industri Perbankan.

Strategi penerapan suku bunga dasar kredit yang kompetitif adalah bagian lain dari upaya BRI untuk meningkatkan basis nasabah melalui peningkatan jaringan layanan konvensional dan *e-channel* serta didukung oleh SDM yang handal dan memadai.

Kenaikan suku bunga acuan BI *rate* sebesar 175 bps selama tahun 2013 telah mempengaruhi biaya dana. akan tetapi dampaknya dapat diminimalkan dengan perbaikan komposisi DPK, yakni berupaya meningkatkan komponen CASA dari total DPK yang dihimpun.

* angka bank saja

Tinjauan Keuangan

Tabel Rincian Pendapatan Bunga

Komponen	2011		2012		2013	
	Rp juta	Komposisi	Rp juta	Komposisi	Rp juta	Komposisi
Kredit	41.835.778	88,45%	42.674.331	88,40%	52.117.514	90,29%
Aktiva Produktif selain Kredit	5.460.400	11,55%	5.597.690	11,60%	5.603.317	9,71%
Obligasi Pemerintah (Obligasi Rekap)	1.111.461	2,35%	375.218	0,78%	163.117	0,28%
Efek-efek	2.000.645	4,23%	2.194.901	4,55%	2.947.881	5,11%
Penempatan pada Bank Lain dan BI	1.802.330	3,81%	1.967.685	4,08%	1.326.538	2,30%
Giro pada Bank Indonesia	137.664	0,29%	163.713	0,34%	190.842	0,33%
Lainnya*	408.300	0,86%	896.173	1,86%	974.939	1,69%
Total Pendapatan Bunga	47.296.178		48.272.021		57.720.831	

* Termasuk pendapatan Syariah

Pendapatan bunga dari aktiva produktif selain kredit relatif tidak mengalami perubahan, tercatat di tahun 2013 sebesar Rp5,60 triliun, mengalami peningkatan 0,10% dari tahun sebelumnya. Kontribusi pendapatan bunga yang berasal dari aktiva produktif selain kredit pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun sebelumnya dari 11,60% menjadi sebesar 9,71% dari total pendapatan bunga, terutama disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang tumbuh lebih tinggi dari pada pertumbuhan aktiva produktif non kredit dengan komposisi kredit dengan *yield* tinggi semakin meningkat.

Beban Bunga

Total beban bunga di tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp15,35 triliun dari angka sebesar Rp13,13 triliun di tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan volume rata-rata dana pihak ketiga ditahun 2013 sebagai konsekuensi dari pertumbuhan dana pihak ketiga terutama dalam bentuk tabungan. Selain itu, kenaikan beban bunga ini juga disebabkan oleh naiknya suku bunga simpanan yang tercermin dari kenaikan *cost of fund* (angka bank saja), yaitu dari 3,68% di tahun 2012 menjadi 3,71% di tahun 2013. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan BI Rate di sepanjang tahun 2013.

Tabel Rincian Beban Bunga

Komponen	2011		2012		2013	
	Rp juta	Komposisi	Rp juta	Komposisi	Rp juta	Komposisi
Giro	1.387.690	10,10%	1.478.777	11,27%	1.266.686	8,25%
Tabungan	2.887.704	21,02%	2.126.266	16,20%	2.255.230	14,69%
Deposito	7.556.843	55,01%	7.366.603	56,12%	9.435.407	61,45%
Lainnya*	1.905.035	13,87%	2.155.009	16,42%	2.397.490	15,61%
Total Beban Bunga	13.737.272		13.126.655		15.354.813	

* Termasuk beban Syariah

Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga bersih BRI di tahun 2013 mencapai Rp44,11 triliun naik dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp36,48 triliun. Peningkatan ini disumbang oleh naiknya outstanding kredit dan membaiknya NPL serta keberhasilan BRI memperbaiki komposisi dana murah yang semakin optimal. Dengan hasil tersebut, maka NIM BRI tahun 2013 semakin baik di kisaran 8,55%, dibandingkan angka 8,42% di tahun 2012.

Pendapatan Operasional Lainnya

Tabel Rincian Pendapatan Operasional Lainnya

Komponen	2011		2012		2013	
	Rp juta	Komposisi	Rp juta	Komposisi	Rp juta	Komposisi
Fee Based Income	3.368.821	58,32%	3.929.559	46,84%	4.862.438	58,24%
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukan	1.797.048	31,11%	2.258.387	26,92%	1.948.158	23,34%
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - Bersih	145.897	2,53%	56.041	0,67%	78.252	0,94%
Keuntungan selisih kurs - bersih	35.521	0,61%	428.800	5,11%	477.524	5,72%
Lain-lain	428.688	7,42%	1.716.945	20,46%	982.087	11,76%
Total Pendapatan Oprs Lainnya	5.775.975		8.389.732		8.348.459	

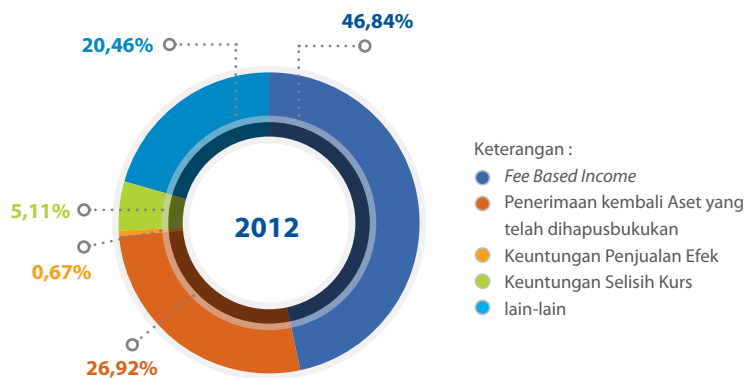
Tinjauan Keuangan

Konsistensi pelaksanaan program dalam penyelesaian kredit bermasalah membuat BRI mampu mencatatkan *recovery kredit* bermasalah sebesar **Rp1,95 triliun** pada tahun 2013

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,49% menjadi Rp8,35 triliun yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan lain-lain dari Rp1,72 triliun di tahun 2012 menjadi Rp982,1 miliar. Salah satu komponen di dalam pendapatan operasional lainnya yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah komponen *fee based income* yang naik 23,74% menjadi sebesar Rp4,86 triliun dari angka sebesar Rp3,93 triliun di tahun 2012. Pada tahun 2013, *fee based income* berkontribusi 58,24% terhadap total pendapatan operasional lain, dan 6,99% dari total pendapatan.

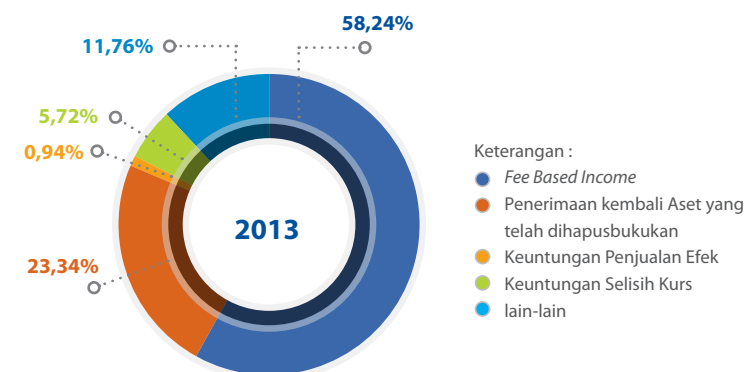
Komposisi Pendapatan Operasional Lainnya

(Dalam %)



Komposisi Pendapatan Operasional Lainnya

(Dalam %)



Di tahun 2013, seiring dengan konsistensi dalam melaksanakan program perbaikan kualitas aset, BRI memperoleh penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan hingga sebesar Rp1,95 triliun, sebagai hasil pelaksanaan program intensifikasi penyelesaian kredit bermasalah. Hasil tersebut sangat membanggakan, mengingat kondisi perekonomian domestik yang penuh tantangan di tahun 2013.

Selain itu, BRI juga berhasil membukukan keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi rekap pemerintah sebesar Rp78 miliar.

Tinjauan Keuangan

Sedangkan pendapatan lain-lain yang terdiri dari pembalikan cadangan masa persiapan pensiun, pendapatan denda, pendapatan pelunasan maju kredit, penerimaan biaya tolakan kliring dan lain-lain di akhir tahun 2013 mencapai angka sebesar Rp982 miliar.

Beban Operasional Lainnya

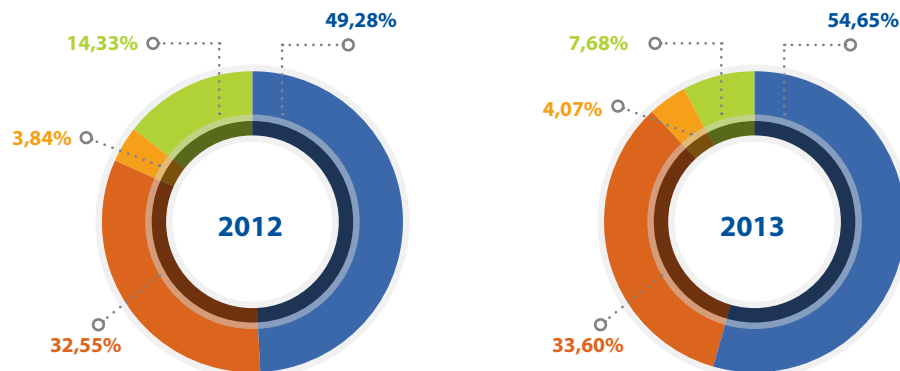
Tabel Rincian Beban Operasional Lainnya						
Komponen	2011		2012		2013	
	Rp juta	Komposisi	Rp juta	Komposisi	Rp juta	Komposisi
Tenaga Kerja dan Tunjangan	8.700.847	50,92%	9.605.547	49,28%	12.231.994	54,65%
Umum dan Administrasi	5.678.786	33,24%	6.343.661	32,55%	7.518.886	33,60%
Premi Program Penjaminan Pemerintah	624.057	3,65%	749.297	3,84%	911.957	4,07%
Lain-lain	2.081.937	12,19%	2.792.527	14,33%	1.717.941	7,68%
Total Beban Oprs Lainnya	17.085.627		19.491.032		22.380.778	

Beban operasional lain yang terdiri dari beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, premi program penjaminan pemerintah dan lain-lain meningkat 14,83% menjadi sebesar Rp22,38 triliun di tahun 2013 dari nilai sebesar Rp19,49 triliun di tahun 2012. Beberapa sub-akun yang menyebabkan peningkatan beban operasional tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya tenaga kerja meningkat sebesar 27,34% menjadi senilai Rp12,23 triliun terkait perubahan status pekerja dari tenaga kerja *outsourcing* menjadi pekerja kontrak maupun dari tenaga kerja kontrak menjadi pekerja tetap, serta sejalan dengan ekspansi unit kerja yang terus dilakukan sehingga aktivitas perekrutan masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan formasi unit kerja.

Komposisi Beban Operasional Lainnya

(Dalam %)



Keterangan :

- Tenaga Kerja dan Tunjangan
- Umum dan Administrasi
- Premi Program Penjaminan Pemerintah
- Lain-lain

Di samping itu, BRI juga menerapkan kebijakan pemberian insentif yang dikaitkan langsung dengan pencapaian kinerja dari masing-masing tenaga pemasar BRI. Perubahan kebijakan ini dilakukan sebagai penghargaan perusahaan terhadap pekerja dengan kinerja yang memuaskan.

Peningkatan biaya umum dan administrasi sebesar 18,53% menjadi senilai Rp7,52 triliun disebabkan oleh aktifitas penambahan jaringan layanan konvensional dan jaringan *e-channel* BRI yang membuat naiknya biaya perbaikan maupun pemeliharaan. (Lihat kembali uraian "Pengembangan Jaringan" pada bab Aspek Pemasaran")

Tinjauan Keuangan

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (beban CKPN)

BRI telah mencadangkan biaya atas kemungkinan terjadinya suatu resiko, terutama resiko kredit yaitu dalam Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Pada tahun 2013 nilai beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan mencapai Rp3,95 triliun, atau naik sebesar Rp1,28 triliun jika dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp2,67 triliun.

Kenaikan beban CKPN ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang penuh tantangan selama tahun 2013, yang secara tidak langsung akan meningkatkan tingkat risiko bisnis BRI sertaantisipasi menurunnya kualitas kredit dimasa mendatang.

Laba Operasional dan Laba sebelum Pajak

Keseluruhan hasil operasional tersebut membuat laba usaha BRI di tahun 2013 meningkat 15,19% menjadi sebesar Rp26,13 triliun dari nilai sebesar Rp22,68 triliun di tahun 2012. BRI juga memperoleh pendapatan non operasional bersih sebesar Rp1,78 triliun di tahun 2013 sehingga total nilai laba sebelum pajak adalah sebesar Rp27,91 triliun, naik 16,98% dari angka sebesar Rp23,86 triliun di tahun 2012.

Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No.36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 77 tanggal 21 November 2013 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan PMK No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" mengatur bahwa Perseroan Terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas

penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang ada.

Syarat perolehan fasilitas tersebut adalah Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Perhitungan pajak sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan yang diubah untuk keempat kalinya dengan UU No.36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 menyatakan bahwa tarif tunggal untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya adalah 25%.

Berdasarkan surat keterangan No.DE/I/2014-0098 tanggal 6 Januari 2014 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No.X.H.I-2 tanggal 6 Januari 2014 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2013) semua kriteria di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah terpenuhi. Sehingga untuk tahun fiskal 2010, 2011, 2012, dan 2013 dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan badan, BRI menggunakan tarif tunggal sebesar 20%.

Berdasarkan peraturan perpajakan tersebut, beban pajak BRI untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp6,56 triliun, naik 26,7% dari nilai sebesar Rp5,17 triliun di tahun 2012.

Laba Bersih

Setelah memperhitungkan pajak penghasilan, maka laba bersih BRI untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp21,35 triliun naik 14,27% dari laba bersih tahun 2012 yang sebesar Rp18,69 triliun. Sementara laba bersih per saham adalah sebesar Rp865,22.

Pendapatan Komprehensif

Penyajian Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak muncul setelah berlakunya PSAK No.1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2011. Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak terdiri dari:

1. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, untung sebesar Rp37,17 miliar.
2. Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekapitulasi pemerintah yang tersedia untuk dijual-neto dengan jumlah yang ditransfer ke laba rugi sehubungan dengan perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi rekap yang tersedia untuk dijual rugi sejumlah Rp1,97 triliun.
3. Pajak Penghasilan terkait pendapatan komprehensif lainnya sejumlah Rp491,62 miliar.

Total Laba Komprehensif

Dengan memperhitungkan pendapatan komprehensif tersebut, maka total laba komprehensif BRI untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp19,92 triliun, naik sebesar 6,73% dari posisi Rp18,66 triliun di tahun 2012.

Tinjauan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Aset

(dalam Rp juta)

Ringkasan Neraca	2011	2012	2013	Pertumbuhan	
				2011-2012	2012-2013
Kas	10.525.973	13.895.464	19.171.778	32,01%	37,97%
Giro Pada Bank Indonesia	33.040.418	42.524.126	40.718.495	28,70%	-4,25%
Giro dan Penempatan pd bank lain - netto	79.129.520	71.084.903	45.742.003	-10,17%	-35,65%
Surat berharga yng dimiliki - netto	48.129.383	56.622.173	66.039.800	17,65%	16,63%
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	8.996.026	4.315.616	4.511.419	-52,03%	4,54%
Kredit yang diberikan	294.514.972	362.006.543	448.344.856	22,92%	23,85%
CKPN Kredit -/-	(16.089.972)	(14.914.865)	(15.418.096)	-7,30%	3,37%
Penyertaan - netto	164.689	196.742	222.851	19,46%	13,27%
Aset tetap - netto	1.852.818	2.804.366	3.972.612	51,36%	41,66%
Aset lain-lain	9.635.457	12.801.722	12.877.208	32,86%	0,59%
Tagihan Derivatif - netto	17.818	28.850	4.981	61,91%	-82,73%
Tagihan Akseptasi -netto	1.692.176	4.786.121	3.679.684	182,84%	-23,12%
Aset Pajak Tangguhan	2.631.958	2.024.911	2.188.506	-23,06%	8,08%
Aset Lain	5.293.505	5.961.840	7.004.037	12,63%	17,48%
Total Aset	469.899.284	551.336.790	626.182.926	17,33%	13,58%

Aset BRI selama tahun pelaporan menunjukkan peningkatan 13,58% menjadi sebesar Rp626,18 triliun dari angka sebesar Rp551,34 triliun di tahun sebelumnya. Kontributor utama peningkatan aset tersebut adalah peningkatan outstanding pinjaman yang diberikan yang tumbuh 23,85% menjadi sebesar Rp448,34 triliun dari angka Rp362,01 triliun di tahun sebelumnya. Pinjaman merupakan komponen utama dari aset BRI dengan proporsi pada akhir tahun 2013 adalah sebesar 71,60% dari total aset Perseroan.

Komposisi Aset

Kredit yang diberikan

Seperti yang diuraikan di atas, pada tahun 2013, BRI berhasil meningkatkan outstanding kredit. Peningkatan tersebut termasuk pembiayaan syariah yang naik sebesar 24,72% menjadi senilai Rp14,03 triliun. Sebagai bank yang memiliki fokus bisnis pada segmen Mikro, Kecil, dan Menengah (MKM), BRI memiliki proporsi kredit mikro, ritel, dan menengah yang dominan yaitu mencapai 72,29% dari total portofolio kredit. Sisanya sebesar 24,58% disalurkan pada sektor korporasi yang meliputi perusahaan BUMN maupun non BUMN dan sebesar 3,13% disalurkan pada pembiayaan dan piutang syariah melalui anak perusahaan (BRI Syariah).

(dalam Rp juta)

Kredit yang Diberikan – Menurut Mata Uang					
Segmen	2011	2012	2013	Pertumbuhan	
				2011-2012	2012-2013
Mikro					
Rupiah	98.079.430	115.494.852	142.266.742	17,76%	23,18%
Valas					
Ritel					
Rupiah	125.789.288	139.723.181	171.286.336	11,08%	22,59%
Valas	4.703.570	6.650.545	10.568.002	41,39%	58,90%
Korporasi					
Rupiah	35.322.832	58.565.193	72.495.929	65,80%	23,79%
Valas	21.511.137	30.324.491	37.699.457	40,97%	24,32%
Pembiayaan dan Piutang Syariah	9.108.715	11.248.281	14.028.390	23,49%	24,72%
Total Kredit					

Tinjauan Keuangan

(dalam Rp juta)

Kredit yang Diberikan – Menurut Mata Uang					
Segmen	2011	2012	2013	Pertumbuhan	
				2011-2012	2012-2013
Rupiah	268.300.265	325.031.507	400.077.397	21,14%	23,09%
Valas	26.214.707	36.975.036	48.267.459	41,05%	30,54%

Kualitas Kredit/NPL

Program konsolidasi, upaya pemantauan kualitas kredit dan penerapan prosedur pemberian kredit yang lebih berhati-hati membuat jumlah kredit lancar meningkat 24,32% dari Rp335,51 triliun di tahun 2012 menjadi Rp417,11 triliun di tahun 2013. Kredit dengan kategori Dalam Perhatian Khusus juga mengalami peningkatan sebesar 20,50% dari Rp19,86 triliun pada Desember 2012 menjadi Rp23,93 triliun pada Desember 2013.

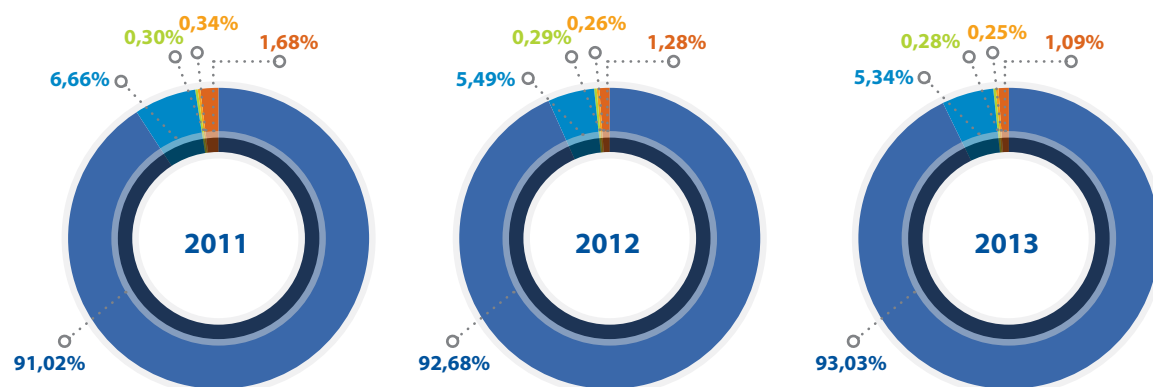
Namun sebagaimana disampaikan sebelumnya, kondisi perekonomian tahun 2013 kurang kondusif sehingga membuat risiko kredit meningkat. Untuk mengantisipasi menurunnya kualitas kredit dimasa mendatang, BRI akan konsisten meningkatkan kualitas penanganan kredit bermasalah, memperbaiki perbaikan sistem pemberian dan administrasi kredit serta mengintensifkan proses monitoring yang telah terbukti memberi hasil positif.

(dalam Rp juta)

Kualitas Kredit dan Pembiayaan Syariah			
	2011	2012	2013
Total Kredit dan Pembiayaan Syariah Performing	287.675.177	355.369.649	441.045.020
Total Kredit dan Pembiayaan Syariah Non Performing	6.839.793	6.636.895	7.299.835
Total Kredit dan Pembiayaan Syariah	294.514.970	362.006.544	448.344.856
NPL (Gross)	2,32%	1,83%	1,63%
NPL (Net)	0,42%	0,38%	0,36%

Komposisi Kredit berdasarkan kolektibilitas

(Dalam %)



Keterangan :

- Lancar
- Dalam perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

Penghapusan Aset Kredit dan Perolehan Kembali

Selama tahun pelaporan, BRI melakukan penghapusbukuan kredit sebesar Rp4,32 triliun, lebih rendah dibandingkan posisi tahun 2012 yang sebesar Rp4,45 triliun, dan menerima kembali kredit yang telah dihapusbukuan (*recovery*) sebesar Rp1,95 triliun. Turunnya angka penghapusbukuan adalah hasil pelaksanaan program konsolidasi yang dijalankan secara intensif.

Tinjauan Keuangan

Kas dan Giro pada BI

Posisi kas di akhir tahun 2013 naik 37,97% dari Rp13,90 triliun menjadi sebesar Rp19,17 triliun, sebagai akibat bertambahnya jumlah jaringan kantor cabang pembantu, kantor kas, BRI Unit, Kiosk BRI, TerasBRI, TerasBRI Keliling, maupun jumlah ATM. Giro pada BI turun 4,25% dari Rp42,52 triliun di tahun 2012 menjadi Rp40,72 triliun di tahun 2013. Walaupun mengalami penurunan, saldo giro BRI pada BI tersebut telah memenuhi aturan BI mengenai Giro Wajib Minimum (GWM).

Saldo giro BRI di BI tersebut merepresentasikan GWM utama, dan GWM valas yang tercatat di Bank Indonesia sebesar 8,02% dan 8,00% (entitas induk).

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain turun 35,65% dari Rp71,08 triliun pada akhir tahun 2012 menjadi Rp45,74 triliun di tahun 2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya penempatan pada BI sebesar Rp36,02 triliun.

Efek-efek

Untuk mengoptimalkan kelebihan dana yang tersedia di Bank dan mengelola likuiditas, manajemen treasury melakukan penempatan dana pada instrumen keuangan yang dapat menghasilkan pendapatan bunga. Penempatan dana tersebut mengalami peningkatan sebesar 16,63% menjadi Rp66,04 triliun di tahun 2013 dari Rp56,62 triliun di tahun sebelumnya.

Obligasi Rekap Pemerintah

Hingga akhir tahun 2013 BRI memiliki obligasi rekap Pemerintah sebesar Rp4,51 triliun, naik 4,54% dari posisi akhir tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp4,32 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pembelian Obligasi Rekap Pemerintah yang masuk kategori nilai wajar melalui laporan laba rugi sebesar Rp199 miliar.

(dalam Rp miliar)

Obligasi Rekap Pemerintah Berdasarkan Suku Bunga			
Jenis Suku Bunga	2011	2012	2013
Suku Bunga Tetap (<i>Fixed Rate</i>)	4.682,33	0,00	0,00
Suku Bunga Mengambang (<i>Variable Rate</i>)	4.313,73	4.315,62	4.511,42
Total	8.996,06	4.315,62	4.511,42

Penyertaan Saham

Total penyertaan saham BRI di tahun 2013 (*nett*) sebesar Rp222,85 miliar, naik 13,27% dari posisi akhir tahun 2012 yang sebesar Rp196,74 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan nilai tercatat PT BTMU – BRI Finance dari Rp195,33 miliar di tahun 2012 menjadi sebesar Rp220,91 miliar di tahun 2013 sebagai hasil akumulasi atas bagian laba netto Perusahaan PT BTMU – BRI Finance tersebut.

Rincian penyertaan per 31 Desember 2013, adalah:

1. PT BTMU-BRI Finance (dahulu PT UFJ BRI Finance): Rp220,91 miliar
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia: Rp900 juta
3. PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia: Rp536 juta
4. PT Perneringkat Efek Indonesia: Rp210 juta
5. PT BPR Toeloengeredjo Dasa Nusantara: Rp77 juta
6. PT BPR Tjoekir Dasa Nusantara: Rp77 juta
7. PT BPR Toelangan Dasa Nusantara: Rp66 juta
8. PT BPR Cinta Manis Agroloka: Rp35 juta
9. PT BPR Bungamayang Agroloka: Rp23 juta
10. PT Aplikanusa Lintasarta: Rp20 juta

Aset Tetap

Sejalan dengan ekspansi jaringan kerja dan peningkatan kualitas sistem operasi berbasis teknologi yang dilakukan oleh BRI, jumlah aset tetap mengalami peningkatan hingga sebesar 22,15% dari nilai sebesar Rp7,22 triliun menjadi sebesar Rp8,82 triliun di akhir tahun 2013.

Tinjauan Keuangan

Aset Lain-lain

Aset lain-lain naik 0,59% menjadi sebesar Rp12,88 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,80 triliun. Pos ini terdiri dari tagihan derivatif, tagihan akseptasi, aset pajak tangguhan, dan aset lainnya. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya pos Tagihan Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp164 miliar, dan aset lain sebesar Rp1,04 triliun.

Liabilitas

Komponen	2011		2012		2013	
	Rp juta	Komposisi	Rp juta	Komposisi	Rp juta	Komposisi
Simpanan Nasabah						
Giro	76.778.729	18,28%	79.723.114	16,39%	79.336.951	14,51%
Tabungan	154.132.973	36,69%	184.717.349	37,97%	212.996.625	38,95%
Deposito	153.352.643	36,51%	185.725.920	38,18%	211.947.806	38,76%
Liabilitas segera	3.961.640	0,94%	4.911.852	1,01%	5.065.527	0,93%
Simpanan dari bank lain	4.024.163	0,96%	2.778.618	0,57%	3.691.220	0,67%
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	102.681	0,02%	-	0,00%	-	0,00%
Pinjaman diterima	13.097.916	3,12%	10.888.755	2,24%	9.084.913	1,66%
Pinjaman Subordinasi	2.136.288	0,51%	2.116.562	0,44%	2.097.024	0,38%
Liabilitas lainnya	12.491.922	2,97%	15.592.841	3,21%	22.635.438	4,14%
Total Liabilitas	420.078.955		486.455.011		546.855.504	

Pertumbuhan aset BRI sebesar 13,58% dapat terjadi berkat adanya kenaikan beberapa akun liabilitas dan kenaikan komponen ekuitas dari akun laba ditahan. Peningkatan terbesar akun liabilitas berasal dari komponen dana pihak ketiga (DPK) 12,02%. Seperti tampak pada tabel di atas, porsi DPK dalam komponen liabilitas BRI sangat dominan, mencapai kisaran 92,21% dari total liabilitas di tahun 2013.

Peningkatan pos DPK tersebut merupakan bukti keberhasilan strategi pemasaran BRI dalam melakukan penghimpunan DPK, terutama dengan adanya dukungan jaringan kerja & e-channel BRI. Selain itu peningkatan kualitas layanan telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BRI.

Dana Pihak Ketiga

DPK merupakan dana yang dihimpun dari pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito termasuk produk syariah seperti Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Berjangka Mudharabah.

Pada tahun 2013 BRI berhasil meningkatkan simpanan sebesar 12,02% mencapai Rp504,28 triliun. Selain itu, BRI juga berhasil mempertahankan komposisi dana murah (Giro dan Tabungan) dan dana mahal pada kisaran 58% dan 42%.

Per Desember 2013 pos tabungan mencapai Rp213,00 triliun atau naik 15,31% dari tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp184,72 triliun. Komposisi tabungan terhadap total Dana Pihak Ketiga berada di kisaran 42,24%.

Peningkatan komposisi tabungan ini menunjukkan keberhasilan sejumlah program promosi tabungan dan semakin beragam serta berkembangnya fitur-fitur produk tabungan yang menarik minat masyarakat untuk menabung di Bank BRI.

Liabilitas Segera

Pos ini merupakan liabilitas BRI kepada pihak lain yang harus segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa transaksi yang masuk ke dalam pos ini adalah titipan *advance payment*, titipan setoran pajak, titipan asuransi, titipan kartu kredit, titipan pinjaman kelolaan, titipan setoran kliring, titipan pengiriman uang, wesel dan cek perjalanan BRI, dan lain-lain.

Tinjauan Keuangan

Di akhir tahun 2013, BRI mencatat liabilitas segera sebesar Rp5,07 triliun, naik 3,13% dibanding posisi Desember 2012 yang sebesar Rp4,91 triliun. Kenaikan terbesar berasal dari pos titipan *advance payment* yang mencapai angka sebesar Rp1,39 triliun pada Desember 2013 dibandingkan dengan nilai per Desember 2012 yang sebesar Rp897,63 miliar.

Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Lainnya

Simpanan dari bank lain dan lembaga lainnya terdiri dari giro, tabungan, deposito, *interbank call money* maupun *deposit on call*. Pos ini digunakan untuk transaksi antar bank dalam rangka operasional dan manajemen likuiditas. Posisi simpanan dari bank lain dan lembaga lainnya di akhir tahun 2013 adalah sebesar Rp3,69 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,78 triliun.

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima antara lain digunakan untuk membiayai kegiatan umum BRI dan kebutuhan *trade finance*. Pos ini terdiri atas pinjaman dari Bank Indonesia (pinjaman likuiditas dan pinjaman untuk investasi aset tetap), pinjaman dari entitas dan Lembaga Pemerintah, pinjaman bilateral, dan pinjaman lainnya.

Saldo pinjaman yang diterima per akhir tahun 2013 adalah sebesar Rp9,08 triliun, turun 16,57% dibanding posisi 31 Desember 2012 yang sebesar Rp10,89 triliun. Penyebab penurunan adalah jatuh temponya pinjaman bilateral dalam mata uang asing sebesar Rp1,93 triliun.

Pinjaman Subordinasi

Total pinjaman subordinasi posisi 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2,10 triliun yang terdiri dari Obligasi Subordinasi II sebesar Rp2 triliun dan pinjaman *two step loan* sebesar Rp98,97 miliar.

Obligasi subordinasi II ini diterbitkan oleh BRI pada tanggal 22 Desember 2009, dengan nilai Rp2 triliun, dengan jangka waktu 5 tahun dan skema bunga tetap sebesar 10,95% serta telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penerbitan obligasi subordinasi II tersebut diperuntukkan sebagai modal pelengkap (tier II capital) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan seluruh dana yang diperoleh telah dimanfaatkan untuk mendukung ekspansi kredit sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Untuk pinjaman *two step loan*, terjadi penurunan pokok pinjaman dari total outstanding sebesar Rp120,30 miliar di akhir tahun 2012 menjadi sebesar Rp98,97 miliar pada tahun 2013.

Liabilitas Lainnya

Liabilitas lainnya terdiri dari liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, efek-efek yang diterbitkan, hutang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, beban bunga yang masih harus dibayar, estimasi imbalan kerja, dan liabilitas lain-lain. Per akhir tahun 2013, nilai liabilitas lainnya naik 45,17% dari Rp15,59 triliun pada akhir tahun 2012 menjadi Rp22,64 triliun.

Kenaikan ini disebabkan pada tanggal 28 Maret 2013 BRI menerbitkan surat utang dengan jumlah nominal USD500.000.000 (nilai tercatat per 31 Desember 2013 sebesar Rp6,02 triliun) yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018 dengan tingkat suku bunga sebesar 2,95% per tahun.

BRI berhasil mempertahankan mayoritas komposisi dana murah pada kisaran **60%** dari total Dana Pihak Ketiga.

Tinjauan Keuangan

Ekuitas

(dalam Rp juta)

Komponen	2011	2012	2013	Pertumbuhan	
				2011-2012	2012-2013
Modal Saham	6.167.291	6.167.291	6.167.291	0,00%	0,00%
Tambahan Modal disetor - bersih	2.773.858	2.773.858	2.773.858	0,00%	0,00%
Selisih kurs karena penjabaran lap keu dalam mata uang asing	49.153	44.912	82.083	-8,63%	82,76%
Opsi Saham	-	-	-	-	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek2 dan obligasi Pemerintah yg tersedia untuk dijual -bersih	765.004	740.459	(727.644)	-3,21%	-198,27%
Total saldo laba	40.019.254	55.080.238	70.868.083	37,63%	28,66%
Total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Induk	49.774.560	64.806.758	79.163.671	30,20%	22,15%
Kepentingan non penegndali	45.769	75.021	163.751	63,91%	118,27%
Total Ekuitas	49.820.329	64.881.779	79.327.422	30,23%	22,26%

Pada tahun 2013, total ekuitas BRI meningkat sebesar 22,26% lebih tinggi dari posisi tahun 2012 yang sebesar Rp64,88 triliun, terutama didorong oleh adanya peningkatan yang signifikan dari saldo laba sebesar 28,66% dari Rp55,08 triliun di tahun 2012 menjadi Rp70,87 triliun di tahun 2013. Peningkatan saldo laba tersebut berasal dari laba bersih periode berjalan yang meningkat 14,27% menjadi sebesar Rp21,35 triliun.

Permodalan

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan guna mendukung pertumbuhan aset, yang terdiri dari aset produktif (kredit, surat berharga, dan sebagainya) maupun aset non produktif (infrastruktur, aset lain-lain dan sebagainya) bank mengandalkan dua komponen utama, yakni ekuitas dan pinjaman.

BRI telah menerapkan Basel II dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Berdasarkan perhitungan tersebut BRI mencatat ATMR setelah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah sebesar Rp408,86 triliun, atau 25,67% di atas angka tahun sebelumnya. Untuk terus mendukung aktivitas sebagai salah satu kreditur utama di segmen UMKM, BRI senantiasa memastikan struktur permodalan yang optimal untuk

mempertahankan pertumbuhannya di tengah potensi pasar yang terus berkembang, dengan menetapkan batasan minimum modal yang harus dijaga.

Untuk memenuhi modal minimum, yaitu modal Tier I dan total KPMM, maka BRI menetapkan tingkat buffer modal yang dibutuhkan guna memastikan agar semua risiko yang diidentifikasi telah diperhitungkan sehingga BRI akan mampu bertahan di bawah tekanan usaha baik karena peningkatan persaingan maupun karena perubahan lingkungan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan sumber pendanaan seperti simpanan nasabah, dana dari pasar konvensional, dan ekuitas.

Pada akhir tahun 2013, 87,33% dari aset BRI didanai oleh liabilitas sedangkan sisanya sebesar 12,67% didanai oleh ekuitas. Pada tahun 2013 tersebut, total aset BRI tumbuh 13,58%, total liabilitas tumbuh sedikit lebih rendah yakni sebesar 12,42%. Namun demikian, kurangnya pertumbuhan di sisi liabilitas tersebut dikompensasi oleh pertumbuhan total ekuitas yang naik 22,26%. Kenaikan ekuitas terutama di dorong oleh peningkatan saldo laba sebesar 28,66%. Mengingat pentingnya struktur modal dalam mendukung ekspansi usaha di tahun-tahun mendatang, BRI bertekad mengelola struktur modal yang kuat dan sehat,

yang akan mampu mendukung pertumbuhan usaha dengan maksimal.

Kebijakan Struktur Modal

Bank wajib menghitung Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio (CAR) berdasarkan peraturan Bank Indonesia terbaru No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, BRI memiliki kebijakan untuk menjaga struktur modal yang mampu mengantisipasi seluruh resiko-resiko utama yang terjadi di dalam pengelolaan bank, yaitu resiko pasar, resiko kredit, dan resiko operasional.

Kebijakan manajemen modal BRI juga ditujukan untuk mempertahankan struktur modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dimasa depan, mempertahankan kepercayaan investor pasar modal, nasabah dan kepercayaan pasar secara keseluruhan. Oleh karenanya, dalam pengelolaan modal, BRI juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengembalian modal yang optimal kepada para pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* dan keuntungan serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang kuat.

BRI memperhitungkan kecukupan modal menggunakan indikator Capital Adequacy Ratio (CAR), yang merupakan rasio kecukupan

Tinjauan Keuangan

modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko serta memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. BRI mencatat kenaikan CAR dari 16,95% di tahun 2012 menjadi 16,99% di tahun 2013. Kenaikan CAR BRI antara lain didukung oleh tambahan modal yang berasal dari perolehan laba yang cukup tinggi.

(dalam Rp miliar)

Posisi Kecukupan Modal BRI	Angka Bank Saja			
	Uraian	2011	2012	2013
Modal Inti		38.215	51.593	65.964
Modal Pelengkap		3.601	3.541	3.508
Penyertaan		-	-	-
Total Modal Tersedia		41.816	55.134	69.472
Total ATMR kredit dan pasar		226.605	261.145	333.457
Total ATMR kredit dan operasional		277.303	323.698	406.563
Total ATMR kredit, pasar dan operasional		279.603	325.352	408.858
Rasio Kecukupan Modal untuk risiko kredit dan risiko pasar		18,45%	21,11%	20,83%
Rasio Kecukupan Modal untuk risiko kredit dan risiko operasional		15,08%	17,03%	17,09%
Rasio Kecukupan Modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional		14,96%	16,95%	16,99%

Sesuai dengan Peraturan BI, modal bank terdiri atas:

1. Modal Inti
Merupakan modal bank yang terdiri dari: modal saham yang disetor, cadangan yang diungkapkan sebagai: modal sumbangan, tambahan modal disetor, laba ditahan (termasuk saldo laba yang dicadangkan untuk tujuan tertentu), penurunan nilai atas instrument keuangan yang tersedia untuk dijual, dan selisih yang terjadi antara laporan keuangan kantor cabang internasional. Seperti tampak pada tabel di atas, Modal Inti BRI di tahun 2013 mencapai Rp65,96 triliun, naik 27,85% dari posisi Rp51,59 triliun di tahun sebelumnya, karena adanya tambahan modal dari komponen laba ditahan.
2. Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)
Modal pelengkap mengacu pada modal bank yang terdiri dari: penyisihan penilaian kembali aktiva tetap, penyisihan umum untuk provisi penghapusan aktiva produktif, pinjaman sub-ordinasi, dan kenaikan nilai instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual. Total modal pelengkap BRI di tahun 2013 turun 0,92% menjadi sebesar Rp3,51 triliun.
3. Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Resiko Pasar
Pada tahun 2013 dan tahun 2012, BRI memiliki modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp69,47 triliun dan Rp55,13 triliun. BRI tidak memiliki modal tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi resiko pasar.

Apabila dilihat dari modal pelengkap – Tier 2 Capital BRI adalah sebesar Rp3,51 triliun pada Desember 2013, atau 5,32% dari total modal inti yang tercatat sebesar Rp65,96 triliun. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012, komposisi modal pelengkap adalah maksimal 100% dari modal inti. Maka dengan komposisi modal pelengkap sebesar 5,32%, BRI memiliki ruang yang cukup besar untuk memperkuat modalnya, seperti melalui penerbitan obligasi sub-ordinasi.

Arus Kas

(dalam Rp miliar)

Arus Kas	2011	2012	2013
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) dari Kegiatan Operasi	15.668	(1.996)	4.399
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) dari Kegiatan Investasi	(10.670)	(5.714)	(12.377)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) dari Kegiatan Pendanaan	466	(5.951)	(2.579)

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Di tahun 2013, total arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah sebesar Rp4,40 triliun. Arus kas masuk terutama berasal dari penerimaan bunga, hasil investasi, provisi dan komisi, serta pendapatan syariah sebesar Rp59,35 triliun, penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan sebesar Rp1,96 triliun, pendapatan operasional lainnya sebesar Rp6,84 triliun, dan juga dipengaruhi oleh kenaikan tabungan dan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp27,40 triliun dan 24,32 triliun.

Tinjauan Keuangan

Arus kas masuk tersebut diimbangi oleh arus kas keluar yang terutama digunakan untuk pembayaran bunga, beban syariah, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp14,88 triliun, beban operasional lainnya sebesar Rp25,23 triliun, dan juga dipengaruhi oleh kenaikan kredit yang diberikan sebesar Rp87,88 triliun.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Sementara arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di tahun 2013 adalah sebesar Rp12,38 triliun, terutama berasal dari kenaikan efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp5,65 triliun

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Pada tahun 2013, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan adalah sebesar Rp2,58 triliun yang berasal dari pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp1,80 triliun dan pembagian laba untuk dividen dan PKBL sebesar Rp5,56 triliun. Arus kas keluar tersebut diimbangi oleh arus kas masuk yang berasal dari penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp4,80 triliun.

Rasio Keuangan*

Uraian	2011	2012	2013
Rasio Kinerja			
1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	14,96%	16,95%	16,99%
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,79%	1,19%	1,06%
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,85%	1,46%	1,28%
4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	4,51%	3,43%	2,90%
5. Return on Asset (ROA)	4,93%	5,15%	5,03%
6. Return on Equity (ROE)	42,49%	38,66%	34,11%
7. Net Interest Margin (NIM)	9,58%	8,42%	8,55%
8. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	66,69%	59,93%	60,58%
9. Loan to Deposit Ratio (LDR)	76,20%	79,85%	88,54%
Kepatuhan (Compliance)			
1. a. Persentase pelanggaran BMPK			
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
b. Persentase pelampauan BMPK			
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
2. Giro Wajib Minimum			
a. GWM Utama Rupiah	9,33%	10,64%	8,02%
b. GWM Valuta Asing	8,00%	8,17%	8,00%
3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	5,49%	3,00%	3,15%
CoF	4,70%	3,68%	3,71%
CER	41,17%	43,11%	42,13%

* angka bank saja

Kemampuan Membayar Kewajiban

Kemampuan bank dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, dicerminkan oleh perhitungan rasio Solvabilitas dan Kolektibilitas, yang terdiri dari Rasio Kecukupan Modal, Rasio Kolektibilitas berikut serta Rasio Likuiditas.

- Rasio Kecukupan Modal
Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, rasio kecukupan modal BRI adalah sebesar 16,99% naik dari angka sebesar 16,95% di tahun 2012. Hal ini menunjukkan kemampuan BRI menghasilkan laba yang tinggi sehingga modal inti meningkat 27,85% yang pada akhirnya meningkatkan rasio CAR pada Desember 2013.

Tinjauan Keuangan

- Rasio Kredit Bermasalah dan Pengelolaan Tingkat Kolektibilitas
Rasio NPL tahun 2013 berhasil diturunkan menjadi sebesar 1,63% dari 1,83% di tahun 2011 hal ini menunjukkan bahwa upaya manajemen dalam mengelola tingkat kolektibilitas dan menjaga kualitas kredit telah memberikan hasil positif.
- Likuiditas
 - *Loan to Deposit Ratio (LDR)*
Selama tahun 2013, LDR BRI relatif terjaga pada target internal BRI, yaitu antara 80% - 90%. Pada akhir tahun 2013, tercatat rasio LDR adalah sebesar 88,54%, naik dari posisi sebesar 79,85% di tahun 2012 lalu. Kenaikan LDR ini sebagai konsekuensi ekspansi kredit yang dilakukan BRI dan kondisi likuiditas perbankan yang ketat selama tahun 2013.
- Profitabilitas
 - *Net Interest Margin (NIM)*
BRI berhasil memperoleh level margin pendapatan bunga bersih sebesar 8,55%. Dengan level NIM tersebut, BRI merupakan bank papan atas Indonesia dengan tingkat profitabilitas tinggi.
 - Rentabilitas
Pada tahun 2013, Return on Asset BRI stabil sebesar 5,15%. Sedangkan Return on Equity yang merupakan cerminan dari imbal hasil kepada pemegang saham dapat dipertahankan di level 34,11%, salah satu yang tertinggi di Industri perbankan
- Rasio Efisiensi
 - *Cost Efficiency Ratio (CER)*
Rasio CER sebesar 42,13% di tahun 2013 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 43,11% menunjukkan keberhasilan BRI dalam menetapkan strategi efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Peningkatan kredit dan perluasan operasional berhasil diimbangi dengan peningkatan peran TI dan kompetensi SDM. Oleh karenanya sejalan dengan meningkatnya pendapatan bunga akibat tumbuhnya pinjaman, biaya meningkat secara proporsional dan terkontrol dengan baik.
 - Rasio beban operasional terhadap pendapatan (BOPO)
Rasio BOPO sebesar 60,58% ditahun 2013 yang relatif sama dengan tahun 2012 merupakan wujud keberhasilan BRI dalam mempertahankan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional.

Belanja Barang Modal

Sampai dengan tahun 2013, BRI telah mempunyai lebih dari 9.800 unit kerja (Lihat juga uraian "Profil Perusahaan" dan "Aspek Pemasaran") sebagai bagian dari realisasi jaringan layanan di seluruh Indonesia. Untuk menambah infrastruktur pendukung tersebut, BRI telah melakukan investasi dana belanja barang modal senilai Rp1,95 triliun (lihat juga uraian "Aset Tetap").

(dalam Rp miliar)

Belanja Modal	2011	2012	2013
Tanah dan Bangunan	209.875	233.031	402.571
Meubelair dan Inventaris	143.403	78.743	116.409
Kendaraan	128.224	216.977	694.558
Komputer dan perangkat lunak	168.472	916.539	734.447
Leasing	-	-	-
Total	649.974	1.445.290	1.947.985

Ikatan Material Untuk Belanja Barang Modal

Pada tahun 2013, terkait dengan belanja modal, BRI telah melakukan beberapa pengikatan material, yang sebagian besar dilakukan dalam mata uang Rupiah, sehingga terdapat risiko yang minimal terkait dengan fluktuasi mata uang. Tujuan pengikatan material untuk modal yang telah dilakukan adalah:

1. Proyek pembangunan gedung kantor senilai Rp43.783,93 juta
2. Pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua senilai Rp26.791,34 juta
3. Pengembangan infrastruktur TI dan e-Banking senilai Rp17.280,00 juta

Sumber pendanaan atas belanja modal tersebut adalah saldo laba dari kegiatan operasional di tahun sebelumnya serta cadangan tujuan yang telah disisihkan dari laba bersih tahun-tahun buku sebelumnya.

Informasi Keuangan Lainnya

Pencapaian Target 2013*

Perbandingan Target dan Realisasi			
	Target 2013	Pencapaian 2013	Keterangan
Pertumbuhan Kredit	Kredit tumbuh 22% - 24%	Kredit tumbuh 23,7%	Tercapai
Kualitas Pinjaman	NPL tetap terjaga pada level 2%	NPL tercatat 1,55%	Tercapai
Komposisi Dana Murah	Komposisi Dana Murah terjaga pada kisaran 60%	Komposisi Dana Murah sekitar 60% (59,2%)	Tercapai
Rasio Pinjaman terhadap Dana (Loan to Deposit Ratio (LDR))	Posisi LDR dijaga pada kisaran 80% - 90%	Posisi LDR adalah 88,54%	Tercapai
Pertumbuhan Biaya Operasional	Biaya operasional ditargetkan meningkat 15%	Biaya operasional meningkat 14,4%	Tercapai
Pertumbuhan laba bersih	Pertumbuhan laba bersih pada 10% - 15%	Laba bersih tumbuh 14,2%	Tercapai

* angka bank saja

Secara umum, pada tahun 2013, BRI (angka bank saja) telah menunjukkan kinerja yang memuaskan, terlihat pada beberapa pencapaian kinerja kunci sebagai berikut:

1. Pertumbuhan kredit BRI telah mencapai target yang ditentukan, yaitu 23,7%, bahkan berada di atas pertumbuhan kredit industri perbankan Indonesia, yang tercatat sebesar 21,60% pada tahun 2013.
2. Dengan pertumbuhan kredit yang cukup tinggi, BRI tetap berhasil menjaga kualitas kreditnya. Tercatat NPL turun dari 1,78% di tahun 2012 menjadi 1,55% di tahun 2013.
3. Rasio kredit yang disalurkan terhadap dana yang berhasil dihimpun BRI atau LDR tercatat sebesar 88,54%, berada pada kisaran LDR yang diinginkan BRI, yaitu antara 80% - 90%
4. Biaya operasional yang meningkat 14,4%, berada di bawah target sebesar 15%, menunjukkan BRI tetap mampu menjaga efisiensi kegiatan operasional usahanya.
5. Dari ekspansi bisnis yang telah dilakukan BRI serta efisiensi operasional yang tetap terjaga, laba bersih BRI mampu tumbuh 14,2% di tahun 2013, mencapai Rp 21,16 Triliun.

Target 2014

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia, infrastruktur BRI yang telah terpasang, baik berupa jaringan kerja, sistem operasi dan pekerja BRI serta jumlah nasabah BRI yang sangat besar ataupun jumlah pegawai BRI maka untuk tahun 2014, BRI telah menetapkan strategi dan target pertumbuhan sebagai berikut:

1. BRI akan melakukan pertumbuhan kredit yang berfokus pada kredit dengan *yield* yang tinggi
2. Kualitas kredit juga akan tetap dijaga
3. BRI juga akan terus meningkatkan porsi dana murah
4. Meningkatkan pendapatan alternatif, yaitu *fee based income*
5. Peningkatan efisiensi operasional

Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen dan kontinjensi yang dimiliki BRI berhubungan dengan penyediaan dana, kontrak pengadaan barang, masalah kredit dana masalah hukum lainnya.

Pada tahun 2013 terdapat kenaikan komitmen neto sebesar 12,01% dibandingkan posisi tahun 2012 yang disebabkan oleh peningkatan *Letter of Credit*, transaksi mata uang asing dan aktivitas pemberian kredit. Sedangkan kontinjensi neto mengalami kenaikan sebesar 31,88% dari posisi tahun 2012. Hal ini disebabkan kenaikan garansi yang diterbitkan baik dalam bentuk *standby L/C* maupun garansi bank. Uraian detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan 42 dari Laporan Keuangan Audit Konsolidasian.

(Dalam Rp Juta)

Tabel Komitmen dan Kontinjensi yang Mempunyai Risiko Kredit Per 31 Desember 2012 dan 2013 *)		
	31 Desember 2012	31 Desember 2013
Komitmen		
Tagihan Komitmen	-	-
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	896.288	1.180.490
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	75.649.401	79.707.332
L/C yang tidak dapat dibatalkan	12.231.900	18.626.470
Penjualan spot dan mata uang asing	558.975	937.090
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	97.225	72.679
Total	88.537.501	99.343.571
Komitmen - neto	(87.641.213)	(98.163.081)
Kontinjensi		
Tagihan kontinjensi		
Tagihan bunga dalam penyelesaian	221.217	58.203
Liabilitas Kontinjensi		
Standby LC	6.158.676	6.656.160
Garansi Bank	6.103.142	9.236.021
Lainnya	-	45.322
	12.261.818	15.937.503
Kontinjensi - neto	(12.040.601)	(15.879.300)
*Angka konsolidasi		

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, BRI tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi).

Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai

BRI melakukan transaksi lindung nilai yang dilakukan sebagai bagian aktivitas manajemen risiko untuk mengamankan portofolio aset berdenominasi mata uang asing. Selain itu, BRI tidak menggunakan atau menerbitkan instrumen derivatif untuk tujuan perdagangan.

Dampak Perubahan Suku Bunga Terhadap Kinerja Bank

Aset dan liabilitas yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Terhadap perubahan suku bunga tersebut, Direksi dan Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola serta mengendalikan tingkat suku bunga dengan mempertimbangan *risk appetite* bank dan target pencapaian kinerja keuangan. Dalam wacana tersebut, Direksi dan Manajemen melakukan analisis tingkat sensitivitas kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada kinerja bank. (Lihat juga catatan 38 dari Laporan Keuangan Audit Konsolidasian)

Selama kurun waktu tahun 2013 Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI rate hingga 175 bps dari 5,75% menjadi 7,50% sebagai respon terhadap kenaikan inflasi dan defisit transaksi berjalan. Kenaikan BI rate tersebut membuat BRI meningkatkan suku bunga simpanan maupun pinjaman yang berdampak terhadap perolehan pendapatan bunga di tahun 2013. Dengan pengendalian suku bunga dan optimalisasi komposisi asset dan liabilitas, BRI mampu meningkatkan pendapatan bunga bersih sebesar 20,9% di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012.

Informasi Keuangan Lainnya

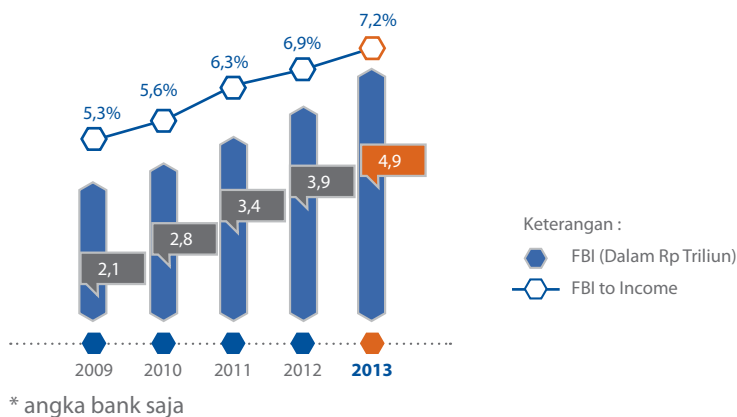
Upaya Meningkatkan Perolehan Fee Based Income

Selain berupaya memperbaiki kualitas kredit untuk meningkatkan pendapatan bunga, BRI juga berupaya menggali sumber pendapatan lainnya. Salah satu yang telah diupayakan sejak lama adalah menggali pendapatan non-bunga dari berbagai jasa layanan perbankan yang diberikan, seperti aktifitas *trade finance*, remitansi, jasa administrasi dan sebagainya.

Sejalan dengan ekspansi jaringan konvensional maupun *e-channel*, BRI berupaya menambah sumber perolehan pendapatan non-bunga lainnya melalui optimalisasi jasa layanan berbasis TI dengan menambah berbagai fitur produk untuk semakin meningkatkan transaksi berbasis *e-channel* yang lebih efisien, handal dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Upaya yang secara konsisten telah dijalankan, kini semakin menunjukkan hasilnya, terlihat dari naiknya pendapatan non-bunga, mengiringi penambahan jaringan *e-channel* yang dijalankan.

Komposisi perolehan *fee-based income* terhadap total pendapatan (angka bank saja) terus meningkat selama lima tahun terakhir, sehingga pada tahun 2013 telah mencapai angka 7,2% dengan nilai sebesar Rp4,9 triliun, naik dari 6,9% di tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp3,9 triliun.

Fee Based Income terhadap Total Pendapatan

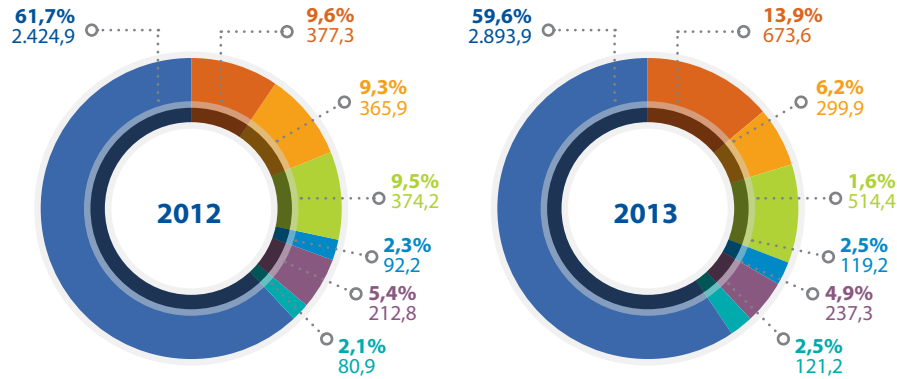


Total perolehan pendapatan *fee based* dari kegiatan administrasi simpanan di tahun 2013 masih mendominasi, dengan komposisi mencapai 59,6% dari total perolehan *fee based*, senilai Rp2,89 triliun, mengingat BRI memiliki jumlah rekening nasabah yang sangat besar. Namun demikian, perolehan *fee based income* dari pengembangan jaringan *e-banking* menunjukkan perkembangan menggembirakan dengan total nilai untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp673,60 miliar melonjak 78,5% dari tahun 2012 yang sebesar Rp377,3 miliar. Angka tahun 2013 tersebut menunjukkan kontribusi *fee based* transaksi *e-banking* terus meningkat mencapai 13,9% dari total *fee-based income*.

Informasi Keuangan Lainnya

Fee Based income

(Dalam Rp Miliar dan %)

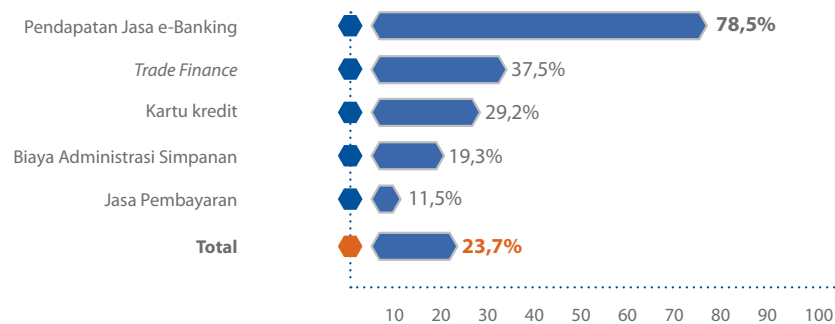


Keterangan :

- Biaya administrasi Simpanan
- Biaya Administrasi Pinjaman
- Kartu Kredit
- lain-lain
- Pendapatan jasa e-banking
- Trade Finance
- Jasa Pembayaran

Data Fee Based Income*

(Dalam %)



*angka bank saja

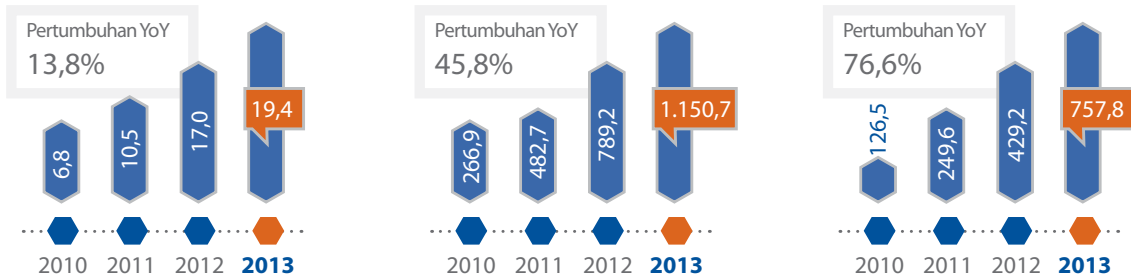
Lebih jauh data-data internal menunjukkan bahwa pengembangan jaringan *e-channel* disertai pengembangan fitur-fitur produk *e-banking* berperan besar dalam meningkatkan perolehan *fee-based* dari transaksi berbasis *e-banking* yang didukung pengembangan Teknologi Informasi terkini. Jumlah pengguna, frekuensi transaksi dan nilai transaksi *e-banking* yang meliputi penggunaan jaringan ATM, *SMS Banking* dan *Internet Banking* dari nasabah BRI meningkat tajam dalam 4 tahun terakhir.

Peningkatan aktifitas tersebut pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan *fee-based income* yang berasal dari transaksi *e-banking*. Mengingat BRI memiliki basis rekening nasabah yang sangat besar, per Desember 2013 mencapai 48 juta rekening, manajemen meyakini *fee-based income* dari transaksi *e-banking* ini akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

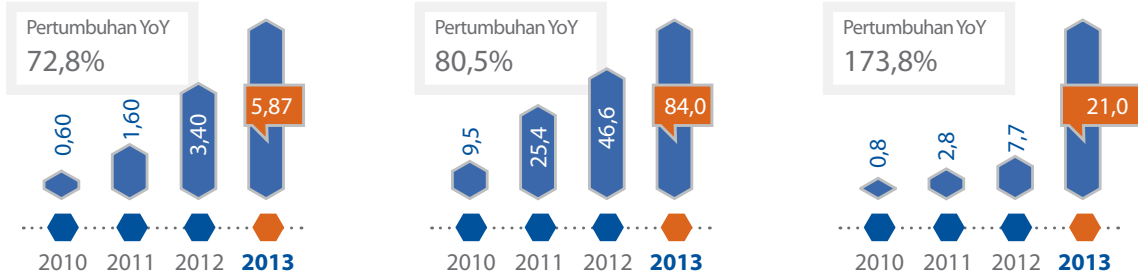
Informasi Keuangan Lainnya

Jumlah Pengguna (dalam juta)	Jumlah Transaksi (dalam juta)	Nilai Transaksi (dalam Rp Triliun)
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

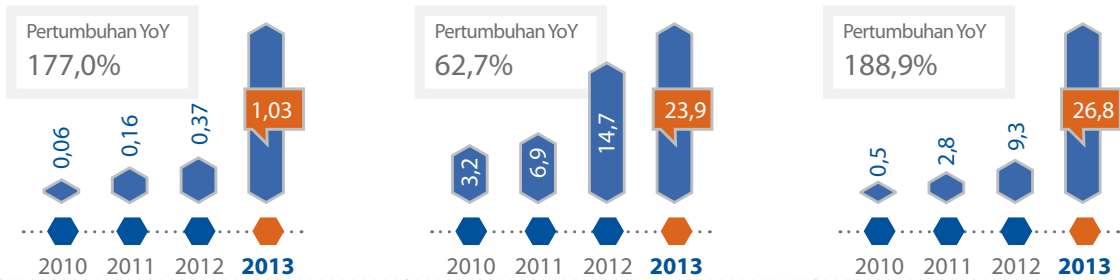
ATM



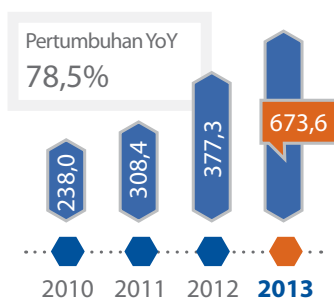
SMS banking



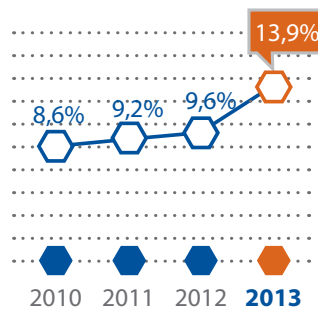
Internet Banking



Pendapatan Jasa e-Banking (dalam Rp miliar)



Pendapatan Jasa e-Banking terhadap Pendapatan fee based (dalam Rp miliar)



Informasi-Informasi Material Lain

Informasi dan Fakta Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang/Modal.

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal.

Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 2013, BRI menerapkan standar akuntansi revisi yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian BRI dan Entitas Anak tetapi tidak memiliki dampak yang signifikan yaitu PSAK no. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK ini menyediakan pengungkapan kualitatif yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat memahami gambaran keseluruhan mengenai sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Dengan mengaitkan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif akan menghasilkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi eksposur risiko suatu entitas dengan lebih baik.

Kebijakan Akuntansi dan Informasi Keuangan Kejadian Luar Biasa

Kebijakan ini digunakan sebagai panduan BRI dalam pencatatan terkait pengungkapan kejadian luar biasa dalam laporan keuangan audit misalnya bencana yang menimpa nasabah dengan saldo pinjaman substansial dan lain-lain.

Pada tahun laporan keuangan, tidak ada kebijakan akuntansi dan informasi keuangan kejadian luar biasa.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Bank

Perubahan pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan terhadap kegiatan usaha BRI, antara lain :

- **Undang-undang (UU) No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).**

Pemberlakuan UU OJK berdampak pada penyesuaian fungsi kepatuhan BRI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) jo Pasal 7 dimana sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (*microprudential*) beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dampak dari pengalihan ini adalah, BRI akan berkoordinasi dengan 2 (dua) regulator, yaitu Bank Indonesia (BI) dan OJK. BRI juga tetap akan memenuhi seluruh ketentuan yang diterbitkan oleh BI sepanjang tidak diubah, diganti atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh BI atau OJK.

- **Surat Edaran (SE) BI No.15/1/DPNP 15 Jan 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)**

Merupakan pengaturan kembali dari SE BI No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.

BRI ikut mendukung peraturan ini dengan menyampaikan SBDK secara periodik, dan menampilkan SBDK di unit kerja serta website BRI.

- **Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/17/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia**

Merupakan penyempurnaan atas PBI No. 7/36/PBI/2005, dengan perubahan bahwa Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan tidak hanya berdasarkan underlying transaksi yang dimiliki oleh Bank, melainkan juga berdasarkan underlying transaksi yang dimiliki oleh Nasabah, yaitu:

1. Investasi luar negeri dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang;
2. Investasi langsung;
3. Devisa Hasil Ekspor;
4. Investasi pada infrastruktur sarana umum dan produksi;
5. Investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
6. Investasi pada kegiatan ekonomi lainnya.

Informasi-Informasi Material Lain

Limit Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, yang semula ditetapkan paling sedikit ekuivalen dengan USD 500,000.00 (Lima ratus ribu US Dollar) dan paling banyak sebesar nilai Underlying Transaksi, diubah menjadi paling sedikit ekuivalen dengan USD 10,000,000.00 (Sepuluh juta US Dollar) dan paling banyak sebesar nilai underlying transaksi, dengan kelipatan USD 1,000,000 (Satu juta US Dollar).

- **PBI No.15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional**

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kewajiban pemenuhan GWM Rupiah sebagai berikut:
 - a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah
 - b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah
 - c. GWM LDR dalam Rupiah dengan parameter:
 - i. Batas bawah LDR target sebesar 78%
 - ii. Batas atas LDR target sebesar 92%, turun dari ketentuan sebelumnya sebesar 100%
 - iii. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Insentif sebesar 14%

- iv. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1
 - v. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2
- d. GWM dalam Valuta Asing sebesar 8% dari DPK dalam Valuta Asing
2. Data KPMM yang digunakan sebagai acuan adalah data KPMM Triwulanan hasil perhitungan OJK, Sehubungan dengan pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI ke OJK. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima BI dari OJK, dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank, maka yang berlaku adalah hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh OJK.
 3. Kelonggaran pemenuhan GWM BI dapat memberikan kelonggaran pemenuhan atas:
 - a. GWM Primer Rupiah kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi dengan persetujuan OJK
 - b. GWM LDR kepada bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana oleh OJK atas dasar permintaan OJK

4. Pemeriksaan kepatuhan bank dalam pemenuhan ketentuan ini dilakukan dengan cara:
 - a. BI melakukan pemeriksaan langsung;
 - b. BI melakukan pemeriksaan bersama OJK; atau
 - c. BI menggunakan data hasil pemeriksaan oleh OJK.

Dengan implementasi peraturan ini, belum ada dampak finansial bagi BRI.

- **PBI No.15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum**

1. Penetapan KPMM tidak berubah dari ketentuan sebelumnya (sebesar 8% dari ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
2. Komponen dan persyaratan instrumen modal ditetapkan menjadi:
 - a. Modal inti (tier 1), paling rendah sebesar 6% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
 - i. Modal inti utama (common equity tier 1), paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR
 - ii. Modal inti tambahan (additional tier 1)
 - b. Modal pelengkap (tier 2)

Informasi-Informasi Material Lain

3. Penetapan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (buffer) mulai 1 Januari 2016 yang dapat berupa:
 - a. Capital Conservation Buffer, yaitu penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis, sebesar 2,5% dari ATMR dengan pemenuhan secara bertahap.
 - b. Countercyclical Buffer, yaitu penyangga atas pertumbuhan kredit yang berlebihan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, sebesar 0-2,5% dari ATMR dan ditetapkan oleh BI.
 - c. Capital Surcharge untuk Domestic Systemically Important Bank, sebesar 1-2,5% dari ATMR untuk bank yang berdampak sistemik sesuai ketentuan OJK.

Terkait implementasi peraturan ini, posisi modal BRI telah siap dengan total CAR 16,99% dan komposisi Tier 1 sebesar 16,13%.

- **PBI No.15/11/PBI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal**

1. Ketentuan Umum:
 - a. Bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
 - b. Setiap kegiatan penyertaan modal wajib disetujui oleh BI, termasuk untuk penyertaan modal lanjutan kepada investee yang sama, kecuali apabila sumber dana berasal dari dividen.
 - c. Penyertaan modal dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal dengan tujuan hanya untuk investasi jangka panjang (bukan untuk jual beli saham).
 - d. Limit portofolio penyertaan modal disesuaikan dengan pengelompokan Bank berdasarkan BUKU.
 - e. Bank dilarang melakukan penyertaan modal melebihi batas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI mengenai BMPK.

2. Ketentuan Penyertaan Modal, antara lain:
 - a. Rencana Penyertaan Modal telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
 - b. Bank telah memenuhi rasio KPMM sesuai profil risiko BI;
 - c. Bank memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut atau 4 (empat) tahun untuk penyertaan modal pada perusahaan baru dan/atau perusahaan luar negeri;
 - d. Penyertaan Modal tidak mengganggu kegiatan usaha bank dan tidak meningkatkan profil risiko bank secara signifikan.
3. Bank wajib melakukan divestasi penyertaan modal apabila:
 - a. Penyertaan modal dapat mengakibatkan penurunan permodalan bank dan/atau peningkatan profil risiko bank secara signifikan; atau
 - b. Atas rekomendasi dari otoritas perusahaan anak dan/atau perintah dari BI.
4. Bank dapat melakukan divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Informasi-Informasi Material Lain

5. Bank harus merealisasikan rencana penyertaan modal maupun rencana divestasi atas inisiatif sendiri paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan BI.

- **Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka tanggal 21 November 2013**

1. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tariff Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan sbb:
 - a. Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak dengan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%.
 - b. Ketentuan diatas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam 1 Tahun Pajak
2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan atau tanggal 21 November 2013

- **Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN tanggal 22 November 2013.**

Peraturan Menteri BUMN ini dalam rangka penataan tenaga kerja *outsourcing*, agar BUMN mengkaji sistem dan pola pengelolaan karyawan *outsourcing* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap memperhatikan kepastian hidup layak karyawan serta kebutuhan dan kemampuan jangka panjang perusahaan. Direksi diharuskan membentuk Tim Pengawasan penanganan karyawan *outsourcing* di BUMN dengan melibatkan Serikat Pekerja yang bersangkutan.

Dalam hal ini, BRI telah memiliki satuan kerja khusus untuk mengelola pekerja *outsourcing*.

- **Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan tanggal 10 September 2013.**

Pembiayaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari :

1. Diperhitungkan sebagai biaya maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya;
2. Saldo dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan sebagian laba yang teralokasi sampai akhir tahun 2012;
3. Bunga deposito dan/atau jasa giro dari Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional dan/atau;
4. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN Lain (jika ada).

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak ada informasi material setelah tanggal laporan akuntan.

Transaksi Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun pelaporan sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.1 "Benturan Kepentingan".

Transaksi Berelasi

BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, BRI telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar.

Pencatatan transaksi berelasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No.7 (revisi tahun 2010) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" agar dapat memberikan laporan keuangan yang wajar. Transaksi material dengan pihak berelasi selama tahun 2013 selengkapnya terdapat pada catatan 43 atas Laporan Keuangan Audited Konsolidasian.

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen ditetapkan setiap tahun melalui RUPS dimana pada tahun 2013 BRI melakukan pembayaran dividen sebesar 30% dari laba bersih 2012 yaitu senilai Rp 5,56 triliun atau Rp 225,2320 per lembar saham. Informasi detail mengenai pembayaran dividen dapat dilihat pada bab Informasi Bagi Investor.

Entitas Anak Usaha

PT Bank BRISyariah Riwayat Usaha

Kehadiran Bank BRISyariah diawali proses akuisisi sebuah bank konvensional, yakni PT Bank Jasa Arta oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 19 Desember 2007. Setelah memperoleh izin Bank Indonesia No. 10/67/KEP. GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, pada tanggal 17 November 2008 PT Bank Jasa Arta berubah nama menjadi PT Bank BRISyariah dan dikonversi menjadi Bank Umum Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatanganinya Akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (proses *spin-off*) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Aksi korporasi tersebut bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah mempunyai visi untuk menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam produk dan layanan perbankan berbasis syariah.

Profil Bank BRISyariah

PT. Bank BRISyariah terus meningkatkan sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis

yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

Dalam melaksanakan kegiatannya, BRISyariah dipimpin oleh 5 orang Direksi (termasuk Direktur Utama), didampingi oleh 5 orang Anggota Dewan Komisaris dan dibantu Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 2 orang pengawas.



Fitch Ratings
Peringkat Jangka Panjang
BRISyariah:
AA+ (idn)

Produk-produk perbankan yang dilayani meliputi:

- a. Produk Simpanan Pihak Ketiga: Tabungan Faedah BRISyariah iB, Tabungan Impian BRISyariah iB, Tabunganku Haji BRISyariah iB, Deposito BRISyariah iB dan Giro BRISyariah iB
- b. Produk Pembiayaan :
 - Pembiayaan Mikro
 - i. Mikro 25 BRISyariah iB
 - ii. Mikro 75 BRISyariah iB
 - iii. Mikro 500 BRISyariah iB
 - Pembiayaan Konsumer
 - i. KPR BRISyariah iB, KPR BRI Sejahtera BRISyariah iB
 - ii. Kepemilikan Multi Guna/jasa BRISyariah iB
 - iii. Employee Benefit Program BRISyariah iB
 - iv. Pembiayaan Kepemilikan Emas BRISyariah iB
- c. UKM Kemitraan
- d. Pembiayaan Komersial.

Pengakuan pihak independen atas kinerja BRISyariah selama tahun 2013, antara lain:

- a. *Banking Service Excellence* 2013
 - *1st Best ATM Islamic Commercial Bank - Infobank & MRI*
 - *3rd Best Teller ATM Islamic Commercial Bank - Infobank & MRI*
- b. *Top Brand Award* 2013
Top Brand, Category Sharia Banking
- c. *Indonesia Brand Champion* 2013
Bronze Brand Champion of Most Popular Brand, Category Islamic Banking (iB)
- d. BUMN Corporate Secretary Public Relations Award 2013
 - Terbaik Pertama Kategori *The Rising Star - Media Pekerja BUMN*
 - Terbaik Pertama Kategori Sosial Media - Media Pekerja BUMN
 - Terbaik Pertama Kategori Program Kegiatan Khusus - Media Pekerja BUMN
- e. *Indonesia Original Brand* 2013
1st Champion of Indonesia Original Brand - Product Category Sharia Bank - SWA

Kinerja Usaha tahun 2013

Kinerja BRISyariah kembali mencatat kinerja usaha yang menggembirakan. Aset bank tumbuh 23,51%, dari Rp 14,09 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 17,40 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 15,45% dari Rp 11,95 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 13,79 triliun. Pembiayaan tumbuh sebesar 24,24% dari Rp 11,40 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 14,17 triliun di akhir 2013.

BRISyariah mencatat laba setelah pajak sebesar Rp 129,56 miliar untuk tahun buku 2013, melonjak 27,16% dari perolehan laba sebelum pajak tahun 2012 yang sebesar Rp 101,89 miliar.

Kinerja usaha tersebut dicapai terutama berkat tersedianya jalur distribusi yang terus menerus dikembangkan, peluncuran produk-produk baru yang sesuai kebutuhan pasar dan juga dukungan sumber daya manusia BRISyariah yang terus tumbuh, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

Selain jaringan kantor yang terus bertambah menjadi 257 kantor pelayanan di akhir tahun 2013, BRISyariah juga mengembangkan jalur-jalur distribusi alternatif dengan membuka Kantor Layanan Syariah (KLS) di jaringan kantor Bank BRI yang saat ini telah berjumlah sebanyak 573 KLS serta membangun pojok BRIS di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di pesantren-pesantren. BRISyariah juga mengoptimalkan dukungan jaringan *e-Channel* melalui 418 unit ATM, 708 unit EDC dan layanan *e-banking* pun dengan penambahan fitur-fitur yang semakin lengkap.

Jumlah SDM BRISyariah terus bertambah dan sampai dengan akhir tahun 2013 mencapai 6.314 orang atau meningkat 35,52%

dibandingkan dengan akhir tahun 2012 yaitu 4.659 orang. Penambahan SDM di kantor pusat difokuskan untuk mendukung operasional kebijakan, prosedur operasional maupun pembuatan berbagai kebijakan, prosedur operasional dan teknologi informasi; sementara di kantor cabang, pengembangan SDM lebih difokuskan pada pembentukan *sales organization* yang kuat.

Pengembangan Produk dan Jasa

Terhitung sejak tanggal 30 Desember 2013, PT. Bank BRISyariah telah mendapat status sebagai bank devisa. Kemudian, melalui Peraturan Menteri Agama RI (PMA) No. 30 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 terkait penetapan BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), BRISyariah ditetapkan sebagai salah satu BPS BPIH yang ditunjuk untuk masa penetapan Tahun 2013 – 2017. Untuk itu, BRISyariah diharapkan dapat mengoptimalkan sinergi dengan BRI sebagai bank transit dalam pengelolaan dana haji sehingga dapat lebih menjangkau masyarakat luas.

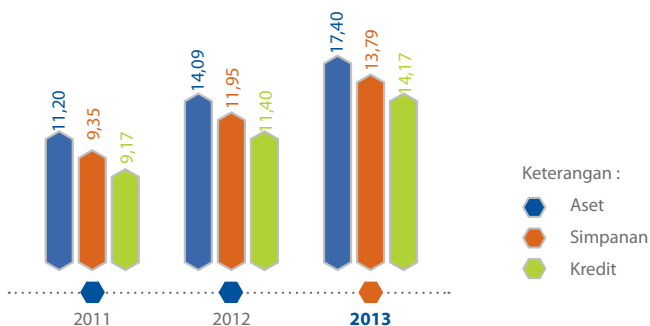
Pengelolaan Risiko

BRISyariah melaksanakan pengelolaan risiko secara prudent. Seluruh profil risiko inherent bank yang terdiri dari 8 jenis risiko meliputi: Risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, strategik, reputasi dan hukum, dianalisa untuk kemudian diikuti dengan penerapan langkah mitigasi. Melalui penerapan mitigasi dan dengan memperhatikan efektivitas manajemen risiko, maka dari seluruh risiko tersebut, hanya risiko likuiditas dan risiko strategik yang memiliki profil *moderate*. Sementara profil risiko lainnya adalah *low to moderate*, sehingga secara komposit profil risiko *inherent* dari BRISyariah adalah *low to moderate*.

BRISyariah akan konsisten melakukan pengelolaan dan merealisasikan langkah mitigasi, sehingga pada periode mendatang, seluruh profil risiko inherent tersebut berubah menjadi *low*.

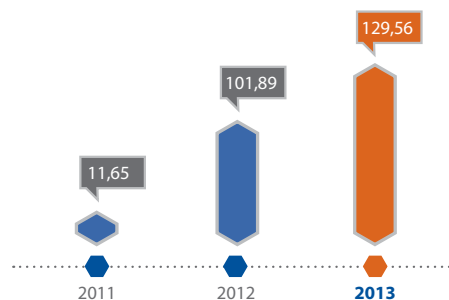
Aset

(Dalam Rp Triliun)



Laba Bersih

(Dalam Rp Miliar)



PT Bank Agroniaga Tbk

Riwayat Usaha

PT Bank Agroniaga Tbk, didirikan pada tanggal 27 September 1989 di Jakarta oleh para tokoh agribisnis baik dari unsur Pemerintah, BUMN maupun Swasta Nasional dengan pemegang saham mayoritas saat pendirian adalah Dana Pensiun Perkebunan. Tahun 2003 PT Bank Agroniaga berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dengan kode perdagangan sahamnya, AGRO. Tahun 2006, PT Bank Agroniaga Tbk berhasil meningkatkan status sebagai Bank Devisa, sesuai izin dari Bank Indonesia. Sejak saat itu, bank yang awalnya berfokus pada sektor agribisnis, seperti perkebunan, perikanan, peternakan dan pengolahannya bisa memberikan berbagai layanan jasa perbankan sebagai mana layaknya bank devisa.

Pada tanggal 3 Maret 2011, sesuai dengan hasil RUPSLB BRI 2010 yang mengamanatkan pelaksanaan akuisisi, maka PT Bank Agroniaga Tbk menjadi bagian dari entitas anak usaha PT Bank BRI (Persero) Tbk, melalui penanda tangan Akta Akuisisi antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan atas 88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Agro. Hal ini telah dicatatkan pada Akta Akuisisi No.14 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Selanjutnya, untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1, lampiran keputusan ketua Bapepam-LK Nokep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008, maka BRI sebagai Pengendali Baru Bank Agro wajib mengalihkan kembali saham Bank Agro kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender Wajib yaitu sebesar 3,15% dari total saham Bank Agro atau

113.326.500 lembar saham dan dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut BRI telah melakukan penjualan saham Bank Agro sebesar 256.875.502 lembar saham (7,10%) dari total saham Bank Agro) yang terdiri dari penjualan kepada Dapenbun sejumlah 256.375.502 lembar saham dan per 31 Maret 2012 jumlah pemegang saham Bank Agro adalah sejumlah 2.286 Pihak, sehingga terhitung sejak 31 Maret 2012 seluruh proses Pengalihan Kembali Saham Bank Agro oleh BRI telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian kepemilikan BRI terhadap Bank Agro sampai dengan tahun 2012 adalah sejumlah 2.886.690.021 lembar atau 79,785% dari total saham Bank Agro.

Pada tanggal 10 Oktober 2012, Bank Agro berubah nama menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk disingkat (BRIAGRO). Kemudian pada bulan Juli 2013, BRI melakukan penambahan modal kepada BRIAGRO sebesar Rp 390 miliar.

Profil BRIAGRO

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (BRIAGRO) sebagai salah satu bank umum devisa nasional mempunyai visi untuk memfokuskan layanan perbankannya pada pembiayaan agribisnis seperti perkebunan, perikanan, peternakan dan pengolahan produk terkait. BRIAGRO menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan dengan sasaran khusus dunia bisnis yang mengacu pada spesifikasi masing-masing segmen pasar, seperti kredit kepada PT Perkebunan Nusantara (I-XIV) berikut kelompok usaha pendukungnya (rekanan dan kontraktor), maupun penyaluran dana untuk kesejahteraan para petani melalui KKPA dan KKP yang telah direkomendasi oleh PT Perkebunan Nusantara terkait.

Sampai dengan tahun 2013, sebagai realisasi penambahan empat kantor Cabang, 1 kantor Capem, 1 kantor kas dan 2 lokasi ATM, BRIAGRO total memiliki jaringan operasi sebanyak 13 (tigabelas) kantor cabang, 10 (sepuluh) kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Bandar Lampung, Jambi, Bandung, Semarang, Rantau Prapat, Makasar dan Balikpapan, disamping juga memiliki 3 (tiga) kantor kas dan 34 jaringan ATM, yang dikelola sendiri. Di akhir tahun 2013, BRIAGRO memiliki total sumber daya manusia sebanyak 438 orang dengan latar belakang beragam disiplin ilmu yang relevan dalam mendukung kegiatan utama perusahaan.

Kinerja BRIAGRO tahun 2013

Total asset BRIAGRO per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 5,12 triliun atau tumbuh 26,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit yang disalurkan tumbuh 46,13% dan mencapai Rp 3,70 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh keberhasilan penghimpunan dana pihak ketiga yang naik 34,90% mencapai Rp 4,12 triliun. Tingkat LDR BRIAGRO berhasil dijaga pada level 89,77%. Adapun laba bersih setelah pajak meningkat 58,78% menjadi sebesar Rp 52,44h miliar. Dengan hasil tersebut, ROA BRIAGRO berhasil dipertahankan pada kisaran 1,65%.

Pengembangan Produk dan Jasa

Meningkatnya persaingan di industri perbankan dalam memperebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) membuat BRI AGRO, berinisiatif untuk mengembangkan dan membuat strategi pemasaran produk Tabungan dan Deposito BRIAGRO yang tepat untuk nasabah.

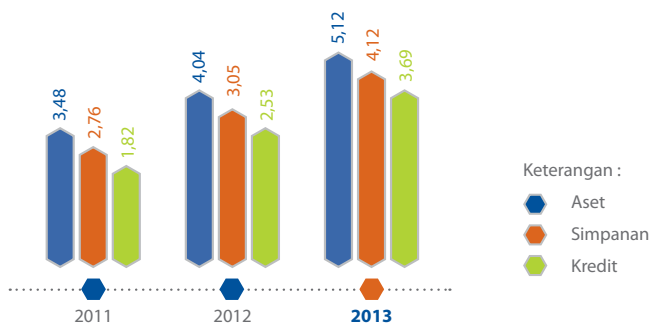
Entitas Anak Usaha

Pengembangan Produk dan Jasa yang dilakukan BRIAGRO adalah :

1. Program “Ayo Bergoyang”
Program “Ayo Bergoyang” merupakan program akuisisi dan retensi dari Tabungan dan Deposito BRIAGRO Berhadiah dengan hadiah langsung tanpa diundi untuk setiap penempatan dana baru (fresh fund) sesuai nominal dan jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Tabungan Infiniti
Tabungan Infiniti BRIAGRO merupakan simpanan yang ditujukan khusus bagi nasabah yang sangat sensitif terhadap suku bunga. Melalui Tabungan Infiniti BRIAGRO dirancang khusus agar nasabah dapat menikmati tingkat pengembalian yang optimal dengan keleluasaan sebuah tabungan.

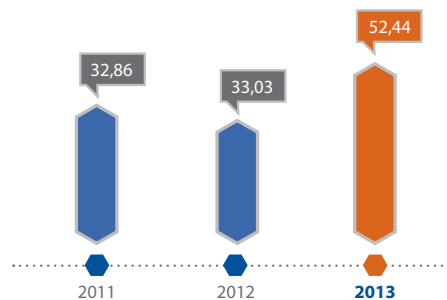
Aset

(Dalam Rp Triliun)



Laba Bersih

(Dalam Rp Miliar)



BRI Remittance Co.Ltd

Profil BRI Remittance Co. Ltd.

BRI Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong didirikan tanggal 7 April tahun 2005 di Hong Kong dengan modal yang disetor sebesar HKD1,600,000.00. Pada tanggal 16 Desember 2011 dilakukan penandatanganan *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* antara BRI dan BJS yang kemudian disahkan oleh Inland Revenue Department Hong Kong, sehingga terhitung sejak tanggal tersebut BRI menjadi Pemegang Saham Pengendali BRC dengan kepemilikan saham 100%.

Bisnis utama yang dijalankan oleh BRC adalah Bisnis Remittance, yaitu perpindahan dana dari pengirim (*originator*) ke penerima (*beneficiary*). Untuk menunjang Bisnis *Remittance* di Hong Kong, saat ini BRI memiliki sistem BRIFAST yang telah di implementasikan di BRC dan diintegrasikan secara on line ke lebih dari 7000 unit kerja BRI. Dengan terintegrasinya BRC dengan unit kerja BRI akan mempercepat pelayanan pengiriman uang dari dan ke Hong Kong, hal ini akan menjadi keunggulan kompetitif bagi BRI.

Di tahun 2013, aset BRC telah berkembang menjadi sebesar HKD 2,71 juta dengan pendapatan dan laba bersih yang diperoleh adalah sebesar HKD 2,26 juta dan HKD 371.660. Dengan demikian nilai laba tersebut menunjukkan rentabilitas terhadap ekuitas sebesar 15,22%. Secara nominal pada tahun 2013 transaksi *remittance* meningkat sebesar 48% dari Rp 82,76 miliar menjadi Rp 122,32 miliar.

Entitas Anak Usaha

Daftar Alamat Perusahaan Anak

1. PT Bank BRISyariah
Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta
Pusat 10160, Indonesia
Telepon : +6221-3450556,
34502227
Fax : +6221-2316064
Website : www.brisyariah.co.id
2. PT Bank BRI Agroniaga Tbk
Plaza GRI, Jl. Haji Rasuna Said,
blok X2 No. 1, Jakarta 12950,
Indonesia
Telepon : +6221-5262570
Fax : +6221-5262559, 5262653
Website : www.briagro.co.id
3. BRI Remittance Company
Limited
Flat 22 G/F Bay view 33 Moreton
Terrace Causeway Bay, Hong
Kong
Telepon : +852-25271318
Fax : +852-28613693
Website : www.briremittance.
com



272

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

274	Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
275	Dasar Acuan Implementasi GCG
277	Road Map Implementasi BRI
280	Implementasi GCG
285	Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
285	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Corporate Charter)

289	Kebijakan dan Prosedur Operasional Perusahaan.
290	Informasi Kebijakan dan Program Penting Lainnya
295	Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
296	Rapat Umum Pemegang Saham
298	Dewan Komisaris
309	Direksi
322	Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi
326	Komite Dibawah Dewan Komisaris



“ Komitmen Tata Kelola ”

Bank BRI berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan sesuai standar yang berlaku di Indonesia maupun Internasional.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

337	Komite - Komite Dibawah Direksi
347	Sekretaris Dewan Komisaris
348	Sekretaris Perusahaan
353	Fungsi Kepatuhan
356	Manajemen Risiko
357	Sistim Pengendalian Internal
359	Audit Intern
367	Auditor Ekstern dan Akuntan Perseroan
368	Kode Etik
372	Budaya Perusahaan

376	Sistem Pelaporan Pelanggaran/ <i>Whistleblowing System</i>
379	Perkara Hukum
380	Informasi Penting Lainnya
387	Tempat/Alamat yang dapat dihubungi <i>Stakeholders</i>

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan



Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan praktek terbaik *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BRI bukan semata mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga berarti upaya melakukan inovasi dan penyempurnaan pengelolaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari partisipasi BRI dalam menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip GCG. Sejak tahun 2000, BRI menunjukkan komitmen yang semakin meningkat dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan bisnis maupun operasional perbankan.

Adapun berbagai tujuan yang dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, meliputi.

1. Menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang sehingga tujuan Perusahaan dapat tercapai
2. Memaksimalkan nilai perusahaan
3. Meningkatkan daya saing Perusahaan baik secara nasional maupun internasional
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders* terhadap Perusahaan
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan
6. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif
7. Mengoptimalkan hubungan *risk – return* yang konsisten dengan strategi bisnis

8. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG
9. Membantu terwujudnya GCG sebagai budaya dan *good corporate citizen*

BRI meyakini, melalui penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat, sehingga Bank memiliki daya saing yang kuat baik di lingkup nasional maupun internasional. Hal tersebut akan lebih menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan untuk memberi manfaat maksimal kepada para pemangku kepentingan akan tercapai.

Dasar Acuan Implementasi GCG

“Peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan peningkatan kinerja Perusahaan dan pengembangan usaha jangka panjang untuk memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.”

Dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola terbaik, BRI berpedoman pada berbagai peraturan perundangan, yakni:

1. Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998
2. Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PB1/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PB1/2006 tanggal 5 Oktober 2006;
7. Surat Edaran Bank Indonesia No 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;

Selain itu, BRI juga memperhatikan perkembangan terkini dan *best practice* yang berlaku seperti :

1. *Principles of Corporate Governance* oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD)
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*
3. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)

Pada tatanan internal, BRI menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional harian.

Dasar Acuan Implementasi GCG

Penguatan Komitmen Penerapan Best Practice GCG

Komitmen Perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) tertuang dalam visi dan misi BRI. Visi BRI untuk menjadikan BRI sebagai Bank Komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah, diperjelas dalam misi BRI dimana dalam memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan Teknologi Informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko yang baik serta praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang sangat baik.

BRI berkomitmen bahwa implementasi tata kelola harus diawali dari top manajemen, dalam hal ini Direksi dan Dewan komisaris. Konsekuensi dari komitmen tersebut adalah implementasi prinsip-prinsip GCG di semua

kegiatan usaha BRI, yang ditunjukkan dalam visi-misi, *core value*, strategi kebijakan dan sebagainya.

Selain itu, sebagai wujud komitmen top manajemen beserta seluruh jajarannya dalam meningkatkan kualitas penerapan *best practices* GCG, sejak beberapa tahun terakhir, BRI telah menjalankan serangkaian kegiatan, meliputi:

- Penanda-tanganan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris untuk mematuhi seluruh butir-butir ketentuan dalam Pedoman GCG dan Kode Etik Perusahaan.
- *Kick off* Revitalisasi Budaya Kerja
- Penandatanganan komitmen implementasi Budaya Kerja oleh Direksi
- Eksternalisasi implementasi *Corporate Governance* BRI kepada Stakeholders BRI



Catatan :
SK Direksi BRI
Nokep : 81-DIR/REN/02/2013 tanggal 13 Februari 2013

Road Map Implementasi BRI

Mekanisme Tata Kelola

Corporate Governance Policy GCG BRI

Ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan GCG BRI (GCG Policy) yang telah dibuat sejak tahun 2001 dan telah dilakukan penyempurnaan sebanyak 3 (tiga) kali terakhir pada tahun 2010, menjadi pedoman umum penerapan GCG di seluruh lapisan organisasi BRI. Pada tahun 2013, telah dilakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan GCG BRI yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi No 05-KOM/BRI/12/2013 - Nokep S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013. Kebijakan Good Corporate Governance

(GCG Policy) BRI mencakup 4 (empat) aspek tata kelola yang meliputi komitmen, struktur, proses dan hasil tata kelola.

Dalam meningkatkan kualitas penerapan tersebut, BRI mengimplementasikan 3 (tiga) tahapan yaitu perumusan, implementasi serta monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan dalam mencapai tahapan/tujuan akhir yang diharapkan yaitu GCG *excellent*.

Tahapan tersebut dilengkapi empat aspek komponen dasar bagi terselenggaranya implementasi tata kelola yang keseluruhannya membentuk *road map* Implementasi GCG dan secara konsisten diterapkan pada seluruh aspek operasional BRI.



Tahap 1

1. Penguatan Komitmen GCG Manajemen
2. Membangun kelengkapan struktur GCG
3. Membangun kelengkapan infrastruktur GCG
4. Menyusun Kelengkapan sistem, kebijakan dan prosedur GCG

Tahap 2

1. GCG Awareness
2. Penegakan Budaya Perusahaan dan kode etik BRI
3. Peran aktif Top Management
4. Optimalisasi Organ pendukung, a.l :
 - a. fungsi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern
 - b. fungsi kepatuhan
 - c. fungsi audit intern & ekstern
5. Pengembangan GCG Tools

Tahap 3

1. Program Assessment GCG
2. Monitoring implementasi GCG
3. Evaluasi Kinerja Perusahaan
4. Evaluasi rencana bisnis Perusahaan
5. Penyempurnaan struktur GCG
6. Penyempurnaan infrastruktur GCG
7. Pengkinian & Penyempurnaan sistem, kebijakan dan prosedur GCG

Tahap terakhir

1. Terwujudnya GCG sebagai budaya
2. Terwujudnya *Good Corporate Citizen*
3. Keberlangsungan usaha
4. Memberi nilai tambah bagi *Stakeholders*
5. *Service Excellent*
6. *Most Valuable Company*
7. *Most Trusted Company*
8. Perusahaan yang berintegritas, beretika & bertanggung jawab

Road Map Implementasi BRI

BRI telah membangun 4 (empat) aspek komponen tata kelola Perusahaan yang terdiri dari :



Kelengkapan GCG Manual BRI yang mencakup Kebijakan GCG (*GCG Policy*), Kode Etik (*Code of conduct*), Panduan kerja Dewan Komisaris dan Direksi beserta Komite, serta prosedur dan kebijakan pendukung lainnya seperti kebijakan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan kepatuhan, dsb telah dimiliki dan secara berkelanjutan dilakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan.

Road Map Implementasi BRI

Pedoman, kebijakan dan prosedur tata kelola Perusahaan

Sebagai bagian dari konsistensi pelaksanaan *roadmap* peningkatan kualitas penerapan GCG, BRI melakukan peninjauan dan pengkinian berbagai perangkat kebijakan dan peraturan internal untuk menyesuaikan dengan kondisi dan praktek terbaik GCG terkini. Perkembangan tersebut terangkum dalam tabel berikut















2000-2001	2002-2005	2006-2009	2010-2012	2013
<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan GCG yang tertuang dalam <i>Business Plan</i> • Komitmen Manajemen dalam Visi-Misi, <i>core value</i> dan <i>Corporate Culture</i> • GCG Policy (<i>Charter</i>) • Kebijakan internal BRI lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi GCG Policy • Kode Etik BRI • <i>Board Manual</i> Dewan Komisaris dan Direksi • Panduan Sekretaris Perusahaan • Panduan Transparansi dan Pengungkapan • Piagam Komite Audit • Kebijakan Umum Manajemen Risiko • Revisi Panduan Kebijakan Audit Intern • Peraturan ketenagakerjaan • Kebijakan Peraturan Displin • Revisi Kebijakan Umum Teknologi dan Sistem Informasi • Kebijakan Sekuriti Teknologi Sistem Informasi • Revisi Kebijakan Umum Logistik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi GCG Policy • Revisi Board manual Dewan komisaris dan Direksi • Revisi Panduan Sekretaris Perusahaan • Revisi Panduan Transparansi dan Pengungkapan • Revisi Piagam Komite Audit • Panduan Komite Pengawas Manajemen Risiko • Panduan Komite Nominasi & Remunerasi • Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank • Piagam Audit Intern (<i>Audit Charter</i>) • Revisi Kebijakan Peraturan Displin • Ketentuan <i>Whistleblowing System</i> • Arsitektur SDM • Revisi Kebijakan Peraturan Displin • Revisi Kebijakan Sekuriti Teknologi Sistem Informasi • Revisi Sistem Monitoring Kualitas Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi GCG Policy • Revisi Kode Etik • Revisi Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi • Revisi Board Manual dan Panduan kerja Dewan Komisaris beserta Komite dibawahnya • Piagam Kepatuhan (<i>Compliance Charter</i>) • Kebijakan Penerapan Budaya Kepatuhan • Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan • Kebijakan Strategi <i>Anti Fraud</i> • Revisi Kebijakan Umum Teknologi dan Sistem Informasi • Revisi Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik • Revisi Sistem Monitoring Kualitas Layanan Standar <i>Service Level Agreement (SLA)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Ketentuan <i>Whistleblowing System</i> • Revisi GCG Policy • Revisi Kode Etik • Kebijakan Gratifikasi • Pedoman Penyusunan dan Penggunaan Anggaran Pendidikan

Implementasi Good Corporate Governance

Program Peningkatan Kualitas Dan Efektifitas GCG

Menyadari bahwa peningkatan kualitas tata kelola harus dilakukan secara terstruktur, berjenjang dan membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasilnya, BRI secara berkala merealisasikan berbagai program terkait GCG, yang melibatkan jajaran internal dan juga pihak eksternal, yakni para pemangku kepentingan.

Untuk tahun 2013, berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penerapan GCG, antara lain:

Beberapa kegiatan Revitalisasi Budaya Kerja 2013		Eksternalisasi Corporate Governance BRI		
<p>Kick off Revitalisasi Budaya Kerja 7 Februari 2013</p>	<p>Komitmen Implementasi Budaya Kerja Penguakuan komitmen Budaya Kerja oleh Direksi.</p> 	<p>Eksternalisasi implementasi Corporate Governance BRI kepada Stakeholders BRI "Pengelolaan Pengetahuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan dalam menerapkan GCG" Jakarta, 9 September 2013</p> 		
<p>Brainstorming Budaya kerja BRI</p> <ol style="list-style-type: none"> Brainstorming dengan 40 orang <i>Change Agent</i> di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah yang baru terpilih dalam rangka membahas tindakan Budaya Kerja Mendapatkan <i>feedback</i> dari 500 orang responden perwakilan staf, pekerja, dan pekerja <i>outsourcing</i> mengenai definisi nilai-nilai Budaya Kerja. 	<p>Training of trainers (TOT) terhadap change agent Memastikan kembali setiap uker mempunyai <i>Change Agent</i> sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan melaksanakan Sosialisasi program Revitalisasi Budaya Kerja</p>    <p>Change Agent Forum (CAF) 2013 Diskusi program budaya kerja di tingkat unit kerja dan nasion</p>	<p>Penguatan Budaya Kerja Setiap unit kerja melaksanakan kegiatan rutin tahunan yaitu Forum Peningkatan Kinerja (FPK) dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan melakukan survey kepuasan pelanggan eksternal dan internal</p>   		
<p>Kegiatan lainnya selama tahun 2013</p>	<p>Self Assessment Good Corporate Governance Menggunakan versi Bank Indonesia Semester I / 2013 dan Semester II / 2013</p>	<p>Corporate Governance Perception Index (CGPI) tema "Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Pengetahuan" Pelaksanaan bulan Juli sd November 2013</p>	<p>Penghargaan Pemberian Sistem Insentif Peningkatan Kinerja (SIPK) bagi unit Mikro Kegiatan rutin tahunan untuk memberikan <i>reward</i> kepada BRI unit yang berprestasi</p>  	<p>SQ Vaganza Kompetisi standar layanan yang melibatkan seluruh Satpam, 1, dan Teller BRI seluruh Indonesia</p>
<p>Annual Disclosure Pernyataan tahunan terkait Benturan Kepentingan setiap Pekerja BRI</p> 	<p>Kegiatan Rapat Koordinasi SA-GCC</p> 	<p>Kegiatan Observasi pihak IICG dengan manajemen BRI</p>  		

Beberapa kegiatan Revitalisasi Budaya Kerja 2013

Pembinaan fungsi Manajemen Risiko

Pembinaan terhadap 18 Kantor Wilayah terkait

- Ruang lingkup fungsi manajemen risiko
- Perangkat Manajemen Risiko Operasional
- Penyusunan profil risiko



Monitoring Kinerja Kualitas Layanan

Monitoring implementasi kualitas layanan di unit kerja operasional dilakukan secara rutin.

Coaching and Role Play dalam meningkatkan performa kualitas layanan

Monitoring Program APU-PPT

Kegiatan rutin tahunan Monitoring implementasi program APU-PPT di unit kerja BRI



Eksternalisasi Corporate Governance BRI

Monitoring lainnya :

- Evaluasi kinerja jaringan kerja
- Manajemen Risiko



Pendalaman materi untuk pekerja baru

- GCG
- Kode Etik BRI
- Budaya Kerja
- Program APU-PPT
- Manajemen Risiko
- Sistem Pengendalian Intern
- Operasional
- Perkreditan



Sosialisasi kebijakan Bisnis Mikro

- Restrukturisasi Kredit Mikro
- Kebijakan Mikro
- Laporan Mikro
- Reward Mantri



Sosialisasi kebijakan Perkreditan

- Pembekalan *supervisor* dan petugas administrasi kredit
- Briefing session* administrasi kredit
- Pembekalan *Associate Auditor*



Sosialisasi lainnya

- Budaya Kepatuhan
- IT Security awareness*
- Manajemen Risiko
- Standarisasi rasio formasi
- Standarisasi tampilan unit kerja
- Refreshment* produk dan aktivitas BRI



Rencana Peningkatan kualitas implementasi GCG ke depan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan GCG, BRI telah menyiapkan berbagai program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, antara lain:

1. Penyempurnaan transparansi implementasi GCG melalui *website* dan laporan tahunan berdasarkan international *best practice* yang diterapkan di industri.
2. Secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan dan pemutahiran kebijakan GCG BRI
3. Pembuatan dan pengembangan sistem informasi manajemen untuk menunjang proses bisnis dan pengendalian
4. Secara berkelanjutan melakukan internalisasi dan eksternalisasi GCG

Implementasi Good Corporate Governance

Sistem Informasi Manajemen tata kelola Perusahaan

BRI telah membangun sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas implementasi GCG, antara lain:

Sistem Monitoring	Media Informasi	Pengelolaan Pengetahuan	Lain-lain
Starweb System (kualitas layanan)	Knowledge Management System (Brilian)	Back Office Automation (BOA)	Remedy Requester console system
OPRA Sistem (manajemen risiko)	Business Information System (BIS)	Portal e-Diklat	Laporan BRI Unit (MIR)
Dashboard Kepatuhan	BRI search engine	Digital Library Pusdiklat	e-Register Humas BRI
Aplikasi Guava	Marcomm insight	Portal SDM	Loan Approval System (LAS)
Aplikasi monitoring PKBL	Public Folder BRI	Media pembelajaran : E-learning, Video conference, Diklat-tube, blog dan forum	SIM - SDM

Penilaian/Asesmen Kualitas Penerapan GCG

Untuk mendapatkan umpan balik guna meningkatkan kualitas penerapan di masa mendatang, BRI secara berkala melakukan penilaian kualitas penerapan GCG. Melalui program penilaian tersebut, akan terlihat sejauh mana perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan, seberapa besar pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis dan operasional BRI serta program perbaikan yang perlu dilaksanakan di masa mendatang. Melalui penilaian tersebut dapat pula diketahui adanya peningkatan kualitas penerapan prinsip GCG secara berkesinambungan.

Untuk tahun 2013, BRI melakukan *self assessment* menggunakan kriteria Bank Indonesia dan mengikuti program riset yang dilakukan oleh pihak eksternal, sebagai berikut.

1. Self Assessment GCG

BRI melakukan *Self Assessment* GCG sesuai Peraturan Bank Indonesia secara berkala dengan hasil sebagai berikut :

Bank	Persentase	Nilai Komposit Individual	Nilai Komposit Konsolidasi
BRI	96,02%	1,27	1,22
BRI Agro	1,22%	2,17	0,03
BRI Syariah	2,76%	1,35	0,04
Total Nilai Komposit Konsolidasi			1,29

- Penilaian pelaksanaan GCG secara konsolidasi melibatkan hasil pelaksanaan GCG Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan yaitu :
 - PT BRI Syariah
 - PT BRI Agro Tbk.
- Perhitungan dampak signifikan penilaian GCG Perusahaan Anak terhadap GCG BRI secara konsolidasi berdasarkan jumlah aset Perusahaan Anak atas total aset secara konsolidasi.
- Hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan GCG BRI periode Semester II tahun 2013 sebesar 1,27 dengan Predikat "Sangat Baik".
- Hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. Bank BRI Syariah periode Semester II tahun 2013 sebesar 1,35 dengan Predikat "Sangat Baik".
- Hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BRI Agro, Tbk. periode Semester II tahun 2013 sebesar 2,17 dengan Predikat "Baik".

Sehingga, perhitungan nilai faktor GCG BRI secara konsolidasi periode Semester II tahun 2013 dan diperoleh nilai komposit 1,29 dengan predikat "Sangat Baik"

Implementasi Good Corporate Governance

2. Corporate Governance Perception Index (CGPI)

- a. Program riset dan pemeringkatan penerapan GCG melalui CGPI dengan tema "Good Corporate Governance dalam Perspektif Pengetahuan" yang dilaksanakan pada bulan Juli sd November 2013 dengan tahapan sbb :

Tahapan	Penjelasan	Skor
Self Assessment	merupakan kegiatan pengisian kuesioner terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan	15,59
Penilaian Dokumen	merupakan pemenuhan persyaratan penilaian berupa penyerahan berbagai dokumen yang telah dimiliki Perusahaan terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan	28,47
Penilaian Makalah	merupakan pemenuhan persyaratan penilaian yang menjelaskan serangkaian proses dan program implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan	11,70
Observasi	merupakan tahap akhir penilaian sebagai salah satu bagian penting dari proses riset dan pemeringkatan CGPI berupa peninjauan langsung ke Perusahaan oleh tim penilai CGPI untuk memastikan proses pelaksanaan serangkaian program implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan	29,80
Total Skor		85,56
Norma Penilaian	Perusahaan Sangat Terpercaya (<i>Most Trusted Company</i>)	

Aspek penilaian GCG dalam Perspektif Risiko adalah :

1. Komitmen	5. Independensi	9. Strategi
2. Transparansi	6. Keadilan/ <i>Fairless</i>	10. Etika
3. Akuntabilitas	7. Kompetensi	11. Manajemen Pengetahuan
4. Responsibilitas	8. Kepemimpinan	

BRI mendapatkan hasil penilaian CGPI 2012 dengan kategori Perusahaan "Sangat Terpercaya" (*Indonesian Most Trusted Companies*).

- b. Sedangkan berdasarkan survey yang dilakukan oleh IICG (Indonesian Institute for Corporate Governance) pada bulan Desember 2013 BRI mendapatkan peringkat *Most Trusted Company*.
- c. Sedangkan berdasarkan investor and *analysts assessment survey* yang dilakukan oleh Riset SWA terhadap 250 responden (investor, analis, dan manajer investasi) dengan total respon sebanyak 1690, BRI berada pada rating "*Trusted Company*". Penilaian dilakukan berdasarkan aspek prinsip GCG dengan nilai sbb :

Aspek dan bobot	Emiten Code : BBRI
Transparency (0.27)	75,16
Accountability (0.23)	75,83
Responsibility (0.22)	74,85
Independency (0.14)	67,84
Fairness (0.14)	60,43
Total score	72,09
Rating	Perusahaan Terpercaya (<i>Trusted Company</i>)

Implementasi Good Corporate Governance

Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan GCG di Tahun Mendatang

Sesuai hasil penilaian kualitas penerapan GCG secara periodik di tahun sebelumnya dan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan praktek GCG, BRI telah menyiapkan berbagai program peningkatan kualitas penerapan GCG yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, antara lain :

1. Penyempurnaan transparansi implementasi GCG melalui *website* dan laporan tahunan berdasarkan international *best practice* yang banyak diterapkan di industri.
2. Secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan dan pengkinian kebijakan-kebijakan Manual GCG BRI
3. Pembuatan dan pengembangan sistem informasi manajemen untuk menunjang proses bisnis dan pengendalian
4. Secara berkelanjutan melakukan internalisasi dan eksternalisasi prinsip.

Penghargaan Terkait Implementasi GCG

Selama tahun 2013 telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dalam setiap aspek Bank, sehingga sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan publik atas implementasi GCG BRI, selama tahun 2013 terdapat beberapa penghargaan dalam hal pelaksanaan GCG yang diterima BRI antara lain :

Peringkat 1 Annual Report Award (ARA) kategori BUMN Keuangan Listed				
				
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 17 Oktober 2013				
Perusahaan dengan kategori "Most Trusted Company"	Perusahaan dengan kategori "Trusted Company"	Peringkat ke-3 Best Financial Sector	Peringkat ke-3 Kategori Good Corporate Governance untuk Bank dengan Modal Inti > 30 Triliun	peringkat ke-9 The Best Corporate Governance
				
Corporate Governance Perception Index (CGPI) – The Indonesian Institute Of Corporate Governance (IICG) 16 Desember 2013	Investors and Analysts Assessment Survey 16 Desember 2013	The 5th The Indonesian Institute for Corporate Directionship (IICD) Conference and Award Corporate Governance 30 Oktober 2013	Economic Review "Anugerah Perbankan Indonesia 2013" 26 September 2013	Finance Asia 26 Juni 2013

Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Corporate Charter)

Sejak tahun 2001 telah BRI telah merumuskan pedoman umum penerapan GCG di setiap tingkatan organisasi melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk Kebijakan *Good Corporate Governance* BRI (*GCG Charter*), dan telah melakukan program penyempurnaan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2010.

Komitmen *Good Corporate Governance*

Bank berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin pada:

- a. **Visi dan Misi**
Perusahaan mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan misi yang memuat cara untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
- b. **Nilai-nilai Perusahaan (*Core Value*)**
Nilai-nilai Perusahaan mencakup nilai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam Tindakan Budaya Kerja yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak.
- c. **Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi**
Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menjabarkan struktur, tugas dan tanggung jawab, pembagian tugas, etika kerja, rapat, organisasi, dan hubungan kerja dari Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Bank.
- d. **Kode Etik (*Code Of Conduct*)**
Kode Etik Bank merupakan pedoman yang menjelaskan etika usaha dan tata perilaku insan Bank untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik.

Kode Etik Bank menjadi standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh insan Bank diseluruh jenjang organisasi Bank. Penerapan Kode Etik Bank secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan mendukung terciptanya budaya Perusahaan.

- e. **Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**
Perjanjian kerja bersama (PKB) mengatur syarat-syarat kerja yang merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara Bank dengan serikat pekerja di Bank, yang akan digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerja bersama.

Kesepakatan tersebut merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang pada prinsipnya merupakan acuan dalam membina hubungan industrial yang harmonis antara Bank dan seluruh pekerja.

- f. **Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan komitmen BRI untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam fungsinya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, BRI memiliki strategi dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terintegrasi dengan strategi bisnis BRI yang memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dalam laporan secara berkala.

Struktur *Governance*

Struktur tata kelola Bank meliputi struktur organ perusahaan utama dan pendukung serta kebijakan Bank dalam rangka pelaksanaan usaha, yaitu sbb :

- a. **Organ Utama**, yang terdiri dari :
 1. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
RUPS adalah organ tertinggi perseroan dan merupakan forum dan saham dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan kepentingan usaha Perseroan dan memperhatikan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan.

RUPS terdiri atas :

Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

- a). RUPS Tahunan untuk mengesahkan beberapa agenda antara lain rencana kerja perusahaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan auditor eksternal, tindakan korporasi yang membawa dampak signifikan termasuk penggunaan laba bersih dan menyetujui Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- b). RUPS lainnya dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Pelaksanaan RUPS mengacu kepada anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif, dengan demikian masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak dapat mengambil keputusan dan bertindak sendiri atas nama Dewan Komisaris. Walaupun demikian anggota Dewan Komisaris dapat bertindak mewakili Dewan Komisaris atas dasar keputusan Dewan Komisaris.

Dewan komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk :

- a). penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
- b). hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris tersebut tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran dasar Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRI tertuang dalam Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

3. Direksi

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, tetapi pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi akhirnya tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Direksi Bank tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ tersebut mempunyai tugas untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang dan mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi Bank memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi Bank. Dewan Komisaris dan Direksi Bank menyetujui bersama rencana kerja jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan GCG.

Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

b. Organ Pendukung, yang terdiri dari :

1. Komite-komite

- a). Komite di bawah Dewan Komisaris, antara lain :
 - i. Komite Audit;
 - ii. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - iii. Komite Pengawasan Manajemen Risiko.

Ketentuan lebih rinci terkait komite di bawah Dewan Komisaris tertuang dalam Panduan Kerja Dewan Komisaris, pedoman tata tertib kerja Komite Pengawas Manajemen Risiko, pedoman tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Piagam Komite Audit.

- b). Komite di bawah Direksi, antara lain:
 - i. Komite Manajemen Risiko /Risk Management Committee (RMC);
 - ii. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP);
 - iii. Komite Kredit (KK);
 - iv. Komite Aset dan Liabilitas / Asset-Liability Committee (ALCO);
 - v. Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi / IT Steering Committee (ITSC);
 - vi. Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia; dan
 - vii. Komite lainnya yang dapat ditetapkan kemudian

Ketentuan lebih rinci terkait komite dibawah Direksi tertuang dalam Surat Keputusan masing-masing Komite.

2. Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris merupakan organ Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris tertuang dalam Panduan Kerja Sekretaris Dewan Komisaris Bank.

3. Sekretaris Perusahaan

Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan GCG serta untuk mengelola komunikasi kepada *stakeholders*. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan

tanggung jawab Sekretariat Perusahaan tertuang dalam Panduan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary Guidelines*).

4. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko meliputi:

- a). Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b). Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- c). Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko
- d). Sistem Pengendalian Internal

Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank tertuang dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) serta Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko (P3MR).

5. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan Unit Kerja independen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan di BRI. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan jajarannya tertuang dalam Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*).

6. Satuan Kerja Audit Intern

Audit Intern merupakan satuan kerja yang secara struktural berada dibawah pengawasan langsung Direktur Utama, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit. Audit Intern melakukan *assurance* dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi kecukupan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Audit Intern Bank tertuang dalam Piagam Audit Intern (*Audit Charter*).

7. Audit Ekstern

Pemeriksaan terhadap Bank dilakukan pula oleh Auditor eksternal yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksa lain sesuai regulasi dan Kantor Akuntan Publik. Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

c. Kebijakan, yang terdiri dari :

1. Kebijakan Penyusunan Rencana Bank

Rencana Bank terdiri dari :

- a). Rencana Jangka Panjang (RJP/*corporate plan*) merupakan rencana strategis jangka panjang yang berfungsi sebagai garis besar haluan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan terkait RJP tertuang dalam Kebijakan Umum RJP dan Pedoman Pelaksanaan RJP.
- b). Rencana Bisnis Bank (RBB) yaitu rincian pelaksanaan strategi dan program kerja serta target kinerja Bank jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan terkait RBB tertuang dalam Kebijakan Umum RBB dan Pedoman Pelaksanaan RBB.
- c). Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) berisi rincian target kinerja Bank selama 1 (satu) tahun. Kebijakan terkait RKAP tertuang dalam Surat Edaran Bank tentang RKAP.

2. Kebijakan Usaha

Kebijakan dan peraturan internal BRI termasuk *standard operating procedure* (SE/SK/BPO/Juklak) harus sejalan dengan kebijakan GCG yang telah ditetapkan.

Setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas baru harus dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait produk dan/atau aktivitas baru Bank diatur dalam ketentuan tersendiri.

3. Kebijakan Pengawasan

- a). Pengawasan Bank diimplementasikan dengan konsep 3 (tiga) garis pertahanan/*three lines of defense* yaitu:
 - 1). *First Line of Defense*
Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Unit Kerja Bisnis/Operasional sebagai pihak yang bertanggungjawab menjaga kualitas output dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - 2). *Second Line of Defense*
Merupakan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
 - 3). *Third Line of Defense*
Pengawasan yang dilakukan

audit intern melalui evaluasi kepada *First Line* dan *Second Line of Defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.

b). Kebijakan Pengawasan BRI terdiri dari :

- 1). Kebijakan pengendalian internal disusun dengan memperhatikan ruang lingkup sebagai berikut :
 - i. Lingkungan pengendalian.
 - ii. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha,
 - iii. Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan disetiap tingkatan struktur bank.
 - iv. Sistem informasi dan komunikasi.
 - v. Pemantauan, Evaluasi dan tindak lanjut atas aktivitas pengendalian intern.
- 2). Kebijakan pengawasan internal antara lain meliputi kebijakan Audit Intern, Strategi Anti Fraud, Hukum dan Kepatuhan.
- 3). Kebijakan pengawasan eksternal
Pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor eksternal dan lembaga pengawas perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4). Kebijakan transparansi dan Pengungkapan
Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan tertuang dalam :
 - i. Panduan transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure guidelines*);
 - ii. Kebijakan Rahasia Bank; dan
 - iii. Kebijakan tentang pelaporan baik laporan internal maupun eksternal termasuk laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam kebijakan tersendiri menurut jenis laporan.

Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan internal Bank dilakukan secara berkala oleh unit kerja pembuat kebijakan (*policy owner*) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank.

Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Proses Governance

(1). Proses *governance* merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan GCG. Proses *governance* terdiri dari :

- a. **Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**
RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil RUPS dipublikasikan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. **Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi**
Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan atas itikad baik, kehati-hatian dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
- c. **Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank**
Kegiatan usaha Bank dilakukan sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan dan strategi Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada GCG.
- d. **Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)**
Pengelolaan SDM Bank dilakukan dengan mengacu pada arsitektur SDM yang meletakkan prinsip-prinsip GCG sebagai fondasi untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bank.
- e. **Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan**
Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank didasari prinsip-prinsip GCG serta dilaksanakan secara terintegrasi dengan strategi Bank.
- f. **Tata kelola teknologi informasi (IT governance)**
Pemanfaatan dan pengelolaan teknologi Informasi Bank dilakukan berdasarkan pada tata kelola teknologi informasi yang efektif, efisien, dan optimal dalam memberikan nilai yang strategis bagi perusahaan, dan mendukung pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan.
- g. **Pengelolaan Anak Perusahaan**
Keberadaan Anak Perusahaan untuk pengembangan bisnis yang dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan mendukung bisnis utama Bank. Setiap Anak

Perusahaan dituntut untuk lebih maju dan mandiri dalam mengelola bisnis usahanya. Setiap transaksi antara Bank dengan Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

- h. **Sosialisasi kebijakan Bank**

Seluruh kebijakan Bank yang berkaitan dengan bidang tugas wajib dikomunikasikan kepada pekerja dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait serta penatakerjaan kebijakan dengan baik dan lengkap sebagai referensi pelaksanaan pekerjaan.

- i. **Dokumentasi proses**

Pendokumentasian berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi efektifitas proses kegiatan. Seluruh proses kegiatan tata kelola didokumentasikan dan ditatakerjaan dengan baik dan rapi serta pelaksanaan retensi dokumen dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2). Bank wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Ketentuan tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang diatur dalam SKB ini menjadi dasar dan atau pedoman bagi seluruh organ dan insan Bank serta unit kerja Bank dalam menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur serta melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha Bank lainnya

Kebijakan dan Prosedur Operasional Perusahaan

BRI telah memiliki berbagai kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bentuk komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang berkualitas. Hingga akhir tahun 2013, BRI telah memiliki tidak kurang dari 35 kebijakan/piagam pelaksanaan kegiatan unit kerja, antara lain:

1. Kebijakan Umum *Good Corporate Governance* BRI;
2. Kebijakan Budaya Kerja BRI;
3. Kode Etik BRI (*code of conduct*);
4. *Board Manual* beserta Panduan kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Panduan Kerja Komite Dewan Komisaris BRI dan Piagam Komite Audit BRI;
6. Panduan Sekretaris Perusahaan BRI;
7. Kebijakan Umum Penanganan Benturan Kepentingan BRI;
8. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) BRI;
9. Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah;

Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

10. Panduan Transparansi dan Pengungkapan BRI;
11. Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank;
12. Strategi Anti Fraud BRI;
13. Peraturan Disiplin BRI;
14. Kebijakan Umum Organisasi BRI;
15. Kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) BRI;
16. Kebijakan Umum Rencana Bisnis Bank (RBB) BRI ;
17. Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BRI;
18. Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) BRI beserta turunannya;
19. Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Management*);
20. Kebijakan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB) BRI;
21. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) BRI;
22. *Compliance Charter*;
23. Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja BRI;
24. *Audit Charter*;
25. Panduan Audit Intern (PAI) BRI;
26. Kebijakan dan Prosedur Audit Teknologi Sistem Informasi;
27. Sistem Manajemen Mutu Audit Intern;
28. Arsitektur Sumber Daya Manusia;
29. Kebijakan Umum Pengembangan dan Pelatihan BRI;
30. Beberapa kebijakan *reward and punishment* BRI;
31. Kebijakan Umum Teknologi Sistem Informasi (KUTSI) BRI;
32. Kebijakan Umum dan Prosedur Sekuriti Teknologi Sistem Informasi;
33. Kebijakan Umum Perkreditan beserta turunannya;
34. Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL) BRI; dan
35. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa BRI.

Informasi Kebijakan dan Program Penting Lainnya

Dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan garis besar kebijakan diatas, BRI merealisasikan berbagai program, baik dalam rangka melaksanakan ketentuan regulator maupun sesuai dengan kaidah penerapan best practice GCG. Beberapa program tersebut mencakup:

- **Penerbitan Laporan Transparansi Kondisi Keuangan**
BRI senantiasa mematuhi ketentuan dari otoritas berwenang untuk memenuhi azas keterbukaan dengan membuat dan menerbitkan berbagai laporan yang diwajibkan seperti tercantum pada tabel berikut.

No	Jenis Laporan	Publikasi	
		Media Publikasi	Tanggal
1.	Laporan Tahunan BRI tahun 2012	Website, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia Bank Indonesia, YLKI, Lembaga Peringkat, Asosiasi Perbankan, IBI, Lembaga Penelitian Ekonomi & Keuangan, Majalah Ekonomi & Keuangan	14 Februari 2013
2.	Laporan Keuangan Publikasi:		
	- Tahun 2012 (posisi 31 Desember 2012)	BI, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, Website BRI, Surat Kabar, Website Bursa Efek Indonesia	01 Februari 2013
	- Triwulan I tahun 2013 (posisi 31 Maret 2013)		27 April 2013
	- Triwulan II Tahun 2013 (posisi 30 Juni 2013)		31 Juli 2013
	- Triwulan III Tahun 2013 (posisi 30 September 2013)		24 Oktober 2013

Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

• Pelaksanaan *Share Option*

BRI telah menetapkan kebijakan internal mengenai pemberian *Share Option* dengan mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK Nomor: Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi insentif berupa kesempatan mendapatkan benefit langsung dari kinerja saham perusahaan terhadap seluruh jajaran internal.

Pemberian saham dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap dalam waktu 3 tahun sebagai berikut:

1. MSOP Tahap I dilaksanakan pada saat *Initial Public Offering* (IPO) dengan harga Rp962,5 dan jangka waktu 5 tahun (10 November 2003 - 9 November 2008)
2. MSOP Tahap II dilaksanakan pada tahun ke-2 setelah IPO dengan harga Rp1.750 dan jangka waktu 5 tahun (10 November 2004 - 9 November 2009)
3. MSOP Tahap III dilaksanakan pada tahun ke-3 setelah IPO dengan harga sesuai aturan Bursa dan jangka waktu 5 tahun (10 November 2005 - 9 November 2010).

Saham yang dimiliki oleh jajaran Direksi (selain Direktur Utama) diberikan pada saat yang bersangkutan aktif menjabat sebagai pejabat eksekutif tercantum pada tabel berikut.

Pengungkapan Pelaksanaan share option BRI									
Nama	Program Penjatahan Saham (Employee Stock Allocation- ESA)			Program Pemberian Opsi Pembelian Saham (Management Stock Option Plan-MSOP)					
	Saham Bonus	Saham Diskon	Saham Jatah Tambah	Jatah Saham yang Diberikan			Jatah Saham yang Dieksekusi		
				Saham MSOP 1	Saham MSOP 2	Saham MSOP 3	Saham MSOP 1	Saham MSOP 2	Saham MSOP 3
Direksi									
Sofyan Basir	-	-	-	-	-	3.115.500	-	-	3.115.500
Sarwono Sudarto	41.000	54.500	50.000	376.000	320.500	140.000	376.000	320.500	140.000
Sulaiman Arif Arianto	38.000	51.000	50.000	345.000	320.500	140.000	345.000	320.500	140.000
Lenny Sugihat	38.000	51.000	50.000	345.000	320.500	137.000	345.000	320.500	137.000
Asmawi Syam	41.000	54.500	125.000	376.000	320.500	140.000	376.000	320.500	140.000
Suprajarto	28.000	37.500	50.000	229.000	215.000	137.000	229.000	215.000	137.000
A. Toni Soetirto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djarot Kusumayakti	28.000	37.500	50.000	229.000	215.000	137.000	229.000	215.000	137.000
Achmad Baiquni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Randi Anto	28.000	37.500	50.000	299.000	215.000	134.000	229.000	215.000	134.000
Gatot Mardiwastoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.177.000	4.244.500	6.780.000	25.367.000	27.124.500	13.305.000			

Setelah pelaksanaan MSOP dan ESOP tersebut diatas, hingga saat ini BRI belum pernah melaksanakan program serupa.

• Pengungkapan Rasio Gaji

Rasio gaji tertinggi dan terendah perbulan dari manajemen dan pekerja BRI adalah sebagai berikut.

Rasio	2012	2013
Gaji Pekerja Tertinggi dan Terendah	24,06	25,66
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,11	1,11
Honorarium Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11	1,11
Gaji Direksi Tertinggi dan Pekerjaan Tertinggi	2,56	2,40

Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

• Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar di Tahun 2013

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BRI telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan atas persetujuan Dewan Komisaris BRI. Selain itu, untuk penyediaan dana dengan besaran minimal Rp1 (satu) triliun dan/atau berdasarkan pertimbangan Komite Kredit BRI atau Direksi, maka putusan penyediaan dana tersebut harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Ketentuan besaran tersebut berlaku baik untuk debitur tunggal, grup, inti plasma maupun debitur BUMN atau pemerintah.

Posisi Dana Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)			
No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal/Total Baki Debet (jutaan rupiah)
1	Kepada pihak terkait	12	2.240.337
2	Kepada debitur inti:		
	• Individu	8	42.315.576
	• Grup	17	70.583.992

• Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi

Sebagai bentuk respon atas ketentuan regulator, yakni :

- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- Peraturan Menteri BUMN No PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

BRI telah menyusun program dan kebijakan pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan aturan tersebut. Kebijakan dan program pengelolaan yang dikembangkan meliputi strategi pengembangan fungsi TI, kebijakan penggunaan perangkat lunak maupun keras, kebijakan pengamanan informasi perusahaan maupun kerahasiaan nasabah, pengembangan SDM dibidang TI dan sebagainya. Uraian lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada sub-bab "**Pengelolaan Teknologi Informasi**".

• IT Architecture Framework

BRI menyadari bahwa IT *Governance* merupakan salah satu pilar utama dari GCG, sehingga diperlukan standar tata kelola TI yang efektif, efisien dan optimal serta dapat diterapkan di lingkungan Perusahaan yang mengacu pada tata kelola TI Internasional.

Arsitektur TI BRI telah disusun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari IT Strategic Plan (ITSP) 2008-2013. Dalam penerapan dan pengembangan IT BRI, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi (MR-IT) bagi Bank Umum. Arsitektur IT BRI terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

1. *Enterprise Architecture: Executive Summary*
2. *Assessment Phase: Business & IT Context*
3. *Design Phase: Enterprise Architecture Definition*
4. *Transition Plan Phase: Application, Information, and Infrastructure*

Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

- Kebijakan dan Prosedur IT**

Beberapa kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mendukung proses tata kelola Perusahaan antara lain sebagai berikut :

Bentuk Kebijakan	Contoh Bukti Dokumentasi
1. Penetapan peran TI Perusahaan	1. RKAP, RBB, RJP BRI yang memuat pembahasan TI BRI 2. Daftar Uraian Jabatan Divisi Teknologi dan Sistem Informasi BRI
2. Perencanaan TI	1. IT <i>Strategic Plan</i> (ITSP) 2008-2013 2. Arsitektur Teknologi Informasi BRI
3. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TI	1. Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi 2. Struktur Organisasi Divisi Teknologi dan Sistem Informasi BRI 3. Kebijakan Umum Sistem informasi 4. Kebijakan Umum Sekuriti Teknologi Sistem Informasi (KUTSI) BRI 5. Ketentuan Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen Dalam Rangka Pengamanan Informasi 6. <i>Service Level Agreement</i> Teknologi dan Sistem Informasi
4. Pengelolaan Investasi TI	1. <i>Horizontal Alignment</i> Prosedur Pengelolaan Pengadaan Investasi TI 2. Kebijakan dan Prosedur terkait <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) dan kamera Embedded
5. Pengelolaan Sumber Daya TI	1. <i>Standar Key Management</i> 2. Kebijakan Standarisasi Perangkat Teknologi Informasi 3. Ketentuan Pengembalian Aset TI dan Perubahan Hak Akses Terkait Perubahan Status Pegawai 4. Ketentuan Pengendalian Akses jaringan 5. Ketentuan Review Kapasitas Sarana Pendukung
6. Pengelolaan Risiko TI	1. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi 2. Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)/ <i>Business Continuity Management</i> (BCM) BRI 3. Standar Operasional Procedur Disaster Recovery management Teknologi dan Sistem Informasi BRI 4. Ketentuan <i>Security Compliance Check</i> 5. Prosedur Tata Kelola <i>User Account</i> 6. Ketentuan Tata Kelola <i>Password</i> 7. Ketentuan <i>Backup dan Restore</i> 8. Ketentuan IT <i>Security Awareness</i> 9. Standar Konfigurasi <i>Firewall</i> 10. Prosedur Manajemen <i>Antivirus dan Security Patch</i> 11. Prosedur Manajemen Insiden Keamanan Informasi
7. Pengelolaan Proyek (<i>Project Management</i>)	1. Kebijakan Pengkajian Perangkat Teknologi Informasi 2. Prosedur Siklus Pengembangan IT BRI
8. Penanganan Kebutuhan dan Identifikasi Solusi (<i>Identify Automated Solution</i>)	1. Ketentuan Evaluasi Kebijakan Keamanan Informasi 2. Ketentuan Penanganan Informasi 3. Ketentuan <i>Security Hardening</i> 4. Ketentuan Pemeliharaan Aset Teknologi Informasi

- Sertifikasi TI (ISO) yang diterima BRI**

Sentra Operasi BRI telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008 untuk bidang *Provision of Payment System by RTGS, Clearing and Remittance*. Sertifikasi dari *Lloyd's Register Quality Assurance*.

Layanan *contact center* BRI telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008. yang diberikan oleh *Verification New Zealand Limited*

- Rencana Pengembangan TI BRI ke depan**

Rencana pengembangan TI BRI ke depan untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi Perusahaan, antara lain dengan menciptakan *one stop service* yang terintegrasi dengan memanfaatkan jaringan yang luas dan produk yang beragam. Menyediakan akses data yang lengkap secara *real time online*, serta penerapan teknologi sekuriti yang handal.

Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

- Kebijakan Transaksi Berelasi dan Benturan Kepentingan**

Transaksi Berelasi

Sebagai salah satu bank BUMN papan atas terbesar dengan daerah operasional tersebar di seluruh pelosok tanah air, BRI tidak dapat menghindari terjadinya transaksi berelasi dengan sesama BUMN atau transaksi lain yang tergolong transaksi berelasi sesuai definisi regulasi terkait. Untuk itu, BRI telah menetapkan kebijakan dimana ketentuan untuk transaksi berelasi sama dengan transaksi dengan pihak ketiga lainnya. Persamaan mendasarnya adalah bahwa dalam penetapan harga jual, harga pembelian, beban sewa maupun transaksi lainnya dilakukan melalui negosiasi agar memenuhi asas *quality, cost, delivery* (QCD) yang optimal bagi kepentingan kedua belah pihak.

Selain itu dilakukan penyebaran Lembar Pakta Integritas kepada seluruh rekanan/mitra pemasok BRI untuk bersama-sama menjalankan mekanisme kerja sama yang menjunjung tinggi kode etik berbisnis dan prinsip-prinsip

Ajakan dan himbauan terbuka (melalui media cetak) juga dilakukan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan BRI untuk bersama-sama menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan kaidah GCG.

Daftar seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi tersebut dapat dilihat pada catatan 43 dari Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan.

Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan Benturan Kepentingan BRI merupakan kebijakan turunan dari Kode Etik BRI, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 02-KOM/BRI/05/2012 dan S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of interest*) BRI. Kebijakan tersebut mengatur tentang bentuk, sumber penyebab, prinsip dasar penanganan, tahapan dalam penanganan, faktor pendukung keberhasilan penanganan, serta pelaporan dalam rangka transparansi dan pengungkapan benturan kepentingan.

Kebijakan umum penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan ketentuan dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan ketentuan untuk beberapa segmen kegiatan seperti penanganan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan putusan pemberian kredit, dsb.

Dalam hal adanya kemungkinan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, ditegaskan bahwa pihak-pihak internal maupun eksternal BRI yang memiliki peluang tersangkut dalam transaksi dimaksud dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan menyangkut transaksi tersebut. Dengan demikian, seluruh pihak dapat terhindar dari dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, bebas dari segala pengaruh dan tekanan sehingga pengambilan keputusan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dilakukan secara obyektif. Untuk maksud tersebut, seluruh Direksi juga tidak diperkenankan memiliki saham pada perusahaan terafiliasi dengan BRI maupun saham pada entitas anak.

Selama tahun 2013, tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Bank, sebagaimana didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang "Benturan Kepentingan".

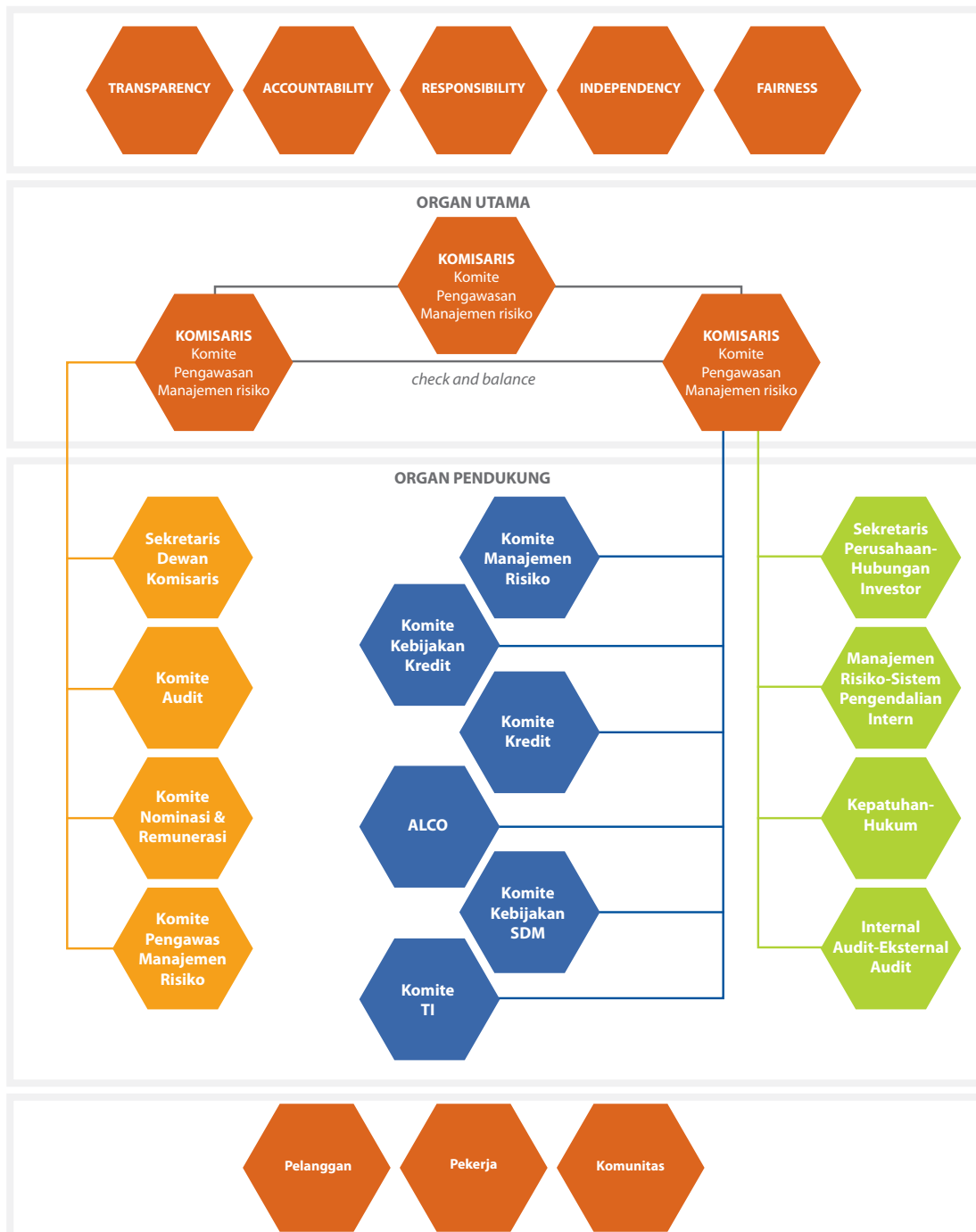
Nama dan Jabatan yang Memiliki benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambilan Ketentuan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp Juta)	Keterangan (tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku)
Nihil				

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

BRI senantiasa berupaya menyempurnakan struktur dan penerapan tata kelola perusahaan. Untuk menjamin adanya *check and balance* dan akuntabilitas yang jelas dan tegas dari masing-masing organ perusahaan.

Untuk menjamin agar masing-masing organ utama dalam struktur tata kelola dapat berfungsi optimal, BRI telah memenuhi jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, serta telah membentuk Komite-Komite di tingkat Dewan Komisaris maupun Direksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemisahan yang jelas antara organ perusahaan mencerminkan adanya *check and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik.

Berikut adalah struktur tata kelola perusahaan BRI:



Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

RUPS merupakan sarana bagi pemegang saham untuk mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan penting Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi Perusahaan. Forum RUPS merupakan forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan investasi para pemegang saham yang akan berpengaruh terhadap garis besar operasional perusahaan. RUPS mempunyai kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting menyangkut pengembangan dan masa depan Perseroan secara setara. RUPS juga merupakan forum evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, mencakup kinerja ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terdiri dari:

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan
2. Usulan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai laba positif.
3. Usulan penetapan akuntan publik untuk mengaudit tahun buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.
4. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara, dengan demikian mengacu pada Pasal 23 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi BRI wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

RUPS Lainnya

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya dengan didahului oleh Pengumuman dan Pemanggilan Rapat.

Ketentuan Acuan

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan menggunakan surat tercatat/iklan surat kabar dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
2. Sebelum melakukan pemanggilan, 14 (empat belas) hari sebelumnya, Perseroan wajib melakukan pemberitahuan bahwa akan dilakukan Pemanggilan RUPS.

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

- Terkait dengan status BRI sebagai salah satu perusahaan terbuka serta dalam rangka keseragaman informasi mengenai rencana atau pelaksanaan RUPS, maka sesuai ketentuan Bapepam-LK No. IX.I.1, Perseroan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda Rapat tersebut secara jelas dan rinci kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan.
- Selanjutnya setelah pelaksanaan RUPS, Perseroan wajib menyampaikan hasil Rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam-LK dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.
- Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.

Tahun 2013 BRI melakukan 1 kali RUPS, dengan keputusan diantaranya pembagian dividen sebesar **30 %** laba bersih 2012

Selama tahun 2013, BRI melaksanakan 1 kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2013 bertempat di Gedung BRI 1 Lantai 21 dan dihadiri oleh 20.998.988.515 atau 85,122% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS Tahunan BRI Tahun 2013, sebagai berikut:

Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil
diumumkan pada tanggal	diumumkan pada tanggal	Dilaksanakan pada tanggal	Dipublikasikan pada tanggal
29 Januari 2013	13 Februari 2013	28 Februari 2013	4 Maret 2013
di media harian koran Kompas dan Bisnis Indonesia	di media harian koran Kompas dan Bisnis Indonesia	Pukul 09.30 WIB Bertempat di Gedung BRI 1 Lantai 21	di media harian koran Kompas dan Bisnis Indonesia

Keputusan penting dalam RUPS sesuai agenda, dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dengan hasil pemungutan didukung **99,891%** dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam rapat, ditolak oleh **0,036%** dari jumlah seluruh saham yang hadir dan abstain sebesar lebih kurang **0,073%** dari jumlah seluruh saham yang hadir, adalah:

- Menyetujui Laporan Tahunan 2012 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Surja sesuai Laporan No. RPC-3167/PSS/2013 tanggal 23 Januari 2013, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2012.
- Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku 2012 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan sesuai dengan Laporan No. 003/LAI/PKBLBRI/HSR.HT tanggal 12 Februari 2013 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

- Lingkungan tahun buku 2012 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tersebut
3. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2012 sebagai berikut:
 - i. Sebesar 30% atau Rp5.556.284.926.148,- ditetapkan sebagai dividen tahun buku 2012 dan akan dibayarkan pada tanggal 15 April 2013 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 April 2013.
 - ii. Sebesar 14% atau Rp2.592.932.965.535,- untuk Cadangan Tujuan guna mendukung investasi.
 - iii. Sebesar 56% atau Rp10.371.731.862.145,10 akan menambah laba ditahan.
 - b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2012 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menyetujui penetapan besaran Dana Program Bina Lingkungan BRI Tahun Buku 2013 untuk menjadi bean tahun berjalan sebesar 2% dari laba bersih tahun buku 2012 atau sebesar Rp370.418.995.076,-.
4. a. Memutuskan gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2013, ditetapkan sama dengan gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan untuk tahun 2012.
 - b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem yang diberikan kepada anggota

- Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012.
5. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2013 serta menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Menyetujui pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Dewan Komisaris Ketentuan Acuan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") mewajibkan semua Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia mempunyai Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Selain itu, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Anggota Dewan Komisaris BRI dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Board Charter Dewan Komisaris

BRI memiliki Board Charter Dewan Komisaris, atau biasa disebut Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sehari-hari. Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris disusun sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dan sebagai dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Dewan Komisaris. Buku Panduan tersebut menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan RUPS.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris juga selalu berpedoman pada Anggaran Dasar, Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Tugas & Tanggung Jawab, Wewenang, Dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Tugas

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya terkait Perusahaan Anak, Dana Pensiun, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
2. Memberikan nasihat kepada Direksi mengenai pengurusan Perseroan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan rencana kerja lainnya yang disusun Direksi.

Disamping itu, Dewan Komisaris juga melakukan tugas yang secara khusus diberikan

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

menurut ketentuan Bank Indonesia, diantaranya adalah:

- a. Mengawasi efektivitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Perseroan;
- b. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko dan
- c. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya.

Tanggung Jawab

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, serta memeriksa kekayaan Perseroan
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/ atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
5. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
6. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
7. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lain, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
9. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
10. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau keputusan RUPS.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
13. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

Kewajiban

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Perseroan (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP),

Dewan Komisaris memiliki berbagai kewenangan untuk menjamin berjalannya tugas pengawasan yang efektif

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan;
5. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan

8. apabila diminta; Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI per 31 Desember 2013 adalah 8 (delapan) orang. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi jumlah Direksi BRI sebanyak 11 (sebelas) orang.

Komisaris Independen BRI berjumlah 4 (empat) orang atau 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris BRI telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Anggota Dewan Komisaris BRI tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain, dengan pengecualian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PBI tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI berdomisili di Indonesia dan seluruhnya telah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*).

Susunan Dewan Komisaris BRI per 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 :

No.	Nama	Jabatan	Usia (Tahun)	Tanggal Pengangkatan
1.	Bunador Sanim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	68	I : 30 Mei 2006 II : 28 April 2011
2.	Mustafa Abubakar *)	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	64	28 Maret 2012
3.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	50	20 Mei 2010
4.	Aviliani	Komisaris Independen	52	I : Mei 2005 II : 20 Mei 2010
5.	Ahmad Fuad ***)	Komisaris Independen	59	28 Maret 2012
6.	Heru Lelono	Komisaris	58	20 Mei 2010
7.	Hermanto Siregar	Komisaris	50	28 April 2011
8.	Vincentius Sonny Loho **)	Komisaris	56	28 Maret 2012

*) terhitung sejak 27 Juli 2012 efektif sebagai Wakil Komisaris Utama setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia berdasarkan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*)

**) terhitung sejak 5 September 2012 efektif sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia berdasarkan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*)

***) terhitung sejak 1 Juni 2012 efektif sebagai Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia berdasarkan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*)

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Independensi Komisaris

Pasal 8 PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum mengatur bahwa Bank harus memiliki Komisaris Independen dengan komposisi paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Demikian pula Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Untuk menjamin terlaksananya independensi Dewan Komisaris BRI, pemegang saham melalui RUPS telah menetapkan 4 (empat) orang Komisaris Independen dari total 8 (delapan) orang jumlah anggota Dewan Komisaris BRI.

Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Komisaris Independen BRI senantiasa melepaskan diri dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Seluruh anggota Komisaris Independen BRI telah memenuhi persyaratan utama, mencakup:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BRI atau pun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Diusulkan oleh Pemegang Saham dan dipilih dalam RUPS.
5. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dengan komposisi Komisaris Independen mencapai **50%**, BRI memenuhi ketentuan aturan independensi Komisaris minimal **30%** sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Perangkapan Jabatan Komisaris

Aturan dari Bank Indonesia menegaskan bahwa anggota Dewan Komisaris hanya diizinkan merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga perusahaan non-keuangan, atau dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak non-bank yang dikendalikan oleh BRI.

Rangkap jabatan dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Sesuai dengan aturan tersebut, saat ini beberapa anggota Dewan Komisaris BRI menjalani perangkapan jabatan pada beberapa lembaga nirlaba, sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	Jabatan Lain Saat ini
1.	Bunasor Sanim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap untuk Program Sarjana dan Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor. Aktif dalam berbagai organisasi antara lain Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Anggota Dewan Penasihat Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Anggota Dewan Penasihat International Center for Analysis of Finance and Economic (InterCAFE), Anggota Penasihat Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Ketua 1 Dewan Pupuk Indonesia (DPI) dan Ketua 1 Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA).
2.	Mustafa Abubakar	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	Nihil
3.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	Nihil
4.	Aviliani	Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Ketua Indonesia Society of Independent Commissioners (ISICOM), Pengurus Perbanas Pusat, Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Pengurus Bidang Keuangan dan Investasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Penasihat KADIN Bidang Hubungan Kerjasama Indonesia – Singapura, dan Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia
5.	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	Nihil
6.	Heru Lelono	Komisaris	Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2004-sekarang)
7.	Hermanto Siregar	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Pengembangan Guru Besar Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor, Anggota Komite Ekonomi Nasional Republik Indonesia Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
8.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Program Kerja dan Pelaksanaan Program Kerja

Program Kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun anak usaha perusahaan Perseroan.

Program kerja Dewan Komisaris pada pokoknya merupakan hasil konsolidasi dari program kerja ketiga Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut.

Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Pelaksanaan program kerja selama tahun 2013 menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

1. Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. BRI (Persero), Tbk. Tahun 2014.
2. Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis Bank 2014-2017 PT. BRI (Persero), Tbk.
3. Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank PT. BRI (Persero), Tbk. Semester II Tahun 2012.
4. Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2013.
5. Hasil Pengawasan Laporan Keuangan DPLK BRI Tahun Buku 2011.
6. Persetujuan atas Perubahan Organisasi PT. BRI (Persero), Tbk.
7. Persetujuan atas Pernyataan Tertulis Pendiri dalam Rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun PT. BRI (Persero), Tbk.
8. Evaluasi terhadap Laporan Direktur Kepatuhan PT. BRI (Persero), Tbk.

9. Evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko PT. BRI (Persero), Tbk.
10. Penilaian *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT. BRI (Persero), Tbk. Semester II Tahun 2013.
11. Penilaian *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2013.
12. Konsultasi Kredit Direksi kepada Dewan Komisaris.
13. Persetujuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT BRI
14. Persetujuan Revisi Piagam Audit Intern tahun 2013
15. Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) DPLK BRI tahun 2013
16. Persetujuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kebijakan GCG dan kode etik PT. BRI (Persero) Tbk.
17. Persetujuan Penyediaan Dana Pihak Terkait Persetujuan Tambahan Modal Kepada PT. Bank BRI Agroniaga Tbk.
18. Persetujuan Tambahan Modal Kerja PT. Bank BRI Syariah
19. Persetujuan penyediaan dana pihak terkait PT. Bringin Gigantara

Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Rekomendasi dan Saran berkaitan dengan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Beberapa Unit Kerja PT. BRI (Persero), Tbk. yang disampaikan pada saat rapat dengan Direksi
2. Rekomendasi Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris PT. BRI (Persero), Tbk

Tanggapan Dewan Komisaris

1. Tanggapan terhadap Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Triwulan I Tahun 2013.
2. Tanggapan terhadap Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Triwulan IV Tahun 2012.

3. Tanggapan atas Perencanaan Audit Tahunan Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Tahun 2013.
4. Tanggapan terhadap Laporan Hasil Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2013

Rapat, Kehadiran Rapat dan Keputusan Rapat

Etika Rapat

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diadakan paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Dalam prakteknya, rapat Dewan Komisaris dilakukan minimal sekali seminggu dan diantaranya sekali dalam sebulan melakukan rapat gabungan dengan seluruh anggota Direksi. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Sesuai ketentuan dalam Panduan Kerja Dewan Komisaris, diatur bahwa materi rapat harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung, sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun pelaporan 2013, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 41 kali dengan rekapitulasi tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
1.	Bunasor Sanim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	41	40	98 %
2.	Mustafa Abubakar	Wakil Komisaris Utama/Komisaris	41	39	96 %
3.	Aviliani	Komisaris Independen	41	37	90 %
4.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	41	29	70 %
5.	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	41	38	94 %
6.	Heru Lelono	Komisaris	41	27	66 %
7.	Hermanto Siregar	Komisaris	41	35	86 %
8.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	41	35	86 %

Adapun agenda rapat yang dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi Pembahasan
1	3 Januari	Rencana kerja Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2013
2	10 Januari	Kinerja Tahun 2012 dan RKA tahun 2013 Dana Pensiun BRI dan Anak Perusahaan.
3	15 Januari	Hasil Kajian tentang Perkembangan Makro Ekonomi dan Keuangan
4	22 Januari	Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2012
5	31 Januari	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2013
6	05 Februari	Pembahasan perubahan organisasi Perseroan
7	12 Februari	1. Profil Risiko BRI untuk Triwulan III dan IV tahun 2012 2. Tingkat Kesehatan Bank 3. Strategi Anti Fraud
8	19 Februari	1. Kinerja PKBL tahun 2012, 2. Pelaksanaan Audit PKBL 2012, 3. Rencana Kerja PKBL 2013
9	5 Maret	1. Laporan Hasil Audit Triwulan IV tahun 2012 2. <i>Whistleblower System</i> 3. Profil SDM
10	26 Maret	1. Kunjungan Dewan Komisaris ke Uker BRI untuk tahun 2012 2. Rencana Kunjungan Dewan Komisaris ke Uker BRI untuk tahun 2013
11	9 April	Kinerja BRI Triwulan I
12	16 April	1. FGD antara IPB dengan Manajemen BRI 2. Kajian Komite Non Komisaris 3. Kunjungan kerja Dewan Komisaris untuk bulan April dan Mei 2013
13	30 April	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut MSDM
14	7 Mei	1. Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris BRI selama tahun 2013 (5 Kanwil BRI) 2. Pelaksanaan Kajian oleh anggota Komite Non Komisaris
15	14 Mei	Pemaparan Kinerja PT. BRI Syariah Tahun 2012 dan RKAP 2013
16	21 Mei	1. Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Triwulan 1 Tahun 2013 2. Laporan Terkini Triwulan II Tahun 2013
17	28 Mei	Pemaparan Kinerja PT. BRI Agroniaga 2012 dan RKAP 2013
18	4 Juni	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Bidang IT

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No	Tanggal	Materi Pembahasan
19	11 Juni	1. Profil Risiko Triwulan I Tahun 2013 2. Peran GMRK di Kanwil BRI Selindo 3. Pelaksanaan fungsi kepatuhan di BRI
20	18 Juni	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut bidang Jaringan Kerja dan Layanan BRI
21	2 Juli	1. Strategi Bisnis Perseroan 2. Implementasi GCG semester I Tahun 2013, 3. Ketentuan pengadaan di BRI
22	9 Juli	Pembahasan <i>Management Letter</i> (Hasil Audit Umum Laporan Keuangan per 31 Desember 2012)
23	30 Juli	1. Kinerja BRI Triwulan II Tahun 2013 2. Persiapan Laporan Publikasi Juni Tahun 2013
24	30 Juli	Kinerja dan Rencana Kerja Dana Pensiun BRI
25	27 Agustus	1. Pembahasan Pengisian Kuesioner CGPI 2. Rencana Kunjungan Kerja Dewan Komisaris pada Semester II Tahun 2013 3. Rencana Kajian dan <i>Sharing Info</i> Lembaga Komisaris pada Tahun 2014
26	03 September	Pembahasan Laporan Hasil Audit Triwulan II Tahun 2013
27	03 September	Pemaparan Realisasi RBB Semester 1 Tahun 2013
28	10 September	1. Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2012, Triwulan I dan II Tahun 2013 2. Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2013 3. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 4. Strategi <i>Anti Fraud</i>
29	12 September	Laporan Keuangan DPLK BRI Tahun 2012
30	8 Oktober	1. Kinerja Bidang Konsumer Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 2. Rencana Kerja Semester II Tahun 2013
31	22 Oktober	Perubahan organisasi Perseroan
32	22 Oktober	1. Persiapan Publikasi Kinerja BRI Triwulan III Tahun 2013 2. Pemaparan realisasi RBB s.d Triwulan III Tahun 2013
33	29 Oktober	Pertemuan dengan IICG (Observasi CGPI 2012)
34	29 Oktober	Pembahasan pengembangan E-Channel
35	31 Oktober	Rencana Audit Perseroan tahun 2013
36	22 November	RBB 2014-2017 dan RKAP 2014
37	26 November	Rencana kerja dan tindak lanjut bidang MSDM
38	10 Desember	1. Profil Risiko Triwulan III Tahun 2013 2. Pembahasan fungsi Kepatuhan 3. Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Triwulan III Tahun 2013
39	17 Desember	Pembahasan RKA Dewan Komisaris 2014
40	24 Desember	Pembahasan Laporan Hasil Audit Triwulan III Tahun 2013
41	30 Desember	Pembahasan <i>Draft Annual Report</i> 2013

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Program Pelatihan secara umum dibagi 2 (dua), yakni Program Pengenalan Perusahaan dan Program Pelatihan Kompetensi.

Program Pengenalan Perusahaan

Kepada anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program pengenalan Perusahaan. Program pengenalan Perusahaan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan

Program pengenalan meliputi:

- pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Perusahaan;
- gambaran mengenai Perusahaan yang berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit
- keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program Pelatihan Kompetensi

BRI menyelenggarakan program pelatihan untuk mendukung upaya peningkatan pengetahuan para anggota Dewan Komisaris mengenai informasi-informasi perkembangan industri perbankan terkini maupun pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa program pelatihan umum yang diselenggarakan meliputi.

No	Tanggal	Nama Komisaris	Judul Pelatihan	Tempat
1	16 Januari 2013	Bunaser Sanim, Mustafa Abubakar, Ahmad Fuad, Hermanto Siregar	Workshop Komisaris / Pengawas BUMN	Jakarta
2	22 - 23 Februari 2013	Heru Lelono dan Ahmad Fuad	Workshop Sosialisasi PER-11/MBU/2012 dan PER-21/MBU/2012 - Media Pekerja BUMN	Bali
3	03 April 2013	Bunaser Sanim dan Mustafa Abubakar	Workshop Eksekutif & Komisaris/Pengawas BUMN "Pencegahan Hyper Corporate Crime terhadap BUMN" - BUMN Executive Club	Jakarta
4	10 - 14 Juni 2013	Ahmad Fuad	Leadership & Strategic Management in Banking School - Euromoney Training EMEA	Prague, Republik Ceko
5	17 September 2013	Mustafa Abubakar dan Ahmad Fuad	The 7th Jakarta Risk Management Convention - BSMR	Jakarta
6	22 - 29 September 2013	Bunaser Sanim dan Mustafa Abubakar	Benchmarking "Praktik ERM Berbasis ISO 31000" - CRMS Indonesia	Sydney & Melbourne, Australia
7	30 September 2013	Aviliani	BARa Risk Forum - Executive International Conference - Growing with Confidence "The Role of Enterprise Risk Management in Driving a Winning Strategy"	London, UK
8	14 - 15 November 2013	Mustafa Abubakar	43rd ASEAN Banking Council Meeting - ASEAN Bankers Association	Yangon, Myanmar
9	11 12 Desember 2013	Hermanto Siregar	Two Days Workshop : Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) & Supervisory Review & Evaluation Process (SREP) - BSMR	Jakarta

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Key Performance Indicator Dewan Komisaris

BRI menetapkan *Key Performance Indicators* dalam bentuk target-target yang terdapat pada Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. *Key Performance Indicators* sebagai acuan kinerja Dewan Komisaris tersebut mencakup:

1. Aspek Pengawasan Pasif (*off site supervision*), yang mencakup ketepatan waktu hasil review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern, ketepatan waktu hasil review Laporan Keuangan, hasil penilaian *Self Assessment* GCG, ketepatan waktu Laporan Profil Risiko, serta ketepatan waktu Laporan Kepatuhan.
2. Aspek Pengawasan Aktif (*on site supervision*), yang mencakup jumlah rapat, jumlah kunjungan kerja, serta jumlah dan ketepatan waktu kajian yang dilakukan oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
3. Aspek Kinerja Perseroan yang mencakup Rentabilitas (Laba Bersih dan ROA), Likuiditas (Dana Pihak Ketiga dan LDR) serta Perkreditan (ekspansi kredit dan NPL).

Pelaksana Assessment Dewan Komisaris

Secara periodik, Dewan Komisaris melakukan *self assessment* terhadap pencapaian *Key Performance Indicators* yang terdapat di dalam RKAP. Namun demikian secara keseluruhan assessment terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh forum pemegang saham, pada saat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

Remunerasi Dewan Komisaris

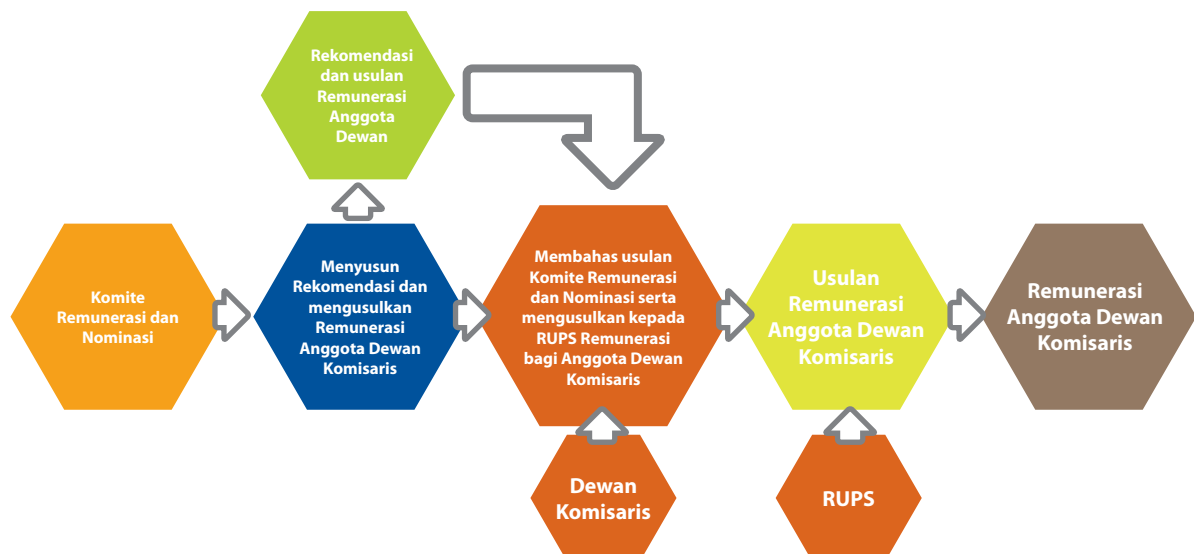
Kebijakan dan prosedur/metode penetapan remunerasi Dewan Komisaris

BRI menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-07/MBU/2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan PER-04/MBU/2013 tentang perubahan atas PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komponen penghasilan Dewan Komisaris BRI terdiri dari : Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem/Insentif Kinerja.

Penetapan Gaji, Honorarium, dan Tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris mengajukan usulan penetapan Gaji, Honorarium, dan Tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Usulan didasarkan pada rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang mempertimbangkan kinerja Perseroan, *business size*, dan hasil survei remunerasi industri Perbankan.

Adapun gambaran ringkas prosedur penetapan Remunerasi Dewan Komisaris BRI adalah sebagai berikut:



Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Putusan RUPS 2013 memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Gaji dan Honorarium 2013 serta Tantiem 2012 bagi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Atas wewenang dan kuasa tersebut Dewan Komisaris telah menetapkan Gaji, Honorarium dan Tantiem dimaksud, yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tertanggal 25 Maret 2013.

Fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan Dewan Komisaris yang telah diberi kewenangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Anggaran Dasar.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris 2013

Sesuai keputusan RUPS 2013, struktur remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Jangka pendek

Jenis Remunerasi dan fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	jutaan Rupiah
Remunerasi		
Gaji	8	8.070
Bonus	-	-
Tunjangan Rutin *	8	3.383
Tantiem	8	33.157
Fasilitas Dalam bentuk Natura		
Perumahan	-	-
Transportasi	8	3.670
Santunan	8	2.017

* Meliputi THR, Cuti, Kesehatan dan Handphone

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun yang diterima tunai	Jumlah Komisaris	
	orang	Jutaan (Rp.)
Di atas Rp. 2 miliar	8	50.297
Di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-

Tidak terdapat imbalan jangka panjang atau pasca kerja untuk Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Komisaris

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, kepemilikan saham oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris BRI tidak mencapai 5% (lima per seratus) dari modal disetor BRI, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. Adapun daftar kepemilikan saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
1.	Bunasor Sanim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil
2.	Mustafa Abubakar	Wakil Komisaris Utama	nihil
3.	Heru Lelono	Komisaris	nihil
4.	Hermanto Siregar	Komisaris	nihil
5.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	nihil
6.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	nihil
7.	Aviliani	Komisaris Independen	nihil
8.	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	nihil

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Direksi Ketentuan Acuan

Beberapa ketentuan eksternal yang menjadi acuan terkait Direksi Bank antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, ketentuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang menjadi acuan diatur dalam kebijakan Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas berwenang lainnya yang terkait.

Persyaratan Menjadi Direksi Bank

Beberapa aturan pokok mengenai Persyaratan Menjadi Direksi Bank, meliputi:

1. Peraturan Bank Indonesia
 - a. PBI No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum pasal 27, mengatur bahwa Anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan.
 - b. PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), mengatur bahwa calon anggota

Direksi wajib lulus *Fit and Proper Test* dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

- c. PBI No. 9/8/PBI/2007 pasal 8 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, mengatur bahwa Direksi yang berkewarganegaraan asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan
 - ii. memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia. Seluruh Direksi BRI berkewarganegaraan Indonesia, sehingga ketentuan ini tidak *aplicable*.
2. Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persyaratan untuk menjadi Direktur diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 93 dan Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.I.6 lampiran keputusan Ketua (d/h) Bapepam-LK No. Kep-45/ PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, yang mencakup:
 - a. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau membuat pailit suatu perusahaan pada saat menjabat sebagai Direksi atau Anggota Dewan Komisaris dalam 5 tahun sebelum menjabat Direksi Bank.

- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Dalam proses pemilihan dan pengangkatan Direksi, BRI telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut diatas.

Board Charter Direksi

BRI telah memiliki Board Charter atau Board Manual Direksi, sebagai pedoman Direksi dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan perusahaan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris. Board Charter disusun dengan acuan peraturan tersebut diatas, berisi petunjuk tata laksana kerja Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam Board Charter BRI, mencakup:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan wewenang Direksi
3. Hak dan kewajiban Direksi
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
5. Pelaksanaan tugas pengurusan perseroan oleh Direksi
6. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi
7. Rapat Direksi
8. Sekretaris Perusahaan
9. Hubungan dengan anak perusahaan.

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Direksi bertugas mengelola Perseroan, memelihara dan mengurus aset Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya mengurus Perseroan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara, dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Deskripsi tugas, tanggung jawab Direksi BRI selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut.

Umum

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank yang sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Bank dan disamping itu, melakukan segala tindakan serta perbuatan baik terkait pengurusan dan pemilikan yang mengikat Bank dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Keputusan RUPS;
2. Direksi bertanggung jawab mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

serta kegiatan usahanya; serta mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Khusus

1. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
 - a. Memastikan pelaksanaan keputusan yang dibuat pada RUPS;
 - b. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah;
 - d. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain;
 - e. Mengkonsultasikan pemberian kredit diatas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyampaikan laporan tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
2. Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi berkaitan dengan Akuntansi dan Laporan Tahunan
 - a. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Bank sesuai dengan praktek yang umum berlaku bagi perusahaan;
 - b. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - c. Menyiapkan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan.
3. Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi berkaitan dengan manajemen risiko dan pengendalian
4. Memelihara proses manajemen risiko seperti berikut:
 - a. Memastikan bahwa Bank memiliki proses yang tepat dan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapinya;
 - b. Memastikan bahwa sistem dan proses yang tepat telah dijalankan untuk mengawasi dan melaporkan adanya risiko utama yang dihadapi Bank;
 - c. Memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan;
 - d. Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk meyakinkan:
 - i. keandalan dan integritas informasi;

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

- ii. kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku;
 - iii. penjagaan atas harta kekayaan Bank;
 - iv. penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien;
 - v. pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasional.
5. Melakukan penilaian tahunan untuk membuat pernyataan publik tentang pengendalian intern di Bank sehingga dapat memberi keyakinan bahwa semua aspek pengendalian intern yang signifikan sudah dipertimbangkan untuk tahun pemeriksaan sampai tanggal persetujuan laporan tahunan.
6. Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen;

Uraian ringkas tugas masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan penyusunan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal

5. Menjalankan fungsi pembinaan terhadap anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Sementara itu, ringkasan tugas masing-masing Anggota Direktur, sesuai bidang operasional BRI adalah sebagai berikut:

Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang UMKM
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang UMKM
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan.

Direktur Pengendalian Risiko Kredit

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan

2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Pengendalian Risiko Kredit
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Pengendalian Risiko Kredit
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Operasional

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Operasional
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Operasional
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Direktur MSDM

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Manajemen Sumber Daya manusia
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Manajemen Sumber Daya manusia
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Bisnis Konsumer

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Bisnis Konsumer
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.

4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Bisnis Konsumer
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Bisnis Komersial

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Bisnis Komersial
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Bisnis Komersial
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Keuangan

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

- serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Keuangan
 3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
 4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Keuangan
 5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
 6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Kepatuhan

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Kepatuhan
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Kepatuhan
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Bisnis Kelembagaan dan BUMN
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Bisnis Kelembagaan dan BUMN
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Jaringan dan Layanan

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Jaringan dan Layanan
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan

4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Jaringan dan Layanan
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Mekanisme Direktur Pengganti

Selain telah menetapkan tugas umum dan tugas khusus masing-masing Direksi, BRI telah menetapkan mekanisme Direktur Pengganti dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur yang ditunjuk sebagai Direktur Pengganti pada prinsipnya memiliki kedekatan bidang tugas dengan Direktur yang digantikan.
2. Direktur Utama Pengganti ditunjuk 2 (dua) Direktur kecuali Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Direktur Kepatuhan.
3. Terdapat Direktur yang ditetapkan sebagai Direktur Pengganti pada lebih dari satu bidang.
4. Direktur Pengganti berlaku efektif apabila Direktur yang digantikan tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
5. Penetapan Direktur sebagai Direktur Pengganti dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Berita Acara Serah Terima Jabatan disiapkan oleh Sekretaris Direktur yang bersangkutan, ditandatangani oleh kedua Direktur yang terkait dan diketahui oleh Direktur Utama.
7. Dalam hal Direktur Pengganti yang ditetapkan tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, tetapi terdapat tugas/

- kegiatan yang memerlukan putusan mendesak pada hari itu maka atas sepengetahuan Direktur Pengganti yang ditetapkan hal tersebut dapat diputuskan oleh Direktur Pengganti lainnya tanpa dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jabatan antara kedua Direktur Pengganti tersebut.
8. Wewenang dan tanggung jawab Direktur Pengganti adalah sama dengan wewenang dan tanggung jawab Direktur Bidang yang digantikan dan dapat bersifat *ex-officio*.
9. Wewenang dan tanggung jawab Direktur Pengganti untuk Komite Kredit diatur sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perkreditan.
10. Direktur Pengganti bertanggung jawab penuh terhadap segala putusan yang dibuat selama menjalankan tugas sebagai Direktur Pengganti.

Komposisi Direksi

Anggota Direksi BRI berjumlah 11 (sebelas) orang yang secara mayoritas telah memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank lebih dari 5 (lima) tahun. Seluruh anggota Direksi BRI berdomisili di Indonesia dan seluruhnya telah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*).

Susunan Direksi BRI per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No	Nama	Jabatan	Usia (Tahun)	Tanggal Pengangkatan
1.	Sofyan Basir	Direktur Utama	55	17 Mei 2005
2.	Sarwono Sudarto	Direktur Operasional	61	30 Mei 2006
3.	Sulaiman Arif Arianto	Direktur Bisnis Komersial	55	30 Mei 2006
4.	Lenny Sugihat	Direktur Pengendalian Risiko Kredit	57	30 Mei 2006
5.	A. Toni Soetirto	Direktur Bisnis Konsumer	55	30 Mei 2006
6.	Suprajarto	Direktur Jaringan dan Layanan	57	5 September 2007
7.	Asmawi Syam	Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN	58	5 September 2007
8.	Achmad Baiquni	Direktur Keuangan	57	20 Mei 2010
9.	Djarot Kusumayakti	Direktur Bisnis UMKM	56	20 Mei 2010
10.	Randi Anto	Direktur Kepatuhan	52	28 April 2011
11.	Gatot Mardiwasisito	Direktur MSDM	61	28 September 2011

Independensi Direksi

Direksi BRI tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/ lembaga lain, dan tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris hingga derajat kedua. Dengan status yang bebas tersebut, Direksi BRI senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi juga tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan BRI, termasuk jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, anggota Direksi BRI:

- Tidak pernah dinyatakan pailit.
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Rapat dan Hasil Rapat Direksi

Direksi secara berkala mengadakan pertemuan internal untuk membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi dan juga membahas rencana strategis lainnya.

Etika Rapat Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 13, BRI telah menetapkan etika rapat Direksi, antara lain:

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih dengan menyebutkan hal-

hal yang akan dibicarakan.

2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
3. a. Panggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

- Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.
- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri dan diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi.
- Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang menentukan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Tingkat Kehadiran Direktur dalam Rapat Direksi

No	Direksi	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
1.	Sofyan Basir	Direktur Utama	56	48	85,71%
2.	Sarwono Sudarto	Direktur Operasional	56	51	91,07%
3.	Sulaiman Arif Arianto	Direktur Bisnis Komersial	56	48	85,71%
4.	Lenny Sugihat	Direktur Pengendalian Risiko Kredit	56	54	96,43%
5.	A. Toni Soetirto	Direktur Bisnis Konsumer	56	44	78,57%
6.	Suprajarto	Direktur Jaringan dan Layanan	56	49	87,50%
7.	Asmawi Syam	Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN	56	45	80,36%
8.	Achmad Baiquni	Direktur Keuangan	56	50	89,29%
9.	Djarot Kusumayakti	Direktur Bisnis UMKM	56	48	85,71%
10.	Randi Anto	Direktur Kepatuhan	56	46	82,14%
11.	Gatot Mardiwastiso	Direktur MSDM	56	54	96,43%

Rekapitulasi Hasil Rapat Direksi

No	Tanggal	Materi Radisi
1	8 Januari 2013	Persyaratan kredit medium dan korporasi
2	22 Januari 2013	ALCO
3	22 Januari 2013	Forum Bisnis Ritel
4	15 Januari 2013	Persiapan RUPS 2013
5	29 Januari 2013	1. Pembahasan bisnis ritel dan konsumer 2. Analyst Meeting BRI
6	5 Februari 2013	1. Pembahasan bisnis ritel dan konsumer 2. Pelaksanaan Forum Strategis (FOSTRA) dan <i>Executive Gathering</i>
7	12 Februari 2013	RUPS BRI Tahun 2013
8	19 Februari 2013	<i>Bancassurance</i>
9	26 Februari 2013	Rencana Aksi Korporasi ALCO
10	26 Februari 2013	Forum Bisnis Ritel
11	5 Maret 2013	<i>Branchless Banking</i>
12	26 Maret 2013	ALCO
13	26 Maret 2013	Forum Bisnis Ritel
14	2 April 2013	1. Rencana Aksi Korporasi 2. Evaluasi Kinerja Kanwil

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No	Tanggal	Materi Radisi
15	9 April 2013	1. <i>Rights Issue</i> Bank BRI Agro 2. Hapus Buku Kredit 3. Kinerja Keuangan BRI Triwulan I Tahun 2013
16	16 April 2013	ALCO
17	16 April 2013	Forum Bisnis Ritel
18	23 April 2013	Evaluasi Kinerja Anak Perusahaan
19	30 April 2013	1. Perkembangan Kinerja Bisnis UMKM 2. Persyaratan kredit korporasi 3. Permasalahan Unit Kerja Operasional 4. Evaluasi Kinerja Anak Perusahaan 5. Kebijakan kredit komersial 6. Kinerja Bisnis Program 7. Putusan Delegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWK) 8. Program Pengembangan Staf
20	7 Mei 2013	1. Rencana Aksi Korporasi 2. Direksi BRI Mengajar 3. Evaluasi Kebijakan SDM 4. Uji coba <i>Branchlessbanking</i>
21	23 Mei 2013	ALCO
22	23 Mei 2013	Forum Bisnis Ritel
23	28 Mei 2013	1. Struktur Organisasi dan Formasi Pekerja Kanwil. 2. Evaluasi kredit menengah 3. Evaluasi Kebijakan SDM
24	4 Juni 2013	1. Organisasi Kanwil. 2. Rencana Aksi Korporasi 3. Evaluasi Kinerja
25	11 Juni 2013	1. Kredit Usaha Rakyat 2. Evaluasi Kinerja Bisnis dan Auditor 3. Pengembangan Bisnis 4. Organisasi Kanwil
26	18 Juni 2013	ALCO
27	18 Juni 2013	Forum Bisnis Ritel
28	27 Juni 2013	1. Evaluasi Kinerja IT
29	11 Juli 2013	1. Perubahan Organisasi Divisi 2. Permasalahan Unit Kerja Operasional 3. Evaluasi Jabatan 4. Pemanfaatan Aktiva Terbangkalai
30	16 Juli 2013	ALCO
31	16 Juli 2013	Forum Bisnis Ritel
32	25 Juli 2013	1. Pembahasan Kasus. 2. Permasalahan Unit Kerja Operasional 3. Kinerja Bisnis Korporasi.
33	29 Juli 2013	1. Program CSR. 2. Audit Kredit Usaha Rakyat 3. Evaluasi Bisnis Program.
34	15 Agustus 2013	1. Evaluasi Kinerja Keuangan. 2. Pembahasan Bisnis Korporasi dan Kinerja Bisnis Operasional. 3. Permasalahan Hukum. 4. Program CSR
35	22 Agustus 2013	ALCO
36	22 Agustus 2013	Forum Bisnis Ritel
37	29 Agustus 2013	1. Kerjasama bisnis dengan pihak eksternal. 2. Permasalahan dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Operasional. 3. Pengembangan bisnis konsumen. 4. Update Perkembangan Ekonomi.
38	5 September 2013	1. Evaluasi Kinerja. 2. Lain-lain
39	12 September 2013	1. Permasalahan SDM. 2. Program CSR.
40	19 September 2013	ALCO
41	19 September 2013	Forum Bisnis Ritel
42	26 September 2013	1. Pertemuan Direksi dengan BI 2. Permasalahan Unit Kerja Operasional

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No	Tanggal	Materi Radisi
43	10 Oktober 2013	1. Evaluasi kinerja Bisnis dan Anak Perusahaan 2. Rencana Bisnis 3. Audit Bank Indonesia 4. Evaluasi Jabatan
44	17 Oktober 2013	ALCO
45	17 Oktober 2013	Forum Bisnis Ritel
46	24 Oktober 2013	1. Permasalahan Unit Kerja Operasional 2. Rencana Aksi Korporasi
47	30 Oktober 2013	1. Permasalahan dengan pihak eksternal 2. Pengembangan Bisnis 3. Kebijakan SDM
48	7 November 2013	Pembahasan kebijakan bisnis UMKM
49	12 November 2013	RBB Tahun 2014-2018
50	14 November 2013	RKAP Tahun 2014 dan RBB Tahun 2014 - 2016.
51	21 November 2013	ALCO
52	21 November 2013	Forum Bisnis Ritel
53	28 November 2013	1. Forum Strategis (Fostra) Tahun 2013. 2. Pengembangan Bisnis.
54	13 Desember 2013	1. Kebijakan Bisnis 2. Pengembangan Bisnis
55	19 Desember 2013	ALCO
56	19 Desember 2013	Forum Bisnis Ritel

Program Pelatihan Direksi

Sebagaimana untuk Anggota Dewan Komisaris, BRI menyelenggarakan dua jenis pelatihan bagi Direksi, yakni Program Pengenalan Perusahaan dan Program Pelatihan Umum.

Program Pengenalan Perusahaan

Program ini diberikan kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya sebagai anggota Direksi BRI. Program pengenalan Perusahaan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Divisi Sekretariat Perusahaan

Sasaran program ini secara umum adalah memberikan wawasan secara ringkas kepada anggota Direksi mengenai BRI agar para anggota baru dapat sesegera mungkin memberikan kontribusi kepada BRI

Informasi atau pengetahuan dasar dalam program pengenalan meliputi: Informasi atau pengetahuan intern Perusahaan, Informasi atau pengetahuan Ekstern Perusahaan, dan pengenalan isi dokumen-dokumen terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi.

BRI menyelenggarakan Program Training bagi anggota Direksi sebagai salah satu program penting bagi Direksi agar senantiasa mendapatkan pengetahuan terkini mengenai perkembangan aktivitas perbankan, kondisi ekonomi serta perkembangan sosial dan hubungannya dengan pengembangan bisnis Perusahaan serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

BRI memperhatikan beberapa parameter dalam melaksanakan Program Training Direksi, mencakup:

- Program training dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan efektivitas kerja Direksi ;
- Biaya program training dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi;
- Setiap Anggota Direksi yang mengikuti program training, seminar, pelatihan, dan *workshop* diharapkan dapat berbagi informasi dan pengetahuan tersebut kepada Anggota Direksi lain yang tidak mengikuti Program tersebut;
- Materi yang diterima dari program training harus terdokumentasi dengan rapi dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi terdapat pada Sekretaris Perusahaan dan harus tersedia jika suatu saat dibutuhkan.

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Daftar rekapitulasi Pelatihan Direksi BRI tahun 2013.

No.	Tanggal	Nama Peserta	Nama Pelatihan	Kota
1	21 - 22 Mei 2013	Randi Anto dan A. Toni Soetirto	World Hajj and Umrah Convention (WHUC) 2013 - Hajj People	London
2	22 - 23 Agustus 2013	Randi Anto dan A. Toni Soetirto	Bancassurance Distribution and Channel Management - UNI Strategic Pte. Ltd	Hong Kong
3	17 - 18 Oktober 2013	Suprajarto	41th EFMA Congress Multidistribution	Paris
4	30 September - 01 Oktober 2013	Achmad Baiquni, Suprajarto, Asmawi Syam	BARa Risk Forum - Executive International Conference - Growing with Confidence "The Role of Enterprise Risk Management in Driving a Winning Strategy"	London

Penilaian kerja direksi

Key Performance Indicator (KPI) Direksi

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) disediakan.
2. Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank) disediakan.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disediakan.
4. Kinerja perusahaan dicapai sesuai penilaian tingkat kesehatan bank yang berlaku mencakup profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas dan permodalan.
5. Laporan dan dokumen atas pelaksanaan pengurusan perusahaan disediakan.
6. Penjelasan atas pelaksanaan pengurusan perusahaan disediakan.
7. Tindak lanjut perbaikan atas temuan audit dilaksanakan.
8. Tugas Direktur Pengganti dilaksanakan.
9. Target kinerja perusahaan dicapai.

Mekanisme/Proses Penilaian (*assessment*) Direksi

Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegal dari seluruh Direksi yang tercermin dalam satu kesatuan pada realisasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) secara tahunan. Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi dilakukan terhadap Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup aspek profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas dan permodalan bank.

Pihak yang melakukan *assessment*

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris, RUPS serta Bank Indonesia.

Remunerasi Direksi

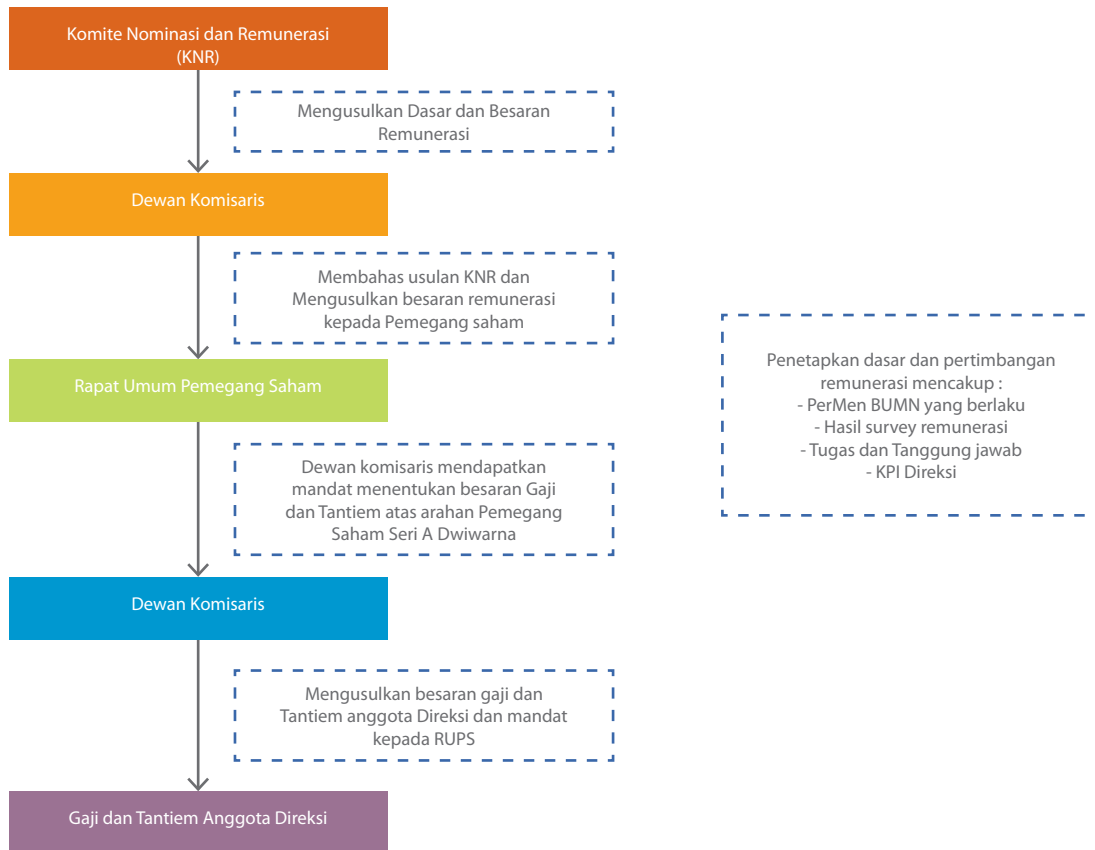
Prosedur/Metode Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi BRI secara garis besar dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Direksi.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi, selain itu (jika ada) memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Direksi antara lain opsi saham.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi yang berbentuk honorarium dan tantiem untuk disetujui (RUPS).
4. Sedangkan untuk fasilitas terkait dengan remunerasi yaitu kendaraan jabatan dinas, asuransi kesehatan, pulsa telepon, keanggotaan (*club membership*) dan tunjangan santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris diajukan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



Struktur Remunerasi Direksi

Penetapan struktur remunerasi bagi Direksi mengacu pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor: PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan PER-04/MBU/2013.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, prinsip penetapan penghasilan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komponen penghasilan Direksi terdiri dari:

1. Proporsi gaji Direktur ditetapkan 90% dari Direktur Utama.
2. Tunjangan Direksi
 - a. Anggota Direksi diberikan tunjangan hari raya keagamaan paling banyak 2 (dua) kali gaji dengan tetap memperhatikan kemampuan Perseroan.
 - b. Anggota Direksi diberikan tunjangan cuti tahunan paling banyak 1 (satu) kali gaji. Tunjangan cuti tahunan tetap diberikan walaupun hak cuti tidak diambil atau ijin cuti tidak diberikan karena kepentingan Perseroan.
 - c. Anggota Direksi diberikan tunjangan cuti besar paling banyak 2 (dua) kali gaji. Tunjangan cuti besar tetap diberikan walaupun hak cuti tidak diambil atau ijin cuti tidak diberikan karena kepentingan Perseroan.
 - d. Tunjangan cuti besar diberikan setelah anggota Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam satu periode jabatan.
 - e. Anggota Direksi diberikan tunjangan komunikasi sebesar biaya pemakaian (*at cost*).
 - f. Anggota Direksi menerima Santuna Purna Jabatan pada setiap akhir masa jabatan. Santunan Purna Jabatan dimaksud diberikan dalam bentuk pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun. Premi atau iuran tahunan yang ditanggung Perusahaan maksimum sebesar 25% dari gaji per tahun.
 - g. Anggota Direksi diberikan kompensasi rumah jabatan per bulan sebesar 30% dari gaji bulanan.
 - h. Anggota Direksi diberikan tunjangan biaya utilitas sebesar 30% dari nilai tunjangan perumahan.

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

3. Fasilitas Direksi
 - a. Perusahaan menyediakan fasilitas berupa 1 (satu) kendaraan jabatan beserta biaya pemeliharaan dan operasional bagi masing-masing anggota Direksi, yang jenisnya dan besarnya ditetapkan dengan memperhatikan aspek kepatasan dan kemampuan keuangan Perusahaan.
 2. Perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan kepada masing-masing anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
 3. Perusahaan memberikan fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.
 4. Perusahaan memberikan fasilitas *Club Membership/Corporate Member* kepada anggota Direksi paling banyak 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Fasilitas *Club Membership* yang diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan.
4. Tantiem/Insentif Kinerja
5. Penetapan tantiem/insentif kinerja bagi Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri tersebut antara lain:
 - a. Pemberian tantiem kepada anggota Direksi diberikan dalam hal BUMN memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan.
 - b. Anggota Direksi dapat diberikan tantiem apabila pencapaian ukuran Kinerja Utama (KPI) lebih dari 70% dan tingkat kesehatan dengan nilai lebih dari 70.
 - c. Pencapaian ukuran kinerja utama yang diperhitungkan dalam tantiem maksimal sebesar 150%.
 - d. Komposisi besarnya tantiem ditetapkan sebagai berikut:
 - Direktur Utama 100%
 - Anggota Direksi 90% dari Direktur Utama
 - e. BRI dapat memberikan tantiem dalam hal BRI mengalami peningkatan kinerja walaupun BRI masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan, atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya.

Struktur (Bentuk dan besarnya) remunerasi Direksi sesuai RUPS

Jangka pendek

Jenis Remunerasi dan fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Direksi	
	Orang	jutaan Rupiah
Remunerasi		
Gaji	11	21.960
Bonus	-	-
Tunjangan Rutin *	11	8.218
Tantiem	11	99.192
Fasilitas Dalam bentuk Natura		
Perumahan	8	3.840
Transportasi	11	7.586
Santunan	11	5.490

* Meliputi THR, Cuti, Kesehatan dan Handphone

Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun yang diterima tunai	Jumlah Direksi	
	orang	Jutaan (Rp.)
Di atas Rp. 2 miliar	11	146.286
Di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-

Kepemilikan Saham Direksi

Per 31 Desember 2013, kepemilikan saham oleh masing-masing anggota Direksi tidak mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor BRI, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya yang berkedudukan didalam maupun luar negeri. Adapun daftar kepemilikan saham anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

No	Nama anggota Direksi	BRI
1.	Sofyan Basir	nihil
2.	Sarwono Sudarto	Kurang dari 5%
3.	Randi Anto	Kurang dari 5%
4.	Sulaiman Arif Arianto	Kurang dari 5%
5.	Achmad Baiquni	nihil
6.	A. Toni Soetirto	nihil
7.	Lenny Sugihat	Kurang dari 5%
8.	Djarot Kusumayakti	nihil
9.	Asmawi Syam	nihil
10	Suprajarto	nihil
11	Gatot Mardiwasiso	Kurang dari 5%

Hubungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Hubungan Kerja

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dua organ perusahaan yang menjalankan aktivitas perusahaan secara harian adalah berbeda. Tugas utama Dewan Komisaris pada intinya adalah sebagai pengawas dan pemberi saran, sementara itu tugas Direksi adalah melaksanakan keputusan RUPS, arahan dari Dewan Komisaris serta mengelola operasional perusahaan. Namun demikian, keduanya harus senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dengan didasarkan pada prinsip keterbukaan dan saling menghormati. Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala.

Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Tugas melakukan pengawasan tersebut meliputi segala hal yang terkait dengan kebijakan pengurusan oleh Direksi, jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil oleh Direksi menjadi ruang lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris. Di dalam praktiknya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan pelaksanaan dari RBB/RKAP tersebut.

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi BRI tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, dan tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris hingga derajat kedua. Dengan status yang bebas tersebut, Direksi BRI senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris. Direksi BRI dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan BRI, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BRI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Direksi BRI dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Untuk menjamin independensi dalam pelaksanaan tugas dan terjaganya mekanisme *check and balances* yang berkualitas, BRI melarang adanya hubungan dalam bentuk apapun antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali		BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris (BOC)												
Bunasor Sanim	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mustafa Abubakar	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Heru Lelono	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hermanto Siregar	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vincentius Sonny Loho	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Adhyaksa Dault	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aviliani	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ahmad Fuad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direksi (BOD)												
Sofyan Basir	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sarwono Sudarto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Randi Anto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sulaiman Arif Arianto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Achmad Baiquni	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A. Toni Soetirto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Lenny Sugihat	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Djarot Kusumayakti	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Asmawi Syam	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Suprajarto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Gatot Mardiwastito	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagaimana biasa terjadi pada perusahaan yang menerapkan sistem dua badan, BRI membedakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan operasional sehari-hari. Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam bentuk Rapat Gabungan.

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diselenggarakan guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini juga merupakan salah satu bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Keputusan rapat dibuat berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Pada proses pengambilan suara, jika ada anggota Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk ikut memberikan suara dan penjelasan mengenai hal tersebut dicatat pada risalah rapat. Seluruh tata cara, pedoman kerja dan hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam *Board Charter*.

Hubungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Rapat Gabungan

Selama tahun 2013, BRI menyelenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 29 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dengan tingkat kehadiran sebagai berikut.

No	Waktu	Agenda
1	10 Januari 2013	Kinerja 2012 dan RKAP 2013 Dana Pensiun BRI
2	12 Februari 2013	Profil risiko TKB <i>anti fraud</i>
3	19 Februari 2013	Kinerja PKBL 2012, Audit PKBL 2012, Rencana Kerja PKBL 2013
4	05 Maret 2013	Laporan hasil audit Triwulan IV tahun 2012
5	03 April 2013	Konsultasi kredit
6	09 April 2013	Kinerja bulanan BRI
7	30 April 2013	Rapat bidang MSDM
8	14 Mei 2013	Kinerja 2012 dan Rencana Kinerja 2013 BRI Syariah
9	21 Mei 2013	LHA Triwulan 1
10	28 Mei 2013	Kinerja 2012 dan Rencana Kinerja 2013 BRI Agro
11	04 Juni 2013	Rapat bidang Operasional
12	11 Juni 2013	Profil risiko dan kepatuhan
13	18 Juni 2013	Rapat bidang jaringan dan layanan
14	02 Juli 2013	SA GCG, Persetujuan ketentuan pengadaan
15	09 Juli 2013	<i>Management Letter</i>
16	30 Juli 2013	Kinerja semester pertama tahun 2013
17	30 Juli 2013	Perubahan peraturan dana pensiun
18	03 September 2013	LHA Triwulan 2
19	03 September 2013	Realisasi RBB Semester 1 Tahun 2013
20	10 September 2013	Rapat bidang Kepatuhan
21	12 September 2013	Kinerja DPLK
22	08 Oktober 2013	Bidang Konsumer
23	22 Oktober 2013	Reorganisasi
24	22 Oktober 2013	Pra publikasi dan realisasi RBB
25	29 Oktober 2013	Persiapan Penilaian CGPI
26	29 Oktober 2013	Kasus Operasional
27	22 November 2013	Pemaparan RBB dan RKAP
28	10 Desember 2013	Profil risiko Triwulan 3
29	24 Desember 2013	LHA Triwulan 3

Rekapitulasi Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Radirkom	Kehadiran Radirkom	% Kehadiran Radirkom
a	b	c	d	e	f=e/d
1.	Bunaser Sanim	Komisaris Utama/Independen	29	28	97%
2.	Mustafa Abubakar	Wakil Komisaris Utama	29	27	93%
3.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	29	21	72%
4.	Aviliani	Komisaris Independen	29	25	86%
5.	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	29	26	90%
6.	Heru Lelono	Komisaris	29	19	66%
7.	Hermanto Siregar	Komisaris	29	25	86%
8.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	29	24	83%

Hubungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Daftar keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. Dalam konteks pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasehat, Dewan Komisaris BRI melakukan rapat rutin sekali dalam seminggu

BRI telah menetapkan ketentuan yang mengatur limit persetujuan Direksi dalam pengambilan keputusan operasional menyangkut nilai tertentu. Untuk keputusan-keputusan tertentu yang melewati limit nilai tersebut maupun kondisi tertentu, Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Beberapa keputusan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris meliputi:

1. Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. BRI (Persero), Tbk. Tahun 2014.
2. Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis Bank 2014-2017 PT. BRI (Persero), Tbk.
3. Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank PT. BRI (Persero), Tbk. Semester II Tahun 2012.
4. Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2013.
5. Hasil Pengawasan Laporan Keuangan DPLK BRI Tahun Buku 2013.
6. Persetujuan atas Perubahan Organisasi PT. BRI (Persero), Tbk.
7. Persetujuan atas Pernyataan Tertulis Pendiri dalam Rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun PT. BRI (Persero), Tbk.
8. Evaluasi terhadap Laporan Direktur Kepatuhan PT. BRI (Persero), Tbk.
9. Evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko PT. BRI (Persero), Tbk.
10. Penilaian Self Assessment Pelaksanaan GCG PT. BRI (Persero), Tbk. Semester II Tahun 2012.
11. Penilaian Self Assessment Pelaksanaan GCG PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2013.
12. Konsultasi Kredit Direksi kepada Dewan Komisaris.
13. Persetujuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU & PPT BRI
14. Persetujuan Revisi Piagam Audit Intern tahun 2013
15. Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) DPLK BRI tahun 2013
16. Persetujuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kebijakan GCG dan kode etik PT. BRI (Persero) Tbk.
17. Persetujuan Penyediaan Dana Pihak Terkait
18. Persetujuan Tambahan Modal Kepada PT. Bank BRI Agroniaga Tbk.
19. Persetujuan Tambahan Modal Kerja PT. Bank BRI Syariah
20. Rekomendasi dan Saran berkaitan dengan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Beberapa Unit Kerja PT. BRI (Persero), Tbk. yang disampaikan pada kesempatan rapat dengan Direksi.
21. Rekomendasi Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris PT. BRI (Persero), Tbk.
22. Tanggapan terhadap Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Triwulan I Tahun 2013.
23. Tanggapan terhadap Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Triwulan IV Tahun 2012.
24. Tanggapan atas Perencanaan Audit Tahunan Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Tahun 2013.
25. Tanggapan terhadap Laporan Hasil Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2013.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite

Komite Audit dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan regulator antara lain :

1. Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Bank Indonesia, PBI No: No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (IDX) No KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Fungsi pembentukan Komite Audit untuk memperkuat fungsi pengawasan Komisaris untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perusahaan. Memonitor proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktek pada semua tingkatan dalam Perusahaan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan Perusahaan dan pengendalian risiko yang baik.

Panduan kerja Komite Audit

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit 2011, Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris BRI dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRI khususnya terkait dengan fungsi pengawasan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan.

Selama tahun 2013 Komite Audit telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Dalam menyelenggarakan pertemuan dengan Unit Kerja, Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah meminta beberapa subordinasi manajemen untuk menghadiri pertemuan dan memberikan informasi terutama berkaitan dengan pengendalian intern dan manajemen risiko Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Audit BRI terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dua orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, dua orang anggota yang merupakan Komisaris, dan tiga orang anggota non Komisaris yang ahli di bidang keuangan, akuntansi, hukum, dan perbankan. Hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Keputusan Ketua Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-29/PM/2004 dan PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006, sebagaimana tersebut diatas. Adapun profil anggota Komite Audit non-Komisaris dapat dilihat pada "Data-data Perusahaan"

Susunan Keanggotaan Komite Audit periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2013

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Bunasar Sanim	Ketua	Komisaris Utama/Independen
2.	Adhyaksa Dault	Anggota	Komisaris Independen
3.	Ahmad Fuad	Anggota	Komisaris
4.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
5.	Hermanto Siregar	Anggota	Komisaris
6.	H.C. Royke Singgih	Anggota	Non Komisaris
7.	Dedi Budiman Hakim	Anggota	Non Komisaris
8.	Syahrir Nasution	Anggota	Non Komisaris

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite

1. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan perbankan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Pendengar yang baik, penyelidik dan pemikir keras
3. Berlatar belakang pengetahuan dan memiliki pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau audit minimal 10 tahun (sekurang-kurangnya satu anggota)
4. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya
5. Mampu berkomunikasi efektif
6. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi
7. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
8. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan
9. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasi yang membangun
10. Memiliki pemahaman tentang konsep *auditing*
11. Menjadi anggota organisasi profesi Komite Audit

Independensi Komite Audit

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI, bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Anggota Komite Audit tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan BRI sebelum menjabat dan bukan merupakan mantan pimpinan maupun pegawai Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan BRI.

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas dan pemberian saran, seluruh anggota Komite Audit BRI memiliki latar belakang keuangan dan atau akuntansi. Dengan demikian seluruh persyaratan independensi anggota Komite Audit yang sesuai dengan peraturan dan kaidah praktek terbaik GCG, telah dipenuhi.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan fungsi pengawasan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan.

Kewenangan Komite Audit

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Komisaris dalam pemilihan Kepala Auditor Internal dan penetapan Auditor Eksternal.

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Mengkaji kecukupan dari Pengendalian Internal bank secara menyeluruh termasuk Kepatuhan terhadap kebijakan *Good Corporate Governance*, Kode Etik Bank dan Hukum, serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
4. Mengkaji kecukupan dari fungsi Audit Internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan pekerjaan yang telah dilaksanakan;
5. Paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Internal, kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Komisaris;
6. Mengkaji kompetensi dan independensi dari Auditor Eksternal dan juga merekomendasikan Auditor Eksternal dalam RUPS;
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan;
8. Menyampaikan laporan atas kegiatan dari Komite Audit kepada Komisaris dan setiap tahunnya disajikan dalam Laporan tahunan Bank.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Program Kerja dan Laporan Singkat Pelaksanaan Program Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan program kerjanya selama tahun 2013 sebagai berikut:

1. Kegiatan Internal
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Komite Audit 2013 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.
 - b. Bersama-sama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris tahun 2013.
 - c. Melakukan pertemuan reguler dengan Audit Intern (AIN) dalam rangka membahas sistem pengendalian intern, temuan-temuan audit terutama yang dinilai mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
 - d. Melakukan pertemuan dengan Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan (AMK) serta Divisi terkait untuk membahas perkembangan kinerja keuangan Perseroan dan informasi keuangan lainnya.
 - e. Melakukan evaluasi dan memberikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris dari setiap pertemuan diatas dan penugasan yang diberikan kepada Komite Audit.
 - f. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik terkait dengan pelaksanaan audit tahunan Laporan Keuangan Perseroan.
 - g. Bersama-sama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review

dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

- h. Bersama-sama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review perkembangan kinerja bulanan Perseroan dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Kegiatan Eksternal
 - a. Mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan fungsi Komite Audit seperti The Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia Chapter, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Komite Audit.
 - b. Melakukan diskusi dengan Eksternal Auditor, baik sebelum maupun setelah dilakukan pemeriksaan mengenai temuan-temuan atas laporan keuangan Perseroan.
 - c. Mendampingi Komisaris saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa unit kerja.

Rapat dan Kehadiran Rapat Anggota Komite Audit

Rapat dilakukan dengan Audit Intern, Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Divisi Kredit Program, Kantor Akuntan Publik PSS - Ernst and Young.

Komite Audit melakukan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali selama tahun 2013 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Kehadiran (%)
1.	Bunasor Sanim	14	13	93 %
2.	Adhyaksa Dault	14	10	75 %
3.	Ahmad Fuad	14	13	92 %
4.	Vincentius Sonny Loho	14	12	83 %
5.	Hermanto Siregar	14	12	75 %
6.	H.C. Royke Singgih	14	14	100 %
7.	Dedi Budiman Hakim	14	10	70 %
8.	Syahrir Nasution	14	13	92 %

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Adapun agenda rapat Komite Audit selamat tahun 2013 adalah sebagai berikut.

No.	Pihak/Unit Kerja	Tanggal	Materi
1.	Direksi	9 Juli 2013	<i>Management Letter</i>
2.	KAP PSS Ernst & Young	22 Januari 2013 12 November 2013	Laporan Hasil Audit oleh Auditor EY atas kinerja BRI tahun 2012 Pemaparan Rencana Audit 2013
3.	Audit Intern	5 Maret 2013 21 Mei 2013 3 September 2013 24 Desember 2013	Laporan Hasil Audit Triwulan IV tahun 2012 Pembahasan Laporan Hasil Audit Triwulan I tahun 2013 Pembahasan Laporan Hasil Audit Triwulan II tahun 2013 Pembahasan Laporan Hasil Audit Triwulan III tahun 2013
4.	Akuntansi Manajemen dan Keuangan	9 April 2013 30 Juli 2013 22 Oktober 2013	Kinerja Keuangan Bulanan BRI Pra Publikasi Kinerja Triwulan II/ 2013 Pra Publikasi Kinerja Triwulan III/ 2013
5.	Kredit Program	19 Februari 2013	Kinerja PKBL 2012, Audit PKBL 2012, dan Rencana Kerja PKBL 2013
6.	PT. BRI Syariah	14 Mei 2013	Pemaparan Kinerja Keuangan 2012 dan RKAP 2013
7.	PT. BRI Agro	28 Mei 2013	Pemaparan Kinerja Keuangan 2012 dan RKAP 2013
8.	DPLK BRI	12 September 2013	Pemaparan Kinerja Keuangan

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)

Dasar Pembentukan Komite

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI didasarkan pada :

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
3. Undang- Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Panduan kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan berbagai ketentuan yang tercantum dalam peraturan dasar pembentukannya, Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi BRI mengatur tentang tujuan pembentukan Komite, keanggotaan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, kedudukan, etika kerja serta etika rapat. Panduan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Komite Nominasi dan Remunerasi BRI dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang berkaitan bidang manajemen SDM.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Nominasi dan Remunerasi BRI terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, satu orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, tiga orang anggota yang merupakan Komisaris, satu orang pejabat eksekutif yaitu Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan dua orang anggota non Komisaris yang memiliki pengetahuan dan mengetahui sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006, seperti disinggung diatas.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Profil lengkap anggota non-Komisaris dapat dilihat pada uraian "Data-data Perusahaan"

Susunan Keanggotaan 1 Januari 2013 – 15 April 2013			
No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Adhyaksa Dault*	Ketua	Komisaris Independen
2.	Mustafa Abubakar	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Komisaris
3.	Aviliani	Anggota	Komisaris Independen
4.	Heru Lelono	Anggota	Komisaris
5.	Hermanto Siregar	Anggota	Komisaris
6.	Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Anggota	Non Komisaris/ex-officio
7.	Kanyatama P. Mulyono**	Anggota	Non Komisaris
8.	Asep Ikhsan Iskandar	Anggota	Non Komisaris

*Sejak 15 April 2013, ybs tidak lagi menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
**Sejak 1 November 2013 ybs sudah tidak menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Susunan Keanggotaan 16 April 2013 sd. saat ini			
No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Ahmad Fuad	Ketua	Komisaris Independen
2.	Mustafa Abubakar	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Komisaris
3.	Aviliani	Anggota	Komisaris Independen
4.	Heru Lelono	Anggota	Komisaris
5.	Hermanto Siregar	Anggota	Komisaris
6.	Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Anggota	Non Komisaris/ex-officio
7.	Kanyatama P. Mulyono**	Anggota	Non Komisaris
8.	Asep Ikhsan Iskandar	Anggota	Non Komisaris

*Sejak 16 April 2013 ybs menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, menggantikan Adhyaksa Dault.
**Sejak 1 November 2013 ybs sudah tidak menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja (Kahlian) anggota Komite

1. Mempunyai integritas, obyektifitas, mentalitas, etika dan tanggung jawab profesi yang tinggi
2. Mampu bersikap independen, yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Mempunyai pengetahuan perbankan yang memadai termasuk ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif, diutamakan berpengalaman dalam manajemen SDM antara lain perencanaan suksesi, pengembangan karir, evaluasi kinerja serta berpengalaman mengelola sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja Perusahaan.
5. Mempunyai pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan dan peraturan lain yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.
6. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
7. Mampu berkomunikasi dengan efektif.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas, beberapa anggota KNR memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sementara anggota lainnya memiliki latar belakang pendidikan bidang sumber daya manusia. Sedangkan untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KNR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Kewenangan, Tugas dan tanggung jawab Komite

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja KNR tanggal 03 Agustus 2011, Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan kebijakan nominasi dan kebijakan remunerasi. Uraian ringkas mengenai kewenangan, tugas dan tanggung jawan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut.

Kewenangan

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi serta kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen SDM dari pihak internal maupun eksternal perusahaan.
2. Mendapat masukan atau saran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi serta kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen SDM dari pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Fungsi Nominasi
 - a. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - c. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

- d. Menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
 - e. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - f. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - g. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara triwulanan dan setiap waktu jika ada perubahan.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.
2. Fungsi Remunerasi
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan.
 - d. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.
3. Lain-lain
 - a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki dampak finansial yang signifikan dan/atau risiko hukum bagi Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi atas penyelesaian temuan audit internal dan /atau eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia, khusus mengenai kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia.
 - c. Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Rapat KNR

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2013 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Kehadiran (%)
1.	Ahmad Fuad*	3	3	100 %
2.	Aviliani	5	5	100 %
3.	Mustafa Abubakar	5	5	100 %
4.	Heru Lelono	5	4	80 %
5.	Hermanto Siregar	5	4	80 %
6.	Adhyaksa Dault**	2	2	100 %
7.	Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM)	5	4	80 %
8.	Asep Ikhsan Iskandar	5	5	100 %
9.	Kanyatama P. Mulyono***	4	4	100 %

*Sejak 16 April 2013 ybs menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, menggantikan Adhyaksa Dault.

**Sejak 15 April 2013, ybs tidak lagi menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

***Sejak 1 November 2013 ybs sudah tidak menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda Rapat KNR

Adapun agenda rapat yang dilaksanakan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No	Waktu	Materi
1.	31 Januari 2013	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2013
2.	5 Februari 2013	Analisa Perbandingan Struktur Organisasi Bank antar bank terbesar
3.	30 April 2013	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut MSDM
4.	30 Juli 2013	Pemaparan Rencana Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI serta Kinerja dan Rencana Kerja Dana Pensiun BRI
5.	26 November 2013	Pemaparan kinerja 2013 dan Rencana tindak lanjut Bidang MSDM 2014

Laporan Pelaksanaan Program Kerja serta Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2013, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan berbagai tugas dan kegiatan, mencakup:

- Menyusun rencana dan program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris tahun 2013.
- Melakukan review dan kajian atas Remunerasi Direksi dan Komisaris sesuai kinerja Perseroan, *business size*, dan hasil survei remunerasi industri Perbankan.
- Memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang persetujuan Komisaris BRI atas Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perpanjangan masa kerja anggota Komite yang berasal dari luar Komisaris.
- Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan ketenagakerjaan, yang meliputi :
 - Pentingnya perencanaan SDM dan *Manpower Planning* (MPP) dilakukan secara *integrative strategic* yang mengacu pada *corporate plan*, RBB dan RKAP, serta sesuai dengan kebutuhan riil perkembangan bisnis perseroan.
 - Akselerasi pemenuhan SDM yang dilakukan tetap memperhatikan peningkatan kompetensi dan kualitas kepemimpinan melalui penyempurnaan kualitas pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pendampingan oleh senior, serta internalisasi dan penerapan budaya Perusahaan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis perseroan
 - Langkah-langkah untuk membentuk komposisi jumlah pekerja yang ideal antara pekerja bisnis dan pekerja *supporting* harus didukung oleh peningkatan peran Teknologi Informasi yang menunjang SDM dalam operasional Perseroan.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

- Strategi MSDM untuk mendukung tahun dana pada 2014, melalui optimalisasi pemenuhan SDM khususnya bidang pemasaran dana, dan perbaikan kebijakan di bidang ketenagakerjaan beserta implementasinya, perlu dibarengi dengan komitmen Manajemen dalam menerapkan *reward and punishment* secara obyektif dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pekerja yang pada akhirnya akan membantu terwujudnya Bank dengan jaringan kerja dan SDM yang produktif dan efisien. Selain itu tetap memperhatikan pada kesejahteraan pekerja di masa pensiun.
- 7. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).
- 8. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review perkembangan kinerja bulanan BRI dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
- 9. Melaksanakan kunjungan langsung ke unit kerja.
- 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR)

Dasar Pembentukan Komite

Pembentukan Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR) BRI didasarkan pada :

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Panduan kerja Komite

Pedoman kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR) BRI mengatur tentang tujuan pembentukan Komite, keanggotaan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, kedudukan, etika kerja serta etika rapat. Panduan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR) BRI dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank.

Struktur dan Keanggotaan KPMR

Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko BRI terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dua orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, dua orang anggota yang merupakan Komisaris, dan tiga orang anggota non Komisaris yang ahli di bidang keuangan dan manajemen risiko. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tersebut diatas.

Profil lengkap anggota non-Komisaris dapat dilihat pada uraian "Data-data Perusahaan"

Susunan Keanggotaan 01 Januari 2013 – 15 April 2013			
No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Aviliani	Ketua	Komisaris Independen
2.	Bunador Sanim	Anggota	Komisaris Utama/Independen
3.	Mustafa Abubakar	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Komisaris
4.	Ahmad Fuad*	Anggota	Komisaris Independen
5.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
6.	Ridwan Darmawan Ayub	Anggota	Non Komisaris
7.	I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	Non Komisaris
8.	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Non Komisaris

*Sejak 15 April 2013, ybs tidak lagi menjadi Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Susunan Keanggotaan 16 April 2013 – 31 Desember 2013

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Aviliani	Ketua	Komisaris Independen
2.	Bunaser Sanim	Anggota	Komisaris Utama/Independen
3.	Mustafa Abubakar	Anggota	Wakil Komisaris Utama
4.	Adhyaksa Dault*	Anggota	Komisaris Independen
5.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
6.	Ridwan Darmawan Ayub	Anggota	Non Komisaris
7.	I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	Non Komisaris
8.	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Non Komisaris

* Sejak 16 April 2013 menjadi anggota komite pengawasan manajemen risiko

Independensi KPMR

KPMR senantiasa mengedepankan independensi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris. Semua anggota komite ini adalah independen terhadap Direksi, dan secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidangnya.

Anggota KPMR adalah para profesional yang memiliki kompetensi cukup dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun. Para profesional ini tidak pernah memiliki hubungan dengan Perseroan ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya. Latar belakang para anggota KPMR beragam, yakni manajemen strategis, pengelolaan kinerja, manajemen risiko, perbankan/keuangan dan akuntansi dan dimaksudkan untuk menjamin kualitas rekomendasi serta menjadi nara sumber perbaikan pelaksanaan manajemen risiko BRI.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Panduan Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko, KPMR memiliki fungsi dalam membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank.

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab KPMR meliputi, antara lain:

1. Mengevaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.
2. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan.
3. Mengevaluasi dan menganalisis laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
4. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan.
5. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
6. Mengevaluasi dan mengkaji RKAP, RBB, dan RJPP untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
7. Memantau dan/atau membuat tanggapan atas laporan realisasi RBB dan RKAP.
8. Mengevaluasi dan menganalisis paket pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris.
9. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Rapat dan Kehadiran Rapat Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Mengingat luasnya cakupan dan keterkaitan antar masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Perseroan, maka selain dilakukan dalam forum Rapat KPMR, pembahasan permasalahan yang terkait dengan implementasi manajemen risiko menjadi agenda Rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2013, KPMR telah melakukan rapat, baik internal KPMR maupun bersama-sama dengan Divisi/Unit Kerja yang terkait dalam rangka mengevaluasi penerapan dan pengelolaan manajemen risiko, yang mencakup Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, dan Risiko Reputasi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Komite Pengawasan Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2013 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Kehadiran (%)
1.	Aviliani	Ketua	16	16	100 %
2.	Bunador Sanim	Anggota	16	16	100 %
3.	Adhyaksa Dault*	Anggota	10	8	80 %
4.	Ahmad Fuad**	Anggota	6	6	100 %
5.	Mustafa Abubakar	Anggota	16	15	94 %
6.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	16	13	81 %
7.	Ridwan Darmawan Ayub	Anggota	16	15	94 %
8.	I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	16	14	88 %
9.	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	16	16	100 %

*Sejak 16 April 2013, ybs menjadi Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko
**Sejak 15 April 2013, ybs tidak lagi menjadi Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Adapun agenda rapat yang dilaksanakan KPMR selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Materi	Direksi/Divisi/Unit Kerja
1.	12 Februari 2013	1. Profil Risiko BRI untuk Triwulan III dan IV tahun 2012 2. Tingkat Kesehatan Bank 3. Strategi <i>Anti Fraud</i>	Direktur Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan
2.	11 Juni 2013	1. Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2013 2. Peran GMRK di Kanwil BRI Selindo 3. Pelaksanaan fungsi kepatuhan di BRI	Direktur Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan
3.	10 September 2013	1. Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2012, Triwulan I dan II Tahun 2013 2. Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2013 3. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 4. Strategi <i>Anti Fraud</i>	Direktur Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan
4.	10 Desember 2013	1. Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2013 2. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan 3. Laporan Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> Triwulan III Tahun 2013	Direktur Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan
5.	Januari – Desember 2013	Konsultasi Kredit, yang diselenggarakan dalam 12 (dua belas) kali rapat.	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Bisnis Komersial Direktorat Bisnis Kelembagaan

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Selama tahun 2013, Komite Pengawasan Manajemen Risiko telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko.
2. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretariat Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris tahun 2012.
3. Melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan oleh Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi.
4. Melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan oleh Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN) DPLK Perseroan.
5. Memberikan tanggapan dan pendapat atas fasilitas kredit yang dikonsultasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
6. Memberikan tanggapan atas *draft* Kebijakan Pedoman Benturan Kepentingan.
7. Melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Portofolio Kredit Perseroan.
8. Melakukan evaluasi terhadap SE-SE Direksi Perseroan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan manajemen risiko.
9. Melakukan review atas laporan triwulanan tentang Laporan Profil Risiko Bank Perseroan.
10. Melakukan review atas laporan bulanan dan laporan semester Direktur Kepatuhan Perseroan.
11. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).
12. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review perkembangan kinerja bulanan BRI dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
13. Melakukan pembahasan terhadap penyempurnaan Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang Berbasis Risiko.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

Komite - Komite Dibawah Direksi

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasional, BRI telah membentuk komite-komite (tujuh komite) di bawah Direksi yaitu:

Komite Manajemen Risiko/ Risk Management Committee (RMC)

RMC adalah komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko BRI yang beranggotakan seluruh anggota Direksi dan pejabat setingkat dibawah Direksi BRI yang ditunjuk. RMC bersifat non-struktural dan independen terhadap Unit Kerja Operasional.

RMC bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, RMC telah menetapkan Sub-RMC yang berperan memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam hal ini Direktur Utama BRI. Sub-RMC yang ditetapkan adalah:

1. Operational Risk Management Committee (ORMC) adalah fungsi Sub-RMC yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan eksposur risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional. Yang dimaksud risiko operasional mencakup risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.
2. Credit Risk Management Committee (CRMC) adalah fungsi Sub-RMC yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan eksposur risiko kredit dan penerapan manajemen risiko kredit.
3. Market Risk Management Committee (MRMC) adalah fungsi Sub-RMC yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan eksposur risiko pasar dan penerapan manajemen risiko pasar. Risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko suku bunga dan risiko likuiditas.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan sub Komite Manajemen Risiko selengkapnya ditetapkan dalam surat keputusan Surat Keputusan Direksi No.519-DIR/DMR/07/2011 tanggal 18 Juli 2011.

Ketua	Direktur Utama
Ketua I	Direktur Kepatuhan (merangkap anggota tetap dengan hak <i>voting</i>)
Ketua II	Direktur Pengendalian Risiko Kredit (merangkap anggota tetap dengan hak <i>voting</i>)
Sekretaris I	Kepala Divisi Manajemen Risiko (merangkap anggota tetap dengan hak <i>voting</i>)
Sekretaris II	Kepala Divisi Administrasi Kredit (merangkap anggota tetap dengan hak <i>voting</i>)
Anggota tetap dengan hak <i>voting</i>	1) Direktur Keuangan
	2) Direktur Operasional
	3) Direktur Bisnis Komersial
	4) Direktur Bisnis UMKM
	5) Direktur Bisnis Konsumer
	6) Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN
	7) Direktur Jaringan dan Layanan
Anggota tetap tanpa hak <i>voting</i>	1) Kepala Audit Intern
	2) Seluruh Kepala Divisi (kec Kadiv Manajemen Risiko dan Kadiv ADK)
	3) Pemimpin Cabang Khusus
	4) Pemimpin Wilayah DKI Jakarta
	5) Inspektur DKI Jakarta
Anggota tidak tetap	Diundang Berdasarkan relevansi permasalahan

Wewenang dan Tanggung Jawab RMC

1. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko, serta perubahannya jika diperlukan; termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk penetapan metodologi pengukuran risiko dan perubahannya.
3. Merekomendasikan penetapan limit risiko dan perubahannya.
4. Penyampaian laporan profil risiko dan hasil pemantauan risiko serta rekomendasi perubahan apabila diperlukan

Komite - Komite Dibawah Direksi

Program Kerja Komite

RMC menyelenggarakan pertemuan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan. RMC membahas, mengkaji-ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dan rekomendasi tersebut diantaranya mencakup kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko.

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite

Rapat RMC dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota tetap tanpa hak *voting*, termasuk 3 (tiga) Direktur yang salah satunya Direktur Kepatuhan. Rapat RMC dipimpin oleh Ketua RMC. Dalam hal Ketua RMC berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua I atau Ketua II.

Putusan rapat RMC diambil secara musyawarah/mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka anggota tetap dengan hak *voting* berhak melakukan *voting* dan dianggap memenuhi persyaratan apabila disetujui oleh lebih dari 50% anggota tetap dengan hak *voting* yang hadir.

Agenda Pertemuan Komite

No	Kegiatan	Jadwal	Agenda
1	RMC I-2013	13 Feb 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Profil Risiko BRI triwulan IV-2012 2. Pembahasan <i>issue</i> (pinjaman ritel dan menengah, peningkatan <i>fee based income e-channel</i>, mitigasi potensi kerugian terhadap pergerakan valas, implementasi <i>business continuity management</i>) 3. Analisa Permodalan dan <i>stress test</i> 4. Rekomendasi dan Putusan RMC
2	RMC II-2013	29 Mei 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Profil Risiko BRI triwulan I-2013 2. Pembahasan <i>issue</i> (CASA, <i>classified loan</i>, <i>employee awareness</i> terhadap <i>fraud</i>) 3. Analisa Permodalan dan <i>stress test</i> 4. Rekomendasi dan Putusan RMC
3	RMC III-2013	31 Juli 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Profil Risiko BRI triwulan II-2013 2. Pembahasan <i>issue</i> (LDR rupiah, pelemahan nilai tukar IDR terhadap USD) 3. Analisa Permodalan dan <i>stress test</i> 4. Rekomendasi dan Putusan RMC
4	RMC IV-2013	29 Okt 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Profil Risiko BRI triwulan III-2013 2. Pembahasan <i>issue</i> (<i>fraud</i> di unit kerja BRI, persiapan tahun 2014, <i>cash ratio</i>) 3. Analisa Permodalan dan <i>stress test</i> 4. Rekomendasi dan Putusan RMC

Komite Kebijakan Kredit (KKP)

KKP adalah komite yang membantu Direksi BRI dalam merumuskan kebijakan perkreditan dan memberikan saran-saran perbaikan terkait kebijakan perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan KKP

Struktur dan Keanggotaan KKP selengkapnya ditetapkan dalam SK Direksi No S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 adalah:

Ketua : Direktur Utama
 Sekretaris : Kepala Divisi Administrasi Kredit (merangkap sebagai Anggota)
 Anggota Tetap : - 7 Direktur Bidang Bisnis, Keuangan dan Kepatuhan
 - 17 Kepala Divisi Bidang Bisnis, Renstra dan Hukum.

Tugas dan Tanggung Jawab KKP

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) BRI, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana dimaksud dalam KUP BRI.
2. Mengawasi agar KUP-BRI diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya. Selanjutnya KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KUP-BRI dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. kebenaran pelaksanaan wewenang memutus kredit
 - b. kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu
 - c. kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK

Komite - Komite Dibawah Direksi

- d. ketaatan terhadap ketentuan perundangundangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit
 - e. penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KUP-BR
 - f. pemenuhan kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)/Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
 - g. debitur-debitur besar tertentu dan kredit-kredit yang berada dalam daftar kredit dalam pengawasan khusus.
4. Melakukan kajian untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern Perkreditan.
 5. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan saran-saran langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris mengenai:
 - a. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KUP-BRI.
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan butir 3 di atas.
2. Membuat dan menyiapkan draft KUP untuk dibahas dalam rapat KKP, apabila terdapat perubahan/revisi KUP
 3. Menyampaikan identifikasi permasalahan penerapan KUP agar dapat diambil keputusan untuk upaya perbaikan serta penyelesaian masalah
 4. Mengelola proses pengajuan persetujuan KUP kepada Direksi dan Komisaris
 5. Menatakerjakan berita acara setiap rapat KKP untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Utama
 6. Membuat dan mengedarkan berita acara pertemuan paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal rapat serta bertanggung jawab memelihara dan menyimpan dokumen-dokumen KKP
 7. Menindaklanjuti hasil rapat KKP untuk dirumuskan dalam bentuk kebijakan perkreditan

Agenda Pertemuan Komite

1. Melakukan rapat pembahasan *final draft* perubahan/revisi Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) apabila terdapat perubahan / revisi sebelum disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi
2. Melakukan pembahasan apabila terdapat permasalahan penting dan mendesak yang memerlukan respon organisasi secara cepat dan segera

Frekuensi Rapat KKP

Sepanjang tahun 2013, tidak terdapat agenda rapat KKP dikarenakan tidak ada perubahan dalam kebijakan perkreditan

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan/atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Struktur dan keanggotaan Komite Kredit ditetapkan dalam SK Direksi No.S.114-DIR/ADK/06/2012. tanggal 29 Juni 2012 dengan gambaran sebagai berikut.

Berdasarkan keanggotaan dan kewenangan yang dimiliki, Komite Kredit di Kantor Pusat dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Komite Kredit BRI (KK-BRI)
2. Komite Kredit Direksi (KK-Direksi)
3. Komite Kredit Divisi (KK-Divisi)
4. Komite Kredit Kantor Cabang Khusus (KK-KCK)

Berdasarkan keanggotaan dan kewenangan yang dimiliki, Komite Kredit di Kantor wilayah dibagi menjadi 3 (tiga) Komite Kredit, yaitu sebagai berikut :

1. Komite Kredit Kanwil
2. Komite Kredit Kanwil Restrukturisasi
3. Komite Kredit Kanwil Hapus Tagih

Program Kerja KKP

Terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan di atas, KKP memiliki program kerja berupa rapat KKP. Fungsi, tugas dan tanggung jawab KKP sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris KKP bersama dengan Divisi-Divisi terkait

Pelaksanaan kegiatan KKP

Pelaksanaan kegiatan rapat KKP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rapat KKP diadakan setiap terjadi perubahan /revisi Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) atau apabila terdapat permasalahan yang mendesak lainnya untuk dibahas dalam KKP
2. Rapat KKP dipimpin oleh Direktur Utama sebagai ketua KKP, dalam hal ketua KKP berhalangan dapat dipimpin oleh Direktur Pengendalian Risiko Kredit atau Direktur lainnya anggota KKP
3. Rapat KKP sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota, termasuk minimal 3 (tiga) orang Direktur. Apabila Kepala Divisi yang menjadi anggota berhalangan hadir maka ybs dapat menunjuk pengganti
4. Keputusan rapat KKP diambil secara musyawarah / mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditentukan dalam Rapat Direksi

Mekanisme Kerja KKP

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab KKP sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris KKP Bersama dengan Divisi-divisi terkait. Sekretaris KKP melaksanakan hal-hal sbb :

1. Menyusun dan merumuskan materi rapat KKP, membuat agenda rapat KKP dan melaksanakan rapat KKP

Komite - Komite Dibawah Direksi

Berikut Susunan keanggotaan Komite Kredit (KK) BRI dan Direksi

Komite Kredit	Anggota	Pengambil Keputusan Akhir
Komite Kredit BRI (untuk putusan kredit)	Direktur Bsinis Komersial Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Konsumer Direktur Pengendalian Risiko Kredit	Direktur Utama
Komite Kredit BRI (untuk putusan <i>Money Market Line</i> dan produk <i>Treasury</i>)	Direktur Keuangan Direktur Bisnis Komersial Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Konsumer Direktur Pengendalian Risiko Kredit	Direktur Utama
Komite Direksi 1 (KKD-1) (untuk putusan kredit <i>performing</i> - kredit menengah prakarsa kantor Wilayah dan Divisi Bisnis Program & Kemitraan)	Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Komersial Direktur Pengendalian Risiko Kredit	
Komite Direksi 2 (KKD-2) (untuk putusan kredit <i>performing</i> - kredit menengah dan korporasi prakarsa Divisi Bisnis BUMN)	Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN Direktur Bisnis Komersial Direktur Pengendalian Risiko Kredit	
Komite Direksi 3 (KKD-3) (untuk putusan kredit <i>performing</i> - kredit menengah dan korporasi prakarsa Divisi Bisnis Umum dan Agribisnis, serta kredit consumer)	Direktur Bisnis Komersial Direktur Bisnis Konsumer Direktur Pengendalian Risiko Kredit	
Komite Kredit Direksi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Komersial Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN Direktur Bisnis Konsumer Direktur Pengendalian Risiko Kredit	

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Tugas Komite

- Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi.
- Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan untuk kredit dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh ALCO.

Tanggung jawab Komite Kredit:

- Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
- Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
- Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit

sebagai bukti pemberian putusan kredit sebagai wujud tanggung jawab Komite Kredit, oleh karena itu, sebelum membubuhkan tanda tangan, Komite Kredit harus:

- Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat.
- Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP-BRI, PPK serta peraturan perkreditan lainnya.
- Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

Program Kerja Komite

Mengadakan rapat Komite Kredit untuk pemberian putusan kredit dengan besaran tertentu
Rapat Komite Kredit dilaksanakan dengan ketentuan;

- Dapat dilaksanakan apabila memenuhi quorum:
 - Untuk KK BRI, dihadiri minimal 60% dari anggota Komite
 - Selain KK BRI, dihadiri oleh seluruh anggota Komite
- Pengambilan Keputusan
 - Untuk KK BRI dan KK Direksi, pengambilan keputusan didasarkan pada asas *majority*. Apabila terdapat anggota yang tidak hadir maka tetap dimintakan putusan secara sirkuler.
 - Selain KK BRI, putusan kredit dilaksanakan secara *unanimous* atau putusan dapat disetujui apabila seluruh anggota Komite Kredit menyatakan setuju.

Komite - Komite Dibawah Direksi

Pelaksanaan kegiatan Komite

Rapat Komite Kredit dilakukan apabila diperlukan putusan kredit baru maupun perpanjangan kredit. Kredit yang harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris adalah kredit dengan besaran minimal Rp.1 (satu) triliun dan atau bila menurut pertimbangan Komite Kredit BRI atau Direksi terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Adapun besaran tersebut berlaku baik untuk debitur tunggal, Grup, inti plasma maupun debitur BUMN atau pemerintah

Agenda Pertemuan Komite

1. Memberikan putusan kredit dengan besaran tertentu sesuai dengan limit kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing Komite
2. Mendapatkan pemecahan permasalahan lainnya yang memerlukan putusan oleh KKP

Putusan Komite Kredit (KK) selama tahun 2013 :

Periode	Putusan Komite Kredit BRI	Putusan Komite Kredit Direksi	Putusan Komite Kredit Direksi Restrukturisasi
2013	258	39	26

Komite Aset dan Liabilitas (Assets and Liabilities Committee/ ALCO)

Asset and Liabilities Committee (ALCO) adalah komite yang membantu Direksi BRI dalam mengelola Asset dan Liability BRI secara terpadu, menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman, menentukan kebijakan *mismatch*, *net open position* dan risiko suku bunga, mengelola dan menetapkan struktur *balance sheet* dan *capital* serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan yang akan diputuskan dalam Rapat ALCO.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Struktur Organisasi Komite Aset dan Liabilitas selengkapnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi no No.650-DIR/TRY/10/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dengan garis besar sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota)	: Direktur Utama
Ketua Pengganti I (merangkap anggota)	: Direktur Keuangan
Ketua Pengganti II (merangkap anggota)	: Direktur Pengganti Direktur Keuangan (Sesuai Surat Keputusan tentang Direktur Pengganti)
Sekretaris (merangkap anggota)	: Kepala Divisi Treasury
Anggota	: - Direksi - Seluruh Kepala Divisi Bisnis, Dana dan Jasa maupun Operasional - Pimpinan Wilayah di Jakarta dan - Pimpinan Kantor Cabang Khusus.

Assets and Liabilities Management (ALM):

Merupakan grup analis penunjang ALCO. Sebagai grup analis penunjang ALCO, ASG memiliki tugas melakukan analisis antara lain atas sumber dan penggunaan dana, *Maturity and Repricing Gap*, *Primary* dan *Secondary Reserve*, monitoring NOP, menyusun skenario tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman dan alternatif *pricing*, menyusun *funding strategy*, dan menyiapkan data, bahan presentasi, dan perlengkapan yang diperlukan untuk rapat ALCO.

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan Asset and Liabilities BRI secara terpadu.
2. Menetapkan suku bunga dasar untuk simpanan, pinjaman dan *fund transfer price*.
3. Menentukan kebijakan *mismatch* dan *net open position* (NOP).
4. Mengelola dan menetapkan struktur *balance sheet* dan *capital*.
5. Memastikan pengelolaan Asset and Liabilities telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan hasil rapat ALCO.

Program Kerja ALCO

ALCO secara periodik menyelenggarakan pertemuan untuk membahas pengelolaan Asset and Liabilities BRI yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan Direksi dalam hal:

- Perkembangan kinerja bank.
- Komposisi dan pertumbuhan portofolio bank.
- Pengelolaan risiko (panduan limit *mismatch* dan *net open position*).
- Suku bunga simpanan, pinjaman, dan *fund transfer price*.

Komite - Komite Dibawah Direksi

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite

- a. Rapat ALCO BRI dipimpin oleh Ketua ALCO. Dalam hal Ketua ALCO berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua ALCO Pengganti I atau apabila berhalangan juga dapat diganti oleh Ketua ALCO Pengganti II.
- b. Koordinasi penyelenggaraan Rapat ALCO merupakan tanggung jawab Sekretaris ALCO, antara lain mempersiapkan rapat, mempersiapkan dan mempresentasikan materi rapat, serta membuat dan menyebarkan notulen rapat. Dalam hal Sekretaris ALCO berhalangan hadir, Kepala Divisi Treasury selaku Sekretaris ALCO dapat digantikan oleh Wakil Kepala Divisi Treasury, atau jika berhalangan juga dapat digantikan oleh Kepala Desk Investment Banking, atau jika berhalangan juga dapat digantikan oleh Kepala Bagian ALCO Supporting Group.
- c. ALCO mengadakan pertemuan secara periodik dalam setiap bulan.
- d. Rapat ALCO harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota ALCO. Apabila Kepala Divisi yang menjadi Anggota ALCO berhalangan maka yang bersangkutan dapat menunjuk penggantinya setingkat Wakil Kepala Divisi atau minimal Kepala Bagian.
- e. Keputusan Rapat ALCO diambil secara musyawarah / mufakat. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka keputusan Rapat ALCO dianggap sah bila disetujui oleh 2/3 jumlah anggota yang hadir dalam pertemuan termasuk 2 orang anggota Direksi, dan salah satunya adalah Ketua / Ketua Pengganti.

Agenda Pertemuan Komite

No	Tanggal	Topik/Agenda rapat ALCO
1	22 Januari 2013	Agenda rutin setiap rapat ALCO antara lain : a. Presentasi Asset and Liabilities Management. b. <i>Market Review</i> . c. Perkembangan Harga Saham BRI. d. Rekomendasi.
2	26 Februari 2013	
3	26 Maret 2013	
4	16 April 2013	
5	23 Mei 2013	
6	18 Juni 2013	
7	16 Juli 2013	
8	22 Agustus 2013	
9	19 September 2013	
10	17 Oktober 2013	
11	21 November 2013	
12	19 Desember 2013	

Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia merupakan komite operasional yang berwenang menetapkan kebijakan di bidang SDM. Komite ini dibentuk pada tahun 2008 dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, obyektivitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan sumber daya manusia serta memberikan keyakinan kepada stakeholders bahwa penetapan kebijakan SDM telah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip GCG.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Ketua : Direktur Utama
 Anggota : Seluruh Direksi BRI
 Sekretaris : Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Wakil Sekretaris : Wakil Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Sebagai komite operasional di bidang SDM, Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia memiliki kewenangan dalam hal:

1. Pengambilan keputusan bidang kebijakan SDM mencakup antara lain perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pengembangan karier, manajemen kinerja, kesejahteraan, hubungan industrial, *assessment*, dan Sistem Informasi Manajemen SDM (SIM-SDM).
2. Pengambilan keputusan bidang operasional SDM, meliputi mutasi (promosi, rotasi, demosi), penilaian kinerja, dan hukuman disiplin Pejabat Eselon 1 dan 2.

Program Kerja Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Program kerja Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia mencakup pembuatan ketentuan di bidang kebijakan dan bidang operasional SDM. Struktur dan keanggotaan komite Kebijakan Sumberdaya Manusia ditetapkan melalui SK Direksi BRI No. S.109-DIK/02/2008 tanggal 29 Februari 2008.

Komite - Komite Dibawah Direksi

Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2013, Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan rapat bidang kebijakan sebanyak 5 (lima) kali dan bidang operasional sebanyak 8 (delapan) kali dengan persentase kehadiran anggota komite 100%. Perincian pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut:

Bidang Kebijakan		
No	Tanggal	Topik/Agenda
1	15 Februari 2013 - 18 Maret 2013	Ketentuan Pembayaran Insentif Jangka Pendek
2	01 Mei 2013- 31 Mei 2013	Ketentuan Pemberian Bonus Th 2012 Bagi Pekerja BRI
3	18 Juni 2013 - 16 Jul 2013	Ketentuan Insentif Jangka Pendek Bagi Pekerja BRI Th 2013
4	27 Juni 2013 - 10 Jul 2013	Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI
5	28 Mei 2013- 11 Juni 2013	Ketentuan Pemberian Bonus Tahun 2013 Bagi Pekerja BRI

Bidang Operasional		
No	Tanggal	Topik/Agenda
1	14 Januari 2013	Pembahasan Kasus
2	17 Januari 2013	Pembahasan Kasus
3	08 Januari 2013	Mutasi / Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2
4	15 Januari 2013	Mutasi / Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2
5	05 Maret 2013	Mutasi / Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2
6	18 Juli 2013	Mutasi / Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2
7	5 September 2013	Mutasi / Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2
8	14 November 2013	Mutasi / Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2

Realisasi Program Kerja Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2013 tidak terdapat kegiatan maupun program kerja Komite, khususnya terkait dengan perubahan dan penetapan kebijakan

Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi/Information System and Technology Steering Committee (ITSC)

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007, keduanya perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, BRI telah menetapkan Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi melalui Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: 625-DIR/TSI/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Komite Pengarah (Steering Committee) Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

ITSC merupakan komite yang bertanggung jawab memberikan arahan dan rekomendasi tentang kebijakan, pengembangan, dan implementasi teknologi dan sistem informasi BRI.

Struktur dan Keanggotaan ITSC

Struktur dan Keanggotaan ITSC ditetapkan melalui SK Direksi No. 625-DIR/TSI/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan gambaran ringkas sebagai berikut:

Ketua : Direktur Operasional
Wakil Ketua : Direktur Kepatuhan
Sekretaris : Kepala Divisi Teknologi dan Sistem Informasi
Anggota : 19 Kepala Divisi terdiri dari Divisi Bisnis, Divisi Operasional dan Audit Intern.

Keanggotaan Komite bersifat *ex-officio* dan anggota komite mewakili pihak yang berhubungan langsung dengan TSI baik sebagai partner maupun sebagai pengguna.

Komite - Komite Dibawah Direksi

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab ITSC

1. Memberikan rekomendasi mengenai rencana kebijakan sasaran pengembangan TSI BRI jangka panjang (5 tahun) yang dituangkan dalam IT *Strategic Plan* (ITSP) BRI;
2. Memberikan rekomendasi prioritas pengembangan TSI BRI jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang (5 tahun) sesuai dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank yang akan dijalankan oleh manajemen BRI;
3. Memberikan rekomendasi perubahan perencanaan dan strategi TSI dalam jangka panjang sebagai akibat perubahan kebijakan dan strategi bisnis BRI;
4. Melakukan review dan merekomendasikan Rencana Kerja Fungsional dan Rencana kerja Anggaran Investasi dan Eksploitasi TSI BRI untuk pengembangan, operasional dan pemeliharaan TSI dalam jangka pendek (tahunan) dengan berpedoman pada ITSP BRI yang telah ditetapkan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan proyek TSI BRI agar arah pengembangan sesuai dengan perencanaan dan strategi yang telah ditetapkan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi status pengembangan TSI secara berkala atas realisasi dan proyek pengembangan TSI yang dikelola oleh Divisi TSI.
7. Melakukan monitor efektivitas langkah-langkah pengelolaan risiko atas investasi BRI pada sektor teknologi informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BRI.
8. Merekomendasikan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna (*user*) dan penyelenggara TSI secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Program Kerja ITSC

Program kerja ITSC adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan terhadap materi yang diagendakan dalam pertemuan komite.

Realisasi Program Kerja

Dalam setiap rapat ITSC telah dilakukan evaluasi terhadap perkembangan IT BRI dan pembahasan masalah sesuai agenda masing-masing rapat. Dalam rapat tersebut Direksi memberikan pengarahan mengenai strategi khususnya terkait pengembangan *e-channel* tertentu yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih. Namun demikian, Direksi juga mengingatkan agar pengembangan aplikasi tidak mengabaikan pengembangan yang bersifat *mandatory*.

Agenda Pertemuan ITSC

Selama tahun 2013, rapat ITSC yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Agenda Pertemuan Komite		
No	Tanggal	Topik/Agenda rapat ITSC
1	29 April 2013 (ITSC I)	Agenda Pembahasan ITSC I 2013 terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi ITSP 2008-2013 & Penyusunan ITSP 2014-2018 • Realisasi Anggaran TI Tahun 2013 • Realisasi Kegiatan Proyek TI Tahun 2013 • Performansi TI • <i>Live Production</i> DRC
2	12 November 2013 (ITSC II)	Agenda Pembahasan ITSC II 2013 terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Live</i> DRC • Pelaksanaan pelatihan IT praktis bagi petugas IT dan <i>E-Channel</i> kanca • Status perkembangan proyek BRI • Realisasi inisiatif bisnis dan implementasinya • Tindak lanjut temuan BI • Proyek CLAS • Penyusunan ITSP 2014-2018 • Aplikasi Mocash • Aplikasi CMS

Komite Pengarah Project Management Office (PMO) Steering Committee

PMO Steering Committee adalah forum/komite tertinggi dalam manajemen proyek tingkat korporat di BRI. PMO Steering Committee mempunyai peran dalam memberikan arahan strategis dalam pengelolaan proyek. Keputusan strategis dalam pengelolaan proyek mencakup keputusan investasi yang terkait dengan masalah proyek, diantaranya menyetujui, mengubah atau membatalkan rencana dan pelaksanaan proyek.

Komite - Komite Dibawah Direksi

Struktur dan Keanggotaan PMO Steering Committee

Struktur dan keanggotaan selengkapnya ditetapkan melalui SK Direksi No.647-DIR/REN/09/2011 tanggal 30 September 2011, dengan gambaran ringkas sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama

Anggota : - Direktur yang menjabat Head of PMO

- Para anggota Direksi yang membawahi Unit Kerja Pemilik Proyek
- Para anggota Direksi yang membawahi Unit Kerja Pendukung Proyek
- Para Kepala Unit Kerja Pemilik Proyek
- Para Kepala Unit Kerja Pendukung Proyek

Tugas dan Tanggung Jawab PMO Steering Committee

1. Memberikan arahan strategi proyek-proyek di BRI secara korporat
2. Mengambil keputusan atas usulan penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan proyek yang tidak dapat diputuskan oleh Head of PMO atau Project Steering Committee
3. Melakukan realokasi anggaran antar proyek yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Proyek sesuai ketentuan yang berlaku
4. Mengambil keputusan atas hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan Umum PMO dan PP PMO
5. Mengesahkan hasil *Joint Planning Session*
6. Menghentikan proyek, jika suatu proyek tidak lagi memiliki alasan untuk diteruskan

Program dan Realisasi Program Kerja PMO Steering Committee

Dalam menjalankan fungsinya, PMO Steering Committee melakukan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan bertanggungjawab kepada Direksi BRI.

Ringkasan kegiatan kerja PMO untuk tahun 2013 lalu adalah:

No.	Kegiatan	Waktu	Agenda	Anggota yang Hadir
1	PMOSC Meeting II Tahun 2012	27 Februari 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan Proyek tahun 2012 2. Usulan Proyek tahun 2014 3. Permohonan putusan PMOSC Meeting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Head of PMO (Direktur kepatuhan) 2. Direktur MSDM 3. Direktur Jaringan dan Layanan 4. Direktur Keuangan 5. Direktur Bisnis UMKM 6. 21 Unit Kerja (Divisi/AIN) Kantor Pusat
2	PMOSC Meeting I tahun 2013	30 Agustus 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan Proyek 2013 2. Usulan Proyek Tahun 2013 3. Permohonan Putusan PMOSC Meeting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Head of PMO (Direktur kepatuhan) 2. Direktur MSDM 3. Direktur Jaringan dan Layanan 4. 19 Unit Kerja (Divisi/AIN) Kantor Pusat

Komite Evaluasi Jabatan

Komite Evaluasi Jabatan adalah suatu komite yang bertugas melakukan review dan merekomendasikan Golongan Jabatan yang diusulkan oleh Tim Evaluasi Jabatan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Evaluasi Jabatan

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nokep. S.38-DIR/REN/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Umum Organisasi, struktur dan keanggotaan Komite Evaluasi Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Direktur Kepatuhan
2. Direktur Operasional
3. Kepala Divisi Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis
4. Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keanggotaan melekat pada Jabatan (*ex officio*), bukan bersifat individual

Komite - Komite Dibawah Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Evaluasi Jabatan

Komite Evaluasi Jabatan bertugas:

1. Memberikan arahan dan masukan atas rekomendasi Golongan Jabatan yang disiapkan oleh Tim Evaluasi Jabatan pada saat pelaksanaan rapat Komite Evaluasi Jabatan.
2. Merekomendasikan Golongan Jabatan yang perlu disetujui oleh Direksi BRI melalui Rapat Direksi. Hasil penetapan Golongan Jabatan diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

Program Kerja Komite Evaluasi Jabatan

Tim Evaluasi Jabatan melaksanakan Evaluasi Jabatan yang kemudian dipresentasikan kepada Komite Evaluasi Jabatan.

Frekuensi Rapat Komite Evaluasi Jabatan

Selama tahun 2013, Komite Evaluasi Jabatan telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebesar 100%, dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal pelaksanaan	Agenda
1.	5 Juni 2013	Pelaporan hasil Tim Evaluasi Jabatan bersama konsultan
2.	13 Juni 2013	Revisi atas pertemuan sebelumnya

Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Panduan Kerja Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris adalah organ Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas usul Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan atas beban Perseroan yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Struktur Organisasi di bawah Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :



Tugas Dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Secara garis besar, tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinasikan tugas Sekretariat Dewan Komisaris bersama Staf, Sekretaris Pelaksana, dan Pelaksana di Lembaga Komisaris BRI.
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris.
4. Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif, kesekretariatan, dan protokoler Dewan Komisaris.
5. Mengkoordinasikan dan tindak lanjut atas permintaan dan/atau pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
6. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran dan menyampaikan anggaran tahunan Lembaga Komisaris yang diminta oleh Divisi Sekretariat Perseroan.
7. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Mengkoordinasikan dan tindak lanjut atas tugas lain yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite di bawah Dewan Komisaris BRI.

Sekretaris Perusahaan

Dasar Acuan

Sekretariat Perusahaan memiliki posisi strategis untuk memastikan kepatuhan dan administrasi pengambilan keputusan serta melakukan fungsi komunikasi korporat dalam rangka membangun *goodwill* perusahaan. Kebijakan Regulator yang menjadi acuan bagi pembentukan dan pelaksanaan sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Keputusan Ketua Bapepam IX.1.4 No: Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.

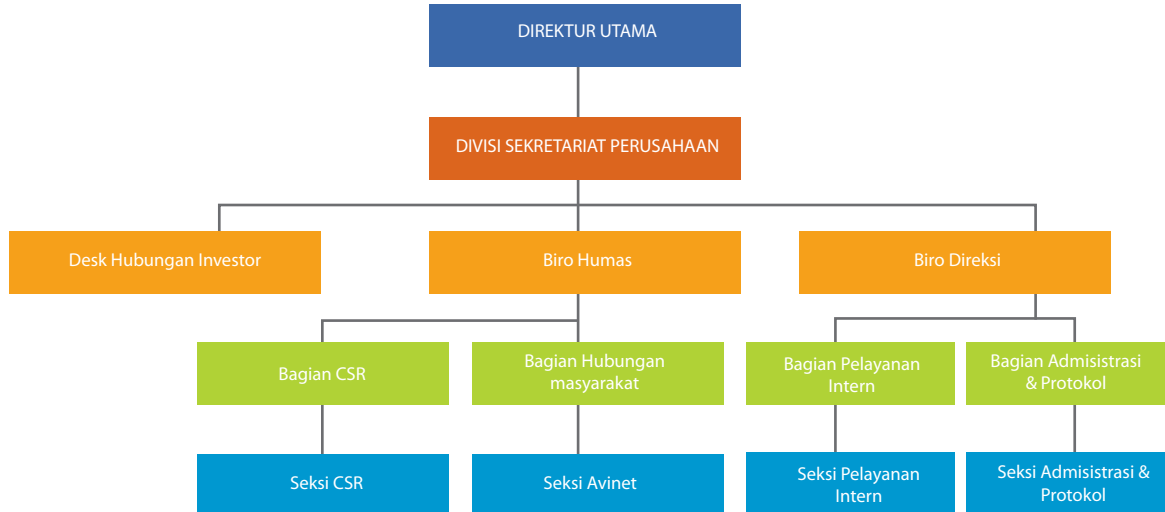
Panduan Sekretariat Perusahaan

Panduan Sekretaris Perusahaan BRI dibuat tahun 2007 sebagai revisi panduan yang dibuat tahun 2003, yang berisi kualifikasi, struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan yang termasuk didalamnya pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi, pendalaman pengetahuan, komunikasi, dan sebagainya.

Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nokep: 205-DIR/REN/04/2013, Sekretaris Perusahaan dibantu oleh:

- a. Fungsi Hubungan Masyarakat (*Public Relation Function*);
- b. Fungsi CSR (*Corporate Social Responsibility Function*);
- c. Fungsi Hubungan Investor (*Investor Relation Function*);
- d. Fungsi Protokol dan Administrasi (*Protocol and Administration Function*);
- e. Fungsi Pelayanan Internal (*Internal Services Function*).



Catatan :

SK Direksi BRI Nokep : S.16-DIR/REN/04/2011 tanggal 27 April 2011

Pihak yang Mengangkat dan/atau Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan dan/atau pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi BRI dan dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dilaporkan kepada OJK serta Bursa Efek Indonesia.

Klasifikasi dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Sesuai klasifikasi Sekretaris Perusahaan yang tertuang dalam Panduan Sekretaris Perusahaan BRI bahwa Sekretaris Perusahaan diwajibkan memiliki pengetahuan hukum dan/atau ekonomi atau pengetahuan terkait lainnya yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu kriteria berpengalaman luas, andal dan mampu mempertahankan kerahasiaan, dapat berperan sebagai komunikator yang baik, seorang pendengaran yang baik, dan mampu berperan sebagai “gerbang penghubung” pertama untuk emberikan saran bagi Dewan Komisaris, Direksi serta eksekutif senior lainnya di BRI, sehingga Sekretaris Perusahaan dilatih dalam bidang hukum, akuntansi, maupun praktik sekretaris perusahaan yang baik.

Fungsi Sekretariat Perusahaan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Bada Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), fungsi sekretariat perusahaan meliputi:

1. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*); dan

4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sesuai peraturan tersebut, tugas utama Sekretariat Perusahaan BRI adalah membangun *corporate image* BRI melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor, dan fungsi kesekretariatan perusahaan termasuk Biro Direksi dan Dewan Komisaris serta pengelolaan hubungan/pelayanan informasi kepada unit kerja terkait dan para *stakeholders* untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan.

Sekretariat Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholders*, serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari *stakeholders*.

Dengan tugas dan tanggung jawab yang bersifat strategis tersebut Sekretariat Perusahaan BRI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretariat Perusahaan BRI juga memiliki fungsi sebagai *office of the board* untuk memastikan ketersediaan informasi dan memastikan pencapaian kuorum dalam pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab mengkinikan informasi tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi serta menyampaikan informasi *corporate action* kepada regulator yang berkepentingan. Dalam rangka menjalankan fungsi kepatuhan, Sekretariat Perusahaan menjalankan fungsi *government relations* yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara *goodwill* perusahaan dimata regulator. Uraian pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan adalah sebagai berikut.

Pelaksanaan Hubungan Masyarakat BRI

Sekretariat Perusahaan menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat yang baik untuk menyampaikan pelaksanaan program perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai bagian dari elemen negara dan masyarakat, serta pemberdayaan *stakeholders*.

Kegiatan Hubungan Masyarakat dijalankan oleh Sekretariat Perusahaan dengan tujuan untuk membentuk *corporate image*, melalui sarana publikasi seperti media cetak, media elektronik, media luar ruang, pameran ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk mencapai tujuan tersebut Sekretariat Perusahaan menyelenggarakan berbagai kegiatan hubungan masyarakat, mencakup:

Selama tahun 2013, telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

Sekretariat Perusahaan

No	Kegiatan	Tanggal
1	CSR BRI Peduli Pendidikan - Direksi Mengajar	20 Januari 2013
2	CSR BRI Peduli Korban Bencana Alam - Posko Banjir	24 Januari 2013
3	<i>Press Confrence</i> Kinerja BRI Triwulan 1	31 Januari 2013
4	RUPST 2013	28 Februari 2013
5	Pameran Gerakan Kewirausahaan Nasional 2013	18 Maret 2013
6	CSR BRI Peduli Pembangunan Sarana Prasarana - Pembangunan Desa Banyumas	01 April 2013
7	<i>Launching Product</i> Britama Versi Man of Steel	18 Mei 2013
8	Pameran Indonesia Banking Expo 2013	23 Mei 2013
9	Pameran Indonesia <i>Islamic Fair</i>	30 Mei 2013
10	Pameran Jakarta <i>Great Sale</i> 2013	01 Juni 2013
11	CSR BRI Peduli Kesehatan - Khitanan Massal Klinik Amira	01 Juni 2013
12	<i>Launching Product</i> Bancassurance BRI	27 Juni 2013
13	Pameran BUMN Expo 2013	27 Juni 2013
14	CSR BRI Peduli Olahraga - Apresiasi Atlet Taekwondo	28 Juni 2013
15	Pameran Semarak Bazaar Ramadhan Danapala	10 Juli 2013
16	Pameran Gelar Batik Nusantara	17 Juli 2013
17	CSR BRI Peduli Kesehatan - Sembako Ramadhan	23 Juli 2013
18	Bazaar Ramadhan Kantor Pusat BRI	24 Juli 2013
19	Buka Puasa Bersama	25 Juli 2013
20	<i>Press Confrence</i> Kinerja BRI Triwulan 2	31 Juli 2013
21	<i>Independence Day Run</i>	25 Agustus 2013
22	Seminar Outlook Ekonomi & Perbankan	26 Agustus 2013
23	CSR BRI Peduli Lingkungan Hidup - Hijaukan Hutanmu	19 September 2013
24	CSR BRI Peduli Lingkungan Hidup - Spirit of Thalassa di Pulau Pramuka	28 September 2013
25	Pameran Produk Dalam Negeri	03 Oktober 2013
26	CSR BRI Peduli Pendidikan - Santipreneur Pondok Pesantren Al Bayan	09 Oktober 2013
27	Pameran Jakarta <i>Night Market</i>	10 Oktober 2013
28	CSR BRI Peduli Sarana Prasarana Umum - Bantuan Air Bersih di daerah Yogyakarta	10 Oktober 2013
29	<i>Press Confrence</i> Kinerja BRI Triwulan 3	23 Oktober 2013
30	Pameran Indocomtech 2013	30 Oktober 2013
31	CSR BRI Peduli Pendidikan - Bantuan Renovasi Sekolah di Perbatasan (Sanggau, Atambua, Merauke, Entikong)	06 November 2013
32	<i>School Visit</i> PERBANAS	11 November 2013
33	Forum Strategis 2013	03 Desember 2013

Pelaksanaan Hubungan Investor

Perseroan telah membentuk fungsi Hubungan Investor yang berkedudukan dibawah Sekretariat Perusahaan dan bertugas sebagai penghubung perusahaan dengan komunitas pasar modal dan pihak eksternal lain. Investor Relations ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan dipenuhinya aspek keterbukaan sebagai salah satu prinsip GCG kepada komunitas pasar modal, membina hubungan dengan para investor saham dan obligasi maupun surat berharga lainnya, para analis, jurnalis, wali amanat, lembaga pemeringkat, *Self Regulatory Organization* (SRO), serta komunitas keuangan terkait lainnya.

Sekretariat Perusahaan

Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut serta dalam rangka memenuhi peraturan dan meningkatkan komunikasi yang efektif, Desk Investor Relations BRI menyelenggarakan beragam kegiatan mencakup: *public expose* dan *analyst meeting*, menerima *company visit*, *field visit*, dan *conference call*, menerbitkan *investor newsletter*, melakukan update informasi pada *investor relations website* serta mengikuti *investor conference* dan *non-deal roadshow* baik di dalam negeri maupun di kota-kota pusat keuangan dunia di Asia, Eropa dan Amerika. BRI juga menyampaikan informasi mengenai perkembangan perusahaan terkini melalui penyelenggaraan RUPS dan penerbitan Laporan Tahunan. Di samping itu, BRI juga menyampaikan informasi untuk seluruh pegawai melalui saluran komunikasi internal. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin kesetaraan dalam penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

BRI berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar kepentingan investor dapat terlindungi, terutama dari risiko kesalahan pengambilan keputusan berinvestasi karena kurangnya informasi, *insider trading*, penyesatan informasi dengan sengaja, atau perbuatan tidak etis lainnya yang berhubungan dengan ketersediaan informasi.

Dalam rangka penyampaian informasi yang tepat dan akurat tersebut, BRI melalui Sekretariat Perusahaan segera mengumumkan hasil-hasil penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan di tahun 2012 serta mengumumkan serangkaian informasi material dan informasi terkait aksi korporasi lainnya melalui forum korespondensi dengan otoritas pasar modal (OJK dan Bursa Efek Indonesia) maupun melalui penerbitan *press-release* (Rincian *press-release* dan korespondensi BRI dengan otoritas pasar modal dapat dilihat pada Bagian Lampiran dari Laporan Tahunan ini). Selain itu, di tahun 2012 BRI juga telah menerbitkan Laporan Tahunan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang berisi informasi mengenai kinerja Perseroan. Pemegang saham dan masyarakat umum juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan Perseroan melalui situs: www.ir-bri.com.

BRI juga mengadakan sejumlah kegiatan komunikasi dengan para investor pasar modal dengan rincian sebagai berikut.

a. *Analyst Briefing*

Dalam rangka memenuhi peraturan dan meningkatkan komunikasi yang efektif, BRI menyelenggarakan RUPS, *public expose* dan *analyst meeting*, menerima *company visit*, *field visit*, *conference call*, menerbitkan laporan tahunan dan *investor newsletter*, mengkinikan informasi pada *investor relation website* serta mengikuti *investor conference* dan *non-deal roadshow* baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Asia, Eropa dan Amerika).

Kegiatan Komunikasi dengan investor, 2013		
No	Kegiatan	Jumlah
1	<i>Company Visit</i>	171
2	<i>Conference Call</i>	46
3	<i>Field Visit</i>	41
4	<i>Analyst Meeting</i>	4
5	<i>Roadshow/Conference (DN)</i>	4
6	<i>Roadshow/Conference (LN)</i>	6
7	<i>Investor Newsletters</i>	1
8	<i>Public Expose</i>	1
Total		274

Selain itu, Pemegang saham dan masyarakat umum juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan Perseroan melalui situs: www.ir-bri.com dan www.bri.co.id

Sekretariat Perusahaan

b. Transparansi kondisi keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkapkan dalam laporan lainnya

No	Jenis Laporan	Disampaikan Kepada	Tanggal
1.	Laporan Tahunan (Annual Report) BRI 2012	Pemegang Saham	28 Februari 2013
		Bank Indonesia	16 Mei 2013
		Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)	17 April 2013
		Fitch Rating	03 Mei 2013
		Pefindo	17 April 2013
		PT ICRA Indonesia	17 April 2013
		Perbanas	17 April 2013
		Asosiasi Bank Pembangunan Daerah	17 April 2013
		Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	03 Mei 2013
		INDEF	03 Mei 2013
		Pusat Penelitian Ekonomi LIPI	03 Mei 2013
		Ikatan Bankir Indonesia	03 Mei 2013
		Majalah Investor	17 April 2013
Majalah Info Bank	17 April 2013		
2.	Neraca Publikasi BRI Triwulan IV Tahun 2012	Kompas, Surat Kabar Kontan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Media Indonesia	01 Februari 2013
3.	Neraca Publikasi BRI Triwulan I Tahun 2013	Surat Kabar Kontan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Media Indonesia	25 April 2013
4.	Neraca Publikasi BRI Triwulan II Tahun 2013	Surat Kabar Kontan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Media Indonesia	31 Juli 2013
5.	Neraca Publikasi BRI Triwulan III Tahun 2013	Surat Kabar Kontan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Media Indonesia	24 Oktober 2013

Pelaksanaan Kegiatan Biro Direksi dan Dewan Komisaris

Sekretariat Perusahaan BRI juga memiliki fungsi sebagai *office of the board* untuk memastikan ketersediaan informasi dan memastikan pencapaian kuorum dalam pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab mengkinikan informasi tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi serta menyampaikan informasi *corporate action* kepada regulator yang berkepentingan.

Dalam rangka menjalankan fungsi kepatuhan, Sekretariat Perusahaan menjalankan fungsi *government relations* yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara *goodwill* perusahaan dimata regulator.

Komunikasi dengan Investor

Salah satu kegiatan Sekretariat Perusahaan yang memiliki fungsi memastikan penyampaian informasi material kepada pemegang saham adalah penyelenggaraan RUPS dan penyusunan Laporan Tahunan, dimana salah satu agenda RUPS

tersebut adalah penyampaian pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas kepengurusan Perseroan kepada pemegang saham dan investor.

Investor merupakan stakeholders strategis yang keputusannya sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ketepatan waktu informasi yang diterimanya. Informasi pada waktu yang tidak tepat dapat menguntungkan sebagian pihak secara tidak wajar dan bertentangan dengan hukum karena memungkinkan terjadinya *self dealing, insider trading*, penyesatan informasi dengan sengaja, ataupun perbuatan tidak etis lainnya.

Sekretariat Perusahaan senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan komunitas pasar modal, khususnya para investor dan *analyst*. Materi komunikasi yang disampaikan secara langsung kepada investor maupun melalui *analyst* merupakan salah satu informasi penting yang mendasari pengambilan keputusan investasi. Untuk menjalin komunikasi yang intensif dan efektif dengan para investor, BRI menyelenggarakan

berbagai kegiatan yang melibatkan investor dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Perusahaan sebagaimana diringkaskan pada tabel ringkasan kegiatan komunikasi dengan investor tersebut diatas.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Bank BRI senantiasa menyediakan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui *website* www.bri.co.id sebagai salah satu sarana untuk memberikan kemudahan akses informasi mengenai informasi perusahaan bagi *stakeholders*. *Website* tersebut berisi berbagai informasi mencakup produk dan pelayanan BRI, informasi finansial perusahaan, info-info mengenai Karir serta semua info mengenai Bank BRI. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Call BRI 14017 atau (62-21) 57-987-400. Bagi investor dapat langsung menghubungi Sekretariat Perusahaan/Hubungan Investor Perusahaan dengan mengirim email ke: ir@bri.co.id atau telepon ke (62-21) 5751969.

Fungsi Kepatuhan

BRI melaksanakan fungsi Kepatuhan dengan mengacu pada PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh jajaran kepatuhan yang terdiri dari Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan. Direktur Kepatuhan selama tahun 2012 adalah Randi Anto yang menjabat sejak 12 Juli 2011, sedangkan Kepala Divisi Kepatuhan dijabat oleh M Jarot Eko Winarno. Baik Direktur Kepatuhan maupun Kepala Divisi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Piagam Kepatuhan

Piagam kepatuhan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.223-DIR/DKP/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Piagam kepatuhan BRI yang memuat panduan fungsi Kepatuhan yang meliputi independensi, kewenangan, kedudukan serta tugas dan tanggung jawab jajaran kepatuhan

Selain itu, BRI telah melengkapi kebijakan kepatuhan lainnya untuk dapat memperkuat fungsi kepatuhan di BRI, antara lain : Kebijakan penerapan budaya kepatuhan, pengujian prinsip kehati-hatian serta kebijakan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)

Satuan kerja kepatuhan

Satuan kerja kepatuhan merupakan unit kerja independen yang membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dalam hal ini adalah Divisi Kepatuhan, terdiri dari 3 Bagian yaitu Bagian kepatuhan bidang perkreditan, Bagian kepatuhan bidang non perkreditan dan Bagian kepatuhan bidang Prinsip Mengenal Nasabah.

Independensi Jajaran Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan dilaksanakan mengacu pada PBI No. 13/2/PBI/2010 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh jajaran kepatuhan yang terdiri dari Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan. Baik Direktur Kepatuhan maupun Kepala Divisi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tugas Dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia bahwa Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BRI.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BRI.

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BRI telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan BRI terhadap komitmen yang dibuat oleh BRI kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang benvenang

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

a. Budaya kepatuhan

Seluruh pekerja BRI bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan. Pada tahun 2013 sebagai lanjutan program di akhir tahun 2012 telah dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh unit kerja BRI yang bertujuan untuk memperkuat Budaya Kepatuhan di BRI. Selain itu, bagi pembekalan dan internalisasi kepatuhan untuk program pengembangan staff BRI dilakukan melalui metode *in class training*.

b. Pemantauan risiko kepatuhan

Terkait dengan pelaksanaan tugas ini, jajaran Kepatuhan berkoordinasi dengan jajaran Manajemen Risiko melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Efektivitas pengelolaan risiko kepatuhan ditampilkan dalam Laporan Profil Risiko Kepatuhan yang disusun secara bulanan.

c. Pemantauan Prinsip kehati-hatian bank

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan BRI terhadap kebijakan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Kegiatan tersebut terdiri dari:

1. Pelaksanaan pengujian prinsip kehati-hatian Pengujian prinsip kehati-hatian dilakukan atas *final draft* rencana kebijakan dan atau keputusan yang akan ditetapkan oleh Direksi BRI baik di bidang perkreditan maupun non perkreditan. Hasil pengujian selama tahun 2012 menunjukkan bahwa pada umumnya rencana kebijakan dan atau keputusan Direksi yang dimintakan pengujian telah memenuhi prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam peraturan eksternal dan peraturan internal yang berlaku.
2. Monitoring hasil pengujian Merupakan kelanjutan dari kegiatan pengujian di atas, kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kembali tidak terdapat adanya penyimpangan dalam tindak lanjut rencana kebijakan dan atau keputusan yang telah dinyatakan memenuhi prinsip kehati-hatian (*comply*).

Fungsi Kepatuhan

3. Kajian kebijakan internal
Dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan berlaku di internal BRI masih memenuhi ketentuan prinsip kehati-hatian.
4. Resume Kebijakan Eksternal
Baik resume maupun penerusan kebijakan eksternal dilakukan terhadap kebijakan baru maupun perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan sehingga kebijakan eksternal dimaksud dapat segera dijadikan acuan oleh unit kerja terkait dalam bidang tugasnya.
5. Analisa Dampak/*Gap Analysis* Kebijakan Eksternal
Dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketentuan eksternal yang berlaku terhadap kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini sekaligus memastikan bahwa kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini telah sesuai dengan ketentuan eksternal.

Jenis Kegiatan	2012		2013	
	Perkreditan	Non Perkreditan	Perkreditan	Non Perkreditan
Pengujian prinsip kehati-hatian	321	133	331	181
Monitoring	300	80	280	116
Tanggapan Kebijakan	11	37	8	49
Review Kebijakan Internal	25	18	17	13
Resume & Penerusan Kebijakan Eksternal	39	33	38	55
Analisa Dampak Kebijakan Eksternal	18	12	15	15

d. Pemantauan komitmen Bank dengan otoritas berwenang

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan BRI terhadap pemenuhan komitmen yang dimilikinya kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Bentuk komitmen tersebut dapat berasal dari hasil audit maupun surat bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lainnya. Hasil dari pemantauan terhadap pemenuhan komitmen dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan BI secara berkala.

e. Penyempurnaan sistem, infrastruktur dan kebijakan kepatuhan

Dalam memastikan efektivitas dari standar prosedur kepatuhan yang telah berjalan saat ini, jajaran kepatuhan senantiasa melakukan evaluasi dan apabila diperlukan akan menyempurnakan *compliance toolkit* yang dimiliki. Selama tahun 2013 telah dilakukan pembuatan dan/atau revisi terhadap *compliance checklist* pengujian Rencana kebijakan dan/atau putusan Direksi berupa produk dan aktivitas baru, surat berharga/obligasi, *counter guarantee*, *uncommitted credit line*, kredit konsumen KKB Kerjasama, dan kredit konsumen Individu.

Selain itu pengembangan dan penyempurnaan *Dashboard* Kepatuhan terus berjalan. *Dashboard* Kepatuhan merupakan *tools* yang dikembangkan oleh BRI dengan tujuan untuk memantau pemenuhan BRI terhadap ketentuan regulator dan memberikan *alert* bagi pejabat terkait dalam mengambil keputusan dan atau kebijakan. Hal-hal yang dapat dipantau dalam *tools* ini antara lain Dana pihak ketiga; Derivatif; Denda SID dan LBU; NPL; CAR; Portofolio Kredit Korporasi, Menengah, Ritel, Mikro; dll.

Pelaksanaan APU-PPT

Kegiatan terkait Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan terorisme (PPT) yang dilakukan selama tahun 2012, antara lain:

1. Review Kebijakan dan Prosedur serta Buku Pedoman Operasional (BPO) Penerapan Program APU dan PPT disesuaikan dengan ketentuan PBI No. 14/27/PBI tanggal 28 Desember 2012 dan SE BI No: 15/21/DPNP/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program APU dan PPT bagi Bank Umum.
2. Secara berkesinambungan melaksanakan sosialisasi Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT:
 - a. Sosialisasi *On site*:
 - i. Pemantauan penerapan Kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT di Unit Kerja BRI dilaksanakan dengan metode *sampling* pada 13 Kantor Wilayah BRI, 39 Kantor Cabang, 26 Kantor Cabang Pembantu BRI, 50 BRI Unit dan 4 Sentra Layanan Prioritas BRI. hasil monitoring telah disampaikan kepada masing-masing Kantor Wilayah BRI *sampling* untuk mendapatkan tindaklanjut dari Unit Kerja BRI yang telah dijadikan sebagai *sampling*.

Fungsi Kepatuhan

- ii. Pelatihan khusus materi penerapan program APU dan PPT kepada instruktur di Pusdiklat dan Sendik BRI.
 - iii. Mengadakan training/pelatihan langsung kepada pekerja BRI dan selanjutnya pekerja yang telah menerima pelatihan diminta untuk melakukan TOT (*Training of Trainers*) kepada seluruh jajaran pekerja di masing-masing Unit kerja kemudian menyampaikan Berita Acara TOT.
 - iv. Pemberian materi APU dan PPT kepada setiap pekerja baru yang dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan prinsip pengenalan terhadap nasabah yaitu antara lain: Frontliner (Customer Service dan Teller), FO (Funding Officer), AO (Account Officer), dll.
- b. Sosialisasi *Off Site*:
- i. Penyampaian materi program APU dan PPT melalui modul *e-learning*, sehingga memungkinkan pekerja dapat melakukan pelatihan Penerapan program APU dan PPT secara mandiri.
 - ii. Untuk meningkatkan *awareness* dan memastikan penerapan Kebijakan Program APU dan PPT di Unit Kerja BRI selindo (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Sentra Layanan Prioritas dan Unit BRI) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dilakukan penilaian Penerapan Program APU dan PPT kepada Unit Kerja BRI selindo dengan metode *Self Assessment*.
 - iii. Penyampaian *action plan* Penerapan program APU dan PPT kepada Bank Indonesia serta melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Unit Kerja terkait untuk memenuhi target *action plan* tersebut.
 - iv. Menyampaikan rencana pengkinian data nasabah dan realisasi pengkinian data nasabah baik untuk nasabah BRI maupun nasabah *Cross Border Correspondent Banking* (CBCB).
 - v. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)/*Cash Transaction Report* (CTR) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/*Suspicious Transaction Report* (STR) serta melakukan pengembangan aplikasi Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)/ *International Funds Transfer Instructions* (IFTI).
 - vi. Menindaklanjuti permintaan informasi/data dan permintaan pemblokiran/pembukaan pemblokiran rekening dari pihak eksternal, antara lain Bank Indonesia, PPATK, KPK RI, BNN RI, Kepolisian dan Dirjen Pajak.

Tingkat Kepatuhan Bank Terhadap Seluruh Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pengukuran tingkat kepatuhan bank dilakukan berdasarkan hasil penilaian profil risiko kepatuhan bank pada tahun 2013, dengan skor nilai 2 (*low to moderate*).

USA Patriot ACT

Untuk memenuhi peraturan "*Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Act of 2001*" (the "USA PATRIOT Act") yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat guna mencegah pencucian uang dan pendanaan para teroris melalui rekening koresponden bank-bank asing yang ada dilembaga-lembaga keuangan Amerika, maka lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat mensyaratkan kepada semua bank asing yang telah mempunyai atau berniat untuk mempunyai rekening koresponden di AS untuk mengisi formulir sertifikat yang standar. Dalam rangka memenuhi persyaratan USA Patriot Act tersebut, BRI telah melengkapi sertifikat mengenai rekening koresponden bank asing dan dapat dilihat pada alamat website BRI www.bri.co.id. Sertifikasi ini berlaku untuk semua rekening-rekening yang dibuka untuk BRI oleh "*Covered Financial Institutions*."

Evaluasi Efektifitas Fungsi Kepatuhan

Laporan fungsi Kepatuhan sebagai salah satu media informasi bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan Kepatuhan BRI. Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan BRI dengan menyampaikan rekomendasi kepada Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali.

Upaya Peningkatan Kualitas Fungsi Kepatuhan Bank

Untuk meningkatkan fungsi Kepatuhan Bank BRI ke depan dan mensosialisasikan budaya Kepatuhan di seluruh level organisasi Bank BRI, Perseroan akan melakukan penyempurnaan dan melengkapi sistem dan kebijakan terkait fungsi Kepatuhan, serta secara intensif melaksanakan sosialisasi pentingnya budaya Kepatuhan.

Keikutsertaan dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) Bank BRI dalam FKDP dapat digunakan untuk menjalin komunikasi dengan fungsi Kepatuhan Bank lain melalui beberapa kegiatan antara lain seminar, *workshop*, dan pelatihan maupun kegiatan lainnya yang dapat mendorong penguatan fungsi Kepatuhan di Bank BRI.

Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko diterapkan secara konsisten dalam setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional perbankan sehari-hari. Pengelolaan risiko yang konsisten merupakan faktor penting, yang akan mempengaruhi keberhasilan BRI dalam mencapai target kinerja secara optimal sesuai yang telah ditetapkan, yaitu menjadi bank yang sehat dan bertumbuh secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko dilakukan secara terpadu (*enterprise-wide risk management*) yang meliputi pengelolaan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sesuai peraturan BI, BRI menerapkan konsep *three lines of defense*. *First line of defense* adalah unit kerja bisnis/operasional dengan aktivitas transaksi sesuai kebijakan, limit, dan pedoman operasional (BPO) yang berlaku di bidangnya. *Second line of defense* adalah unit kerja manajemen risiko yang memantau pemenuhan manajemen risiko BRI sesuai toleransi risiko dan menetapkan kebijakan, pedoman dan limit risiko unit kerja bisnis/operasional secara independen. Disamping itu, Divisi Manajemen Risiko menjalankan program-program untuk meningkatkan kesadaran Unit Kerja Operasional sehingga dapat berfungsi sebagai *first line of defense*, yaitu melalui sosialisasi aplikasi OPRA yang didalamnya terdapat edukasi mengenai proses manajemen risiko dan melaksanakan pembekalan kepada pemimpin unit kerja dalam bidang manajemen risiko.

Third line of defense adalah unit internal audit yang berfungsi memastikan pengendalian internal yang dilakukan *first* dan *second line of defense* telah memadai serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.

Uraian lengkap Manajemen Risiko dapat dilihat pada Sub Bab "Manajemen Risiko" pada bab "Tinjauan Operasional" (kata pengantar untuk merujuk ke Sub-Bab Manajemen Risiko)

Sistem Pengendalian Internal

Dasar Acuan

Dalam rangka menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh secara efektif, BRI mengacu pada ketentuan Bank Indonesia antara lain :

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan PBI No 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan SEBI No 13/23/2011 tanggal 28 Oktober 2011
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BRI menerapkan kegiatan pengendalian internal dengan mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional, yakni COSO ERM *framework* (*Internal Environment, Objective Setting, Event Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, Information & Communication and Monitoring*).

Upaya tersebut dilakukan agar BRI mendapatkan keyakinan yang memadai dalam menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Tujuan penerapan SPI di BRI mencakup:

1. Mendapatkan kepastian dipatuhinya seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan operasional. Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan intern yang ditetapkan Bank.
2. Memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu. Terutama informasi-informasi relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan.
3. Mendapatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank, diantaranya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan asset dan sumber daya lainnya serta dalam melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko pada seluruh jajaran organisasi secara menyeluruh, terutama dalam mengidentifikasi kelemahan dan mendeteksi penyimpangan secara dini serta menilai kewajaran kebijakan dan memperbaiki seluruh prosedur kerja yang relevan.
5. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

BRI menerapkan kerangka pengendalian intern berstandar internasional COSO ERM untuk menjamin efektivitas pengendalian operasional maupun finansial.

Pelaksanaan Pengawasan Intern (Internal Control and Audit)

Audit Intern melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional. Audit Intern membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk

Sistim Pengendalian Internal

mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance*.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

BRI melakukan evaluasi efektifitas penerapan SPI secara berkesinambungan. Pemantauan dan mitigasi terhadap risiko utama kegiatan perbankan senantiasa menjadi prioritas dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan SPI sehari-hari, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun oleh Unit Internal Audit. BRI juga melakukan evaluasi dan pemantauan atas kecukupan sistem pengendalian intern secara terus menerus karena terjadinya perubahan kondisi intern dan ekstern sehubungan dengan ekspansi usaha yang terus berjalan serta berupaya meningkatkan kapasitas SPI untuk meningkatkan efektifitasnya.

Pada dasarnya evaluasi efektifitas penerapan sistim pengendalian intern dilaksanakan berdasarkan pada aktivitas fungsional dan proses bisnis utama yang dilakukan terhadap beberapa komponen pengendalian yang saling berkaitan, mencakup:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Identifikasi, penilaian dan mitigasi Risiko
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi,
4. Sistem Informasi, akuntansi dan komunikasi, dan
5. Kegiatan pemantauan serta tindakan koreksi atas penyimpangan/kelemahan.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar evaluasi Manajemen BRI terhadap implementasi efektifitas sistem pengendalian internal untuk menentukan tahapan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan pengendalian yang memungkinkan Manajemen meningkatkan efektifitas kegiatan operasional sekaligus meminimalisir kejadian risiko yang merugikan Perusahaan.

Pemantaan maupun evaluasi tersebut dalam operasionalnya dijabarkan lebih lanjut kedalam berbagai kebijakan baru berupa Pedoman, Petunjuk Operasional maupun Instruksi Kerja. Sesuai dengan hasil penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite-Komite, Satuan Kerja Audit dan beberapa

divisi terkait, diperoleh kesimpulan bahwa BRI telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai.

Untuk merespon pertumbuhan bisnis Bank BRI yang semakin cepat dan kompleks, Audit Intern melakukan pengembangan terhadap struktur organisasinya melalui pembentukan fungsi audit di Kantor Cabang dan BRI Unit yang disebut dengan *Resident Auditor*. Fungsi *Resident Auditor* melaksanakan kegiatan monitoring berkaia secara berkesinambungan sehingga peningkatan sinyal-sinyal risiko di unit kerja dapat dideteksi secara lebih dini.

Kemudian dalam rangka meminimalkan risiko fraud, Bank BRI membentuk unit kerja Spesial Investigasi yang bertanggungjawab untuk melakukan analisa *red flags* (ketidakwajaran), analisa indikator-indikator risiko *fraud* secara berkaia serta melaksanakan kegiatan investigasi atas indikasi *fraud*.

Audit Intern

Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern di BRI dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki akses komunikasi langsung (*communication line*) kepada Komite Audit untuk berkoordinasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil audit. Peran Audit Intern sangat strategis dalam membantu Perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis, teratur dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance*.

Dasar Acuan

Implementasi fungsi audit intern BRI mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No: KEP- 496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern;
2. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB);
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan PBI No 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009
4. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan SEBI No 13/23/2011 tanggal 28 Oktober 2011

5. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum
6. Peraturan Bank Indonesia No.9/30/DPNP Tanggal 12 Desember 2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;

Serta ketentuan eksternal lainnya yang terkait.

Selain itu referensi dan/atau *best practice* yang menjadi acuan antara lain:

1. The Internal Audit Function In Bank - Basel Committee On Banking Supervision;
2. International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing of Internal Auditing (Standards);
3. Practice Advisories Under International Professional Practice Framework (IPPF);
4. Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern Indonesia. 2004. Standar Profesi Audit Intern. Jakarta. Yayasan Pendidikan Internal Audit;

Piagam Audit Intern BRI

Audit Intern memiliki Piagam Audit Intern yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nokep.S.53-DIR/AIN/07/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Piagam Audit Intern serta Kebijakan dan Prosedur Audit Intern PT BRI dan diperbaharui dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nokep.B.802-DIR/AIN/11/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Piagam Audit Intern PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Piagam audit intern dibentuk guna memberikan gambaran dan pedoman mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan audit intern dalam organisasi.

Piagam Audit Intern terdiri dari aspek-aspek yang berkaitan dengan visi, misi, atribut, kode etik auditor, kedudukan, peran, fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup audit, independensi, objektivitas, persyaratan profesional, komunikasi & pelaporan, dan pelaksanaan fungsi audit intern oleh pihak eksternal (*outsourcing*), *quality assurance and improvement* program, dan kebijakan & prosedur yang digunakan oleh Auditor sebagai acuan dalam menjalankan fungsinya.

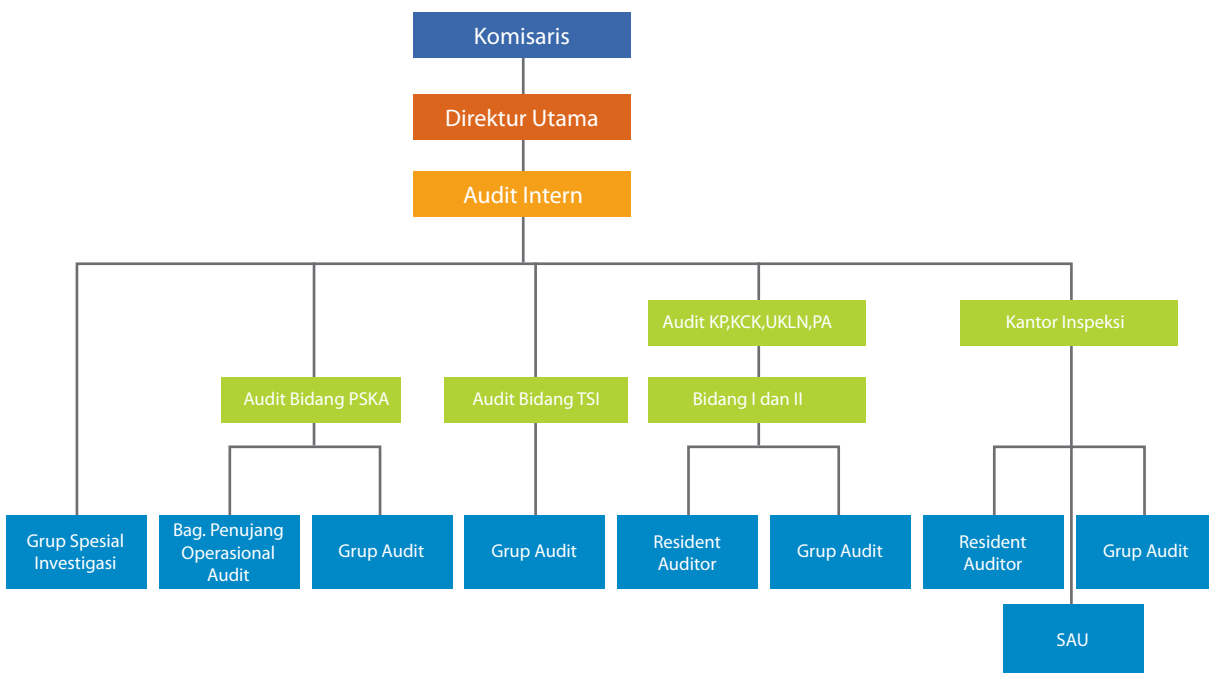
Audit Intern

Struktur Organisasi Dan Kedudukan

Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Audit Intern diatur dalam:

1. SK Struktur Organisasi Audit Intern BRI Nokep. S.129-DIR/REN/08/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Organisasi Audit Intern PT. BRI.
2. Piagam Audit Intern BRI No.S 53-DIR/AIN/07/2008 tanggal 28 Juli 2008.



Audit Intern BRI secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit, Audit Intern melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional. Audit Intern membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance*.

Kedudukan

Audit Intern BRI secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Namun, dalam kegiatan operasional, Direktur Kepatuhan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional Audit Intern BRI sesuai kewenangannya, dan memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit (Dewan Komisaris) sehingga Kepala Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Komite Audit untuk melaporkan/menginformasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan audit.

Audit Intern BRI secara struktural terdiri atas Unit Kerja Audit Bidang *Delivery* dan Unit Kerja Audit Bidang *Support* dengan rincian sebagai berikut:

1. Fungsi *Delivery* Audit mencakup :
 - a. Fungsi Audit TSI
Fungsi Audit TSI memiliki ruang lingkup audit yang terdiri atas unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penggunaan TSI meliputi proses pengembangan dan operasional aplikasi *Core Banking* dan *Non Core*, operasional infrastruktur TSI pada DC, DRC dan seluruh Unit Kerja, pengamanan informasi, aplikasi, infrastruktur TSI, strategi, kebijakan, manajemen resiko dan penunjang, dan sebagainya.
 - b. Fungsi Audit KP/KCK/UKLN dan PA
Fungsi Audit KP/KCK/UKLN dan PA memiliki ruang lingkup audit yang terdiri atas Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, Unit Kerja Luar Negeri, dan Perusahaan Anak.

Audit Intern

- c. Fungsi Audit Kantor Inspeksi Fungsi Audit Kanins memiliki ruang lingkup audit yang terdiri atas Kanwil, Kanca, KCP, KK, dan BRI Unit.
- d. Fungsi Audit Investigasi.

Fungsi Audit Investigasi secara khusus melakukan investigasi dengan ruang lingkup audit yang tidak terbatas.

2. Fungsi *Support* yaitu Audit Bidang PSKA Melaksanakan pengkajian organisasi Audit Intern, pengembangan kebijakan, prosedur dan sarana penunjang audit, pengembangan kualitas audit serta perancangan *software* maupun *hardware* sesuai ketentuan dan *best practices* Audit Intern.

Untuk mendukung fungsinya Audit Intern Bank BRI memiliki 19 Unit Kerja Audit Bidang *Delivery* (unit kerja yang melaksanakan kegiatan audit) yang tersebar di seluruh Indonesia yang bertugas untuk mengawasi setiap Kantor Wilayah beserta Unit Kerja Operasionalnya.

Ketua Audit Intern Dan Pengangkatan Ketua Audit Intern

Audit Intern ini dipimpin oleh Kepala Audit Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Hal ini diatur dalam PBI No 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Selain itu diatur pula pada

Piagam Audit Intern BRI dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nokep.B.802-DIR/AIN/11/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Piagam Audit Intern PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang menegaskan bahwa Kepala Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Bank Indonesia dan OJK.

Hingga akhir tahun 2013, Kepala Audit Intern dijabat oleh Sdr. Ali Mudin. Profil lengkap ketua audit intern dapat dilihat pada uraian "Data Perusahaan".

Sumber Daya Manusia dan Kualifikasi Audit Internal

Audit Intern terus berupaya untuk memenuhi / menyediakan auditor yang berkualitas, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan, rentang kendali, dan tingkat risiko di masing-masing wilayah kerja audit.

Satuan Kerja Audit Intern terus berupaya untuk memenuhi/ menyediakan auditor yang berkualitas, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan, rentang kendali, dan tingkat risiko di masing-masing wilayah kerja audit. Sampai dengan 31 Desember 2013 posisi SDM Audit Intern terdiri atas 1 Kepala Audit Intern, 17 Inspektur, 22 Wakil Inspektur, 1 Kepala Bidang, 69 Grup Head, 1 Kepala Bagian, 439 Auditor (meliputi Senior Auditor, Auditor, Junior Auditor, dan Associate Auditor). Audit Intern juga memiliki 362 Resident Auditor Kantor Cabang, dan 1139 Resident Auditor Unit

Audit Intern BRI didukung **17 Kantor Inspeksi** yang tersebar di seluruh Indonesia dan berperan sebagai *strategic business partner* untuk setiap Kantor Wilayah beserta unit kerja operasionalnya

Audit Intern

Jabatan	31 Desember 2013
Kepala Audit Intern	1
Wakil Kepala Audit Intern	1
Inspektur	17
Wakil Inspektur	22
Group Head	69
Kepala Bagian	1
Subtotal	111
Senior Auditor	15
Auditor	43
Junior Auditor	88
Associate Auditor	293
Subtotal	439
Total	550
Resident Auditor Kantor Cabang	362
Resident Auditor Unit	1.139
Total	2.051

Sertifikasi Profesi Audit Intern

Untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang berkualitas, Audit Intern BRI didukung tenaga audit profesional yang sebagian telah bersertifikat nasional maupun internasional sebagai berikut:

Data Sertifikasi Pekerja Jajaran Audit Intern BRI	
Sertifikasi	Jumlah Pekerja
CFE (Certified Fraud Examiner)	8
QIA (Qualified Internal Auditor)	18
CISA (Certified Information System Auditor)	3
CEH (Certified Ethical Hacker)	1
CDCP (Certified Data Center Professional)	1
CFSS (Certified Forensic Security Specialist)	1
CRMA (Certified Risk Management Assurance)	1
CICA (Certified Internal Control Auditor)	1
Tata Kelola IT dari MTI UI	1
Jumlah	35

Posisi Desember 2013

Audit Intern

Sertifikasi	Jumlah Pekerja
Certified Fraud Examiner	8
Qualified Internal Auditor	18
Certified Information System Auditor	3
Certified Ethical Hacker	1
Certified Data Center Professional	1
Certified Forensic Security Specialist	1
Tata Kelola IT	1
Total	33

Sementara itu, kualifikasi pendidikan formal berdasarkan level jabatan adalah sebagai berikut:

Jabatan	S3	S2	S1	D3/D2/D1	SMA/SLTA	-
KAI	-	1	-	-	-	-
Inspektur	1	11	5	-	-	-
Walns	-	14	9	-	-	-
Kabid	-	1	-	-	-	-
GH/Kabag	-	45	36	-	-	-
Auditor	-	23	614	6	1	59
RA Kanca	-	18	574	35	57	1
RA Unit	-	12	532	60	169	1
Total	1	125	1770	101	227	61

Pendidikan Formal	Jabatan						Jumlah
	KAI/ Inspektur	Kabid/ Ka Audit/ Wains	Kabag/ GH	Auditor	Resident Auditor	Support Admin	
Strata 3	1	-	-	-	-	-	1
Strata 2	11	16	30	13	23	2	95
Strata 1	5	8	22	525	769	23	1352
Diploma (D3)	-	-	-	9	62	3	74
SLTA/Setingkat	-	-	-	-	120	14	134
Jumlah	17	24	52	547	974	42	1656

Level Auditor	Core Competencies Level General Auditor		Core Competencies Level Auditor IT	
	General Auditing	Risk Management	General & IT Auditing	IT Risk Management
Group Head	4	4	4	4
Senior Auditor	4	4	4	4
Auditor	3	4	3	4
Junior Auditor	3	3	3	3
Associate Auditor	3	2	-	-
Senior Resident Auditor	3	3	-	-
Resident Auditor	3	3	-	-
Resident Auditor Unit	3	3	-	-
Level Penguasaan Hard Competency:				
a. Level C1: Pengetahuan (Knowledge)				
b. Level C2: Pemahaman (Comprehension)				
c. Level C3: Penerapan (Application)				
d. Level C4: Analisis (Analysis)				
e. Level C5: Sintesis (Synthesis)				
f. Level C6: Evaluasi (Evaluation)				

Audit Intern

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Kepala Audit Intern

1. Kepala Audit Intern mengelola fungsi Audit Intern secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi BRI.
2. Kepala Audit Intern bertanggung jawab untuk merencanakan audit, mengarahkan kegiatan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit dan mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari BRI akan dapat dicapai secara optimal.
3. Kepala Audit Intern mempertanggungjawabkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur Utama

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern

Tugas dan tanggung jawab Audit Intern BRI sebagaimana diatur di dalam Piagam Audit Intern mencakup:

1. Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Audit Intern harus menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama.
7. Meyakinkan kualitas pelaksanaan tugas manajemen lini atas proses manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola usaha telah dilaksanakan secara cukup dan efektif.
8. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bank BRI untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan bisnis BRI dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan para *stakeholders*.
9. Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal dan eksternal secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
10. Menjaga hubungan baik dengan *Auditee*, Eksternal Auditor dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja Audit Intern.

Metodologi Audit

BRI menerapkan metodologi *risk based internal audit* (RBIA) dengan pendekatan proses bisnis yang diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara korporat. Dengan metodologi tersebut, maka proses bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan lebih diprioritaskan untuk diaudit, sehingga dapat diyakini bahwa seluruh potensi risiko dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan *risk based audit* serta untuk meningkatkan

peran audit sebagai *Strategic Business Partner* (SBP), dalam proses analisa data didukung dengan penggunaan Computer Assisted Audit Technique (CAATs).

Evaluasi Audit

Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan audit, dilakukan penilaian kualitas (*quality assurance*) oleh pihak internal melalui internal *quality assurance review* maupun eksternal. Penilaian kualitas oleh pihak eksternal dilakukan oleh PT. SGS Indonesia melalui *surveillance* ISO 9001. Hasil *surveillance* ISO 9001:2008 visit 2/2012 oleh PT SGS Indonesia tidak ada temuan major maupun minor.

Efektivitas pelaksanaan kerja dan kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dievaluasi oleh Auditor Ekstern (pada tahun 2011 kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh PriceWaterHouseCoopers), hasilnya menunjukkan bahwa fungsi Audit Intern BRI telah mampu menjalankan peranannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mendapatkan predikat *good practices*.

Uraian Pelaksanaan Tugas Audit

Tugas dan tanggung jawab Audit Intern BRI yaitu melaksanakan audit di semua manajemen lini BRI. Hal ini tertuang dalam ruang lingkup kegiatan audit yang terdapat dalam Perencanaan Audit Tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang terdiri atas kegiatan Reguler Audit yang dilakukan kepada semua Manajemen Lini, serta *Special Audit*, *Surprise Audit*, dan *Mandatory Audit*. Penetapan ruang lingkup audit adalah berdasarkan pada hasil *assessment* atas risiko.

Audit Intern

Audit Intern secara rutin melakukan pemantauan atas pelaksanaan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern yang ada sesuai target waktu yang telah disepakati, dan memberikan opini atas kecukupan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan oleh manajemen. Opini Audit Intern atas pelaksanaan komitmen manajemen berupa surat pernyataan MEMADAI atau TIDAK MEMADAI.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen atas 548 unit kerja yang diaudit sampai dengan selama Tahun 2013, sebagai berikut:

No	Hasil Monitoring Komitmen Manajemen 2013	Jumlah Uker	%
1	Memadai	287	52.37%
2	Tidak Memadai	4	0.73%
3	Masih dalam Proses Pemantauan	257	46.90%
TOTAL		548	100%

Untuk tahun 2013, BRI memprioritaskan pelaksanaan audit terhadap 3.463 unit kerja atau 62% dari total unit kerja BRI. Rencana tersebut didasarkan pada hasil penilaian risiko secara korporat, konsistensi dengan tujuan dan rencana strategis BRI, ketentuan regulator, arahan manajemen dan Komite Audit, *risk profile* serta hasil audit periode sebelumnya. Sampai dengan 31 Desember 2013, Audit Intern BRI telah melaksanakan kegiatan audit reguler pada 3.867 unit kerja atau mencapai 111,67% dari target penugasan audit dan telah melaksanakan penugasan audit khusus (*special audit*) sejumlah 813 kegiatan serta fraud audit sejumlah 6 kegiatan.

Koordinasi Dengan Eksternal Auditor

Pemeriksaan terhadap akurasi data keuangan dan operasional BRI dilakukan pula oleh eksternal auditor yakni Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor, Audit Intern berperan sebagai *liaison officer* untuk mengkoordinir kelancaran pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut perbaikan dari temuan eksternal auditor oleh unit kerja terkait.

Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan perbaikan atas kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh eksternal auditor.

No	Eksternal Auditor	Jumlah Temuan	Status Temuan	
			Selesai	Belum Selesai
1	Bank Indonesia (BI)	555	312	243
2	BPK RI	454	267	187
3	Kantor Akuntan Publik (KAP)	34	3	31

Peningkatan Kualitas Audit

Untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses audit, BRI menyusun rencana strategis untuk unit Audit Intern, meliputi:

1. Peningkatan Internal Bisnis Proses.

Upaya yang direncanakan untuk meningkatkan internal bisnis proses meliputi.

- Melakukan pengkinian Strategi Audit Intern BRI yang selaras dengan visi, misi dan strategi BRI serta tingkat kematangan implementasi proses manajemen risiko.
- Menyiapkan kajian secara berkesinambungan atas praktik-praktik Audit Intern sebagai bahan penyempurnaan PAI, baik melalui seminar, *benchmarking* dan sumber-sumber lainnya.
- Melakukan kajian terhadap Panduan Audit Intern/PAI (Kebijakan dan Prosedur) sesuai ketentuan dan *best practices*.
- Melakukan penyusunan dan penetapan Buku Pedoman Operasional untuk:
 - Unit Kerja Audit - Fungsi *Delivery*
 - Unit Kerja Audit - Fungsi *Non Delivery*.
- Melakukan penyusunan dan pengkinian Program Audit (*manual control* diluar proses bisnis IT) untuk memastikan tersedia pedoman teknis pelaksanaan audit sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.

Audit Intern

- f. Menyiapkan pengkinian parameter (*Key Risk Indicator*) unit *assessment* dan mengembangkan pola-pola pengawasan baru atau indikator data (transaksi) anomali untuk mendukung implemetasi *continuous auditing* melalui Pusat Data Elektronik/PDE.
- g. Melakukan *quality assurance review* (QAR) terhadap pelaksanaan audit di seluruh Unit Kerja Delivery untuk memberikan kepastian bahwa pekerjaan audit dan kegiatan organisasi lainnya sudah efektif, efisien serta sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Audit Intern dan BRI secara keseluruhan
- h. Melaksanakan *surveillance* ISO 9001:2008 visit 5 dan Resertifikasi ISO 9001 : 2008 periode ke-5 dari tahun 2014 s/d 2017
- i. Melakukan proses kompilasi penilaian survey kepuasan *customer/* pelanggan (CSS) dari *auditee* dan melaporkan hasilnya kepada seluruh UKA.
- j. Melaksanakan kajian kesesuaian fungsi Audit Intern BRI dengan SPFAIB dan *quality assurance review* (QAR)

2. Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi Audit

Dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi penerapan *Risk Based Audit*, dengan beberapa program yang direncanakan meliputi:

- a. Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Audit (BRISMA) yang mengintegrasikan seluruh proses audit mulai dari perencanaan audit tahunan (PAT), perencanaan audit individual, pelaksanaan audit individual, pelaporan dan dokumentasi. Pada aplikasi tersebut akan dilakukan
 - Evaluasi aplikasi audit manajemen sistem Brisma.
 - Menyusun pengembangan aplikasi BRISMA
 - Pengkinian data *reference* Brisma
 - Melaksanakan User Forum BRISMA
- b. Pengelolaan User dan Operasional Aplikasi Audit
- c. Melaksanakan Implementasi dan Sosialisasi Aplikasi AER (*Audit Intern Electronic Register*). Aplikasi ini menangani inventarisasi infrastruktur IT (*hardware*) yang ada di masing-masing kantor audit.
- d. Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi BrideX 2.0 sebagai *analytical tools* sehingga peningkatan indikator risiko dapat diidentifikasi.
- e. Pengembangan secara berkesinambungan Pusat Data Elektronik (PDE) tahap III untuk auditor. PDE menangani pengolahan data yang digunakan untuk audit secara terpusat. Hasil pengolahan data oleh PDE dapat diakses oleh

masing-masing auditor sesuai wilayah auditnya masing-masing. Bila auditor mempunyai data mentah yang perlu diolah lebih lanjut (pengolahan *adhoc*), auditor dapat memanfaatkan BrideX sebagai aplikasi *offline* yang menangani pengolahan data secara desentralisasi.

- f. Penyusunan *manual control* untuk proses bisnis Infrastruktur IT. Manual control merupakan panduan langkah-langkah minimal yang dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan audit.

3. Learning and Growth

Terkait dengan pengembangan kuantitas dan kualitas SDM Audit Intern, program yang akan dilakukan adalah:

- a. Pemenuhan SDM Audit Intern secara berkala sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan melalui berbagai strategi pemenuhan formasi.
- b. Peningkatan kompetensi auditor melalui *sustainable education* yang diharapkan dapat memberikan pembekalan secara proporsional kepada auditor dalam menjalankan tugas auditnya.
- c. Pengembangan karier SDM jajaran audit.

Auditor Ekstern dan Akuntan Perseroan

Pengawasan terhadap BRI dilaksanakan oleh auditor internal BRI dan juga auditor eksternal diantaranya oleh Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Penunjukan Akuntan Perseroan.

Sesuai keputusan RUPS tertanggal 28 Februari 2013, BRI berdasarkan surat Dewan Komisaris No B.101-KOM/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Penetapan KAP General Audit Laporan Keuangan BRI telah menunjuk KAP Purwantono, Suherman dan Surja - Ernst and Young (PSS-EY), salah satu dari 4 (empat) KAP berskala internasional (*The Big Four*) untuk melakukan audit atas laporan Keuangan BRI tahun buku 2013. Penunjukan ini merupakan periode ke-3 (tiga) dari KAP PSS-EY untuk melakukan audit laporan keuangan BRI, serta penunjukkan yang ke-3 (tiga) dari akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan BRI.

Penunjukan ini dilakukan setelah memperhatikan hasil evaluasi KAP yang dilakukan oleh manajemen dan rekomendasi oleh Komite Audit. Penunjukan KAP sebelumnya adalah untuk tahun buku 2012 dan 2011.

	Nama Instansi	Jumlah Periode audit
Kantor Akuntan Publik	KAP Purwantono, Suherman dan Surja (Ernst and Young Global) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 7 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta	3 tahun (2011-2013)

Penunjukan KAP tersebut telah berpedoman pada regulasi yang berlaku dan dipilih melalui tahapan proses seleksi dengan pelelangan terbatas/tender berdasarkan pemenuhannya terhadap kriteria:

1. Berpengalaman sebagai auditor perbankan
2. Memahami regulasi perbankan di Indonesia, perusahaan masuk bursa serta peraturan lainnya yang relevan.
3. Berpengalaman dan memahami sistem aplikasi dan teknologi perbankan.
4. Memahami produk perbankan.
5. Berpengalaman dan paham mengenai manajemen risiko.

Ketentuan internal lain yang dijadikan acuan adalah tidak melakukan penunjukan KAP yang sama untuk periode audit 5 (lima) tahun berturut-turut dan dengan *partner* yang sama selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Imbalan Jasa

Imbalan jasa yang diberikan BRI kepada KAP-PSS-EY adalah sebesar Rp5.550.000.000 (Lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan pajak lainnya yang terkait. Imbalan jasa tersebut sudah termasuk *out of pocket expenses* (OPE) dimana didalamnya termasuk biaya untuk kunjungan cabang yang berada di Indonesia serta kajian atas laporan keuangan cabang dan perwakilan luar negeri. Tidak terdapat jasa lain yang diberikan selain jasa *financial auditing*.

Penugasan telah dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku dan memenuhi aspek-aspek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana diubah dengan PBI No: 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan SE BI No: 3/32/DPNP/IDPnP tanggal 14 November 2001 tentang Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.

KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank dengan tepat waktu. Akuntan Publik juga telah bekerja secara independen dan memenuhi kriteria yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Kode Etik (Code Of Conduct)

BRI menjabarkan standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan BRI dalam bentuk Pedoman Kode Etik yang berlaku bagi seluruh insan BRI disetiap level organisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penerapan GCG.

Keberadaan Kode Etik Perusahaan

Kode etik (*Code of Conduct*) BRI menjabarkan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh pekerja BRI dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan BRI. Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh pekerja BRI.

Kebijakan Kode Etik BRI dibangun sejak tahun 2003, dan telah dilakukan revisi pada tahun 2010 serta dilakukan penyempurnaan pada tahun 2013 dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor 06-KOM/BRI/12/2013 tanggal 16 Desember 2013. Penerapan Kode Etik BRI diikuti dengan Ketentuan terkait gratifikasi serta mekanisme *Whistleblowing System* (WBS-BRI) yang dibangun sebagai media pelaporan pelanggaran kode etik serta kebijakan Peraturan Disiplin BRI yang mengatur jenis-jenis pelanggaran dan mekanisme penanganan pelanggaran.

Komitmen Kode Etik

Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh insan Bank di seluruh jenjang organisasi Bank. Penerapan kode etik Bank secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen, dan ketentuan mendukung terciptanya budaya perusahaan yang menjunjung tinggi moral dan integritas dalam melaksanakan tugas operasional.

Elemen Kode Etik BRI

Setiap insan BRI bertanggung jawab untuk mewujudkan Kode Etik BRI ke dalam setiap perilaku sehingga tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Bank karena tingkah laku insan BRI mencerminkan etika bisnis BRI. Elemen-elemen Kode Etik BRI terdiri dari:

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank

Bank berkomitmen patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam segala aktivitas bisnis Bank. Insan Bank menjunjung tinggi kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penguatan budaya kepatuhan Bank.

2. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

a. Etika terhadap nasabah Bank berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap Bank dengan menyediakan produk dan/atau jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Insan Bank menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dalam melakukan aktivitas pelayanan terhadap nasabah. Hal ini merupakan prinsip utama terhadap dedikasi insan Bank kepada nasabah dan untuk menjamin kesetiaan nasabah atas produk dan/atau jasa serta pelayanan Bank.

- b. Etika Terhadap Mitra Kerja Bank berkomitmen menjalankan hubungan dengan Mitra Kerja berdasarkan pada praktik-praktik usaha yang sah dan wajar, serta memberikan manfaat yang optimal bagi Bank dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Insan Bank menjunjung tinggi sikap profesionalisme dengan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.

Insan Bank memastikan Mitra Kerja tunduk pada kebijakan Bank dan peraturan perundangan yang berlaku serta setuju untuk menjaga setiap hubungan kerahasiaan dengan Bank, kecuali pengungkapan kerahasiaan tersebut telah diakui dan disetujui oleh Bank.

- c. Etika Terhadap Pesaing Bank berkomitmen berusaha mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) dalam menjalankan bisnis perbankan dengan berdasar pada prinsip kehati-hatian bank (*prudential Banking*) dan tetap menjaga profesionalisme serta persaingan yang sehat dan kompetitif.

Insan Bank menjunjung tinggi untuk mengedepankan prinsip persaingan yang sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja

- d. Etika terhadap Regulator Bank berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan maupun otoritas berwenang lainnya.

Insan Bank berkomitmen untuk membangun komunikasi yang baik dengan regulator perbankan maupun otoritas berwenang lainnya berdasarkan standar etika dan peraturan perundangan yang berlaku.

- e. Etika terhadap Pemegang Saham Bank berkomitmen untuk berupaya menghasilkan kontribusi positif dan optimal bagi para pemegang saham.

Insan Bank menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan laporan-laporan sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

3. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup

Bank berkomitmen menjunjung tinggi nilai – nilai masyarakat setempat (*local wisdom*) dan memberikan manfaat serta mendukung pelestarian lingkungan hidup dimana Bank menjalankan operasionalnya. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat merupakan kunci keberhasilan bagi Bank untuk dapat menjaga loyalitas nasabah dan juga meningkatkan kepercayaan nasabah.

Insan Bank memiliki komitmen menjadi warga yang baik di semua lingkungan di manapun mereka ditempatkan. Hal tersebut bertujuan agar bisnis Bank senantiasa dapat dijaga untuk terus berkembang dalam membantu usaha masyarakat.

4. Hubungan Perusahaan dengan Insan Bank

- a. Etika Perusahaan terhadap Pekerja Bank berkomitmen memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai visi dan misi Bank tanpa diskriminasi atas dasar kesetaraan dan saling percaya.

Insan Bank berpartisipasi aktif dalam pencapaian visi dan misi Bank dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja.

- b. Perilaku Etis Terhadap Sesama Pekerja Bank berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan mengatur etika berperilaku sesama pekerja.

Insan Bank menjunjung tinggi etika saling menjaga, menghargai dan menghormati satu sama lain.

5. Kerahasiaan Informasi Bank

- a. Perlindungan Informasi Nasabah Bank berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam rangka kelangsungan usaha Bank.

Kode Etik (Code Of Conduct)

Insan Bank menjunjung tinggi etika untuk wajib menjaga seluruh informasi terkait nasabah Bank terhadap pihak luar.

- b. Penggunaan Informasi Internal Bank.
Insan Bank menjunjung tinggi etika terkait penyampaian informasi internal yang ada di BRI yang hanya dapat disampaikan pada pihak-pihak berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku. Insan Bank diwajibkan untuk menjaga penyampaian informasi internal Bank

6. Integritas dan Akurasi Pelaporan Bank.

Bank berkomitmen untuk menghasilkan laporan Bank yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, pemegang saham, nasabah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Insan Bank bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan resmi mengenai kegiatan Bank secara akurat, jujur, lengkap, dan tepat waktu

7. Benturan Kepentingan

Bank berkomitmen untuk memiliki dan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang mengikat insan Bank dalam rangka mencegah adanya tindak pidana korupsi dan praktik kolusi serta nepotisme di lingkungan Bank.

Insan Bank dilarang menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan antara dirinya dengan Bank, nasabah Bank maupun pihak ketiga yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Insan Bank dalam mengambil keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu yang dapat secara sadar atau tidak sadar akan mempengaruhi pertimbangan terbaiknya bagi kepentingan Bank.

8. Kontribusi dan Aktivitas Politik

Bank berkomitmen untuk tidak memperkenankan dana, fasilitas dan sumber daya Bank untuk disumbangkan kepada dan atau digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan politik atau usaha sejenis lainnya.

Insan Bank menjunjung tinggi etika untuk tidak mengkontribusikan waktu, uang atau sumberdaya pribadinya bagi aktivitas politik.

9. Hadiah

Bank berkomitmen untuk tidak memperkenankan Insan Bank meminta atau menerima hadiah atau imbalan apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Insan Bank menjunjung tinggi etika untuk tidak meminta atau menerima hadiah atau imbalan apapun untuk memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.

Hadiah yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian dalam arti luas dari pihak ketiga maupun nasabah kepada pihak Insan Bank

Upaya Penegakan Kode Etik BRI

Upaya penerapan dan penegakkan kode etik BRI dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus menerus dalam bentuk sikap perbuatan, komitmen dan ketentuan, meliputi:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik BRI
Guna penerapan Kode Etik yang efektif, insan BRI diharuskan membaca dan memahami dengan baik dan benar serta setiap insan BRI diwajibkan menandatangani "pernyataan kepatuhan insan BRI terhadap kode etik",
2. Komitmen Manajemen Penegakan komitmen Manajemen BRI terkait komitmen Bank BRI untuk tidak menerima dan atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk dan dalih apapun dari pihak nasabah, debitur, dan mitra kerja maupun pihak ketiga lainnya dalam media massa dan *website* Bank BRI.
3. Komitmen *Anti Fraud*
Komitmen *Anti Fraud* menjadi dasar dalam penyusunan setiap kebijakan-kebijakan, ketentuan-ketentuan, ataupun aturan-aturan yang berlaku dalam kegiatan operasional BRI meliputi penerapan prinsip GCG, Manajemen Risiko dan sistem pengendalian Intern.

Kode Etik (Code Of Conduct)

- Penyusunan *Anti Fraud statement* dilakukan dengan penyusunan komitmen *anti Fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris BRI serta komitmen pekerja di setiap unit kerja. Kewajiban unit kerja untuk membuat dan/atau mengkinikan Komitmen *Anti Fraud* pekerja, minimal satu tahun sekali pada saat pelaksanaan Forum peningkatan Kinerja (FPK).
4. Pakta Integritas
Dalam melakukan hubungan kerjasama dengan rekanan/ mitra kreja dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa diwajibkan membuat dan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk melaksanakan prinsip GCG dalam pelaksanaan kerjasama.
- Dalam Pakta Integritas telah dinyatakan hal-hal mengenai antara lain:
- Independency*
 - Duty of Care and loyalty*
 - Prudent person rule*
 - Conflict of interest rule*
 - Duty abiding the laws*
5. Pengungkapan Benturan Kepentingan
Unit kerja wajib mentransparansikan transaksi yang mengandung benturan, yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangannya
- sesuai ketentuan. Selain itu setiap Pekerja diharuskan mengisi Pernyataan Tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap akhir tahun sesuai ketentuan internal BRI.
6. Kebijakan *Reward and Punishment*
BRI telah mempunyai kebijakan terkait strategi kompensasi dan benefit dimana kompensasi dan benefit disusun sesuai ketentuan dan kemampuan Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dengan memberikan kompensasi dan benefit, Perusahaan menerapkan juga peraturan disiplin secara konsisten. Penegakan disiplin diperlukan untuk mendorong pekerja menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.
7. Sosialisasi, dan lainnya
Program induksi Kode Etik BRI dilakukan terhadap pekerja baru BRI melalui program pendidikan di pusat pendidikan BRI serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten.
- Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja BRI terkait kode etik antara lain strategi *anti fraud* BRI, budaya kerja, budaya sadar risiko, budaya Kepatuhan, serta budaya layanan.

Budaya Perusahaan (Corporate Culture)

Budaya Kerja BRI

Nilai pokok (*core value*) merupakan nilai penting yang menjadi pedoman bagi pegawai dalam bersikap dan berperilaku, baik dalam berhubungan dengan nasabah, sesama Pegawai, manajemen serta pihak eksternal lainnya dan merupakan budaya kerja BRI. Nilai pokok (*core value*) BRI meliputi nilai-nilai yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Kepuasan Nasabah
4. Keteladanan
5. Penghargaan kepada SDM

Untuk mendukung rencana kerja perusahaan sebagaimana telah ditetapkan dalam "*corporate planning*" BRI, maka sejak awal tahun 2013 manajemen BRI telah memutuskan untuk mengimplementasikan revitalisasi Budaya Kerja BRI. Adapun latar belakang implementasi Budaya kerja BRI tersebut antara lain:

- a. Bertambahnya komposisi pekerja BRI di usia muda dengan membawa budayanya masing-masing,
- b. Perkembangan organisasi dan penambahan unit kerja baru yang sangat cepat,
- c. Pergeseran orientasi kebutuhan nasabah dan gaya hidup modern,
- d. Tingkat persaingan perbankan yang semakin ketat,
- e. Faktor internal dan eksternal lainnya.

Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam rangka Implementasi Revitalisasi Budaya kerja BRI adalah:

- a. Pembaharuan Konsep,
- b. Penyempurnaan Program,
- c. Pengintegrasian Sistem,
- d. Pembaharuan Alat Ukur Budaya kerja,
- e. Penciptaan media komunikasi dan pelaksanaan sosialisasi secara berkala dan terus menerus.

Salah satu dari pembaharuan konsep tersebut adalah meningkatkan peran serta *Change Leader* (CL) dan *Change Agent* (CA) sebagai penggerak revitalisasi Budaya Kerja BRI di seluruh unit kerja. Program revitalisasi baik internalisasi maupun eksternalisasi Budaya Kerja dijalankan setiap tahunnya secara berkala, mulai dari Forum Strategis di tingkat Kantor Pusat, lalu Forum Komunikasi di Kantor Wilayah, hingga pelaksanaan Forum Peningkatan Kinerja di setiap Unit Kerja seluruh Indonesia.

Selama tahun 2013, BRI melakukan revitalisasi Budaya Kerja antara lain:

- a. *Brainstorming* terhadap seluruh *Change Agent* di Kantor Pusat dan Kantor Cabang Khusus,
- b. *Kick Off* revitalisasi Budaya kerja oleh Direksi BRI dihadapan seluruh Kepala Divisi dan Wakil Kepala Divisi Setingkat,

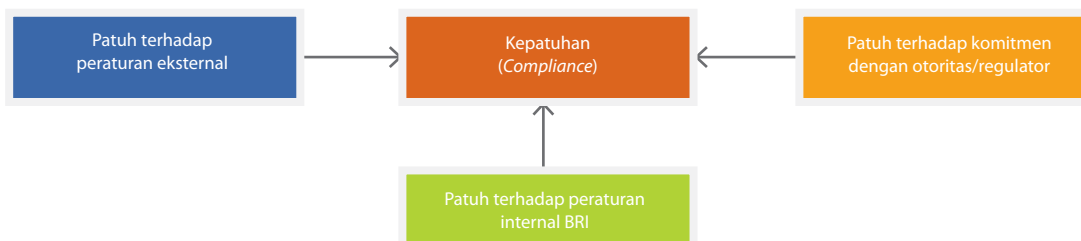
- c. *Training of trainers* kepada seluruh *Change Agent* di Kantor Pusat dan Kantor Cabang Khusus.

Pelaksanaan program revitalisasi Budaya Kerja BRI dilatarbelakangi dengan semakin bertambahnya jumlah pekerja BRI, tuntutan perkembangan bisnis yang semakin meningkat serta mendukung penguatan proses internalisasi di unit kerja BRI. Tujuan revitalisasi budaya kerja BRI adalah untuk meningkatkan peran pekerja untuk menghadapi tantangan bisnis ke depan dengan memiliki sikap perilaku sesuai budaya kerja BRI. Beberapa hal yang dilakukan dalam upaya revitalisasi budaya kerja BRI antara lain:

1. Meningkatkan peran *change leader* dan *change agent* dimasing-masing unit kerja.
2. Menetapkan kembali rasio *change agent*
3. Memonitor dan evaluasi secara berjenjang dan didukung oleh sistem.

Budaya Kepatuhan

Budaya Kepatuhan dituangkan dalam Kebijakan Direksi BRI yang mengikat seluruh elemen pekerja di BRI. Pernyataan tersebut meliputi:



Pilar-pilar dalam membangun budaya kepatuhan di setiap insan BRI dalam seluruh lapisan Unit Kerja di BRI seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Peran Manajemen dalam setiap unit Kerja (Teladan)
- b. Sosialisasi terhadap kebijakan baru/perubahan
- c. Ketersediaan Kebijakan dalam setiap Unit Kerja
- d. Penyampaian informasi isu kepatuhan, sebagaimana digambarkan berikut.



Sebagai lanjutan program sosialisasi tahun sebelumnya, setiap unit kerja diharuskan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terkait penerapan budaya Kepatuhan BRI. Peran setiap pekerja adalah memastikan nilai, perilaku dan tindakan telah sesuai dengan kebijakan eksternal, kebijakan internal dan komitmen kepada regulator serta aktif menyampaikan informasi terkait isu kepatuhan. Pemimpin unit kerja harus memiliki komitmen dan memberikan contoh dalam penerapan budaya kepatuhan kepada jajaran di bawahnya. Selain itu harus didukung dengan ketersediaan kebijakan di setiap unit kerja sebagai referensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidang tugasnya.

Budaya Layanan BRI

Budaya Layanan merupakan nilai-nilai penting yang menjadi ekspektasi dari nasabah yang digunakan sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam hubungan dengan nasabah baik eksternal maupun internal. Sejak dilakukan *Kick Off* Budaya Layanan sebagai bagian dari revitalisasi budaya kerja BRI pada tahun 2012, BRI kembali menguatkan komitmen bersama dalam mewujudkan layanan prima yang membudaya di seluruh unit kerja melalui beberapa kegiatan antara lain :

a. Internalisasi Budaya Layanan

Budaya Layanan merupakan nilai-nilai penting yang merupakan ekspektasi dari nasabah yang digunakan sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam hubungan dengan nasabah baik eksternal maupun internal. Selaku pemilik jajaran mikro terbesar maka untuk menegakkan budaya layanan tersebut, BRI melakukan program Training dan Motivasi BRI Unit. Dengan mengundang para Kepala Unit, Supervisor Unit, Customer service, dan Teller maka dilakukanlah training dan motivasi sebagai sarana *refreshment* kepada pelaku mikro agar dapat meningkatkan layanan di BRI.

b. SQ Vaganza 2013

BRI senantiasa memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya, dalam rangka apresiasi sekaligus komitmen jajaran terdepan BRI dalam memberikan pelayanan maka diciptakanlah kompetisi 2 tahunan SQ Vaganza yang melibatkan seluruh Satpam, Customer service, dan Teller BRI seluruh Indonesia. Kompetisi berlangsung ditingkat Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Nasional. Pemenang dari kompetisi ini berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman terbaik langsung dari Layanan Mass Rapid Transportation, Marina Bay Sands, dan SQ Airlines di Singapura.

Budaya Perusahaan (Corporate Culture)

Budaya Sadar Risiko

Penerapan budaya sadar risiko dilakukan dengan komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif, antara lain melalui:

1. Top 50 *Risk Issue* triwulanan dalam bentuk saku yang memuat *risk issue* di unit kerja dan risk control yang diterapkan.
2. Fungsi Manajemen Risiko yang ada di seluruh Uker yang bertugas menerapkan budaya sadar risiko serta dibentuknya Bagian Manajemen Risiko di setiap Kantor Wilayah BRI.
3. Penerapan Forum Manajemen Risiko (FMR) sebagai wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja dengan pekerjanya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional. Hasil pembahasan risiko yang memerlukan tindak lanjut dan penyelesaian dari pengambil keputusan dapat dieskalasi kepada tingkatan yang lebih tinggi.
4. Sosialisasi Manajemen Risiko.
5. Surat ke unit kerja terkait peningkatan pengendalian intern

Budaya Anti Fraud

BRI menerapkan Budaya Anti Fraud melalui pelaksanaan *Anti Fraud Awareness* untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait. Pelaksanaan *Anti Fraud Awareness* dilaporkan setiap Semester kepada Divisi Kepatuhan. *Anti fraud awareness* dilakukan melalui program sosialisasi dan penyusunan statement *anti fraud*, *employee awareness*, dan *customer awareness*. Berikut Pelaksanaan *anti fraud awareness*:

1. Penyusunan dan sosialisasi *anti fraud statement*, Manajemen BRI menyatakan *zero tolerance* terhadap setiap tindakan *fraud* yang terjadi di BRI Unit. *Anti Fraud statement* tersebut tertuang di dalam Komitmen *Anti Fraud* yang ditandatangani Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja BRI.
2. *Employee Awareness*, diantaranya Penerbitan Buku Top 50 *Risk issue* dan Surat-surat peningkatan kontrol bagi unit kerja. Selain itu Refreshment Fungsi Manajemen Risiko, Sosialisasi Manajemen Risiko secara langsung di Unit Kerja BRI, dan Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko.
3. *Customer Awareness* dilakukan dalam bentuk edukasi nasabah untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap keamanan bertransaksi. Bentuk edukasi diantaranya dengan menghimbau unit kerja untuk mensosialisasikan kewaspadaan kepada jajaran *front liner* terhadap pungutan liar dan modus-modus *fraud* lainnya.

Implementasi Strategi *Anti-Fraud* BRI dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *fraud* yang saling berkaitan yaitu:

- 1) Pencegahan
- 2) Deteksi
- 3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
- 4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

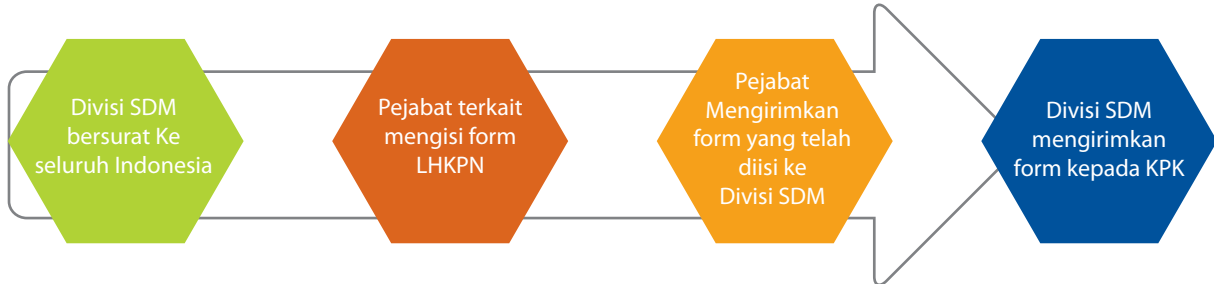
Kebijakan Strategi *Anti Fraud* BRI merupakan wujud komitmen Direksi BRI dalam pengendalian *fraud*. Direksi tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada setiap bentuk *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal BRI.

Penerapan Pilar Pencegahan terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. *Anti fraud awareness* : upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait. Kegiatan *anti fraud awareness* dilakukan melalui penyusunan & sosialisasi Komitmen *Anti Fraud*, program *employee awareness*, dan program *customer awareness*.
2. Identifikasi kerawanan : proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur potensi risiko operasional terjadinya *fraud* internal dan eksternal pada setiap aktivitas operasional bisnis BRI. Hasil identifikasi diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.
3. *Know Your Employee* (KYE) : melakukan pengamatan terhadap perilaku karyawan di unit kerja binaan.

Budaya Perusahaan (Corporate Culture)

Mekanisme Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)



Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pejabat yang Wajib Mengisi LHKPN serta Surat Keputusan Nokep 182- DIR/SDM/03/2011 Tambahan Pejabat yang wajib mengisi LHKPN adalah Pejabat selon 1 dan 2 BRI yang berstatus sebagai Pekerja Tetap atau Pekerja Kontrak, eselon 1 dengan jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Audit Intern.
2. Kepala Divisi
3. Pemimpin Wilayah.
4. Pernimpin Cabang Khusus.
5. Inspektur
6. Pejabat Eselon 1 yang ditempatkan di luar BRI, yakni Pejabat Eselon 1 yang ditempatkan di Dana Pensiun (DP) BRI, Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI, Perusahaan

anak BRI, Perusahaan Anak DP BRI atau Perusahaan Anak YKP BRI.

7. Pekerja dengan jabatan lain yang memimpin unit kerja setingkat divisi

Sedangkan eselon 2 dengan jabatan sebagai berikut:

1. Wakil Kepala Divisi
2. Wakil Pemimpin Wilayah
3. Wakil Inspektur
4. Kepala Desk setingkat Wakil Kepala Divisi
5. Kepala Biro
6. Wakil Pemimpin Cabang Khusus
7. Kepala Audit TSI
8. Kepala Bidang PSKA
9. Pejabat Eselon 2 BRI yang ditempatkan diluar BRI,

yakni Pejabat Eselon 2 yang ditempatkan di Dana Pensiun (DP) BRI, Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI, Perusahaan anak BRI, Perusahaan anak DP BRI atau Perusahaan anak YKP BRI.

10. Pekerja dengan jabatan lain yang menjabat Wakil Pemimpin Unit Kerja setingkat divisi.
11. Pekerja dengan jabatan lain setingkat pemimpin unit kerja.

Berikut rekap pemantauan dan penyelesaian kasus *Fraud*.

Pemantauan dan Penyelesaian kasus Fraud		
Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	101	146
Telah diselesaikan	66	106
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	25	29
Belum diupayakan penyelesaian	4	4
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	6	7

Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System

BRI telah membangun dan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing system) melalui aturan internal yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI. Tujuan penerapan sistem ini adalah menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi

Pengelola Pengaduan

Sistem Pengaduan pelanggaran (Whistleblowing system/WBS) Bank BRI dikelola langsung oleh Direktur Utama BRI.

Informasi pelaporan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS-BRI antara lain:

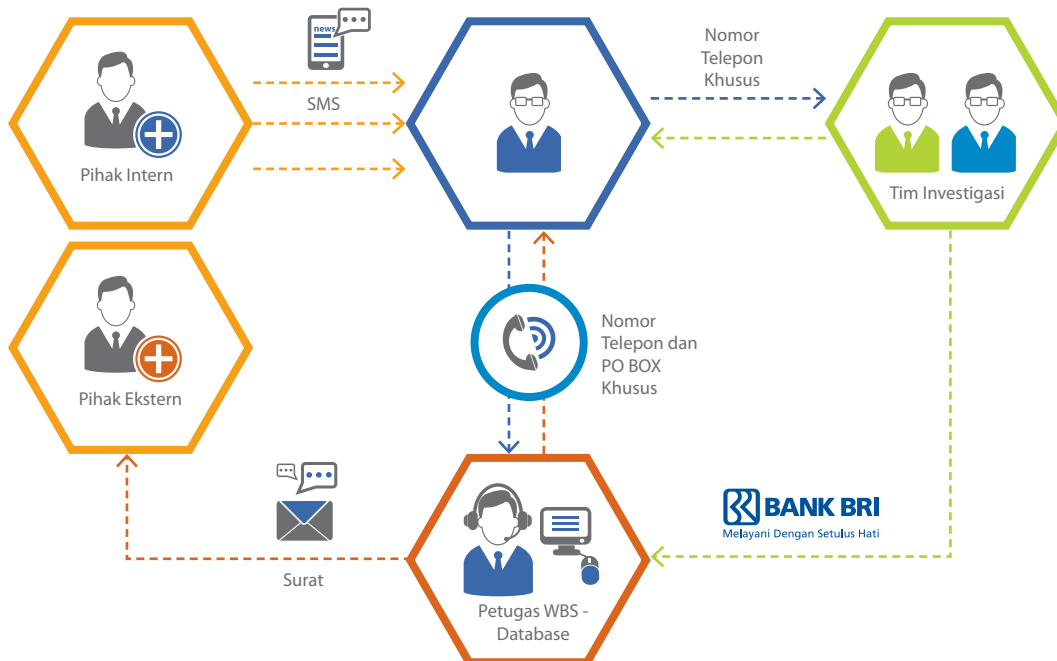
1. Tindakan *fraud*;
2. Tindakan salah/kelalaian kewajiban yang disengaja dari manajemen.
3. Perbuatan melanggar hukum (penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
4. Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pelanggaran SOP perusahaan;
6. Pelanggaran kode etik BRI; atau
7. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja atau membahayakan keamanan perusahaan serta merugikan perusahaan.

Laporan pelanggaran tersebut, wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, minimal meliputi:

1. Pelanggaran yang diadakan;
2. Pihak yang terlibat;
3. Waktu terjadinya pelanggaran;
4. Tempat terjadinya pelanggaran;
5. Bagaimana kejadiannya; dan
6. Bukti-bukti pelanggaran.

Mekanisme Penyampaian laporan

Sebagai salah satu infrastruktur dalam menunjang sistem strategi *anti fraud* BRI, mekanisme penyampaian pelanggaran dikirimkan kepada Direktur Utama melalui sarana telepon atau *short message service* (SMS) atau dengan menggunakan surat tertulis.



Penanganan Pengaduan

Pengelolaan dan tindak lanjut terhadap pengaduan/pengungkapan yang telah diterima adalah sebagai berikut :

1. Direktur utama menerima dan menyampaikan setiap pengaduan pelanggaran kepada petugas WBS yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data dan pengumpulan bukti awal yang cukup dan memadai serta menatakerjakan laporan penerimaan pengaduan.
2. Dewan Direksi menetapkan tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah diterima. Langkah-langkah tindak lanjut yang dapat ditempuh :
 - a. Investigasi oleh Audit Intern, apabila substansi pengaduan dapat dilakukan investigasi oleh tim Audit Intern.
 - b. Investigasi oleh investigator eksternal, apabila substansi pengaduan membutuhkan kompetensi/ *knowledge/skill* tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tim Audit Intern.
3. Tim investigasi melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasil investigasi pengaduan kepada Dewan Direksi untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut. Beberapa putusan yang dapat ditetapkan antara lain :
 - a. Dihentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti.
 - b. Meneruskan hasil investigasi kepada forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan terbukti benar.
 - c. Meneruskan kasus pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum atau korupsi kepada penyidik untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan BRI dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim dari Divisi Hukum guna memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam kegiatan investigasi dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Perlindungan Pelapor

Bank BRI memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap pelapor pengaduan/ pengungkapan terhadap:

1. Kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email, unit kerja).
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor akan tetapi dapat diperluas sampai dengan anggota keluarga pelapor.

Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System

Rincian Pengaduan melalui WBS Tahun 2013

Penanganan laporan

Terhadap seluruh laporan yang diterima, dapat dikelompokkan menurut sumber laporan (internal / eksternal), penyertaan identitas pelapor (ada/tidak), media penyampaian (Surat / SMS), klasifikasi laporan (keluhan / pengaduan pelanggaran) sebagai berikut :

Periode	Laporan Masuk	Sumber Laporan		Media Penyampaian			Laporan yang status selesai	Laporan yang status dalam proses	Klasifikasi	
		Pihak Internal	Pihak Eksternal	SMS	Surat	Telp/ Lisan			Keluhan/ Masukan	Pengaduan Pelanggaran
2009	50									
2010	111									
2011	278	634	138	626	140	6	503	269	532	249
2012	333									
2013	278	228	50	231	47	-	300	247	173	105
Total	1050	862	188	857	187	6	803	516	-	-

Rencana Pengembangan

Untuk meningkatkan efektifitas implementasi *whistleblowing system* (WBS-BRI), BRI merancang beberapa rencana pengembangan, mencakup:

1. Sosialisasi baik internal maupun eksternal lebih ditingkatkan dengan penyampaian informasi keberadaan WBS di setiap unit kerja operasional dan juga melalui media massa.
2. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dan sistem pelaporan WBS-BRI.

Perkara Hukum

Rekapitulasi Perkara Hukum yang dihadapi oleh BRI dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

1. Jumlah perkara penting yang dihadapi.

2011	2012	2013
336	309	270

2. Rincian Perkara

Triwulan 2013	Total	Kredit	Try dan Invest	Ops dan Jasa	Support
Triwulan 1	59	54	-	1	4
Triwulan 2	81	71	-	5	5
Triwulan 3	60	58	-	-	2
Triwulan 4	70	63	-	1	6
Total	270	246	-	7	17

3. Perkara Hukum dan status penyelesaian perkara

Permasalahan Hukum	Jumlah			
	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		901	-	29
Dalam proses penyelesaian		1377	1	35
Total		2278	1	64

4. Gugatan Hukum dan status penyelesaian gugatan

Permasalahan Hukum	
1. Pokok perkara	Gugatan dari PT. MPPC kepada BRI dan Dana Pensiun BRI sebagai upaya untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengakhiran Perjanjian BOT antara PT. MPPC dengan BRI sebagaimana putusan perkara No. 157/Pdt.G/2010/PN.JKT/PST jo No. 203/G/PT.DKI jo No. 268/K/PDT/2011/MARI jo No. 247/PK/PDT/2013
Posisi perkara	PT. MPPC menuntut uang hasil sewa Gedung BRI II, Gedung Parkir, berikut seluruh fasilitasnya yang menurut PT. MPPC seharusnya menjadi haknya. Namun demikian hal tersebut tidak sesuai dengan putusan perkara Perjanjian BOT antara PT. MPPC dengan BRI.
Status Penyelesaian	Proses Mediasi
Pengaruh terhadap kondisi keuangan Bank	-
2. Pokok perkara	Gugatan ganti rugi atas hilangnya agunan emas yang diikat gadai
Posisi perkara	Penggugat memperoleh fasilitas kredit dengan agunan pokok berupa persediaan emas dan <i>fixed asset</i> tanah bangunan. Agunan emas diikat Fidusia dan disimpan di SDB. Kemudian pengikatan agunan emas dirubah menjadi Gadai dan disimpan dalam SDB yang sama. Kemudian debitur mengajukan suplesi dimana sebelum realisasi dilaksanakan dilakukan pengujian atas agunan emas yg terdapat dlm SDB, namun diketahui berat emas tidak sesuai dengan data sehingga bersama dengan Debitur dilakukan pemeriksaan ulang dan ternyata hasilnya palsu. Adanya kejadian tersebut, Debitur mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. BRI menemukan adanya indikasi penipuan yang dilakukan oleh debitur, sehingga BRI melaporkan debitur ke Kepolisian atas dugaan penipuan. Sebelumnya debitur juga melaporkan beberapa pejabat BRI ke Polda dengan dugaan penipuan.
Status Penyelesaian	Proses Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Pengaruh terhadap kondisi keuangan Bank	-

5. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Selama tahun pelaporan, seluruh perkara yang tengah ditangani Perseroan tidak ada yang melibatkan jajaran Pengurus maupun jajaran pelaksana Bank BRI, sehingga tidak ada sanksi administratif yang diberikan oleh otoritas terkait (Bank Indonesia, OJK dan BEI) terhadap BRI, baik sebagai institusi maupun terhadap individu Pengurus dan pelaksana.

Informasi Penting Lainnya

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Ketentuan acuan

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI yang mencakup tanggung jawab lingkungan hidup, tanggung jawab pengembang sosial dan kemasyarakatan, tanggung jawab konsumen serta tanggung jawab ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang RI No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
5. Peraturan Menteri BUMN No Per-05/MBU/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen No Per-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Tanggung Jawab Lingkungan Hidup

Kegiatan yang dilakukan

Contoh program yang BRI lakukan berkaitan dengan sosial lingkungan hidup diantaranya adalah Sinergi BRI dengan Yayasan Kehati untuk melestarikan Mangrove, dimana kelestarian mangrove yang mulai mengkhawatirkan di Indonesia akibat abrasi pantai. Abrasi pantai akan mengakibatkan berubahnya ekosistem dan eksistensi serta usaha dari para penduduk yang bermukim di tepi pantai. Abrasi ini menggugah BRI untuk menyelamatkan ekosistem, masyarakat dan usaha di tepi pantai melalui upaya membuat sabuk hijau pesisir dengan mangrove. Oleh karenanya BRI bekerjasama dan bersinergi dengan Yayasan Kehati yang dinilai sebagai pakar di bidang keanekaragaman hayati termasuk pengelolaan lingkungan mangrove di Indonesia.

Selain program tersebut, BRI juga Bersinergi dengan Harian Bisnis Indonesia menggelar pelatihan Upaya Menciptakan Lingkungan Usaha yang Go Green kepada 150 pengusaha menengah bawah. Program CSR dengan Bisnis Indonesia merupakan wujud kepedulian BRI untuk lingkungan usaha yang lebih memperdulikan lingkungan.

Dampak keuangan atau Biaya yang dikeluarkan dari kegiatan terkait program lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, dll

(dalam Rp miliar)

Bidang	Total Biaya 2012 (disajikan kembali)	Total Biaya 2013
Pelestarian alam (termasuk penanaman pohon)	1,20	3,90
Pembuatan sarana umum	11,89	12,27
Kegiatan Politik	Tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik	Tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik

Tanggung Jawab Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Kegiatan yang dilakukan

Konsep penerapan program tanggung jawab sosial di BRI diarahkan untuk program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya yang bergerak di segmen Usaha Mikro dan Kecil (UKM) atau masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu.

Contoh program yang BRI lakukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi diantaranya adalah Pemberian paket pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha atau warga masyarakat yang tidak memiliki kemampuan namun memiliki kemauan untuk maju. Program seperti ini dapat di lihat di Purwokerto, di mana BRI memfasilitasi pelatihan kepada masyarakat di desa pesawahan yang terletak di pedalaman hutan mengenai kiat budidaya kambing dan pemberian kambing kepada masyarakat desa untuk dikelola secara sistem koloni. Dengan bantuan tersebut, diharapkan menjadi stimulus bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kondisi ekonominya.

Selain program pemberdayaan, BRI juga memperhatikan Pendidikan yang merupakan salah satu fokus dari BRI, sebab dengan memajukan pendidikan, diharapkan BRI dapat berperan bagi Indonesia untuk menghasilkan generasi muda yang memiliki pengetahuan untuk memajukan bangsa.

Saat ini penyaluran di bidang pendidikan difokuskan dalam 3 (tiga) pokok kegiatan yang dilaksanakan mencakup:

1. Program Pemberian Beasiswa :
 - a. Beasiswa Nusantara Cerdas untuk mahasiswa dari Indonesia Timur.
 - b. Beasiswa Indonesia Cerdas, yaitu beasiswa regular yang ditujukan untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Tahun 2013 BRI menganggarkan Rp.28,9 miliar yang ditujukan untuk 6.025 mahasiswa di Seluruh Indonesia.
 - c. Beasiswa Jurnalis BRI, yaitu beasiswa Kepada para jurnalis media cetak harian nasional untuk menempuh jenjang pendidikan Master (Strata 2).
2. Bantuan Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan
 - a. Renovasi sekolah yang tidak layak pakai.
 - b. Bantuan mobil perpustakaan keliling (Kalteng).
 - c. Bantuan Kapal Pintar (ditempatkan di Raja Ampat).
 - d. Bantuan perpustakaan sekolah.
 - e. Bantuan renovasi sekolah di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Pada tahun 2013 BRI telah menyalurkan dana sebesar Rp 2,4 Milyar yang ditujukan kepada 4 sekolah, yaitu SD Yayasan Pendidikan Kristen di distrik Sota-Kabupaten Merauke, SDN Hanowai di Desa Debulik Kecamatan Lamaknens Belu-Kab. Atambua, SDN 001 Aji Kuning di Desa Aji Kuning Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, dan SDN 12 Entikong Kabupaten Sanggau.
3. Program Pelatihan dan Pemberdayaan masyarakat
 - a. Program BRI Studentpreneur (pemberdayaan mahasiswa untuk menjadi pengusaha muda), telah berjalan dengan UGM dan UMY.
 - b. Bantuan untuk kegiatan *one day workshop selling mastery* oleh Yayasan Pendidikan Budi Wanita, Bandung.
 - c. Bantuan Dana untuk Pelatihan Ketrampilan bagi Pemberdayaan Penyandang Cacat.
 - d. Kerjasama Antara Jawa Pos dengan BRI "Pendidikan Desain - Tata Artistik - SKKM" (Sekolah Kreatif Khusus Media).
 - e. BRI bersinergi dengan IPB membangun Pusat Pengembangan Sentra Holtikultura – Agribisnis Development Centre (ADC) di Desa Pasir Sarongge, Cianjur - Jawa Barat.
 - f. BRI bekerja sama dengan Harian Republika menggarap Program Santripreneur di Pondok pesantren. Program ini untuk memberikan pelatihan peternakan bagi santri-santri di pondok pesantren. Selain memberi pelatihan peternakan, BRI juga memberi bantuan hewan ternak ke pondok pesantren.
4. Program Perbaikan Kesehatan
 - a. BRI bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia mengadakan sinergi CSR berupa operasi langit-langit mulut dan bibir sumbing di Rumah Sakit Mohamad Al Kadri Pontianak.
 - b. BRI mendukung operasional Rumah Sehat Amira untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga kurang mampu di wilayah Jakarta.
 - c. BRI, ANTV dan RSPAD Gatot Soebroto mengadakan operasi katarak gratis untuk wartawan dan keluarganya.

Informasi Penting Lainnya

Dampak keuangan atau biaya yang dikeluarkan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan masyarakat, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya dll

(dalam Rp miliar)

Bidang	Total Biaya 2013 (Rp miliar)	Persentase
Bina Lingkungan (BRI Peduli)		
Bidang:		
- Sarana umum	12,27	8,76%
- Bencana Alam	3,97	2,83%
- Pendidikan	73,28	52,29%
- Kesehatan	20,46	14,60%
- Sarana Ibadah	23,12	16,50%
- Pelestarian alam	3,90	2,79%
- Bantuan Sosial untuk pengentasan kemiskinan	3,12	2,23%
TOTAL	140,12	100%
Kegiatan politik	Tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik	Tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik

Tanggung Jawab Kepada Konsumen Kebijakan Acuan

Tanggung jawab kepada Konsumen BRI didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 10 tahun 1998
2. Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan OJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
4. Peraturan Bank Indonesia No 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dimana telah diubah dengan PBI No 10/10/PBI/2008
5. Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
6. Surat Edaran Bank Indonesia No 15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit

Program peningkatan layanan kepada Konsumen

1. Dalam memastikan layanan kepada konsumen yang menyampaikan pengaduan, telah ditetapkan jangka waktu (*service level agreement*) penyelesaian pengaduan nasabah yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Kewenangan User dan SLA Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bagi nasabah yang masih belum puas terhadap penyelesaian pengaduannya maka nasabah dapat melanjutkan upayanya dengan mengajukan ke Lembaga Mediasi Perbankan. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa BRI Dengan Nasabah Melalui Lembaga Mediasi Perbankan.
3. Dalam menindaklanjuti pengaduan nasabah, telah diatur fungsi-fungsi yang terlibat sebagai berikut :
 - a. Fungsi Penerimaan Pengaduan. Fungsi ini bertugas, antara lain, menerima dan mencatat pengaduan yang disampaikan nasabah. Termasuk juga menjelaskan prosedur penyelesaian pengaduan nasabah.
 - b. Fungsi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan. Fungsi ini bertugas, antara lain, menangani dan menyelesaikan pengaduan. Termasuk penatakerjaan dokumen yang dibutuhkan selama proses penyelesaian.
 - c. Fungsi Pemantauan Pengaduan. Fungsi ini bertugas, antara lain, memantau bahwa proses penyelesaian pengaduan nasabah yang ditangani tidak melewati jangka waktu yang ditetapkan. Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin dengan menyampaikan daftar pengaduan yang belum selesai ke Divisi terkait.
 - d. Fungsi Pelaporan Penyelesaian Pengaduan. Fungsi ini bertugas, antara lain, menyampaikan laporan penyelesaian pengaduan nasabah setiap triwulan ke Bank Indonesia.

Informasi Penting Lainnya

Implementasi kebijakan dan program layanan

Implementasi kebijakan penyelesaian pengaduan nasabah telah dilakukan melalui:

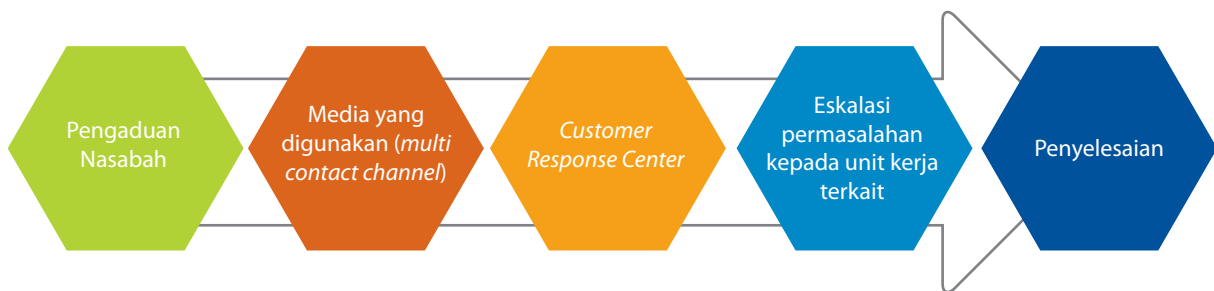
1. Implementasi aplikasi *Complaint Handling System* (CHS) yang telah selesai dilaksanakan di seluruh unit kerja BRI.
2. Sosialisasi kebijakan dilakukan secara berjenjang melalui Bagian Operasional Jaringan Layanan (OJL) di setiap Kantor Wilayah.

Pusat Pengaduan Konsumen

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai saluran (*multi channel* BRI) sebagai berikut:

1. Melalui Customer Service di seluruh Unit Kerja Operasional BRI
2. Melalui telepon di nomor: 14017, 500017, 021-57987400, 08001017017, 021-5758899, dan 021-5751234 (tiga nomor terakhir khusus untuk melayani nasabah premium).
3. Melalui email di : kartu_kredit@bri.co.id dan contactcenter@bri.co.id
4. Melalui media sosial twitter di @kontak_bri
5. Melalui media sosial Facebook di BANK BRI Official
6. Melalui media sosial Youtube di BANK BRI

Prosedur pengaduan nasabah



Kegiatan yang dilakukan terkait tindak lanjut terhadap pengaduan dan tingkat penyelesaian pengaduan yang diterima

Hasil survey tingkat standar layanan BRI oleh Marketing Research Indonesia (MRI)

Aspek yang dinilai	2012	2013
Phone Banking Officer	82,21	92,99
Phone Banking IVR	87,50	90,19

Laporan tingkat penyelesaian pengaduan nasabah

Periode	Pengaduan Masuk	Pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan yang dinyatakan selesai	Pengaduan yang dalam proses
2011	173.728	173.728	170.263	3.465
2012	168.672	168.672	165.192	3.482
2013	132.697	132.697	130.979	1.718

* Pengaduan yang dalam proses akan ditindaklanjuti pada periode selanjutnya

Informasi Penting Lainnya

Sertifikasi yang diperoleh seperti ISO

Operasional Bagian Layanan Contact Center BRI mendapat sertifikasi AS/NZS ISO 9001:2008 tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan 5 Desember 2014

Evaluasi terhadap implementasi

Evaluasi prosedur penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan bersama Divisi-Divisi terkait, beberapa hasil evaluasi telah yang dilakukan:

1. Permasalahan nasabah yang menanyakan pengiriman kartu kredit pengganti. Tindak lanjut yang dilakukan adalah uji coba akses aplikasi register *delivery* kartu kredit di *team leader call center*.
2. Penanganan pengaduan yang disampaikan melalui sosial media (Twitter, Facebook, dan Youtube). Tindak lanjut yang dilakukan adalah koordinasi internal agar pengaduan yang masuk ditindaklanjuti.
3. Penanganan pengaduan nasabah kredit konsumen yang disampaikan ke Divisi Kredit Konsumer. Tindak lanjut yang dilakukan adalah meneruskan pengaduan terkait produk kredit konsumen ke Divisi Kartu Kredit melalui aplikasi CHS/ Proklamasi sehingga penyelesaian pengaduan dapat terpantau.

Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kebijakan Acuan

Tanggung jawab Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja BRI didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang RI No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang RI No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Program kerja yang dilakukan dalam kesempatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, pelatihan dll.

Kebijakan Acuan

Tanggung jawab Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja BRI didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang RI No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 2. Undang-undang RI No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 3. Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- Program kerja yang dilakukan dalam kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan dll.
 - Kegiatan yang telah dilakukan seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan dll.

Informasi Penting Lainnya

Status	2012	2013
Penerimaan pekerja	13.855	7.319
Berhenti bekerja	393	779
Jumlah Pekerja akhir tahun	72.625	81.238
Turn over Rasio	1,14%	1,8%
Promosi	6.435	10.208
Rotasi	21.013	29.279

Jenis Fasilitas	Pekerja tetap	Pekerja tidak tetap
Upah	Ada	Ada
Upah kerja lembur	Ada	Ada
Jaminan pemeliharaan kesehatan	Ada	Ada
Asuransi Jiwa dan Kecelakaan	Ada	Ada
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)	Ada	Tidak
Cuti tahunan	Ada	Ada
Cuti Besar	Ada	Tidak
Insentif jangka pendek	Ada	Ada
Pendidikan dan pelatihan	Ada	Ada
Fasilitas Pinjaman Pekerja	Ada	Tidak

Kelompok Jabatan	Usia	Fasilitas General Medical Check Up
Executive Vice President Vice President	Tidak dibatasi	1 tahun 1 kali
Assistant Vice President Senior Manager Manager	> 50 tahun	1 tahun 1 kali
Assistant Manager Officer Assistant	≤ 50 tahun	2 tahun 1 kali
Assistant Vice President Senior Manager Manager	40- 50 tahun	2 tahun 1 kali
Assistant Manager Officer Assistant	<40 tahun	Belum diberikan

Informasi Penting Lainnya

Jenis Pendidikan	Jumlah Peserta 2012	Jumlah Peserta 2013
Pendidikan Pengembangan	7.529	4
Pendidikan Pembekalan	24.467	24.565
Pendidikan Aplikasi	179.641	129.250
Total	211.637	153.819

- Dampak keuangan atau biaya yang dikeluarkan terkait ketenagakerjaan**

(dalam Rp miliar)

Bidang	Total Biaya 2012	Total Biaya 2013
Pengobatan	15,87 (kantor pusat)	177,22
Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pekerja	484,9 miliar	544,72

Tempat/Alamat yang dapat dihubungi Stakeholders



Alamat BRI

Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (+62-21) 251 0244, 251 0254
Faks: (+62-21) 250 0065, 250 0077
Website: www.bri.co.id
Email: humas@bri.co.id



Alamat Sekretariat Perusahaan

Gedung BRI I, Lantai 20
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (+62-21) 575 1966
Faks: (+62-21) 570 0916



Alamat Investor Relations

Gedung BRI I, Lantai 20
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (+62-21) 575 1966
Faks: (+62-21) 575 2010
E-mail: ir@bri.co.id
Website: www.ir-bri.com



388

Laporan Tanggung Jawab Sosial

390	Asas dan Komitmen
393	Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
394	Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
396	Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

396	Penyaluran Kredit Program (KUR dan Kredit Program Lainnya)
-----	--

397	Pelaksanaan Kegiatan CSR
-----	--------------------------

403	Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Nasabah
-----	--



“ Komitmen terhadap Masyarakat dan Lingkungan “

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkualitas terhadap seluruh elemen pemangku kepentingan utama menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara berkelanjutan

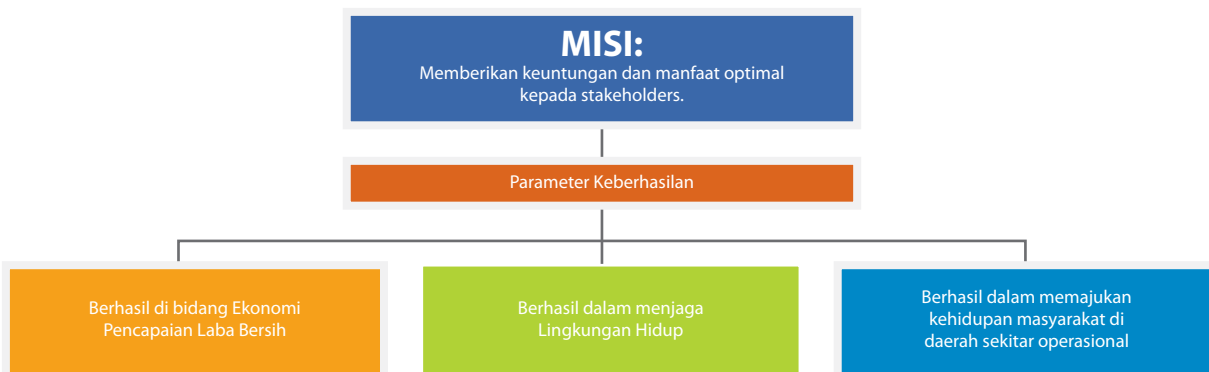
Laporan
Tanggung
Jawab Sosial
Perusahaan

Asas dan Komitmen



Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, BRI konsisten menunjukkan komitmennya yang tinggi untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar dimanapun unit kerja beroperasi. Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan mampu menyeimbangkan keberhasilan kinerja yang diukur dengan perolehan laba diimbangi dengan keberhasilan menjaga lingkungan hidup dan keberhasilan memajukan kehidupan masyarakat di daerah sekitar operasional. Untuk memastikan pertumbuhan yang berkualitas, BRI merancang dan menerapkan berbagai program yang meliputi seluruh aspek operasional dan ditujukan bagi terpenuhinya harapan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana digambarkan dalam rumusan misi serta hubungannya dengan tiga aspek dasar pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, sebagai berikut.

Misi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BRI:



“ Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial merupakan wujud investasi sosial melalui pendalaman hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar, bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Massa. “



Bagi BRI, pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan investasi sosial melalui pendalaman hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa dan lain-lain.

Mengingat pentingnya investasi sosial ini, BRI menunjukkan komitmen bagi tercapainya misi perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan berbagai program strategis terkait, dengan tujuan:

- Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.
- Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing, mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui pengelolaan yang profesional.
- Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, yang berpotensi memberi hubungan timbal balik jangka panjang dengan bisnis Perseroan melalui penyaluran dana kemitraan dan pembinaan berkesinambungan, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
- Partisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan strategis pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, BRI senantiasa mengembangkan program dengan mempertimbangkan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan berlanjutnya manfaat pelaksanaan program bagi tumbuh dan berkembangnya kemandirian komunitas sekitar.

Dasar Acuan

Perencanaan dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan BRI yang mencakup tanggung jawab lingkungan hidup, tanggung jawab pengembang sosial dan kemasyarakatan, tanggung jawab konsumen serta tanggung jawab ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

Asas dan Komitmen



1. Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang RI No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
5. Peraturan Menteri BUMN No Per-05/MBU/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen No Per-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Garis Besar Kegiatan

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan BRI pada dasarnya melibatkan interaksi pemangku kepentingan dengan setiap aspek operasional perusahaan. Uraian lengkap yang menggambarkan interaksi tersebut disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BRI. Laporan tersebut berisi penjelasan mengenai peran Perseroan dalam berpartisipasi pada upaya menjaga keberlanjutan bumi beserta seluruh isinya melalui pelaksanaan berbagai program dengan tujuan menjaga keseimbangan kinerja dibidang ekonomi, sosial dan masyarakat, termasuk menghormati hak pekerja dan penerapan tata kelola terbaik dalam mencapai tujuan tersebut.

Sesuai butir-butir ketentuan Bapepam-LK Nomor: KEP-431/BL/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, pada uraian berikut BRI menyampaikan laporan tanggung jawab perusahaan berupa pelaksanaan kegiatan yang mencakup empat topik laporan, yakni tanggung jawab perusahaan terhadap: (1) Lingkungan Hidup (2) Praktik Ketenagakerjaan (3) Pengembangan Sosial dan Masyarakat (4) Tanggung Jawab Produk. Uraian masing-masing topik tersebut secara lebih lengkap dapat dijumpai pada Laporan Keberlanjutan BRI dan uraian di bab terkait pada laporan tahunan ini.

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Kegiatan operasional BRI tidak melibatkan proses pengolahan bahan maupun proses fisik lain yang memberi dampak langsung terhadap lingkungan sekitar, namun demikian BRI berkomitmen untuk berpartisipasi pada upaya memperbaiki maupun menjaga kelestarian lingkungan secara aktif maupun secara pasif.

Partisipasi aktif dilaksanakan melalui gerakan penghijauan sekitar unit kerja maupun lingkungan sekitar, *sponsorship* bagi penyelenggaraan event berkaitan dengan lingkungan hidup, pemberian bantuan langsung dalam skema Bina Lingkungan pada kegiatan lingkungan hidup dan sebagainya. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Partisipasi pada acara MECS (*Mangrove Ecosystem Conservation and Sustainable Use*) yang bertujuan melestarikan hutan mangrove dengan dukungan pendanaan yang berkelanjutan.
- Pelatihan bagi terciptanya lingkungan usaha yang ramah lingkungan terhadap para pengusaha menengah bawah, bekerja sama dengan Bisnis Indonesia.
- Menggagas program Hutan Sekolah di lokasi 27 SMU pada 9 kota sebagai bagian dari penciptaan edukasi masyarakat, terutama akademisi, akan lingkungan yang bersih dan terpelihara.
- Memberi bantuan peralatan pemelihara kebersihan dan lingkungan danau di Tondano, Tomohon, Kabupaten Minahasa

(Uraian lebih rinci pada bagian Tanggung Jawab Sosial – Bina Lingkungan – BRI Peduli Pelestarian Alam)

Partisipasi pasif BRI dalam kegiatan pelestarian lingkungan diwujudkan melalui penerapan berbagai kebijakan yang bertujuan mengurangi dampak negatif kegiatan operasional terhadap lingkungan. Berbagai kebijakan yang dilakukan, selain memberi dampak positif terhadap kelestarian lingkungan, juga memberi dampak pada berlangsungnya kegiatan operasional yang lebih efektif dan efisien.

(Dalam Rp miliar)

Bidang	Total Biaya 2012 (Disajikan Kembali)	Total Biaya 2013
Pembuatan sarana umum	Rp. 11,89	Rp. 12,27
Pelestarian alam	Rp. 1,20	Rp. 3,90
Total	Rp. 13,09	Rp. 16,17

Kebijakan-kebijakan operasional yang menunjukkan wujud tanggung jawab BRI terhadap lingkungan mencakup:

- *Paperless system* dalam proses administrasi, yang bertujuan mengurangi konsumsi kertas dengan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, meliputi aplikasi:
 - *Loan Approval System*
 - E-SPJ
 - Portal SDM
 - Sosialisasi kebijakan melalui *public folder*
 - *SMK Online*
 - Perubahan Absensi manual dengan kertas menjadi dengan EDC
- Kebijakan penghematan penggunaan listrik, meliputi pemakaian lampu hemat energi maupun penyeletelan suhu ruangan yang wajar.
- Kebijakan uji petik kendaraan operasional untuk menekan emisi.
- Kebijakan proses penggantian peralatan berteknologi tinggi yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan pengelola limbah padat berteknologi tinggi yang berijin dan berkompeten.
- Persyaratan proses produksi ramah lingkungan dalam proses pemberian kredit KI maupun KMK kepada seluruh pelaku industri skala kecil, menengah maupun besar.
- Penetapan kebijakan penghematan penggunaan air, dengan memanfaatkan air daur ulang dalam tata kelola gedung Kantor Pusat BRI

Dampak Keuangan

Total dana yang dialokasikan untuk kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana umum, serta pelestarian lingkungan di tahun 2013, mencapai Rp16,17 miliar dengan rincian sebagai berikut.

Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.



Uraian mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dalam aspek ketenagakerjaan dapat dilihat pada sub-Bab "Tinjauan Operasional- Pengelolaan Sumber Daya Manusia"

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kebijakan

Untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (K3) para pekerja, nasabah dan *stakeholder* lain yang berada di lingkungan unit kerja operasional, BRI telah mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU). Kebijakan tersebut melingkupi Rencana Penanggulangan Bencana, yakni selain menjamin K3 juga dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional

terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana.

Kebijakan perlindungan K3 tersebut juga dicantumkan dalam PKB sesuai dengan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep 107/PHIJSK-PKKAD/PKB/VIII/2011 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan Serikat Pekerja PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

Kegiatan

BRI menerapkan MKU terhadap seluruh unit kerja BRI melalui pembentukan/pengkinian Tim Manajemen Krisis, penyusunan/pengkinian *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk memetakan

unit kerja rawan bencana serta menginventarisir sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja.

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa unit kerja BRI, sepanjang tahun 2013 seperti gempa di Aceh, banjir di Ambon, Jakarta, dan Kendari, serta erupsi gunung berapi di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. BRI memanfaatkan keberadaan mobil e-Buzz dan Teras BRI Keliling yang tersebar di seluruh wilayah kerja BRI sebagai *alternate site* pada saat terjadi bencana sehingga unit kerja dapat beroperasi sesegera mungkin pasca terjadi bencana.

Selain itu, Divisi Manajemen Risiko mengkoordinasikan implementasi BCM secara berkesinambungan dengan unit-unit kerja terkait diantaranya adalah pelaksanaan uji coba atau testing seperti *Switch Over* DC-DRC 2013 dan evakuasi bencana di beberapa gedung kantor BRI termasuk Gedung Kantor Pusat BRI dan Gedung TI Ragunan.

Selain bersiap menghadapi bencana alam tersebut, seluruh unit kerja BRI juga senantiasa bersiap untuk menghadapi kejadian insiden kecelakaan kerja pada seluruh kegiatan operasional yang mayoritas berlangsung di dalam ruang tertutup, baik berupa gedung bertingkat tinggi, Ruko, Rumah Kantor maupun unit-unit kerja *mobile*.

Dengan konfigurasi kegiatan yang mayoritas berada di dalam ruang tersebut, maka program K3 yang dijalankan lebih menitik beratkan pada pelaksanaan program dasar untuk mencegah risiko kecelakaan kerja dan penjangaan kesehatan pekerja. Program dasar berupa simulasi kejadian bencana yang dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun meliputi:

- Latihan evakuasi dari gedung bertingkat.
- Latihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran.
- Latihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung.
- Dan latihan dasar yang relevan lainnya.

Selain program dasar tersebut, dalam rangka menjaga pekerja dari risiko kecelakaan kerja, BRI memiliki kebijakan yang menegaskan agar para pekerja senantiasa mengikuti aturan keselamatan dari pemilik proyek, manakala melakukan peninjauan lapangan. Selain itu seluruh pekerja BRI dilindungi oleh polis asuransi kecelakaan kerja saat melakukan kunjungan kerja.

BRI juga menerapkan program standar keselamatan kerja dengan melengkapi seluruh fasilitas operasionalnya, baik unit mobile, Ruko, Rukan dan gedung bertingkat dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai. BRI bahkan mewajibkan adanya pemberian informasi perihal jalur evakuasi apabila terjadi kondisi darurat, pada setiap acara dengan pihak eksternal yang dilaksanakan di Gedung BRI.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi darurat pekerja yang mengalami sakit mendadak di lingkungan kantor, perusahaan juga menyediakan fasilitas kesehatan berupa tabung oksigen (O2) dan kotak obat P3K untuk ditempatkan di setiap unit kerja BRI.

Saat ini, seluruh pekerja BRI mendapatkan beberapa fasilitas terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja:

- BRI menyediakan paket benefit yang khusus ditujukan pada pekerja untuk menjaga kesehatan dan/atau mendapatkan pengobatan atas tanggungan perusahaan dalam batas-batas yang wajar.
- BRI juga melaksanakan program pemeriksaan kesehatan berkala/ General Medical Chek-Up (GMCU) setiap periode, yang merupakan tindakan preventif untuk menjaga kesehatan pekerja
- Pemberian fasilitas tunjangan kacamata kepada pekerja BRI, sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan
- Seluruh pekerja BRI telah diikutsertakan sebagai peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Untuk memastikan adanya layanan kesehatan yang berkualitas bagi para pekerja BRI, terutama di Kantor Pusat, maka salah satu langkah maju

BRI adalah bekerja sama dengan BRIMedica (anak perusahaan Dana Pensiun BRI) untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan. Disamping itu, di Kantor Pusat BRI juga telah siap sedia 2 (dua) mobil Ambulans sebagai salah satu sarana pertolongan pertama pada kecelakaan.

Nama:

BRI Medika

Lokasi:

Gedung BRI I, Jakarta

Jam Operasional :

08.00 – 16.30WIB

Dokter :

3 orang (Dokter Umum)

Layanan kesehatan :

pemeriksaan dokter, pemberian obat, dan menyediakan layanan cek laboratorium

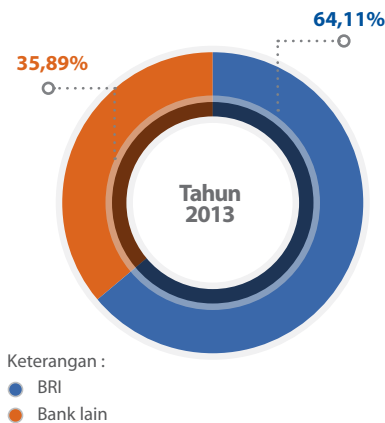
Dampak Keuangan

Pelaksanaan pelatihan dan penyediaan peralatan keselamatan dasar tersebut tidak menyebabkan dampak material terhadap keuangan BRI.

Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

Oustanding KUR Terhadap Nasional

(Dalam %)



Seperti telah ditegaskan sebelumnya, BRI bertekad meraih hasil pengembangan usaha bersama-sama dengan komunitas sekitar. Salah satu perwujudan tekad tersebut adalah dengan mengupayakan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan dukungan sumber pembiayaan bagi perintisan usaha oleh komunitas sekitar. Selain aspek ekonomi, BRI juga berupaya mengembangkan kehidupan sosial masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program yang relevan. Sehingga program yang dijalankan oleh BRI dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas, terdiri atas dua program pokok, yaitu:

- Penyaluran Kredit Program, berupa:
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat)
 - Kredit Program Lainnya (KKPE, KUT dll)
- Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, berupa:
 - Program BRI Peduli
 - Program Kemitraan

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang *feasible* tapi belum *bankable*, yaitu usaha yang memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit tersebut. Bagi BRI, penyaluran KUR juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan status usaha kecil mitra binaan dalam program PKBL, menjadi usaha kecil yang *bankable* dan siap berkembang lebih lanjut.

BRI menjadi salah satu andalan Pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, mengingat *competitive advantage* yang dimiliki BRI berupa jaringan unit kerja *real time on-line* yang terbesar dan tersebar diseluruh pelosok Indonesia serta pengalaman dalam bisnis mikro. Keunggulan

tersebut membuat BRI mampu menyalurkan kredit ini dengan mudah, namun dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

Oleh karena itu, proporsi penyaluran KUR BRI secara nasional di tahun 2013 secara nominal mencapai 64,11% dari total nominal penyaluran KUR serta 94,1 % dari total nasabah KUR.

Dampak Keuangan Program KUR

Sampai dengan akhir tahun 2013, BRI telah melayani lebih dari 9 juta nasabah dengan total penyaluran KUR mencapai lebih dari Rp 69 triliun. Pada Desember 2013, outstanding KUR BRI adalah Rp 27,7 triliun, meningkat 35,12% dari tahun 2012 yang sebesar Rp 20,5 triliun. Jumlah debitur KUR pada akhir tahun 2013 mencapai 2,7 orang meningkat 22,73% dari tahun sebelumnya yang tercatat sejumlah 2,2 juta orang. Kualitas Kredit KUR BRI juga berhasil dikelola dengan baik, yakni NPL KUR akhir 2013 pada kisaran 1,42% lebih baik dari posisi 1,65% di tahun 2012.

Hal ini menunjukkan peranan BRI yang cukup signifikan dalam meningkatkan *financial inclusion* di Indonesia dan secara tidak langsung meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar unit kerja BRI.

Kredit Program Lainnya

Selain menyalurkan skema pembiayaan mikro melalui KUR, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah melalui penciptaan ketahanan pangan dan energi, dengan dukungan jaringan dan pengalaman luas dalam bidang kredit mikro yang dimiliki, BRI juga menyalurkan kredit program lainnya.

BRI melakukan penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Pola Non

Kemitraan. Skim kredit KKP-E ini terbukti mampu membantu petani, peternak, nelayan dan pembudidaya dalam meningkatkan produksi pertanian mereka karena adanya dukungan pendanaan yang sesuai dengan kondisi usaha mikro tersebut di lapangan.

Dampak Keuangan Kredit Program

Sampai akhir tahun 2013 BRI telah menyalurkan kredit KKP-E kepada 25.127 Kelompok Petani/ Peternak/Pembudidaya/Koperasi untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Total outstanding meningkat 16,67% dari Rp2,46 triliun menjadi sebesar Rp2,87 triliun.

Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Program Corporate Social Responsibility Perusahaan diarahkan untuk program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya yang bergerak di segmen Usaha Mikro dan Kecil (UKM) atau masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu. Program ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk bantuan sosial dan pengembangan komunitas yang dilakukan melalui mekanisme PKBL.

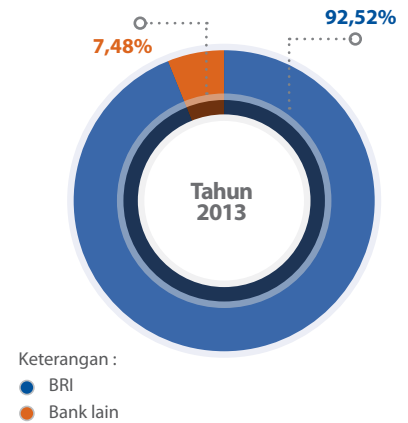
PKBL merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Mengacu pada peraturan ditingkat Menteri tersebut, secara internal BRI telah menetapkan berbagai ketentuan teknis pelaksanaan dalam bentuk surat-surat edaran kepada Unit Kerja BRI, antara lain:

- NOSE.S.19 – DIR/ADK/04/2006, tanggal 28 April 2006 tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Surat B.789 PRG/KBL/12/2010, tanggal 03 Desember 2010 tentang Program Bina Lingkungan
- Surat B.257 SKP/CSR/07/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Program Bina Lingkungan
- Surat B.752 SKP/CSR/07/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Persyaratan Bantuan Bina Lingkungan dan Mekanisme Pencairan Bantuan Bina Lingkungan.
- NOSE.S.32 – DIR/SKP/11/2013, tanggal 29 November 2013 tentang Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Surat B.131.PRG/KBL/03/2009, tanggal 5 Maret 2009 tentang Bantuan Dana Bina Lingkungan Untuk Tanggap Darurat Bencana.
- Surat B.524-PRG/KBL/09/2012, tanggal 5 September 2012 tentang Petunjuk Pembukuan Pinjaman Kemitraan.
- Surat Direksi B.176-DIR/PRG/03/2013, tanggal 13 Maret 2013 tentang Perubahan Distribusi Bunga Pinjaman Kemitraan
- Surat B.54-DIR/PRG/01/2012, tanggal 31 Januari 2012 tentang Breakdown Pinjaman Kemitraan

Alokasi dana kegiatan CSR/PKBL tiap tahunnya diputuskan oleh RUPS BRI sebagai anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, masing-masing maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, baik untuk PK (Program Kemitraan) maupun BL (Bina Lingkungan). Untuk tahun 2013, total alokasi anggaran bagi realisasi program PKBL berasal dari saldo dana program yang bersumber dari penyisihan sebagian laba perusahaan yang teralokasi sampai dengan akhir 2012

Total Nasabah KUR Terhadap Nasional



Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

Total realisasi dana PKBL selama tahun 2013 adalah sebesar Rp 271,44 miliar, terdiri dari penyaluran Dana Kemitraan sebesar Rp 131,32 miliar dan dana Bina Lingkungan sebesar Rp 140,12. miliar.

Program Kemitraan

Program Kemitraan BRI ditujukan untuk mendukung pembiayaan dan pembinaan kepada usaha mikro dan kecil termasuk koperasi yang memenuhi kelayakan usaha tetapi belum bisa dilayani dengan skim kredit komersial BRI. BRI memandang realisasi program kemitraan adalah bagian dari upaya mewujudkan misi perusahaan yaitu "Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat".

Melalui pelaksanaan program ini, BRI menargetkan peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil para Mitra Binaan agar terus berkembang menjadi usaha yang tangguh di kemudian hari, sehingga kemudian embrio nasabah ini dapat berubah menjadi nasabah komersial BRI.

Melalui Program Kemitraan ini BRI memberikan program pembinaan kewirasusahaan kepada para Mitra Binaan, selain memberikan fasilitas pembiayaan dengan persyaratan yang ringan. Program pembinaan dilaksanakan dalam berbagai bentuk, mencakup pembinaan pengetahuan dasar kewirasusahaan, pengetahuan dasar pemasaran produk, bahkan kegiatan promosi pemasaran produk dengan mengikut sertakan mitra binaan pada berbagai pameran produk usaha mikro baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Keikutsertaan pada event pameran selain bertujuan menambah wawasan para mitra binaan juga sebagai ajang perluasan pemasaran produknya.

Proses dan seleksi pemberian pembiayaan mitra dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan rencana jangka panjang Perseroan. Dengan mempertimbangkan efisiensi proses pembinaan, pengawasan dan kemudahan pemasaran, BRI kini lebih memfokuskan penyaluran dana dalam rangka pembentukan kluster-kluster usaha.

Tahun 2013 ditandai penghentian sementara penyaluran Pinjaman Kemitraan mulai bulan April oleh Kementerian BUMN, sehingga total realisasi penyaluran dana menurun dibandingkan dengan tahun 2012 lalu. Sekalipun demikian, dengan mengandalkan pola pembentukan kluster usaha tersebut, pada tahun 2013 BRI berhasil menyalurkan dana program kemitraan terhadap 3.723 mitra binaan, sehingga total mitra binaan BRI berkembang menjadi 23.725 unit usaha. Total pinjaman kemitraan yang disalurkan mencapai Rp 130,06 miliar, termasuk kerjasama penyaluran dana pinjaman kemitraan sinergi dengan BUMN lain yaitu: PTPN IX dan PTPN XI sebesar Rp. 90 miliar pada sektor perkebunan, sehingga total dana kemitraan yang disalurkan sampai akhir tahun 2013 telah mencapai Rp 717,48 miliar. Selain pinjaman, pada tahun 2013 BRI juga menyalurkan dana pembinaan kemitraan senilai Rp 1,26 miliar.

Rincian penyaluran dana pinjaman kemitraan tahun 2013 menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut.

Sektor Usaha	Realisasi 2013	% Komposisi
	Dalam Rp Miliar	
Industri	2,57	1,98%
Perdagangan	18,51	14,23%
Pertanian	2,90	2,23%
Perternakan	5,96	4,58%
Perkebunan	91,80	70,58%
Perikanan	2,79	2,14%
Jasa	4,01	3,08%
Lainnya	1,52	1,17%
Sub Total	130,06	100,00%
Dana Pembinaan	1,26	
Total	131,32	

Tanggung Jawab Terhadap Komunitas



Pengembangan Usaha Kopi Bali

Program Pemberdayaan Ekonomi– BRI

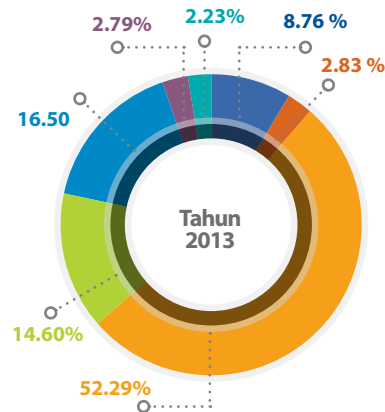
Kopi Bali, yang didalamnya termasuk kopi arabika yang dihasilkan perkebunan kopi di Desa Landih, Kabupaten Bangli, Bali, cukup dikenal di Indonesia. Wayan Jamin sebagai pelaku usaha industri kopi sekaligus ketua KSU Bale Dana Mesari telah membina puluhan kelompok petani kopi di desanya, dan telah berkecimpung dalam industri ini selama puluhan tahun. Produk unggulannya adalah B36 Kopi Arabika Bali dan Kopi Luwak B36, dimana biji kopinya didapat dari hasil kebun petani kopi arabika Desa Landih, dan juga dari 2 Ha lahan kopi yang di huni luwak liar.

Kopi Arabika dan Kopi Luwak hasil olahan KSU Bale Dana Mesari adalah kopi yang berkualitas tinggi karena diolah secara organik melalui pemanfaatan pupuk yang diperoleh dari ternak milik para petani kopi yang diolah secara tradisional. Diwadahi dan dibina oleh KSU Bale Dana Mesari, hasil kopi para petani langsung diolah menjadi kopi arabika organik yang dikenal dengan nama B36 Kopi Arabika Bali yang telah dipasarkan ke seluruh Pulau Bali dan di ekspor ke luar negeri.

Bank BRI melalui Program Kemitraan telah membina 7 kelompok petani kopi atau 105 orang binaan KSU Bale Dana Mesari dengan total lahan 43 Ha. Pembiayaan yang diberikan BRI digunakan untuk meningkatkan proses hasil produksi dengan pembelian mesin pengolah biji kopi. Mesin ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas dengan memproses biji kopi kulit merah menjadi biji kopi bersih tanpa kulit. Dalam keadaan yang bersih menjadi biji kopi tanpa kulit, secara langsung meningkatkan harga jual kopi ke Koperasi. Demi menjaga kualitas dan efisiensi dalam pengolahan hasil kopi, dibutuhkan pemanfaatan teknologi dalam prosesnya. Untuk itu, BRI dan KSU Bale Dana Mesari siap mendukung dan membina ratusan petani kopi yang berkeinginan mengembangkan usahanya.

Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

Realisasi Bina Lingkungan 2013



Keterangan :

- Sarana Umum
- Bencana Alam
- Pendidikan/Pelatihan
- Peningkatan Kesehatan
- Sarana Ibadah
- Pelestarian Alam
- Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan

Bina Lingkungan BRI Peduli

Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh BRI direalisasikan dalam BRI Peduli. Program BRI Peduli bertujuan untuk memberdayakan kondisi sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasional BRI menjadi lebih baik dengan mengutamakan pada pemberdayaan ekonomi. Bantuan yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai lebih bermanfaat karena dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi maka secara tidak langsung masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lain.

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan PKBL yang salah satunya adalah membantu mensejahterakan komunitas dengan menumbuh kembangkan kemampuan ekonomi, kondisi sosial, lingkungan, dan kehidupan kemasyarakatan. Agar memberikan dampak sinergis dengan program pemberian dana PK, realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan pada tahun 2013 difokuskan untuk sektor Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Fokus bantuan pada bidang tersebut bertujuan meningkatkan standar hidup, meningkatkan pengetahuan serta kompetensi masyarakat, sekaligus memberi dampak sinergis pada penyaluran dana PK.

Realisasi penyaluran dana BL BRI Peduli yang dilaksanakan selama tahun 2013, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Sektor Usaha	Realisasi 2013	% Komposisi BRI Peduli
	Dalam Rp Miliar	
Sarana Umum	12,27	8,76%
Bencana Alam	3,97	2,83%
Pendidikan/Pelatihan	73,28	52,29%
Peningkatan Kesehatan	20,46	14,60%
Sarana Ibadah	23,12	16,50%
Pelestarian Alam	3,90	2,79%
Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan	3,13	2,23%
Total	140,12	100%

BRI Peduli Pendidikan

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan program CSR, Program BRI Peduli Pendidikan ditekankan pada pola pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi serta ditujukan sebagai stimulus untuk mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha yang kreatif dan inovatif di masyarakat. Program ini di implementasikan melalui BRI Studentpreneur Program bekerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia dan pelatihan-pelatihan pengembangan usaha UMKM kepada masyarakat bekerjasama dengan LSM atau instansi pemerintah.

Pada tahun 2013, untuk memperluas cakupan program pengembangan jiwa pengusaha, BRI juga menggandeng pondok pesantren melaksanakan program pemberdayaan ekonomi santri, melalui program BRI Santripreneur.

Tanggung Jawab Terhadap Komunitas



BRI Gandeng Pesantren Sukseskan Santripreneur

Salah satu cara untuk mengembangkan dan memperkuat usaha UMKM adalah berupaya menciptakan dan membina pengusaha-pengusaha baru melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat pemberdayaan ekonomi. Setelah pada tahun-tahun sebelumnya, BRI konsisten menggelar BRI Studentpreneur Program, pada tahun 2013 BRI mencoba memperluas cakupan program ke lingkungan pesantren melalui program Santripreneur.

Program Santripreneur ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan menumbuhkan minat usaha di kalangan santri. Program Santripreneur diimplementasikan dalam bentuk pelatihan peternakan bagi santri-santri di pondok pesantren.

Selain memberi pelatihan peternakan, BRI juga memberi bantuan hewan ternak kambing ke pondok pesantren tersebut.

Untuk langkah awal, Pondok pesantren sebagai *pilot project* adalah Ponpes Al Bayan, Lebak, Banten. Di pesantren ini BRI memberikan pelatihan dan hibah 50 ekor kambing. Kambing tersebut adalah modal awal peternakan kambing di pondok pesantren Al Bayan. Santri yang mendapat pelatihan dari program Santripreneur diharapkan dapat menjadi pioner dalam pengembangan peternakan kambing di pondok pesantren. Pondok pesantren Al Bayan sendiri mengirimkan sekitar 20an santri untuk mendapat pelatihan beternak kambing. Mereka yang akan membagi ilmu pada santri lain tentang bagaimana beternak dan mengolah kotoran menjadi pupuk organik.

BRI Peduli Sarana Umum

BRI memberikan bantuan dengan memperbaiki dan membangun prasarana/sarana umum yang diperlukan oleh masyarakat diantaranya dalam bentuk : pembangunan sumur bor untuk daerah kekeringan di Purworejo, pembangunan *agrobusiness development center* Pasir Sarongge kerjasama IPB, penyediaan perlengkapan pusat kuliner Blog G Tanah Abang, perbaikan jalan desa di desa Pesawahan Banyumas, dan sebagainya. Total penyaluran BRI Peduli untuk sarana umum di tahun 2013 adalah sebesar Rp12,27 miliar.

BRI Peduli Bencana Alam

Sebagai bentuk kepedulian BRI dalam membantu korban bencana alam, BRI memberikan bantuan tanggap darurat melalui unit kerja terdekat di lokasi terjadinya bencana. Di tahun 2013, BRI menyalurkan bantuan sebesar Rp 3,97 miliar untuk penanggulangan bencana alam. Areal bencana alam yang mendapatkan bantuan meliputi: Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara; gempa di Kab Bener Meriah, NAD; korban banjir di sekitar Jakarta, korban topan Haiyan di Filipina. Bantuan yang disalurkan meliputi pengadaan bahan makanan, kebutuhan sandang, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan darurat lainnya.

BRI Peduli Kesehatan

Merupakan salah satu wujud kepedulian BRI dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Total dana yang disalurkan di tahun 2013 untuk kegiatan menyangkut kesehatan adalah sebesar Rp 20,46 miliar dalam berbagai bentuk kegiatan, meliputi: Pengembangan Rumah Sehat Amira 2, program operasi Katarak gratis, Khitanan masal, pelaksanaan operasi mulut dan bibir sumbing di Pontianak dan kegiatan Donor Darah pekerja BRI, serta berbagai kegiatan lainnya.

Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

BRI Peduli Sarana Ibadah

Dalam rangka memberikan kenyamanan beribadah dan meningkatkan kualitas spiritual masyarakat di sekitar unit kerja, BRI berusaha membenahi dan memberikan bantuan pembangunan dan perbaikan sarana ibadah seperti mesjid dan mushola serta kegiatan peribadatan lainnya. Total bantuan yang disalurkan melalui BRI Peduli Sarana Ibadah di tahun 2013 adalah sebesar Rp 23,12 miliar yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas peribadatan.

BRI Peduli Pelestarian Alam

Kegiatan yang dilakukan BRI dalam memelihara lingkungan dan kualitas udara diwujudkan dalam bentuk realisasi berbagai kegiatan, meliputi: peralatan pembersihan danau dari eceng gondok, realisasi program Hutan Sekolah, di 9 provinsi dan 27 sekolah partisipasi pada kegiatan pelestarian dan penanaman hutan mangrove dikawasan pantai utara Jawa. Dana yang telah disalurkan untuk kegiatan ini di tahun 2013 adalah sebesar Rp 3,90 miliar.

BRI Peduli Bantuan Sosial dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

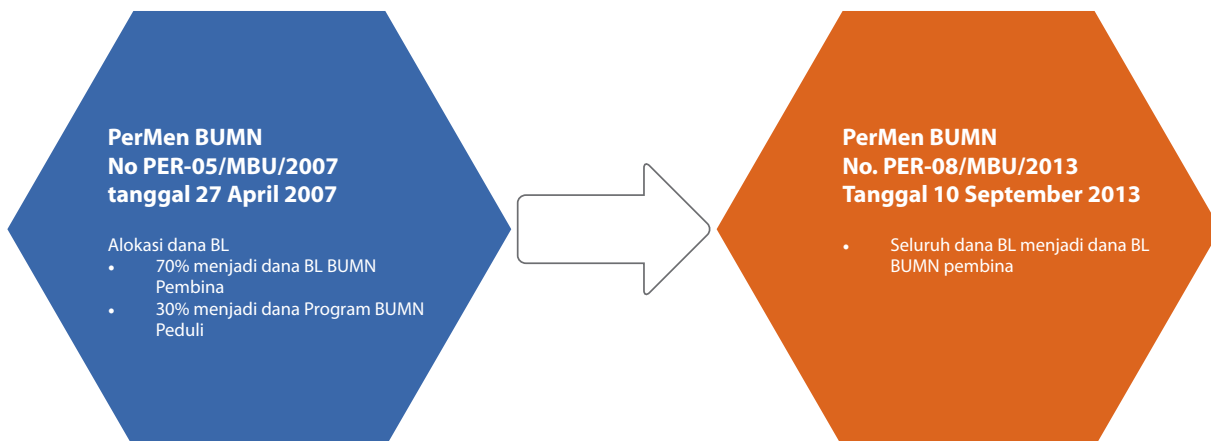
Sektor ini merupakan yang sektor baru masuk dalam Bina Lingkungan pada bulan September 2013, sesuai dengan Permen BUMN Per No. PER.05/MBU/2013, tanggal 1 Mei 2013. Realisasi di sektor ini diimplementasikan dalam bentuk pembagian sembako gratis dan santunan sosial yang dilaksanakan di beberapa titik diantaranya :

- Bantuan 20.000 Paket Sembako gratis pada bulan Ramadhan di 15 titik daerah pesisir se Jabodetabek
- Pembagian 4000 paket Sembako Gratis dalam kegiatan BUMN Berbagi Sembako di Gorontalo dan Kalimantan Tengah.
- Bantuan santunan yatim piatu Yayasan Misbach Chunur, Cimahi
- Bantuan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Cimande Melalui Kelompok Tani
- Bantuan santunan yatim piatu dan kaum dhuafa Yayasan Dompot Umat Berdikari

Total bantuan yang disalurkan melalui BRI Peduli Bansos pengentasan kemiskinan adalah sebesar Rp. 3,13 miliar.

Dampak Perubahan Aturan

Dengan adanya perubahan aturan Peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012 dan akhirnya diperbaiki dengan aturan Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka telah dilaksanakan serah terima pengelolaan dana PKBL sesuai ketentuan tersebut.



Tanggung Jawab Terhadap Konsumen / Nasabah

Konsumen atau nasabah bank merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berperan paling besar dalam menjamin keberlangsungan usaha BRI dalam jangka panjang. Dengan perannya yang sentral dalam menjamin ketersediaan dana perbankan (melalui tabungan, deposito dan lain-lain) maupun menjamin pertumbuhan bisnis penyaluran dana (melalui berbagai produk kredit) dan jasa perbankan, maka kepercayaan serta kepuasan nasabah merupakan elemen yang harus dikelola dengan baik.

Untuk mengelola kepercayaan dan kepuasan nasabah tersebut, BRI merealisasikan berbagai program, mencakup menyediakan ragam produk dan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan, berkualitas, fitur produk yang juga beragam, kemudahan akses melalui penyediaan jaringan layanan konvensional maupun e-channel, record transaksi yang akurat, layanan real time on-line disertai penyediaan layanan konsumen yakni terutama penyelesaian pengaduan nasabah.

Uraian mengenai seluruh program dimaksud ada pada bagian "Produk dan Jasa", "Tinjauan Operasional-Pemasaran", dan "Diskusi dan Analisis Manajemen - Tinjauan Bisnis".

Kebijakan Pelayanan Kepada Nasabah

Untuk menyelesaikan pengaduan nasabah, BRI sejak tahun 2010 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank BRI No. S.46 –DIR/LYN/07/2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kebijakan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut diterapkan dengan konsisten melalui serangkaian langkah lanjutan meliputi:

- Penetapan service level agreement penyelesaian pengaduan nasabah seperti diatur dalam Surat Keputusan Bank BRI No. S.35 –DIR/LYN/05/2013 tentang Kewenangan User dan SLA Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

- Penyelesaian melalui Lembaga Mediasi Perbankan bagi nasabah yang masih belum puas dengan penyelesaian pengaduan yang dilakukan BRI, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank BRI No. S. 49 –DIR/OPS/10/2006 tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa BRI Dengan Nasabah Melalui Lembaga Mediasi Perbankan.
- Penetapan fungsi-fungsi penyelesaian pengaduan nasabah, meliputi: Fungsi Penerimaan Pengaduan, Fungsi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan, Fungsi Pemantauan Pengaduan dan Fungsi Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.

Selain pemantapan prosedur penyelesaian pengaduan, sebagai upaya pemberian layanan yang berkualitas dan bertanggung-jawab kepada para nasabahnya, BRI menetapkan kebijakan layanan sebagaimana digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

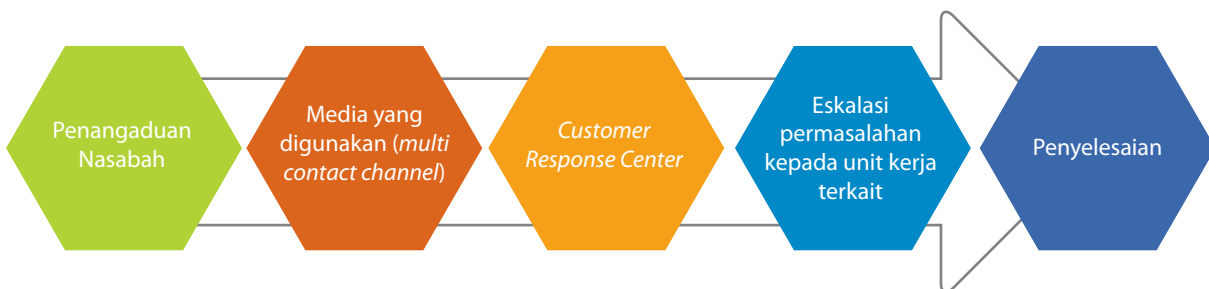


Tanggung Jawab Terhadap Konsumen / Nasabah

Implementasi Kebijakan

Untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan kepercayaan nasabah, sebagai bentuk implementasi kebijakan peningkatan kualitas layanan tersebut, BRI melaksanakan berbagai program meliputi:

- Peningkatan aksesibilitas jaringan kerja, baik jaringan kerja konvensional maupun e-channel, yakni:
 - Penambahan 756 kantor, 4.000 ATM dan 41.221 EDC (selengkapnya ada pada uraian “Perluasan jaringan”)
 - Investasi pada infrastruktur teknologi perbankan yang dimiliki BRI. (Selengkapnya ada pada uraian “Teknologi Informasi”)
- Peningkatan aksesibilitas informasi produk dan layanan BRI, yakni:
 - Mengembangkan *website* BRI yaitu www.bri.co.id, dimana nasabah BRI dapat menemukan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap.
 - *Contact Center* BRI.
Melalui *contact center* BRI, nasabah dapat memperoleh informasi mengenai BRI, baik berupa informasi produk, program pemasaran, layanan terbaru BRI ataupun menyampaikan keluhan terkait layanan BRI
 - *Mobile Banking* BRI
Melalui layanan terbaru ini, nasabah dengan mudah dapat mengakses layanan perbankan BRI, mendapatkan informasi mengenai produk serta informasi mengenai jaringan ATM BRI terdekat secara real time on-line.
- Peningkatan kualitas layanan melalui implementasi *Service Level Agreement* (SLA) dalam penyelesaian pengaduan nasabah, yakni:
 - Implementasi aplikasi *Complaint Handling System* (CHS) yang telah selesai dilaksanakan di seluruh unit kerja.
 - Sosialisasi kebijakan SLA dalam penyelesaian pengaduan nasabah.
 - Meningkatkan akses pengaduan melalui berbagai saluran (*multi channel BRI*), yakni:
 1. Melalui Customer Service di seluruh Unit Kerja Operasional BRI
 2. Telpon melalui 14017, 500017, 021-57987400
 3. Premium Call melalui 08001017017, 021-5758899, dan 021-5751234
 4. Website www.bri.co.id
 5. Email di : kartu_kredit@bri.co.id dan contactcenter@bri.co.id
 6. Internet banking di : <https://ib.bri.co.id>
 7. Media sosial twitter di @kontak_bri
 8. Media sosial Facebook di BANK BRI Official
 9. Media sosial Youtube di BANK BRI
 10. Surat, dengan dialamatkan kepada : unit kerja BRI terdekat; atau Bagian Layanan Contact Center Kantor Pusat
 11. Media Cetak dan elektronik
 12. Tatap muka, melalui Customer Service BRI pada unit kerja BRI terdekat.
 - Sosialisasi Prosedur Pengaduan Nasabah, yakni:



Tanggung Jawab Terhadap Konsumen / Nasabah

- Pelaksanaan evaluasi atas jumlah penyelesaian pengaduan, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Laporan tingkat penyelesaian pengaduan nasabah				
Periode	Pengaduan Masuk	Pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan yang dinyatakan selesai	Pengaduan yang dalam proses
2011	173.728	173.728	170.263	3.465
2012	168.672	168.672	165.192	3.482
Triwulan I - 2013	35.862	35.862	32.606	3.256
Triwulan II - 2013	35.943	35.943	33.290	2.653
Triwulan III - 2013	34.562	34.562	30.859	3.703
Triwulan IV - 2013	35.942	35.942	34.224	1.718

* Pengaduan yang dalam proses akan ditindaklanjuti pada periode selanjutnya

- Pelaksanaan survey standar layanan BRI untuk mendapatkan *feed-back* perbaikan tingkat layanan terhadap nasabah. Survey dilakukan oleh pihak independen (Marketing Research Indonesia/MRI), dengan hasil sebagai berikut.

Aspek yang dinilai	2012	2013
Phone Banking Officer	82,21	92,99
Phone Banking IVR	87,50	90,19

Selain indeks tingkat layanan yang menunjukkan peningkatan tersebut diatas, BRI juga mendapatkan rekomendasi perbaikan layanan pada berbagai aspek yang relevan untuk ditindak lanjuti di tahun-tahun mendatang.

Sertifikasi Tingkat Layanan

Layanan Contact Center BRI telah mendapat sertifikasi ISO 9001:2008 yang diberikan oleh Verification New Zealand Limited yang berlaku sejak tanggal 5 Desember 2011 dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2014

Dampak Keuangan

Investasi modal yang dilakukan BRI selama tahun 2013, yang dimaksudkan untuk semakin meningkatkan kualitas layanan dan menambah jaringan kerja BRI adalah sebesar Rp1,95 triliun, (lihat kembali uraian belanja barang modal pada "Tinjauan Keuangan".



406

Informasi Perusahaan

408 Profil Dewan Komisaris

412 Profil Direksi

418 Profil Komite Dewan Komisaris

420 Profil Sekretaris Perusahaan

420 Profil Kepala Audit Intern

421 Daftar Pejabat Senior

423 Alamat Kantor

423 Unit Kerja

425 Alamat Kontak Bagi Pembaca



Informasi Perusahaan

Profil Dewan Komisaris



Bunasor Sanim
Komisaris Utama /
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Memulai periode jabatan pertama pada tanggal 19 Mei 2005, sebagai Komisaris Independen, kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI sejak 30 Mei 2006. Diangkat kembali sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI sejak 28 April 2011.

Saat ini sebagai Dosen tetap untuk Program Sarjana dan Pasca Sarjana di Institut Pertanian Bogor. Aktif dalam berbagai organisasi antara lain Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Anggota Dewan Penasihat Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Anggota Dewan Penasihat *International Center for Analysis of Finance and Economic* (InterCAFE), Anggota Penasihat Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Ketua 1 Dewan

Pupuk Indonesia (DPI) dan Ketua 1 Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA).

Pernah menjabat sebagai *Consortium Coordinator on Agriculture and Natural Resources* dari SEARCA-SEAMEO (1989-2002) dan *Senior Scientist Partnership*, Kerjasama IPB-University of Gottingen.

Meraih gelar Insinyur dalam bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1972), gelar M.Sc bidang *Agricultural Economics* dari *University of the Philippines Los Banos* (1982), dan Ph.D. dalam bidang *Resource Economics* dari *University of the Philippines Los Banos* (1986). Melaksanakan *Post Doctoral Programme* di *Harvard Institute of International Development* (HIID), *Harvard University, Cambridge, MA, USA* (Juni-Juli 1994).



Mustafa Abubakar
Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, mulai menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI sejak 28 Maret 2012.

Saat ini aktif dalam berbagai organisasi antara lain sebagai Anggota Dewan Penasihat Perbankan Nasional (PERBANAS), Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Ketua Dewan Penasihat Persatuan Wredhatama Republik Indonesia (PWRI), Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL), dan Anggota Dewan Pembina Yayasan Leuser Internasional (YLI).

Pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (1999-2001), Inspektur Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan (2001-2005), Pj. Gubernur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (2005-2007), Direktur

Utama Perum Bulog (2007-2009), Menteri Negara BUMN (2009-2011), Konsultan Proyek Bank Dunia (Rural Credit Project) di BRI (1979-1985), Konsultan Proyek Bank Dunia (SEDP) di Bank Indonesia (1985-1989) dan pernah aktif dalam berbagai organisasi antara lain sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (DEMA-IPB) tahun 1975-1976, Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) pada tahun 1996-1999, Ketua Umum Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (FORBES-APIP) pada tahun 2003-2008.

Meraih gelar Insinyur dalam bidang Manajemen Sumber Daya Perairan dari Institut Pertanian Bogor (1977), gelar M.Si bidang Teknologi Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (2002), dan Doktor bidang Teknologi Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (2004).

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Mulai Diangkat sebagai Komisaris BRI sejak 28 April 2011.

Saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Kajian Strategis dan Guru Besar Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor, Anggota Komite Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) (2007), Komisaris Utama PT. PNM (2008-2011), Sekjen PERHEPI (2007-2011), Anggota Forum Masyarakat Statistik (2007-2009), Sekjen *Asia Pacific Agricultural Policy Forum* (2007-2009), dan Direktur Akademik Program Pasca Sarjana

Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (2005-2008). Meraih gelar Insinyur dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (1986), gelar M.Ec bidang *Agricultural Economics* dari *University of New England, Armidale Australia* (1991), dan Ph.D. dalam bidang *Economics* dari *Lincoln University New Zealand* (2003).



Hermanto Siregar
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Diangkat sebagai Komisaris BRI sejak 28 Maret 2012.

Saat ini juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan Sekretaris Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (2004-2006), Direktur Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (2006-2008), dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (2008-2011).

Meraih gelar Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980), gelar Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1987), dan *Master of Public Management* dari *Carnegie Mellon University, Pittsburgh* (1998).



Vincentius Sonny Loho
Komisaris

Profil Dewan Komisaris



Heru Lelono
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Diangkat sebagai Komisaris BRI sejak 20 Mei 2010.

Saat ini juga menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2004-sekarang).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT. Bukit Jaya Abadi Surabaya (1993-1995) dan Managing Director PT. Telesera (Rajawali Corp.) (1995-1998).

Meraih gelar Sarjana Muda Teknik Arsitektur dari Universitas Katolik Soegijapranata (1983).



Aviliani
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Memulai periode pertama menjabat sebagai Komisaris Independen BRI pada bulan Mei 2005. Diangkat kembali untuk periode jabatan kedua sebagai Komisaris Independen BRI sejak 20 Mei 2010.

Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Ketua *Indonesia Society of Independent Commissioners* (ISICOM), Pengurus Perbanas Pusat, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Pengurus Bidang Keuangan dan Investasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Penasihat KADIN Bidang Hubungan Kerjasama Indonesia – Singapura, Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia, Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Dosen di *Perbanas Institute*. Sebelumnya pernah menjabat

sebagai Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan SDM Perbanas Institute (2000-2002), Sekretaris Umum Konsorsium Lembaga Pengabdian PTS se-Indonesia (2000-2003), Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Paramadina (2002-2005), Dosen bidang Ilmu Manajemen Perbanas Institute dan beberapa Perguruan Tinggi lain (1986-2005), *Direktur Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) (2004-2005).

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, Jakarta (1985), gelar Master bidang Administrasi Niaga dari Universitas Indonesia (1995), dan gelar Doktor bidang Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor (2012).

Profil Dewan Komisaris

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI sejak 28 Maret 2012.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputy Direktur Hukum Bank Indonesia (2001-2005), Direktur Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia (2005-2008), dan Direktur Hukum Bank Indonesia (2008-2012).

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta (1982) dan gelar MBA bidang *Finance* dari *University of Adelaide, Australia* (1995).



Ahmad Fuad
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI sejak 20 Mei 2010.

Saat ini aktif dalam berbagai organisasi antara lain Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Ketua Kwartir Nasional Pramuka. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan (1995-2002) dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (2004-2009).

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti Jakarta (1989), gelar Magister Pembangunan Masyarakat dari Universitas Indonesia Jakarta (1999), dan gelar Doktor bidang Teknik Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (2007).



Adhyaksa Dault
Komisaris Independen

Profil Direksi



Sofyan Basir
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama untuk periode pertama sejak tanggal 17 Mei 2005 dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 20 Mei 2010.

Sebelum bergabung dengan BRI, menjabat sebagai Direktur Utama Bank Bukopin. Karir perbankan dimulai pada tahun 1981 di Bank Duta, pada tahun 1986 bergabung dengan Bank Bukopin dan telah menduduki beberapa jabatan manajerial di Bank Bukopin termasuk Direktur Komersial, *Group Head Line of Business*, dan Pemimpin Cabang di beberapa kota besar Indonesia.

Meraih gelar Diploma dari STAK Trisakti, Jakarta (1980), gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Ganesha, Jakarta (2010), dan gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Trisakti, Jakarta (2012). Telah mengikuti berbagai

pendidikan serta pelatihan di bidang perbankan baik di dalam maupun luar negeri, diantaranya CEO *Networking*, IDX (Denpasar); Seminar *Risk Management Certification Refreshment Program*, BARA (Frankfurt); *Market Risk Management Refresher*, ABN Amro (Swiss); Eksekutif Manajemen Risiko, ABN Amro (Denpasar); *Islamic Finance Forum* (Swiss); Seminar *Business Continuity Planning*, *Ernst & Young* (Jakarta); dan SESPIBANK (Jakarta).



Sarwono Sudarto
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur untuk periode pertama sejak 30 Mei 2006, dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 April 2011.

Memulai karir di BRI sejak tahun 1976 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial diantaranya Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Renstra, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Bisnis Ritel, Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan, Pemimpin Cabang Palembang Sriwijaya, Guest Officer Sanwa International Finance Ltd. Hongkong, Treasury Manager dan Chief Dealer BRI Finance Ltd. Hongkong.

Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Diponegoro, Semarang (1975), gelar MBA dari *Tulane University*,

Amerika Serikat (1987), dan gelar Doktor dari Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (2011). Telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan antara lain seperti Pasar Modal (Tokyo); Sertifikasi Manajemen Risiko, BSMR (Singapura); sebagai Asesor Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko dari BNSP; *5th World Islamic Economic Forum*, *Risk Management Certification Refreshment Program*; LEMHANNAS RI, SESPIBANK, dan *Organization Management* (Jakarta). Mewakili BRI antara lain sebagai pembicara tentang *microfinance* di Thailand dan *APEC Meeting* di Chile (2004) serta dalam berbagai *roadshow* maupun *conference* di London, Hong Kong serta Singapura.

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mulai menjabat Direktur BRI sejak tanggal 20 Mei 2010.

Memulai karir perbankan di Bank BNI sejak tahun 1984 dan pernah menduduki beberapa jabatan manajerial, diantaranya adalah Direktur Bisnis Usaha Kecil Menengah dan Syariah, Direktur Korporasi, Direktur Konsumer, Pemimpin Divisi Pengelolaan Bisnis Personal, Pemimpin Divisi Pemasaran Ritel, Pemimpin Kantor Wilayah Bandung, dan Pemimpin Kantor Wilayah Manado.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1982) dan *Master of Business Management* dari *Asian Institute of Management*, Makati, Filipina (1992). Telah mengikuti beberapa pelatihan,

kursus dan seminar perbankan termasuk *Executive International Conference, Growing with Confidence - BARa* (London); *Risk Management in Retail Banking - BSMR* (Belanda); *Executive Training for Director - The Wharton School of The University of Pennsylvania* (Amerika Serikat); *Bank Indonesia's Executive Risk Management Certification - BSMR* (Singapura); *Retail Banking Conference - LAFFERTY* (Singapura); *Asian Bankers Surveyor Program - Bank of New York* (New York); *SESPIBANK - IBI* (Jakarta); *Business Bank & Financial Service Conference - LAFFERTY* (Singapura), dan *Human Resources Banking Conference - LAFFERTY* (Singapura). Mewakili BRI dalam berbagai *roadshow* maupun *conference* di Amerika Serikat, Eropa dan Asia.



Achmad Baiquni
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Memulai jabatan periode pertama sebagai Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sejak 30 Mei 2006, kemudian menjabat sebagai Direktur Bisnis Komersial sejak 12 Oktober 2009.

Terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 April 2011. Memulai karir di BRI sejak tahun 1983 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial diantaranya adalah Kepala Divisi Kredit Menengah, Kepala Divisi Agribisnis, Pemimpin Wilayah Denpasar, dan Pemimpin Wilayah Jakarta.

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (1981) dan gelar MBA dari University of New Orleans, Amerika Serikat (1991). Mewakili BRI dalam

berbagai organisasi seperti APRACA, *UN Advisors Group on Inclusive Financial Sectors dan Micro Finance Network*. Pembicara berbagai seminar internasional UMKM, antara lain *Asian Banking Forum* (Jakarta); *APEC SME Working Group* (Bali); *Financial Technology Conference* (Singapura); *Microfinance Sustainability*, APRACA (Kunming, China); *APO Forum, Micro Banking and Risk Management Workshop* (Beijing); *Asia Pacific Regional Microcredit Summit* (Bali); *Round Table on the Impact of the Global Crisis on SMEs* (Turin, Italia); dan *International Microfinance Conference 2012* (Yogyakarta). Mewakili BRI dalam beberapa *Investor Conference* yang berlangsung di dalam maupun luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa dan Asia.



Sulaiman Arif Arianto
Direktur Bisnis Komersial

Profil Direksi



A. Toni Soetirto
Direktur Bisnis Konsumer

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Memulai periode pertama jabatan Direktur BRI sejak 30 Mei 2006, dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 April 2011.

Memulai karir perbankan bersama Bank Duta pada tahun 1983, kemudian tahun 1985 bergabung dengan Bank Bukopin. Sebelumnya telah menduduki berbagai jabatan manajerial seperti Direktur Bisnis Komersial, Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan *Group Head Credit and Marketing Financial Institutions*.

Pada tahun 1981, meraih gelar Sarjana Pertanian Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Telah mengikuti beberapa pelatihan, kursus, dan seminar perbankan seperti CRM and *Intelligence Banking*

EFMA (Barcelona); *The Future Face of Marketing* (Australia); *Self-Service Banking*, EFMA (Barcelona); *The Branch of the future*, EFMA (Barcelona); *Structured Trade and Export Finance in Asia Conference*, *Euromoney*, *JP Morgan and Citigroup* (Singapura); *The Strategic Board*, *Australian Institute of Company Director* (Australia); *Comparative Study for Trade Financing and Risk Management – Deutsche Bank* (Jerman); *Certified Wealth Manager - Erasmus Heuis Netherlands* (Belanda); *Risk Management Certification Refreshment Program* (Frankfurt); *World Hajj & Umrah Convention 2013* (London); dan *Bancassurance Distribution and Channel Management* (Hong Kong).



Lenny Sugihat
Direktur Pengendalian Risiko Kredit

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur BRI pada periode pertama sejak 30 Mei 2006, dan terpilih kembali untuk periode kedua pada tanggal 28 April 2011.

Karir perbankan dimulai bersama BRI sejak tahun 1981 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial antara lain sebagai Kepala Divisi Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Agribisnis, dan Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Meraih gelar Sarjana di bidang perikanan dari Institut Pertanian Bogor (1979) dan MBA dari *University of Houston, Texas*, Amerika Serikat (1993). Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan antara lain *Loan Syndication* (Hong Kong); *Credit Risk Management BRI & Citibank*

(Jakarta); *The Advanced Management Program for Overseas Bankers* (Pennsylvania, AS); *Problem Loan and Loan Syndication Training* (Sydney); *SESPIBANK* (Jakarta); *Seminar World Bank "Rethinking The East Asia Miracle"* (Jakarta); *Seminar "Bank Risk Management and Basel II Capital Requirements"* (Jakarta); *World Bank/IMF 2002 Annual Meeting* (Washington, USA); *Strategic Management in Banking Programme* (Fontainebleau, Perancis); *33rd ASEAN Banking Council Meeting* (Bali); *Seminar "Program Management Office"* (Jakarta); *The World Bank Conference "Role of State-Owned Bank"* (Washington, USA); *Sertifikasi Manajemen Risiko – BSMR* (Bali); *Seminar BSMR "Market Risk Management Refresher"* (Bali); dan *Pelatihan Uji Kompetensi* oleh BNSP sebagai Asesor Kompetensi (Jakarta).

Profil Direksi

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menjadi Direktur BRI sejak 28 April 2011.

Telah menduduki jabatan manajerial di BRI seperti Kepala Divisi MSDM, Pemimpin Wilayah BRI Palembang, Kepala Divisi Administrasi Kredit, dan Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1984) dan gelar MBA dari *St. Louis University*, USA (1994). Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan diantaranya *Pro*

Active Operational Risk Management (Jakarta); *SESPIBANK* (Jakarta); *Worldclass Leadership Mentoring Coaching* (Jakarta); *Credit Appraisal for Small Medium Individu* (Tokyo); *The Asian Bankir Summit* (Singapura); *International Certified Wealth Manager Europe Class* (Rotterdam); *Seminar Risk Management Certification Refreshment Program* (Frankfurt); *Improving Compliance Competency* (Jakarta); *The Banking Technology Summit* (Praha); *World Hajj & Umrah Convention* (London); dan *Bancassurance Distribution & Channel Management* (Hong Kong).



Randi Anto
Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur BRI sejak 5 September 2007 dan diangkat kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 Maret 2012.

Memulai karir perbankan di BRI sejak tahun 1983 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial seperti Pemimpin Wilayah BRI Jakarta, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Wakil Pemimpin Wilayah Jakarta, dan Pemimpin Cabang di beberapa kota besar di Indonesia.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta (1982) dan Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2001). Saat ini sedang menyelesaikan Disertasi dengan kekhususan Manajemen Bisnis Program Doktor Ilmu

Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan seperti *Customer Relationship Management* (Paris); *Seminar The Branch of the Future* (Barcelona); *Seminar The 5th Annual Asia Pacific Mobile Payments* (Bangkok); *SESPIBANK* (Jakarta); Pendidikan Pengembangan Eksekutif Manajemen (Jakarta); *Seminar Marketing* (Sydney); *Seminar Delivery Channel Strategy The Branch & Beyond* (Kuala Lumpur); *Seminar Branch of the Future Revamping the Branch for the Technology Driven World* (London); *Seminar 40th EFMA Congress Multichannel Coordination and Integration* (Barcelona); *Seminar 41st EFMA Congress Multidistribution* (Paris); dan *BARa Executive International Conference* (London).



Suprajarto
Direktur Jaringan dan Layanan

Profil Direksi



Asmawi Syam
Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur BRI sejak 5 September 2007, dan diangkat kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 Maret 2012.

Memulai karir perbankan di BRI sejak tahun 1980 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial diantaranya adalah Kepala Divisi Bisnis Umum, Kepala Divisi *Consumer Banking*, Pemimpin Wilayah Bandung, dan Pemimpin Wilayah Denpasar.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Makassar (1979) dan Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2003). Telah mengikuti berbagai

pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan seperti *Risk Management Certification Refreshment Program - BARa* (London); *From State Owned Enterprise to World Class Competitors Creative Innovative and State Owned Firms* (Filipina); *4th World Islamic Economic Forum* (Kuwait); *Card and Payment - European Financial Management Marketing EFMA* (Paris); Restrukturisasi & Peningkatan Kinerja BUMN (Jakarta); *Strategic Leadership – Mastercard International* (Bangkok); *World Congress on IT Information (Adelaide)*; *Asset and Liability Management, Credit Risk Management & International Banking* (Brussel); dan SESPIBANK (Jakarta).



Djarot Kusumayakti
Direktur Bisnis Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Diangkat sebagai Direktur BRI sejak tanggal 20 Mei 2010.

Memulai karir perbankan di BRI sejak tahun 1983 dan telah menduduki jabatan manajerial seperti Komisaris Utama PT. BTMU BRI Finance, Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Jakarta, dan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Semarang, dan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Padang.

Meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi Perusahaan dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1982) dan gelar Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Airlangga, Surabaya (2000). Telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan diantaranya *Senior Banker Development Program - Bank of America* (Jakarta); *Credit Risk Management Training* (Semarang); SESPIBANK (Jakarta); Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan (Jakarta); dan *Financial Lecture – Bisnis Indonesia* (Jakarta). Mewakili BRI antara lain sebagai pembicara tentang *Microfinance dalam The Key Success on Sustainable Microfinance Program di Microfinance Network (MFN) 17th Meeting Conference Riviera Maya di Cancun* (Meksiko), dan *The Role of Microsaving on Sustainable Microfinancing di Global Microcredit Summit di Valladolid* (Spanyol).

Profil Direksi

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur BRI sejak tanggal 28 September 2011. Sebelumnya pernah menjabat Direktur Usaha Niaga Farmasi, Kantor Meneg. PBUMN & BKPM, Direktur Keuangan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Asisten Deputi bidang Usaha Perbankan Kementerian BUMN, dan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Meraih gelar Sarjana Hukum Ekonomi/Bisnis dari Universitas Indonesia (1985) dan gelar *Magister Management* dari *Ecole Superieure, Lyon, Prancis* (1989). Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diantaranya *Property Appraisal* (Taiwan); *Urban Finance and Taxation* (Taiwan); Manajemen Keuangan oleh

Institute International d'Administration Public (Paris); *Strategic Planning* (Jakarta); Lokakarya Privatisasi dan *Corporate Governance* BUMN (Jakarta); *International Conference Bara Risk Forum 2010* (Bali); *Executive Risk Management Refresher Program* (Paris); Seminar *Sharpening Leadership for Senior Executive* (Jakarta); *Global Islamic Finance Forum* (Kuala Lumpur); dan *International Seminar on Housing Finance Management* (Bali).



Gatot Mardiwasisito

Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia

Profil Komite Dewan Komisaris

Profil Anggota Komite Audit

H.C. Royke Singgih

Umur 53 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak Oktober 2005.

Merupakan akuntan terdaftar. Sebelumnya berkarir di PT Bank IFI Jakarta, PT PAN Indonesia Bank Jakarta, dan PT Krakatau Steel Cilegon.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1986), gelar Magister Manajemen bidang Keuangan dan Perbankan dari Universitas Indonesia, Jakarta (2000), Sertifikat Khusus bidang Manajemen Strategis Program Pra-Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta (2004), dan gelar Doktor bidang Manajemen Bisnis dari Institut Pertanian Bogor (2012).

Dedi Budiman Hakim

Umur, 49 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak November 2005.

Saat ini menjabat sebagai staf pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor dan peneliti di *Center for Applied Economics and Finance* IPB, Bogor.

Memperoleh gelar Sarjana bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bogor (1988), gelar Magister bidang Ekonomi Pertanian dari *Massey University Palmerston North*, Selandia Baru (1994), dan gelar Doktor bidang Ekonomi Pertanian dari *Georg-August-Universitaet Goettingen*, Jerman (2004).

Syahrir Nasution

Umur 61 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak November 2008.

Merupakan akuntan terdaftar. Sebelumnya berkarir di BPKP, Jakarta s/d 1990, berkarir di BRI sejak 1990-2008 dalam bidang audit dan terakhir menjabat sebagai Inspektur Kantor Inspeksi BRI Jakarta.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan, Departemen Keuangan, Jakarta (1981).

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Ganefi

Umur 50 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak Juni 2012.

Berkarir di BRI sejak 1989 dalam berbagai posisi, saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BRI.

Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Fiskal dari FISIP Universitas Indonesia, Jakarta (1989), dan gelar *Master of Business dari Monash University*, Australia (1994).

Asep Ikhsan Iskandar

Umur 41 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak November 2009.

Berkarir di BRI sejak 1998 dalam berbagai posisi, saat ini menjabat sebagai Staf di Divisi Operasional Sumber Daya Manusia BRI.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Pasundan Bandung (1996).

Profil Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Pamuji Gesang Raharjo

Umur 45 tahun. Aktif kembali sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko BRI sejak bulan September 2011.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko BRI untuk periode 2007-2010. Pernah berkarir di Bank BNI, Bank Danahutama, Bank Internasional Indonesia dalam berbagai posisi, dan di Perum Pegadaian sebagai *General Manager* Manajemen Risiko (Juni 2010 - Maret 2011). Aktif sebagai pengajar di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi).

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta (1996), dan gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Risiko dari Universitas Indonesia, Jakarta (2003). Kandidat Doktor bidang Manajemen dan Bisnis dari Institut Pertanian Bogor.

Ridwan Darmawan Ayub

Umur 51 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko sejak 2006.

Sebelumnya berkarir di Bank Internasional Indonesia dalam berbagai posisi.

Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1985), dan gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Mercu Buana, Jakarta (2008).

I Gde Yadnya Kusuma

Umur 59 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko sejak Juli 2010.

Sebelumnya berkarir di Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Direktur Riset dan Analisis.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta (1993) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (2006).

Profil Sekretaris Perusahaan dan Kepala Audit Intern

Profil Sekretaris Perusahaan

Muhamad Ali

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Memimpin Divisi Sekretariat Perusahaan sejak 1 Januari 2010

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nokep. 20-DIR/SDM/12/2009 tanggal 14 Januari 2010. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 1987, dan memulai karir di BRI sejak 2 Juni 1988. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan pada tahun 2008 dan Kepala Biro Direksi pada tahun 2009.

Pengangkatannya sebagai Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi BRI dan telah dilaporkan ke Bank Indonesia guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum serta dilaporkan ke Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No: B.02-SKP/DHI/01/2010 tanggal 27 Januari 2010 mengenai Penggantian Sekretaris Perusahaan.

Profil Kepala Audit Intern

Ali Mudin

Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun. Menjabat sebagai Kepala Audit Intern BRI sejak bulan September 2008.

Berkarir di BRI sejak 1990 dalam berbagai posisi, diantaranya Kepala Divisi Logistik, Pemimpin Wilayah Aceh, Kepala Divisi Hukum dan Pimpinan Cabang BRI di berbagai wilayah. Sejak tahun 2006 mendapatkan berbagai penugasan, seperti Komisariss di PT Beringin Karya Sejahtera (2006-2009) ataupun sebagai Komisariss Utama di PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera (2009 – Sekarang).

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pajajaran Bandung (1981), dan Magister Manajemen bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Padjadjaran Bandung (2006). Telah mengikuti berbagai training dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri seperti *European Conference Amsterdam: Internal Audit A'la Carte* (2012), *Intl Conference: Auditing through Leadership*, Atlanta-USA (2010) dan Seminar *Enhancing Internal Audit's Role: Gaining Stakeholder's Confidence through the Global Economic Crisis* – Bali (2009).

Daftar Pejabat Senior

Daftar Nama Inspektur			
NO	Organizational Unit	Nama	Posisi
1	Bid. Audit KP, KCK, UKLN & PA	Yan Budiarmoko	Inspektur
2	Kanins Medan	Denny Arsamanggala	Inspektur
3	Kanins Padang	Ruslan Wahyudi	Inspektur (Pj.)
4	Kanins Pekanbaru	Khairi Setiawan.	Inspektur
5	Kanins Palembang	Abing Rabani	Inspektur
6	Kanins Bandung	Rusli Witjahjono	Inspektur
7	Kanins Jakarta 1	Hartono Sukiman	Inspektur
8	Kanins Jakarta 2	Mudjiharno	Inspektur
9	Kanins Jakarta 3	Umi Haryati	Inspektur
10	Kanins Banjarmasin	Erdianto Sigit C.	Inspektur (Pj.)
11	Kanins Semarang	Zainuddin Mappa	Inspektur
12	Kanins Yogyakarta	Eka Sriyantini	Inspektur
13	Kanins Surabaya	Sutardjo	Inspektur
14	Kanins Malang	Saptono Siwi	Inspektur
15	Kanins Denpasar	Suindiyo	Inspektur
16	Kanins Makassar	-	Inspektur
17	Kanins Manado	Siswanto	Inspektur
18	Kanins Jayapura	Wahyu Waluyo	Inspektur
Daftar Nama Pemimpin Wilayah			
NO	Organizational Unit	Nama	Posisi
1	KW Banda Aceh	Dedy Ihsan	Pinwil (Pj.)
2	KW Medan	Endra Sasmito Soengkowo	Pinwil
3	KW Padang	Susilo	Pinwil
4	KW Pekanbaru	I Made Suprateka Y.	Pinwil
5	KW Palembang	Budi Satria	Pinwil
6	KW Bandung	Pardiman	Pinwil
7	KW Jakarta 1	Mohammad Irfan	Pinwil
8	KW Jakarta 2	Zainuddin Latif	Pinwil
9	KW Jakarta 3	Eko Wahyu Andriastono	Pinwil
10	KW Banjarmasin	Catur Budi Harto	Pinwil (Pj.)
11	KW Semarang	Achmad Chairul Ganie	Pinwil
12	KW Yogyakarta	Triyana	Pinwil
13	KW Surabaya	Adhy Kusnandar	Pinwil
14	KW Malang	Mardiwibawa	Pinwil
15	KW Denpasar	Irianto	Pinwil
16	KW Makassar	Achmad Chumaidi	Pinwil
17	KW Manado	Oskal Saragi Rumahorbo	Pinwil
18	KW Jayapura	Priyastomo	Pinwil
19	KCLN New York	Haru Koesmahargyo	General Manager
20	KCLN Hong Kong	Miswan Nawawi	Chief

Daftar Pejabat Senior

NO	Organizational Unit	Nama	Posisi
1	Divisi Administrasi Kredit	Arief Tjatur Widodo	Kepala Divisi (Pj.)
2	Divisi Agribisnis	Kuswiyoto	Kepala Divisi
3	Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan	Fahmi Subandi	Kepala Divisi (Pj.)
4	Divisi Analisis Resiko Kredit	Susy Liestiowaty	Kepala Divisi
5	Divisi Bisnis BUMN 1	M. Sodo Harisetyanto	Kepala Divisi
6	Divisi Bisnis BUMN 2	Benni O.Kailani	Kepala Divisi
7	Divisi Bisnis Internasional	Heru Prabowo	Kepala Divisi
8	Pembinaan Bisnis Mikro 1	Tri Wintarto	Kepala Divisi
9	Kebijakan & Pengembangan Bisnis Mikro	Agus Katon ES.	Kepala Divisi
10	Pembinaan Bisnis Mikro 2	Johanes Saragih	Kepala Divisi
11	Divisi Bisnis Program & Kemitraan	Teten Djaka Triana	Kepala Divisi
12	Divisi Bisnis Ritel dan Menengah	Khairullah	Kepala Divisi
13	Divisi Bisnis Umum	Donsuwan Simatupang	Kepala Divisi
14	Desk Bisnis Migas & Energi	Amam Sukriyanto	Kepala Desk (Pj.)
15	Divisi Dana dan Jasa	Widodo Januarso	Kepala Divisi
16	Divisi Pendidikan & Latihan	Retno Surdini	Kepala Divisi
17	Divisi Hubungan Lembaga 1	I Komang Sudiarsa	Kepala Divisi
18	Divisi Hubungan Lembaga 2	Agus Noorsanto	Kepala Divisi
19	Divisi Hukum BRI	Hadi Susanto	Kepala Divisi
20	Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro	Dadang Setiabudi	Kepala Divisi (Pj.)
21	Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel	R.Sophia Alizsa	Kepala Divisi
22	Desk E-Channel	Arif Wicaksono	Kepala Desk
23	Divisi Kartu Kredit	Mohamad Helmi	Kepala Divisi
24	Divisi Kepatuhan	M.Jarot Eko Winarno	Kepala Divisi
25	Divisi Kredit Konsumer	Joice Farida Rosandi	Kepala Divisi
26	Divisi Layanan	Luki Presisa Budi Utami	Kepala Divisi
27	Desk Kualitas Layanan	Ninis Indriswari	Kepala Desk (Pj.)
28	Divisi Manajemen Aktiva Tetap & Properti	Wisto Prihadi	Kepala Divisi
29	Divisi Pengadaan Barang & Jasa	Sunuaji Noor Widiyanto	Kepala Divisi
30	Divisi Manajemen Risiko	Irwan Rinaldi	Kepala Divisi
31	Divisi Marketing Communication	A. Firman Taufick	Kepala Divisi
32	Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM	Ganefi	Kepala Divisi
33	Divisi OPS SDM	Siswarin Dwi Hendarsapti	Kepala Divisi
34	Divisi PKO	Ira Wirayanti	Kepala Divisi (Pgs)
35	Divisi Perenc.Strategis & Pengemb.Bisnis	Hexana Tri Sasongko	Kepala Divisi
36	Divisi Restrukturisasi & PKB	Edy Priyono	Kepala Divisi (Pj.)
37	Divisi Sentra Operasi	Edy Utomo	Kepala Divisi
39	Divisi Sekretariat Perusahaan	Muhamad Ali	Kepala Divisi
40	Desk Hubungan Investor	Listiarini Dewajanti	Kepala Desk
41	Divisi Treasury	Rico Rizal Budidarmo	Kepala Divisi
42	Bid. Investment Banking	Henri	Kepala Desk
43	Divisi Teknologi & Sistem Informasi	Zulhelfi Abidin	Kepala Divisi

Alamat Kantor

Kantor	Alamat	Kota	Telepon	Facsimile
Kantor Pusat	Gedung BRI I Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46, Jakarta 10210	Jakarta	(021) 2510244, 2510254, 2510264, 2510279	(021) 2500065, 2500077
Banda Aceh	Jl Cut Meutia No 17 Banda Aceh	Banda Aceh	(0651) 22822 (hunting)	(0651)-23487, 22352
Medan	Jl. Putri Hijau No.2A, Medan	Medan	(061) 4525666, 4528323	(061) 4525601
Padang	Jl Bagindo Azis Chan No. 30, Kec. Padang Timur, Padang	Padang	(0751) 892309, 892310, 892311, 892312	(0751) 892313, 892314, 892315
Palembang	Jl. Kapten A. Rivai No.15, Palembang	Palembang	(0711) 313411	(0711) 312262
Jakarta 1	Jl Veteran No. 8 Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	(021) 3840802	(021) 3453685
Bandung	Jl Asia Afrika No.57-59, Bandung	Bandung	(022) 4200356 (hunting)	(022) 432038, 4200763 (Sekertariat), 4200348 (OPS), 4200368 (Bag.Log)
Semarang	Jl. Teuku Umar No. 24 Semarang	Semarang	(024) 8440728, 8440729, 8440730, 84418146	(024) 84473154, 8318463
Yogyakarta	Jl Cik Ditiro No.3 Yogyakarta	Yogyakarta	(0274) 510850, 520268, 520269, 520270, 520272, 562707, 561403	(0274) 514166, 584883, 584882
Jakarta 2	Gedung Mulia Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 9 - 11	Jakarta Selatan	(021) 52920581, 52920585	(021) 52920586, 52920587
Surabaya	Jl Jend Basuki Rahmat No.122-138 Gedung BRI Tower LT 20, Surabaya	Surabaya	(031) 5324230	(031) 5324033, 5324044
Banjarmasin	Jl. Jend. A.Yani KM 3,5 No. 151 Banjarmasin	Banjarmasin	(0511)3250256/57	(0511) 3251649,3252992
Denpasar	Jl. Hayam Wuruk No. 123, Denpasar	Denpasar	(0361)228715	(0361)225402, 234796, 264858, 225791
Manado	Jl Sarapung No.4-6, Manado	Manado	(0431)863592,863378,863778	(0431)862779 (Surat Biasa), 866966 (Surat Rahasia)
Makassar	Jl Achmad Yani No. 8 Makassar	Makassar	(0411) 3616174, 312931, 322974, 3613176	(0411) 365535
Jakarta 3	Jl. S.Parman Kav. G No.9-11, Slipi, Jakarta Barat	Jakarta Barat	(021) 53653470 (hunting), 53653467-69, 53653473-74	(021) 5481766
Malang	Jl. Laksmana Martadinata 80, Malang	Malang	(0341) 474949 (hunting)	(0341) 474944, 474945, 474935
Pekanbaru	Jl. Jend Sudirman Blok E Kavling No.01, Rt.01, Rw.01, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru	Pekanbaru	(0761) 44493/94/97	(0761) 44533, 571719
Jayapura	Gedung BRI Lt. 3 - 5 Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko Dok II, Kel. Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99112	Jayapura	(0967) 524453	(0967) 524452, 537191
Kantor Cabang Khusus	Gedung BRI II Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46, Jakarta 10210	Jakarta Pusat	(021) 5709060	(021) 570570
BRI New York Agency	140 Broadway 36th Floor New York	New York	(212) 3793840-3842	(212) 3793850
BRI Representative Office Hong Kong	Room 1115, 11/F, Tower 2 Lippo Centre 89 Queensway	Hongkong	(85) 2 25271318	(85) 228613693

Unit Kerja

Kanwil Banda Aceh	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
11	Kantor Cabang
14	Kantor Cabang Pembantu
9	Kantor Kas
137	BRI Unit
36	Teras BRI
23	Teras BRI Keliling

Kanwil Jakarta 2	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
32	Kantor Cabang
61	Kantor Cabang Pembantu
72	Kantor Kas
187	BRI Unit
86	Teras BRI
16	Teras BRI Keliling

Kanwil Malang	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
23	Kantor Cabang
30	Kantor Cabang Pembantu
18	Kantor Kas
512	BRI Unit
231	Teras BRI
30	Teras BRI Keliling

Kanwil Medan	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
24	Kantor Cabang
34	Kantor Cabang Pembantu
26	Kantor Kas
260	BRI Unit
106	Teras BRI
36	Teras BRI Keliling

Kanwil Jakarta 3	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
34	Kantor Cabang
51	Kantor Cabang Pembantu
42	Kantor Kas
236	BRI Unit
123	Teras BRI
24	Teras BRI Keliling

Kanwil Denpasar	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
30	Kantor Cabang
25	Kantor Cabang Pembantu
20	Kantor Kas
282	BRI Unit
152	Teras BRI
37	Teras BRI Keliling

Kanwil Padang	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
13	Kantor Cabang
8	Kantor Cabang Pembantu
9	Kantor Kas
150	BRI Unit
56	Teras BRI
15	Teras BRI Keliling

Kanwil Bandung	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
30	Kantor Cabang
43	Kantor Cabang Pembantu
64	Kantor Kas
602	BRI Unit
255	Teras BRI
32	Teras BRI Keliling

Kanwil Banjarmasin	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
36	Kantor Cabang
27	Kantor Cabang Pembantu
18	Kantor Kas
327	BRI Unit
136	Teras BRI
37	Teras BRI Keliling

Kanwil Pekanbaru	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
18	Kantor Cabang
19	Kantor Cabang Pembantu
18	Kantor Kas
150	BRI Unit
95	Teras BRI
21	Teras BRI Keliling

Kanwil Yogyakarta	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
33	Kantor Cabang
35	Kantor Cabang Pembantu
56	Kantor Kas
589	BRI Unit
184	Teras BRI
30	Teras BRI Keliling

Kanwil Makassar	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
36	Kantor Cabang
27	Kantor Cabang Pembantu
18	Kantor Kas
327	BRI Unit
136	Teras BRI
37	Teras BRI Keliling

Kanwil Palembang	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
33	Kantor Cabang
38	Kantor Cabang Pembantu
20	Kantor Kas
380	BRI Unit
155	Teras BRI
40	Teras BRI Keliling

Kanwil Semarang	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
22	Kantor Cabang
33	Kantor Cabang Pembantu
45	Kantor Kas
404	BRI Unit
175	Teras BRI
25	Teras BRI Keliling

Kanwil Manado	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
16	Kantor Cabang
16	Kantor Cabang Pembantu
15	Kantor Kas
193	BRI Unit
50	Teras BRI
21	Teras BRI Keliling

Kanwil Jakarta 1	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
26	Kantor Cabang
54	Kantor Cabang Pembantu
68	Kantor Kas
95	BRI Unit
79	Teras BRI
8	Teras BRI Keliling

Kanwil Surabaya	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
25	Kantor Cabang
37	Kantor Cabang Pembantu
22	Kantor Kas
284	BRI Unit
140	Teras BRI
23	Teras BRI Keliling

Kanwil Jayapura	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
13	Kantor Cabang
11	Kantor Cabang Pembantu
10	Kantor Kas
80	BRI Unit
38	Teras BRI
14	Teras BRI Keliling

Alamat Kontak Bagi Pembaca



www.bri.co.id
ISO 9001 Certified

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



Kantor Pusat

Gedung BRI I
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Telp. (62-21) 251 0244, 251 0254
Fax. (62-21) 250 0065, 250 0077



Sekretariat Perusahaan

Gedung BRI I
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Telp. (62-21) 575 1966
Fax. (62-21) 570 0916



Website

www.bri.co.id

Email

humas@bri.co.id

Lampiran-Lampiran

Press Release

No	Bulan Januari	Waktu
1.	BRI Gandeng 150 Mahasiswa UMY Lakukan Riset	08 Jan 2013
2.	Garuda Indonesia, Dirjen Imigrasi dan BRI, Kerjasama Immigration on Board	10 Jan 2013
3.	Jakarta Banjir, BRI Optimalkan <i>e-Banking</i> dan ATM Layani Nasabah	17 Jan 2013
4.	e-Tax BRI Mantap, Warga DKI Jakarta Sudah Bisa Bayar Pajak Lewat BRI Secara <i>Online</i>	18 Jan 2013
5.	Jokowi Gandeng 5 Bank Layani Penumpang TransJakarta	22 Jan 2013
6.	Perkuat Pasar Daerah, Kartu Kredit BRI Gandeng Bank BNP	23 Jan 2013
7.	PD Pasar Jaya Gandeng Bank BRI	29 Jan 2013
8.	BRI Siap Akselerasi Pertumbuhan Segmen UMKM di Tahun 2013	31 Jan 2013
No	Bulan Februari	Waktu
1.	BRI Raih Top Brand Award 2013	06 Feb 2013
2.	Mantap, 700 Ribu Pengusaha KUR BRI Naik Kelas	15 Feb 2013
3.	Jangkau Desa Terpencil, BRI & TNI-AL Bikin Kapal Pintar	18 Feb 2013
4.	Sejahterakan Pensiunan, BRI Konsisten Terapkan UU No.13/2003	19Feb 2013
5.	BRI Layani <i>e-Tax Payment</i> Pelindo IV	25 Feb 2013
6.	Pembayaran Gaji Melalui Rekening Dan Pengelolaan Program Pensiun Bagi Prajurit Dan PNS TNI AD	25 Feb 2013
7.	Pemegang Saham Setujui Dividend Payout Ratio 30%, BRI Sasar Pertumbuhan yang Berkualitas	28 Feb 2013
No	Bulan Maret	Waktu
1.	Transaksi <i>e-Channel</i> BRI Tembus 1 Miliar	03 Mar 2013
2.	Kredit Tebu Capai Rp 2,64 T, BRI Gandeng RNI	07 Mar 2013
3.	BRI BAWA KASUS EMAS KE POLDA	07 Mar 2013
4.	BRI Targetkan Dana Stimulan Perumahan Rp 2,2 T	15 Mar 2013
5.	BRI Konsisten Jalankan UU No.13 / 2003	19 Mar 2013
6.	<i>Microbanking</i> BRI Diakui Dunia	21 Mar 2013
7.	BRI SUKSES TERBITKAN OBLIGASI GLOBAL	27 Mar 2013
No	Bulan April	Waktu
1	BRI Bagi Dividen Rp 5,55 Triliun, Terbesar di Sektor Perbankan	9-Apr-2013
2	5 Manfaat <i>e-Pay</i> BRI Bagi <i>Netizen</i>	11-Apr-2013
3	BRI Latih <i>Microfinance</i> Pejabat dan Warga Palestina	11-Apr-2013
4	KUR BRI Tembus Rp 65,348 Triliun	15-Apr-2013
5	BRI Konsisten Implementasikan UU No 132003	16-Apr-2013
6	Bersama BRI, RI Latih <i>Microfinance</i> 30 Warga Palestina di Yordania	18-Apr-2013
7	BRI dan Jamsostek Tandatangani Nota Kesepahaman Jamsostek <i>Service Point Office</i>	19-Apr-2013
8	Jawab Tuntunan Pensiunan, BRI Persilakan Sinkronkan Aspirasi dengan Regulasi	25-Apr-2013
9	Tumbuh 22%, Kredit Mikro BRI Tetap Terdepan	24-Apr-2013
10	Bank BRI Luncurkan Kartu BRIZZI Edisi Basket	26-Apr-2013
11	ATM BRI Tembus 14.292 Unit	30-Apr-2013
12	Peraih <i>Inacraft</i> 2013 dari BRI, Wakili RI di <i>UNESCO Award</i>	30-Apr-2013

Press Release

No	Bulan Mei	Waktu
1.	BRI Kucuri Kredit ke KBN Rp 535,5 M	2 Mei 2013
2.	Bank BRI Dukung Festival Jakarta <i>Great Sale</i> 2013	3 Mei 2013
3.	Tingkatkan Animo Kawula Muda, BRI Kenalkan Debit BRI <i>Man Of Steel Edition</i>	18 Mei 2013
4.	Dirut BRI Kebagian di SMA 1 Bogor	20 Mei 2013]
5.	BRI Ingin IIFF Mendunia	30 Mei 2013
No	Bulan Juni	Waktu
1.	500 Kantor BRI Siap Layani Peserta Jamsostek	10 Juni 2013
2.	Bank BRI Dukung Operasional Perhutani	10 Juni 2013
3.	Dukung JIFW, BRI Terus Ekspansi Ke Pasar Fesyen	11 Juni 2013
4.	BRI Luncurkan T-BANK gandeng Telkom ralam rangka <i>Financial Inclusion</i>	20 Juni 2013
5.	BRI Luncurkan <i>IN-BRANCH SALES BANCASSURANCE</i>	27 Juni 2013
No	Bulan Juli	Waktu
1.	48 BRI Kirim Bantuan Sebanyak 3 Truk Ke Aceh	5-Jul-2013
2.	BRI Siap Layani Peserta BPJS	12-Jul-2013
3.	BRI Sediakan Dana Tunai Rp 33,4 Triliun Selama Libur Lebaran	16-Jul-2013
4.	RAMAIKAN GELAR BATIK NUSANTARA, BRI Tampilkan Batik Tuban	17-Jul-2013
5.	BRI Bagi Sembako Gratis di 15 Titik	23-Jul-2013
6.	Dihadiri Presiden, BRI Buka Puasa Bareng 5.000 Anak Yatim	25-Jul-2013
7.	BRI Incar 90.000 Usaha Mikro di Sekitar Alfamart	26-Jul-2013
8.	Laba Bersih BRI Capai Rp 10 Triliun	30-Jul-2013
No	Bulan Agustus	Waktu
1.	Ini Dia Acara Pamungkas Berbagi Bahagia Bersama BRI	1-Aug-2013
2.	Gandeng PT Berdikari, KKP-E BRI Incar 500 Peternak Sapi	1-Aug-2013
3.	Halal Bihalal BRI, 1.500 TKI Penuhi Stadion Incheon	11-Aug-2013
4.	Siapkan Layanan Bank, BRI Ajak TKI di Korea Jadi Investor	12-Aug-2013
5.	Meriahkan HUT RI, BRI Gelar Pentas Seni dan Olahraga	16-Aug-2013
6.	BRI Apresiasi Kinerja Penegak Hukum	16-Aug-2013
7.	Pemudik Rajin Gesek, Dana Tunai BRI Terserap Rp 25,9 Triliun	20-Aug-2013
8.	Terbelit Untung di Undian Untung Beliung BritAma	27-Aug-2013

Lampiran-Lampiran

Press Release

No	Bulan September	Waktu
1.	Jokowi Gandeng BRI Majukan Bisnis Eks PKL Tanah Abang	1-Sep-2013
2.	BRI Demo Layanan <i>Microfinance</i> di APEC	5-Sep-2013
3.	Layani Nasabah, Teras BRI Kumbasari Buka Non Stop 24 Jam	6-Sep-2013
4.	BRI Demo Cara Pembayaran BPJS	9-Sep-2013
5.	BRI Tidak Turunkan Target Kredit	13-Sep-2013
6.	Layanan Kian Renyah, McDonald's Indonesia Kerjasama dengan Bank BRI Untuk Penyediaan Transaksi NonTunai	17-Sep-2013
7.	PEDULI NASIB PETANI BRI Gandeng IPB Dirikan Agribisnis Development Center	18-Sep-2013
8.	BRI Komit Sejahterakan Pekerja dan Pensiunan	18-Sep-2013
9.	BERPATOKAN PADA ATURAN BRI Minta Publik Awasi Kesepakatan Dengan Pensiunan	18-Sep-2013
10.	DORONG <i>CASHLESS SOCIETY</i> BRI Berikan Kemudahan Bertransaksi Jemaah Haji di Arab Saudi	22-Sep-2013
11.	BRI Touch Dukung "Yovie and His Friends Irreplaceable Concert"	22-Sep
12.	DORONG INFRASTRUKTUR BRI Salurkan Kredit Ke Angkasa Pura I Rp 1 Triliun	23-Sep
13.	Gaet 35 Pengembang dan 10 Dealer, BRI Gelar Roadshow KRK Expo	23-Sep
No	Bulan Oktober	Waktu
1	Majukan PKL, Jokowi Gandeng BRI Sukseskan <i>Night Market</i>	5-Oct-2013
2	Didukung BRI, Mobil Listrik Lokal Nangkring di APEC 2013	7-Oct-2013
3	Kinerja Bisnis Solid, Laba BRI Capai Rp 15,2 T	23-Oct-2013
No	Bulan November	Waktu
1	BRI Asuransikan Hampir Sejuta Pengusaha Mikro	13-Nov-2013
2	Tangani 9 Proyek Besar, BRI Kelola Aset Trustee Rp 9,1 Triliun	14-Nov-2013
3	<i>Internet Banking</i> dan 16.432 ATM BRI Siap Layani UKM Bayar Pajak	15-Nov-2013
4	Bantuan BRI Peduli ke PMI Topan Haiyan	18-Nov-2013
5	Salurkan Rp 82,2 T KUR, BRI Ditopang 18ribu Pegawai	21-Nov-2013
6	GCG yang Handal, Kunci Sukses BRI	22-Nov-2013
7	BRI Buka <i>One Stop Financial Solution</i> di kawasan Pluit Jakarta	26-Nov-2013
8	BRI Bantu Korban Gunung Sinabung	27-Nov-2013
9	Melonjak 18 Kali, Kapitalisasi Pasar Saham BBRI Tembus Rp 188,7 Triliun	27-Nov-2013
10	Ini Dia 4 Keunggulan BRI	28-Nov-2013
No	Bulan Desember	Waktu
1	Majukan Industri Fesyen, BRI Kembali Dukung Bazaar Fashion Concerto	5-Dec-2013
2	Bank BRI Dukung Target Juara Umum Karate	6-Dec-2013
3	Gairahkan Pertanian, BRI Salurkan Kredit Perkebunan Rp 26,4 Triliun	10-Dec-2013
4	Kemilau Perayaan Natal dan Belanja Akhir Tahun di Pacific Place	10-Dec-2013
5	2013 Reksadana BRI Jadi 29 Produk	12-Dec-2013
6	BRI Gelar Sunatan Massal Sambul Ultah ke 118	14-Dec-2013
7	BRI Hadirkan Produk dan Layanan Top di Hari Ulang Tahun	16-Dec-2013
8	Jalan Sehat 40ribu Keluarga Besar BRI di Puncak HUT BRI KE-118	22-Dec-2013
9	Mudahkan Masyarakat, BANK BRI Resmikan <i>E-Banking Hybrid Lounge</i>	19-Dec-2013
10	Libur Natal-Tahun Baru, BRI Siapkan Dana Tunai Rp 20,24 Triliun	19-Dec-2013
11	Tutup 2013, BRI Kembali Sabet ISO 9001:2008	26-Dec-2013
12	BRI Optimistis Transisi Berlangsung Mulus	29-Dec-2013

Lampiran-Lampiran

Korespondensi dengan OJK dan BEI

Bulan	No	No Surat		Dikirim Kepada	Perihal
		Nomor	Tanggal		
Januari	1	B.04-SKP/ DHI/01/13	8-Jan-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	2	B.06-SKP/ DHI/01/13	9-Jan-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
	3	B.13-SKP/ DHI/01/13	18-Jan-13	Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa BEI	Konfirmasi Pememnuhan Kriteria dalam Satu Grup Perusahaan oleh BRI
	4	B.18-SKP/ DHI/01/13	29-Jan-13	Ketua OJK	Penyampaian Bukti Iklan RUPST BRI tahun 2013
	5	B.19-SKP/ DHI/01/13	29-Jan-13	Dir. Pencatatan BEI	Penyampaian Bukti Iklan RUPST pada Harian Kompas dan Bisnis Indonesia
	6	B.20-SKP/ DHI/01/13	29-Jan-13	Dir. Pencatatan BEI	Pemberitahuan RUPST BRI tahun 2013
	7	B.21-SKP/ DHI/01/13	29-Jan-13	Ketua OJK	Pemberitahuan RUPST BRI tahun 2013
	8	B.23-SKP/ DHI/01/13	31-Jan-13	Direktur Pencatatan BEI	Jawaban Konfirmasi Bursa tentang Pemberitaan di Media Massa
Februari	1	B.25-SKP/ DHI/02/13	1-Feb-13	Dir. Pencatatan BEI, up: Div Pencatatan Surat Utang	Laporan Keuangan BRI Tahun 2013
	2	B.26-SKP/ DHI/02/13	1-Feb-13	Dir. Pencatatan BEI, up: Div. Pencatatan Sektor Jasa	Laporan Keuangan BRI Tahun 2013
	3	B.27-SKP/ DHI/02/13	1-Feb-13	Dir. Pencatatan BEI, up: Div. Pencatatan Sektor Jasa	Bukti Pengumuman laporan Keuangan BRI tahun 2012
	4	B.27-SKP/ DHI/02/13	1-Feb-13	Ketua OJK	Bukti Pengumuman laporan Keuangan BRI tahun 2012
	5	B.32-SKP/ DHI/02/13	8-Feb-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
	6	B.35-SKP/ DHI/02/13	11-Feb-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	7	B.37-SKP/ DHI/02/13	12-Feb-13	Ketua OJK	Penyampaian Agenda RUPST BRI tahun 2013
	8	B.39-SKP/ DHI/02/13	13-Feb-13	Ketua OJK	Laporan Tahunan BRI tahun 2012
	9	B.40-SKP/ DHI/02/13	13-Feb-13	Direktur Pencatatan BEI	Laporan Tahunan BRI tahun 2012
	10	B.42-SKP/ DHI/02/13	13-Feb-13	Direktur Pencatatan BEI	Panggilan RUPST BRI tahun 2013 Melalui Harian Kompas dan Bisnis Indonesia 13 Feb 2013
	11	B.43-SKP/ DHI/02/13	13-Feb-13	Ketua OJK	Panggilan RUPST BRI tahun 2013 Melalui Harian Kompas dan Bisnis Indonesia 13 Feb 2013
	12	B.44-SKP/ DHI/02/13	13-Feb-13	Ketua OJK	Penyampaian Bukti Iklan RUPST BRI tahun 2013

Lampiran-Lampiran

Korespondensi dengan OJK dan BEI

Bulan	No	No Surat		Dikirim Kepada	Perihal
		Nomor	Tanggal		
Februari	13	B.45-SKP/ DHI/02/13	13-Feb-13	Direktur Pencatatan BEI	Penyampaian Bukti Iklan RUPST BRI tahun 2013
	14	B.46-SKP/ DHI/02/13	14-Feb-13	Direktur Pencatatan BEI	Konfirmasi tentang Pemberitaan Di Media Massa
Maret	1	B.62-SKP/ DHI/03/13	4-Mar-13	Ketua OJK	Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen
	2	B.63-SKP/ DHI/03/13	4-Mar-13	Direktur Pencatatan BEI	Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen
	3	B.65-SKP/ DHI/03/13	4-Mar-13	Ketua OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pelaksanaan RUPST BRI tahun 2013
	4	B.66-SKP/ DHI/03/13	4-Mar-13	Direktur Pencatatan BEI	Penyampaian Bukti Iklan Pelaksanaan RUPST BRI tahun 2013
	5	B.67-SKP/ DHI/03/13	4-Mar-13	Ketua OJK	Laporan Pelaksanaan RUPST BRI tahun 2013
	6	B.68-SKP/ DHI/03/13	4-Mar-13	Direktur Pencatatan BEI	Laporan Pelaksanaan RUPST BRI tahun 2013
	7	B.70-SKP/ DHI/03/13	4-Mar-13	Direktur Pencatatan BEI	Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
	8	B.79-SKP/ DHI/03/13	7-Mar-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	9	B.81-SKP/ DHI/03/13	8-Mar-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
	10	B.93-SKP/ DHI/03/13	26-Mar-13	Direktur Pencatatan BEI	Pemberitahuan Rencana Penerbitan Unsecured Notes
	11	B.94-SKP/ DHI/03/13	26-Mar-13	Ketua OJK	Pemberitahuan Rencana Penerbitan Unsecured Notes
	12	B.95-SKP/ DHI/03/13	26-Mar-13	Direktur Pencatatan BEI	Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa tentang BRI Berpeluang Kuasai Saham Bank Bukopin
	13	B.96-SKP/ DHI/03/13	26-Mar-13	Ketua OJK	Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa tentang BRI Berpeluang Kuasai Saham Bank Bukopin
April	1	B.103-SKP/ DHI/04/13	9-Apr-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	2	B.105-SKP/ DHI/04/13	10-Apr-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
	3	B.114-SKP/ DHI/04/13	25-Apr-13	Direktur Pencatatan BEI, up: Divisi Pencatatan Surat Utang	Laporan Keuangan BRI Triwulan 1 Tahun 2013
	4	B.115-SKP/ DHI/04/13	25-Apr-13	Direktur Pencatatan BEI Up: Divisi Pencatatan Sektor Jasa	Laporan Keuangan BRI Triwulan 1 Tahun 2013
	5	B.116-SKP/ DHI/04/13	25-Apr-13	Ketua OJK	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI Triwulan 1 tahun 2013
	6	B.117-SKP/ DHI/04/13	25-Apr-13	Direktur Pencatatan BEI	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI Triwulan 1 tahun 2013

Lampiran-Lampiran

Korespondensi dengan OJK dan BEI

Bulan	No	No Surat		Dikirim Kepada	Perihal
		Nomor	Tanggal		
May	1	B.133-SKP/ DHI/05/13	8-May-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	2	B.135-SKP/ DHI/05/13	8-May-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
Juni	1	B.150-SKP/ DHI/06/13	11-Jun-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
	2	B.155-SKP/ DHI/06/13	12-Jun-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
Juli	1	B.167-SKP/ DHI/06/13	2-Jul-13	Ketua OJK	Keterbukaan Informasi
	2	B.168-SKP/ DHI/07/13	2-Jul-13	Direktur Pencatatan BEI	Keterbukaan Informasi
	3	B.172-SKP/ DHI/07/13	9-Jul-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	4	B.178-SKP/ DHI/07/13	11-Jul-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
	5	B.182-SKP/ DHI/07/13	31-Jul-13	Direktur Pencatatan BEI	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI Triwulan II tahun 2013
	6	B.184-SKP/ DHI/07/13	31-Jul-13	Ketua OJK	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
Juli	7	B.184-SKP/ DHI/07/13	31-Jul-13	Direktur Pencatatan BEI, UP: Divisi Pencatatan Surat Utang	Laporan Keuangan BRI Triwulan II tahun 2013
	8	B.185-SKP/ DHI/07/13	31-Jul-13	Direktur Pencatatan BEI, UP: Divisi Pencatatan Sektor Jasa	Laporan Keuangan BRI Triwulan II tahun 2013
	9	B.186-SKP/ DHI/07/13	31-Jul-13	Ketua OJK	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI Triwulan II tahun 2013
Agustus	1	B.187-SKP/ DHI/08/13	1-Aug-13	Direktur Pencatatan BEI	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
	2	B.190-SKP/ DHI/08/13	2-Aug-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
	3	B.191-SKP/ DHI/08/13	2-Aug-13	Ketua OJK	Bukti Iklan Ralat pada laporan laba Rugi Komprehensif BRI
	4	B.192-SKP/ DHI/08/13	2-Aug-13	Direktur Pencatatan BEI	Bukti Iklan Ralat pada laporan laba Rugi Komprehensif BRI
	5	B.193-SKP/ DHI/08/13	2-Aug-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
September	1	B.199-SKP/ DHI/09/13	9-Sep-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	2	B.200-SKP/ DHI/09/13	10-Sep-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
	3	B.203-SKP/ DHI/09/13	20-Sep-13	Direktur Pencatatan BEI	Konfirmasi tentang Pemberitaan Di Media Massa

Lampiran-Lampiran

Korespondensi dengan OJK dan BEI

Bulan	No	No Surat		Dikirim Kepada	Perihal
		Nomor	Tanggal		
Oktober	1	B.204-SKP/ DHI/10/13	8-Oct-13	Direktur Pencatatan BEI	Konfirmasi tentang Pemberitaan Di Media Massa
	2	B.206-SKP/ DHI/10/13	9-Oct-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	3	B.208-SKP/ DHI/10/13	10-Oct-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
	4	B.213-SKP/ DHI/10/13	24-Oct-13	Ketua OJK	Pemeringkatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
	5	B.214-SKP/ DHI/10/13	24-Oct-13	Ketua OJK	Bukti Pengumuman laporan Keuangan BRI Triwulan III tahun 2013
	6	B.215-SKP/ DHI/10/13	24-Oct-13	Direktur Pencatatan BEI, up: Divisi Pencatatan Sektor Jasa	Bukti Pengumuman laporan Keuangan BRI Triwulan III tahun 2013
	7	B.216-SKP/ DHI/10/13	24-Oct-13	Direktur Pencatatan BEI, up: Divisi Pencatatan Surat Utang	Laporan Keuangan BRI Triwulan III tahun 2013
	8	B.217-SKP/ DHI/10/13	24-Oct-13	Direktur Pencatatan BEI, up: Divisi Pencatatan Sektor Jasa	Laporan Keuangan BRI Triwulan III tahun 2013
	9	B.220-SKP/ DHI/10/13	29-Oct-13	Direktur Pencatatan BEI	Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
	10	B.222-SKP/ DHI/10/13	31-Oct-13	Ketua OJK	Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
November	1	B.223-SKP/ DHI/11/13	8-Nov-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
	2	B.226-SKP/ DHI/11/13	11-Nov-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	3	B.231-SKP/ DHI/11/13	18-Nov-13	Direktur Pencatatan BEI	Rencana Public Expose
	4	B.233-SKP/ DHI/11/13	25-Nov-13	Direktur Pencatatan BEI	Penyampaian Materi Public Expose
	5	B.235-SKP/ DHI/12/12	2-Dec-13	Direktur Pencatatan BEI	Laporan Pelaksanaan Public Expose BRI tahun 2013
Desember	1	B.237-SKP/ DHI/12/13	9-Dec-13	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing
	2	B.238-SKP/ DHI/12/13	9-Dec-13	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek

Lampiran-Lampiran

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

I.	Umum	Halaman
1	Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.	
2	Laporan tahunan dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas.	
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama Perusahaan dan Tahun <i>Annual Report</i> ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman
4	Laporan Tahunan ditampilkan di <i>website</i> Perusahaan	
II	Ikhtisar Data Keuangan Penting	Halaman
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi) 3. Total laba (rugi) komprehensif 4. Laba (rugi) per saham 17
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Modal kerja bersih 2. Jumlah investasi pada entitas asosiasi dan/atau <i>joint venture</i> 3. Jumlah aset 4. Jumlah liabilitas 5. Jumlah ekuitas 17
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan 16-17
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.	Informasi dalam bentuk tabel dan grafik yang memuat: 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Kapitalisasi pasar; 3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan 4. Volume perdagangan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). 75

Lampiran-Lampiran

II		Ikhtisar Data Keuangan Penting	Halaman
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>) 2. Tingkat bunga/imbalan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk	76
III		Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	Halaman
1	Laporan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi 3. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada)	29 30
2	Laporan Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Gambaran tentang prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)	39-43 45-47 43-45
3	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	50-51
IV		Profil Perusahaan	Halaman
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, <i>email</i> , dan <i>website</i>	55

Lampiran-Lampiran

IV	Profil Perusahaan		Halaman
2	Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).	56
3	Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; dan 2. penjelasan mengenai produk dan/atau jasa yang dihasilkan	55 62-63
4	Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi	68-69
5	Visi dan Misi Perusahaan	Mencakup: 1. Visi Perusahaan; 2. Misi Perusahaan; dan 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris	60-61
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris	408-411
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota Direksi.	412-417
8	Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan 4. Biaya yang telah dikeluarkan	95 95 92 94

Lampiran-Lampiran

IV	Profil Perusahaan		Halaman
9	Komposisi Pemegang Saham	Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham 2. Direksi dan Komisaris yang memiliki saham 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%, dan persentase kepemilikannya	78 321, 308 78
10	Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi	Informasi memuat antara lain : 1. Nama Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi 4. Keterangan status operasi Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)	70,267-271
11	Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV), atau pernyataan tidak memiliki grup	70
12	Kronologis pencatatan saham	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham 2. Jenis tindakan korporasi (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah saham 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatan	76
13	Kronologis pencatatan Efek lainnya	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya 2. Jenis tindakan korporasi (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya 4. Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatan 5. Peringkat efek	76
14	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek	71

Lampiran-Lampiran

IV	Profil Perusahaan		Halaman
15	Penghargaan dan atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan atau sertifikat 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan atau sertifikat 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)	23
16	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)		70, 423
V	Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		Halaman
1	Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 3. Penjualan/pendapatan usaha; 4. Profitabilitas; untuk masing-masing segmen usaha yang diungkapkan dalam laporan keuangan (jika ada)	84-87 210-271
2	Uraian atas kinerja keuangan Perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas 3. Ekuitas 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan Total laba (Rugi) Komprehensif 5. Arus Kas	249-252 252-253 254-255 244-248 255-256
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang	250, 256
4	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>), kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>)	Penjelasan atas: 1. Struktur modal (<i>capital structure</i>), 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>)	254 254-255

Lampiran-Lampiran

V	Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	Halaman
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal	257
	Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut 3. Mata uang yang menjadi denominasi 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan	
6	Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan/pendapatan bersih, maka berikan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan/atau adanya produk atau jasa baru	244-247
	Penjelasan mengenai: 1. Besaran peningkatan/penurunan penjualan atau pendapatan bersih 2. Faktor penyebab peningkatan/ penurunan material dari penjualan atau pendapatan bersih yang dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan/atau adanya produk atau jasa baru	
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	258
	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang	
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	266
	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan	
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan	84-87
	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	
10	Uraian tentang aspek pemasaran	86-87 204-209
	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar	
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	80-81
	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah dividen kas 2. Jumlah dividen kas per saham 3. <i>Payout ratio</i> untuk masing-masing tahun Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasan tidak membagikan dividen	

Lampiran-Lampiran

V	Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	Halaman
12	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Irrelevant
13	Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal.	263
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.	266
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan	263-266
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi	263

Lampiran-Lampiran

VI	Tata Kelola Perusahaan		Halaman
1	Uraian Dewan Komisaris:	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris 6. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris) 	<p>298-300</p> <p>307-308</p> <p>308</p> <p>303-305</p> <p>306</p> <p>298</p>
2	Uraian Direksi	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2. Frekuensi pertemuan 3. Tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi 5. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi) 	<p>310-313</p> <p>315-317</p> <p>315</p> <p>317-318</p> <p>309</p>
3	<i>Assessment</i> terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaksanaan <i>assessment</i> atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan <i>assessment</i> atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan <i>assessment</i> 	307,318
4	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi 3. Pengungkapan indikator kinerja untuk mengukur kinerja Direksi 	<p>318-320</p> <p>320</p> <p>318</p>
5	Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram	78

Lampiran-Lampiran

VI	Tata Kelola Perusahaan	Halaman	
6	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/ atau Pengendali 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	322-323
7	Komite Audit	Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit 3. Independensi anggota komite audit 4. Uraian tugas dan tanggung jawab 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit	326, 418 327 327 327 328 328
8	Komite Nominasi dan Remunerasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/ atau remunerasi 2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi	330, 418 330 331 332-333 332
9	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain 2. Independensi anggota komite lain 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain	333-336 419
10	Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan	420 348-352

Lampiran-Lampiran

VI	Tata Kelola Perusahaan		Halaman
11	Uraian mengenai unit Audit Internal	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal 3. Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan 5. Uraian pelaksanaan tugas 6. Pihak yang mengangkat/ memberhentikan ketua unit audit internal	420 362 362-363 360 364-365 361
12	Akuntan Perseroan	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan	367
13	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut	116 200 122 150
14	Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional/COSO (<i>Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring Activities</i>) 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.	357 357 358

Lampiran-Lampiran

VI	Tata Kelola Perusahaan		Halaman
15	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup	Mencakup antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 4. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki 	393
16	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja	Mencakup antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain 	394-395
17	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Mencakup antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain 	396-397
18	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain 	403-405

Lampiran-Lampiran

VI	Tata Kelola Perusahaan		Halaman
19	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan 2. Status penyelesaian perkara/gugatan 3. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi) Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan	379
20	Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> , media massa, <i>mailing list</i> , buletin dan sebagainya	388
21	Bahasan mengenai kode etik perusahaan	Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi 3. Upaya dalam penerapan dan penegakannya 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan	368-371
22	Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i>	Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> 3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan 5. Hasil dari penanganan pengaduan	377-378
VII	Informasi Keuangan		Halaman
1	Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung jawab atas laporan keuangan	451
2	Opini Auditor Independen atas laporan keuangan		453
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan 2. Tanggal Laporan Audit 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik	454

Lampiran-Lampiran

VII	Informasi Keuangan		Halaman
4	Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)	455-458 459-461 462-463 464-465 466 -
5	Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya	Ada atau tidak ada pengungkapan sesuai dengan PSAK	478
6	Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan laba/rugi usaha tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	459, 461
7	Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan	464-465
8	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap PSAK 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 3. Pengakuan pendapatan dan beban 4. Aset tetap 5. Instrumen keuangan	472-503
9	Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.	616-624

Lampiran-Lampiran

VII	Informasi Keuangan		Halaman
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. 	567-571
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penyusutan yang digunakan 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode untuk tiap kelompok aset tetap dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. 	543-544
12	Kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan imbalan kerja	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan; 2. Deskripsi umum mengenai jenis program imbalan pascakerja yang diselenggarakan oleh perusahaan; 3. Kebijakan akuntansi perusahaan dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial; dan 4. Pengakuan keuntungan dan kerugian untuk kurtailmen dan penyelesaian. 	603-615

Lampiran-Lampiran

VII	Informasi Keuangan	Halaman
13	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan 2. Klasifikasi instrumen keuangan 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan 4. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko instrumen keuangan; 5. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 6. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.
14	Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.





**Laporan
Keuangan
Konsolidasi
2013**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian
beserta laporan auditor independen
31 Desember 2013 dan 2012



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tomol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
Telepon: 021 2510244, 2510254, 2510264, 2510268, 2510279
Faksimili: 021 2500077 Kawat: KANPUSBR1
Telex: 65293 55456, 65459 65451

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 dan 2012 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sofyan Basir
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Alamat Domisili : Jl. Bendungan Jati Luhur No. 3 Jakarta Pusat
Nomor Telepon : 021 - 251 0286
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Achmad Baiquni
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Alamat Domisili : Jl. Taman Wijaya Kusuma III/21C Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 - 575 1741
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Januari 2014
Atas nama dan mewakili Direksi





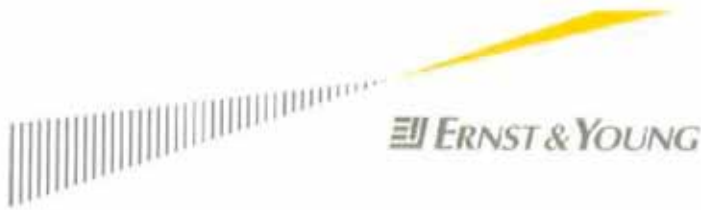

Sofyan Basir
Direktur Utama
Achmad Baiquni
Direktur

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	455 - 458
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	459 - 461
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	462 - 463
Laporan Arus Kas Konsolidasian	464 - 465
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	466 - 630



Purwantono, Suherman & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
www.ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-4702/PSS/2014

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

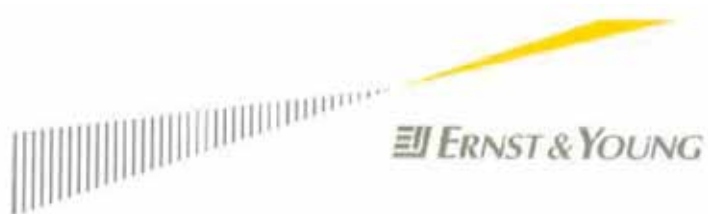
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-4702/PSS/2014 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya langgal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Purwantono, Suherman & Surja

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sinarta".

Sinarta
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0701

16 Januari 2014

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ASET			
Kas	2a,2c,4	19.171.778	13.895.464
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c,2g,5	40.718.495	42.524.126
Giro pada Bank lain	2a,2c,2e,2f, 2g,6,43	9.435.197	4.842.146
Cadangan kerugian penurunan nilai		(77)	(171)
		<u>9.435.120</u>	<u>4.841.975</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	2a,2c,2e,2f, 2h,7,43	36.306.883	66.242.928
Efek-efek	2a,2c,2e,2f,2i, 8,43	42.674.437	41.137.640
Cadangan kerugian penurunan nilai		(772)	(760)
		<u>42.673.665</u>	<u>41.136.880</u>
Tagihan Wesel Ekspor	2c,2e,2f,2j,9, 43	8.926.072	5.934.772
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	2c,2e,2i,10, 43	4.511.419	4.315.616
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	2c,2e,2u,11, 43	14.440.063	9.550.521
Tagihan Derivatif	2c,2f,2ai,12	4.981	28.850
Kredit yang Diberikan	2c,2e,2f, 2k,13,43	434.316.466	350.758.262
Cadangan kerugian penurunan nilai		(15.171.736)	(14.677.220)
		<u>419.144.730</u>	<u>336.081.042</u>
Piutang dan Pembiayaan Syariah	2e,2f,2l,14,43	14.028.390	11.248.281
Cadangan kerugian penurunan nilai		(246.360)	(237.645)
		<u>13.782.030</u>	<u>11.010.636</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ASET (lanjutan)			
Tagihan Akseptasi	2c,2e,2f,2m, 15,43	3.679.684	4.786.121
Penyertaan Saham	2c,2e,2f, 2n,16,43	222.851	197.278
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	(536)
		<u>222.851</u>	<u>196.742</u>
Aset Tetap	2o,2p,17		
Biaya perolehan		8.817.641	7.218.807
Akumulasi penyusutan		(4.845.029)	(4.414.441)
Nilai buku - neto		<u>3.972.612</u>	<u>2.804.366</u>
Aset Pajak Tangguhan - neto	2aj,37c	2.188.506	2.024.911
Aset Lain-lain - neto	2c,2f,2p,2q,2r, 18	7.004.037	5.961.840
TOTAL ASET		<u>626.182.926</u>	<u>551.336.790</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	2c,2s,19	5.065.527	4.911.852
Simpanan Nasabah	2c,2e,2t,43		
Giro	20	78.666.064	79.051.314
Giro <i>Wadiah</i>		670.887	671.800
Tabungan	21	210.234.683	182.833.586
Tabungan <i>Wadiah</i>		2.480.554	1.688.478
Tabungan <i>Mudharabah</i>		281.388	195.285
Deposito Berjangka	22	201.585.766	177.267.237
Deposito Berjangka <i>Mudharabah</i>		10.362.040	8.458.683
Total Simpanan Nasabah		<u>504.281.382</u>	<u>450.166.383</u>
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	2c,2e,2t, 23,43	3.691.220	2.778.618
Liabilitas Derivatif	2c,2ai,8,12	1.565.102	152.193
Liabilitas Akseptasi	2c,2e,2m, 15,43	3.679.684	4.786.121
Utang Pajak	2aj,37a	1.266.018	895.695
Surat Berharga yang Diterbitkan	2c,2v,24	6.023.133	-
Pinjaman yang Diterima	2c,2e,2w,25,43	9.084.913	10.888.755
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2e,2am,26,43	223	414
Liabilitas Imbalan Kerja	2ad,27,41	6.858.932	5.838.152
Liabilitas Lain-lain	2c,2y,2z,28, 44b	3.242.346	3.920.266
Pinjaman Subordinasi	2c,2x,29	2.097.024	2.116.562
TOTAL LIABILITAS		<u>546.855.504</u>	<u>486.455.011</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)			
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Modal dasar - 60.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 59.999.999.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.669.162.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 24.669.161.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012	1,30a	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor/agio saham	2d,30b	2.773.858	2.773.858
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - setelah dikurangi pajak tangguhan	2ah,30c	82.083	44.912
Saldo laba - (defisit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi akibat kuasi- reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003) Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya	2i	(727.644)	740.459
	2d,3,30d	11.005.528	8.412.595
		59.862.555	46.667.643
Total Saldo Laba		70.868.083	55.080.238
Total Ekuitas yang Dapat Distribusikan Kepada Entitas Induk		79.163.671	64.806.758
Kepentingan non-pengendali		163.751	75.021
TOTAL EKUITAS		79.327.422	64.881.779
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		626.182.926	551.336.790

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga, Investasi dan Syariah			
Bunga dan investasi	2aa,31	57.720.831	48.272.021
Pendapatan syariah	2l,2ac	1.740.253	1.338.400
Total Pendapatan Bunga, Investasi dan Syariah		<u>59.461.084</u>	<u>49.610.421</u>
Beban Bunga, Pembiayaan Lainnya dan Syariah			
Beban bunga dan pembiayaan lainnya	2aa,32	(14.590.223)	(12.599.060)
Beban syariah	2ac	(764.590)	(527.595)
Total Beban Bunga, Pembiayaan lainnya dan Syariah		<u>(15.354.813)</u>	<u>(13.126.655)</u>
Pendapatan Bunga - neto		<u>44.106.271</u>	<u>36.483.766</u>
Pendapatan Operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	2ab	4.862.438	3.929.559
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		1.948.158	2.258.387
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2ag,2ai	477.524	428.800
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2i,8,10	78.252	42.670
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2i,8,10	-	13.371
Lain-lain		982.087	1.716.945
Total Pendapatan Operasional lainnya		<u>8.348.459</u>	<u>8.389.732</u>
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	2f,33	(3.947.875)	(2.668.177)
(Pembalikan) beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	2am,26b	191	(262)
Pembalikan (penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	2p	1.309	(31.489)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Beban Operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	2e,2ad, 34,41,43	(12.231.994)	(9.605.547)
Umum dan administrasi	2o,35	(7.518.886)	(6.343.661)
Premi program penjaminan Pemerintah	45	(911.957)	(749.297)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2i,8,10	(13.208)	-
Lain-lain		(1.704.733)	(2.792.527)
Total Beban Operasional lainnya		<u>(22.380.778)</u>	<u>(19.491.032)</u>
LABA OPERASIONAL		26.127.577	22.682.538
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO	36	<u>1.782.489</u>	<u>1.177.034</u>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		27.910.066	23.859.572
BEBAN PAJAK	2aj,37b,37c	(6.555.736)	(5.172.192)
LABA TAHUN BERJALAN		21.354.330	18.687.380
Pendapatan komprehensif lainnya:			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		37.171	(4.241)
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - neto dengan jumlah yang ditransfer ke laba rugi sehubungan dengan perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual		(1.966.470)	(33.481)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya		491.623	11.350
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		<u>(1.437.676)</u>	<u>(26.372)</u>
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		19.916.654	18.661.008

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		21.344.130	18.680.884
Kepentingan non-pengendali		10.200	6.496
TOTAL		<u>21.354.330</u>	<u>18.687.380</u>
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		19.913.198	18.652.098
Kepentingan non-pengendali		3.456	8.910
TOTAL		<u>19.916.654</u>	<u>18.661.008</u>
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)	2af,48	865,22	757,26

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambah Modal Disetor/ Agi Saham	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Setelah Pajak Tanggung	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Inklusif ^{*)}	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
						Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2011		6.167.291	2.773.858	49.153	765.004	8.261.766	31.757.488	49.774.560	45.769	49.820.329
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	18.680.884	18.680.884	6.496	18.687.380
Pendapatan komprehensif lainnya	2ah, 2i, 8, 10	-	-	(4.241)	(24.545)	-	-	(28.786)	2.414	(26.372)
Total laba komprehensif untuk tahun berjalan		-	-	(4.241)	(24.545)	-	18.680.884	18.652.098	8.910	18.661.008
Pembagian laba Dividen	30d	-	-	-	-	-	(3.016.585)	(3.016.585)	-	(3.016.585)
Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)		-	-	-	-	150.829	(150.829)	-	-	-
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali		-	-	-	-	-	(603.315)	(603.315)	-	(603.315)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2012		6.167.291	2.773.858	44.912	740.459	8.412.595	46.667.643	64.806.758	75.021	64.881.779

*) Saldo defisit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor/ Agi Saham	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Setelah Pajak Tanggung	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk ^{*)}	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
						Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2012		6.167.291	2.773.858	44.912	740.459	8.412.595	46.667.643	64.806.758	75.021	64.881.779
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	21.344.130	21.344.130	10.200	21.354.330
Pendapatan komprehensif lainnya	2ah,2i,8,10	-	-	37.171	(1.468.103)	-	-	(1.430.932)	(6.744)	(1.437.676)
Total laba komprehensif untuk tahun berjalan		-	-	37.171	(1.468.103)	-	21.344.130	19.913.198	3.456	19.916.654
Tambahan Modal Disetor		-	-	-	-	-	-	-	87.495	87.495
Pembagian laba Dividen	30d	-	-	-	-	-	(5.556.285)	(5.556.285)	-	(5.556.285)
Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan		-	-	-	-	2.592.933	(2.592.933)	-	-	-
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	(2.221)	(2.221)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013		6.167.291	2.773.858	82.083	(727.644)	11.005.528	59.862.555	79.163.671	163.751	79.327.422

^{*)} Saldo defisit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan bunga, hasil investasi, provisi dan komisi serta pendapatan syariah		59.350.676	49.830.419
Pembayaran bunga, beban syariah dan pembiayaan lainnya		(14.883.697)	(13.147.390)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukkan		1.959.521	2.284.074
Pendapatan operasional lainnya		6.842.840	5.417.549
Beban operasional lainnya		(25.225.142)	(22.978.696)
Pendapatan non operasional - neto		2.147.065	1.163.042
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		30.191.263	22.568.998
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
(Kenaikan) penurunan aset operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		14.164.442	(13.916.625)
Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		(397.415)	(2.987.198)
Tagihan wesel ekspor		(2.991.300)	(1.106.203)
Tagihan derivatif		23.869	(11.032)
Kredit yang diberikan		(87.876.065)	(69.799.516)
Piutang dan pembiayaan syariah		(2.785.166)	(2.165.254)
Aset lain-lain		124.624	(4.014.473)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		143.863	1.240.892
Simpanan:			
Giro		(385.250)	3.140.314
Giro <i>wadiah</i>		(913)	155.971
Tabungan		27.401.097	29.838.227
Tabungan <i>wadiah</i>		792.076	301.754
Tabungan <i>mudharabah</i>		86.103	92.495
Deposito berjangka		24.318.529	31.260.256
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>		1.903.357	1.113.021
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya		912.602	(1.245.545)
Liabilitas derivatif		1.412.909	(21.343)
Liabilitas lain-lain		(2.639.539)	3.559.568
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Operasi		4.399.086	(1.995.693)
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil penjualan aset tetap	36	108.193	13.751
Penerimaan dividen	16	382	158
Kenaikan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		(4.889.542)	(167.223)
Perolehan aset tetap	17	(1.947.985)	(1.445.290)
Kenaikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		(5.648.237)	(4.115.600)
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi		(12.377.189)	(5.714.204)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pembayaran pinjaman yang diterima		(1.803.842)	(2.209.161)
Penurunan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		-	(102.681)
Pembagian laba untuk dividen dan PKBL	30d	(5.556.285)	(3.619.900)
Pembayaran pinjaman subordinasi		(19.538)	(19.725)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan		4.800.584	-
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Pendanaan		<u>(2.579.081)</u>	<u>(5.951.467)</u>
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS			
		(10.557.184)	(13.661.364)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING			
		4.369	10.530
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN			
		119.371.406	133.022.240
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN			
		<u>108.818.591</u>	<u>119.371.406</u>
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:			
Kas	2a		
	4	19.171.778	13.895.464
Giro pada Bank Indonesia	5	40.718.495	42.524.126
Giro pada bank lain	6	9.435.197	4.842.146
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7	36.304.087	52.075.690
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		3.189.034	6.033.980
Total Kas dan Setara Kas		<u>108.818.591</u>	<u>119.371.406</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang "SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa", BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), yang fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Akta No. 57 tanggal 28 Maret 2012, Dina Chozie, S.H., kandidat Notaris, pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-20726 tanggal 8 Juni 2012. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRI adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dengan melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan operasi sesuai dengan prinsip syariah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Program Rekapitalisasi

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah, BRI telah menerima seluruh jumlah rekapitalisasi sebesar nominal Rp29.149.000 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000 (Catatan 10 dan 30b).

Lebih lanjut, seperti yang disebutkan dalam Kontrak Manajemen tanggal 28 Februari 2001 antara Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan BRI, Pemerintah telah menetapkan bahwa total kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Liabilitas Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Oleh karena itu, BRI telah mengembalikan kelebihan total rekapitalisasi sebesar Rp85.469 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2001 (Catatan 10 dan 30a).

Pada tanggal 30 September 2003, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 tentang besarnya nilai akhir dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BRI dalam rangka program rekapitalisasi bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan bahwa nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531 (Catatan 30a).

c. Penawaran Umum Saham Perdana dan Pemecahan Saham (Stock Split)

Dalam rangka penawaran umum saham perdana BRI, berdasarkan pernyataan pendaftaran tanggal 31 Oktober 2003, Pemerintah, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyetujui untuk melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering ("IPO")) sebesar 3.811.765.000 lembar saham biasa BRI bersamaan dengan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih.

Penawaran umum saham perdana meliputi penawaran kepada masyarakat internasional (Peraturan 144A dari Perundang-undangan Sekuritas dan peraturan "S") dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Bapepam-LK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003 (Catatan 30a).

Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp875 (Rupiah penuh) per lembar saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875 (Rupiah penuh) setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI (Catatan 30a). Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham BRI juga telah dicatatkan.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham Perdana dan Pemecahan Saham (Stock Split) (lanjutan)

Berdasarkan akta No. 38 tanggal 24 November 2010, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp250 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010. Pemecahan Saham dilakukan pada tahun 2011 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal dimulainya perdagangan sah dengan nilai nominal baru atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 11 Januari 2011.

d. Struktur dan Manajemen

Kantor pusat BRI berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, BRI memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

	2013	2012
Kantor Wilayah	18	18
Kantor Inspeksi Pusat	1	1
Kantor Inspeksi Wilayah	17	16
Kantor Cabang Dalam Negeri	449	442
Kantor Cabang Khusus	1	1
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri	3	3
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	565	545
Kantor Kas	950	914
BRI Unit	5.144	5.000
Teras	2.212	1.778

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, BRI memiliki 1 (satu) Kantor Cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands dan 2 (dua) Kantor Perwakilan yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta memiliki 3 (tiga) Entitas Anak yaitu PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (dahulu PT Bank Agroniaga Tbk) dan BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong.

Berdasarkan kebijakan akuntansi BRI, manajemen kunci BRI cakupannya adalah anggota komisaris, direksi, komite audit, komite remunerasi, kepala divisi, kepala audit intern dan inspektur, pemimpin wilayah dan pemimpin cabang khusus. Total karyawan BRI adalah 81.238 dan 72.625 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BRI tanggal 28 Maret 2012 yang diaktakan dengan akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 41 dan No. 57 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama/Independen	:	Bunakor Sanim
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Mustafa Abubakar
Komisaris	:	Heru Lelono
Komisaris	:	Vincentius Sonny Loho
Komisaris	:	Hermanto Siregar
Komisaris Independen	:	Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	:	Ahmad Fuad
Komisaris Independen	:	Aviliani

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Direktur Utama	:	Sofyan Basir
Direktur Operasional	:	Sarwono Sudarto
Direktur Keuangan	:	Achmad Baiquni
Direktur Bisnis Komersial	:	Sulaiman Arif Arianto
Direktur Kepatuhan	:	Randi Anto
Direktur Bisnis Konsumer	:	Agus Toni Soetirto
Direktur Pengendalian Risiko Kredit	:	Lenny Sugihart
Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	:	Djarot Kusumayakti
Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN	:	Asmawi Syam
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Suprajarto
Direktur Manajemen SDM (MSDM)	:	Gatot Mardiwastito

Susunan Komite Audit BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. B.61-KOM/06/2012 tanggal 1 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Bunator Sanim
Anggota	:	Adhyaksa Dault
Anggota	:	H. C. Royke Singgih
Anggota	:	Dedi Budiman Hakim
Anggota	:	Syahrir Nasution
Anggota	:	Hermanto Siregar
Anggota	:	Ahmad Fuad
Anggota	:	Vincentius Sonny Loho

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Sekretaris Perusahaan BRI adalah Muhammad Ali sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. Kep. 20-DIR/SDM/12/2009 tanggal 14 Januari 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Kepala Satuan Kerja Audit Internal BRI adalah Ali Mudin berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI No. Kpts.18/Dir.01.03/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011.

e. Entitas Anak

PT Bank BRISyariah

Pada tanggal 29 Juni 2007, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Bank Jasa Arta ("BJA") untuk mengakuisisi 100% saham BJA dengan harga pembelian sebesar Rp61 miliar. Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 3 tanggal 5 September 2007 Notaris Imas Fatimah, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BJA tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 9/188/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Desember 2007 dan No. 9/1326/DPIP/Prz tanggal 28 Desember 2007. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan akta Akuisisi No. 61 Notaris Imas Fatimah, S.H., dimana BRI memiliki 99,99875% dari total saham yang dikeluarkan BJA dan sebesar 0,00125% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

BJA berdasarkan akta No. 45 tanggal 22 April 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah berubah menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSB"). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, BSB memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, BSB wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah keputusan, BSB wajib menyelesaikan seluruh kredit dan liabilitas debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BRISyariah (lanjutan)

BRI pada tanggal 19 Desember 2008 sepakat untuk melakukan pemisahan (spin-off) atas Unit Usaha Syariah BRI ("UUS BRI") kedalam BSB yang telah diaktakan dengan "Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BRI ke dalam PT Bank Syariah BRI" No. 27 tanggal 19 Desember 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana tanggal efektif pemisahan adalah tanggal 1 Januari 2009. Akibat dari pemisahan yang ditetapkan tersebut, terhitung sejak tanggal efektif pemisahan maka:

1. Semua aset dan liabilitas UUS BRI yang dimiliki oleh BRI, karena hukum telah beralih kepada dan menjadi hak atau kepunyaan, serta liabilitas atau beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan BSB, selaku perseroan yang menerima pemisahan.
2. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas kantor UUS BRI karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau diusahakan oleh BSB atas keuntungan, kerugian dan tanggungan BSB.
3. Semua hak, piutang, wewenang dan liabilitas UUS BRI berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum tanggal efektif pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam daftar aset dan liabilitas UUS BRI, serta semua hubungan hukum antara UUS BRI dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh BSB atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan BSB.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham BSB No. 18 tanggal 14 April 2009, Notaris Fathiah Helmi, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Syariah BRI menjadi PT Bank BRISyariah ("BRIS") dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Anggaran Dasar BRIS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah No. 113 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-40622.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRIS yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRIS adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Total aset BRIS pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp17.419.045 dan Rp14.088.915 atau 2,78% dan 2,56% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan pengelolaan dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.740.253 dan Rp1.338.400, atau 2,93% dan 2,70% dari total pendapatan bunga konsolidasian.

Kantor pusat BRISyariah berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, dan memiliki 51 kantor cabang dan 195 kantor cabang pembantu.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)

Pada tanggal 19 Agustus 2010, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) selaku pemegang 95,96% saham BRI Agro untuk mengakuisisi saham BRI Agro dengan total nominal sebesar Rp330.296 untuk 3.030.239.023 lembar saham dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Komposisi kepemilikan saham BRI Agro nantinya adalah BRI akan memiliki 76%, Dapenbun 14% dan publik 10%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 37 tanggal 24 November 2010 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BRI Agro. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan melalui Surat No. 13/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 Februari 2011. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan akta akuisisi No. 14 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BRI Agro, sebagaimana dimuat dalam akta No. 68 tanggal 29 Desember 2009, Notaris Rusnaldy, S.H. Hal tersebut diatas telah mempertimbangkan efek dari Waran Seri I yang dapat dieksekusi sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.

Untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, tentang "Pengambilalihan Perusahaan Terbuka", BRI sebagai pengendali baru BRI Agro diwajibkan untuk melaksanakan Penawaran Tender terhadap saham BRI Agro yang dimiliki pemegang saham publik. Pernyataan Penawaran Tender telah dinyatakan efektif pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-4985/BL/2011 dan telah diumumkan pada dua surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan *Investor Daily*, keduanya pada tanggal 5 Mei 2011. Masa penawaran Tender dimulai pada tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2011. Pada tanggal penutupan masa Penawaran Tender, terdapat 113.326.500 lembar saham (3,15% dari seluruh saham BRI Agro) yang dibeli oleh BRI. Harga penawaran Tender yang digunakan adalah sebesar Rp182 (Rupiah penuh) per lembar.

Pada tanggal 1 Juli 2011, telah dilaksanakan penjualan saham kepada Dapenbun sejumlah 256.375.502 lembar atas eksekusi opsi beli Dapenbun dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Selanjutnya sesuai peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, jangka waktu pengembalian *tender offer* adalah selama 2 (dua) tahun, namun khusus untuk BRI Agro maka BRI wajib memenuhi kepemilikan saham publik minimal adalah sebesar 10%, dan harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 24 Mei 2013. Hal ini untuk memenuhi Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011. Sampai dengan 31 Desember 2012, saham BRI Agro yang berhasil dijual ke publik sebesar 500.000 lembar, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro per 31 Desember 2012 menjadi 79,78% dan Dapenbun 14%.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 16 Mei 2012, Notaris Rusnaldy, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("BRI Agro") dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

Pada tanggal 10 Mei 2013, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 3.846.035.599 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 26 Juni 2013, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-186/D.04/2013 menyetujui Pernyataan Penawaran Umum Terbatas IV tersebut, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.832.685.599 lembar saham.

Hasil dari PUT IV menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 30 Juli 2013, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 80,43%, Dapenbun 14,02% dan publik 5,55%. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074249.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Total aset BRI Agro pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp5.122.727 dan Rp4.041.003 atau 0,82% dan 0,73% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp420.186 dan Rp349.990 atau 0,71% dan 0,71% dari total pendapatan bunga konsolidasian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Agro adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan.

BRI Agro berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/1037/UUps/Ps6D tanggal 26 Desember 1989, telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum.

Kantor pusat BRI Agro berlokasi di Plaza Great River, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 No. 1, Jakarta, dan memiliki 12 kantor cabang dan 10 kantor cabang pembantu.

BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance)

Pada tanggal 16 Desember 2011, BRI telah menandatangani *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* untuk mengakuisisi 100% atau 1.600.000 (angka penuh) saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong dengan harga pembelian sebesar HKD1.911.270. Akuisisi ini telah disahkan oleh *Inland Revenue Department* (IRD) Hong Kong dengan *stamp duty* pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 13/32/DPB1/TPB1-3/Rahasia pada tanggal 1 Desember 2011.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited tanggal 2 Juli 2012, serta dengan diterbitkannya *Certificate of Change of Name* No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh *Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region*, maka nama BRIngin Remittance Company Limited secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong.

Total aset BRI Remittance pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp4.124 atau 0,0007% dan Rp2.815 atau 0,0005% dari total aset konsolidasian.

Ruang lingkup kegiatan BRI Remittance adalah menjalankan kegiatan umum di bidang *remittance*.

Kantor pusat BRI Remittance berlokasi di Lippo Centre, Tower II, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", serta praktek yang lazim berlaku di industri perbankan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

BRIS (Entitas Anak) yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi *Jarah*" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BRI dan Entitas Anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh BRI.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu periode berjalan maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Suatu pengendalian atas suatu Entitas Anak lain dianggap ada bilamana BRI menguasai lebih dari 50% hak suara, BRI dapat menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Entitas Anak, atau mempunyai kemampuan untuk memberhentikan atau menunjuk mayoritas Direksi Entitas Anak, atau mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Dalam mencatat akuisisi Entitas Anak digunakan metode pembelian. Biaya akuisisi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berkaitan secara langsung dengan akuisisi. Kelebihan biaya akuisisi atas nilai wajar aset neto Entitas Anak dicatat sebagai *goodwill*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Bank dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan Entitas Anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba neto dan ekuitas Entitas Anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas pada Entitas Anak tersebut.

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah, tagihan wesel ekspor, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan saham dengan metode biaya dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan BRI terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi dan liabilitas lain-lain.

BRI menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 60 termasuk penyesuaiannya tahun 2012, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 50 (Revisi 2010), berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban akan saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa depan suatu entitas terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.

PSAK No. 55 (Revisi 2011) menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan *item-item* non-keuangan. PSAK ini memberikan definisi dan karakteristik derivatif, kategori-kategori dari masing-masing instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai.

PSAK No. 60 termasuk penyesuaiannya tahun 2012, mensyaratkan pengungkapan signifikansi atas masing-masing instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerjanya, serta sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dihadapi BRI selama periode berjalan dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana BRI mengelola risiko tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi

BRI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki BRI terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- Yang dimaksudkan oleh BRI untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- Dalam hal BRI mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana BRI mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

BRI pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai menggunakan *credit derivatives* atau *swap* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- BRI mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan antara (a) BRI telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) BRI tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika BRI telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan BRI yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Penghapusbukuan kredit yang diberikan dilakukan ketika tidak terdapat lagi prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BRI dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga, untuk aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari *item* moneter, dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai dari aset keuangan tersebut.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau terjadi penurunan nilai, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklas pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

BRI tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

BRI tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam periode berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

- a. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b. Terjadi setelah BRI telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau BRI telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali BRI, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh BRI.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai neto-nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika BRI memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, di antara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran, termasuk didalamnya adalah nilai pasar dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga yang diberikan oleh *broker* (quoted price) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, BRI mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*) dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, BRI menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. BRI menggunakan *credit risk spread* sendiri di dalam menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar. Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, BRI mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, entitas mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

BRI menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menggunakan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, BRI menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar, *over the counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif. Beberapa *input* dari model ini tidak berasal dari data yang dapat diobservasi di pasar yang dengan demikian merupakan hasil estimasi berdasarkan asumsi tertentu.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan suatu estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki BRI. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti *model risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen BRI berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah di-review dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Nilai wajar dari liabilitas kontinjensi dan fasilitas kredit yang tidak dapat dibatalkan dibukukan sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset keuangan dan aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; liabilitas keuangan dan liabilitas yang dimiliki atau liabilitas yang akan diperoleh diukur menggunakan harga permintaan. Jika BRI memiliki posisi aset dan liabilitas konsolidasian dimana risiko pasarnya saling hapus, maka BRI dapat menggunakan nilai tengah dari pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

(x) Aset keuangan sukuk

BRI dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 110 "Investasi Sukuk" yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*.

Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* setelah pengakuan awal, diukur sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
- Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laporan laba rugi komprehensif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

Investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* setelah pengakuan awal, diukur sebagai berikut (lanjutan):

b. Diukur pada nilai wajar

- Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - Kuotasi harga di pasar aktif.
 - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif.
 - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Semua investasi sukuk BRI dan Entitas Anak dilakukan dengan akad *ijarah*.

d. Kuasi-reorganisasi

Berdasarkan PSAK No. 51 tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar tanpa melalui reorganisasi secara hukum. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang tanpa dibebani defisit karena defisit telah dieliminasi ke akun tambahan modal disetor.

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas BRI dalam rangka kuasi-reorganisasi ditentukan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia saat itu sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas yang bersangkutan serta mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi atau nilai pasar aset dan liabilitas yang bersangkutan. Apabila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, estimasi nilai sekarang atau arus kas yang didiskontokan. Untuk aset dan liabilitas tertentu, penilaian dilakukan sesuai dengan PSAK yang terkait.

Dalam RUPS Luar Biasa BRI tanggal 3 Oktober 2003 yang diaktakan oleh Notaris Imas Fatimah, S.H., dengan akta No. 6 pada tanggal yang sama, pemegang saham telah memberikan persetujuan prinsip atas rencana kuasi-reorganisasi BRI per tanggal 30 Juni 2003 (Catatan 3).

BRI telah melakukan penilaian kembali atas akun-akun aset dan liabilitasnya dalam rangka kuasi-reorganisasi per 30 Juni 2003. Karena nilai wajar aset neto (jumlah aset dikurangi dengan jumlah liabilitas) BRI lebih tinggi dari nilai buku aset neto maka berdasarkan PSAK No. 51 (sebelum direvisi pada tahun 2003) dalam pelaksanaan kuasi-reorganisasinya BRI tidak membukukan selisih lebih aset neto tersebut ke saldo defisit dan tetap menggunakan nilai buku aset dan liabilitas pada tanggal dilaksanakannya kuasi-reorganisasi. Sebagai hasil dari kuasi-reorganisasi tersebut, saldo defisit BRI yang dieliminasi ke akun tambahan modal disetor/agio saham adalah sebesar Rp24.699.387 pada tanggal 30 Juni 2003.

Bank Indonesia dalam suratnya No. 5/105/DPwB2/PwB24 tanggal 19 September 2003 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kuasi-reorganisasinya, BRI mengacu kepada PSAK No. 51 (sebelum direvisi pada tahun 2003) serta memperhatikan aspek-aspek lain yang terkait dengan pelaksanaan kuasi-reorganisasi tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

BRI dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan Entitas Anak jika:

- 1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan BRI dan Entitas Anak; (ii) memiliki kepentingan dalam BRI dan Entitas Anak yang memberikan pengaruh signifikan atas BRI dan Entitas Anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas BRI dan Entitas Anak;
- 2) suatu pihak yang berelasi dengan BRI dan Entitas Anak;
- 3) suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan Entitas Anak sebagai *venturer*;
- 4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci BRI dan Entitas Anak atau induk;
- 5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- 6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- 7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari BRI dan Entitas Anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan Entitas Anak.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan BRI telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara BRI dan Entitas Anak dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah Negara RI diungkapkan juga pada Catatan 43 tersebut.

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):

- d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - 1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - 2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

BRI pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika BRI menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka BRI memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

BRI menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- 1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
- 2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, BRI melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

BRI menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- 1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
- 2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
- 3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (*probability of default*). Kredit yang mempunyai data dan informasi kerugian historis yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana oleh Pemerintah Republik Indonesia dan didukung oleh kebijakan internal BRI, maka perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan dengan menghitung tingkat kerugian secara keseluruhan yang meliputi tingkat kerugian aktual ditambah dengan faktor-faktor risiko terkait yang relevan berdasarkan survei yang dilakukan secara periodik kepada pihak eksternal maupun internal BRI.

BRI menggunakan metode *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. BRI menggunakan rata-rata bergerak (*moving average*) data historis 3 tahun dalam menghitung *probability of default* (PD) dan *loss of given default* (LGD).

BRI menggunakan *fair value of collateral* sebagai arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal atas pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, BRI dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi komprehensif dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui pembalikan atas penurunan nilai sebelumnya pada laporan laba rugi komprehensif pada tahun berjalan.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif pada tahun berjalan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia, Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" sebagai panduan untuk menghitung minimum cadangan kerugian penurunan nilai yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Aset keuangan Entitas Anak yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah, BRIS menerapkan PBI No. 8/21/PBI/2006, tanggal 5 Oktober 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Aktiva produktif terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga, piutang *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, piutang *istishna*, piutang *qardh*, dan komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) 1% dari aktiva produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
- b) 5% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
- c) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
- d) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
- e) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

g. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *Deposit Facility*, *Term Deposit* dan *Deposit Facility Syariah*, sedangkan penempatan dana pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang (*inter-bank call money*) dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

i. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Efek-efek terdiri atas surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, obligasi Pemerintah, wesel tagih, *subordinated bond*, unit penyertaan reksadana, *medium term notes*, *US Treasury Bonds* dan *credit linked notes* serta obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Termasuk didalam efek-efek adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang tidak terkait dengan program rekapitalisasi seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah dalam mata uang asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder.

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi bank-bank umum yang terdiri dari obligasi dalam rangka rekapitalisasi BRI dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.

Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah (lanjutan)

Penilaian efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. BRI tidak mengklasifikasikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, BRI telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.
- 2) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.
- 3) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

j. Tagihan wesel ekspor

Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminan oleh bank lainnya. Tagihan wesel ekspor dicatat pada biaya perolehan amortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Tagihan wesel ekspor diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

k. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh BRI dan BRI Agro.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di Laporan Posisi Keuangan.

l. Piutang dan pembiayaan syariah

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *istishna* dan *ijarah*. Pembiayaan syariah terdiri atas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan BRIS, dimana BRIS membiayai kebutuhan investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Marjin *murabahah* yang ditanggung disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

Istishna adalah akad penjualan antara *al - mustashni* (pembeli) dan *al - shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al - mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara *muajjir* (lessor) dengan *mustajir* (lessee) atas *ma'jur* (obyek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan kerja sama antara BRIS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut dilakukan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama. Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian penurunan nilai. BRIS menetapkan penyisihan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (*mitra musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal. Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian penurunan nilai. BRIS menetapkan penyisihan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *letter of credit* (L/C) yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting bank).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

n. Investasi pada Entitas Asosiasi

BRI menerapkan PSAK No. 15 (Revisi 2009), "Investasi pada Entitas Asosiasi", yang mengatur akuntansi investasi dalam entitas asosiasi dalam hal penentuan pengaruh signifikan, metode akuntansi yang harus diterapkan, penurunan nilai investasi dan laporan keuangan tersendiri.

Investasi BRI pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana BRI mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham 20% sampai dengan 50%. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian BRI atas laba atau rugi neto *investee* dan penerimaan dividen dari *investee* sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, BRI mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berlaku, dalam laporan perubahan ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil transaksi-transaksi antara BRI dan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan BRI dalam entitas asosiasi.

Setelah menerapkan metode ekuitas, BRI menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi BRI dalam entitas asosiasi. BRI menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, BRI menghitung jumlah penurunan berdasarkan selisih jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi komprehensif.

Investasi BRI pada Entitas Asosiasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan dibawah 20% dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

o. Aset tetap

BRI dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap" dan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah".

ISAK 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Beban Ditangguhkan, Neto" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang, mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Sesuai dengan ketentuan transisi ISAK 25 tersebut, biaya perolehan pertama kali hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP yang diakui sebagai bagian dari akun "Beban Ditangguhkan, Neto" pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebelum tanggal 1 Januari 2012 direklasifikasi ke akun "Aset Tetap - Tanah" dan amortisasinya dihentikan pada tanggal 1 Januari 2012.

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	15
Kendaraan bermotor	5
Komputer dan mesin	3 - 5
Perlengkapan kantor	5

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomik masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan kedalam laba rugi untuk tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi, serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini, tanah tersebut disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

BRI dan Entitas Anak menerapkan secara prospektif PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", termasuk goodwill dan aset yang berasal dari kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011.

PSAK No. 48 (Revisi 2009) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas akan membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, BRI menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan atas penurunan nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka BRI akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, BRI dan Entitas Anak menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

q. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "Aset Lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (reconditioning cost) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

r. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas BRI kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Giro *wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan diberikan bonus berdasarkan kebijakan BRIS. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di BRIS.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya (lanjutan)

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada BRIS, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut BRIS tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas BRIS.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan BRIS atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan BRI dan BRI Agro. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dan BRIS. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dan BRIS.

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan *inter-bank call money* dengan promes yang berjangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari serta dinyatakan sesuai dengan jumlah liabilitas terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut.

Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana *syirkah* temporer yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BRI dan Entitas Anak kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

v. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan BRI adalah Obligasi.

Surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

x. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

y. Provisi

Bank menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Provisi diakui jika BRI dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang, akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

z. Cadangan dan pembayaran bunga tepat waktu pada BRI Unit

Pembayaran Bunga Tepat Waktu (PBTW) adalah insentif yang diberikan kepada para debitur Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang melunasi liabilitasnya membayar kembali kredit sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati bersama. Besarnya PBTW adalah sebesar 25% dari bunga yang diterima baik untuk Kupedes Modal Kerja maupun Kupedes Investasi. PBTW disajikan sebagai pengurang pendapatan bunga dari kredit yang diberikan. BRI membentuk Cadangan Pembayaran Bunga Tepat Waktu (CPBTW) atas PBTW tersebut dan menyajikan pada akun "Liabilitas Lain-lain".

aa. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, BRI dan BRI Agro mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

aa. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (*impairment*) dan pendapatan bunga tersebut akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

ab. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

ac. Pendapatan dan beban syariah

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dari transaksi *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pendapatan dari transaksi *murabahah* dan *ijarah* diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

ad. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BRI. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran tertutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ad. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

BRI menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti penghargaan tanda jasa dan cuti besar dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BRI dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Penyisihan biaya jasa masa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi syarat tersebut. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun/periode berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset dana pensiun, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang memenuhi syarat.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu dari imbalan kerja jangka panjang lainnya langsung diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

ae. Opsi saham

Sehubungan dengan IPO BRI memberikan opsi saham kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BRI. Biaya kompensasi saham pada tanggal penerbitan dihitung berdasarkan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" berdasarkan program hak yang diakui pada tahun berjalan (*cliff-vesting scheme*) dengan metode garis lurus selama masa tunggu (*vesting period*). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas.

Nilai wajar dari opsi saham tersebut dinilai dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Black-Scholes*.

af. Laba per lembar saham

BRI menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011), "Laba Per Saham".

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk (BRI) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ag. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

BRI dan Entitas Anak menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
1 Dolar Amerika Serikat	12.170,00	9.637,50
1 Pound Sterling Inggris	20.110,93	15.514,93
100 Yen Jepang	11.575,00	11.176,50
1 Euro Eropa	16.759,31	12.731,62
1 Dolar Hong Kong	1.569,54	1.243,27
1 Riyal Arab Saudi	3.244,81	2.569,59
1 Dolar Singapura	9.622,08	7.878,61
1 Ringgit Malaysia	3.715,47	3.147,97
1 Dolar Australia	10.855,65	10.007,10
1 Yuan China	2.010,28	1.546,52
1 Baht Thailand	371,15	314,85
1 Franc Swiss	13.674,16	10.536,25
1 Dolar Kanada	11.434,22	9.686,91
1 Dolar Brunei Darussalam	9.620,94	7.878,61
1 Danish Kroner	2.246,78	1.708,60
1 Won Korea Selatan	11,53	9,00
1 Dolar New Zealand	9.995,83	7.918,18
1 Papua New Guinean Kina	4.856,09	4.735,56
1 Dirham Arab Emirates	3.313,50	2.623,84

ah. Penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan di luar negeri

BRI memiliki 1 (satu) Kantor Cabang di Cayman Islands, serta 2 (dua) Kantor Perwakilan masing-masing di New York dan Hong Kong yang merupakan entitas asing yang terpisah.

Untuk tujuan penggabungan laporan keuangan konsolidasian, seluruh akun Kantor Cabang dan Perwakilan di luar negeri dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.
- Pendapatan, beban, laba dan rugi - menggunakan kurs tengah rata-rata yang berlaku pada bulan yang bersangkutan. Saldo akhir tahun merupakan penjumlahan saldo bulanan pendapatan, beban, laba dan rugi selama tahun yang bersangkutan.
- Pos ekuitas - Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor menggunakan kurs historis.
- Laporan arus kas - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan, kecuali pos-pos laba rugi yang menggunakan kurs tengah rata-rata dan pos-pos ekuitas yang menggunakan kurs historis.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan di kelompok ekuitas sebagai "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing".

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ai. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Transaksi derivatif diakui sesuai dengan PSAK No. 55. Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh *broker* (quoted price) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

aj. Perpajakan

BRI dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan".

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Kelompok Usaha mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ak. Informasi segmen

BRI dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. *Item-item* segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

BRI dan Entitas Anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi dan lainnya serta Entitas Anak, juga berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Asia dan Amerika Serikat.

al. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian BRI dan Entitas Anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi BRI dan Entitas Anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian BRI dan Entitas Anak sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen BRI telah melakukan penilaian atas kemampuan BRI dan Entitas Anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa BRI dan Entitas Anak memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen BRI tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan BRI dan Entitas Anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

al. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Manajemen BRI dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) telah dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi BRI dan Entitas Anak seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika.

Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan *judgement* yang signifikan. Dalam membuat *judgement* ini, BRI dan Entitas Anak mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo, maka jika BRI dan Entitas Anak gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang tidak signifikan saat mendekati jatuh tempo, BRI dan Entitas Anak harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual. Surat berharga yang tersedia untuk dijual tersebut akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Manajemen BRI dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arm's length*.

Kontinjensi

Manajemen BRI dan Entitas Anak sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum BRI dan Entitas Anak didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen BRI dan Entitas Anak tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

al. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. BRI dan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali BRI dan Entitas Anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah

Manajemen BRI dan Entitas Anak menelaah portofolio kredit dan pembiayaan/piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, BRI dan Entitas Anak membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok peminjam, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. BRI dan Entitas Anak menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Manajemen BRI menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis dari aset tetap

Manajemen BRI memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa. Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

al. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Umur ekonomis dari aset tetap (lanjutan)

masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan dari taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban usaha.

Penurunan nilai aset non-keuangan

BRI dan Entitas Anak mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Manajemen BRI dan Entitas Anak mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan dalam hal terdapat kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dikompensasi terhadap kerugian yang dapat digunakan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

BRI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

am. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif dan komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, BRI dan BRI Agro tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun manajemen BRI tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Atas aset non produktif, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Atas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan selisih antara nilai tercatat dan nilai kini atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi probable).

an. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

BRI menerapkan standar akuntansi revisi pada tanggal 1 Januari 2013, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian BRI dan Entitas Anak tetapi tidak memiliki dampak yang signifikan, adalah Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan atas PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan ini menyediakan pengungkapan kualitatif, dalam konteks pengungkapan kuantitatif, yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mampu menghubungkan pengungkapan-pengungkapan terkait, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami gambaran keseluruhan mengenai sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Interaksi antara pengungkapan kualitatif dan kuantitatif menghasilkan pengungkapan informasi dengan suatu cara yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi eksposur risiko suatu entitas dengan lebih baik.

3. PELAKSANAAN KUASI-REORGANISASI

Sebagai dampak dari kondisi ekonomi, BRI menderita akumulasi kerugian yang signifikan pada tahun 1999 sejumlah Rp28.221.364. Setelah rekapitalisasi BRI pada bulan Juli 2000 dan Oktober 2000, cadangan penghapusan aktiva produktif BRI berkurang secara signifikan sehubungan dengan pengalihan aktiva produktif *non-performing* ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BRI memiliki akumulasi saldo rugi (defisit) sejumlah Rp24.699.387 dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2003.

Untuk memperoleh awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit maka BRI melaksanakan kuasi-reorganisasi per 30 Juni 2003 (Catatan 2d).

Manajemen BRI telah menyiapkan proyeksi laporan keuangan yang menunjukkan profitabilitas yang kuat dan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau *CAR*) yang sehat sejalan dengan dukungan dari kekuatan utama BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang memfokuskan diri pada pembiayaan Mikro, Konsumer, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Sektor Agribisnis.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		18.775.487		13.610.755
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	15.234.745	185.407	22.215.525	214.102
Riyal Arab Saudi	22.226.667	72.121	8.155.415	20.956
Dolar Australia	3.396.638	36.873	658.143	6.586
Dolar Singapura	2.887.148	27.780	2.489.050	19.610
Ringgit Malaysia	7.139.467	26.526	1.044.325	3.287
Euro Eropa	1.541.528	25.835	1.009.273	12.850
Yen Jepang	88.974.900	10.299	10.981.900	1.227
Yuan Cina	1.678.716	3.375	2.119.113	3.277
Dolar Hong Kong	1.505.130	2.362	414.231	515
Pound Sterling Inggris	74.714	1.503	46.214	717
Franc Swiss	65.410	894	11.040	116
Baht Thailand	2.221.340	824	4.365.130	1.374
Won Korea Selatan	68.568.000	791	-	-
Dolar New Zealand	78.155	781	-	-
Dolar Kanada	38.750	443	6.295	61
Papua New Guinean Kina	75.060	365	-	-
Dolar Brunei Darussalam	11.620	112	3.883	31
		396.291		284.709
		19.171.778		13.895.464

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, saldo dalam mata uang Rupiah tersebut, sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah masing-masing sebesar Rp4.720.085 dan Rp3.555.174.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

Giro pada Bank Indonesia terdiri atas:

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		34.124.694		37.334.059
Dolar Amerika Serikat	541.807.803	6.593.801	538.528.330	5.190.067
		40.718.495		42.524.126

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, didalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah, masing-masing sebesar Rp679.112 dan Rp528.298.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Rasio GWM BRI (Entitas Induk) (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
GWM Utama - Rupiah	8,02%	10,64%
GWM Sekunder - Rupiah	8,40	4,94
GWM Utama - Valuta Asing	8,00	8,17

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2013 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/7/2013 tanggal 26 September 2013 tentang "Perubahan kedua atas PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang GWM Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing". Sedangkan rasio GWM tanggal 31 Desember 2012 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang "Perubahan atas PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang GWM Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing".

GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar:

- 2,5% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah sampai dengan tanggal 30 September 2013;
- 3% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013;
- 3,5% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan 1 Desember 2013; dan
- 4% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 2 Desember 2013

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, BRI harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar 8%. Untuk GWM Sekunder pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, masing-masing adalah sebesar 4% dan 2,5% dalam Rupiah.

BRI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

6. GIRO PADA BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang:

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		9.093		96.268
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	452.562.200	5.507.682	234.372.503	2.258.765
Yuan Cina	873.761.773	1.756.501	579.827.548	896.712
Euro Eropa	43.824.139	734.462	44.151.883	562.125
Dolar Australia	48.462.724	526.094	19.104.536	191.181
Dolar Singapura	18.903.491	181.891	13.964.011	110.017
Yen Jepang	1.259.084.064	145.739	861.128.260	96.244
Pound Sterling Inggris	5.575.667	112.132	15.512.348	240.673
Dolar Hong Kong	63.659.364	99.916	133.138.148	165.526
Dirham Arab Emirates	25.111.745	83.208	18.138.294	47.592
Riyal Arab Saudi	25.320.262	82.160	42.256.174	108.581
Franc Swiss	4.272.851	58.428	2.632.911	27.741
Dolar Selandia Baru	1.151.474	11.510	1.498.579	11.866
Kroner Swedia	3.339.004	6.335	773.002	1.143
Kroner Norwegia	2.437.940	4.879	-	-
Dolar Kanada	412.728	4.719	1.796.961	17.407
		9.315.656		4.735.573
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
<u>Rupiah</u>		3.126		1.627

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang (lanjutan):

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u> (lanjutan)				
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Hong Kong	64.414.371	101.101	6.457.191	8.028
Dolar Amerika Serikat	511.171	6.221	67.445	650
		107.322		8.678
		9.435.197		4.842.146
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(77)		(171)
		9.435.120		4.841.975

b) Berdasarkan Bank:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	6.874	94.698
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	1.108	539
Lain-lain	1.111	1.031
	9.093	96.268
<u>Mata uang asing</u>		
JP Morgan Chase Bank, N.A.	2.286.308	1.177.222
Standard Chartered Bank	1.413.727	697.117
Industrial and Commercial Bank of China (Indonesia) Co. Ltd	964.312	419.292
Bank of America, New York	822.611	1.041
Bank of China	792.190	477.420
Federal Reserve Bank of New York	621.092	46.011
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	577.174	388.774
Commerzbank, A.G.	484.150	121.539
Commonwealth Bank	379.394	21.398
The Royal Bank of Scotland	158.716	624.816
ANZ Banking Group Limited	146.700	169.783
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	143.416	74.630
ING Belgium N.V. Brussels	120.210	208.668
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	112.426	52.292
Citibank, N.A.	91.251	45.833
Al Rajhi Bank	67.769	108.581
UBS AG	45.437	13.553
The Bank of New York Mellon	41.822	28.851
Lain-lain	46.951	58.752
	9.315.656	4.735.573

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Bank (lanjutan):

	2013	2012
Pihak berelasi (Catatan 43)		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.646	1.170
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	470	447
PT Bank Bukopin Tbk	10	10
	<u>3.126</u>	<u>1.627</u>
<u>Mata uang asing</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	101.107	8.028
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.215	650
	<u>107.322</u>	<u>8.678</u>
	9.435.197	4.842.146
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(77)	(171)
	<u>9.435.120</u>	<u>4.841.975</u>

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 semua giro pada bank lain diklasifikasikan "Lancar".

d) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2013	2012
Rupiah	0,59%	1,58%
Dolar Amerika Serikat	0,01	0,10

e) Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Giro Pada Bank Lain:

	2013	2012
Saldo awal	171	61
(Pembalikan) pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	(94)	110
Saldo akhir	<u>77</u>	<u>171</u>

BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali untuk giro pada bank lain milik BRIS (Entitas Anak) (berdasarkan prinsip syariah) penilaian dilakukan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp77 dan Rp171 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat giro pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 38.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis:

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Bank Indonesia				
<i>Deposit Facility</i>		22.813.358		14.929.280
<i>Deposit Facility Syariah</i>		897.500		1.101.000
<i>Term Deposit</i>		-		43.702.732
		<u>23.710.858</u>		<u>59.733.012</u>
<i>Inter-bank call money</i>				
PT Bank Mega Tbk		320.000		300.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		-		250.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk		260.000		150.000
Citibank. N.A.		250.000		45.000
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited		200.000		-
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten Tbk		120.000		50.000
PT Bank DBS Indonesia		100.000		45.000
PT Bank DKI		100.000		-
PT Bank BNP Paribas Indonesia		95.000		-
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk		89.040		-
PT BPD Riau Kepri		25.000		-
PT Bank Mestika Dharma Tbk		25.000		-
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)		25.000		-
PT BPD Sumatera Utara		25.000		-
PT Bank Sinarmas Tbk		20.000		-
PT BPD Kalimantan Selatan		15.000		-
PT BPD Jawa Tengah		-		40.000
PT Bank UOB Indonesia		-		40.000
		<u>1.669.040</u>		<u>920.000</u>
		<u>25.379.898</u>		<u>60.653.012</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Bank Indonesia - <i>Term Deposit</i>	599.998.264	7.301.979	99.979.409	963.552

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat (lanjutan)</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
Citibank. N.A.	84.290.000	1.025.809	86.200.000	830.753
The Bank of New York Mellon	58.800.000	715.596	138.900.000	1.338.649
First Union. NY	45.600.000	554.952	149.600.000	1.441.770
Bank Of China Limited	4.000.000	48.680		-
Bank of America. N.A.		-	29.560.000	284.885
US Bank		-	27.509	265
		2.345.037		3.896.322
<u>Deposito berjangka</u>				
Standard Chartered Bank	229.732	2.796	1.000.000	9.637
		9.649.812		4.869.511
		35.029.710		65.522.523
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
<u>Rupiah</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		400.000		-
PT Bank Bukopin Tbk		210.000		150.000
PT BTMU-BRI Finance		130.000		285.000
		740.000		435.000
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	44.139.117	537.173	29.614.072	285.405
		1.277.173		720.405
		36.306.883		66.242.928

b) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	25.379.898	26.030.740
> 1 bulan - 3 bulan	-	21.131.764
> 3 bulan - 1 tahun	-	13.490.508
	25.379.898	60.653.012

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

	2013	2012
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
≤ 1 bulan	9.647.016	3.896.322
> 1 bulan - 3 bulan	-	491.459
> 3 bulan - 1 tahun	2.796	481.730
	<u>9.649.812</u>	<u>4.869.511</u>
	<u>35.029.710</u>	<u>65.522.523</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	700.000	180.000
> 1 bulan - 3 bulan	40.000	60.000
> 3 bulan - 1 tahun	-	195.000
	<u>740.000</u>	<u>435.000</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
≤ 1 bulan	537.173	285.405
	<u>1.277.173</u>	<u>720.405</u>
	<u>36.306.883</u>	<u>66.242.928</u>

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan "Lancar".

d) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2013	2012
<u>Rupiah</u>		
<i>Deposit Facility</i>	4,92%	3,90%
<i>Term Deposit</i>	4,42	4,41
<i>Inter-bank call money</i>	5,81	4,87
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
<i>Term Deposit</i>	0,13	0,15
<i>Inter-bank call money</i>	0,32	0,67
Deposito berjangka	0,02	0,66

BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali untuk penempatan pada bank lain milik BRIS (Entitas Anak) (berdasarkan prinsip syariah) penilaian dilakukan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, karena Manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 38.

8. EFEK-EFEK

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis:

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Nilai Wajar melalui Laporan				
<u>Laba Rugi</u>				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Sertifikat Bank Indonesia		87.424		-
Reksadana		10.702		10.998
		98.126		10.998
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>Credit Linked Notes</i>	55.000.000	669.350	55.000.000	530.063
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah		131.035		71.925
		898.511		612.986
<u>Tersedia untuk Dijual</u>				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Sertifikat Bank Indonesia		2.853.028		4.043.563
Sertifikat Deposito Bank Indonesia		1.342.650		-
Reksadana		75.013		-
Obligasi		25.487		-
		4.296.178		4.043.563
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi	35.431.553	431.202	14.691.569	141.590
<i>U.S Treasury Bonds</i>	26.894.823	327.310	40.415.875	389.508
<i>Medium term notes</i>		-	5.029.313	48.470
		758.512		579.568

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Tersedia untuk Dijual (lanjutan)				
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah		6.771.956		6.424.673
Reksadana		252.749		-
Obligasi		186.764		202.509
		<u>7.211.469</u>		<u>6.627.182</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah	251.828.595	3.064.754	234.108.741	2.256.223
Obligasi	3.545.193	43.145	1.924.669	18.549
		<u>3.107.899</u>		<u>2.274.772</u>
		<u>15.374.058</u>		<u>13.525.085</u>
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Sertifikat Bank Indonesia		5.087.423		12.513.201
Sertifikat Deposito Bank Indonesia		2.375.218		-
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)		1.050.000		575.000
Obligasi		918.425		603.000
Obligasi Subordinasi		40.000		89.873
Medium Term Notes		25.000		-
		<u>9.496.066</u>		<u>13.781.074</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Credit Linked Notes	291.162.942	3.543.453	328.714.293	3.167.984
Wesel Tagih	7.000.000	85.190	12.000.000	115.650
		<u>3.628.643</u>		<u>3.283.634</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah		11.223.864		8.749.563
Obligasi		855.553		753.716
Medium Term Notes		25.000		100.000
		<u>12.104.417</u>		<u>9.603.279</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah	84.306.081	1.026.005	34.405.395	331.582
Obligasi	12.057.272	146.737		-
		<u>1.172.742</u>		<u>331.582</u>
		<u>26.401.868</u>		<u>26.999.569</u>
		<u>42.674.437</u>		<u>41.137.640</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(772)		(760)
		<u>42.673.665</u>		<u>41.136.880</u>

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, semua efek-efek diklasifikasikan "Lancar".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

c) Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo:

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	4.643.601	4.554.059
> 1 bulan - 3 bulan	1.958.854	1.650.919
> 3 bulan - 1 tahun	6.489.098	11.067.784
> 1 tahun	798.817	562.873
	<u>13.890.370</u>	<u>17.835.635</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
≤ 1 bulan	758.513	579.569
> 1 bulan - 3 bulan	2.733.930	-
> 3 bulan - 1 tahun	866.921	300.738
> 1 tahun	697.141	3.512.958
	<u>5.056.505</u>	<u>4.393.265</u>
	<u>18.946.875</u>	<u>22.228.900</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	7.355.448	6.542.974
> 1 bulan - 3 bulan	22.126	26.822
> 3 bulan - 1 tahun	1.143.379	435.029
> 1 tahun	10.925.968	9.297.561
	<u>19.446.921</u>	<u>16.302.386</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
≤ 1 bulan	3.107.899	2.226.584
> 1 tahun	1.172.742	379.770
	<u>4.280.641</u>	<u>2.606.354</u>
	<u>23.727.562</u>	<u>18.908.740</u>
	42.674.437	41.137.640
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(772)	(760)
	<u>42.673.665</u>	<u>41.136.880</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit:

d.1. Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S Treasury Bonds*. Rincian obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Seri	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			2013	2012
Nilai Wajar melalui Laporan				
Laba Rugi				
Rupiah				
FR0062	6,38	15 April 2042	14.300	30.033
FR0064	6,13	15 Mei 2028	23.288	20.750
FR0065	6,63	15 Mei 2033	23.450	21.142
FR0068	8,38	15 Maret 2034	18.969	-
FR0070	8,38	15 Maret 2024	29.858	-
SR004	6,25	21 September 2015	21	-
SR005	6,00	27 Februari 2016	6.170	-
ORI010	8,50	15 Oktober 2016	14.979	-
			131.035	71.925
Tersedia untuk Dijual				
Rupiah				
FR0027	9,50	15 Juni 2015	242.391	263.095
FR0028	10,00	15 Juli 2017	105.986	120.834
FR0031	11,00	15 November 2020	56.702	68.796
FR0040	11,00	15 September 2025	419.232	530.673
FR0042	10,25	15 Juli 2027	214.085	275.402
FR0045	9,75	15 Mei 2037	10.471	14.000
FR0047	10,00	15 Februari 2028	181.043	234.538
FR0050	10,50	15 Juli 2038	28.049	37.676
FR0052	10,50	15 Agustus 2030	330.095	446.934
FR0053	8,25	15 Juli 2021	335.164	409.920
FR0054	9,50	15 Juli 2031	142.540	187.189
FR0055	7,38	15 September 2016	216.315	238.276
FR0056	8,38	15 September 2026	162.338	209.620
FR0057	9,50	15 Mei 2041	51.103	69.583
FR0058	8,25	15 Juni 2032	399.679	524.274
FR0059	7,00	15 Mei 2027	409.121	521.784
FR0060	6,25	15 April 2017	442.243	492.300
FR0061	7,00	15 Mei 2022	440.417	547.178
FR0062	6,38	15 April 2042	291.270	409.964
FR0063	5,63	15 Mei 2023	387.145	209.652
FR0064	6,13	15 Mei 2028	499.417	206.672
FR0065	6,63	15 Mei 2033	413.417	216.126
FR0066	5,25	15 May 2018	262.507	-
FR0068	8,38	15 Maret 2034	175.444	-
FR0069	7,88	15 April 2019	65.320	-
FR0070	8,38	15 Maret 2024	171.773	-
FR0071	9,00	15 Maret 2029	120.089	-
ORI005	11,45	15 September 2013	-	15.263
ORI007	7,95	15 Agustus 2013	-	68.571
ORI008	7,30	15 Oktober 2014	17.763	9.618
ORI009	6,25	15 Oktober 2015	26.045	10.156
ORI010	8,50	15 Oktober 2016	80.259	-
ZC0005	-	20 Februari 2013	-	29.710
SPN	beragam	beragam	74.533	56.869
			6.771.956	6.424.673

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Seri	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			2013	2012
Tersedia untuk Dijual				
(lanjutan)				
Dolar Amerika Serikat				
RI0014	6,75	10 Maret 2014	682.431	688.842
RI0014	10,38	4 Mei 2014	37.667	32.418
RI0015	7,25	20 April 2015	195.392	206.459
RI0016	7,50	15 Januari 2016	80.565	67.583
RI0017	6,88	9 Maret 2017	176.268	436.723
RI0018	6,88	17 Januari 2018	150.416	129.335
RI0020	5,88	13 Maret 2020	154.621	139.358
RI0021	4,88	5 Mei 2021	276.411	253.320
RI0023	3,38	15 April 2023	100.695	-
RI0035	8,50	12 Oktober 2035	44.295	46.405
RI0037	6,63	17 Februari 2037	184.961	167.885
RI0038	7,75	17 Januari 2038	82.849	87.895
RI0142	5,25	17 Januari 2042	20.724	-
RI0422	3,75	25 April 2022	164.321	-
RI0423	3,38	15 April 2023	183.134	-
RI0443	4,63	15 April 2043	309.994	-
RI1023	5,38	17 Oktober 2023	36.331	-
<i>U.S Treasury Bonds</i>	5,38	15 Februari 2031	327.310	389.508
USDFR0001	3,50	15 Mei 2017	183.679	-
			3.392.064	2.645.731
			10.164.020	9.070.404
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo				
Rupiah				
FR0026	11,00	15 Oktober 2014	156.670	158.613
FR0028	10,00	15 Juli 2017	301.847	304.636
FR0030	10,75	15 Mei 2016	32.381	33.912
FR0039	11,75	15 Agustus 2023	52.296	52.804
FR0040	11,00	15 September 2025	57.123	57.451
FR0042	10,25	15 Juli 2027	169.881	169.863
FR0043	10,25	15 Juli 2022	523.620	522.622
FR0044	10,00	15 September 2024	76.082	76.426
FR0045	9,75	15 Mei 2037	224.164	224.016
FR0046	9,50	15 Juli 2023	182.197	181.757
FR0047	10,00	15 Februari 2028	381.298	381.973
FR0048	9,00	15 September 2018	107.571	107.074
FR0049	9,00	15 September 2013	-	90.453
FR0050	10,50	15 Juli 2038	68.539	68.527
FR0052	10,50	15 Agustus 2030	296.813	296.747
FR0053	8,25	15 Juli 2021	590.392	590.002
FR0054	9,50	15 Juli 2031	352.730	352.469
FR0055	7,38	15 September 2016	656.387	655.829
FR0056	8,38	15 September 2026	798.687	797.056
FR0058	8,25	15 Juni 2032	550.097	551.636
FR0059	7,00	15 Mei 2027	259.577	259.829
FR0060	6,25	15 April 2017	321.533	323.810
FR0061	7,00	15 Mei 2022	429.254	430.932
FR0062	6,38	15 April 2042	66.586	66.603
FR0063	5,63	15 Mei 2023	486.440	57.551
FR0064	6,13	15 Mei 2028	147.199	24.323
FR0065	6,63	15 Mei 2033	247.954	100.299
FR0066	5,25	15 Mei 2018	119.554	-
FR0068	8,38	15 Maret 2034	142.889	-
FR0069	7,88	15 April 2019	332.414	-
FR0070	8,38	15 Maret 2024	416.094	-
FR0071	9,00	15 Maret 2029	226.824	-
IFR0003	9,25	15 September 2015	113.408	114.544

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Seri	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			2013	2012
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo				
(lanjutan)				
<u>Rupiah (lanjutan)</u>				
IFR0004	9,00	15 Oktober 2013	-	49.877
IFR0005	9,00	15 Januari 2017	307.203	310.661
IFR0006	10,25	15 Maret 2030	47.928	47.914
IFR0007	10,25	15 Januari 2025	309.906	311.073
IFR0010	10,00	15 Februari 2036	81.778	82.631
ORI008	7,30	15 Oktober 2014	3.458	-
ORI009	6,25	15 Oktober 2015	569	-
ORI010	8,50	15 Oktober 2016	12.650	-
PBS0001	4,45	15 Februari 2018	210.101	144.973
PBS0002	5,45	15 Januari 2022	242.847	241.958
PBS0003	6,00	15 Januari 2027	243.510	243.048
PBS0004	6,10	15 Februari 2037	108.969	94.710
PBS0005	6,75	15 April 2043	4.821	-
PBS0006	8,25	15 September 2020	5.294	-
SR002	8,70	10 Februari 2013	-	26.822
SR003	8,15	23 Februari 2014	22.126	18.131
SR004	6,25	21 September 2015	13.732	5.309
SR005	6,00	27 Februari 2016	81.322	-
SPN	beragam	beragam	639.149	120.699
			11.223.864	8.749.563
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
RI0015	7,25	20 April 2015	70.134	31.337
RI0016	7,50	15 Januari 2016	172.365	-
RI0018	6,88	17 Januari 2018	119.484	19.209
RI0020	5,88	13 Maret 2020	90.531	72.266
RI0021	4,88	5 Mei 2021	27.203	27.202
RI0037	6,63	17 Februari 2037	168.461	133.379
USDFR0001	3,50	15 Mei 2017	134.427	-
Indois18	4,88	5 Mei 2021	60.850	48.189
Indois19s	6,13	15 Maret 2019	182.550	-
			1.026.005	331.582
			12.249.869	9.081.145
			22.544.924	18.223.474

Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual" berkisar dari 70,97% sampai dengan 144,12% dan 94,78% sampai dengan 150,71% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

d.2. Obligasi

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{a)}		Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			2013	2012	2013	2012
Tersedia untuk Dijual						
<u>Pihak Ketiga</u>						
<u>Rupiah</u>						
PT Bank Permata Tbk Tahap I 2013 Seri A	10,00	3 Januari 2015	idAA+	-	25.487	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{a)}		Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			2013	2012	2013	2012
Tersedia untuk Dijual						
(lanjutan)						
<u>Pihak Ketiga (lanjutan)</u>						
<u>Dolar Amerika Serikat</u>						
<u>PT Medco Energi</u>						
Internasional Tbk						
Tahap I 2011	6,05	14 Juli 2016	idAA-	idAA-	123.298	90.912
General Electric Company	3,10	9 Januari 2023	A1**)	-	81.137	-
Morgan Stanley	3,75	25 Februari 2023	A-****)	-	35.599	-
Mizuho Bank	3,50	21 Maret 2023	A+****)	-	34.971	-
Hewlett-Packard Company	4,30	1 Juni 2021	Baa1**)	-	25.310	-
Goldman Sach	3,30	3 Mei 2015	A****)	A****)	25.273	20.295
Kraft Foods	5,00	4 Juni 2042	Baa2**)	-	24.462	-
Indian Oil Corporation Ltd	5,75	1 Agustus 2023	BBB-****)	-	23.645	-
Apple Incorporation	3,85	4 Mei 2043	AA+****)	-	20.534	-
Alcoa Inc	5,72	23 Februari 2019	Ba1**)	-	12.988	-
Darden Restaurants Inc	4,50	15 Oktober 2021	Baa3**)	-	12.048	-
Goldman Sach	3,63	22 Januari 2023	A****)	-	11.937	-
Barclays Bank	5,14	14 Oktober 2020	-	A-****)	-	30.383
					431.202	141.590
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>						
<u>Rupiah</u>						
<u>PT Jasa Marga</u>						
(Persero) Tbk						
Seri XIII R	10,25	21 Juni 2017	idAA	idAA	99.977	111.497
<u>PT Perusahaan Listrik</u>						
Negara (Persero)						
Seri IX A	10,40	10 Juli 2017	idAAA	idAA+	76.858	80.180
<u>Perum Pegadaian</u>						
Seri XII B	8,00	4 September 2017	idAA+	idAA+	9.929	10.832
					186.764	202.509
<u>Dolar Amerika Serikat</u>						
<u>PT Bank Negara</u>						
Indonesia (Persero) Tbk	4,13	27 April 2017	BB****)	idAA	24.344	18.549
PT Pertamina (Persero)	5,63	20 Mei 2043	Baa3**)	-	9.695	-
<u>PT Perusahaan Listrik</u>						
Negara (Persero)	5,25	24 Oktober 2042	Baa3**)	-	9.106	-
					43.145	18.549
					686.598	362.648
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo						
<u>Pihak Ketiga</u>						
<u>Rupiah</u>						
<u>PT Japfa Comfeed</u>						
Indonesia Tbk						
Seri I 2012	9,90	12 Januari 2017	idA+	idA	150.000	150.000
<u>PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.</u>						
Tahap I Seri C 2011	9,00	16 Desember 2016	idAA+	-	4.009	-
Tahap I Seri C 2013	7,85	1 Maret 2016	idAA+	-	15.000	-
Tahap I Seri D 2013	8,90	1 Maret 2018	idAA+	-	9.856	-
Tahap II Seri A 2013	9,15	3 Nopember 2014	idAA+	-	5.012	-
Sukuk Tahap I Seri C 2013	7,85	1 Maret 2016	idAA+(Sy)	-	15.000	-

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{a)}		Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			2013	2012	2013	2012
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (lanjutan)						
Pihak Ketiga (lanjutan)						
Rupiah (lanjutan)						
PT Bakrieland						
Development Tbk						
Seri I B	12,85	11 Maret 2013	-	idB	-	100.000
PT Bank Danamon						
Indonesia Tbk						
Seri II A	8,75	9 Desember 2013	-	idAA+	-	20.000
Seri II B	9,00	9 Desember 2015	idAA+	idAA+	81.292	30.000
PT Bank Pan						
Indonesia Tbk						
Seri III 2009	11,50	6 Oktober 2014	idAA	-	26.595	-
Seri IV 2010	9,00	9 Nopember 2015	idAA	-	9.995	-
PT BFI Finance						
Seri I B 2013	8,50	19 Februari 2015	idA+	-	25.000	-
PT Salim Invomas						
Pratama						
Sukuk Ijarah I	11,65	1 Desember 2014	idAA	idAA	25.000	25.000
PT Federal International Finance						
Tahap I Seri C	7,65	20 April 2015	idAA+	-	29.430	-
Tahap II Seri A	6,75	14 April 2014	idAA+	-	10.000	-
Tahap II Seri B	7,75	4 April 2016	idAA+	-	10.000	-
PT Bank OCBC NISP						
Seri I B	6,90	19 Februari 2015	idAAA	-	4.980	-
Seri I C	7,40	19 Februari 2016	idAAA	-	34.256	-
PT Malindo Feedmill Tbk						
Seri I	11,80	6 Maret 2013	-	idAAA	-	10.000
PT BW Plantation Tbk						
Seri I	10,68	16 November 2015	idBBB+	idA-	25.000	25.000
PT Astra Sedaya Finance						
Seri XII C	9,70	25 Februari 2014	idAA+	idAA+	50.000	50.000
Tahap II Seri A 2013	8,75	6 Desember 2014	idAA+	idAA+	50.000	-
PT Agung Podomoro						
Land Tbk						
Seri I A	10,00	25 Agustus 2014	idA	idA	6.000	6.000
Seri II	9,38	15 Agustus 2017	idA	idA	10.000	10.000
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)						
Seri VI	9,88	13 Januari 2016	idA	idA	10.000	10.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk						
Seri B	8,30	23 Desember 2016	idAAA	idAAA	30.000	30.000
Seri I A 2013	8,75	20 November 2015	idAAA	-	40.000	-
Seri I C 2013	9,75	20 November 2018	idAAA	-	30.000	-
PT Bank Sumut						
Seri III	10,13	5 Juli 2016	idA+	idA+	10.000	10.000
PT Bank Jabar Banten Tbk						
Seri VII A	9,20	9 Februari 2014	idAA-	idAA-	20.000	20.000
PT Bank DKI						
Seri VI A	9,25	17 Juni 2014	idA+	idA+	17.000	17.000
PT Bank BTPN						
Seri I A	7,75	3 Agustus 2015	AA-	AA-	30.000	30.000
Seri I B	8,25	3 Agustus 2017	AA-	AA-	20.000	20.000
PT Bank Internasional						
Indonesia Tbk						
Seri I A 2012	7,60	31 Oktober 2015	idAAA	idAAA	25.000	25.000
Seri I B 2012	8,00	31 Oktober 2017	idAAA	idAAA	15.000	15.000
PT Bank Permata Tbk						
Tahap I 2013 Seri A	10,00	3 Januari 2015	idAA+	-	50.000	-
Tahap I 2013 Seri B	10,50	24 Desember 2016	idAA+	-	25.000	-
					918.425	603.000

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{a)}		Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			2013	2012	2013	2012
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (lanjutan)						
<u>Pihak berelasi</u>						
<u>(Catatan 43)</u>						
<u>Rupiah</u>						
PT Danareksa (Persero)						
Seri III C	13,50	20 Juni 2013	-	idA	-	5.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia						
Seri I B	8,85	8 Juli 2013	idAAA	idAAA	-	29.000
Seri I C	9,60	8 Juli 2015	idAAA	idAAA	20.000	20.000
Seri A	7,00	20 Desember 2014	idAAA	idAAA	37.000	37.000
Seri B	7,75	20 Desember 2016	idAAA	idAAA	38.000	38.000
Seri I A 2012	6,25	7 Desember 2013	idAAA	idAAA	-	25.000
Seri I B 2012	6,50	27 November 2015	idAAA	idAAA	25.000	25.000
Tahap III Seri A	6,15	2 Juni 2014	idAAA	-	60.000	-
Tahap III Seri B	6,40	23 Mei 2016	idAAA	-	60.000	-
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)						
Seri I B	7,50	27 Desember 2017	idAA	-	18.824	-
Seri III B	9,75	8 Juli 2013	-	AA****)	-	20.000
Seri IV B	8,80	5 April 2013	-	AA****)	-	20.000
PT Pupuk Kalimantan Timur						
Sukuk Ijarah I	10,75	4 Desember 2014	idAA+	idAA	25.000	25.000
Seri II	10,75	4 Desember 2014	idAA+	idAA	10.000	10.000
PT Indosat Tbk						
Sukuk Ijarah IV A	11,25	8 Desember 2014	idAA+	idAA+	16.000	16.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk						
Seri I	7,90	5 Juni 2022	idAA	idAA	25.000	25.000
Seri XIV	10,25	11 Juni 2020	idAA	idAA	30.000	30.000
Seri XV	9,50	28 Juni 2021	idAA	idAA	50.000	50.000
Seri I Tahap II 2013	7,90	27 Maret 2023	-	idAA	33.872	-
Seri XIII C	12,25	29 Mei 2014	idAA	-	3.046	-
EBA Seri I A	13,00	10 Maret 2018	idAAA	idAAA	-	1.716
PT PLN (Persero)						
Sukuk Ijarah IV A	11,95	12 Januari 2017	idAAA	idAA+	10.000	10.000
Perum Pegadaian						
Seri I A	7,50	11 Oktober 2014	idAA+	idAA+	247.000	247.000
Seri XI A	13,10	23 Mei 2016	idAA+	-	19.616	-
Seri XIII B	12,65	1 Juli 2017	idAA+	-	1.094	-
Seri XII A	10,03	4 September 2017	idAA+	-	6.101	-
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk						
Seri I A	8,38	14 Desember 2018	idAA-	idAA	20.000	20.000
Seri I B	9,05	14 Desember 2021	idAA-	idAA	75.000	75.000
PT Waskita Karya						
Seri II A	8,75	5 Juni 2015	idA	idA-	25.000	25.000
					855.553	753.716
<u>Dolar Amerika Serikat</u>						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4,13	27 April 2017	BB****)	-	82.377	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	3,75	26 April 2017	idAAA	-	64.360	-
					146.737	-
					1.920.715	1.356.716
					2.607.313	1.719.364

^{a)} Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

^{**)} Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's.

^{***)} Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings.

^{****)} Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
ITB - Niaga	10.702	10.998
RHB OSK Asset Management	75.013	-
	<u>85.715</u>	<u>10.998</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT BNI Asset Management	252.749	-
	<u>338.464</u>	<u>10.998</u>

d.4. Wesel Tagih

<u>Penerbit</u>	2013		
	<u>Nilai Tercatat</u>	<u>Peringkat****)</u>	<u>Jatuh Tempo</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
Verizon	36.510	A-	28 Maret 2014
Morgan Stanley	24.340	A-	31 Agustus 2015
Morgan Stanley	24.340	A-	31 Agustus 2017
	<u>85.190</u>		
	2012		
<u>Penerbit</u>	<u>Nilai Tercatat</u>	<u>Peringkat****)</u>	<u>Jatuh Tempo</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
Gen Electric Cap Corp	48.188	A-	22 Mei 2013
Verizon	28.912	A-	28 Maret 2014
Morgan Stanley	19.275	A-	31 Agustus 2015
Morgan Stanley	19.275	A-	31 Agustus 2017
	<u>115.650</u>		

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.5. Obligasi Subordinasi

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			2013	2012	2013	2012
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo						
<u>Pihak Ketiga</u>						
<u>Rupiah</u>						
PT Bank OCBC NISP Seri III	11,35	30 Juni 2017	AA***)	AA***)	40.000	40.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk Seri II	11,60	9 April 2018	-	idAA-*)	-	49.873
					40.000	89.873

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

d.6. *Medium-Term Notes* (MTN)

Penerbit	Nilai Nominal		Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	Dolar Amerika Serikat (Angka Penuh)	Rupiah			2013	2012
Tersedia untuk Dijual						
<u>Pihak Ketiga</u>						
<u>Dolar Amerika Serikat</u>						
PT Medco Energi Internasional Tbk	5.000.000	-	6,38*)	29 Oktober 2013	-	48.470
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo						
<u>Pihak Ketiga</u>						
<u>Rupiah</u>						
PT Bank OCBC NISP Tbk Seri III	-	25.000	7,00*)	18 April 2016	25.000	-
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>						
<u>Rupiah</u>						
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Seri B	-	25.000	9,75*)	22 November 2015	25.000	25.000
Seri A	-	25.000	9,10*)	22 November 2013	-	25.000
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Seri A	-	50.000	10,40*)	8 Juli 2013	-	50.000
					25.000	100.000
					50.000	148.470

*) Bunga diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.7. Credit Linked Notes (CLN)

Berikut ini merupakan saldo efek-efek berupa *Credit Linked Notes* (CLN) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:

Penerbit	2013				
	Tanggal Efektif	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga Per Tahun	Nilai Nominal (Dolar Amerika Serikat) (Angka Penuh)	Nilai Tercatat
Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi					
<i>Pihak Ketiga</i>					
Dolar Amerika Serikat					
Standard Chartered Bank	14 Maret 2011	20 Maret 2014	3,05%	25.000.000	304.250
The Royal Bank of Scotland	6 April 2011	20 Maret 2014	LIBOR** ¹⁾ + 2%	30.000.000	365.100
				<u>55.000.000</u>	<u>669.350</u>
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo					
<i>Pihak Ketiga</i>					
Dolar Amerika Serikat					
Credit Suisse International	20 Oktober 2011	20 Desember 2016	LIBOR ¹⁾ + 2,95%	50.000.000	648.462
Standard Chartered Bank	11 Februari 2009	20 Maret 2014	LIBOR** ²⁾ + 1,50%	90.000.000	1.105.834
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	28 April 2009	20 Juni 2014	LIBOR** ²⁾ + 1,50%	70.000.000	866.921
The Royal Bank of Scotland	14 Januari 2009	20 Maret 2014	LIBOR** ²⁾ + 2,80%	50.000.000	615.003
The Royal Bank of Scotland	10 Februari 2009	20 Maret 2014	LIBOR** ²⁾ + 1,10%	25.000.000	307.233
				<u>285.000.000</u>	<u>3.543.453</u>
					<u>4.212.803</u>

¹⁾ LIBOR ASD 6 (enam) bulanan.

²⁾ LIBOR ASD 3 (tiga) bulanan.

Penerbit	2012				
	Tanggal Efektif	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga Per Tahun	Nilai Nominal (Dolar Amerika Serikat) (Angka Penuh)	Nilai Tercatat
Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi					
<i>Pihak Ketiga</i>					
Dolar Amerika Serikat					
Standard Chartered Bank	14 Maret 2011	20 Maret 2014	3,05%	25.000.000	240.938
The Royal Bank of Scotland	6 April 2011	20 Maret 2014	LIBOR** ¹⁾ + 2%	30.000.000	289.125
				<u>55.000.000</u>	<u>530.063</u>
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo					
<i>Pihak Ketiga</i>					
Dolar Amerika Serikat					
Credit Suisse International	20 Oktober 2011	20 Desember 2016	LIBOR ¹⁾ + 2,95%	50.000.000	523.850
Standard Chartered Bank	11 Februari 2009	20 Maret 2014	LIBOR** ²⁾ + 1,50%	90.000.000	914.480
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	28 April 2009	20 Juni 2014	LIBOR** ²⁾ + 1,50%	70.000.000	711.959
The Royal Bank of Scotland	14 Januari 2009	20 Maret 2014	LIBOR** ²⁾ + 2,80%	50.000.000	510.837
The Royal Bank of Scotland	10 Februari 2009	20 Maret 2014	LIBOR** ²⁾ + 1,10%	25.000.000	254.308
The Royal Bank of Scotland	1 Desember 2008	20 Desember 2013	LIBOR ¹⁾ + 1,00%	25.000.000	252.550
				<u>310.000.000</u>	<u>3.167.984</u>
					<u>3.698.047</u>

¹⁾ LIBOR ASD 6 (enam) bulanan.

²⁾ LIBOR ASD 3 (tiga) bulanan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.7. *Credit Linked Notes* (CLN) (lanjutan)

CLN merupakan surat utang yang pembayaran kupon dan pelunasan pokok CLN tersebut dikaitkan dengan kejadian atas kegagalan pembayaran kewajiban (*credit default event*) oleh Negara Republik Indonesia (*reference entity*). BRI akan menerima seluruh bunga dan pelunasan pokok secara penuh jika tidak terjadi *credit default event*. Jika terjadi *credit default event* terhadap *reference entity*, penerbit akan segera melunasi CLN tersebut dengan obligasi yang diterbitkan oleh *reference entity* atau kas dengan nilai tertentu. *Credit default event* yang dapat terjadi terhadap *reference entity* antara lain (i) kegagalan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, (ii) *repudiation/moratorium* dan (iii) restrukturisasi yang syarat pembayaran kewajibannya tidak menguntungkan bagi kreditur.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, *credit default swaps* yang melekat memiliki nilai wajar berupa kewajiban masing-masing sebesar ASD3.225.160 dan ASD5.392.134 (ekuivalen sebesar Rp39.250 dan Rp51.967) yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai kewajiban derivatif (Catatan 12). Keuntungan neto dari perubahan nilai wajar *credit default swaps* yang melekat dicatat sebagai pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar ASD2.166.975 (ekuivalen sebesar Rp26.372) dan ASD6.221.952 (ekuivalen sebesar Rp59.964).

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 kenaikan nilai wajar CLN yang yang diklasifikasikan dalam "Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi" berupa keuntungan yang belum direalisasi masing-masing sebesar ASD404.078 dan ASD1.387.416 (ekuivalen sebesar Rp4.918 dan Rp13.371) yang dicatat pada laporan posisi keuangan sebagai tagihan derivatif (Catatan 12) dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah.

e) Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Efek-efek:

	2013	2012
<u>Rupiah</u>		
Saldo awal	760	1.510
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 33)	12	(750)
Saldo akhir	772	760

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai efek-efek secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai, kecuali untuk efek-efek milik BRIS (Entitas Anak) (berdasarkan prinsip syariah) penilaian dilakukan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp772 dan Rp760 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai.

f) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2013	2012
Rupiah	7,24%	6,25%
Dolar Amerika Serikat	4,07	3,94

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- g) BRI mengakui kerugian yang belum direalisasi - neto dari nilai efek-efek yang diklasifikasikan "Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi" sebesar Rp21.820 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, yang dilaporkan dalam akun "Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto" di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
- h) BRI mengakui keuntungan neto atas penjualan efek-efek adalah sebesar Rp78.252 dan Rp42.670, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto" di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 38.

9. TAGIHAN WESEL EKSPOR

- a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		932.062		35.148
Wesel Ekspor		114.289		-
		<u>1.046.351</u>		<u>35.148</u>
<u>Mata uang asing</u>				
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)			1.350.888	13.019
Dolar Amerika Serikat	-	-		
Wesel Ekspor				
Yuan Cina	3.234.176.175	6.501.583	2.874.780.071	4.445.891
Dolar Amerika Serikat	66.388.123	807.943	120.627.482	1.162.547
Yen Jepang	1.036.368.866	119.960	727.785.840	81.341
Dolar Hong Kong	73.008.995	114.591	63.553.434	79.014
Pound Sterling Inggris	2.265.458	45.560	565.404	8.772
Euro Eropa	2.476.401	41.503	3.909.649	49.776
Dirham Arab Emirates	8.740.469	28.962	8.902.950	23.360
Riyal Arab Saudi	1.713.915	5.561	4.515.358	11.603
Dolar Singapura	545.412	5.248	1.102.041	8.683
Dolar Australia	108.326	1.176	133.637	1.337
		<u>7.672.087</u>		<u>5.885.343</u>
		<u>8.718.438</u>		<u>5.920.491</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		175.326		14.281
<u>Mata uang asing</u>				
Wesel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	2.654.727	32.308	-	-
		<u>207.634</u>		<u>14.281</u>
		<u>8.926.072</u>		<u>5.934.772</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. TAGIHAN WESEL EKSPOR (lanjutan)

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, semua tagihan wesel ekspor diklasifikasikan "Lancar".

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan wesel ekspor berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
≤ 1 bulan	928.943	763.565
> 1 bulan - 3 bulan	1.079.390	800.732
> 3 bulan - 1 tahun	6.710.105	4.356.194
	<u>8.718.438</u>	<u>5.920.491</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	207.634	14.281
	<u>8.926.072</u>	<u>5.934.772</u>

BRI melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan wesel ekspor secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, karena Manajemen berkeyakinan bahwa wesel ekspor dapat ditagih.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 38.

10. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH

Akun ini terdiri dari obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi BRI dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.

Sehubungan dengan program rekapitalisasi, BRI menerima obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sejumlah nominal Rp29.149.000 yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000, yang seluruhnya merupakan obligasi tingkat bunga tetap. Berdasarkan kontrak manajemen tanggal 28 Februari 2001 antara Pemerintah dengan BRI dan Direksi serta Dewan Komisaris BRI, telah disepakati bahwa jumlah Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dibutuhkan untuk rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531 (Catatan 30a), sehingga kelebihan rekapitalisasi sebesar Rp85.469 wajib dikembalikan kepada Pemerintah dan BRI tidak memperoleh bunga atas obligasi tersebut. Pada tanggal 5 November 2001, BRI telah mengembalikan obligasi tersebut sebesar Rp85.469, termasuk bunga yang terkait dengan obligasi tersebut kepada Pemerintah.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

10. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH (lanjutan)

Rincian Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Tujuan Kepemilikan dan Sisa Umur Sampai Saat Jatuh Tempo:

	2013	2012
<u>Nilai Wajar melalui Laporan</u>		
<u>Laba Rugi</u>		
≤ 1 bulan	199.314	-
<u>Tersedia untuk Dijual</u>		
≤ 1 bulan	712.105	715.616
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</u>		
> 1 tahun - 5 tahun	1.000.000	1.000.000
> 5 tahun - 10 tahun	2.600.000	2.600.000
	3.600.000	3.600.000
	4.511.419	4.315.616

b) Berdasarkan Klasifikasi dan Jenis:

Seri	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			2013	2012
<u>Nilai Wajar melalui Laporan</u>				
<u>Laba Rugi</u>				
VR0026	SPN 3 bulan	25 Januari 2018	199.314	-
<u>Tersedia untuk Dijual</u>				
VR0027	SPN 3 bulan	25 Juli 2018	444.748	447.565
VR0031	SPN 3 bulan	25 Juli 2020	267.357	268.051
			712.105	715.616
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</u>				
VR0020	SPN 3 bulan	25 April 2015	250.000	250.000
VR0021	SPN 3 bulan	25 November 2015	250.000	250.000
VR0023	SPN 3 bulan	25 Oktober 2016	500.000	500.000
VR0026	SPN 3 bulan	25 Januari 2018	375.000	375.000
VR0027	SPN 3 bulan	25 Juli 2018	375.000	375.000
VR0028	SPN 3 bulan	25 Agustus 2018	375.000	375.000
VR0029	SPN 3 bulan	25 Agustus 2019	375.000	375.000
VR0031	SPN 3 bulan	25 Juli 2020	1.100.000	1.100.000
			3.600.000	3.600.000
			4.511.419	4.315.616

c) Informasi Signifikan Lainnya:

Jadwal pembayaran bunga untuk obligasi seri FR adalah 6 (enam) bulan sekali, sedangkan untuk seri VR adalah 3 (tiga) bulan sekali.

Nilai pasar untuk beberapa Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan "Tersedia untuk dijual" berkisar dari 98,83% sampai dengan 99,02% dan 99,00% sampai dengan 99,64% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH (lanjutan)

c) Informasi Signifikan Lainnya (lanjutan):

BRI mengakui keuntungan yang belum direalisasi dari nilai obligasi pemerintah yang diklasifikasikan "Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi" sebesar Rp3.694 pada tanggal 31 Desember 2013, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto" di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

11. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 terdiri dari:

	2013				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
Seri FR0026	5,90	27 Desember 2013	3 Januari 2014	323.242	323.454
Seri FR0026	5,90	31 Desember 2013	7 Januari 2014	1.289.285	1.289.285
Seri FR0027	5,90	31 Desember 2013	7 Januari 2014	1.674.894	1.674.894
Seri FR0056	6,06	18 Desember 2013	2 Januari 2014	463.099	464.112
Seri FR0056	6,06	20 Desember 2013	3 Januari 2014	464.450	465.310
Seri FR0057	6,34	4 Desember 2013	2 Januari 2014	483.903	486.204
Seri FR0058	6,34	17 Desember 2013	16 Januari 2014	372.741	373.660
Seri FR0059	6,06	19 Desember 2013	2 Januari 2014	804.695	806.320
Seri FR0059	6,06	30 Desember 2013	13 Januari 2014	806.682	806.818
Seri FR0060	5,90	30 Desember 2013	6 Januari 2014	365.700	365.759
Seri FR0064	6,32	12 Desember 2013	9 Januari 2014	709.928	712.296
Seri FR0064	6,34	13 Desember 2013	10 Januari 2014	713.828	716.091
Seri FR0066	5,90	27 Desember 2013	3 Januari 2014	2.246.357	2.247.829
Seri FR0069	5,90	27 Desember 2013	3 Januari 2014	360.344	360.581
Seri FR0071	6,34	17 Desember 2013	16 Januari 2014	73.859	74.041
Seri SPN12140703	5,90	30 Desember 2013	6 Januari 2014	733.153	733.154
Seri SPN12140911	5,90	27 Desember 2013	3 Januari 2014	610.321	610.721
Seri SPN12140911	5,90	30 Desember 2013	6 Januari 2014	270.860	270.905
Seri SPN12141009	5,90	30 Desember 2013	6 Januari 2014	448.692	448.765
				13.216.033	13.230.199
PT Bank Pan Indonesia Tbk					
Sertifikat Bank Indonesia					
IDSD06031491S					
	7,00	19 Desember 2013	15 Januari 2014	99.805	100.038
				13.315.838	13.330.237
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank Bukopin Tbk					
Obligasi Pemerintah					
Seri ORI010	7,00	20 Desember 2013	10 Januari 2014	100.800	101.016
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					
Obligasi Rekap Pemerintah					
Seri VR0026	7,00	31 Desember 2013	7 Januari 2014	504.405	504.405
Seri VR0026	7,00	31 Desember 2013	7 Januari 2014	504.405	504.405
				1.008.810	1.008.810
				1.109.610	1.109.826
				14.425.448	14.440.063

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 terdiri dari (lanjutan):

	2012				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto
<i>Pihak ketiga</i>					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
Seri FR0019	4,41	23 Nopember 2012	4 Januari 2013	532.792	535.272
Seri FR0026	4,50	18 Desember 2012	2 Februari 2013	540.436	541.314
Seri FR0030	4,51	26 Desember 2012	1 Maret 2013	883	884
Seri FR0036	4,50	17 Desember 2012	22 Februari 2013	142.924	143.174
Seri FR0042	4,60	13 Desember 2012	19 Maret 2013	304.536	305.236
Seri FR0042	4,60	14 Desember 2012	19 Maret 2013	350.752	351.514
Seri FR0042	4,60	18 Desember 2012	22 Maret 2013	701.151	702.315
Seri FR0043	4,62	26 Desember 2012	2 April 2013	338.595	338.812
Seri FR0046	4,42	27 Nopember 2012	8 Januari 2013	646.606	649.305
Seri FR0047	4,60	17 Desember 2012	22 Maret 2013	344.492	345.108
Seri FR0053	4,50	28 Nopember 2012	1 Februari 2013	495.553	497.597
Seri FR0053	4,50	13 Desember 2012	12 Februari 2013	295.843	296.509
Seri FR0053	4,50	14 Desember 2012	15 Februari 2013	296.679	297.309
Seri FR0054	4,62	19 Desember 2012	26 Maret 2013	634.453	635.430
Seri FR0055	4,50	17 Desember 2012	22 Februari 2013	151.443	151.708
Seri FR0055	4,50	27 Desember 2012	1 Maret 2013	179.090	179.180
Seri FR0056	4,60	28 Nopember 2012	1 Maret 2013	299.395	300.657
Seri FR0057	4,62	19 Desember 2012	26 Maret 2013	16.247	16.272
Seri FR0058	4,51	27 Desember 2012	1 Maret 2013	31.497	31.513
Seri FR0059	4,51	19 Desember 2012	6 Februari 2013	435.389	436.044
Seri FR0059	4,51	27 Desember 2012	1 Maret 2013	47.833	47.857
Seri FR0060	4,51	27 Desember 2012	1 Maret 2013	9.154	9.158
Seri FR0061	4,50	28 Nopember 2012	1 Februari 2013	83.816	84.162
Seri FR0061	4,50	10 Desember 2012	15 Februari 2013	537.312	538.722
Seri FR0061	4,50	11 Desember 2012	8 Februari 2013	536.764	538.106
Seri FR0061	4,50	27 Desember 2012	2 April 2013	272.428	272.564
Seri FR0063	4,62	19 Desember 2012	26 Maret 2013	20.175	20.206
Seri FR0064	4,60	13 Desember 2012	19 Maret 2013	31.864	31.937
Seri SPN12130205	4,50	5 Desember 2012	8 Februari 2013	280.447	281.359
Seri SPN12130307	4,49	4 Desember 2012	5 Februari 2013	470.704	472.289
Seri SPN12130606	4,50	5 Desember 2012	8 Februari 2013	186.154	186.759
Seri SPN12130710	4,51	19 Desember 2012	26 Februari 2013	27.551	27.592
Seri SPN12130912	4,51	26 Desember 2012	1 Maret 2013	229.766	229.910
Seri SPN12131204	4,51	19 Desember 2012	26 Februari 2013	54.665	54.747
				9.527.389	9.550.521

BRI melakukan penilaian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 38.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut:

Transaksi	2013	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
<i>Credit linked notes</i> (Catatan 8)	4.918	39.250
Swap mata uang dan suku bunga	-	1.523.183
Swap mata uang asing	-	2.669
Pembelian dan penjualan <i>spot</i> mata uang asing	63	-
	4.981	1.565.102

Transaksi	2012	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Swap mata uang dan suku bunga	14.062	95.298
<i>Credit linked notes</i> (Catatan 8)	13.371	51.967
Swap mata uang asing	1.417	-
Pembelian dan penjualan <i>spot</i> mata uang asing	-	3.404
Pembelian forward mata uang asing	-	1.524
	28.850	152.193

a. Swap Mata Uang dan Suku Bunga

BRI memiliki kontrak *swap* mata uang dan suku bunga pada tanggal - tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut:

Counterparties	Nilai Nosional	2013		Tingkat Bunga Per Tahun		Tanggal	
		Diterima		Dibayar		Efektif	Jatuh Tempo
		Diterima	Dibayar	Diterima	Dibayar		
DBS Bank	ASD65.000.000	7,50%	LIBOR**) + 1,65%	27 September 2011	27 September 2014		
DBS Bank	ASD50.000.000	8,50%	LIBOR*) + 0,55%	28 November 2013	28 November 2016		
Standard Chartered Bank	ASD20.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,69%	18 September 2012	18 September 2014		
Standard Chartered Bank	ASD40.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,75%	1 November 2012	1 November 2015		
Standard Chartered Bank	ASD60.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,75%	1 November 2012	1 November 2015		
Standard Chartered Bank	ASD50.000.000	8,50%	LIBOR*) + 0,55%	27 November 2013	27 November 2016		
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,50%	LIBOR**) + 1,70%	26 September 2011	26 September 2014		
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,50%	LIBOR**) + 1,70%	21 September 2011	22 September 2014		
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,90%	16 April 2012	16 April 2014		
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,50%	10 Desember 2012	10 Desember 2015		
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,50%	4 Desember 2012	4 Desember 2015		
ANZ Bank	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,55%	5 November 2012	5 November 2014		
Citibank	ASD25.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,68%	15 Oktober 2012	15 Oktober 2014		

*) LIBOR ASD 6 (enam) bulanan.

**) LIBOR ASD 3 (tiga) bulanan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

a. *Swap* Mata Uang dan Suku Bunga (lanjutan)

Counterparties	Nilai Nosional	Tingkat Bunga Per Tahun		Tanggal	
		Diterima	Dibayar	Efektif	Jatuh Tempo
DBS Bank	ASD65.000.000	7,50%	LIBOR**) + 1,65%	27 September 2011	27 September 2014
DBS Bank	ASD35.000.000	7,25%	LIBOR**) + 1,65%	6 Oktober 2011	6 Oktober 2013
DBS Bank	SGD10.000.000	7,00%	SIBOR*) + 1,90%	16 Juli 2012	16 Juli 2013
Standard Chartered Bank	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,30%	22 September 2011	22 September 2013
Standard Chartered Bank	ASD20.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,69%	18 September 2012	18 September 2014
Standard Chartered Bank	ASD40.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,75%	1 November 2012	1 November 2015
Standard Chartered Bank	ASD60.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,75%	1 November 2012	1 November 2015
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,50%	LIBOR**) + 1,70%	26 September 2011	26 September 2014
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,50%	LIBOR**) + 1,70%	21 September 2011	22 September 2014
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,90%	16 April 2012	16 April 2014
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,50%	10 Desember 2012	10 Desember 2015
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,50%	4 Desember 2012	4 Desember 2015
ANZ Bank	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,55%	5 November 2012	5 November 2014
Citibank	ASD25.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,68%	15 Oktober 2012	15 Oktober 2014

*) SIBOR SGD 3 (tiga) bulanan.

**) LIBOR ASD 3 (tiga) bulanan.

BRI melakukan kontrak pertukaran mata uang dan suku bunga (*cross currency interest rate swap*) terhadap beberapa *counterparties*, dimana BRI dan *counterparties* sepakat untuk saling menukarkan dana dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (ASD) dan Rupiah yang nilainya setara pada tanggal efektif kontrak. Dengan demikian maka para pihak berkewajiban membayar bunga sesuai dengan dana yang diterimanya.

Apabila dana yang diterima ASD, maka pihak penerima berkewajiban membayar bunga tetap (*fixed rate*) atau mengambang (*floating rate*) sebesar SIBOR 3 (tiga) bulanan, LIBOR 3 (tiga) bulanan atau LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah dengan margin tertentu. Sebaliknya penerima dana Rupiah berkewajiban membayar *fixed rate* atau *floating rate* sebesar tingkat suku bunga mengambang yang berlaku di pasar ditambah dengan margin tertentu.

b. Pembelian dan Penjualan *Spot* Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2013, BRI memiliki kontrak pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing dengan masing-masing nilai nosional sebesar ASD63.000.000 dengan nilai kontrak pembelian sebesar Rp769.942 dan nilai kontrak penjualan sebesar Rp770.005.

c. *Swap* Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2013, BRI memiliki kontrak *swap* mata uang asing dengan nilai nosional pembelian sebesar ASD34.000.000 dan nilai nosional penjualan sebesar ASD14.000.000 dengan nilai kontrak beli sebesar Rp393.359 dan nilai kontrak jual Rp147.291.

BRI melakukan penilaian tagihan derivatif secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 38.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. KREDIT YANG DIBERIKAN

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Kupedes	132.131.803	106.797.402
Modal kerja	87.467.943	70.456.569
Konsumsi	74.610.014	62.108.755
Investasi	26.634.287	20.354.468
Program	10.594.551	8.769.157
Sindikasi	1.703.561	1.238.165
Lainnya	-	567.508
	<u>333.142.159</u>	<u>270.292.024</u>
 <u>Mata uang asing</u>		
Modal kerja	18.935.853	13.754.643
Investasi	12.705.403	8.602.611
Sindikasi	1.075.184	841.957
	<u>32.716.440</u>	<u>23.199.211</u>
	<u>365.858.599</u>	<u>293.491.235</u>
 <u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Modal kerja	29.191.123	25.174.987
Sindikasi	16.927.886	11.321.078
Investasi	6.694.154	6.889.231
Karyawan	54.084	55.823
Konsumsi	39.601	50.083
	<u>52.906.848</u>	<u>43.491.202</u>
 <u>Mata uang asing</u>		
Modal Kerja	11.124.217	11.975.719
Investasi	3.825.317	1.707.399
Sindikasi	601.485	92.707
	<u>15.551.019</u>	<u>13.775.825</u>
	<u>68.457.867</u>	<u>57.267.027</u>
	434.316.466	350.758.262
 Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.171.736)	(14.677.220)
	<u>419.144.730</u>	<u>336.081.042</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka Penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka Penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		386.049.007		313.783.226
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	3.944.419.742	48.003.588	3.713.071.805	35.784.729
Dolar Singapura	22.162.586	213.250	20.527.736	161.730
Euro Eropa	2.397.871	40.187	77.180.493	982.633
Yen Jepang	90.143.666	10.434	101.059.547	11.295
Pound Sterling Inggris	-	-	2.233.250	34.649
		48.267.459		36.975.036
		434.316.466		350.758.262
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(15.171.736)		(14.677.220)
		419.144.730		336.081.042

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Perdagangan, perhotelan dan restoran	127.520.973	91.728.349
Pertanian	32.452.072	23.561.544
Jasa dunia usaha	14.438.720	9.792.471
Perindustrian	14.220.719	11.204.269
Konstruksi	7.811.836	6.090.323
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	4.184.363	2.510.326
Jasa pelayanan sosial	2.701.451	2.438.540
Pertambangan	2.265.285	1.343.961
Listrik, gas dan air	602.103	508.731
Lain-lain	126.944.637	121.113.510
	333.142.159	270.292.024
<u>Mata uang asing</u>		
Perindustrian	18.164.626	10.274.764
Perdagangan, perhotelan dan restoran	5.377.368	4.358.103
Pertanian	2.881.438	2.349.319
Listrik, gas dan air	1.539.950	1.932.052
Pertambangan	1.512.662	1.504.623
Konstruksi	1.138.289	1.042.591
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.136.003	832.526
Jasa dunia usaha	848.098	269.905
Jasa pelayanan sosial	-	3.761
Lain-lain	118.006	631.567
	32.716.440	23.199.211
	365.858.599	293.491.235

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan):

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Perdagangan, perhotelan dan restoran	10.727.788	941.581
Listrik, gas dan air	10.001.627	7.844.061
Pengangkutan, perdagangan dan komunikasi	7.086.773	5.885.222
Perindustrian	6.522.773	7.305.937
Jasa dunia usaha	6.102.396	6.874.999
Jasa pelayanan sosial	5.850.094	4.500.043
Pertanian	4.193.698	6.979.950
Konstruksi	2.162.385	2.295.776
Pertambangan	203.514	123.884
Lain-lain	55.800	739.749
	<u>52.906.848</u>	<u>43.491.202</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Perindustrian	10.135.360	10.294.599
Jasa pelayanan sosial	3.286.158	1.180.748
Pertambangan	1.528.349	2.098.967
Jasa dunia usaha	592.004	56.308
Pertanian	9.148	63.284
Pengangkutan, perdagangan dan komunikasi	-	81.919
	<u>15.551.019</u>	<u>13.775.825</u>
	<u>68.457.867</u>	<u>57.267.027</u>
	434.316.466	350.758.262
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.171.736)	(14.677.220)
	<u>419.144.730</u>	<u>336.081.042</u>

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	12.190.232	9.162.744
> 1 bulan - 3 bulan	13.988.502	12.034.330
> 3 bulan - 1 tahun	62.647.603	53.594.760
> 1 tahun - 2 tahun	52.210.407	43.277.587
> 2 tahun - 5 tahun	95.010.709	74.711.131
> 5 tahun	97.094.706	77.511.472
	<u>333.142.159</u>	<u>270.292.024</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

	2013	2012
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	4.106.354	1.325.785
> 1 bulan - 3 bulan	3.625.688	1.648.194
> 3 bulan - 1 tahun	9.002.931	7.037.085
> 1 tahun - 2 tahun	2.881.897	3.508.766
> 2 tahun - 5 tahun	4.549.898	5.405.805
> 5 tahun	8.549.672	4.273.576
	<u>32.716.440</u>	<u>23.199.211</u>
	<u>365.858.599</u>	<u>293.491.235</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	1.015.879	5.885.185
> 1 bulan - 3 bulan	20.261.074	10.230.543
> 3 bulan - 1 tahun	5.403.421	5.415.744
> 1 tahun - 2 tahun	2.554.393	971.450
> 2 tahun - 5 tahun	5.418.516	6.090.145
> 5 tahun	18.253.565	14.898.135
	<u>52.906.848</u>	<u>43.491.202</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	8.865.691	9.459.919
> 1 bulan - 3 bulan	20.014	-
> 3 bulan - 1 tahun	2.197.227	514.814
> 1 tahun - 2 tahun	486.800	1.954.003
> 2 tahun - 5 tahun	829.573	569.005
> 5 tahun	3.151.714	1.278.084
	<u>15.551.019</u>	<u>13.775.825</u>
	<u>68.457.867</u>	<u>57.267.027</u>
	<u>434.316.466</u>	<u>350.758.262</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.171.736)	(14.677.220)
	<u>419.144.730</u>	<u>336.081.042</u>

d) Berdasarkan Kolektibilitas:

	2013	2012
Individual	7.421.717	6.335.884
Kolektif		
Lancar	400.826.162	321.845.346
Dalam perhatian khusus	20.564.316	17.517.600
Kurang lancar	930.623	816.579
Diragukan	949.415	832.095
Macet	3.624.233	3.410.758
	<u>426.894.749</u>	<u>344.422.378</u>
	<u>434.316.466</u>	<u>350.758.262</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:		
Individual	(2.387.935)	(3.403.315)
Kolektif	(12.783.801)	(11.273.905)
	<u>(15.171.736)</u>	<u>(14.677.220)</u>
	<u>419.144.730</u>	<u>336.081.042</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e) Berdasarkan Segmen Operasi:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Korporasi	25.715.738	20.426.136
Ritel	165.159.679	134.371.036
Mikro	142.266.742	115.494.852
	<u>333.142.159</u>	<u>270.292.024</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Korporasi	22.265.376	16.596.854
Ritel	10.451.064	6.602.357
	<u>32.716.440</u>	<u>23.199.211</u>
	<u>365.858.599</u>	<u>293.491.235</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Korporasi	46.780.191	38.139.057
Ritel	6.126.657	5.352.145
	<u>52.906.848</u>	<u>43.491.202</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Korporasi	15.434.081	13.727.637
Ritel	116.938	48.188
	<u>15.551.019</u>	<u>13.775.825</u>
	<u>68.457.867</u>	<u>57.267.027</u>
	<u>434.316.466</u>	<u>350.758.262</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(15.171.736)</u>	<u>(14.677.220)</u>
	<u>419.144.730</u>	<u>336.081.042</u>

f) Informasi Penting Lainnya:

1) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2013	2012
<u>Bunga Kontrak</u>		
Rupiah	11,79%	12,11%
Mata uang asing	4,47	4,53
<u>Bunga Efektif</u>		
Rupiah	15,95%	16,80%
Mata uang asing	4,58	4,65

2) Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan (Catatan 20, 21 dan 22).

3) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan barang-barang modalnya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

- 4) Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.
- 5) Kredit program merupakan kredit yang disalurkan BRI berdasarkan petunjuk dari Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan di Indonesia khususnya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
- 6) Kredit Kupedes merupakan kredit yang disalurkan BRI melalui kantor BRI Unit. Sasaran kredit ini adalah usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafon Kupedes. Sektor ekonomi yang menjadi sasaran adalah pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.
- 7) Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dibawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan BRI sebagai anggota sindikasi berkisar 2,97% sampai dengan 74,94% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
- 8) Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 5,5% per tahun yang ditujukan untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditanggungkan dan dicatat sebagai beban yang ditanggungkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditanggungkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp640.498 dan Rp708.141 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 18).
- 9) Kredit yang diberikan BRI kepada pihak berelasi diluar kredit yang diberikan kepada karyawan kunci (Catatan 43) adalah sebagai berikut:

	2013	2012
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	10.288.290	8.211.065
Perum BULOG	9.355.324	3.570.265
PT Pertamina (Persero)	8.603.110	10.348.229
PT Taspen (Persero)	5.100.000	4.500.000
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	3.778.698	1.711.741
Perum Pegadaian	3.602.519	4.769.429
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.709.044	714.538
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.250.000	3.625.000
PT Pupuk Kalimantan Timur	1.836.399	892.162
PT Dayamitra Telekomunikasi	1.610.438	1.000.000
Lain-lain	19.269.961	17.868.775
	68.403.783	57.211.204

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

- 10) Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI (Entitas Induk) selama tahun 2013 dan 2012 yang dilaporkan kepada Bank Indonesia masing-masing adalah sebesar Rp2.190.691 dan Rp3.582.981. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.
- 11) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 kepada Bank Indonesia, BRI tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK.
- 12) Rincian kredit bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Perdagangan, perhotelan dan restoran	5.489.984	3.904.999
Konstruksi	1.492.326	1.510.299
Perindustrian	1.314.935	1.050.306
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.254.465	998.893
Jasa dunia usaha	1.147.967	675.248
Pertanian	821.780	595.414
Jasa pelayanan sosial	81.758	69.115
Pertambangan	46.927	84.077
Listrik, gas dan air	26.173	35.037
Lain-lain	1.249.673	2.471.928
	<u>12.925.988</u>	<u>11.395.316</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(3.790.925)	(4.595.451)
	<u>9.135.063</u>	<u>6.799.865</u>

13) Rasio-rasio

- a. Rasio kredit bermasalah (NPL) BRI berdasarkan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

(i) Konsolidasian

	2013	2012
Total kredit <i>non-performing</i>	6.735.938	6.296.470
Total kredit yang diberikan	434.316.466	350.758.262
% kredit <i>non-performing</i> (NPL)	1,55%	1,80%

(ii) BRI (Entitas Induk)

	2013	2012
Total kredit <i>non-performing</i>	6.654.494	6.203.863
Total kredit yang diberikan	430.617.872	348.227.188
% kredit <i>non-performing</i> (NPL)	1,55%	1,78%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

13) Rasio-rasio (lanjutan):

b. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan BRI adalah masing-masing sebesar 41,71% dan 42,45% tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (tidak diaudit).

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan:

	2013	2012
Saldo awal	14.677.220	15.951.531
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	3.946.083	2.593.691
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(4.317.861)	(4.447.510)
Selisih kurs	866.294	579.508
Saldo akhir	15.171.736	14.677.220

Dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai BRI (Entitas Induk) termasuk cadangan kerugian untuk daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah rawan bencana atau yang pernah mengalami bencana oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah sebesar Rp1.166.798 dan Rp1.847.010, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 2f).

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan, yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Catatan 2f) adalah sebesar Rp10.265.927 dan Rp9.024.876, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan yang dibentuk telah memadai.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 38.

14. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
Lancar	13.032.367	10.524.430
Dalam perhatian khusus	354.586	264.904
Kurang lancar	289.826	144.735
Diragukan	53.914	24.707
Macet	220.157	170.983
	13.950.850	11.129.759

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2013	2012
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Lancar	77.540	118.495
Dalam perhatian khusus	-	26
Kurang lancar	-	1
	<u>77.540</u>	<u>118.522</u>
	14.028.390	11.248.281
Dikurangi cadangan kerugian	(246.360)	(237.645)
	<u>13.782.030</u>	<u>11.010.636</u>

Piutang dan pembiayaan syariah terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musarakah*.

Perubahan cadangan kerugian piutang dan pembiayaan syariah:

	2013	2012
Saldo awal	237.645	138.441
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	2.410	75.426
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	11.363	25.687
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(5.058)	(1.909)
Saldo akhir	<u>246.360</u>	<u>237.645</u>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian piutang dan pembiayaan syariah yang dibentuk telah memadai.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, jumlah piutang dan pembiayaan syariah yang diklasifikasikan *Non-Performing Financing* (NPF) adalah masing-masing sebesar Rp563.897 (4,02%) dan Rp340.426 (3,03%).

15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga Rupiah L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		4.412		23.306

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut (lanjutan):

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing</u>				
<u>L/C Impor dan SKBDN</u>				
Dolar Amerika Serikat	181.409.070	2.207.748	422.097.044	4.067.960
Euro Eropa	1.578.533	26.455	632.342	8.051
Franc Swiss	360.000	4.923	-	-
Yen Jepang	3.324.651	385	7.979.000	892
		2.239.511		4.076.903
		2.243.923		4.100.209
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
<u>Rupiah</u>				
<u>L/C Impor dan SKBDN</u>				
		381.296		349
<u>Mata uang asing</u>				
<u>L/C Impor dan SKBDN</u>				
Dolar Amerika Serikat	86.356.761	1.050.962	51.463.696	495.981
Euro Eropa	209.000	3.503	14.890.654	189.582
		1.054.465		685.563
		1.435.761		685.912
		3.679.684		4.786.121

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai lancar.

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
≤ 1 bulan	986.137	530.585
> 1 bulan - 3 bulan	281.528	1.530.415
> 3 bulan - 1 tahun	976.258	2.039.209
	2.243.923	4.100.209
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
≤ 1 bulan	241.061	43.378
> 1 bulan - 3 bulan	830.344	425.110
> 3 bulan - 1 tahun	364.356	217.424
	1.435.761	685.912
	3.679.684	4.786.121

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

Jumlah liabilitas akseptasi adalah sebesar jumlah tagihan akseptasi kepada nasabah.

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, karena Manajemen berkeyakinan bahwa tagihan akseptasi dapat ditagih.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 38.

16. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

2013					
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Perusahaan Asosiasi	Nilai Tercatat
PT BTMU-BRI Finance (Pihak berelasi - Catatan 43)	Pembiayaan	45,00%	24.750	196.157	220.907
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga penyelesaian efek	3,00			900
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Investasi	8,00			536
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	2,10			210
BPR Toelongredjo Dasa Nusantara	Perbankan	3,00			77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00			77
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	3,00			66
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	3,50			35
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	2,25			23
PT Aplikanusa Lintasarta	Non-Bank	0,03			20
					1.944
					222.851

2012					
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Perusahaan Asosiasi	Nilai Tercatat
PT BTMU-BRI Finance (Pihak berelasi - Catatan 43)	Pembiayaan	45,00%	24.750	170.584	195.334
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga penyelesaian efek	3,00			900
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Investasi	8,00			536
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	2,10			210

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan	Biaya Perolehan	2012	
				Akumulasi atas Bagian Laba Neto Perusahaan Asosiasi	Nilai Tercatat
BPR Toelongredjo Dasa Nusantara	Perbankan	3,00			77
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00			77
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	3,00			66
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	3,50			35
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	2,25			23
PT Aplikanusa Lintasarta	Non-Bank	0,03			20
					1.944
					197.278
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(536)
					196.742

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai penyertaan secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, semua penyertaan diklasifikasikan "Lancar", kecuali PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia diklasifikasikan "Macet" pada tanggal 31 Desember 2012.

Pada tahun 2013 dan 2012, BRI telah menerima dividen tunai dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia masing-masing sebesar Rp237 dan Rp145, sedangkan pada tahun 2012 hanya dari PT Pemeringkat Efek Indonesia sebesar Rp158.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham:

	2013	2012
Saldo awal	536	536
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	(536)	-
Saldo akhir	-	536

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2013, karena manajemen berkeyakinan bahwa penyertaan saham dapat ditagih, sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2012 telah memadai.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 38.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET TETAP

Aset tetap terdiri atas:

Keterangan	2013			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Hak atas tanah	318.257	144.704	3.708	459.253
Bangunan	1.918.424	257.867	87.319	2.088.972
Kendaraan bermotor	839.088	694.558	30.890	1.502.756
Komputer dan mesin	3.201.863	734.447	212.470	3.723.840
Perlengkapan kantor	940.991	116.409	14.764	1.042.636
Aset tetap museum	184	-	-	184
	<u>7.218.807</u>	<u>1.947.985</u>	<u>349.151</u>	<u>8.817.641</u>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan	895.273	94.014	6.111	983.176
Kendaraan bermotor	540.336	150.730	30.061	661.005
Komputer dan mesin	2.233.862	351.946	197.553	2.388.255
Perlengkapan kantor	744.970	81.595	13.972	812.593
	<u>4.414.441</u>	<u>678.285</u>	<u>247.697</u>	<u>4.845.029</u>
Nilai buku neto	<u>2.804.366</u>			<u>3.972.612</u>

Keterangan	2012			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Hak atas tanah	287.257	31.421	421	318.257
Bangunan	1.730.115	201.610	13.301	1.918.424
Kendaraan bermotor	658.286	216.977	36.175	839.088
Komputer dan mesin	2.423.658	916.539	138.334	3.201.863
Perlengkapan kantor	890.844	78.743	28.596	940.991
Aset tetap museum	184	-	-	184
	<u>5.990.344</u>	<u>1.445.290</u>	<u>216.827</u>	<u>7.218.807</u>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan	850.930	78.483	34.140	895.273
Kendaraan bermotor	513.781	54.780	28.225	540.336
Komputer dan mesin	2.077.811	212.059	56.008	2.233.862
Perlengkapan kantor	695.004	72.074	22.108	744.970
	<u>4.137.526</u>	<u>417.396</u>	<u>140.481</u>	<u>4.414.441</u>
Nilai buku neto	<u>1.852.818</u>			<u>2.804.366</u>

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah masing-masing sebesar Rp678.285 dan Rp417.396 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 35).

BRI telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur (pihak berelasi) dan PT Asuransi Jasa Tania dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp9.522.788 dan Rp8.813.509 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET TETAP (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

18. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri atas:

	2013	2012
<u>Rupiah</u>		
Uang Muka Pajak (Catatan 37)	966.341	-
Biaya dibayar di muka	906.035	866.545
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 13f)	640.498	708.141
Piutang bunga		
Efek-efek	426.473	368.106
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	50.042	47.508
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.257	4.718
Lain-lain	838	714
Persekot Intern	270.007	261.564
Persediaan kantor	189.634	185.663
Agunan yang diambil alih	33.951	49.544
Lain-lain	3.318.542	3.374.300
	<u>6.810.618</u>	<u>5.866.803</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Piutang bunga		
Efek-efek	97.241	54.865
Lain-lain	40.783	37.314
Biaya dibayar di muka	3.511	112
Persekot Intern	421	32
Lain-lain	51.463	2.714
	<u>193.419</u>	<u>95.037</u>
	<u>7.004.037</u>	<u>5.961.840</u>

19. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera terdiri atas:

	2013	2012
<u>Rupiah</u>		
Titipan <i>advance payment</i>	1.393.627	897.627
Titipan asuransi	253.158	135.729
Titipan pengiriman uang	227.307	352.431
Titipan setoran pajak	120.513	188.224
Titipan pinjaman kelolaan	54.461	56.595
Titipan kartu kredit	30.209	118.883
Wesel dan cek perjalanan BRI (Cepebri)	27.405	22.075
Titipan setoran kliring	16.972	30.511
Lain-lain	2.850.475	2.872.738
	<u>4.974.127</u>	<u>4.674.813</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

Liabilitas segera terdiri atas (lanjutan):

	2013	2012
<u>Mata uang asing</u>		
Titipan pengiriman uang	127	111
Lain-lain	91.273	236.928
	<u>91.400</u>	<u>237.039</u>
	<u>5.065.527</u>	<u>4.911.852</u>

20. GIRO

Giro terdiri atas:

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
Rupiah		44.381.264		52.851.673
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	932.761.837	11.351.712	710.536.861	6.847.799
Euro Eropa	48.241.628	808.496	39.869.946	507.609
Dolar Australia	30.981.358	336.323	457.580	4.579
Pound Sterling Inggris	7.072.289	142.230	13.771.509	213.664
Dolar Singapura	12.255.264	117.921	23.690.107	186.645
Dolar Hong Kong	28.859.414	45.296	35.942.458	44.686
Yen Jepang	185.040.829	21.418	32.092.690	3.587
Yuan Cina	6.630.477	13.329	101.126.726	156.394
Riyal Arab Saudi	1.290.369	4.187	2.304.260	5.921
Franc Swiss	300	4	-	-
		<u>12.840.916</u>		<u>7.970.884</u>
		<u>57.222.180</u>		<u>60.822.557</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
Rupiah		17.543.458		16.135.876
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	312.398.136	3.801.885	213.854.112	2.061.019
Euro Eropa	4.939.769	82.787	2.213.151	28.177
Yen Jepang	136.062.121	15.749	32.969.491	3.685
Yuan Cina	2.088	4	-	-
Dolar Singapura	70	1	-	-
		<u>3.900.426</u>		<u>2.092.881</u>
		<u>21.443.884</u>		<u>18.228.757</u>
		<u>78.666.064</u>		<u>79.051.314</u>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2013	2012
Rupiah	2,55%	2,87%
Mata uang asing	0,32	0,17

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. GIRO (lanjutan)

Giro yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp72.136 dan Rp68.148 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

21. TABUNGAN

Tabungan terdiri atas:

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
Rupiah				
Simpedes		127.649.038		109.024.862
Britama		78.580.879		69.655.010
Lain-lain		3.172.251		3.488.379
		<u>209.402.168</u>		<u>182.168.251</u>
Mata uang asing				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	52.542.488	639.442	35.819.351	345.209
Dolar Australia	393.360	4.270	1.199	12
Dolar Singapura	165.174	1.589	176.799	1.393
Euro Eropa	58.786	985	157	2
Yuan Cina	11.172	22	646	1
		<u>646.308</u>		<u>346.617</u>
		<u>210.048.476</u>		<u>182.514.868</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
Rupiah				
Simpedes		1.772		1.766
Britama		162.339		297.204
Lain-lain		15.689		14.465
		<u>179.800</u>		<u>313.435</u>
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	525.908	6.400	548.171	5.283
Dolar Singapura	590	6	-	-
Yuan Cina	364	1	-	-
		<u>6.407</u>		<u>5.283</u>
		<u>186.207</u>		<u>318.718</u>
		<u>210.234.683</u>		<u>182.833.586</u>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2013	2012
Rupiah	1,26%	1,40%
Mata uang asing	0,22	0,19

Tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp67.271 dan Rp63.072 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. DEPOSITO BERJANGKA

Deposito berjangka terdiri atas:

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
Rupiah		114.672.685		105.067.723
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	865.225.457	10.529.794	2.939.062.620	28.325.216
Euro Eropa	562.552.458	9.427.991	3.030.082	38.579
Yuan Cina	4.116.198.111	8.274.690	78.979.680	122.143
Dolar Singapura	283.458	2.727	307.019	2.419
Dolar Australia	100.103	1.087	49.965	500
Pound Sterling Inggris	11.746	236	-	-
		<u>28.236.525</u>		<u>28.488.857</u>
		<u>142.909.210</u>		<u>133.556.580</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
Rupiah		38.562.901		36.300.317
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	1.641.703.370	19.979.530	748.316.680	7.211.902
Euro Eropa	8.003.040	134.125	15.586.233	198.438
		<u>20.113.655</u>		<u>7.410.340</u>
		<u>58.676.556</u>		<u>43.710.657</u>
		<u>201.585.766</u>		<u>177.267.237</u>

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Deposits on call</i>	3.812.090	8.640.037
Deposito		
1 bulan	77.525.429	65.689.511
3 bulan	18.399.280	17.917.049
6 bulan	7.867.620	8.054.826
12 bulan	6.812.550	4.455.948
Lebih dari 12 bulan	255.716	310.352
	<u>114.672.685</u>	<u>105.067.723</u>
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Deposits on call</i>	3.801.861	1.286.886
Deposito		
1 bulan	8.853.438	8.736.039
3 bulan	2.197.124	5.866.620
6 bulan	9.693.174	7.286.207
12 bulan	3.689.404	5.311.922
Lebih dari 12 bulan	1.524	1.183
	<u>28.236.525</u>	<u>28.488.857</u>
	<u>142.909.210</u>	<u>133.556.580</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2013	2012
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Deposits on call</i>	1.985.697	3.266.429
Deposito		
1 bulan	14.559.406	5.670.758
3 bulan	3.294.887	688.879
6 bulan	321.666	46.660
12 bulan	18.401.245	26.627.591
	<u>38.562.901</u>	<u>36.300.317</u>
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Deposits on call</i>	5.739.576	1.905.871
Deposito		
1 bulan	8.829.425	5.490.377
3 bulan	5.478.347	1.602
6 bulan	5.207	2.409
12 bulan	8.459	10.081
Lebih dari 12 bulan	52.641	-
	<u>20.113.655</u>	<u>7.410.340</u>
	<u>58.676.556</u>	<u>43.710.657</u>
	<u>201.585.766</u>	<u>177.267.237</u>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2013	2012
Rupiah	6,12%	5,84%
Mata uang asing	1,51	1,76

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp202.654 dan Rp213.313 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas:

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro		100.749		104.582
Tabungan		4.534		3.983
<i>Deposits on call</i>		650.000		-
Deposito berjangka		660.993		1.299.493
<i>Inter-bank call money</i>		380.000		30.000
		<u>1.796.276</u>		<u>1.438.058</u>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas (lanjutan):

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing</u>				
Giro				
Dolar Amerika Serikat	100.161	1.219	288.249	2.778
<i>Inter-bank call money</i>				
Dolar Amerika Serikat	121.893.432	1.483.443	70.786.822	682.208
		1.484.662		684.986
		3.280.938		2.123.044
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro		45.182		3.699
Deposito berjangka		-		50.000
<i>Inter-bank call money</i>		-		120.000
		45.182		173.699
<u>Mata uang asing</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
Dolar Amerika Serikat	30.000.000	365.100	50.000.000	481.875
		410.282		655.574
		3.691.220		2.778.618

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah:

	Rupiah		Mata Uang Asing	
	2013	2012	2013	2012
Giro	1,35%	1,62%	0,00%	0,00%
Tabungan	1,24	1,39	-	-
Deposits on call	6,83	3,53	-	-
Deposito berjangka	5,72	4,79	0,00	0,71
Inter-bank call money	4,43	3,63	0,22	1,00

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2013			Total
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro	100.749	-	-	100.749
Tabungan	4.534	-	-	4.534
<i>Deposits on call</i>	650.000	-	-	650.000
Deposito berjangka	655.449	3.108	2.436	660.993
<i>Inter-bank call money</i>	380.000	-	-	380.000
	1.790.732	3.108	2.436	1.796.276

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2013			Total
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing</u>				
Giro	1.219	-	-	1.219
<i>Inter-bank call money</i>	1.265.680	44.543	173.220	1.483.443
	<u>1.266.899</u>	<u>44.543</u>	<u>173.220</u>	<u>1.484.662</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro	45.182	-	-	45.182
<u>Mata uang asing</u>				
<i>Inter-bank call money</i>	365.100	-	-	365.100
	<u>3.467.913</u>	<u>47.651</u>	<u>175.656</u>	<u>3.691.220</u>
	2012			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro	104.582	-	-	104.582
Tabungan	3.983	-	-	3.983
Deposito berjangka	1.285.056	11.250	3.187	1.299.493
<i>Inter-bank call money</i>	30.000	-	-	30.000
	<u>1.423.621</u>	<u>11.250</u>	<u>3.187</u>	<u>1.438.058</u>
<u>Mata uang asing</u>				
Giro	2.778	-	-	2.778
<i>Inter-bank call money</i>	337.312	-	344.896	682.208
	<u>340.090</u>	<u>-</u>	<u>344.896</u>	<u>684.986</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro	3.699	-	-	3.699
Deposito berjangka	50.000	-	-	50.000
<i>Inter-bank call money</i>	120.000	-	-	120.000
	<u>173.699</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>173.699</u>
<u>Mata uang asing</u>				
<i>Inter-bank call money</i>	481.875	-	-	481.875
	<u>2.419.285</u>	<u>11.250</u>	<u>348.083</u>	<u>2.778.618</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

BRI menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

	2013
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
Obligasi BRI	
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp61.867 per 31 Desember 2013	6.023.133

Pada tanggal 28 Maret 2013, BRI menerbitkan dan mendaftarkan obligasi Bank BRI tahun 2013 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018 dengan tingkat bunga tetap 2,95% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,20% setara dengan ASD495.980.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 28 September 2013. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan rating masing-masing Baa3 dan BBB-.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Bank BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan memperkuat struktur pendanaan umum BRI.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Obligasi Bank BRI Tahun 2013 memperoleh peringkat BBB- dan Baa3 dari Fitch dan Moody's.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri atas:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Bank Indonesia		
Pinjaman likuiditas	16.066	28.410
Pinjaman lainnya	12.457	12.376
	28.523	40.786
<u>Mata uang asing</u>		
Pinjaman bilateral	-	1.927.500
Pinjaman lainnya	8.956.390	8.644.248
	8.956.390	10.571.748
	8.984.913	10.612.534
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	100.000	100.000
Pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	150.987
Pinjaman dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	25.234
	100.000	276.221
	9.084.913	10.888.755

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2013	2012
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
> 1 bulan - 3 bulan	202	4.066
> 3 bulan - 1 tahun	6.727	15.130
> 1 tahun - 5 tahun	9.137	9.214
> 5 tahun	12.457	12.376
	<u>28.523</u>	<u>40.786</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	1.909.483	1.692.127
> 1 bulan - 3 bulan	4.065.257	3.467.951
> 3 bulan - 1 tahun	2.981.650	5.411.670
	<u>8.956.390</u>	<u>10.571.748</u>
	<u>8.984.913</u>	<u>10.612.534</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
> 1 bulan - 3 bulan	-	125.423
> 3 bulan - 1 tahun	-	50.798
> 1 tahun - 5 tahun	100.000	100.000
	<u>100.000</u>	<u>276.221</u>
	<u>9.084.913</u>	<u>10.888.755</u>

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

a) Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman Likuiditas

Akun ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI antara lain untuk keperluan Kredit Investasi, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Tebu Rakyat, Pinjaman untuk BULOG dan KUD, Kredit Modal Kerja Permanen, Pupuk dan lain-lain.

Klasifikasi jangka waktu pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
> 1 bulan - 3 bulan	202	4.066
> 3 bulan - 1 tahun	6.727	15.130
> 1 tahun - 5 tahun	9.137	9.214
	<u>16.066</u>	<u>28.410</u>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun masing-masing adalah sebesar 0,06% dan 3,22% untuk tahun-tahun 2013 dan 2012.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b) Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

- Pinjaman kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) merupakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh BRIS (Entitas Anak) pada tanggal 14 Desember 2012 untuk modal kerja pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR). Pembiayaan tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2017, dan porsi *nisbah* yang disepakati adalah masing-masing sebesar 63,46% untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan 36,54% untuk BRIS.
- Pinjaman kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan fasilitas kredit yang diperoleh untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI Agro (Entitas Anak) untuk keperluan Kredit Investasi dengan pola kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) untuk Koperasi Petani Sawit Makmur, Koperasi Perkebunan Belimbing Makmur dan lain-lain. Fasilitas kredit ini (4 fasilitas) dijamin dengan fidusia berupa Surat Utang Negara dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2013. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun sebesar 7,05% untuk tahun 2012.
- Pinjaman kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia merupakan fasilitas kredit yang diperoleh untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI Agro untuk keperluan *refinancing* kepada KUD Delima Sakti, Kopbun Siampo, KUD Hidup Baru dan lain-lain. Fasilitas kredit ini (2 fasilitas) tanpa jaminan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 28 Maret 2013 dan 4 Juni 2013. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun sebesar 7,27% untuk tahun 2012.

c) Pinjaman Bilateral

Pada tanggal 26 Agustus 2011 dan 27 September 2011, BRI melakukan pinjaman bilateral dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) masing-masing sebesar ASD25.000.000 dan ASD200.000.000 untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam rangka mengantisipasi ekspansi bisnis BRI dengan bunga masing-masing sebesar LIBOR ditambah margin 1,20% per tahun dan LIBOR ditambah margin 2,20% per tahun dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pinjaman sebesar ASD25.000.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya tanggal 26 Agustus 2012.

Pinjaman sebesar ASD200.000.000 jatuh temponya terbagi dua, untuk ASD100.000.000 pertama akan dibayar pada tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan ASD100.000.000 kedua akan dibayarkan pada tanggal 27 September 2012. Pada saat jatuh tempo pinjaman ASD100.000.000 pada tanggal 27 Agustus 2012 dilakukan perpanjangan dengan mengubah bunga menjadi sebesar LIBOR ditambah margin 2% per tahun, sedangkan pada saat jatuh tempo pinjaman ASD100.000.000 pada tanggal 27 September 2012 dilakukan perpanjangan dengan mengubah bunga menjadi sebesar LIBOR ditambah margin 1,5% per tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada saat jatuh temponya masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2013 dan 27 September 2013.

d) Pinjaman Lainnya

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Bank Indonesia		12.457		12.376

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d) Pinjaman Lainnya (lanjutan)

	2013		2012	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
OCBC Bank	146.015.613	1.777.010	97.636.272	940.969
The Royal Bank of Scotland	96.175.305	1.170.453	130.059.214	1.253.446
The Bank of New York Mellon	75.150.275	914.579	50.739.925	489.006
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	51.133.844	622.299	34.577.911	333.245
Commerzbank, A.G.	50.000.000	608.500	-	-
Citibank, N.A.	50.000.000	608.500	125.415.500	1.208.692
Australia and New Zealand Bank	50.000.000	608.500	25.000.000	240.938
Bank of Montreal	50.000.000	608.500	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited	40.000.000	486.800	-	-
Bank of Nova Scotia	30.000.000	365.100	-	-
Wells Fargo	25.478.200	310.070	75.000.000	722.812
Maybank	25.000.000	304.250	-	-
Standard Chartered Bank	25.000.000	304.250	150.871.757	1.454.027
Bank of America N.A.	19.537.048	237.766	30.000.000	289.125
JP Morgan Chase Bank, N.A.	1.537.555	18.712	80.000.000	771.000
		8.945.289		7.703.260
<u>Euro Eropa</u>				
Commerzbank, A.G.	662.400	11.101	65.440.466	833.163
JP Morgan Chase Bank, N.A.	-	-	8.340.671	106.190
		11.101		939.353
<u>Yen Jepang</u>				
Standard Chartered Bank	-	-	14.630.000	1.635
		8.956.390		8.644.248
		8.968.847		8.656.624

Fasilitas pinjaman diterima lainnya dalam mata uang asing merupakan pinjaman jangka pendek dari beberapa bank asing dengan jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau SIBOR ditambah margin tertentu, serta termasuk fasilitas pinjaman *refinancing* yang dijamin dengan *letters of credit* yang diterbitkan oleh BRI.

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a) Rincian Estimasi Kerugian atas Transaksi Komitmen dan Kontinjensi yang Mempunyai Risiko Kredit:

	2013	2012
<u>Rupiah</u>		
Garansi yang diterbitkan	223	414

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi:

	2013	2012
<u>Rupiah</u>		
Saldo awal tahun	414	152
(Pembalikan) pembentukan biaya estimasi kerugian selama tahun berjalan	(191)	262
Saldo akhir	223	414

BRI melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali untuk transaksi komitmen dan kontinjensi milik BRIS (Entitas Anak) (berdasarkan prinsip syariah) penilaian dilakukan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

Jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp223 dan Rp414 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

c) Kolektibilitas Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif (Catatan 2am dan 42):

	2013					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
<u>Pihak ketiga</u>						
<u>Rupiah</u>						
Garansi yang diterbitkan	2.956.284	-	-	-	-	2.956.284
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	482.260	-	-	-	-	482.260
	<u>3.438.544</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.438.544</u>
<u>Mata uang asing</u>						
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	14.520.957	-	-	-	-	14.520.957
Garansi yang diterbitkan	5.073.751	-	-	-	-	5.073.751
	<u>19.594.708</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19.594.708</u>
<u>Pihak berelasi</u>						
<u>(Catatan 43)</u>						
<u>Rupiah</u>						
Garansi yang diterbitkan	2.814.419	-	-	-	-	2.814.419
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	180.540	-	-	-	-	180.540
	<u>2.994.959</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.994.959</u>
<u>Mata uang asing</u>						
Garansi yang diterbitkan	5.047.727	-	-	-	-	5.047.727
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	3.442.713	-	-	-	-	3.442.713
	<u>8.490.440</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.490.440</u>
	<u>34.518.651</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>34.518.651</u>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c) Kolektibilitas Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif (Catatan 2am dan 42) (lanjutan):

	2012					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak ketiga						
Rupiah						
Garansi yang diterbitkan	2.238.507	-	-	-	-	2.238.507
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	126.012	-	-	-	-	126.012
	<u>2.364.519</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.364.519</u>
Mata uang asing						
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	6.037.299	-	-	-	-	6.037.299
Garansi yang diterbitkan	4.578.886	-	-	-	-	4.578.886
	<u>10.616.185</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.616.185</u>
Pihak berelasi (Catatan 43)						
Rupiah						
Garansi yang diterbitkan	1.463.576	-	-	-	-	1.463.576
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	324.284	-	-	-	-	324.284
	<u>1.787.860</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.787.860</u>
Mata uang asing						
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	5.744.305	-	-	-	-	5.744.305
Garansi yang diterbitkan	3.980.849	-	-	-	-	3.980.849
	<u>9.725.154</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9.725.154</u>
	<u>24.493.718</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24.493.718</u>

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja terdiri atas:

	2013	2012
Bonus dan Insentif	4.049.103	2.791.258
Cadangan cuti besar (Catatan 41e)	844.309	903.446
Cadangan penghargaan tanda jasa (Catatan 41e)	752.338	825.709
Program pemutusan hubungan kerja (Catatan 41d)	815.881	684.438
Program pensiun imbalan pasti (Catatan 41a)	392.870	573.290
Cadangan masa persiapan pensiun (Catatan 41e)	4.431	60.011
	<u>6.858.932</u>	<u>5.838.152</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri atas:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Utang bunga	618.490	488.539
Cadangan pembayaran bunga tepat waktu (Catatan 2z)	581.812	494.150
Cadangan kewajiban litigasi (Catatan 44b)	328.630	826.661
Pendapatan diterima di muka	51.919	15.559
Setoran jaminan	32.617	63.273
Lain-lain	1.412.833	1.694.102
	<u>3.026.301</u>	<u>3.582.284</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Utang bunga	85.932	57.065
Pendapatan diterima di muka	47.083	35.799
Setoran jaminan	21.091	18.175
Lain-lain	61.939	226.943
	<u>216.045</u>	<u>337.982</u>
	<u>3.242.346</u>	<u>3.920.266</u>

29. PINJAMAN SUBORDINASI

BRI memperoleh pinjaman subordinasi dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Rupiah</u>		
Obligasi subordinasi II	1.998.052	1.996.266
Pinjaman <i>two-step loan</i>	98.972	120.296
	<u>2.097.024</u>	<u>2.116.562</u>

a. Obligasi Subordinasi II

Pada tanggal 22 Desember 2009, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga tetap yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Obligasi Subordinasi tersebut diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,95% yang dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan. Obligasi Subordinasi ini akan jatuh tempo dan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok Obligasi Subordinasi, yaitu pada tanggal 22 Desember 2014. Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia, namun demikian jika di kemudian hari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana disebut di atas tidak lagi disyaratkan oleh Bank Indonesia, maka pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Bank Indonesia.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

a. Obligasi Subordinasi II (lanjutan)

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Subordinasi tersebut akan dimanfaatkan seluruhnya untuk ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya. BRI tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi Subordinasi.

Penerbitan dan klasifikasi Obligasi Subordinasi sebagai pinjaman Subordinasi telah mendapatkan izin prinsip oleh Bank Indonesia melalui Surat No. 11/90/DPB1/TPB1-3 tanggal 11 November 2009.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 memperoleh peringkat "idAAA" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Bertindak sebagai wali amanat untuk Obligasi Subordinasi tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap BRI dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali atas permintaan dan atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara).
- Melakukan penggabungan dan atau pemisahan dan atau peleburan dan atau pengambilalihan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk melakukan penggabungan dan atau pemisahan dan atau peleburan dan atau pengambilalihan, kecuali atas permintaan dan atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan OJK.

BRI telah memenuhi perjanjian perwaliamanatan tersebut di atas.

b. Pinjaman *Two-step Loan*

Pinjaman *two-step loan* dalam mata uang Rupiah merupakan pinjaman dari Pemerintah yang dananya berasal dari Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United States Agency for International Development (USAID) dan Islamic Development Bank (IDB). Tingkat bunga pinjaman ini bervariasi sesuai dengan masing-masing perjanjian dengan jangka waktu antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk pinjaman subordinasi adalah sebesar 4,38% dan 4,40%, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Pinjaman-pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2027.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu pinjaman subordinasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Rupiah	2013	2012
≤ 1 bulan	232	232
> 3 bulan - 1 tahun	1.998.289	21.093
> 1 tahun - 5 tahun	-	1.996.502
> 5 tahun	98.503	98.735
	2.097.024	2.116.562

30. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 1c) adalah sebagai berikut:

	Total Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal Dasar				
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	250	0,00%
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	59.999.999.999	250	14.999.999.999.750	100,00
	60.000.000.000		15.000.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Negara Republik Indonesia				
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	250	0,00%
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	13.999.999.999	250	3.499.999.999.750	56,75
Masyarakat				
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	10.669.162.000	250	2.667.290.500.000	43,25
	24.669.162.000		6.167.290.500.000	100,00%

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BRI, pengajuan permohonan agar BRI dinyatakan pailit dan pembubaran BRI.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Struktur Modal

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen antara Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dengan BRI tanggal 28 Februari 2001, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 tentang besarnya nilai final dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BRI dalam rangka program rekapitalisasi bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan bahwa nilai final kebutuhan rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531 (Catatan 10).

Hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara pada BRI dengan nilai final tersebut dilaksanakan sebagai berikut: Rp29.063.531 dikonversi dengan 3.272.000 lembar saham baru yang diterbitkan oleh BRI dengan nominal Rp1 juta per lembar saham dan Rp25.791.531 dari dana rekapitalisasi dibukukan sebagai agio saham pada struktur modal BRI. Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku surut sejak tanggal 30 Juni 2003.

Dalam RUPS Luar Biasa BRI tanggal 3 Oktober 2003 berdasarkan akta No. 6 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham BRI memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Restrukturisasi modal BRI per 30 Juni 2003 yang berasal dari dana rekapitalisasi sebesar Rp29.063.531 dengan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor BRI oleh Negara Republik Indonesia dari Rp1.728.000 yang terdiri dari 1.728.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per saham menjadi Rp5.000.000 yang terdiri dari 5.000.000 lembar saham dengan nilai nominal yang sama dan sisanya sebesar Rp25.791.531 dicatat sebagai agio saham (Tambahan Modal Disetor).
2. Perubahan nilai nominal saham (stock split) dari Rp1 juta menjadi Rp500 (Rupiah penuh).
3. Peningkatan modal dasar BRI dari Rp5 triliun yang terbagi atas 5.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per lembar saham menjadi Rp15 triliun yang terbagi atas 30.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham.
4. Perubahan klasifikasi saham BRI menjadi saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.
5. Penggunaan cadangan umum dan tujuan per 30 Juni 2003 adalah sebesar Rp1.386.616 untuk menutup saldo rugi kumulatif per 30 Juni 2003.
6. Rencana kuasi-reorganisasi BRI per tanggal 30 Juni 2003 guna menutup saldo rugi kumulatif sebesar Rp24.699.387 dengan agio saham yang telah dibentuk (Catatan 3).
7. Rencana untuk melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) BRI kepada masyarakat.
8. Tindak lanjut atas perubahan Anggaran Dasar
 - i. Menyetujui perubahan status BRI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Terbuka, sehingga untuk selanjutnya mengubah nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Struktur Modal (lanjutan)

- ii. Menyetujui perubahan seluruh pasal dalam Anggaran Dasar BRI dengan menyusun kembali sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang "Pasar Modal" dan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik".

Perubahan Anggaran Dasar BRI sehubungan dengan RUPS Luar Biasa tersebut di atas telah diaktakan dengan akta No.7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003.

Berdasarkan Akta Notaris No. 38 tanggal 24 November 2010 dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp250 (Rupiah penuh) per saham, efektif berlaku tanggal 11 Januari 2011 (Catatan 1c).

Pada tanggal 13 Oktober 2003, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2003 tentang penjualan sebagian saham BRI yang dimiliki Negara Republik Indonesia serta menerbitkan saham baru BRI yang tidak diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia, melalui pasar modal dan atau menjual langsung kepada investor.

Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) BRI

Berdasarkan Surat Ketua Bapepam No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003, pernyataan pendaftaran yang diajukan BRI dalam rangka IPO BRI sejumlah 3.811.765.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B, yang terdiri dari 2.047.060.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan 1.764.705.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham dan harga penawaran sebesar Rp875 (Rupiah penuh) setiap lembar saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 31 Oktober 2003. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham BRI juga dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi) masing-masing dengan harga Rp875 (Rupiah penuh) setiap saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan telah dilaksanakan, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI.

Program Penjatahan Saham

Berdasarkan RUPS Luar Biasa di atas, para pemegang saham BRI juga menyetujui rencana kepemilikan saham oleh pekerja dan manajemen melalui Program Penjatahan Saham (Employee Stock Allocation (ESA)) dan Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Plan (MSOP)). Program kepemilikan saham oleh pekerja (ESA) terdiri dari program pemberian saham bonus (Bonus Share Plan), program penjatahan saham dengan diskon (Shares Purchase at Discount) dan program penjatahan saham tambahan (Additional Shares Grant).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Program Penjatahan Saham (lanjutan)

Sedangkan program kepemilikan saham oleh manajemen (MSOP) ditujukan untuk Direksi dan pekerja pada posisi atau jabatan tertentu. Biaya dan diskon atas program ESA dan MSOP menjadi tanggungan BRI yang bebannya bersumber dari cadangan yang telah dibentuk. Biaya kompensasi MSOP diakui sebagai opsi saham, bagian dari ekuitas. Pengelolaan dan pelaksanaan program ESA dan MSOP dilakukan oleh Direksi, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Dewan Komisaris.

b. Tambahan Modal Disetor

Rincian tambahan modal disetor per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Tambahan modal Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi	1.092.144
Sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya	5
Agio saham dari IPO	589.762
Eksekusi atas opsi saham	
Tahun 2004	49.514
Tahun 2005	184.859
Tahun 2006	619.376
Tahun 2007	140.960
Tahun 2008	29.013
Tahun 2009	14.367
Tahun 2010	43.062
Opsi saham MSOP tahap pertama yang telah jatuh tempo	504
Opsi saham MSOP tahap kedua yang telah jatuh tempo	1.845
Opsi saham MSOP tahap ketiga yang telah jatuh tempo	8.447
	<u>2.773.858</u>

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah", Pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2003, modal dasar dan ditempatkan BRI belum ditingkatkan dengan tambahan modal dari program rekapitalisasi tersebut, sehingga setoran modal Pemerintah sebesar Rp29.063.531 dicatat sementara pada akun "Tambahan Modal Disetor" bersama-sama dengan sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya sebesar Rp5.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 seperti dijelaskan pada butir a di atas, dari nilai final kebutuhan rekapitalisasi BRI sebesar Rp29.063.531, dikonversi menjadi modal disetor sebesar Rp3.272.000 dan sisanya sebesar Rp25.791.531 dibukukan sebagai agio saham (Catatan 30a). Selanjutnya, dengan dilaksanakannya kuasi-reorganisasi oleh BRI, saldo rugi sebelum kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp24.699.387 (Catatan 3) dieliminasi ke agio saham, sehingga menghasilkan saldo agio saham sebesar Rp1.092.149 pada tanggal 30 Juni 2003.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Pada tanggal 10 November 2003, BRI telah melakukan IPO dengan mengeluarkan 1.764.705.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp875 (Rupiah penuh) per saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Jumlah Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang dikeluarkan untuk masyarakat dalam rangka IPO (lembar saham)	1.764.705.000
Agio saham per saham (Rupiah penuh)	375
Total agio saham - sebelum diskon	661.764
Dikurangi - 3% diskon yang diberikan kepada nasabah BRI	(2.961)
- Biaya IPO	(69.041)
Agio saham dari IPO	589.762

Pegawai BRI telah melakukan eksekusi atas opsi saham untuk MSOP I mulai tanggal 10 November 2004, MSOP II mulai tanggal 10 November 2005 dan MSOP III mulai tanggal 15 November 2006. Selama periode 2004 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan eksekusi atas opsi saham sebanyak 569.876.000 lembar saham untuk MSOP I, II dan III, dimana untuk tahun 2010 sebanyak 4.728.500 lembar saham, tahun 2009 sebanyak 4.553.000 lembar saham, tahun 2008 sebanyak 7.499.000 lembar saham, tahun 2007 sebanyak 31.379.000 lembar saham, tahun 2006 sebanyak 250.721.000 lembar saham, tahun 2005 sebanyak 185.610.000 lembar saham dan tahun 2004 sebanyak 85.385.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp43.062, tahun 2009 adalah sebesar Rp14.367, tahun 2008 sebesar Rp29.013, tahun 2007 sebesar Rp140.960, tahun 2006 sebesar Rp619.376, tahun 2005 sebesar Rp184.859 dan tahun 2004 sebesar Rp49.514.

c. Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan BRI Kantor Cabang/Perwakilan luar negeri (Cayman Islands, New York dan Hong Kong) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Dolar Hong Kong ke dalam mata uang Rupiah (Catatan 2ah). Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing lainnya dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut merupakan penjumlahan dari laporan laba rugi komprehensif setiap bulan yang telah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah rata-rata pada bulan yang bersangkutan.

d. Pembagian Laba

Dalam RUPS Tahunan BRI tanggal 28 Februari 2013 dan 28 Maret 2012, pemegang saham menyetujui pembagian dividen dari laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dengan penggunaan sebagai berikut:

	Laba tahun 2012	Laba tahun 2011
Dividen	5.556.285	3.016.585
Cadangan tujuan dan umum	2.592.933	150.829
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	603.315

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. EKUITAS (lanjutan)

d. Pembagian Laba (lanjutan)

Sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010) mengenai "Imbalan Kerja", BRI telah membukukan cadangan *tantiem* pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

31. PENDAPATAN BUNGA DAN INVESTASI

Pendapatan bunga dan investasi diperoleh dari:

	2013	2012
Rupiah		
Kredit yang diberikan		
Mikro	24.838.353	19.780.729
Ritel	21.020.297	18.688.743
Korporasi	5.075.470	3.385.618
Efek-efek		
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi		
Sertifikat Bank Indonesia	1.965	-
Obligasi Pemerintah	16.143	35.525
Obligasi	2.557	1.005
Tersedia untuk Dijual		
Sertifikat Bank Indonesia	223.282	305.875
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	15.067	-
Obligasi	3.026	6.296
Obligasi Pemerintah	489.708	332.418
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		
Sertifikat Bank Indonesia	466.203	341.361
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	41.369	-
Obligasi	53.263	88
Obligasi Subordinasi	13.744	7.950
Obligasi Pemerintah	800.421	780.606
<i>Medium Term Notes</i>	5.646	6.794
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah		
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	647	-
Tersedia untuk Dijual	21.675	294.839
Dimiliki hingga Jatuh Tempo	140.795	80.379
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	1.138.532	1.862.490
<i>Inter-bank call money</i>	96.577	45.422
Lain-lain	104	323
Giro pada Bank Indonesia	190.842	163.713
Lain-lain	830.891	669.285
	55.486.577	46.789.459
Mata uang asing		
Kredit yang diberikan		
Ritel	211.720	140.436
Korporasi	971.674	678.805

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. PENDAPATAN BUNGA DAN INVESTASI (lanjutan)

Pendapatan bunga dan investasi diperoleh dari (lanjutan):

	2013	2012
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>		
Efek-efek		
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi		
<i>Credit Link Notes</i>	18.007	17.451
Obligasi Pemerintah	4.123	3.514
Tersedia untuk Dijual		
Obligasi	11.279	493
<i>Medium Term Notes</i>	2.681	18.114
Obligasi Pemerintah	345.880	181.561
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		
<i>Credit Link Notes</i>	33.541	64.574
Wesel Tagih	9.754	23.376
<i>Medium Term Notes</i>	4.612	-
Obligasi	1.172	2.089
Obligasi Pemerintah	120.521	65.812
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	3.888	-
<i>Inter-bank call money</i>	32.715	15.275
Lain-lain	58.610	44.175
Lain-lain	404.077	226.887
	<u>2.234.254</u>	<u>1.482.562</u>
	<u>57.720.831</u>	<u>48.272.021</u>

32. BEBAN BUNGA DAN PEMBIAYAAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban bunga dan pembiayaan lainnya atas:

	2013	2012
<u>Rupiah</u>		
Deposito berjangka	8.870.319	6.892.440
Tabungan	2.253.778	2.125.483
Giro	1.202.053	1.462.384
Pinjaman subordinasi	220.786	221.208
Pinjaman yang diterima	183.428	177.180
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	101.405	41.856
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	388
Lain-lain	1.001.681	1.055.971
	<u>13.833.450</u>	<u>11.976.910</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Deposito berjangka	565.088	474.163
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	86.751	51.877
Giro	64.633	16.393
Pinjaman yang diterima	38.849	78.934
Tabungan	1.452	783
	<u>756.773</u>	<u>622.150</u>
	<u>14.590.223</u>	<u>12.599.060</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN - NETO

Akun ini merupakan beban (pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebagai berikut:

	2013	2012
Kredit yang diberikan (Catatan 13f)	3.946.083	2.593.691
Piutang dan pembiayaan syariah (Catatan 14)	2.410	75.426
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	-	(300)
Efek-efek (Catatan 8e)	12	(750)
Giro pada bank lain (Catatan 6e)	(94)	110
Penyertaan saham (Catatan 16)	(536)	-
	3.947.875	2.668.177

34. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Gaji, upah dan tunjangan	6.397.984	4.593.169
Bonus, insentif dan <i>tantiem</i>	4.079.858	2.806.706
Pendidikan dan pelatihan	566.365	495.736
Tunjangan kesehatan	183.551	154.641
Iuran Jamsostek	180.464	122.173
Pemutusan hubungan kerja (Catatan 41d)	174.500	155.250
Pensiun iuran pasti (Catatan 41c)	124.322	104.385
Cuti besar (Catatan 41e)	55.534	224.217
Pensiun imbalan pasti (Catatan 41a)	46.791	497.852
Masa persiapan pensiun (Catatan 41e)	32.220	2.152
Penghargaan tanda jasa (Catatan 41e)	2.342	192.577
Lain-lain	388.063	256.689
	12.231.994	9.605.547

Jumlah gaji dan tunjangan untuk Direksi adalah sebesar Rp48.817 dan Rp46.269, dan Dewan Komisaris adalah sebesar Rp17.256 dan Rp14.739 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 43).

Jumlah bonus, insentif dan *tantiem* Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan kunci BRI yang dibayarkan adalah masing-masing sebesar Rp266.479 dan Rp225.076 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 43).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Sewa	1.280.213	1.016.732
Perbaikan dan pemeliharaan	752.937	654.556
Penyusutan aset tetap (Catatan 17)	678.285	417.396
Listrik dan air	435.213	362.027
Transportasi	324.360	272.628
Percetakan dan benda pos	254.341	168.212
Peralatan kantor	220.913	183.298
Komunikasi	117.015	107.615
Jasa profesional	72.478	54.139
Instalasi komputer	47.128	42.300
Penelitian dan pengembangan produk	13.823	6.874
Lain-lain	3.322.180	3.057.884
	<u>7.518.886</u>	<u>6.343.661</u>

36. PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pendapatan klaim asuransi kredit	593.346	460.359
Laba penjualan aset tetap	108.193	13.751
Distribusi kas hasil likuidasi BRI Finance Limited, Hong Kong	39.542	23.855
Pendapatan sewa	7.104	4.636
Lain-lain - neto	1.034.304	674.433
	<u>1.782.489</u>	<u>1.177.034</u>

37. PERPAJAKAN

a) Utang Pajak

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>BRI (Entitas Induk)</u>		
Pajak penghasilan		
Pasal 25 (Desember)	160.469	392.603
Pasal 29	1.067.156	443.641
	<u>1.227.625</u>	<u>836.244</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

a) Utang Pajak (lanjutan)

	2013	2012
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak penghasilan		
Pasal 21	10.116	10.374
Pasal 23	736	725
Pasal 25 (Desember)	7.342	4.574
Pasal 29	4.254	34.103
Pasal 4 ayat 2	15.940	9.669
Lain-lain	5	6
	<u>38.393</u>	<u>59.451</u>
	<u>1.266.018</u>	<u>895.695</u>

b) Beban Pajak

	2013	2012
<u>Entitas Induk</u>		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	5.674.294	4.434.804
Periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak	483.171	36.142
Beban pajak tangguhan	330.261	646.937
	<u>6.487.726</u>	<u>5.117.883</u>
<u>Entitas Anak</u>		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	71.080	71.089
Periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak	-	4.455
Manfaat pajak penghasilan	(3.070)	(21.235)
	<u>68.010</u>	<u>54.309</u>
	<u>6.555.736</u>	<u>5.172.192</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	27.910.066	23.859.572
Bagian laba Entitas Anak	(262.190)	(188.685)
Laba sebelum beban pajak BRI (Entitas Induk)	<u>27.647.876</u>	<u>23.670.887</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Perbedaan Temporer:		
Pembalikan cadangan kerugian kredit yang diberikan	(752.577)	(1.688.909)
Pembalikan penyisihan beban pegawai (Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diperdagangkan	(255.395)	(657.053)
Penyusutan aset tetap	(4.516)	882
Pembalikan cadangan kerugian aktiva produktif yang dibentuk diluar kredit yang diberikan	(308.020)	(242.670)
	(536)	-
	<u>(1.321.044)</u>	<u>(2.587.750)</u>
Perbedaan Permanen:		
Humas	209.352	142.637
Representasi dan sumbangan	86.789	49.706
Pembinaan jasmani dan rohani	36.825	32.098
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan tarif final	(5.261)	(4.724)
Bagian laba Entitas Asosiasi	(25.573)	(32.060)
Lain-lain	1.742.508	903.225
	<u>2.044.640</u>	<u>1.090.882</u>
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>28.371.472</u>	<u>22.174.019</u>

Perhitungan beban dan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>28.371.472</u>	<u>22.174.019</u>
<u>Entitas Induk</u>		
Beban pajak-kini	(5.674.294)	(4.434.804)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	4.607.138	3.991.163
Utang pajak penghasilan - Pasal 29	<u>(1.067.156)</u>	<u>(443.641)</u>
<u>Entitas Anak</u>		
Beban pajak-kini	(71.080)	(71.089)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	66.826	36.986
Utang pajak penghasilan - Pasal 29	<u>(4.254)</u>	<u>(34.103)</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2013 dan 2012 digunakan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan BRI kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pajak penghasilan BRI dan Entitas Anak dihitung untuk setiap perusahaan sebagai salah satu badan hukum yang terpisah.

Pemeriksaan tahun pajak 2010

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00198/207/10/093/12 tanggal 28 November 2012, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp1.418 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp447) serta dendanya sebesar Rp194 telah ditagih dengan Surat Tagihan Pajak No. 00112/107/10/093/12 tanggal 28 November 2012. Pokok pajaknya telah disetujui oleh BRI, namun untuk sanksi administrasi dan dendanya saat ini sedang diajukan proses penghapusan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00003/206/10/093/12 tanggal 28 November 2012, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp1.484.041, yang telah disetujui oleh BRI sebesar Rp34.529. Manajemen berpendapat bahwa kekurangan pembayaran pajak yang masih belum disetujui oleh BRI perlakuannya sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Total pembayaran atas kekurangan PPN (termasuk sanksi administrasi) dan PPh serta denda di atas adalah sebesar Rp36.142 dan telah dibayarkan oleh BRI pada tanggal 27 Desember 2012.

Pada tanggal 27 Februari 2013, BRI telah mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00003/206/10/093/12 tanggal 28 November 2012. Untuk memenuhi syarat pengajuan keberatan tersebut, BRI telah membayar deposit sebesar Rp1.449.512 ke Kas Negara pada tanggal 28 Februari 2013. Setelah melakukan penilaian, manajemen BRI berpendapat bahwa jangka waktu proses pengajuan keberatan dan banding sampai dengan putusan peninjauan kembali membutuhkan waktu sekitar 3 tahun 3 bulan dan bahwa putusan keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali mempunyai kemungkinan ditolak oleh pengadilan pajak, untuk itu BRI telah melakukan pembentukan biaya atas kemungkinan kerugian dari proses pengajuan keberatan tersebut sampai dengan putusan peninjauan kembali sebesar Rp483.171 pada tahun 2013 (Catatan 18).

c) Aset Pajak Tangguhan

Perhitungan (beban) manfaat pajak tangguhan BRI adalah sebagai berikut (Catatan 2aj):

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Entitas Induk</u>		
Pembalikan cadangan kerugian aktiva produktif	(188.278)	(422.227)
Pembalikan penyisihan beban pegawai	(63.849)	(164.263)
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diperdagangkan	(1.129)	220
Penyusutan aset tetap	(77.005)	(60.667)
	<u>(330.261)</u>	<u>(646.937)</u>
Entitas Anak	3.070	21.235
	<u>(327.191)</u>	<u>(625.702)</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

c) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun "Aset Pajak Tangguhan") adalah sebagai berikut (Catatan 2aj):

	2013	2012
Entitas Induk		
Cadangan kerugian aktiva produktif	1.245.440	1.433.718
Penyisihan beban pegawai	682.503	746.352
Penyusutan aset tetap	(21.191)	55.814
Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diperdagangkan	(1.129)	-
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi dari efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	236.513	(243.652)
	<u>2.142.136</u>	<u>1.992.232</u>
Entitas Anak	46.370	32.679
	<u>2.188.506</u>	<u>2.024.911</u>

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 25%.

Namun demikian, berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tersebut, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" mengatur bahwa Perseroan Terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang ada, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2014-0098 tanggal 6 Januari 2014 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 6 Januari 2014 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2013) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah terpenuhi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO

Kunci keberhasilan BRI dalam menjadi bank yang kuat, sehat, dan tumbuh secara berkesinambungan salah satunya adalah pelaksanaan bisnis yang disertai pengelolaan risiko secara terpadu dan sistematis, yakni pengelolaan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum sesuai dengan Surat Edaran BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis oleh BRI dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, dimulai dari kebijakan umum, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko, proses dan penerapan manajemen risiko, sampai dengan sistem pengendalian intern. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko diatur dalam kebijakan-kebijakan turunan sesuai dengan jenis risikonya.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko BRI secara efektif. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR).

Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Selain itu Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Direksi menunjuk Direktur khusus, dalam hal ini Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, untuk menjalankan proses pengawasan dan pengendalian risiko secara *bank-wide*.

Direksi BRI dibantu oleh *Risk Management Committee* (RMC) sebagai komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko BRI. RMC bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan.

Untuk membahas permasalahan yang spesifik pada jenis risiko tertentu dan membutuhkan putusan segera, dilakukan rapat RMC yang bersifat terbatas, atau yang disebut sub-RMC. Terdapat 3 (tiga) sub-RMC yaitu CRMC (Credit Risk Management Committee), MRMC (Market Risk Management Committee), dan ORMC (Operational Risk Management Committee), yang dibentuk untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya.

Manajemen risiko dalam organisasi BRI merupakan salah satu fungsi yang bersifat independen, yakni terhadap fungsi bisnis dan terhadap fungsi audit. Ketiga fungsi tersebut berperan aktif dalam menerapkan manajemen risiko dengan tingkat kewenangan yang berbeda. Pengelolaan Manajemen Risiko BRI diimplementasikan dengan konsep tiga garis pertahanan atau *Three Lines of Defense*. *First Line of Defense* adalah unit kerja bisnis/operasional dengan aktivitas fungsional, sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengendalian intern dan menjaga kualitas *output* dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. *Second line of defense* adalah unit kerja manajemen risiko yang memantau penerapan manajemen risiko BRI sesuai toleransi risiko dan menetapkan kebijakan, pedoman dan limit risiko unit kerja bisnis/operasional secara independen. *Third Line of Defense* adalah unit kerja audit internal yang berfungsi melakukan pengendalian melalui evaluasi kepada *first line* dan *second line of defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BRI. BRI memantau kualitas kredit sebagai bagian dari identifikasi dini dari pemburukan kredit. Pengelolaan risiko kredit diantaranya dilakukan dengan pengelolaan *limit* pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima untuk individu pihak ketiga, pengelolaan *limit* pada batasan geografis, dan pengelolaan *limit* konsentrasi per industri. Penetapan *limit* dilakukan melalui penggolongan risiko kredit (*rating*) per individual debitur. Rating risiko kredit dikinikan secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko akibat ekspansi kredit dan penentuan tindak lanjut perbaikan.

Penerapan manajemen risiko kredit tidak hanya ditujukan untuk menempatkan BRI sebagai bank yang patuh terhadap regulasi, namun merupakan suatu tuntutan manajemen untuk menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktek di perbankan, sehingga diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis BRI.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh unit kerja bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak saat kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dilunasi. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas kredit untuk mencegah terjadinya *Non Performing Loan* (NPL).

Melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) terhadap perkembangan kondisi usaha debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pengelolaan risiko kredit BRI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio kredit secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan BRI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia.

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Tabel dibawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2013:

	Eksposur Maksimum	Agunan	Net Eksposur
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14.440.063	15.133.887	-

Untuk kredit yang diberikan, BRI menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit BRI dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. *Secured loans*
2. *Unsecured loans*

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan)

Untuk *secured loans*, BRI menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminan sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari :

- a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, BPKB kendaraan bermotor, dan properti.
- b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.
- c. Lainnya berupa garansi, jaminan pemerintah dan lembaga penjamin.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), BRI akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Unsecured loans terdiri dari *fully unsecured loans* seperti kartu kredit dan *partially secured loans* seperti kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, kredit untuk para pensiunan dan kredit konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured loans* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis.

Dengan demikian, meskipun kredit tersebut termasuk dalam kategori *unsecured loans* namun tingkat risiko dari *partially secured loans* tidak sebesar nilai tercatat kredit. Sedangkan untuk *fully unsecured loans*, tingkat risiko adalah sebesar nilai tercatat kredit.

Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured loans* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

2. Analisa konsentrasi risiko

- a. Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

	2013							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495	-	-	-	-	-	-	40.718.495
Giro pada bank lain	8.746.304	3.740	1.416	795	5.016	10.076	667.850	9.435.197
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	36.306.883	-	-	-	-	-	-	36.306.883
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	898.511	-	-	-	-	-	-	898.511
Tersedia untuk dijual	13.739.364	-	-	-	-	-	1.634.694	15.374.058
Dimiliki hingga jatuh tempo	26.289.475	-	-	-	-	-	112.393	26.401.868
Tagihan wesel ekspor	6.399.769	901.712	143.749	1.116.915	350.933	12.994	-	8.926.072
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	199.314	-	-	-	-	-	-	199.314
Tersedia untuk dijual	712.105	-	-	-	-	-	-	712.105
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14.440.063	-	-	-	-	-	-	14.440.063
Tagihan derivatif	4.981	-	-	-	-	-	-	4.981
Kredit yang diberikan								
Mikro	11.172.945	12.787.420	22.711.207	19.609.819	30.126.437	45.858.914	-	142.266.742
Ritel	48.387.090	12.809.817	19.690.352	23.467.745	31.556.531	45.616.690	326.113	181.854.338
Korporasi	76.579.783	7.685.786	2.089.124	5.946.223	9.701.029	4.191.558	4.001.883	110.195.386
Piutang dan pembiayaan Syariah	3.939.050	3.186.621	1.624.095	1.352.004	2.252.143	1.674.477	-	14.028.390
Tagihan akseptasi	1.788.857	1.034.340	189.150	527.306	140.031	-	-	3.679.684

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

	2013							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset (lanjutan)								
Penyertaan saham*)	1.944	-	-	-	-	-	-	1.944
Aset lain-lain**)	996.975	19.189	15.550	20.885	34.920	23.292	49.723	1.160.534
	294.921.908	38.428.625	46.464.643	52.041.692	74.167.040	97.388.001	6.792.656	610.204.565
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(15.418.945)
								<u>594.785.620</u>
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	15.691.043	1.811.410	110.618	557.092	429.071	27.236	-	18.626.470
Garansi yang diterbitkan	10.058.642	2.226.392	158.740	480.897	393.191	2.574.319	-	15.892.181
	25.749.685	4.037.802	269.358	1.037.989	822.262	2.601.555	-	34.518.651
	2012							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	42.524.126	-	-	-	-	-	-	42.524.126
Giro pada bank lain	4.736.402	118	1.026	8	562	7.818	96.212	4.842.146
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	65.947.885	-	-	-	-	-	295.043	66.242.928
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	612.986	-	-	-	-	-	-	612.986
Tersedia untuk dijual	12.280.118	-	-	-	-	-	1.244.967	13.525.085
Dimiliki hingga jatuh tempo	26.856.716	-	-	-	-	-	142.853	26.999.569
Tagihan wesel ekspor	4.048.115	7.623	80.255	905.657	72.752	14.669	805.701	5.934.772
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	715.616	-	-	-	-	-	-	715.616
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.550.521	-	-	-	-	-	-	9.550.521
Tagihan derivatif	28.850	-	-	-	-	-	-	28.850
Kredit yang diberikan								
Mikro	9.034.327	9.939.161	17.788.181	15.498.699	25.571.902	37.662.582	-	115.494.852
Ritel	35.603.909	10.090.294	15.982.950	19.034.391	26.932.435	38.567.169	-	146.373.726
Korporasi	60.861.940	6.794.456	1.828.626	6.825.359	7.259.103	3.774.799	1.545.401	88.889.684
Piutang dan pembiayaan Syariah	3.608.075	2.332.404	1.342.613	1.052.596	1.687.256	1.225.337	-	11.248.281
Tagihan akseptasi	3.730.657	676.866	336.822	8.086	33.690	-	-	4.786.121
Penyertaan saham*)	1.944	-	-	-	-	-	-	1.944
Aset lain-lain**)	410.062	18.732	9.904	18.323	30.045	65.895	72.394	625.355
	284.152.249	29.859.654	37.370.377	43.343.119	61.587.745	81.318.269	4.365.149	541.996.562
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(14.916.332)
								<u>527.080.230</u>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

	2012							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Rekening Administratif								
Garansi yang diterbitkan L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	8.503.562	887.918	278.298	253.230	285.400	2.053.410	-	12.261.818
	7.436.075	3.685.709	160.285	435.667	475.178	38.986	-	12.231.900
	15.939.637	4.573.627	438.583	688.897	760.578	2.092.396	-	24.493.718

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

b. Sektor industri

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:

	2013							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495	-	-	-	-	-	-	40.718.495
Giro pada bank lain	-	9.435.197	-	-	-	-	-	9.435.197
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	31.957.329	4.349.554	-	-	-	-	-	36.306.883
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	197.028	701.483	-	-	-	-	-	898.511
Tersedia untuk dijual	14.262.387	461.029	-	248.524	12.048	25.310	364.760	15.374.058
Dimiliki hingga jatuh tempo	21.653.086	4.456.782	50.000	50.000	150.000	42.000	-	26.401.868
Tagihan wesel ekspor	10.266	-	-	2.664.128	40.856	32.965	6.177.857	8.926.072
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	199.314	-	-	-	-	-	-	199.314
Tersedia untuk dijual	712.105	-	-	-	-	-	-	712.105
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14.440.063	-	-	-	-	-	-	14.440.063
Tagihan derivatif	-	4.981	-	-	-	-	-	4.981
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	18.962.693	2.684.186	58.893.221	6.554.528	55.172.114	142.266.742
Ritel	-	6.773.316	3.936.283	13.693.620	65.489.885	6.561.863	85.399.371	181.854.338
Korporasi	3.541.631	4.371.588	16.625.502	31.961.494	18.601.806	4.407.974	30.685.391	110.195.386
Piutang dan pembiayaan Syariah	6.739	79.173	129.504	311.405	49.542	5.467.247	7.984.780	14.028.390
Tagihan akseptasi	1.417.558	-	-	11.241	-	-	2.250.885	3.679.684
Penyertaan saham*)	-	834	-	-	-	900	210	1.944
Aset lain-lain**)	764.030	90.272	-	-	-	42.177	264.055	1.160.534
	133.480.031	30.724.209	39.703.982	51.624.598	143.237.358	23.134.964	188.299.423	610.204.565
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(15.418.945)
								594.785.620

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri (lanjutan)

	2013							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	5.856.008	-	-	575.179	33.095	810	12.161.378	18.626.470
Garansi yang diterbitkan	7.194.127	1.689	-	960.675	169.827	109.416	7.456.447	15.892.181
	13.050.135	1.689	-	1.535.854	202.922	110.226	19.617.825	34.518.651
	2012							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	42.524.126	-	-	-	-	-	-	42.524.126
Giro pada bank lain	-	4.842.146	-	-	-	-	-	4.842.146
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	60.696.564	5.261.364	-	-	-	-	285.000	66.242.928
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	71.925	541.061	-	-	-	-	-	612.986
Tersedia untuk dijual	13.113.967	69.227	-	-	-	-	341.891	13.525.085
Dimiliki hingga jatuh tempo	22.169.346	3.591.573	25.000	233.188	-	-	980.462	26.999.569
Tagihan wesel ekspor	14.281	-	11.627	928.956	57.048	-	4.922.860	5.934.772
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	715.616	-	-	-	-	-	-	715.616
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.550.521	-	-	-	-	-	-	9.550.521
Tagihan derivatif	-	28.850	-	-	-	-	-	28.850
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	13.606.510	1.569.718	37.471.249	2.554.663	60.292.712	115.494.852
Ritel	696.347	387.937	2.710.743	7.967.775	53.131.825	6.630.768	74.848.331	146.373.726
Korporasi	2.254.829	5.489.847	15.880.206	28.623.491	3.759.502	798.102	32.083.707	88.889.684
Piutang dan pembiayaan Syariah	17.695	-	127.960	682.580	677.218	4.210.196	5.532.632	11.248.281
Tagihan akseptasi	685.912	-	-	1.185	-	-	4.099.024	4.786.121
Penyertaan saham*)	-	834	-	-	-	900	210	1.944
Aset lain-lain**)	68.054	730	-	-	387.883	168.688	-	625.355
	156.179.183	20.213.569	32.362.046	40.006.893	95.484.725	14.363.317	183.386.829	541.996.562
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(14.916.332)
								527.080.230
Rekening Administratif								
Garansi yang diterbitkan	5.444.426	-	347.076	75.036	268.021	23.262	6.103.997	12.261.818
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	6.068.726	-	1.654	250.057	74.932	80.184	5.756.347	12.231.900
	11.513.152	-	348.730	325.093	342.953	103.446	11.860.344	24.493.718

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

a. Giro pada bank lain

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp77 dan Rp171.

b. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

c. Efek-efek

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	2013	2012
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Pemerintah	18.126.855	15.246.161
Sertifikat Bank Indonesia	8.027.875	16.556.764
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	3.717.868	-
Obligasi	1.986.229	1.559.225
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	1.050.000	575.000
Reksadana	338.464	10.998
<i>Medium term notes</i>	50.000	100.000
Obligasi subordinasi	40.000	89.873
	33.337.291	34.138.021
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah	4.418.069	2.977.313
<i>Credit linked notes</i>	4.212.803	3.698.047
Obligasi	621.084	160.139
Wesel tagih	85.190	115.650
<i>Medium term notes</i>	-	48.470
	9.337.146	6.999.619
	42.674.437	41.137.640
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(772)	(760)
	42.673.665	41.136.880

d. Tagihan wesel ekspor

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (lanjutan)

e. Tagihan derivatif

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

f. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif, sedangkan untuk syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

	2013				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	Standard Grade			
Rupiah					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	122.782.974	215.206	10.670.167	4.629.957	138.298.304
Pertanian	34.633.345	3.482	1.350.181	788.266	36.775.274
Jasa dunia usaha	20.169.721	3.625.324	1.274.688	940.567	26.010.300
Perindustrian	18.340.606	1.291.838	651.361	771.092	21.054.897
Jasa pelayanan sosial	11.986.164	646	253.642	194.599	12.435.051
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	10.673.187	2.555	351.335	299.492	11.326.569
Listrik, gas dan air	10.564.096	-	13.471	26.207	10.603.774
Konstruksi	8.324.731	-	390.665	1.317.825	10.033.221
Pertambangan	2.065.572	1.800	362.284	41.451	2.471.107
Lain-lain	124.568.589	1.267	5.146.468	1.352.576	131.068.900
	<u>364.108.985</u>	<u>5.142.118</u>	<u>20.464.262</u>	<u>10.362.032</u>	<u>400.077.397</u>
Mata uang asing					
Perindustrian	27.227.762	413.841	-	658.383	28.299.986
Perdagangan, perhotelan dan restoran	4.190.159	100.737	220.878	865.594	5.377.368
Jasa pelayanan sosial	3.286.158	-	-	-	3.286.158
Pertanian	2.853.568	-	-	37.018	2.890.586
Pertambangan	2.820.276	-	215.260	5.475	3.041.011
Listrik, gas dan air	1.539.950	-	-	-	1.539.950
Jasa dunia usaha	995.281	-	17.148	427.673	1.440.102
Konstruksi	959.459	-	92	178.738	1.138.289
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	179.769	-	1.262	954.972	1.136.003
Lain-lain	118.006	-	-	-	118.006
	<u>44.170.388</u>	<u>514.578</u>	<u>454.640</u>	<u>3.127.853</u>	<u>48.267.459</u>
	<u>408.279.373</u>	<u>5.656.696</u>	<u>20.918.902</u>	<u>13.489.885</u>	<u>448.344.856</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(15.418.096)
					<u>432.926.760</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (lanjutan)

f. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

	2012				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	Standard Grade			
Rupiah					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	80.229.488	64.984	8.286.020	4.240.317	92.820.809
Pertanian	28.614.575	31.667	1.334.176	640.306	30.620.724
Perindustrian	16.962.073	990.610	535.521	611.051	19.099.255
Jasa dunia usaha	13.991.749	4.792.238	962.900	727.991	20.474.878
Jasa pelayanan sosial	9.015.540	-	151.023	126.736	9.293.299
Listrik, gas dan air	8.301.198	575	17.156	35.200	8.354.129
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	8.029.664	3.391	169.940	230.195	8.433.190
Konstruksi	6.838.465	12.627	243.304	1.347.726	8.442.122
Pertambangan	1.359.468	1.799	92.973	67.069	1.521.309
Lain-lain	118.167.559	195.976	5.905.868	1.702.389	125.971.792
	<u>291.509.779</u>	<u>6.093.867</u>	<u>17.698.881</u>	<u>9.728.980</u>	<u>325.031.507</u>
Mata uang asing					
Perindustrian	19.776.030	309.920	2.542	480.871	20.569.363
Perdagangan, perhotelan dan restoran	4.060.098	73.859	28.546	195.600	4.358.103
Pertambangan	3.573.399	-	13.183	17.008	3.603.590
Pertanian	2.384.829	-	17.352	10.422	2.412.603
Listrik, gas dan air	1.653.608	-	-	278.444	1.932.052
Jasa pelayanan sosial	1.184.509	-	-	-	1.184.509
Konstruksi	855.796	-	19.196	167.599	1.042.591
Jasa dunia usaha	238.439	-	-	87.774	326.213
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	144.350	-	1.051	769.044	914.445
Lain-lain	629.788	-	1.779	-	631.567
	<u>34.500.846</u>	<u>383.779</u>	<u>83.649</u>	<u>2.006.762</u>	<u>36.975.036</u>
	<u>326.010.625</u>	<u>6.477.646</u>	<u>17.782.530</u>	<u>11.735.742</u>	<u>362.006.543</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(14.914.865)
					<u>347.091.678</u>

g. Tagihan akseptasi

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (lanjutan)

h. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, akun-akun administratif ini mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	2013	2012
<u>Rupiah</u>		
Garansi yang diterbitkan	5.770.703	3.702.083
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	662.800	450.296
	<u>6.433.503</u>	<u>4.152.379</u>
<u>Mata uang asing</u>		
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	17.963.670	11.781.604
Garansi yang diterbitkan	10.121.478	8.559.735
	<u>28.085.148</u>	<u>20.341.339</u>
	34.518.651	24.493.718
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(223)	(414)
	<u>34.518.428</u>	<u>24.493.304</u>

4. Kualitas aset keuangan

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*.

	2013				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	<i>High Grade</i>	<i>Standard Grade</i>			
<u>Aset</u>					
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495	-	-	-	40.718.495
Giro pada bank lain	9.435.197	-	-	-	9.435.197
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	36.306.883	-	-	-	36.306.883
<u>Efek efek</u>					
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	898.511	-	-	-	898.511
Tersedia untuk dijual	15.232.460	141.598	-	-	15.374.058
Dimiliki hingga jatuh tempo	26.294.491	107.377	-	-	26.401.868
Tagihan wesel ekspor	8.926.072	-	-	-	8.926.072

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

	2013				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	Standard Grade			
Aset (lanjutan)					
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah					
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	199.314	-	-	-	199.314
Tersedia untuk dijual	712.105	-	-	-	712.105
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14.440.063	-	-	-	14.440.063
Tagihan derivatif	4.981	-	-	-	4.981
Kredit yang diberikan					
Mikro	131.203.167	-	9.350.206	1.713.369	142.266.742
Ritel	165.838.852	25.647	10.297.146	5.692.693	181.854.338
Korporasi	98.149.920	5.608.577	916.964	5.519.925	110.195.386
Piutang dan pembiayaan syariah	13.087.434	22.472	354.586	563.898	14.028.390
Tagihan akseptasi	3.679.684	-	-	-	3.679.684
Penyertaan saham*)	1.944	-	-	-	1.944
Aset lain-lain**)	1.160.534	-	-	-	1.160.534
	569.890.107	5.905.671	20.918.902	13.489.885	610.204.565
	2012				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	Standard Grade			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	42.524.126	-	-	-	42.524.126
Giro pada bank lain	4.842.146	-	-	-	4.842.146
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	66.242.928	-	-	-	66.242.928
Efek efek					
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	612.986	-	-	-	612.986
Tersedia untuk dijual	13.525.085	-	-	-	13.525.085
Dimiliki hingga jatuh tempo	26.899.569	100.000	-	-	26.999.569
Tagihan wesel ekspor	5.934.772	-	-	-	5.934.772
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah					
Tersedia untuk dijual	715.616	-	-	-	715.616
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.550.521	-	-	-	9.550.521
Tagihan derivatif	28.850	-	-	-	28.850
Kredit yang diberikan					
Mikro	106.003.807	-	7.996.256	1.494.789	115.494.852
Ritel	132.119.531	79.936	8.716.216	5.458.043	146.373.726
Korporasi	77.264.187	6.377.885	805.128	4.442.484	88.889.684
Piutang dan pembiayaan syariah	10.623.100	19.825	264.930	340.426	11.248.281
Tagihan akseptasi	4.786.121	-	-	-	4.786.121
Penyertaan saham*)	1.944	-	-	-	1.944
Aset lain-lain**)	625.355	-	-	-	625.355
	505.900.644	6.577.646	17.782.530	11.735.742	541.996.562

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

1. Tingkat Tinggi (High Grade)

- a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah dan transaksi dengan bank yang telah terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan tidak mengalami penurunan nilai, serta tidak pernah direstrukturisasi.
- c) Tagihan wesel ekspor dan tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
- d) Efek-efek dan obligasi Pemerintah dengan kategori *high grade*, yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan *rating* minimal idA- (Pefindo), A- (Fitch), A- (Standard & Poor's) atau A3 (Moody's).
- e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

2. Tingkat Standar (Standard Grade)

- a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah dan transaksi dengan bank yang tidak terdaftar pada Bursa.
- b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan tidak mengalami penurunan nilai, namun pernah direstrukturisasi.
- c) Tagihan wesel ekspor dan tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang memadai.
- d) Efek-efek dan obligasi Pemerintah dengan kategori *standard grade* yaitu efek-efek dan obligasi pemerintah dengan *rating* antara idBBB+ sampai dengan idBBB- (Pefindo), BBB+ sampai dengan BBB- (Fitch), BBB+ sampai dengan BBB- (Standard & Poor's) atau Baa1 sampai dengan Baa3 (Moody's).
- e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

5. Berdasarkan PSAK 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap kredit yang diberikan, piutang, dan pembiayaan syariah yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

	2013			Total
	≤ 30 hari	> 30 – 60 hari	> 60 – 90 hari	
Kredit yang diberikan				
Mikro	300.557	47.635	9.002.014	9.350.206
Ritel	918.767	270.709	9.107.670	10.297.146
Korporasi	152.059	36.573	728.332	916.964
Piutang dan pembiayaan syariah	234.651	74.944	44.991	354.586
	1.606.034	429.861	18.883.007	20.918.902

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

	2012			
	≤ 30 hari	> 30 – 60 hari	> 60 – 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	201.957	53.068	7.741.231	7.996.256
Ritel	739.385	252.277	7.724.554	8.716.216
Korporasi	-	192.769	612.359	805.128
Piutang dan pembiayaan syariah	191.418	38.107	35.405	264.930
	1.132.760	536.221	16.113.549	17.782.530

Manajemen Risiko Likuiditas

BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko likuiditas yang mencakup manajemen likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas, penetapan strategi pendanaan, sistem peringatan dini, pengukuran dan penetapan *limit* risiko likuiditas termasuk pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat (*contingency plan*).

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kecukupan dana harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi kelebihan atau kekurangan likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:

Keterangan	Total	2013				
		Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	19.171.778	19.171.778	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495	40.718.495	-	-	-	-
Giro pada bank lain	9.435.197	9.435.197	-	-	-	-
Cadangan kerugian Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(77)	-	-	-	-	(77)
	36.306.883	36.264.087	40.000	2.796	-	-

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Keterangan	Total	2013				
		Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset (lanjutan)						
Efek-efek	42.674.437	15.865.461	4.714.910	8.499.398	13.594.668	-
Cadangan kerugian	(772)	-	-	-	-	(772)
Tagihan wesel ekspor	8.926.072	1.136.577	1.079.390	6.710.105	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	4.511.419	911.419	-	-	3.600.000	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14.440.063	14.440.063	-	-	-	-
Tagihan derivatif	4.981	-	4.981	-	-	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	142.266.742	1.408.628	2.415.817	18.491.165	119.951.132	-
Ritel	181.854.338	9.533.300	16.308.914	48.101.129	107.910.995	-
Korporasi	110.195.386	15.236.228	19.170.547	12.658.888	63.129.723	-
Cadangan kerugian Piutang dan pembiayaan	(15.171.736)	-	-	-	-	(15.171.736)
Syariah	14.028.390	688.838	582.437	1.809.569	10.947.546	-
Cadangan kerugian	(246.360)	-	-	-	-	(246.360)
Tagihan akseptasi	3.679.684	1.227.198	1.111.872	1.340.614	-	-
Penyertaan saham*)	1.944	-	-	-	-	1.944
Aset lain-lain**)	1.160.534	243.920	548.476	368.138	-	-
	613.957.398	166.281.189	45.977.344	97.981.802	319.134.064	(15.417.001)
Liabilitas						
Liabilitas segera	5.065.527	5.065.527	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	78.666.064	78.666.064	-	-	-	-
Giro <i>Wadiah</i>	670.887	670.887	-	-	-	-
Tabungan	210.234.683	210.234.683	-	-	-	-
Tabungan <i>Wadiah</i>	2.480.554	2.480.554	-	-	-	-
Tabungan <i>Mudharabah</i>	281.388	281.388	-	-	-	-
Deposito	201.585.766	125.107.421	29.369.138	28.524.375	18.584.832	-
Deposito <i>Mudharabah</i>	10.362.040	8.432.979	1.690.677	238.384	-	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	3.691.220	3.467.913	47.651	175.656	-	-
Liabilitas derivatif	1.565.102	6.212	35.706	1.523.184	-	-
Liabilitas akseptasi	3.679.684	1.227.198	1.111.872	1.340.614	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	6.023.133	-	-	-	6.023.133	-
Pinjaman yang diterima	9.084.913	1.909.483	4.065.459	2.988.377	121.594	-
Pinjaman subordinasi	2.097.024	232	-	1.998.289	98.503	-
Liabilitas lain-lain***)	758.130	594.714	100.579	57.965	4.872	-
	536.246.115	438.145.255	36.421.082	36.846.844	24.832.934	-
Perbedaan Jatuh Tempo	77.711.283	(271.864.066)	9.556.262	61.134.958	294.301.130	(15.417.001)

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Keterangan	Total	2012				
		Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	13.895.464	13.895.464	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	42.524.126	42.524.126	-	-	-	-
Giro pada bank lain	4.842.146	4.842.146	-	-	-	-
Cadangan kerugian Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(171)	-	-	-	-	(171)
Efek-efek	66.242.928	30.392.467	21.683.223	14.167.238	-	-
Cadangan kerugian	41.137.640	13.903.186	1.677.741	11.803.551	13.753.162	-
Tagihan wesel ekspor	(760)	-	-	-	-	(760)
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	5.934.772	777.846	800.732	4.356.194	-	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	4.315.616	715.616	-	-	3.600.000	-
Tagihan derivatif	9.550.521	1.184.577	7.754.568	611.376	-	-
Kredit yang diberikan	28.850	-	1.417	-	27.433	-
Mikro	115.494.852	1.114.126	2.125.242	15.374.321	96.881.163	-
Ritel	146.373.726	12.098.999	9.676.910	38.730.298	85.867.519	-
Korporasi	88.889.684	12.620.508	12.110.915	12.457.784	51.700.477	-
Cadangan kerugian Piutang dan pembiayaan Syariah	(14.677.220)	-	-	-	-	(14.677.220)
Cadangan kerugian Tagihan akseptasi	11.248.281	357.787	684.964	1.297.635	8.907.895	-
Penyertaan saham*)	(237.645)	-	-	-	-	(237.645)
Cadangan kerugian Aset lain-lain**)	4.786.121	573.963	1.955.525	2.256.633	-	-
	1.944	-	-	-	-	1.944
	(536)	-	-	-	-	(536)
	625.355	191.772	125.701	307.882	-	-
	540.975.694	135.192.583	58.596.938	101.362.912	260.737.649	(14.914.388)
Liabilitas						
Liabilitas segera	4.911.852	4.911.852	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	79.051.314	79.051.314	-	-	-	-
Giro <i>Wadiah</i>	671.800	671.800	-	-	-	-
Tabungan	182.833.586	182.833.586	-	-	-	-
Tabungan <i>Wadiah</i>	1.688.478	1.688.478	-	-	-	-
Tabungan <i>Mudharabah</i>	195.285	195.285	-	-	-	-
Deposito	177.267.237	100.685.908	24.474.150	51.795.644	311.535	-
Deposito <i>Mudharabah</i>	8.458.683	6.426.477	1.850.612	179.246	2.348	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	2.778.618	2.419.285	11.250	348.083	-	-
Liabilitas derivatif	152.193	3.403	1.525	-	147.265	-
Liabilitas akseptasi	4.786.121	573.963	1.955.525	2.256.633	-	-
Pinjaman yang diterima	10.888.755	1.692.127	3.597.440	5.477.598	121.590	-
Liabilitas lain-lain***)	627.052	471.169	81.448	68.956	5.479	-
Pinjaman subordinasi	2.116.562	232	-	21.093	2.095.237	-
	476.427.536	381.624.879	31.971.950	60.147.253	2.683.454	-
Perbedaan Jatuh Tempo	64.548.158	(246.432.296)	26.624.988	41.215.659	258.054.195	(14.914.388)

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga dan setoran jaminan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki BRI, baik posisi yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Posisi tersebut merupakan posisi yang ada dalam *trading book* dan *banking book*.

BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury* dan risiko pasar (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. Melalui aplikasi ini dapat dilakukan pengukuran risiko pasar menggunakan model internal (Value-at-risk) yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, juga melakukan *monitoring limit* risiko pasar dan *limit* transaksi antara lain *limit* nominal transaksi *dealer*, *cut loss limit*, *stop loss limit* dan *Value at Risk (VaR) limit*. *Monitoring* dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan (*trading*).

1. Value-at-Risk (VaR): Tujuan Penggunaan Metode dan Keterbatasannya

BRI menggunakan pendekatan model internal untuk mengukur potensi kerugian VaR akibat perubahan harga pasar dari portofolio *trading* berdasarkan pada data historis. Potensi kerugian VaR dari risiko pasar diukur dengan menggunakan asumsi perubahan faktor risiko mengikuti pola distribusi normal. BRI menggunakan VaR untuk menghitung risiko nilai tukar untuk posisi *trading* dan *banking book* serta menghitung risiko suku bunga untuk posisi *trading book*.

2. Asumsi Value-at-Risk (VaR)

Potensi kerugian VaR dihitung berdasarkan nilai estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan (*confidence level*) di 99% dan posisi risiko pasar yang tidak berubah dalam 1 (satu) hari (*holding period*), maksudnya adalah bahwa potensi kerugian yang dapat melebihi nilai VaR dalam kondisi pasar normal, rata-rata dapat terjadi satu kali dalam seratus hari. Metode yang digunakan dalam pengukuran VaR adalah metode Delta Gamma.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai nilai VaR dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan dari 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. BRI tidak memiliki *trading* portofolio per 31 Desember 2012.

	2013	
	Nilai Tukar*)	Suku Bunga
Rata-rata Harian	18.104,97	5.849,11
Tertinggi	30.828,99	30.322,73
Terendah	8.082,87	7,22
*) Termasuk <i>trading</i> dan <i>banking book</i> .		
	2012	
	Nilai Tukar*)	Suku Bunga
Rata-rata Harian	22.738,54	6.332,23
Tertinggi	37.003,37	26.493,55
Terendah	8.953,73	0,02
*) Termasuk <i>trading</i> dan <i>banking book</i> .		

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

3. *Back Testing*

Tujuan dilaksanakannya *back testing* yaitu untuk memastikan bahwa hasil perhitungan internal model untuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar telah sesuai. Ketika melakukan *back testing*, BRI membandingkan antara estimasi VaR harian dengan realisasi perubahan harga.

Berdasarkan prosedur *back testing* untuk risiko nilai tukar dan risiko tingkat suku bunga, hasil kerugian sebenarnya sepanjang tahun telah sesuai secara signifikan dengan VaR *forecast model*. Hasil dari *back testing* tersebut dilaporkan kepada *Risk Management Committee* (RMC) setiap triwulan.

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book*

a. Risiko Tingkat Suku Bunga

Instrumen keuangan yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak ke arus kas di masa depan.

Direksi dan manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola, serta mengendalikan tingkat suku bunga dengan menimbang *risk appetite* bank dan target pencapaian kinerja keuangan. *Review* penetapan suku bunga dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam forum *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk posisi aset dan liabilitas keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:

	2013		2012	
	Rupiah (%)	Valas (%)	Rupiah (%)	Valas (%)
Aset				
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,05	0,16	4,39	0,49
Efek-efek	7,24	4,07	6,25	3,94
Kredit yang diberikan	11,79	4,47	12,11	4,53
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	4,59	-	3,73	-
Liabilitas				
Simpanan nasabah				
Giro	2,55	0,32	2,87	0,17
Tabungan	1,26	0,22	1,40	0,19
Deposito	6,12	1,51	5,84	1,76
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain				
Pinjaman yang diterima	3,91	0,07	2,99	0,57
Pinjaman subordinasi	3,22	1,19	3,99	1,64
Pinjaman subordinasi	7,67	-	7,68	-
Surat berharga yang diterbitkan	-	2,95	-	-

Tingkat sensitivitas digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio *banking book*. Pada analisa sensitivitas di atas, asumsi perubahan suku bunga untuk portofolio *banking book* dengan basis 1%.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan dalam tingkat suku bunga untuk *banking book*, dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan, terhadap laporan laba rugi BRI.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

2013	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi Komprehensif
+/- 1%	-/+ 1.094.229
2012	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi Komprehensif
+/- 1%	-/+ 1.094.205

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit):

Keterangan	Suku bunga mengambang					Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	
Aset						
Kas	-	-	-	-	19.171.778	19.171.778
Giro pada Bank						
Indonesia	40.718.495	-	-	-	-	40.718.495
Giro pada Bank Lain	9.435.197	-	-	-	-	9.435.197
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	36.304.087	2.796	-	-	-	36.306.883
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	669.350	-	-	229.161	-	898.511
Tersedia untuk dijual	-	-	-	15.374.058	-	15.374.058
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.543.453	-	-	22.858.415	-	26.401.868
Tagihan wesel ekspor	8.926.072	-	-	-	-	8.926.072
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	199.314	-	-	-	-	199.314
Tersedia untuk dijual	712.105	-	-	-	-	712.105
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.072.475	-	-	11.367.588	-	14.440.063
Tagihan derivatif	-	-	-	-	4.981	4.981
Kredit yang diberikan						
Mikro	64.538.130	26.463.720	-	51.264.892	-	142.266.742
Ritel	25.842.213	99.237.434	-	56.774.691	-	181.854.338
Korporasi	34.406.775	75.788.611	-	-	-	110.195.386
Piutang dan pembiayaan						
Syariah	-	-	-	-	14.028.390	14.028.390
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	3.679.684	3.679.684
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.944	1.944
Aset lain-lain**)	-	-	-	-	1.160.534	1.160.534
	231.967.666	201.492.561	-	157.868.805	38.047.311	629.376.343

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

2013						
Suku bunga mengambang						
Keterangan	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	5.065.527	5.065.527
Simpanan nasabah						
Giro	78.666.064	-	-	-	-	78.666.064
Giro <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	670.887	670.887
Tabungan	210.234.683	-	-	-	-	210.234.683
Tabungan <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	2.480.554	2.480.554
Tabungan <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	281.388	281.388
Deposito	154.476.560	28.524.375	18.584.831	-	-	201.585.766
Deposito <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	10.362.040	10.362.040
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	-	-	-	3.691.220	-	3.691.220
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	1.565.102	1.565.102
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	3.679.684	3.679.684
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	6.023.133	-	6.023.133
Pinjaman yang diterima	3.807.529	5.148.861	-	28.523	100.000	9.084.913
Pinjaman subordinasi	-	-	-	2.097.024	-	2.097.024
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	758.130	758.130
	447.184.836	33.673.236	18.584.831	11.839.900	24.963.312	536.246.115
Perbedaan (gap) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	(215.217.170)	167.819.325	(18.584.831)	146.028.905	13.083.999	93.130.228

2012						
Suku bunga mengambang						
Keterangan	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset						
Kas	-	-	-	-	13.895.464	13.895.464
Giro pada Bank Indonesia	42.524.126	-	-	-	-	42.524.126
Giro pada Bank Lain	4.842.146	-	-	-	-	4.842.146
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	30.392.467	35.850.461	-	-	-	66.242.928
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	530.063	-	-	82.923	-	612.986
Tersedia untuk dijual Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	13.525.085	-	13.525.085
Tagihan wesel ekspor	3.167.984	-	-	23.831.585	-	26.999.569
	5.934.772	-	-	-	-	5.934.772

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

2012						
Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset (lanjutan)						
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah						
Tersedia untuk dijual	715.616	-	-	-	-	715.616
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	9.550.521	-	9.550.521
Tagihan derivatif	-	-	-	-	28.850	28.850
Kredit yang diberikan						
Mikro	48.866.678	21.813.902	-	44.814.272	-	115.494.852
Ritel	21.876.420	77.718.128	-	46.779.178	-	146.373.726
Korporasi	24.675.699	64.213.985	-	-	-	88.889.684
Piutang dan pembiayaan Syariah	-	-	-	-	11.248.281	11.248.281
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	4.786.121	4.786.121
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.944	1.944
Aset lain-lain**)	-	-	-	-	625.355	625.355
	187.125.971	199.596.476	-	138.583.564	30.586.015	555.892.026
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	4.911.852	4.911.852
Simpanan nasabah						
Giro	79.051.314	-	-	-	-	79.051.314
Giro <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	671.800	671.800
Tabungan	182.833.586	-	-	-	-	182.833.586
Tabungan <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	1.688.478	1.688.478
Tabungan <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	195.285	195.285
Deposito	125.160.057	51.795.645	311.535	-	-	177.267.237
Deposito <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	8.458.683	8.458.683
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	-	-	-	2.778.618	-	2.778.618
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	152.193	152.193
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	4.786.121	4.786.121
Pinjaman yang diterima	-	10.571.748	-	217.007	100.000	10.888.755
Pinjaman subordinasi	-	-	-	2.116.562	-	2.116.562
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	627.052	627.052
	387.044.957	62.367.393	311.535	5.112.187	21.591.464	476.427.536
Perbedaan (gap) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	(199.918.986)	137.229.083	(311.535)	133.471.377	8.994.551	79.464.490

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga dan setoran jaminan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya fluktuasi nilai tukar terhadap Rupiah dari posisi valuta asing yang dimiliki BRI. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN (Posisi Devisa Neto).

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, per mata uang, sebagai berikut (tidak diaudit):

Mata Uang	2013		
	Aset	Liabilitas	PDN
Laporan Posisi Keuangan			
Dolar Amerika Serikat	81.598.671	82.238.633	(639.962)
Yuan Cina	8.250.550	8.350.010	(99.460)
Euro Eropa	956.013	1.244.606	(288.593)
Dolar Australia	564.135	345.783	218.352
Dolar Singapura	428.239	132.542	295.697
Yen Jepang	290.260	46.027	244.233
Pound Sterling Inggris	159.097	144.218	14.879
Dolar Kanada	5.139	8.827	(3.688)
Lain-lain	692.383	68.465	623.918
			365.376
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif¹⁾			
Dolar Amerika Serikat	83.088.333	83.484.895	396.562
Yuan Cina	8.250.550	8.350.010	99.460
Euro Eropa	956.013	1.244.606	288.593
Dolar Australia	564.135	345.783	218.352
Dolar Singapura	428.239	132.542	295.697
Yen Jepang	290.260	46.027	244.233
Pound Sterling Inggris	159.097	144.218	14.879
Dolar Kanada	5.139	8.827	3.688
Lain-lain	692.383	68.465	623.918
			2.185.382
Modal (Catatan 47a)			69.472.036
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			0,53%
Rasio PDN (Keseluruhan)			3,15%

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, per mata uang, sebagai berikut (tidak diaudit) (lanjutan):

Mata Uang	2012		
	Aset	Liabilitas	PDN
Laporan Posisi Keuangan			
Dolar Amerika Serikat	69.353.239	69.086.218	267.021
Yuan Cina	5.326.904	5.312.508	14.396
Euro Eropa	1.797.947	1.937.302	(139.355)
Dolar Singapura	296.609	275.679	20.930
Pound Sterling Inggris	284.626	216.665	67.961
Yen Jepang	203.138	25.577	177.561
Dolar Australia	198.837	7.363	191.474
Dolar Kanada	17.463	185	17.278
Lain-lain	482.511	61.325	421.186
			1.038.452
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif *)			
Dolar Amerika Serikat	70.558.698	69.954.365	604.333
Yuan Cina	5.326.904	5.312.508	14.396
Euro Eropa	1.797.947	1.937.302	139.355
Dolar Singapura	296.609	275.679	20.930
Pound Sterling Inggris	284.626	216.665	67.961
Yen Jepang	203.138	25.577	177.561
Dolar Australia	198.837	7.363	191.474
Dolar Kanada	17.463	185	17.278
Lain-lain	482.511	61.325	421.186
			1.654.474
Modal (Catatan 47a)			55.133.677
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			1,88 %
Rasio PDN (Keseluruhan)			3,00 %

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih aset dan kewajiban beberapa mata uang asing lainnya.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

5. Analisa Sensitivitas BRI Agro

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitifitas terhadap kemungkinan perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar BRI Agro terhadap laba rugi komprehensif dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan.

	2013		2012	
	Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi Komprehensif	Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi Komprehensif
Risiko tingkat suku bunga	+/- 1%	-/+ 21.478	+/- 1%	-/+ 3.912
Risiko nilai tukar	+/- 1%	-/+ 8	+/- 1%	-/+ 41

Manajemen Risiko Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup pilar-pilar pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit*, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Penerapan Manajemen Risiko Operasional dimaksud ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, internal proses, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan, dan strategik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Setiap unit kerja operasional BRI bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko melalui sistem pengendalian intern dalam aktivitas operasional dan bisnis di masing-masing unit kerja. Hal tersebut dilakukan mulai dari tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian risiko. Direksi BRI menetapkan fungsi manajemen risiko pada setiap unit kerja mulai dari level Kantor Pusat (Divisi/ *Desk*), Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang yang mencakup bidang operasional, pemasaran dan bisnis mikro, dan Kantor Cabang Pembantu.

Manajemen risiko baik yang berada di Kantor Pusat maupun di Kantor Wilayah BRI bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional, pengembangan dan implementasi kebijakan/prosedur dan metodologi, pengawasan, pengkajian, serta pemantauan proses manajemen risiko operasional. Disamping itu juga berperan dalam penyusunan dan pemantauan profil risiko BRI, penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari suatu produk dan/atau aktivitas baru, serta mendukung unit kerja operasional/*risk owner* dalam mengembangkan budaya sadar risiko, penerapan strategi anti *fraud*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko dimaksud. Dalam rangka pembahasan pengelolaan dan perbaikan kontrol atas risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko mengkoordinasikan pelaksanaan *Operational Risk Management Committee* (ORMC) yang dilaksanakan setiap triwulanan bersama Divisi/*Desk* dan Unit Kerja terkait.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

Audit Intern selaku *third line of defense* yang meliputi Audit Kantor Pusat dan Kantor Inspektorat BRI seluruh Indonesia bertugas melakukan pemantauan dan validasi atas kecukupan pengendalian intern dalam aktivitas operasional dan bisnis di unit kerja operasional dan konsistensi atas penerapan manajemen risiko operasional di BRI secara *bankwide*.

Penerapan manajemen risiko operasional BRI difasilitasi melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa *Operational Risk Assessor* (OPRA) yang mencakup *modul Risk and Control Self Assessment* (RCSA), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI), Manajemen Insiden (MI), Forum MR, dan Maturitas. Upaya peningkatan pemahaman atas manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya sadar risiko dan sosialisasi/pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh pekerja BRI serta peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional BRI.

1. Risk Control and Self Assessment (RCSA)

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (*impact*) dan kemungkinan kejadian (*likelihood*). RCSA di BRI telah diterapkan di Divisi/*Desk* Kantor Pusat BRI, Kantor Wilayah (KanWil), Kantor Cabang Khusus (KCK), Kantor Cabang (KanCa) yang juga mewakili BRI Unit, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Sentra Layanan BRI Prioritas. Kebijakan RCSA diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.25-DIR/DMR/12/2012.

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan.

Pengkinian *risk issue* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis; perubahan ketentuan internal/eksternal; dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data Manajemen Insiden (MI)/*Loss Event Database* (LED), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI) dan Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap triwulan, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan.

Laporan hasil konsolidasi RCSA tersebut dilaporkan secara rutin kepada seluruh Direksi BRI dalam *Risk Management Committee* (RMC) yang dilaksanakan setiap triwulanan.

2. Manajemen Insiden (MI) dan Loss Event Database (LED)

Manajemen Insiden (MI) merupakan *Loss Event Database* (LED) BRI yang mencakup proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian finansial maupun non finansial yang meliputi *actual loss*, *potential loss*, dan *near misses* sejak insiden terjadi sampai dengan penyelesaian, termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan. Kebijakan MI diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.30-DIR/DMR/11/2013.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada modul MI, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian (*event type*) dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berbasis pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan *recovery* kerugian maupun proses litigasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

2. Manajemen Insiden (MI) dan *Loss Event Database* (LED) (lanjutan)

Data kerugian operasional BRI yang didokumentasikan mulai dari tahun 2007 yang disusun secara konsisten dan sistematis dalam bentuk matriks *database* kerugian yang diklasifikasikan berdasarkan delapan lini bisnis dan tujuh *event type*/kategori kejadian dan dilihat dari dimensi frekuensi kejadian dan *severity/loss*.

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) yang mulai diterapkan sejak 2010 sesuai dengan ketentuan regulator. Namun demikian, BRI telah melakukan persiapan penerapan *The Standardised Approach* (TSA) dan *Advanced Measurement Approach* (AMA). LED BRI juga telah digunakan dalam simulasi perhitungan beban modal risiko operasional dengan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA), baik dengan menggunakan *Extreme Value Theory* (EVT) maupun *Loss Distribution Approach* (LDA). Dalam rangka menuju perhitungan beban modal risiko operasional yang lebih *advanced*, BRI telah menyusun *gap analysis* terkait penerapan TSA dan AMA.

3. Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator (KRI)

IRU/KRI adalah alat untuk mendeteksi peningkatan dan atau penurunan risiko/tren risiko baik yang bersifat *leading* terhadap kejadian kerugian yang belum terjadi maupun yang bersifat historis. Prediksi tren risiko dimaksud ditujukan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait risiko operasional yang muncul sebelum kerugian finansial atau non finansial terjadi. Kebijakan IRU/KRI diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.24-DIR/DMR/08/2007.

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau *limit* risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (*threshold*) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan *risk appetite* BRI. Penentuan *threshold* melibatkan Audit Internal, *Risk Owner*, dan Unit Kerja terkait lainnya. Indikator Risiko Utama BRI antara lain tercermin dalam Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko KanWil yang dimonitor secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan.

4. Forum Manajemen Risiko (Forum MR)

Forum Manajemen Risiko (Forum MR) adalah wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja operasional dengan pejabat setingkat dibawahnya, pekerja atau jajarannya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional yang menjadi kendala dalam rangka mencapai target bisnis atau kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di masing-masing unit kerja BRI diharapkan menjadi salah satu pendukung dan pendorong untuk menumbuhkembangkan budaya sadar risiko di BRI. Kebijakan Forum MR diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.25-DIR/DMR/08/2007.

5. Maturitas

Maturitas merupakan proses *self assessment* terhadap tingkat kemapanan penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja BRI yang dilakukan setiap akhir tahun oleh masing-masing pimpinan unit kerja BRI terhadap parameter-parameter tertentu. Dengan melakukan penilaian maturitas diharapkan masing-masing unit kerja dapat mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan sehingga lebih baik ke depan. Kebijakan Maturitas diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.12-DIR/DMR/04/2009.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

6. Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)

Potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha BRI, dimana BRI memiliki unit kerja operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Direksi BRI memandang perlu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU) guna melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan unit kerja operasional BRI (Rencana Penanggulangan Bencana), serta mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan / bencana (Rencana Kelangsungan Usaha). Kebijakan MKU diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.02-DIR/DMR/01/2009.

Implementasi MKU BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Pelaksanaan uji coba MKU dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana termasuk di dalamnya 3 Gedung Kantor Pusat yaitu Gedung BRI 1, Gedung IT dan Gedung Pusdiklat serta Asrama Siswa di Raganan.

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa unit kerja BRI, dimana di Tahun 2013 terjadi bencana seperti gempa di Aceh, banjir di Ambon, banjir di Jakarta, dan Kendari. Ketersediaan mobil E-Buzz dan Teras BRI Keliling yang tersebar di seluruh wilayah kerja BRI dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai *alternate site* pada saat terjadi bencana sehingga unit kerja dapat beroperasi sesegera mungkin pasca terjadi bencana. Ketersediaan fasilitas dimaksud sangat mendukung kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting di BRI pasca terjadi bencana.

7. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB)

Dalam rangka penerbitan setiap produk dan/atau aktivitas baru (PAB) di BRI, dilakukan proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PAB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko PAB dimaksud. Divisi Manajemen Risiko BRI bertugas melakukan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB dan merekomendasikan hasil penilaian dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI. Kebijakan PAB diatur melalui Surat Edaran BRI No. 03-DIR/DMR/08/2013.

8. Penerapan Strategi Anti Fraud BRI

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur pengendalian internal BRI, dimana perhatian khusus diberikan terhadap penyelesaian kasus-kasus *fraud* yang terjadi untuk menunjukkan intoleransi manajemen BRI terhadap *fraud* (zero fraud tolerance). Penetapan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko dalam rangka pencegahan dan pengelolaan kejadian *fraud* di BRI mencakup 4 (empat) pilar, yaitu pilar pencegahan, pilar deteksi, pilar investigasi, pelaporan dan sanksi, dan pilar evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut. Komitmen Anti *Fraud* ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh pekerja BRI sebagai bentuk peningkatan *employee awareness* dan pencegahan *fraud*. Kebijakan Strategi Anti *Fraud* diatur melalui Surat Keputusan BRI No. S.106-DIR/DMR/05/2012.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

39. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

	2013		2012	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
ASET				
Kas	19.171.778	19.171.778	13.895.464	13.895.464
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495	40.718.495	42.524.126	42.524.126
Giro pada bank lain	9.435.120	9.435.120	4.841.975	4.841.975
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	36.306.883	36.306.883	66.242.928	66.242.928
Efek-efek				
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	898.511	898.511	612.986	612.986
Tersedia untuk dijual	15.374.058	15.374.058	13.525.085	13.525.085
Dimiliki hingga jatuh tempo	26.401.096	26.656.632	26.998.809	27.596.819
Tagihan wesel ekspor	8.926.072	8.926.072	5.934.772	5.934.772
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah				
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	199.314	199.314	-	-
Tersedia untuk dijual	712.105	712.105	715.616	715.616
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	3.567.687	3.600.000	3.576.735
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14.440.063	14.440.063	9.550.521	9.550.521
Tagihan derivatif	4.981	4.981	28.850	28.850
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	432.926.760	432.926.760	347.091.678	347.091.678
Tagihan akseptasi	3.679.684	3.679.684	4.786.121	4.786.121
Penyertaan saham *)	1.944	1.944	1.408	1.408
Aset lain-lain **)	1.160.534	1.160.534	625.355	625.355
	613.957.398	614.180.621	540.975.694	541.550.439
LIABILITAS				
Liabilitas segera	5.065.527	5.065.527	4.911.852	4.911.852
Simpanan nasabah ****)				
Giro	79.336.951	79.336.951	79.723.114	79.723.114
Tabungan	212.996.625	212.996.625	184.717.349	184.717.349
Deposito berjangka	211.947.806	211.947.806	185.725.920	185.725.920
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya				
Giro	147.150	147.150	111.059	111.059
Tabungan	4.534	4.534	3.983	3.983
Deposito berjangka dan <i>on call</i>	1.310.993	1.310.993	1.349.493	1.349.493
<i>Inter-bank call money</i>	2.228.543	2.228.543	1.314.083	1.314.083
Liabilitas derivatif	1.565.102	1.565.102	152.193	152.193
Liabilitas akseptasi	3.679.684	3.679.684	4.786.121	4.786.121
Surat berharga yang diterbitkan	6.023.133	6.023.133	-	-
Pinjaman yang diterima	9.084.913	9.084.913	10.888.755	10.888.755
Liabilitas lain-lain ***)	758.130	758.130	627.052	627.052
Pinjaman subordinasi	2.097.024	2.097.024	2.116.562	2.116.562
	536.246.115	536.246.115	476.427.536	476.427.536

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga dan setoran jaminan.

*****) Termasuk simpanan nasabah dengan prinsip syariah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut:

- a) Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, tagihan dan liabilitas derivatif, serta pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

- b) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Nilai wajar untuk efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

- c) Kredit yang diberikan

Portofolio kredit BRI secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh BRI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- d) Tagihan dan liabilitas derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

- e) Pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman subordinasi

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh tempo.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan BRI untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- a. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
- b. Tingkat 2: yang melibatkan input selain dari harga pasar aktif yang dikutip yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (turunan dari harga);
- c. Tingkat 3: input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

	2013		
	Nilai Tercatat	Tingkat 1	Tingkat 2
Aset Keuangan			
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			
Reksadana	10.702	10.702	-
Sertifikat Bank Indonesia	87.424	87.424	-
<i>Credit Linked Notes</i>	669.350	-	669.350
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	199.314	199.314	-
Obligasi Pemerintah	131.035	131.035	-
	<u>1.097.825</u>	<u>428.475</u>	<u>669.350</u>
Tersedia untuk dijual			
Sertifikat Bank Indonesia	2.853.028	2.853.028	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	1.342.650	1.342.650	-
Reksadana	327.762	327.762	-
Obligasi	686.598	686.598	-
<i>U.S Treasury Bonds</i>	327.310	327.310	-
Obligasi Pemerintah	9.836.710	9.836.710	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	712.105	712.105	-
	<u>16.086.163</u>	<u>16.086.163</u>	<u>-</u>
	<u>17.183.988</u>	<u>16.514.638</u>	<u>669.350</u>
	2012		
	Nilai Tercatat	Tingkat 1	Tingkat 2
Aset Keuangan			
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			
Reksadana	10.998	10.998	-
<i>Credit Linked Notes</i>	530.063	-	530.063
Obligasi Pemerintah	71.925	71.925	-
	<u>612.986</u>	<u>82.923</u>	<u>530.063</u>
Tersedia untuk dijual			
Sertifikat Bank Indonesia	4.043.563	4.043.563	-
Obligasi	362.648	362.648	-
<i>Medium Term Notes</i>	48.470	48.470	-
Obligasi Pemerintah	8.680.896	8.680.896	-
<i>U.S Treasury Bonds</i>	389.508	389.508	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	715.616	715.616	-
	<u>14.240.701</u>	<u>14.240.701</u>	<u>-</u>
	<u>14.853.687</u>	<u>14.323.624</u>	<u>530.063</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI SEGMENT

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan Entitas Anak:

a. Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan Konvensional
PT Bank BRISyariah	Perbankan Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Perbankan Konvensional
BRI Remittance Co. Limited Hong Kong	Jasa Keuangan

b. Segmen Operasi

Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan kedalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

- Segmen Mikro
- Segmen Retail
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya
- Entitas Anak

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan Entitas Anak berdasarkan segmen operasi:

Keterangan	2013					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga neto	21.455.414	16.496.904	3.598.795	1.354.791	1.200.367	44.106.271
Pendapatan operasi lainnya	2.509.400	4.267.299	266.802	1.113.137	191.821	8.348.459
Total pendapatan	23.964.814	20.764.203	3.865.597	2.467.928	1.392.188	52.454.730
Beban operasional	(8.852.630)	(9.176.086)	(1.781.821)	(1.462.965)	(1.107.276)	(22.380.778)
Beban CKPN	(2.629.684)	(995.278)	(291.520)	-	(29.893)	(3.946.375)
Total beban Pendapatan	(11.482.314)	(10.171.364)	(2.073.341)	(1.462.965)	(1.137.169)	(26.327.153)
Pendapatan lainnya-neto	664.188	701.567	211.141	199.324	6.269	1.782.489
Laba sebelum pajak penghasilan	13.146.688	11.294.406	2.003.397	1.204.287	261.288	27.910.066
Beban pajak	(3.084.992)	(2.650.356)	(470.146)	(282.232)	(68.010)	(6.555.736)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(10.200)	-	(10.200)
Laba tahun berjalan	10.061.696	8.644.050	1.533.251	911.855	193.278	21.344.130
Aset segmen						
Kredit	142.266.742	178.155.745	110.195.386	-	17.726.983	448.344.856
CKPN	(8.985.643)	(2.801.046)	(3.285.710)	-	(345.697)	(15.418.096)
Non kredit	-	-	-	185.949.421	5.118.239	191.067.660
Total	133.281.099	175.354.699	106.909.676	185.949.421	22.499.525	623.994.420
Liabilitas segmen						
Pendanaan	146.150.785	167.812.080	172.403.394	-	17.915.123	504.281.382
Non pendanaan	-	-	-	40.492.762	2.081.360	42.574.122
Total	146.150.785	167.812.080	172.403.394	40.492.762	19.996.483	546.855.504

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

40. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

b. Segmen Operasi (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan Entitas Anak berdasarkan segmen operasi (lanjutan):

Keterangan	2012					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga neto	16.245.047	14.583.543	3.156.294	1.476.258	1.022.624	36.483.766
Pendapatan operasi lainnya	2.882.661	4.034.082	418.621	861.837	192.531	8.389.732
Total pendapatan	19.127.708	18.617.625	3.574.915	2.338.095	1.215.155	44.873.498
Beban operasional	(6.811.859)	(8.090.789)	(1.908.908)	(1.790.492)	(888.984)	(19.491.032)
Beban CKPN	(1.841.805)	(749.039)	36.213	522	(145.819)	(2.699.928)
Total beban	(8.653.664)	(8.839.828)	(1.872.695)	(1.789.970)	(1.034.803)	(22.190.960)
Pendapatan lainnya-neto	680.448	383.474	9.146	95.632	8.334	1.177.034
Laba sebelum pajak penghasilan	11.154.492	10.161.271	1.711.366	643.757	188.686	23.859.572
Beban pajak	(2.414.984)	(2.199.948)	(370.516)	(132.436)	(54.308)	(5.172.192)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(6.496)	-	(6.496)
Laba tahun berjalan	8.739.508	7.961.323	1.340.850	504.825	134.378	18.680.884
Aset segmen						
Kredit	115.158.007	145.332.428	87.736.754	-	13.779.354	362.006.543
CKPN	(7.873.344)	(3.039.110)	(3.671.471)	-	(330.940)	(14.914.865)
Non kredit	-	-	-	197.568.562	4.651.639	202.220.201
Total	107.284.663	142.293.318	84.065.283	197.568.562	18.100.053	549.311.879
Liabilitas segmen						
Pendanaan	126.593.606	226.985.513	82.518.728	-	14.068.536	450.166.383
Non pendanaan	-	-	-	33.666.602	2.622.026	36.288.628
Total	126.593.606	226.985.513	82.518.728	33.666.602	16.690.562	486.455.011

c. Segmen Geografi

Keterangan	Pendapatan bunga neto, operasional, dan investasi	
	2013	2012
Indonesia	52.175.937	44.703.235
Amerika Serikat	275.263	168.286
Hong Kong	3.530	1.977
Total	52.454.730	44.873.498

Keterangan	Laba sebelum beban pajak	
	2013	2012
Indonesia	27.756.857	23.743.590
Amerika Serikat	152.638	115.621
Hong Kong	571	361
Total	27.910.066	23.859.572

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

c. Segmen Geografi (lanjutan)

Keterangan	Total aset	
	2013	2012
Indonesia	609.388.109	536.235.345
Amerika Serikat	14.602.187	13.073.719
Hong Kong	4.124	2.815
	623.994.420	549.311.879

Keterangan	Total liabilitas	
	2013	2012
Indonesia	532.440.777	473.593.925
Amerika Serikat	14.414.277	12.860.852
Hong Kong	450	234
	546.855.504	486.455.011

41. PROGRAM BAGI PEKERJA

a. Program Pensiun Imbalan Pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2007, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program ini dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun BRI dikelola oleh Dana Pensiun BRI (DPBRI). Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI, kontribusi pekerja BRI untuk iuran pensiun adalah sebesar 7% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBRI merupakan kontribusi BRI, dimana kontribusi BRI sejak tanggal 1 Mei 2013 adalah sebesar 24,96% (sebelumnya 22,58%).

Penilaian aktuaria atas beban pensiun BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014 dan 4 Januari 2013, telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2013	2012
Tingkat diskonto	8,7%	5,67%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	7,5	7,5
Tingkat kenaikan imbalan pensiun	4,0	4,0
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958	10,0% dari CSO 1958
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan dan deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset, investasi jangka panjang dalam bentuk saham dan properti.

Status dana pensiun sesuai penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	2013	2012	2011	2010	2009
Nilai wajar aset	11.254.714	11.021.236	9.370.652	8.785.181	7.578.545
Nilai kini kewajiban pensiun manfaat pasti	(11.022.194)	(14.359.520)	(11.345.025)	(8.400.544)	(6.821.484)
Status pendanaan program pensiun (Keuntungan) kerugian aktuarial yang belum diakui	232.520 (787.415)	(3.338.284) 2.689.837	(1.974.373) 1.345.298	384.637 (732.773)	757.061 (887.840)
Biaya jasa lalu yang belum diakui (non-vested)	162.025	75.157	82.363	89.569	-
Kewajiban pensiun imbalan pasti	(392.870)	(573.290)	(546.712)	(258.567)	(130.779)

Mutasi atas nilai kini kewajiban manfaat pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal periode	14.359.520	11.345.026
Beban bunga	814.185	737.427
Biaya jasa kini	234.443	389.239
Biaya jasa lalu yang diakui – Non Vested	97.659	-
Biaya jasa lalu yang diakui – Vested	179.298	569.480
Pembayaran imbalan kerja (benefit paid) (Keuntungan) kerugian aktuarial	(703.866) (3.959.045)	(575.214) 1.893.562
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti akhir periode	11.022.194	14.359.520

Mutasi atas nilai wajar aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Nilai wajar Aset Program awal periode	11.021.236	9.370.652
Imbal hasil ekspektasian dari aset program	1.234.378	1.125.415
Pembayaran luran-iuran (Contributions)	295.234	533.896
Pembayaran Imbalan kerja (Benefit paid)	(703.866)	(575.214)
Kerugian (keuntungan) Aktuarial pada Aset Program	(592.268)	566.487
Aset Program akhir periode	11.254.714	11.021.236

Mutasi atas kewajiban pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Saldo awal	573.290	546.712
Beban pensiun imbalan pasti - neto (Catatan 34) luran pemberi kerja (kontribusi BRI)	46.791 (227.211)	497.852 (471.274)
Saldo akhir (Catatan 27)	392.870	573.290

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Beban pensiun imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Biaya jasa kini	234.443	389.239
Iuran peserta program	(68.023)	(62.621)
Beban bunga	814.185	737.427
Tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program (Keuntungan) kerugian neto aktuarial yang diakui	(1.234.378)	(1.125.415)
Pengakuan lebih awal atas biaya jasa lalu (non-vested)	110.474	(17.464)
Pengakuan lebih awal atas biaya jasa lalu (vested)	10.792	7.206
	179.298	569.480
Beban pensiun imbalan pasti (Catatan 34)	46.791	497.852

b. Program Tunjangan Hari Tua

Karyawan BRI juga memperoleh manfaat dari pemberian Tunjangan Hari Tua (THT) sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI. Program THT dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI.

Iuran THT terdiri dari iuran beban pekerja dan iuran beban BRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI.

Berdasarkan perhitungan penilaian aktuarial atas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014 dan 4 Januari 2013, telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2013	2012
Tingkat diskonto	9,0%	5,8%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,5	7,5
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958	10,0% dari CSO 1958

Status THT sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Nilai wajar aset	2.635.837	3.031.998
Nilai kini kewajiban THT	(902.821)	(986.681)
Status pendanaan	1.733.016	2.045.317

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua (lanjutan)

Perhitungan beban THT untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 sesuai dengan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Biaya jasa kini	16.002	31.910
Beban bunga	57.228	58.490
Tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program	(303.806)	(228.582)
Kerugian aktuarial yang diakui	297.193	194.907
Beban THT	<u>66.617</u>	<u>56.725</u>

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, BRI tidak mengakui adanya THT dibayar dimuka dan manfaat THT karena manajemen BRI tidak memiliki keuntungan (benefit) atas aset tersebut dan BRI juga tidak memiliki rencana untuk mengurangi kontribusinya di masa depan.

c. Program Pensiun Iuran Pasti

Karyawan BRI juga diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti sesuai dengan Keputusan Direksi BRI yang berlaku efektif sejak bulan Oktober 2000. Kontribusi BRI pada program ini yang dilaporkan dalam laba rugi konsolidasian tahun berjalan adalah sebesar Rp124.322 dan Rp104.385 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 34). Pengelolaan program pensiun iuran pasti dilakukan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI.

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

(i) BRI (Entitas Induk)

Perhitungan PHK menggunakan asumsi-asumsi penilaian aktuarial atas kewajiban BRI berkaitan dengan cadangan penyisihan untuk penetapan uang pesangon, uang penghargaan tanda jasa dan ganti kerugian disusun berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, untuk tahun buku masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014 dan 4 Januari 2013 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Tingkat diskonto	9,0%	5,8%
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	7,5	7,5
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958	10,0% dari CSO 1958

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(i) BRI (Entitas Induk) (lanjutan)

Status dari program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nilai kini kewajiban pemutusan hubungan kerja	(831.234)	(833.035)
Kerugian aktuarial yang belum diakui	68.376	192.270
Kewajiban PHK	<u>(762.858)</u>	<u>(640.765)</u>

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Saldo awal	640.765	533.471
Beban pemutusan hubungan kerja - neto (Catatan 34)	160.472	138.314
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(38.379)	(31.020)
Saldo akhir (Catatan 27)	<u>762.858</u>	<u>640.765</u>

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 sesuai dengan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Biaya jasa kini	78.949	85.832
Beban bunga	74.974	52.482
Kerugian aktuarial yang diakui	6.549	-
Beban PHK (Catatan 34)	<u>160.472</u>	<u>138.314</u>

(ii) BRISyariah (Entitas Anak)

Entitas Anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Tabel berikut menyajikan ringkasan komponen beban pemutusan hubungan kerja yang dicatat di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk kewajiban pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, sesuai perhitungan PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2014 dan 4 Januari 2013, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Tingkat diskonto	9,0%	6,0%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,0	5,0
Tingkat kematian	TMI-III 2011	TMI-III 2011

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(ii) BRISyariah (Entitas Anak) (lanjutan)

Status dari program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Nilai kini kewajiban pemutusan hubungan kerja	(28.080)	(27.423)
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	(11.622)	(2.501)
Kewajiban PHK	(39.702)	(29.924)

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Saldo awal	29.924	18.628
Beban pemutusan hubungan kerja - neto (Catatan 34)	9.895	11.300
Pembayaran manfaat aktual	(117)	(4)
Saldo akhir (Catatan 27)	39.702	29.924

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Biaya jasa kini	7.427	10.428
Beban bunga	2.468	937
Amortisasi akumulasi keuntungan aktuarial	-	(65)
Beban PHK (Catatan 34)	9.895	11.300

(iii) BRI Agro (Entitas Anak)

Entitas Anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(iii) BRI Agro (Entitas Anak) (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan ringkasan komponen beban pemutusan hubungan kerja yang dicatat di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk kewajiban pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, sesuai perhitungan PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014 dan 11 Januari 2013, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Tingkat diskonto	8,8%	6,0%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,0	8,0
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat	10% TMI 2011	10% TMI 2011

Status dari program pemutusan hubungan kerja pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nilai kini kewajiban pemutusan hubungan kerja	(19.431)	(25.738)
Kerugian aktuarial yang belum diakui	611	6.070
Biaya jasa lalu yang belum diakui	5.499	5.919
Kewajiban PHK	<u>(13.321)</u>	<u>(13.749)</u>

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Saldo awal	13.749	12.715
Beban yang diakui pada tahun berjalan (Catatan 34)	4.133	5.636
Pembayaran manfaat	(4.561)	(4.602)
Saldo akhir (Catatan 27)	<u>13.321</u>	<u>13.749</u>

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Biaya jasa kini	1.935	2.628
Beban bunga	1.544	1.956
Kerugian aktuarial yang belum diakui	234	632
Amortisasi biaya jasa lalu	420	420
Beban PHK (Catatan 34)	<u>4.133</u>	<u>5.636</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pekerja BRI juga memiliki imbalan kerja jangka panjang, seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar dan Masa Persiapan Pensiun (MPP).

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa

Perhitungan aktuarial atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014 dan 4 Januari 2013 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Tingkat diskonto	9,0%	5,8%
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	7,5	7,5
Tingkat kenaikan harga emas	10,0	10,0
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958	10,0% dari CSO 1958

Nilai kini kewajiban atas penghargaan tanda jasa berdasarkan perhitungan aktuarial adalah masing-masing sebesar Rp752.338 dan Rp825.709 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Mutasi untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Saldo awal kewajiban	825.709	670.744
Beban penghargaan tanda jasa - neto (Catatan 34)	2.342	192.577
Pembayaran manfaat oleh BRI	(75.713)	(37.612)
Kewajiban penghargaan tanda jasa (Catatan 27)	<u>752.338</u>	<u>825.709</u>

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Biaya jasa kini	51.643	56.886
Beban bunga	47.891	43.598
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui	(97.192)	92.093
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 34)	<u>2.342</u>	<u>192.577</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar

i. BRI (Entitas Induk)

Perhitungan aktuarial atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014 dan 4 Januari 2013 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Tingkat diskonto	9,0%	5,8%
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	7,5	7,5
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958	10,0% dari CSO 1958

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar berdasarkan perhitungan aktuarial adalah masing-masing sebesar Rp821.951 dan Rp887.617 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Saldo awal kewajiban	887.617	750.623
Beban cuti besar - neto (Catatan 34)	48.504	217.635
Pembayaran manfaat oleh BRI	(114.170)	(80.641)
Kewajiban cuti besar (Catatan 27)	<u>821.951</u>	<u>887.617</u>

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Biaya jasa kini	93.578	88.398
Beban bunga	51.482	48.790
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui	(96.556)	80.447
Beban cuti besar (Catatan 34)	<u>48.504</u>	<u>217.635</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

ii. BRISyariah (Entitas Anak)

Entitas Anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas cuti besar Entitas Anak dicatat di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang dilakukan oleh PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2014 dan 4 Januari 2013, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Tingkat diskonto	9,0%	6,0%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,0	5,0
Tingkat kematian	TMI-III 2011	TMI-III 2011
Usia pensiun	56 tahun	56 tahun

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar Entitas Anak berdasarkan perhitungan aktuaria adalah masing-masing sebesar Rp19.650 dan Rp13.153 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Saldo awal	13.153	6.915
Beban cuti besar - neto (Catatan 34)	6.497	6.238
Saldo akhir (Catatan 27)	<u>19.650</u>	<u>13.153</u>

Beban cuti besar Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Biaya jasa kini	5.669	5.701
Beban bunga	828	537
Beban cuti besar (Catatan 34)	<u>6.497</u>	<u>6.238</u>

iii. BRI Agro (Entitas Anak)

Entitas Anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

iii. BRI Agro (Entitas Anak) (lanjutan)

Perhitungan aktuarial atas cuti besar Entitas Anak dicatat di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014 dan 11 Januari 2013, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Tingkat diskonto	8,4%	6,8%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,0	8,0
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar Entitas Anak berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebesar Rp2.708 dan Rp2.676 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Saldo awal kewajiban	2.676	3.224
Beban yang diakui pada tahun berjalan (Catatan 34)	533	344
Pembayaran manfaat	(501)	(892)
Kewajiban cuti besar (Catatan 27)	<u>2.708</u>	<u>2.676</u>

Beban cuti besar Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Biaya jasa kini	881	948
Beban bunga	181	226
Keuntungan aktuarial yang diakui	(529)	(830)
Beban cuti besar (Catatan 34)	<u>533</u>	<u>344</u>

(iii) Masa persiapan pensiun

i. BRI (Entitas Induk)

Perhitungan aktuarial atas masa persiapan pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014 dan 4 Januari 2013 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2012</u>
Tingkat diskonto	6,0%
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	7,5

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Masa persiapan pensiun (lanjutan)

i. BRI (Entitas Induk) (lanjutan)

	2012
Tingkat kematian	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas masa persiapan pensiun berdasarkan perhitungan aktuarial adalah masing-masing sebesar RpNihil dan Rp58.030, pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Mutasi untuk cadangan atas masa persiapan pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Saldo awal kewajiban	58.030	1.140.913
(Pendapatan) beban masa persiapan pensiun (Catatan 34)	29.770	(985.007)
Pembayaran manfaat oleh BRI	(87.800)	(97.876)
Kewajiban masa persiapan pensiun (Catatan 27)	-	58.030

Beban masa persiapan pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Biaya jasa kini	-	135.628
Beban bunga	3.482	74.159
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui	26.288	(1.194.794)
(Pendapatan) beban masa persiapan pensiun (Catatan 34)	29.770	(985.007)

Berdasarkan Surat Keputusan No. S.248-DIR/KPS/12/2012 tanggal 21 Desember 2012, Direksi BRI memutuskan bahwa pekerja wajib tetap aktif bekerja sampai usia pensiun normal 56 (lima puluh enam) tahun tanpa menjalani masa persiapan pensiun terhitung mulai 1 Januari 2013. Untuk pekerja yang memasuki usia 55 (lima puluh lima) tahun di tahun 2013 dapat memilih opsi untuk tetap menjalani masa persiapan pensiun atau tetap aktif bekerja sampai usia 56 tahun. Pembalikan cadangan masa persiapan pensiun atas berlakunya Surat Keputusan tersebut dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Masa persiapan pensiun (lanjutan)

ii. BRI Agro (Entitas Anak)

Efektif pada tanggal 12 Maret 2012 BRI Agro juga memberikan program masa persiapan pensiun kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuarial atas masa persiapan pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 3 Januari 2014 dan 11 Januari 2013 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Tingkat diskonto	8,8%	6,0%
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	8,0	8,0
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10% TMI 2011	10% TMI 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas masa persiapan pensiun berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebesar Rp4.431 dan Rp1.981 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Mutasi untuk cadangan atas masa persiapan pensiun pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Saldo awal kewajiban	1.981	-
Beban masa persiapan pensiun - neto (Catatan 34)	2.450	2.152
Pembayaran manfaat	-	(171)
Kewajiban masa persiapan pensiun (Catatan 27)	<u>4.431</u>	<u>1.981</u>

Beban masa persiapan pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Biaya jasa kini	694	955
Beban bunga	559	-
Pengakuan rugi aktuarial	1.197	1.197
Beban masa persiapan pensiun (Catatan 34)	<u>2.450</u>	<u>2.152</u>

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

42. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	2013	2012
Komitmen		
Tagihan komitmen		
Pembelian spot dan mata uang asing	1.180.490	896.288
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	79.707.332	75.649.401
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26c)	18.626.470	12.231.900
Penjualan spot dan mata uang asing	937.090	558.975
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	72.679	97.225
	<u>99.343.571</u>	<u>88.537.501</u>
Komitmen - neto	<u>(98.163.081)</u>	<u>(87.641.213)</u>
Kontinjensi		
Tagihan kontinjensi		
Tagihan bunga dalam penyelesaian	58.203	221.217
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26c) dalam bentuk:		
Standby L/C	6.656.160	6.158.676
Garansi bank	9.236.021	6.103.142
Lain-lain	45.322	-
	<u>15.937.503</u>	<u>12.261.818</u>
Kontinjensi - neto	<u>(15.879.300)</u>	<u>(12.040.601)</u>

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah
Perum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Perum DAMRI	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah
Perum Pegadaian	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Bukopin Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada Bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada Bank lain, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada Bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya
PT Barata Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Garansi yang diterbitkan
PT Bringin Gigantara	Hubungan kepemilikan melalui Dana Pensiun BRI	Piutang dan pembiayaan Syariah, Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT BNI Asset Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bringin Karya Sejahtera	Hubungan kepemilikan melalui Dana Pensiun BRI	Piutang dan pembiayaan Syariah

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT BTMU-BRI Finance	Hubungan kepemilikan	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Penyertaan saham
PT Dayamitra Telekomunikasi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Indonesia Asahan Aluminium	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Indonesia Power	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Inti (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT KHI Pipe Industries	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Len Industri (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

<u>Pihak-pihak berelasi</u>	<u>Jenis hubungan</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi</u>
PT Pertamina Patra Niaga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pertani (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT PP Dirganeka	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Pupuk Kalimantan Timur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Tagihan wesel ekspor
PT Rekayasa Industri (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Pinjaman yang diterima
PT Taspen (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Bangunan dan Gedung	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
Karyawan kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Piutang dan pembiayaan Syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	2013	2012
Aset		
Giro pada Bank lain (Catatan 6)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	101.577	8.475
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.861	1.820
PT Bank Bukopin Tbk	10	10
	<u>110.448</u>	<u>10.305</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	537.173	285.405
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	400.000	-
PT Bank Bukopin Tbk	210.000	150.000
PT BTMU-BRI Finance	130.000	285.000
	<u>1.277.173</u>	<u>720.405</u>
Efek-efek (Catatan 8)		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	22.217.614	17.833.966
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	304.360	174.000
Perum Pegadaian	283.740	257.832
PT BNI Asset Management	252.749	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	141.918	106.716
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	106.721	18.549
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	99.977	111.497
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	95.964	90.180
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	95.000	95.000
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	25.000	50.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	25.000	25.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	18.824	40.000
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	-	50.000
Lain-lain	60.695	56.000
	<u>23.727.562</u>	<u>18.908.740</u>
Tagihan Wesel Ekspor (Catatan 9)		
PT PP Dirganeka	165.060	-
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	32.307	-
PT Pupuk Kalimantan Timur	5.663	14.281
PT Barata Indonesia (Persero)	4.604	-
	<u>207.634</u>	<u>14.281</u>
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah (Catatan 10)		
Pemerintah Republik Indonesia	4.511.419	4.315.616
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 11)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.008.810	-
PT Bank Bukopin Tbk	101.016	-
	<u>1.109.826</u>	<u>-</u>
Kredit yang diberikan (Catatan 13)		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	10.288.290	8.211.065
Perum BULOG	9.355.324	3.570.265
PT Pertamina (Persero)	8.603.110	10.348.229

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	2013	2012
Aset (lanjutan)		
Kredit yang diberikan (Catatan 13) (lanjutan)		
PT Taspen (Persero)	5.100.000	4.500.000
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	3.778.698	1.711.741
Perum Pegadaian	3.602.519	4.769.429
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.709.044	714.538
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.250.000	3.625.000
PT Pupuk Kalimantan Timur	1.836.399	892.162
PT Dayamitra Telekomunikasi	1.610.438	1.000.000
Karyawan kunci	54.084	55.823
Lain-lain	19.269.961	17.868.775
	<u>68.457.867</u>	<u>57.267.027</u>
Piutang dan Pembiayaan Syariah (Catatan 14)		
Perum DAMRI	50.858	75.994
PT Bringin Gigantara	8.763	17.621
PT Bringin Karya Sejahtera	3.711	9.237
Karyawan kunci	14.208	15.670
	<u>77.540</u>	<u>118.522</u>
Tagihan Akseptasi (Catatan 15)		
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	592.260	287.699
PT Inti (Persero)	232.075	23.499
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	187.418	-
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	140.031	-
PT Pindad (Persero)	137.639	95.497
PT Pertani (Persero)	54.837	17.702
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	53.979	-
PT Len Industri (Persero)	19.320	-
PT Rekayasa Industri (Persero)	9.967	-
PT Bringin Gigantara	8.082	-
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	153	-
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	-	231.467
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	-	29.699
PT Wijaya Karya Bangunan dan Gedung	-	349
	<u>1.435.761</u>	<u>685.912</u>
Penyertaan saham (Catatan 16)		
PT BTMU-BRI Finance	220.907	195.334
Total aset dari pihak-pihak berelasi	101.136.137	82.236.142
Total aset konsolidasian	626.182.926	551.336.790
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	16,15%	14,92%

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	2013	2012
Liabilitas		
Giro (Catatan 20)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	21.391.485	18.202.762
Karyawan kunci	1.332	4.774
Lain-lain	51.067	21.221
	<u>21.443.884</u>	<u>18.228.757</u>
Tabungan (Catatan 21)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	73.286	207.368
Karyawan kunci	99.662	111.277
Lain-lain	13.259	73
	<u>186.207</u>	<u>318.718</u>
Deposito berjangka (Catatan 22)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	57.426.013	43.169.843
Karyawan kunci	238.668	136.273
Lain-lain	1.011.875	404.541
	<u>58.676.556</u>	<u>43.710.657</u>
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 23)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	410.282	655.574
Liabilitas Akseptasi (Catatan 15)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	1.435.761	685.912
Pinjaman yang diterima (Catatan 25)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	100.000	276.221
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci (Catatan 41)		
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti	229.549	309.734
Nilai kini kewajiban tunjangan hari tua	40.227	45.082
Nilai kini kewajiban pemutusan hubungan kerja	52.133	72.625
Nilai kini kewajiban penghargaan tanda jasa	29.782	30.931
Nilai kini kewajiban cuti besar	32.410	33.689
Nilai kini kewajiban masa persiapan pensiun	1.134	2.686
	<u>385.235</u>	<u>494.747</u>
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	82.637.925	64.370.586
Total liabilitas konsolidasian	546.855.504	486.455.011
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	15,11%	13,23%

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	2013	2012
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26c)		
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.349.021	224.692
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.109.338	567.473
PT Pertamina (Persero)	1.071.133	851.530
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	651.429	1.972.063
PT Rekayasa Industri (Persero)	607.567	-
PT Indonesia Power	500.737	235.815
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	395.436	156.799
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	330.598	677.496
PT Barata Indonesia (Persero)	205.173	30.739
PT Pindad (Persero)	196.047	246.126
Lain-lain	1.445.667	481.692
	7.862.146	5.444.425
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26c)		
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	747.150	1.125.563
PT Pertamina (Persero)	691.526	-
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	491.271	2.150.192
PT Indonesia Asahan Aluminium	400.453	-
PT Pindad (Persero)	338.432	176.205
PT Pertamina Patra Niaga	331.450	108.422
PT KHI Pipe Industries	172.984	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	81.983	758.112
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	39.240	-
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	35.963	-
Perum BULOG	-	506.374
Lain-lain	292.801	1.243.721
	3.623.253	6.068.589
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi (Catatan 34)	66.073	61.008
Tantiem, bonus dan insentif Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan kunci (Catatan 34)	266.479	225.076

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Aset		
Giro pada Bank lain	0,018%	0,002%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	0,204	0,131
Efek-efek	3,789	3,430
Tagihan Wesel Ekspor	0,033	0,003
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	0,720	0,783
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	0,177	-
Kredit yang diberikan	10,933	10,387
Piutang dan pembiayaan Syariah	0,012	0,021
Tagihan akseptasi	0,229	0,124
Penyertaan saham	0,035	0,035
	16,150%	14,916%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan Entitas Anak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2013	2012
Liabilitas		
Giro	3,921%	3,747%
Tabungan	0,034	0,065
Deposito berjangka	10,730	8,986
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya	0,075	0,135
Liabilitas akseptasi	0,263	0,141
Pinjaman yang diterima	0,018	0,057
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci	0,070	0,102
	15,111%	13,233%

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, BRI (Entitas Induk) telah mengasuransikan aset tetap kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur (pihak berelasi) (Catatan 17).

44. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Jasa Komunikasi

Pada tanggal 16 Desember 2013, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sehubungan dengan pengadaan jasa layanan media komunikasi VSAT untuk 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lokasi ATM *offsite* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp45.500.

Pada tanggal 11 November 2013, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Prima Vista Solusi sehubungan dengan pengadaan 2.567 (dua ribu lima ratus enam puluh tujuh) unit EDC LAN untuk UKO, 4.788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) unit EDC GPRS untuk UKO dan 10.074 (sepuluh ribu tujuh puluh empat) unit EDC *Triple Connection* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp53.542.

Pada tanggal 8 November 2013, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Pasifik Satelit Nusantara sehubungan dengan pengadaan jasa layanan media komunikasi VSAT untuk 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lokasi ATM *offsite* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp45.500.

Pada tanggal 12 September 2013, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Tangara Mitrakom sehubungan dengan pengadaan jasa layanan media komunikasi VSAT untuk 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lokasi ATM *offsite* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp43.550.

Pada tanggal 5 September 2013, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan pengadaan jasa layanan media komunikasi VSAT untuk 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lokasi ATM *offsite* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp45.125.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian Jasa Komunikasi (lanjutan)

Pada tanggal 13 Agustus 2012, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan pengadaan jasa sewa media komunikasi VSAT pada 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) lokasi ATM *offsite* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp57.798.

Pada tanggal 19 Maret 2012, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sehubungan dengan pengadaan jasa sewa media komunikasi MPLS untuk 1.200 (seribu dua ratus) lokasi ATM *offsite* BRI VSAT untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp35.652.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan dimana BRI sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas BRI.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, BRI telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp328.630 dan Rp826.661 (Catatan 28). Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

45. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (SKB BI dan BPPN) No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin kewajiban tertentu dari seluruh bank umum yang berbadan hukum Indonesia. Berdasarkan perubahan terakhir yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus-menerus, kecuali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya, Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini, Pemerintah membebaskan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005 jenis kewajiban bank umum yang dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

Program penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang "Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" untuk periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan", dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar dari semula Rp100 juta, efektif sejak tanggal tersebut di atas.

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar 7,25% dan 5,5% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah, dan masing-masing sebesar 1,5% dan 1,0% untuk simpanan dalam mata uang asing.

46. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut ini ikhtisar PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk BRI dan Entitas Anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2013:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014:

- a. ISAK No. 28 "Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas", yang mengatur, ketika entitas sebagai debitur ingin menyelesaikan liabilitas keuangannya melalui mekanisme penerbitan instrumen ekuitas (debt for equity swaps).
- b. PSAK No. 102 (Revisi 2013), "*Murabahah*", yang merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 102 yang diterbitkan pada tahun 2008, perihal kriteria transaksi *murabahah* sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015:

- a. PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
- b. PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", yang diadopsi dari IAS 4, mengatur persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian diatur dalam PSAK No. 65.
- c. PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", yang diadopsi dari IAS 28, mengatur penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi.
- d. PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.
- e. PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasi", yang diadopsi dari IFRS 10, menggantikan porsi PSAK No. 4 (Revisi 2009) yang mengenai pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 (lanjutan):

- f. PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", yang diadopsi dari IFRS 11, menggantikan PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan ISAK No. 12. PSAK ini menghapus opsi metode konsolidasi proporsional untuk mencatat bagian ventura bersama.
- g. PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain", yang diadopsi dari IFRS 12, mencakup semua pengungkapan yang diatur sebelumnya dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009), PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan PSAK No. 15 (Revisi 2009). Pengungkapan ini terkait dengan kepentingan entitas dalam entitas-entitas lain.
- h. PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Saat ini BRI dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK dan ISAK yang dikeluarkan tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

47. INFORMASI TAMBAHAN

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

BRI secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat BRI dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (inherent risk) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

CAR adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), perhitungannya didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 dimana jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Selain itu bank dengan kriteria tertentu harus memasukkan risiko pasar dan risiko operasional dalam perhitungan CAR dengan memasukan komponen modal pelengkap tambahan.

Pada tanggal 31 Desember 2013, BRI telah menerapkan PBI No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan Peringkat Profil Risiko, yang merupakan perubahan dari PBI No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008. Peraturan tersebut efektif diterapkan pertama kali untuk pelaporan posisi bulan Maret 2013 dengan menggunakan profil risiko bulan Desember 2012. Berdasarkan profil risiko BRI per 30 Juni 2013, yaitu *satisfactory*, maka CAR minimum per 31 Desember 2013 ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Penentuan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktis akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Selama periode 2013 dan 2012, BRI telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan BI untuk rasio kecukupan modal.

CAR BRI (Entitas Induk) pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar 17,09% untuk CAR risiko kredit dan risiko operasional dan sebesar 16,99% untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 17,03% untuk CAR risiko kredit dan risiko operasional dan sebesar 16,95% untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang dihitung sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) (lanjutan)

	2013	2012
Modal		
Modal Inti *)	65.964.040	51.593.002
Modal Pelengkap **)	3.507.996	3.540.675
Total Modal untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional	69.472.036	55.133.677
ATMR untuk Risiko Kredit setelah memperhitungkan Risiko Spesifik ****)	331.161.598	259.490.149
ATMR untuk Risiko Operasional *****)	75.401.807	64.207.405
Total ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	406.563.405	323.697.554
ATMR untuk Risiko Pasar	2.294.988	1.654.474
Total ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	408.858.393	325.352.028
CAR untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional ****)	17,09%	17,03%
CAR untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional ***)	16,99%	16,95%
CAR Minimum	9,00%	8,00%

*) Disajikan dengan tidak memperhitungkan dampak aset pajak tangguhan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008.

**) Disajikan setelah dikurangi amortisasi atas obligasi subordinasi selama jangka waktu obligasi subordinasi tersebut sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 12/18/DPB1/TPB1-3 tanggal 11 Februari 2010.

***) Risiko kredit dihitung berdasarkan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011.

****) Risiko operasional dihitung berdasarkan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009.

b. Rasio Kredit *Non-Performing* (NPL)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, rasio NPL BRI termasuk piutang dan pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

(i) Konsolidasian

	2013	2012
Rasio NPL - kotor	1,63%	1,83%
Rasio NPL - neto	0,36	0,38

(ii) BRI (Entitas Induk)

	2013	2012
Rasio NPL - kotor	1,55%	1,78%
Rasio NPL - neto	0,31	0,34

Rasio NPL - neto dihitung berdasarkan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

c. Kegiatan Penitipan Harta dan Agen Penjual

BRI melakukan kegiatan jasa penitipan harta sejak tahun 1996 berdasarkan izin operasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. 91/PM/1996 tanggal 11 April 1996 dan telah ditunjuk sebagai *Sub Registry* dalam melaksanakan transaksi obligasi Pemerintah dan penatakerjaan SBI *Scriptless* oleh Bank Indonesia.

Jasa penitipan harta ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Treasury* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Jasa administrasi penyimpanan dan *Portfolio Valuation*;
- Jasa penyelesaian transaksi (*settlement/transaction handling*);
- Jasa penagihan penghasilan (*income collection*), termasuk pembayaran pajaknya;
- Jasa *corporate action* dan *proxy services*;
- Jasa informasi dan pelaporan (*reporting services*), termasuk informasi melalui *web*;
- Jasa *Custodian Unit Link*, DPLK, KIK EBA; dan
- Jasa *Brokerage On Line* saham BRI.

BRI memiliki 90 (sembilan puluh) dan 91 (sembilan puluh satu) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, terutama dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, reksadana dan perusahaan lainnya.

Jumlah pendapatan jasa penitipan harta adalah masing-masing sebesar Rp25.550 dan Rp18.015, (tidak diaudit) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, saat ini Kustodian BRI telah menyediakan sistem informasi yang dapat diakses melalui *Web* "Customer Information E-access", guna memudahkan nasabah mengetahui nilai portofolionya.

BRI bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dimana BRI sebagai Bank Kustodian sedang mengembangkan produk "Unit Link" yang akan dipasarkan melalui Kantor Cabang BRI yang ditunjuk sebagai agen penjual.

d. Kegiatan Wali Amanat

BRI melakukan kegiatan jasa wali amanat sejak tahun 1990. Izin operasi BRI sebagai wali amanat telah diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 dan telah terdaftar di Bapepam sesuai Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Jasa wali amanat ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Treasury* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Wali amanat
- Agen jaminan
- Agen pembayaran
- *Sinking fund agent*
- Agen penjual (*Selling Agent*) efek reksadana dan produk investasi

BRI memiliki 17 (tujuh belas) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Jumlah obligasi yang diwaliamanati oleh BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp47.006.889 dan Rp42.656.506 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

47. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

d. Kegiatan Wali Amanat (lanjutan)

Jumlah pendapatan dan komisi jasa wali amanat dan jasa lain yang terkait dengan wali amanat (agen pembayaran) (tidak diaudit) adalah sebesar Rp5.590 dan Rp5.142 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Menindaklanjuti Ketentuan Ketua Bapepam-LK No. Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang "Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana" maka fungsi jasa agen penjual yang sebelumnya dilaksanakan oleh kustodian beralih ke wali amanat.

Jumlah pendapatan agen penjual reksadana dan Obligasi Negara ritel (tidak diaudit) adalah sebesar Rp4.583 dan Rp2.957 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

48. LABA PER LEMBAR SAHAM

Berikut ini adalah rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba tahun berjalan Entitas Induk per lembar saham dasar:

	2013		
	Laba Tahun Berjalan Entitas Induk	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Entitas Induk Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan Entitas Induk per lembar saham dasar	21.344.130	24.669.162.000	865,22
	2012		
	Laba Tahun Berjalan Entitas Induk	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Entitas Induk Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan Entitas Induk per lembar saham dasar	18.680.884	24.669.162.000	757,26

49. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen BRI bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2014.



Melayani Dengan Setulus Hati

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI I

Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210,
Indonesia

Telepon: (62-21) 251 0244, 251 0254

Faks : (62-21) 250 0065, 250 0077

Website : www.bri.co.id

Sekretariat Perusahaan

Gedung BRI I Lt. 20

Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210,
Indonesia

Telepon: (62-21) 575 1966

Faks : (62-21) 570 0916